



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Jl. Jend. Sudirman
Telp : (0411) 374 374 Fax (0411)371 138
Website : www.maroskab.go.id



Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Maros
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten
Maros Tahun 2021-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif dan spasial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 65 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD. Selanjutnya Pasal 260 ayat (1) menyatakan daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) pada tahun 2020 telah menetapkan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maros periode 2021 – 2026, olehnya itu Pemerintah Kabupaten Maros perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021 – 2026, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan



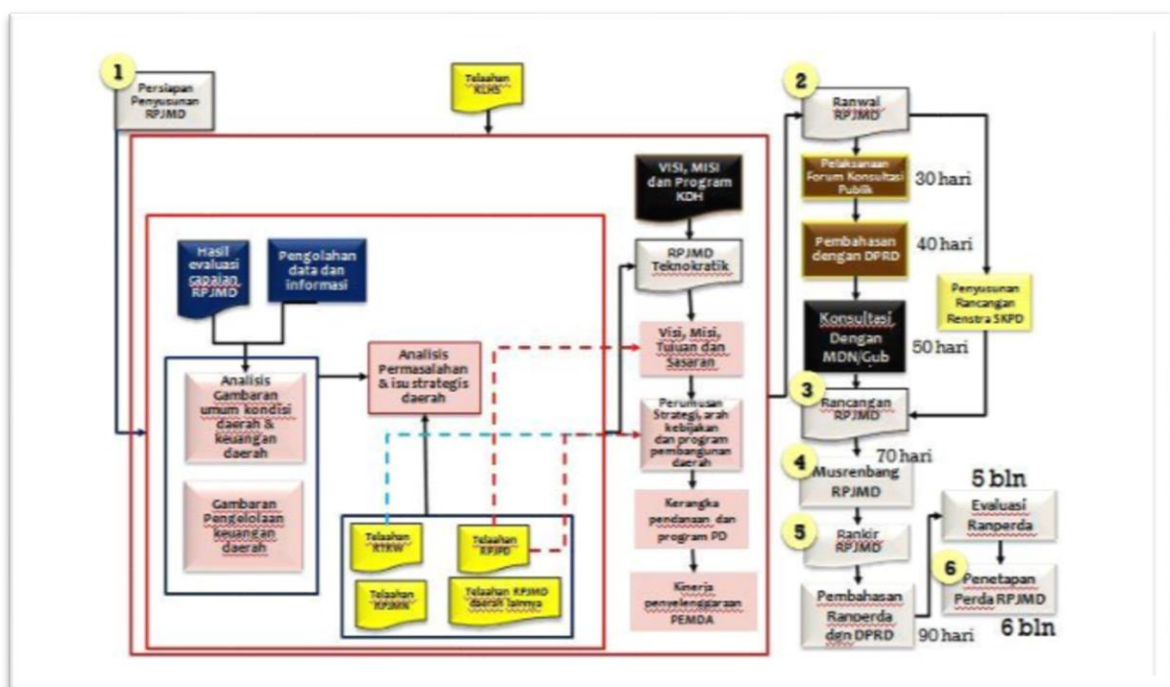
daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, RPJMD Provinsi dan RPJMN.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dengan dilantikannya H.A.S Chaidir Syam S.I.P., M.H sebagai Bupati Maros dan Hj. Suhartina Bohari, SE sebagai Wakil Bupati Maros pada tanggal 26 Februari 2021 dengan mengusung tagline **“MAROS KEREN (KREATIF, ENERGIK, RELIGIUS, EMPATI DAN NYATA)**, maka Pemerintah Kabupaten Maros menyusun RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021–2026, yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahun, yang proses penyusunannya melibatkan stakeholders serta para pemangku kepentingan dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Maros.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021–2026 disusun dengan menggunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, *bottom-up* dan *top down*.

Untuk memenuhi kaidah-kaidah dan komponen perencanaan, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021–2026 melalui 6 tahapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tahapan penyusunan sebagai berikut: 1) Persiapan Penyusunan RPJMD; 2) Penyusunan Rancangan Awal RPJMD; 3) Penyusunan Rancangan RPJMD; 4) Pelaksanaan Musrenbang RPJMD; 5) Perumusan Rancangan Akhir RPJMD, 6) Penetapan RPJMD.

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026





RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021 - 2026 merupakan tahap keempat periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maros Tahun 2005 – 2025, yang menjabarkan beberapa arah pembangunan yang memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Dokumen RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 selanjutnya akan menjadi pedoman perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD ini selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen rencana tahunan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021 – 2026 dilandasi pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68);



9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 25. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 26. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 27. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);



40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
42. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
44. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 252);
45. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
47. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2008 Nomor 07);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 4);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2);



1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Maros berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Maros Tahun 2012-2032. Selain itu dalam penyusunannya memperhatikan pula dokumen RPJPN Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024 dan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Selanjutnya untuk menjamin implementasi RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021—2026 akan sejalan dengan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan kapasitas daya dukung dan daya tampung, maka penyusunan RPJMD memperhatikan data dan informasi serta mengadopsi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Kabupaten Maros.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros merupakan tahap keempat pencapaian visi misi pembangunan daerah. RPJMD kemudian dijabarkan lagi kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk satu tahun.

Undang-Undang 23 tahun 2014 menyatakan bahwa RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dokumen RKPD yang disusun setiap tahun sebagai penjabaran RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya KUA-PPAS menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun berkenaan.

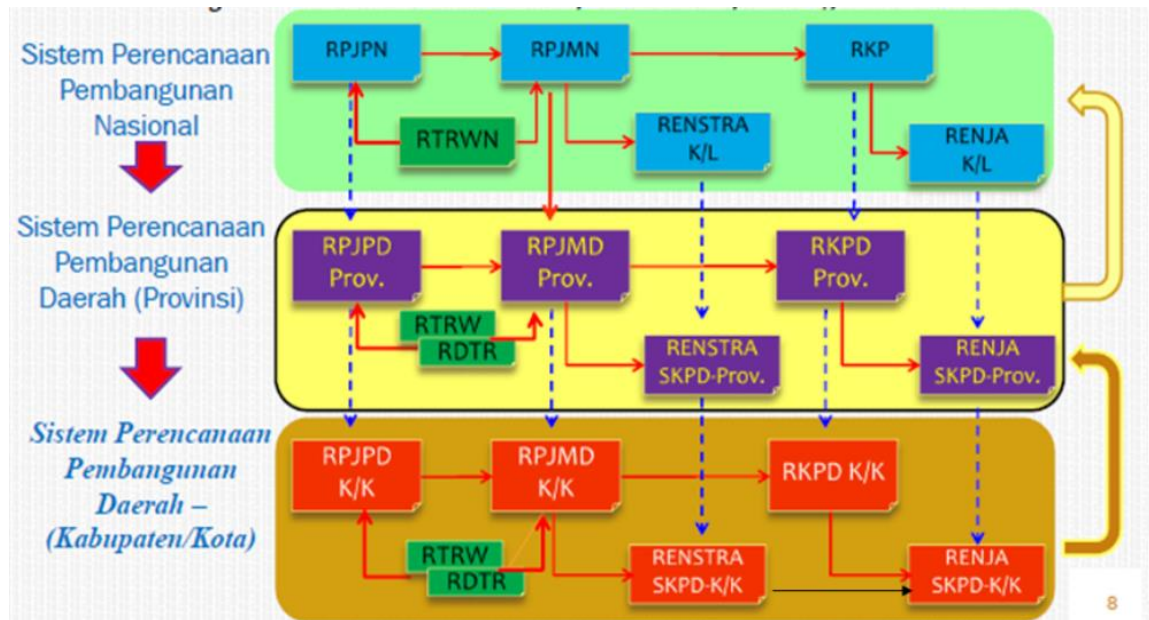
RPJMD Kabupaten Maros tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang memuat sasaran dan strategi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun pemerintahan. Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah daerah diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjadi acuan bagi perangkat daerah untuk mendukung pencapaian program prioritas kepala daerah yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) yang memuat tujuan dan sasaran, strategis dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan melaksanakan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021 – 2026,



selanjutnya sebagai dokumen rencana strategis perangkat daerah 5 (lima) tahunan menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai penjabaran rencana kerja tahunan bagi perangkat daerah. Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar 1.2

Keterkaitan Antar Dokumen Peencanaan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan



Penyusunan dokumen perencanaan sesuai bagan alur diatas menunjukkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian program dan kegiatan prioritas kepala daerah. RPJMD kemudian dijabarkan kedalam dokumen RKP yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahun yang juga memuat kebijakan baru terkait dinamika pembangunan khususnya kebijakan pemerintah pusat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun berkenaan. Selanjutnya RKP menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan berpedoman pada Renstra PD.

1.4 Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021- 2026 disusun untuk menerjemahkan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati sebagai bentuk respon terhadap janji politik dan aspirasi



masyarakat melalui pokok-pokok pikiran DPRD yang diwujudkan melalui penetapan program serta kegiatan dan isu kegiatan prioritas daerah.

RPJMD menjadi tolok ukur pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui RENSTRA PD. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati diukur dari pencapaian target RPJMD. Seluruh program prioritas selama lima tahun yang ditetapkan dalam RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RENSTRA PD.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi, dan misi Bupati Maros periode masa pemerintahan tahun 2021 – 2026 kedalam tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan pembangunan daerah serta program prioritas pembangunan daerah;
2. Sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis lima tahunan berupa program dan kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas RPJMD serta kinerja pelayanan daerah sesuai tugas pokok dan fungsi yang termuat dalam dokumen RENSTRA PD.
3. Tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Maros.
4. Menjadi instrumen bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan pemerintah daerah dalam mendukung aspirasi masyarakat serta pencapaian target kinerja program prioritas pembangunan daerah.
5. Merupakan instrumen dalam menetapkan target kinerja sasaran dan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian prioritas daerah dan prioritas nasional.
6. Sebagai pedoman bagi stakeholders khususnya dalam pencapaian target kinerja program prioritas serta dukungan pendanaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan Dokumen RPJMD Kabupaten Maros

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RPJMD yang berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan RPJMD, hubungan RPJMD dengan dokumen



perencanaan lainnya, maksud dan tujuan penyusunan RPJMD serta sistematika penulisan RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menjeaskan dan menyajikan serta logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan aspek-aspek tersebut. Gambaran kondisi umum daerah dijabarkan berdasarkan hasil analisis dan kajian pada tahap perumusan berupa informasi yang relevan dan penting yang menjelaskan gambaran umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi dan misi kepala daerah dan kebutuhan perumusan strategis.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah, meliputi kinerja keuangan, kebijakan pengelolaan keuangan, dan kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Menguraikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang menjadi dasar utama dalam penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah, yang menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan Kabupaten Maros dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Menguraikan tentang visi dan misi kepala daerah terpilih, serta perumusan tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategis terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sedangkan program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategis yang dipilih.



BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam RENSTRA perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menguraikan penetapan indikator kinerja daerah untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir jabatan.

BAB IX PENUTUP

Menguraikan pedoman transisi yang disusun untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dengan memasukkan program-program yang diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum dicapai selama periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 Kabupaten Maros Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros; Kabupaten Maros secara geografis terletak di bagian barat Provinsi Sulawesi Selatan sekitar 30 km arah utara Kota Makassar. Kabupaten Maros berada pada posisi 40°45' hingga 50°07' Lintang Selatan, dan 109°20' hingga 129°12' Bujur Timur. Luas Kabupaten Maros adalah 1.619,12 km² atau 3,53 persen dari luas Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Letak Kabupaten Maros yang sangat dekat dengan Kota Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan jika ditinjau dari segi geografis sangat strategis. Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten penyangga Kota Makassar, sehingga kegiatan perekonomian akan banyak berjalan di Kabupaten Maros. Hal ini juga ditopang dengan letak Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang berada didalam wilayah Kabupaten Maros.

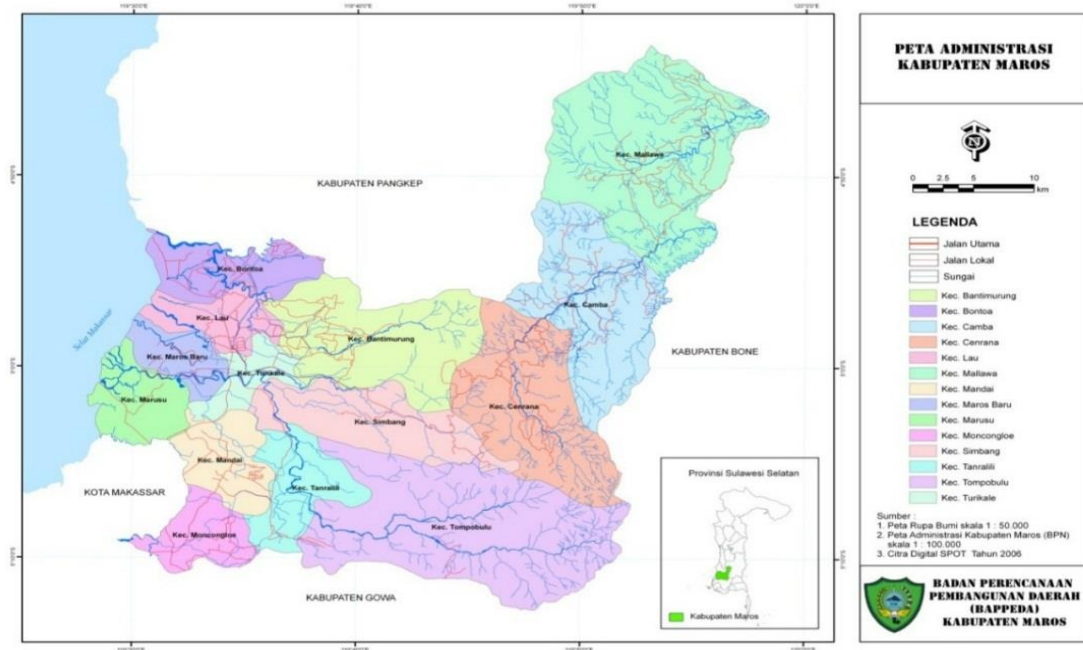
Kabupaten Maros secara geografis terdiri dari 10 desa (10%) adalah kawasan pantai, 5 desa (5%) adalah kawasan lembah, 28 desa (27%) kawasan lereng/bukit dan 60 desa/kelurahan (58%), yang terdiri dari 37 desa dan 23 kelurahan adalah kawasan dataran. Kawasan Kabupaten Maros memiliki panjang pantai sejauh 31 km dengan batasan luas 4 mil dari bibir pantai. Karakteristik pantai di Kabupaten Maros adalah pantai yang landai dan sebagian berpasir putih. Wilayah kecamatan yang termasuk daerah pesisir adalah Kecamatan Marusu, Lau, Maros Baru dan Bontoa.

Kabupaten Maros merupakan bagian administrasi dari Provinsi Sulawesi Selatan yang tergabung dalam 24 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Kabupaten Maros berada pada peringkat ke 10 yang terluas dari seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Batas-batas wilayah Kabupaten Maros :

- Sebelah utara adalah Kabupaten Pangkep;
- Sebelah selatan adalah Kota Makassar;
- Sebelah timur adalah Kabupaten Bone, dan
- Sebelah barat adalah Selat Makassar.



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Maros



Sumber: Bappeda Kab. Maros, 2021

Salah satu ekosistem karst di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat di Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep yang dikenal dengan nama kawasan karst Maros Pangkep. Kawasan karst Maros Pangkep secara astronomis berada antara $S4^{\circ} 42' 49''$ – $5^{\circ} 06' 42''$ dan $E119^{\circ} 34' 17''$ – $119^{\circ} 55' 13''$. Secara areal geologi, kawasan ini termasuk dalam areal geologi regional Maros, Pangkep, dan Watampone yang secara umum terbagi atas dua baris pegunungan yang memanjang dengan arah utara-barat laut yang terpisahkan oleh lembah Sungai WalannaE.

Kawasan karst Maros Pangkep sebagai warisan geologi mempunyai luas 43.750 ha, dan sebanyak ± 19.337 ha diantaranya termasuk dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Hal ini yang kemudian menjadikan kawasan karst Maros Pangkep sebagai kawasan karst terbesar kedua di dunia. Kawasan karst Maros-Pangkep mempunyai keunikan berupa bukit-bukit menara tinggi yang berjajar yang biasa disebut dengan tower karst, dengan hamparan tebing yang luas, dimana tidak dijumpai di daerah lain di Indonesia. Karst Maros Pangkep memiliki potensi yang luar biasa bagi penunjang kehidupan manusia, berdasarkan sifat fisiknya, kawasan karst memiliki fungsi utama sebagai akuifer air yang memenuhi air baku bagi ratusan ribu masyarakat yang hidup di dalamnya, kawasan ini juga berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ekosistem regional. Adanya keragaman potensi di kawasan inilah yang kemudian mendorong pemerintah untuk menjadikannya sebagai Geopark Nasional, dan berkat kerjasama semua pihak pada 20 November 2017 secara resmi Kawasan Karst Maros Paengkep telah ditetapkan sebagai Geopark Nasional.

**2.1.1.1 Kondisi Topografi**

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, kondisi topografi Kabupaten Maros terdiri dari 10% (10 desa) adalah pantai, 5% (5 desa) adalah kawasan lembah, 27% (28 desa) adalah lereng/bukit dan 58% (60 desa) adalah dataran. Tinggi wilayah setiap kecamatan bervariasi di antara 0-1000 mdpl di atas permukaan laut. Ibukota Kabupaten Maros, yaitu Kecamatan Turikale berada pada ketinggian 0-300 mdpl. Luas areal per kecamatan berdasarkan ketinggian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kecamatan di Kabupaten Maros

No	Kecamatan	Keterangan					Luas (Ha)
		0-300 Mdpl	1000-1500 Mdpl	1500> Mdpl	300-500 Mdpl	500-1000 Mdpl	
1	Bantimurung	7572,28	449,30	2,13	4785,70	2505,62	15.315,03
2	Bontoa	6010,20	--	--	386,52	0,03	6.396,76
3	Camba	--	6046,86	595,45	2385,99	5544,59	14.572,89
4	Cenrana	--	5407,05	1671,38	2583,02	9154,65	18.816,09
5	Lau	4146,41	--	--	--	--	4.146,41
6	Mallawa	53,61	4626,89	3268,62	7408,01	7164,99	22.522,12
7	Mandai	3934,20	--	--	1,13	--	3.935,33
8	Maros Baru	4261,06	--	--	--	--	4.261,06
9	Marusu	4376,97	--	--	--	--	4.376,97
10	Moncong Loe	3807,02	--	--	94,44	--	3.901,46
11	Simbang	6081,35	--	--	2994,04	0,57	9.075,95
12	Tanralili	7697,77	--	--	597,47	--	8.295,25
13	Tompobulu	6350,45	3552,31	1642,55	9183,90	5222,86	25.952,07
14	Turikale	2450,21	--	--	--	--	2.450,21
Total		56.741,52	20.082,41	7.180,13	30.420,22	29.593,31	14.4017,59

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021

Wilayah Kabupaten Maros berada pada kondisi topografi dengan kelas kemiringan lereng mulai dari datar, berbukit, sampai bergunung. Kelas kemiringan lereng 0 - 8% (datar) merupakan kondisi topografi dengan luas 48.207,72 ha, kemiringan lereng 8-15% dengan luas 24.046,23 ha, kemiringan lereng 15 – 25% (berbukit) dengan luas areal 35.361,65 ha, kemudian kelas kemiringan lereng 25 – 45% (bergunung), dengan luas areal 24.612,94 ha, dan kemiringan lereng >45% dengan total luas 11.646,94 ha. Luas areal per kecamatan berdasarkan kondisi topografinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Luas Areal (Ha) Berdasarkan Kemiringan Lereng per Kecamatan

No	Kecamatan	Kelerengan					Jumlah
		0-8%	8-15%	15-25%	25-45%	45>%	
1	Bantimurung	4.655.18	2.930.91	4.421.14	2.532.89	756.75	15.296.86
2	Bontoa	5.165.24	489.20	325.01	348.03	59.27	6.386.75
3	Camba	781.74	2.141.28	4.744.08	4.138.27	2759.35	14.564.71
4	Cenrana	1.082.11	3.361.14	7.153.82	5.489.67	1715.43	18.802.17
5	Lau	4.120.83	18.89	--	--	--	4.139.73

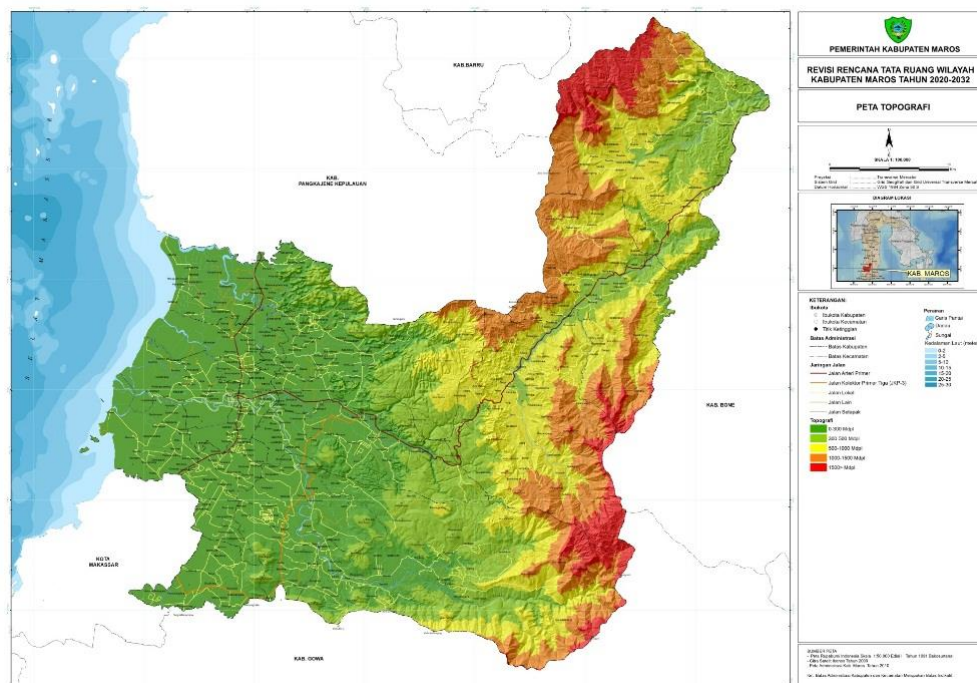


No	Kecamatan	Kelerengan					Jumlah
		0-8%	8-15%	15-25%	25-45%	45>%	
6	Mallawa	1.491.57	5.362.59	7.784.68	4.902.53	2971.20	22.512.57
7	Mandai	3.785.00	51.24	92.75	0.03	--	3.929.02
8	Maros Baru	4.254.43	--	--	--	--	4.254.43
9	Marusu	4.370.76	--	--	--	--	4.370.76
10	Moncong Loe	3.456.26	194.67	114.96	129.27	--	3.895.16
11	Simbang	3.835.68	2.351.96	2.447.46	429.94	--	9.065.04
12	Tanralili	5.613.27	1.365.45	1.103.93	201.00	--	8.283.65
13	Tompobulu	3.149.25	5.778.91	7.173.83	6.441.31	33-84.93	25.928.22
14	Turikale	2.446.41	--	--	--	--	2.446.41
Jumlah		48.207.72	24.046.23	35.361.65	24.612.94	11.646.94	14.3875.49

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021

Dari sisi topografi, Kecamatan Bantimuring merupakan kecamatan bertopografi agak datar (lereng 0 – 8%) terluas, yakni sekitar 7.829 Ha, diikuti oleh Kecamatan Bontoa sekitar 4.901 Ha, Kecamatan Tanralili dan Simbang dengan luas areal masing-masing sekitar 4.736 Ha dan 4.712 Ha. Kemiringan lereng 8 – 15% tersebar di Kecamatan Mallawa, Bantimuring, dan Tompobulu, dengan luas areal masing-masing 1.134 Ha, 932 Ha dan 780 Ha. Seperti halnya dengan iklim, kemiringan lereng adalah salah satu indikator biofisik penting dalam penentuan potensi lahan suatu wilayah. Wilayah didominasi lereng yang terjal (lebih besar dari 40%), umumnya memiliki potensi yang kecil untuk pengembangan pertanian. Karena itu, data pada tabel diatas bisa menjadi indikator umum dari potensi sumberdaya lahan setiap kecamatan di Maros.

Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Maros



Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021



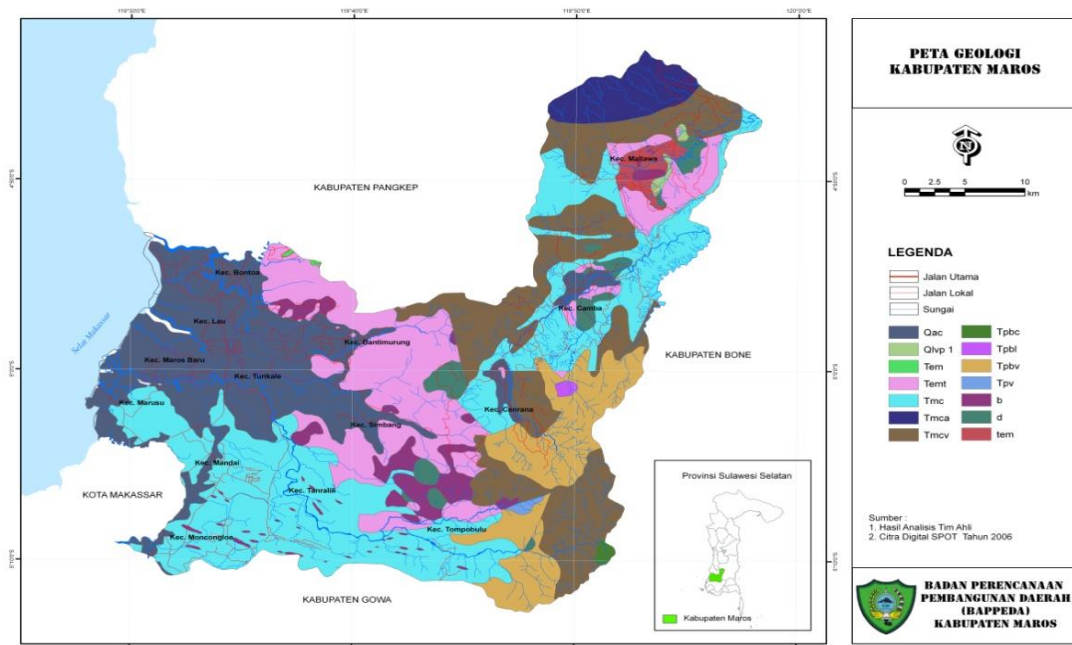
2.1.1.2 Kondisi Geologi dan Hidrologi

Klasifikasi batuan di wilayah Kabupaten Maros terbagi dalam empat kelompok besar, yaitu (1) batuan permukaan dengan luas keseluruhan 55.359 Ha yang terdapat hampir di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Mallawa; (2) batuan sedimen dengan luas 66.195 Ha yang penyebarannya juga hampir terdapat di seluruh kecamatan, kecuali di Kecamatan Bontoa; (3) batuan gunung api yang tersebar di Kecamatan Tanralili, Camba, Mallawa dan Bantimurung dengan luas 32.008 Ha; dan (4) batuan terobosan dengan luas 8.312 Ha yang terdapat hampir di seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Maros Baru dan Bontoa.

Kabupaten Maros terbagi dalam empat satuan geomorfologi sebagai berikut :

- Satuan pegunungan Vulkanik: menempati bagian utara, tengah dan timur puncak tertinggi Bulu Lekke (1.361 mdpl) dengan luas 30% dari luas wilayah Kabupaten Maros.
- Satuan perbukitan vulkanik, intrusi dan sedimen: menempati daerah perbukitan yang menyebar secara setempat-setempat sekitar 15% dari luas Kabupaten Maros.
- Satuan perbukitan Karst: satuan perbukitan ini tersebar cukup luas pada bagian tengah dan timur laut daerah Kabupaten Maros.
- Satuan Pedataran Alluvium: terletak dibagian barat yang tersebar dengan arah utara-selatan, menempati sekitar 25% dari luas wilayah Kabupaten Maros.

Gambar 2.3 Peta Geologi Kabupaten Maros



Sumber : Bappeda Kab. Maros, 2021



Ada 2 (dua) jenis kategori hidrologi yang melingkupi wilayah Kabupaten Maros, yaitu jenis air permukaan dan jenis air tanah (dangkal dan dalam). Kedua jenis air tersebut berasal dari air hujan yang sebagian mengalir di permukaan (*run-off*) dan sebagian lagi meresap kedalam tanah.

Sungai-sungai yang terletak di Kabupaten Maros cukup berpotensi untuk mengairi tanah-tanah pertanian disekitarnya. Sungai-sungai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Daerah Aliran Sungai Kabupaten Maros

No	Kecamatan	Keterangan	Luas (Ha)
1	Bantimurung	S. Maros	4.231,77
		S. Manraleng	74,39
		Salo Kalibone	10.990,70
2	Bontoa	Salo Kalibone	6.386,75
3	Camba	S. Manraleng	14.550,40
		S. Walanae	14,31
4	Cenrana	S. Maros	4.160,88
		S. Manraleng	14.522,96
		Salo Kalibone	118,33
5	Lau	S. Maros	0,04
		Salo Kalibone	2.464,76
		Salo Soreang	1.674,92
6	Mallawa	S. Manraleng	4.241,00
		S. Pangkajene	3,32
		S. Walanae	18.268,25
7	Mandai	S. Maros	3.404,21
		S. Tallo	524,82
8	Maros Baru	S. Maros	3.013,11
		Salo Soreang	1.241,32
9	Marusu	S. Maros	4.329,54
		Pulau	41,22
10	Moncong Loe	Maros	3,68
		S. Tallo	3.891,48
11	Simbang	S. Maros	9.065,04
12	Tanralili	S. Maros	7.975,30
		S. Tallo	308,35
13	Tompobulu	Jene Berang	47,16
		S. Maros	25.709,35
		S. Manraleng	22,63
		S. Tallo	149,09
14	Turikale	S. Maros	1.950,82
		Salo Kalibone	467,48
		Salo Soreang	28,11
Total			143.875,49

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021

Sungai-sungai yang berada di Kabupaten Maros merupakan bagian dari dua wilayah sungai besar yaitu Wilayah Sungai Jeneberang dan Wilayah Sungai Walanae-



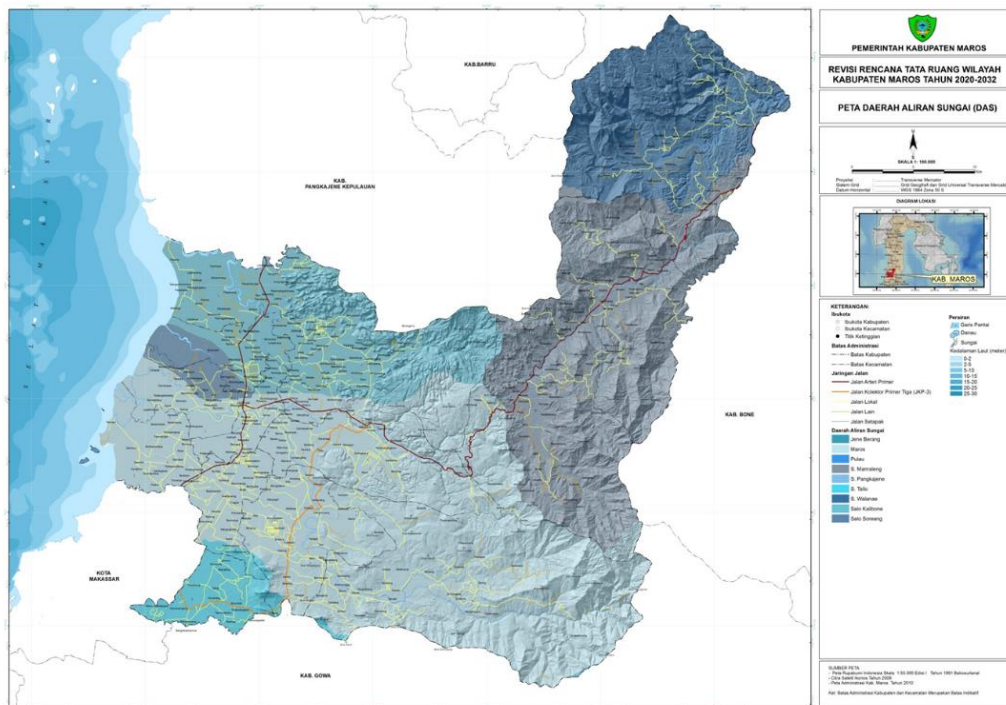
Cenranae. Berikut ini luas wilayah sungai dan satuan wilayah sungai per kecamatan Kabupaten Maros.

Tabel 2.4
Wilayah Sungai Berdasarkan Satuan Wilayah Sungai (SWS) dan Luas per Kecamatan Kabupaten Maros

No	Kecamatan	Keterangan	SWS Tidak Kritis	SWS Kritis	Luas (Ha)
1	Bantimurung	WS Jeneberang	15.222,48	15.222,48	15.222,48
	Bontoa		--	6.386,75	6.386,75
	Cenrana		--	4.279,21	4.279,21
	Lau		1.674,92	2.464,80	4.139,73
	Mallawa		3,32	--	3,32
	Mandai		--	3.929,02	3.929,02
	Maros Baru		1.241,32	3.013,11	4.254,43
	Marusu		--	4.329,54	4.329,54
	Moncong Loe		--	3.895,16	3.895,16
	Simbang		--	9.065,04	9.065,04
	Tanralili		--	8.283,65	8.283,65
	Tompobulu		--	25.905,59	25.905,59
	Turikale		28,11	2.418,30	2.446,41
2	Bantimurung	WS Walanae Cendranae	--	74,39	74,39
	Camba		--	14.564,71	14.564,71
	Cenrana		--	14.522,96	14.522,96
	Mallawa		--	22.509,25	22.509,25
	Tompobulu		--	22,63	22,63
Total			18.170,15	14.0886,59	143.834,26

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021

Gambar 2.4 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Maros



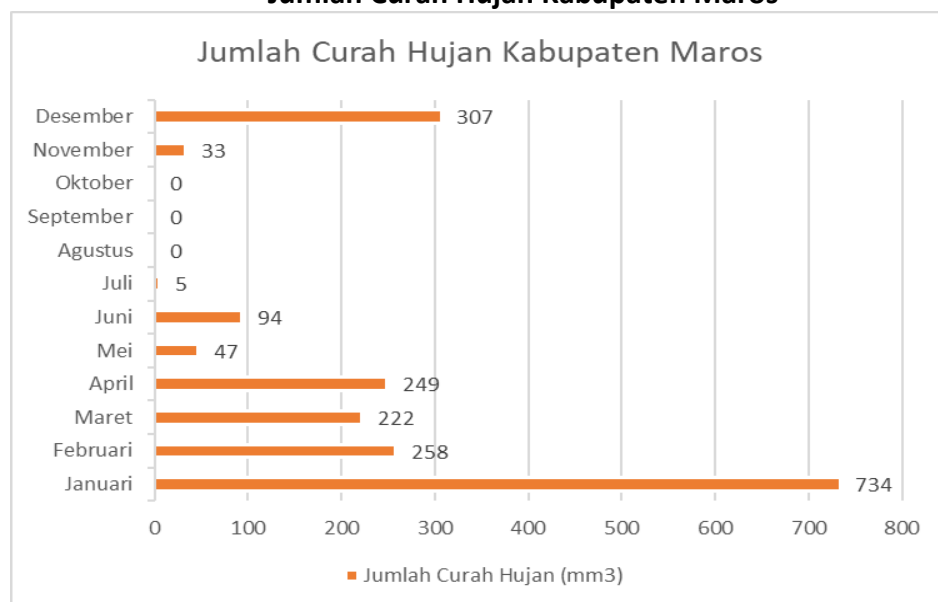
Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021



2.1.1.3 Kondisi Klimatologi

Kabupaten Maros termasuk daerah yang beriklim tropis basah dengan curah hujan rata-rata 162,5 mm³ setiap bulan. Curah hujan tertinggi sekitar bulan Januari dan Desember. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari dengan jumlah curah hujan sebesar 735 mm³, kemudian jumlah hujan terendah terjadi pada bulan Mei dengan jumlah curah hujan 47 mm³.

Grafik 2.1
Jumlah Curah Hujan Kabupaten Maros



Sumber : BMKG Kab. Maros, 2021

2.1.1.4 Penggunaan Lahan

Berdasarkan penggunaannya lahan dibedakan menjadi lahan sawah, lahan pertanian bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Lahan pertanian sawah adalah lahan pertanian yang berpetak dan dibatasi oleh pematang, saluran untuk menahan/menyalurkan air. Lahan sawah terdiri dari sawah irigasi, sawah tadah hujan, sawah rawa pasang surut dan sawah rawa lebak. Sedangkan yang dimaksud dengan lahan pertanian bukan sawah adalah lahan pertanian yang terdiri dari tegal/kebun, ladang/huma, perkebunan, lahan yang ditanami pohon/hutan rakyat, padang penggembalaan, dan lahan yang sementara tidak diusahakan, serta lahan sekitar rumah (pekarangan) yang diusahakan untuk pertanian. Yang termasuk lahan bukan pertanian adalah pemukiman, kantor, industri dan pertokoan.

Luas lahan yang digunakan sebagai lahan pertanian di Kabupaten Maros sebesar 134.690 Ha atau sekitar 83% dari luas wilayah Kabupaten Maros. Lahan



pertanian bukan sawah menjadi lahan terluas, yaitu sekitar 67%, lahan sawah sekitar 16%, sedangkan lahan bukan pertanian sekitar 17% dengan luas 27.222 ha.

Tabel 2.5
Luas Lahan (Ha) dan Jenis Penggunaannya Per Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Kecamatan	Pengunaan Lahan			Total Luas Lahan (Ha)
		Sawah (Ha)	Pertanian Bukan Sawah (Ha)	Bukan Pertanian (Ha)	
1	Mandai	1.440	1.259	2.212	4.911
2	Moncongloe	1.139	1.244	2.304	4.687
3	Maros Baru	1.101	1.888	2.387	5.376
4	Marusu	1.190	4.816	1.377	7.383
5	Turikale	975	191	1.827	2.993
6	Lau	2.259	2.003	1.111	5.373
7	Bontoa	1.935	6.302	1.115	9.352
8	Bantimurung	3.964	12.464	942	17.370
9	Slimbang	2.034	5.372	3.125	10.531
10	Tanralili	1.292	2.062	4.692	8.945
11	Tompobulu	1.066	23.883	2.817	28.766
12	Camba	1.937	11.476	1.123	14.536
13	Cenrana	2.001	14.449	1.647	18.097
14	Mallawa	1.770	21.279	543	23.592
Jumlah		26.002	108.668	27.222	161.912

Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kawasan strategis di Kabupaten Maros merupakan bagian wilayah Kabupaten Maros yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten dibidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Maros terdiri atas; Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP), dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).

2.1.2.1 Kawasan Strategis Nasional (KSN)

Kawasan Strategis Nasional yang ada di Kabupaten Maros adalah Kawasan Perkotaan Mamminasata yang merupakan Kawasan Strategis Nasional dengan sudut kepentingan ekonomi. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menetapkan kawasan Perkotaan Metropolitan Mamminasata sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dalam hal ini wilayah-wilayah Kabupaten Maros yang termasuk dalam kawasan Metropolitan Mamminasata merupakan pusat perkotaan yang memiliki kepentingan dalam skala nasional.



2.1.2.2 Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kabupaten Maros sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 09 Tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan bahwa :

a. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi :

- Kawasan lahan pangan berkelanjutan khususnya komoditas beras dan jagung diarahkan sebagian wilayah Kecamatan Camba, sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Lau, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Mandai, sebagian wilayah Kecamatan Turikale, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe, dan sebagian wilayah Kecamatan Marusu.
- Kawasan pengembangan budidaya alternatif komoditi perkebunan unggulan kakao, kelapa sawit, kopi Robusta, jambu mente dan jarak diarahkan sebagian wilayah Kecamatan Camba, sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Lau, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Mandai, sebagian wilayah Kecamatan Turikale, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe, dan sebagian wilayah Kecamatan Marusu.
- Kawasan Industri Manufaktur diarahkan di kawasan Industri Maros di Kecamatan Marusu; dan Kawasan industri Semen Bosowa terdapat di Kecamatan Bantimurung.

b. KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdiri atas :

- Kawasan wisata bahari diarahkan di sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Marusu, dan sebagian wilayah Kecamatan Bontoa;
- Kawasan Hutan Lindung diarahkan sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian



wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu;

- Kawasan penambangan kapur diarahkan di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, dan sebagian wilayah Kecamatan Cenrana;
- Kawasan penambangan marmer diarahkan di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, dan sebagian wilayah Kecamatan Simbang;
- Kawasan Taman Nasional Bantimurung – Bulusaraung diarahkan sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, dan sebagian wilayah Kecamatan Cenrana; dan
- Kawasan Kebun Raya Pucak diarahkan di sebagian wilayah Kecamatan Tanralili.

2.1.2.3 Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) di Kabupaten Maros, terdiri atas:

a. KSK Dengan Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan kriteria kawasan strategis dan potensi wilayah, maka rencana kawasan strategis kabupaten yang layak ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Maros diarahkan pada :

- Kawasan Perkotaan Barandasi Kecamatan Lau;
- Kawasan Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Mandai Kecamatan Kabupaten Maros;
- Kawasan potensi pengembangan ekonomi di wilayah pesisir Kecamatan Marusu, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau dan Kecamatan Bontoa;
- Kawasan Minapolitan di Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau, Kecamatan Marusu dan Kecamatan Maros Baru;
- Kawasan agrowisata yang terpadu dengan Agropolitan Tanralili;
- Kawasan wisata pasir putih Pantai Kuri Kecamatan Marusu;
- Kawasan Perdagangan Pasar Tradisional Modern Kota Maros di Kecamatan Turikale;
- Kawasan Perdagangan Pasar Induk Pertanian Kabupaten Maros di Kecamatan Turikale;
- Kawasan Kota Baru Moncongloe di Kecamatan Moncongloe;
- Kawasan perkotaan Baru Satelit Mandai di Kecamatan Mandai; dan
- Kawasan perkotaan Baru Satelit Maros di Kecamatan Turikale.

b. KSK Dengan Sudut Kepentingan Sosial Budaya



Kawasan strategis untuk pengembangan kepentingan sosial budaya di Kabupaten Maros meliputi;

- Kawasan pendopo Pallantikang Karaeng Marusu di Kelurahan Pallantikang Kecamatan Maros Baru;
- Kawasan rumah adat Karaeng Loe Ripakere (istana raja Marusu) di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang; dan
- Kawasan budaya Khawaltiah Saming di Patte'ne Desa Temmappadaue Kecamatan Marusu, Leppangkoma Desa Borimasunggu Kecamatan Maros Baru, dan Kelurahan Turikale Kecamatan Turikale.

c. KSK Dengan Sudut Kepentingan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tinggi

Untuk kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi di Kabupaten Maros, terdiri atas :

- Rencana pembangunan Kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Tompobulu;
- Rencana pembangunan kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTHM) di Mallawa;
- Rencana pembangunan kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kecamatan Bontoa;
- Kawasan Pabrik Semen Bosowa di Kecamatan Bantimurung; dan
- Kawasan penambangan marmer di Kecamatan Bantimurung dan Kecamatan Simbang.

d. KSK Dengan Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kawasan strategis untuk kepentingan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Maros meliputi :

- Kawasan wisata alam dan Agrowisata Bantimurung Kecamatan Bantimurung;
- Kawasan wisata Cagar Alam Karaenta yang terpadu dengan Goa Salukang Kallang Kecamatan Cenrana; dan
- Kawasan wisata alam air panas di Dusun Reatoa Kecamatan Mallawa.
- KSK Dengan Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan

e. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, terdiri atas:

- Kawasan Lapangan Udara (LANUD) Hasanuddin di Kecamatan Mandai;
- Kawasan KOSTRAD Batalyon Infantri L-433 Julu Siri di Sambueja Kecamatan Simbang; dan



- Kawasan KOSTRAD Kompi Zeni dan Tempur A, B, dan C dan Batalyon Zeni dan Tempur 8 Sakti Mandraguna di Kariango Kecamatan Tanralili.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana adalah wilayah yang memiliki potensi terjadi bencana yang cukup tinggi, baik itu bencana banjir, longsor, puting beliung dan lain sebagainya. Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Maros termasuk dalam wilayah rawan bencana, hal ini disebabkan karena kondisi geografis dan topografi Kabupaten Maros yang berada di wilayah pegunungan dan pesisir.

Potensi bencana di Kabupaten Maros diketahui dari catatan sejarah kejadian bencana dan kemungkinan bencana terjadi berdasarkan pengkajian resiko bencana yang dilakukan di Kabupaten Maros. Berdasarkan pengkajian resiko bencana maka Kabupaten Maros memiliki 9 (Sembilan) jenis bencana yang rawan terjadi, yaitu; bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, tsunami.

Banjir merupakan peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat (BNPB). Wilayah dengan potensi rawan bencana banjir di Kabupaten Maros berada di 10 (sepuluh) kecamatan. Kelas sangat rawan tersebar di wilayah hilir sampai tengah DAS meliputi; Kecamatan Maros Baru bagian selatan, Marusu bagian utara, Turikale, Mandai bagian utara, Tanralili bagian utara, Bantimurung bagian selatan, Simbang bagian barat. Sebagian besar daerah yang datar dan landau rawan banjir di wilayah DAS Maros.

Total luas wilayah yang terdampak bencana banjir di Kabupaten Maros adalah 47.431,57 Ha, dengan kelas kerawanan TINGGI. Beberapa faktor penyebab banjir di Kabupaten Maros diantaranya : curah hujan cukup tinggi, topografi datar dan landau, jenis tanah Alluvial dan Litosol, penggunaan lahan dominan tambak dan sawah. Di samping itu faktor manusia yang kurang menyadari dalam hal pengelolaan sampah, karena sampah dibuang di kanal dan sungai supaya ikut aliran sungai sehingga drainase kurang lancar. Sebaran wilayah rawan bencana banjir serta kelas kerawanan bencana di Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.6
Wilayah Rawan Bencana Banjir dan Kelas Kerawanan Bencana

No	Kecamatan	Luas Terdampak (Ha)	Kelas Kerawanan
1	Bantimurung	4.207,20	Tinggi
2	Bontoa	8.341,40	Tinggi
3	Lau	5.361,24	Sedang
4	Mandai	4.294,45	Tinggi
5	Maros Baru	5.354,25	Tinggi
6	Marusu	7.723,42	Tinggi
7	Moncongloe	3.208,99	Tinggi
8	Simbang	3.379,38	Tinggi
9	Tanralili	2.568,09	Tinggi
10	Turikale	2.993,12	Tinggi
Jumlah		47.431,54	Tinggi

Sumber : BNPB, 2021

Banjir bandang merupakan banjir yang datang tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada luar sungai (BNPB). Wilayah dengan potensi rawan bencana banjir bandang di Kabupaten Maros berada di 8 (delapan) kecamatan. Total luas wilayah yang terdampak bencana banjir adalah 2.860,04 ha, dengan kelas kerawanan TINGGI, dengan melihat kelas bahaya maksimum di setiap kecamatan. Sebaran wilayah rawan bencana banjir bandang serta kelas kerawanan bencana di Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Wilayah Rawan Bencana Banjir Bandang dan Kelas Kerawanan Bencana

No	Kecamatan	Luas Terdampak (Ha)	Kelas Kerawanan
1	Bantimurung	694,06	Tinggi
2	Bontoa	461,07	Tinggi
3	Camba	252,84	Tinggi
4	Cenrana	594,98	Tinggi
5	Lau	447,89	Tinggi
6	Mallawa	398,73	Tinggi
7	Tompobulu	0,13	Tinggi
8	Turikale	10,34	Tinggi
Jumlah		2.860,04	Tinggi

Sumber : BNPB, 2021

Cuaca ekstrim atau angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi (BNPB). Wilayah dengan potensi rawan bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Maros berada di 14 (empat belas) kecamatan. Total luas wilayah yang terdampak cuaca ekstrim adalah 125.594,93 ha, dengan kelas kerawanan TINGGI. Sebaran wilayah rawan bencana cuaca ekstrim serta kelas kerawanan bencana di Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.8
Wilayah Rawan Cuaca Ekstrim dan Kelas Kerawanan Bencana

No	Kecamatan	Luas Terdampak (Ha)	Kelas Kerawanan
1	Bantimurung	8.102,96	Tinggi
2	Bontoa	8.599,54	Tinggi
3	Camba	10.906,37	Sedang
4	Cenrana	10.947,07	Sedang
5	Lau	5.371,48	Tinggi
6	Mallawa	16.161,83	Tinggi
7	Mandai	4.907,66	Tinggi
8	Maros Baru	5.261,90	Tinggi
9	Marusu	8.143,75	Tinggi
10	Moncongloe	4.682,84	Tinggi
11	Simbang	6.371,90	Tinggi
12	Tanralili	8.904,02	Tinggi
13	Tompobulu	24.240,21	Tinggi
14	Turikale	2.993,33	Tinggi
Jumlah		125.594,93	Tinggi

Sumber : BNPB, 2021

Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis disekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sedangkan abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Wilayah dengan potensi rawan bencana cuaca ekstrim dan abrasi di Kabupaten Maros berada di 4 (empat) kecamatan. Total luas wilayah yang terdampak bencana banjir adalah 329,76 ha, dengan kelas kerawanan SEDANG. Sebaran wilayah rawan bencana cuaca gelombang ekstrim dan abrasi serta kelas kerawanan bencana di Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Wilayah Rawan Gelombang Ekstrim dan Abrasi serta Kelas Kerawanan Bencana

No	Kecamatan	Luas Terdampak (Ha)	Kelas Kerawanan
1	Bontoa	119,41	Sedang
2	Lau	23,24	Sedang
3	Maros Baru	55,25	Sedang
4	Marusu	131,85	Sedang
Jumlah		329,76	Sedang

Sumber : BNPB, 2021

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhnya batuan (BNPB). Wilayah dengan potensi rawan bencana cuaca ekstrim dan abrasi di Kabupaten Maros berada di 14 (empat belas) kecamatan. Total



wilayah luas wilayah yang terdampak bencana banjir adalah 162.546,72 Ha, dengan kelas kerawanan RENDAH. Sebaran wilayah rawan bencana gempa bumi dan kelas kerawanan bencana di Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Wilayah Rawan Gempa Bumi Serta Kelas Kerawanan Bencana

No	Kecamatan	Luas Terdampak (Ha)	Kelas Kerawanan
1	Bantimurung	17.368,53	Rendah
2	Bontoa	9.497,64	Rendah
3	Camba	14.535,18	Rendah
4	Cenrana	17.787,45	Rendah
5	Lau	5.370,82	Rendah
6	Mallawa	23.590,67	Rendah
7	Mandai	4.910,48	Rendah
8	Maros Baru	5.376,26	Rendah
9	Marusu	8.184,67	Rendah
10	Moncongloe	4.686,95	Rendah
11	Simbang	10.529,44	Rendah
12	Tanralili	8.944,44	Rendah
13	Tompobulu	28.770,83	Rendah
14	Turikale	2.993,37	Rendah
Jumlah		162.546,72	Rendah

Sumber : BNPB, 2021

Kebakaran hutan dan lahan merupakan suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan seringkali menyebabkan bencana asap yang sangat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar (BNPB). Wilayah dengan potensi rawan bencana cuaca ekstrim dan abrasi di Kabupaten Maros berada di 14 (empat belas) kecamatan. Total luas wilayah yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan adalah 162.546,72 Ha, dengan kelas kerawanan RENDAH. Sebaran wilayah rawan bencana kebakaran hutan dan lahan dan kelas kerawanan bencana di Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Wilayah Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Kelas Kerawanan Bencana

No	Kecamatan	Total Luas Terdampak (Ha)	Kelas Kerawanan
1	Bantimurung	17.368,53	Rendah
2	Bontoa	9.497,64	Rendah
3	Camba	14.535,18	Rendah
4	Cenrana	17.787,45	Rendah
5	Lau	5.370,82	Rendah
6	Mallawa	23.590,67	Rendah
7	Mandai	4.910,48	Rendah
8	Maros Baru	5.376,26	Rendah
9	Marusu	8.184,67	Rendah
10	Moncongloe	4.686,95	Rendah
11	Simbang	10.529,44	Rendah



No	Kecamatan	Total Luas Terdampak (Ha)	Kelas Kerawanan
12	Tanralili	8.944,44	Rendah
13	Tompobulu	28.770,83	Rendah
14	Turikale	2.993,37	Rendah
KABUPATEN MAROS		162.546,72	Rendah

Sumber : BNPB, 2021

Kekeringan merupakan ketersediaan air yang jauh dibawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian dalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman yang sedang dibudidayakan (BNPB). Wilayah dengan potensi rawan bencana kekeringan di Kabupaten Maros berada di 14 (empat belas) kecamatan. Total luas wilayah yang terdampak bencana banjir adalah 162.546,72 ha, dengan kelas kerawanan SEDANG. Sebaran wilayah rawan bencana kekeringan dan kelas kerawanan bencana di Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Wilayah Rawan Kekeringan dan Kelas Kerawanan Bencana

No	Kecamatan	Luas Terdampak (Ha)	Kelas Kerawanan
1	Bantimurung	17.368,53	Sedang
2	Bontoa	9.497,64	Sedang
3	Camba	14.535,18	Sedang
4	Cenrana	17.787,45	Sedang
5	Lau	5.370,82	Sedang
6	Mallawa	23.590,67	Sedang
7	Mandai	4.910,48	Sedang
8	Maros Baru	5.376,26	Sedang
9	Marusu	8.184,67	Sedang
10	Moncongloe	4.686,95	Sedang
11	Simbang	10.529,44	Sedang
12	Tanralili	8.944,44	Sedang
13	Tompobulu	28.770,83	Sedang
14	Turikale	2.993,37	Sedang
Jumlah		162.546,72	Sedang

Sumber : BNPB, 2021

Tanah longsor adalah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun pencampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng (BNPB). Sebaran wilayah rawan bencana tanah longsor dan kelas kerawanan bencana di Kabupaten Maros serta luasannya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.13
Wilayah Rawan Tanah Longsor dan Kelas Kerawanan Bencana

No	Kecamatan	Luas Terdampak (Ha)	Kelas Kerawanan
1	Bantimurung	7.833,83	Sedang
2	Bontoa	755,52	Sedang
3	Camba	10.171,15	Sedang
4	Cenrana	13.815,70	Sedang
5	Mallawa	15.998,01	Sedang
6	Mandai	71,20	Sedang
7	Moncongloe	427,94	Sedang
8	Simbang	3.732,45	Sedang
9	Tanralili	1.342,01	Sedang
10	Tompobulu	11.336,87	Sedang
Jumlah		65.484,70	Sedang

Sumber : BNPB, 2021

Tsunami berasal dari bahasa jepang yang berarti gelombang lautan. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi (BNPB). Wilayah dengan potensi rawan bencana tsunami di Kabupaten Maros berada di 4 (empat) kecamatan. Luas wilayah yang terdampak bencana tsunami adalah 6.019,72 ha, dengan kelas kerawanan SEDANG. Sebaran wilayah rawan bencana tsunami dan kelas kerawanan bencana di Kabupaten Maros serta luasannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14
Wilayah Rawan Tsunami dan Kelas Kerawanan Bencana

No	Kecamatan	Luas Terdampak (Ha)	Kelas Kerawanan
1	Bontoa	2.594,08	Tinggi
2	Lau	679,63	Tinggi
3	Maros Baru	455,85	Tinggi
4	Marusu	1.290,15	Tinggi
Jumlah		6.019,72	Tinggi

Sumber : BNPB, 2021

2.1.4 Kondisi Demografi

Kondisi demografi suatu wilayah sangat penting di dalam proses pembangunan. Penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik.

Jumlah penduduk Kabupaten Maros pada tahun 2020, berdasarkan sensus penduduk 2020 sebesar 391.774 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 196.499 jiwa, perempuan 195.275 jiwa dan tersebar di 14 (empat belas) kecamatan. Jumlah penduduk bertambah 72.772 jiwa dibandingkan dengan hasil sensus penduduk 2010.



Rata-rata laju pertumbuhan per tahun selama periode 2010-2020 sebesar 2,01 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode 2000-2010 sebesar 1,62 persen per tahun.

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Maros tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Mandai	38.628	39.032	39.449	39.830	51.793
2	Moncongloe	18.671	18.856	19.031	19.208	23.742
3	Maros Baru	25.870	26.134	26.397	26.647	28.364
4	Marusu	27.035	27.312	27.589	27.850	34.319
5	Turikale	44.242	44.710	45.196	45.633	48.541
6	lau	26.101	26.368	26.634	26.886	27.542
7	Bontoa	28.179	28.468	28.759	29.033	30.598
8	Bantimurung	29.861	30.168	30.479	30.770	32.831
9	Simbang	23.667	23.908	24.144	24.369	25.544
10	Tanralili	26.101	26.370	26.635	26.888	30.950
11	Tompobulu	15.186	15.334	15.467	15.608	15.945
12	Camba	13.303	13.430	13.539	13.660	14.221
13	Cenrana	14.580	14.720	14.845	14.979	14.574
14	Mallawa	11.466	11.572	11.659	11.761	12.811
JUMLAH		342.890	346.383	349.822	353.121	391.774

Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

Selama tahun 2016 hingga tahun 2019 jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan, rasio jenis kelamin selama kurun waktu tersebut sebesar 100. Sensus penduduk 2020 mencatat jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Maros lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 101. Hal ini berarti untuk setiap 100 orang perempuan, terdapat 101 laki-laki. Hal ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Jumlah penduduk laki-laki berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 sebanyak 196.499 orang dan penduduk perempuan sebanyak 195.275 orang.

Perubahan rasio jenis kelamin pada tahun 2020 disebabkan cukup besarnya migrasi penduduk di beberapa wilayah kecamatan yang berbatasan dengan Kota Makassar, seperti Kecamatan Moncongloe, Mandai dan Kecamatan Marusu.



Grafik 2.2
Jumlah penduduk Berdasarkan jenis Kelamin
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

Komposisi penduduk Kabupaten Maros menurut kecamatan menunjukkan bahwa penduduk terbesar yakni 51.793 jiwa mendiami Kecamatan Mandai, sedangkan wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Mallawa dengan jumlah penduduk sebanyak 12.811 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Maros pada tahun 2020 mencapai 242 jiwa/km². Kecamatan Turikale adalah kecamatan terpadat dengan tingkat kepadatan mencapai 1.622 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Mandai 1.055 jiwa/km², sedangkan kecamatan yang tingkat kepadatannya paling rendah adalah Kecamatan Mallawa yaitu 54 jiwa/km².

Komposisi penduduk setiap kecamatan menurut jumlah penduduk, laju pertumbuhan per tahun, kepadatan penduduk per kilometer persegi, serta rasio jenis kelamin Kabupaten Maros tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Pertumbuhan, Kepadatan dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Kecamatan	Penduduk		
		Pertumbuhan	Kepadatan	Rasio Jenis Kelamin
1	Mandai	27,64	1.055	102
2	Moncongloe	20,96	506	102
3	Maros Baru	6,18	528	104
4	Marusu	23,59	639	101
5	Turikale	6,92	1.622	100
6	Lau	2,20	373	100
7	Bontoa	6,62	327	100
8	Bantimurung	7,67	189	99
9	Simbang	5,52	243	100
10	Tanralili	15,87	346	100
11	Tompobulu	1,75	55	104



No	Kecamatan	Penduduk		
		Pertumbuhan	Kepadatan	Rasio Jenis Kelamin
12	Cenrana	5,02	98	95
13	Camba	-2,85	80	97
14	Mallawa	8,94	54	99
Jumlah		10,94	242	101

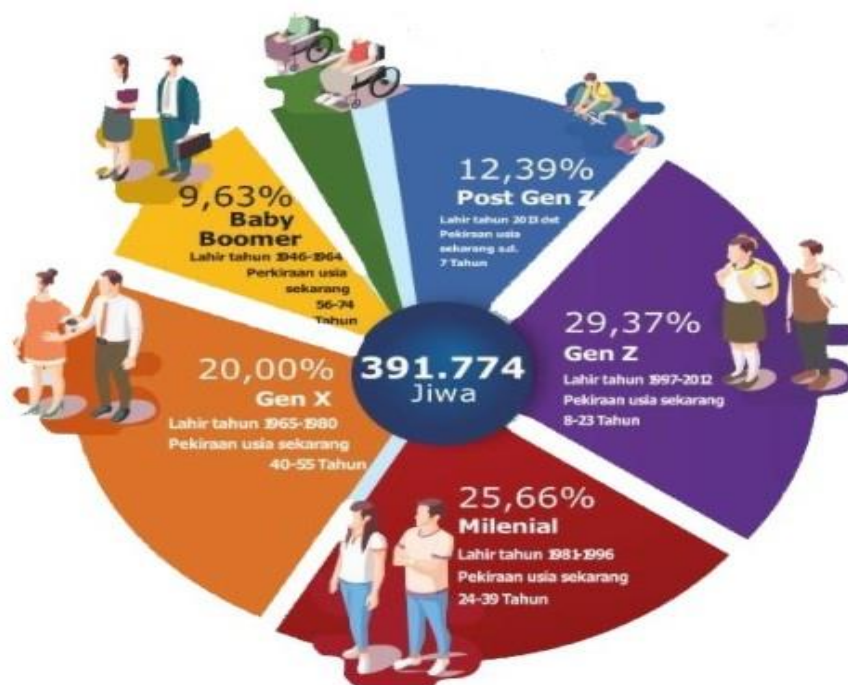
Sumber : BPS Kab. Maros, 2021
Hasil Sensus Penduduk 2020

Hasil sensus penduduk 2020 mencatat penduduk Kabupaten Maros didominasi oleh Generasi Z (8-23 tahun) dan Generasi Milenial (24-39 tahun). Proporsi Generasi Z sebanyak 29,37 persen dan Generasi Milenial sebanyak 25,66 persen dari total jumlah penduduk. Sekitar tujuh tahun lagi semua Generasi Z akan berada pada kelompok usia produktif. Generasi inilah yang berpotensi menjadi motor dalam pembangunan yang akan menjadi penentu masa depan bangsa.

Dari sisi demografi, seluruh Generasi X (40-55 tahun) dan Generasi Milenial (24-39 tahun) merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif pada tahun 2020. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Adapun komposisi penduduk menurut generasi di Kabupaten Maros pada tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.3
Komposisi Penduduk menurut Generasi Kabupaten Maros tahun 2020



Sumber : BPS Kab. Maros, 2021
Hasil Sensus Penduduk 2020



Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Maros tahun 2020 sebanyak 266.611 jiwa atau 68,11 persen dari total jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Maros masih dalam bonus demografi. Sedangkan penduduk lanjut usia sebesar 5,28 persen atau sebanyak 20.685 jiwa.

Tabel 2.17
Jumlah Penduduk Berdasarkan kelompok Umur
Kabupaten Maros Tahun 2020

Kelompok Umur	JUMLAH PENDUDUK				
	2016	2017	2018	2019	2020
0-4	35.420	35.481	35.532	35.078	35.708
5-9	32.738	32.826	32.904	33.288	33.940
10-14	31.942	31.741	31.530	32.167	32.817
15-19	33.112	33.436	33.756	32.378	33.041
20-24	30.937	31.305	31.669	32.354	33.217
25-29	27.323	27.464	27.596	28.342	35.778
30-34	25.447	25.407	25.357	25.732	34.204
35-39	25.159	25.236	25.304	25.160	29.166
40-44	23.752	24.106	24.456	24.142	26.461
45-49	20.478	21.109	21.749	21.753	24.172
50-54	16.462	17.037	17.625	18.270	21.364
55-59	13.060	13.535	14.021	14.580	17.397
60-64	9.237	9.489	9.740	10.406	12.811
65-69	7.140	7.308	7.471	7.771	9.180
70-75	5.122	5.222	5.316	5.610	5.844
75+	5.561	5.683	5.795	6.090	6.674
Jumlah	342.890	346.383	349.822	353.121	391.774

Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

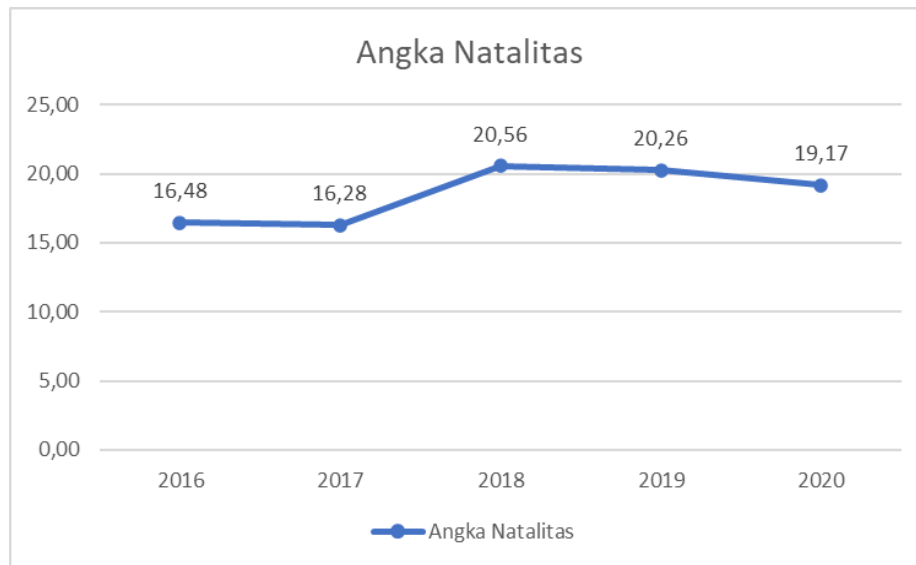
Sebuah daerah akan mengalami perubahan jumlah penduduk karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: angka kelahiran (natalitas), angka kematian (mortalitas), dan migrasi.

1. Angka Natalitas

Untuk menghitung angka kelahiran dapat menggunakan pembagian jumlah angka kelahiran bayi yang hidup dengan jumlah penduduk dikalikan 1000. Angka kelahiran dapat dihitung dari jumlah kelahiran setiap 1000 penduduk dalam satu tahun. Angka Natalitas Kabupaten Maros menunjukkan angka natalitas yang berfluktuatif selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 angka natalitas sebesar 16,48 per 1.000 penduduk kemudian menurun hingga mencapai 16,28 per 1.000 penduduk pada tahun 2017. Pada tahun 2018 angka natalitas meningkat hingga mencapai 20,56 per 1.000 penduduk. Namun menurun Kembali pada tahun 2019 sebesar 20,26 per 1.000 penduduk dan 19,17 per 1.000 penduduk pada tahun 2020.



Grafik 2.3
Angka Natalitas
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

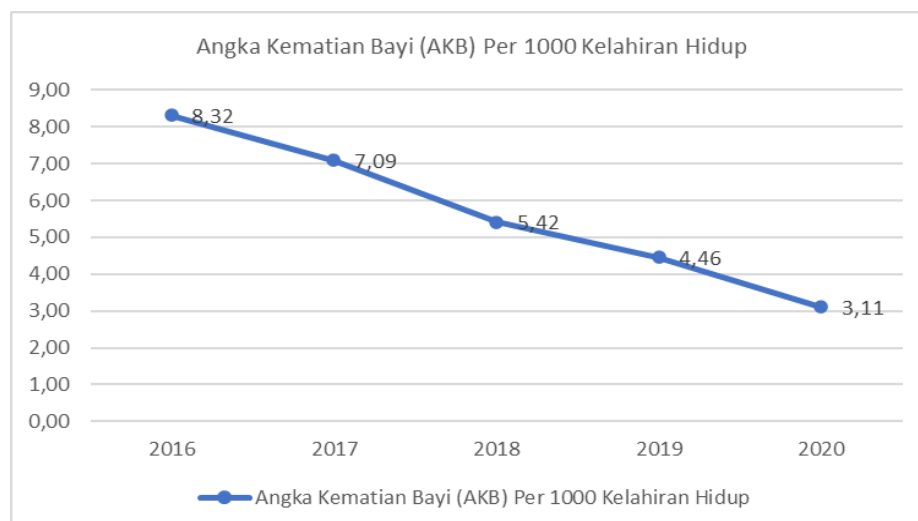


Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2. Angka Mortalitas

Angka kematian menunjukkan jumlah kematian tiap 1000 penduduk dalam satu tahun. Angka kematian dihitung dengan jumlah kematian dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk. Indikator yang digunakan untuk mengukur angka mortalitas adalah angka kematian kasar, angka kematian bayi (AKI) dan angka kematian menurut kelompok umur. Angka kematian bayi di Kabupaten Maros menunjukkan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 AKI sebesar 8,32 per 1.000 penduduk kemudian menurun hingga mencapai 3,11 1.000 penduduk pada tahun 2020.

Grafik 2.4
Angka Kematian Bayi
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021



3. Angka Migrasi

Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah migrasi. Pengertian dari migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Biasanya, migrasi terjadi relative permanen dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Migran adalah sebutan untuk orang yang melakukan migrasi. Jumlah perpindahan penduduk Kabupaten Maros menurut hasil sensus penduduk tahun 2020 sebesar 29.735 orang atau 30 orang per 1.000 penduduk

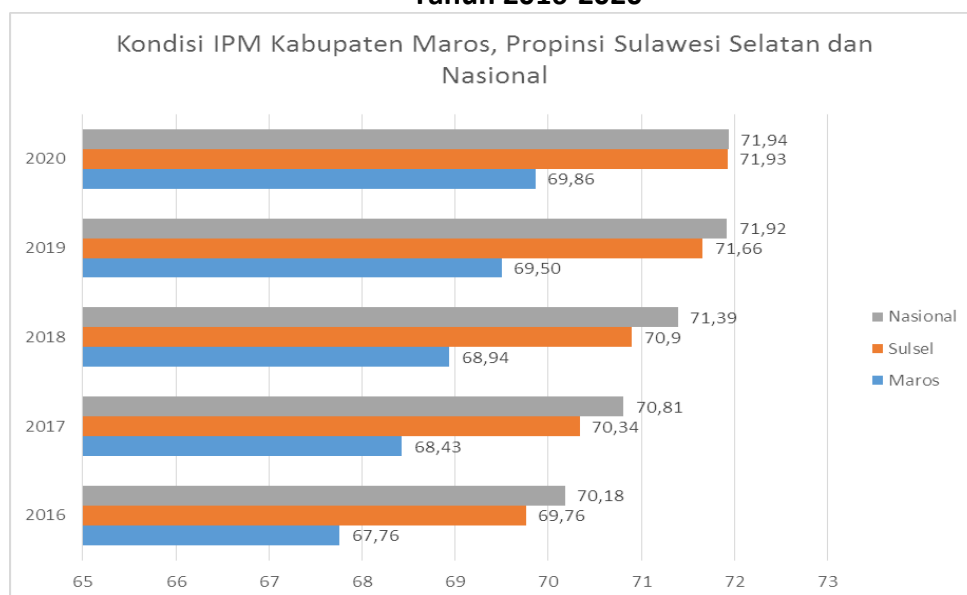
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Perkembangan IPM Kabupaten Maros selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup baik sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.5
Kondisi IPM Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional
Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa kondisi IPM Kabupaten Maros sejak tahun 2016-2021 meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 IPM Kabupaten Maros sebesar 67,76 kemudian meningkat hingga mencapai 69,86 pada tahun 2020.



Hal ini disebabkan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Maros selama sepuluh tahun terakhir. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia tenaga pendidik serta tenaga kesehatan dilakukan secara konsisten setiap tahunnya.

Walaupun demikian, kondisi IPM Kabupaten Maros masih berada dibawah capaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. IPM Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 mencapai 71,93 setara dengan IPM Nasional yang berada pada angka 71,94. IPM Kabupaten Maros masih termasuk dalam kategori sedang, namun diharapkan pada tahun 2021, IPM Kabupaten Maros dapat mencapai angka 70 dan masuk dalam kategori tinggi.

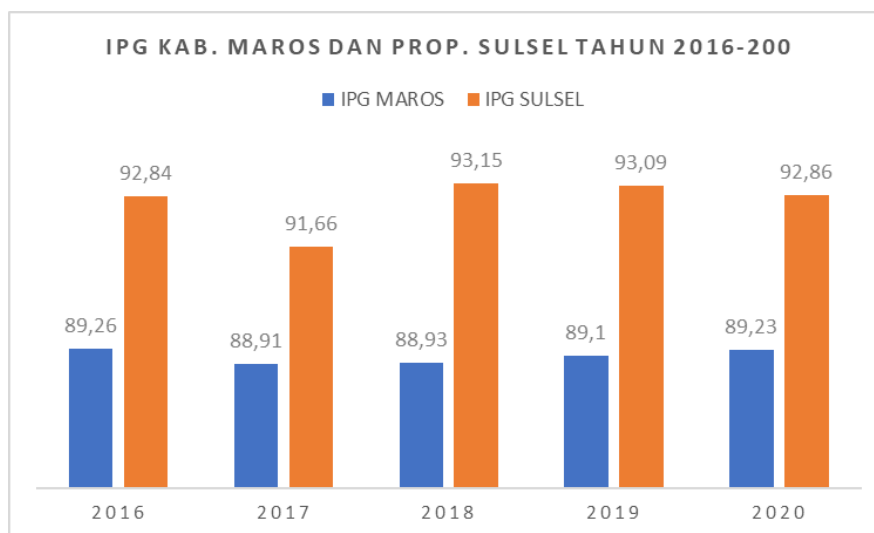
2.2.1.2 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan mempertimbangkan aspek gender. Ketimpangan antara capaian IPM dan IPG yang dilihat dari rasio keduanya. Semakin mendekati angka 100 maka kesejangan pemabgunan antara perempuan dan laki-laki akan semakin kecil.

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Maros menunjukkan tren peningkatan setianp tahunnya, walaupun peningkatanna tidak terlalu besar. APda tahun 2016 IPG Kabupaten Maros sebesar 89.26, kemudian menurun pada tahun 2017 hingga mencapai 88,91. Pada tahun 2018 IPG Kembali meningkat sebesar 88,93, kemudian pad atahun 2019 seeb sar 89,10 dan tahun 2020 sebesar 89,23. Berdasarkan data tersebut dapat diketahu bahwa tingkat kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Maros berada pada kategori rendah. Walaupun demikian, pencapaian IPG kabupaten Maros masih berada dibawah capaian IPG Propini Sulawesi Selatan



Grafik 2.6
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Maros,
Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020



Sumber : Kemenppa dan BPS, 2021

2.2.1.3 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten yang memiliki fungsi strategis dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan. Keberadaan Bandara di Kabupaten Maros merupakan subsektor yang sangat strategis bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai PDRB Maros atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 sebesar 18,62 triliun rupiah, mengalami penurunan sekitar 4,09 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 22,71 triliun rupiah. Berdasarkan harga konstan PDRB juga mengalami penurunan, dari 13,72 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 12,23 triliun rupiah pada tahun 2020. Turunnya nilai PDRB dipengaruhi oleh menurunnya produksi di hampir seluruh lapangan usaha.

Struktur perekonomian Kabupaten Maros selama lima tahun terakhir (2016-2020) didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha, diantaranya Transportasi dan Pergudangan, Industri Pengolahan, dan Pertanian, kehutanan, dan perikanan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Maros pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, yaitu 25,79%, angka ini menurun dari 40,06% di tahun 2019. Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 18,94%, naik dari 16,40% di tahun 2019, disusul kemudian oleh lapangan usaha Pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 18,52%, naik dari 15,16% di tahun 2019.



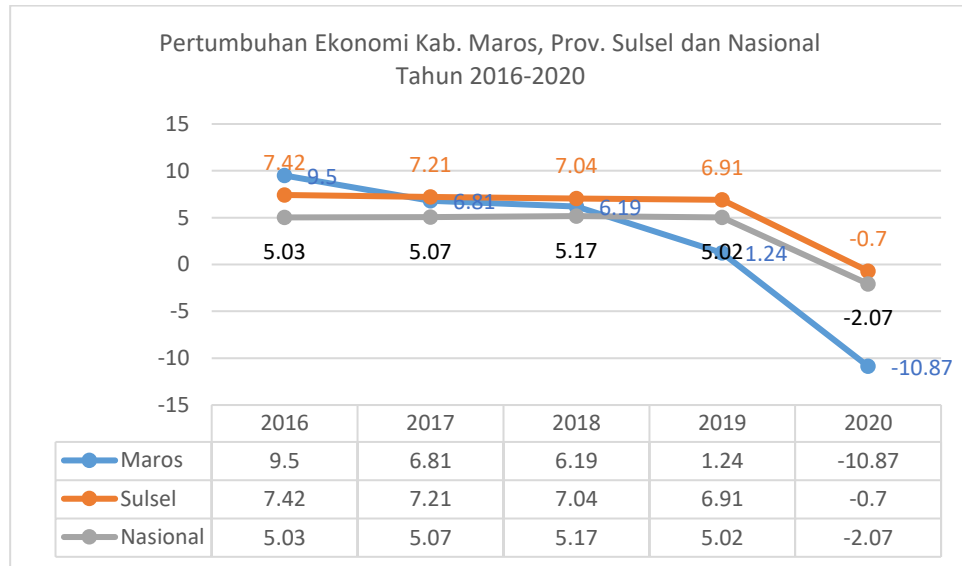
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros secara keseluruhan sangat bergantung pada laju pertumbuhan ketiga lapangan usaha dengan kontribusi terbesar, terutama pada pertumbuhan sektor transportasi dan perdagangan. Sektor transportasi dan perdagangan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -35,54 %, semakin melambat dibandingkan tahun 2019 sebesar -11,02%. Kemudian untuk Industri Pengolahan juga mengalami kontraksi sebesar -6,57 %, turun dari 1,48% di tahun 2019, selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan perikanan mengalami kontraksi sebesar -2,29%, turun dari 5,29% di tahun 2019.

Dalamnya kontraksi pada lapangan usaha transportasi dan perdagangan sangat dipengaruhi oleh sub sektor angkutan udara, dalam hal ini jumlah penumpang dan barang/kargo yang berangkat dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin mengalami trend negatif (belum normal kembali) akibat pandemi Covid-19. Demikian juga kontraksi pada sektor Industri Pengolahan sangat dipengaruhi oleh industri barang galian bukan logam, dalam hal ini produksi Semen Bosowa yang juga mengalami penurunan. Sektor Pertanian yang diharapkan mampu bertumbuh positif, juga mengalami kontraksi yang disebabkan oleh berkurangnya luas lahan serta bergesernya waktu panen ke awal tahun 2021, sehingga terjadi selisih jumlah produksi pada perhitungan akhir tahun 2020.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Maros selama lima tahun terakhir (2016-2020) menunjukkan trend menurun. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mencapai 9,51% (tertinggi ke-3 di Provinsi Sulawesi Selatan), namun pada tahun 2017 hingga tahun 2020 terus mengalami pelambatan. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi melambat cukup signifikan sebesar 1,24%, dan kemudian mengalami kontraksi yang cukup dalam pada tahun 2020 sebesar 10,87%. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros sejak tahun 2019 berada dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.



Grafik 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Prov. Sulsel, 2021



Tabel 2.18
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.051.940	2.202.311	2.312.494	2.434.716	2.378.990
2	Pertambangan dan Penggalian	955.853	1.142.053	1.253.526	1.419.899	1.432.110
3	Industri Pengolahan	2.653.474	2.733.882	2.747.088	2.787.667	2.604.390
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10.042	10.649	11.232	11.928	11.360
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	10.979	12.171	13.078	15.204	17.330
6	Konstruksi	675.641	735.098	807.441	950.688	1.084.870
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	396.964	419.031	451.107	508.099	497.270
8	Transportasi dan Pergudangan	3.917.728	4.175.994	4.541.584	4.040.990	2.604.870
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	39.628	41.548	46.552	53.225	43.120
10	Informasi dan Komunikasi	160.210	168.702	179.843	190.749	214.950
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	169.038	169.505	176.663	189.050	196.640
12	Real Estate	167.671	178.653	190.656	204.729	217.650
13	Jasa Perusahaan	2.798	3.060	3.366	3.745	3.710
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	432.882	453.024	478.681	540.342	539.400
15	Jasa Pendidikan	187.360	193.918	207.036	224.921	231.460
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	80.796	84.108	88.463	93.743	102.680
17	Jasa Lainnya	40.987	44.603	49.938	56.590	52.870

Sumber : BPS Kab. Maros, 2021



Tabel 2.19
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

NO	Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.707.127	3.056.371	3.244.103	3.443.104	3.449.200,00
2	Pertambangan dan Penggalian	1.081.677	1.208.401	1.350.071	1.548.502	1.577.680,00
3	Industri Pengolahan	3.245.902	3.570.314	3.642.509	3.724.658	3.527.340,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8.675	10.605	11.659	12.394	11.780
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	14.063	17.581	19.077	22.185	25390
6	Konstruksi	1.131.149	1.316.146	1.549.801	1.880.589	2.150.300
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	452.529	504.051	572.321	662.437	658.050
8	Transportasi dan Pergudangan	7.477.534	7.866.724	8.843.202	9.099.710	4.801.860
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54.445	61.526	69.800	81.417	69.340
10	Informasi dan Komunikasi	185.131	211.049	229.096	245.501	277.560
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	232.165	244.478	265.438	293.085	308.330
12	Real Estate	212.702	233.240	257.761	280.406	299.670
13	Jasa Perusahaan	4.553	5.112	5.839	6.583	6.650
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	636.413	682.998	753.813	869.257	883.330
15	Jasa Pendidikan	244.655	263.004	287.091	314.897	327.050
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	110.409	119.021	129.284	140.470	160.190
17	Jasa Lainnya	62.397	69.386	80.458	91.772	87.310
PDRB		17.861.531	19.440.014	21.311.332	22.716.974	18.621.030

Sumber : BPS Kab. Maros, 2021



Tabel 2.20
Distribusi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Sektor	Distribusi					Pertumbuhan				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15,16	15,72	15,22	15,16	18,52	8,63	7,39	4,95	5,29	-2,29
2	Pertambangan dan Penggalian	6,06	6,22	6,33	6,82	8,47	15,32	19,48	9,76	13,27	0,86
3	Industri Pengolahan	18,17	18,37	17,09	16,40	18,94	10,05	3,16	0,48	1,48	-6,57
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	11,99	6,05	5,46	6,20	-4,79
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,08	0,09	0,09	0,10	0,14	0,98	10,86	7,45	16,25	13,97
6	Konstruksi	6,33	6,77	7,27	8,28	11,55	7,95	8,89	9,48	17,74	14,11
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,53	2,59	2,69	2,92	3,53	6,3	5,07	8,58	12,63	-2,13
8	Transportasi dan Pergudangan	41,86	40,47	41,50	40,06	25,79	14,98	6,59	8,75	-11,02	-35,54
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,30	0,32	0,33	0,36	0,37	6,7	4,88	12,00	14,33	-18,89
10	Informasi dan Komunikasi	1,04	1,09	1,07	1,08	1,49	4,53	5,3	6,6	6,06	12,69
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,30	1,26	1,25	1,29	1,66	10,02	0,28	4,22	7,01	4,01
12	Real Estate	1,19	1,20	1,21	1,23	1,61	5,65	6,55	6,72	7,38	6,31
13	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	3,45	9,34	10,00	11,24	-1,03
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,56	3,51	3,54	3,83	4,74	8,47	4,65	5,66	12,88	-0,17
15	Jasa Pendidikan	1,37	1,35	1,35	1,39	1,76	4	3,5	6,76	8,64	2,91
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,62	0,61	0,61	0,62	0,86	5,91	4,1	5,18	5,97	9,53
17	Jasa Lainnya	0,35	0,36	0,38	0,40	0,47	4,5	8,82	11,96	13,32	-6,58
	PDRB	100	100	100	100	100	9,50	6,81	6,19	1,24	-10,87

Sumber : BPS Kab. Maros, 2021



2.2.1.4 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk.

Kondisi PDRB per kapita Kabupaten Maros pada kurun waktu tahun 2016 - 2019 menunjukkan trend meningkat setiap tahunnya, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan seiring dengan menurunnya nilai PDRB ADHB. Pada tahun 2016 PDRB per kapita Kabupaten Maros sebesar 52,09 juta rupiah/jiwa/tahun kemudian mencapai 64,33 juta rupiah/jiwa pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 52,28 juta rupiah/jiwa. Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Maros selama tahun lima tahun terakhir (2016-2020) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21
Pendapatan Per Kapita Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

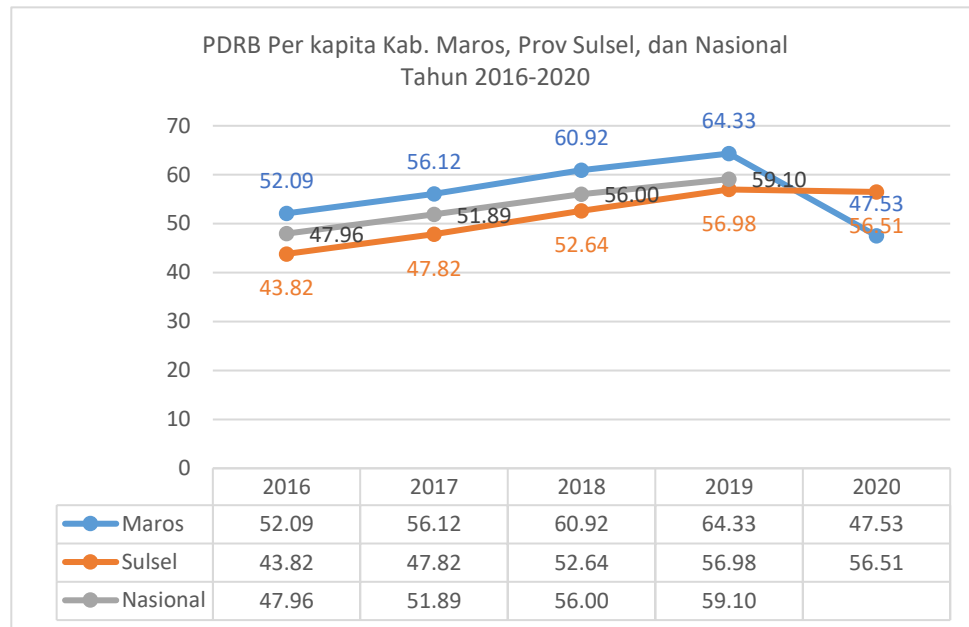
No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai PDRB (Juta Rp)	17.861.500	19.440.000	21.311.300	22.718.000	18.621.000
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	342.890	346.383	349.822	353.121	391.774
3	PDRB Perkapita (Juta Rp/Jiwa)	52,09	56,12	60,92	64,33	52,28

Sumber : BPS Kabupaten Maros, 2021

Secara umum, PDRB per kapita Kabupaten Maros pada kurun waktu tahun 2016 - 2019 berada diatas provinsi dan nasional. Pada tahun 2019, PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 56,98 juta rupiah, dan Nasional sebesar 59,10 juta rupiah. Kondisi ini sedikit berbeda di tahun 2020, dimana PDRB per kapita Maros sebesar 52,28 juta rupiah lebih rendah dari Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 56,51 juta rupiah.



Grafik 2.8
PDRB Perkapita Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Prov. Sulsel, 2021

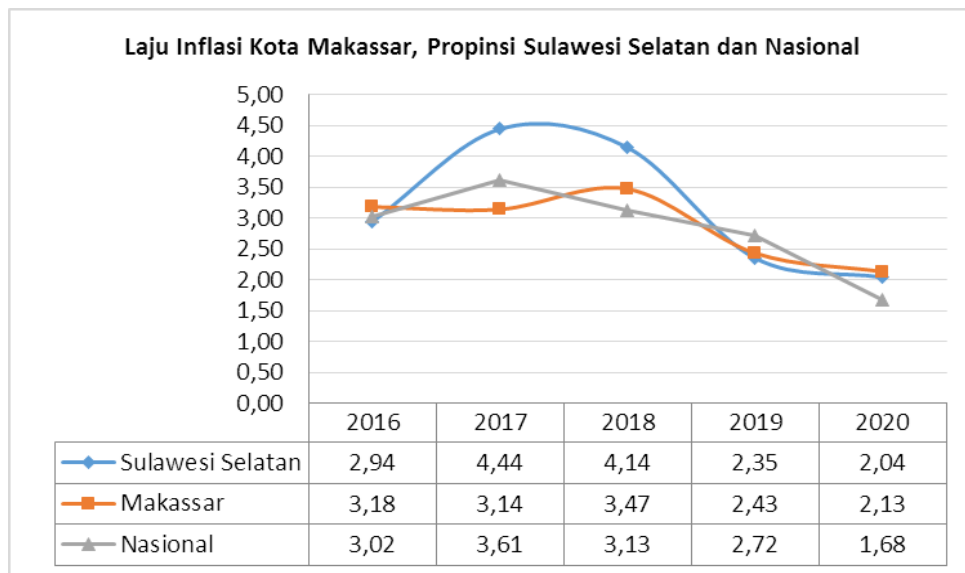
2.2.1.5 Laju Inflasi

Inflasi adalah kondisi meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (kontinyu) dalam jangka waktu tertentu. Penyebab meningkatnya berkaitan dengan mekanisme pasar antara lain; konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

Angka inflasi disajikan pada tingkat provinsi dan kota. Untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, inflasi dihitung pada wilayah Kota Makassar, Kota Pare-pare, Kota Palopo, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Bulukumba. Untuk daerah-daerah atau kabupaten lainnya dapat mengikuti inflasi pada wilayah terdekat yang dihitung inflasinya. Laju inflasi Kabupaten Maros mengikuti laju inflasi Kota Makassar sebagai wilayah terdekat. Pada tahun 2020 tingkat inflasi Kota Makassar sebesar 2,13%, sedangkan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 2,14% dan Nasional sebesar 1,68%.



Grafik 2.9
Laju Inflasi Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2021

Berdasarkan grafik diatas, inflasi Kota Makassar dari tahun ke tahun selaras dengan inflasi Provinsi Sulawesi Selatan. Meski rata-rata inflasi Kota Makassar lebih tinggi dari laju inflasi nasional. Untuk menekan laju inflasi tersebut harus dilakukan kontrol berkala terhadap komoditas-komoditas penyumbang inflasi di Kabupaten Maros dan Kota Makassar.

2.2.1.6 Koefisien Gini

Untuk memberikan gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan digunakan pendekatan teori Gini Rasio yaitu sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien rasio antara 0 – 1 (> 0 dan < 1).

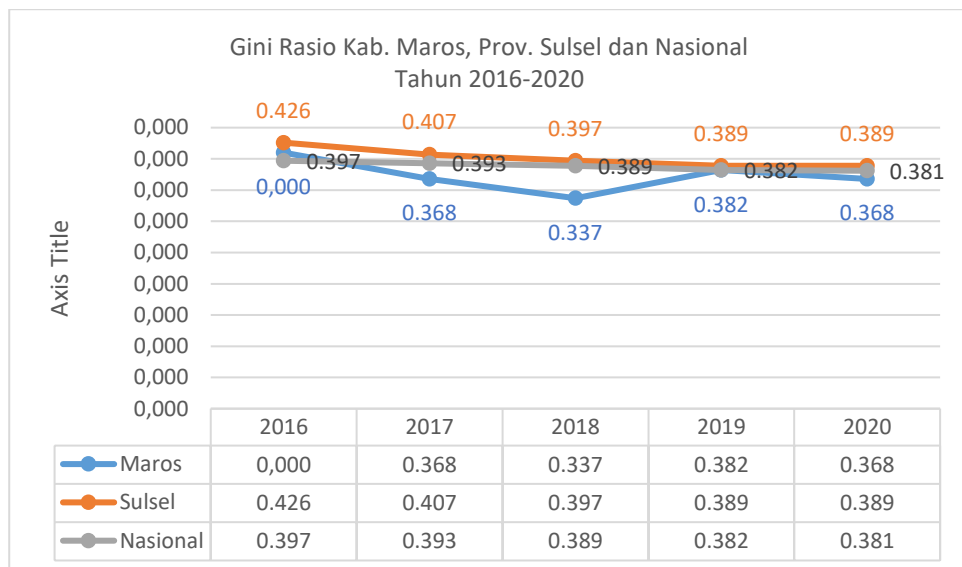
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Maros selama lima tahun terakhir (2016-2020) menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2016 sebesar 0,410, kemudian menurun tahun 2018 hingga mencapai 0,337. Pada tahun 2019 capaian Indeks Gini Kabupaten Maros meningkat tajam hingga mencapai 0,382, namun kembali menurun 0,368 di tahun 2020.

Berdasarkan capaian pada tahun 2020, besaran Indeks Gini Kabupaten Maros menunjukkan bahwa tingkat pemerataan pendapatan dan kekayaan termasuk



kategori sedang atau dengan kata lain ketimpangan sedang. Kondisi ini berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Perkembangan koefisien gini Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional selama kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.10
Koefisien Gini Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2021

2.2.1.7 Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Ketimpangan distribusi pendapatan sangat erat hubungannya dengan kemiskinan. Upaya penurunan angka kemiskinan menjadi sasaran utama dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Pengukuran kemiskinan secara umum di Indonesia disusun dengan menggunakan standar indikator dari Badan Pusat Statistik.

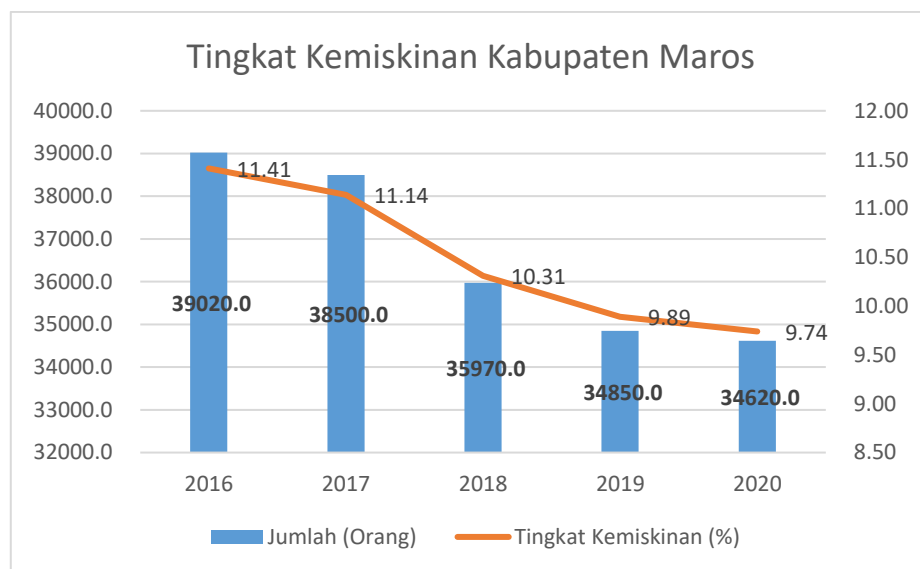
Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros menunjukkan trend penurunan selama tahun 2016 - 2020. Persentase penduduk miskin pada tahun 2016 sebesar 11,41%, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 39.020 orang. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin menurun hingga 9,74% dengan jumlah penduduk miskin sekitar 34.620 orang. Penurunan persentase penduduk miskin ini disebabkan banyaknya program kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) serta peningkatan infrastruktur utamanya jalan yang dilakukan



pemerintah daerah yang berdampak terhadap peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat.

Walaupun pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan peningkatan tingkat kemiskinan hamper di seluruh Propinsi. Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, namun tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Hal ini disebabkan penduduk Kabupaten Maros Sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani dan nelayan sehingga dampak ekonomi dari pednemi tidak terlalu besar terhadap tingkat kesejahteraan amsyarakat. Selain itu masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan yang mengalami PHK, banyak yang pulang ke kampung halaman untuk Bertani atau nelayan sehingga penhasilannya tetap terjaga.

Grafik 2.11
Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

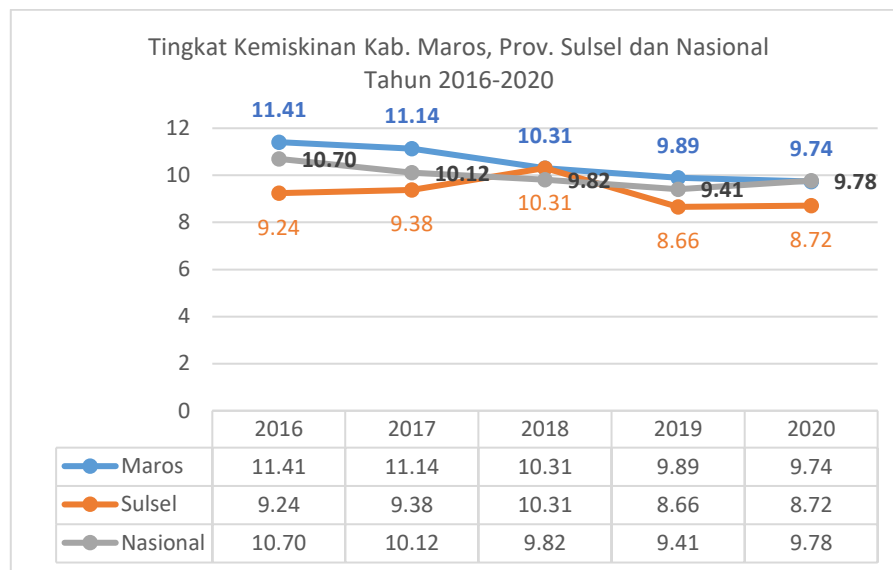


Sumber : BPS Provinsi Sulsel, 2021

Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Maros pada tahun 2020 menunjukkan hasil yang menggembarikan. Di tengah masa sulit akibat pandemi Covid-19, persentase penduduk miskin mampu mencapai 9,74%, turun dibandingkan tingkat kemiskinan tahun 2019 sebesar 9,89%. Jika pada tahun 2019, tingkat kemiskinan Kabupaten Maros masih berada di atas provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, maka pada tahun 2020 tingkat kemiskinan Kabupaten Maros berada di bawah Nasional (9,78%) dan di atas Provinsi Sulawesi Selatan (8,72%). Gambaran perkembangan tingkat kemiskinan selama kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 2.12
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Maros, Provinsi Sulsel,
dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Angka Harapan Sekolah

Indeks Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tinggi rendahnya IPM suatu daerah tergantung dari komponennya. Semakin tinggi nilai komponennya maka akan semakin tinggi pula indeks IPM. Indeks pendidikan diukur dengan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka harapan sekolah memiliki keterkaitan dengan angka partisipasi murni dan kasar PAUD, SD dan SMP. Sedangkan untuk rata-rata lama sekolah erat kaitannya dengan Angka Melanjutkan (AM) SD ke SMP dan Angka Melanjutkan SMP ke SMA.

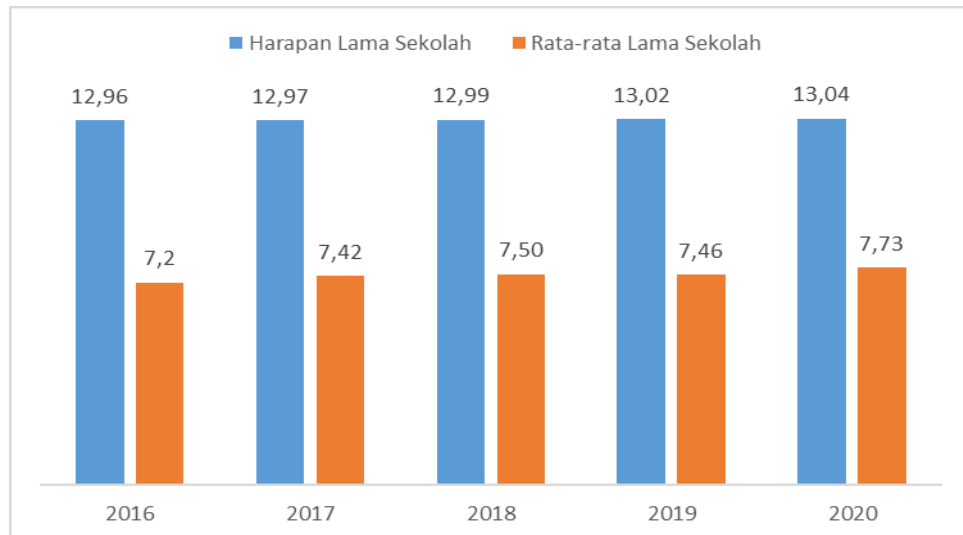
Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Maros meningkat dari tahun 2016 sebesar 7,20 tahun menjadi 7,73 tahun pada tahun 2020. Capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Maros masih cukup rendah, dimana tingkat pendidikan terakhir penduduk Kabupaten Maros adalah SMP/MTs/Setara tahun 2020.

Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) Kabupaten Maros menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Maros yang lahir pada tahun 2016 hingga tahun 2020 diharapkan memiliki tingkat pendidikan terakhir adalah SMA/SMK/Setara. Pada tahun 2016 AHLS di Kabupaten Maros sebesar 12,96 tahun kemudian meningkat menjadi 13,04 tahun pada tahun 2020. Dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang terus dilakukan, masyarakat Kabupaten Maros terutama anak-anak



dan pelajar memiliki harapan yang tinggi untuk mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SMA/SMK/Setara, bahkan hingga bangku kuliah tahun pertama.

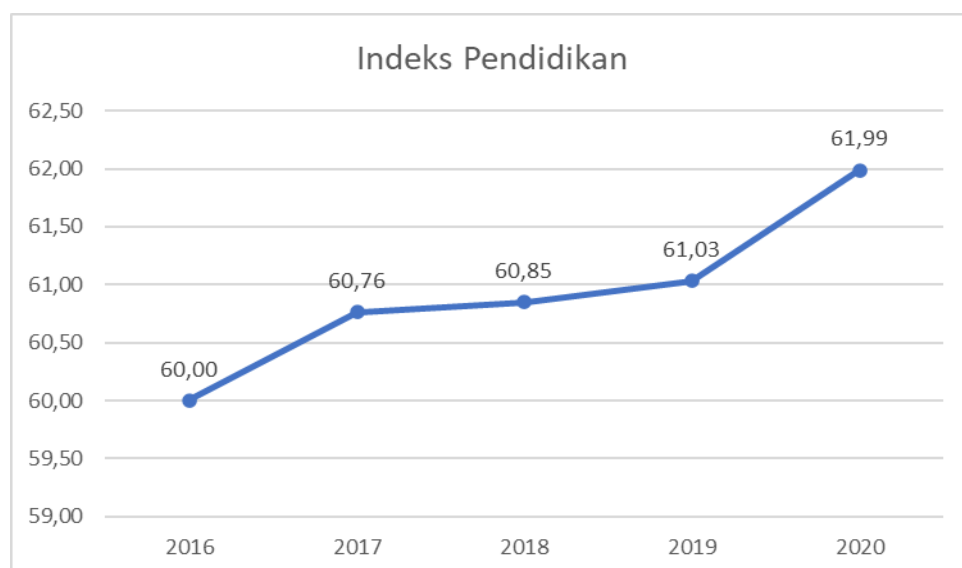
Grafik 2.13
Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata lama Sekolah Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

Indeks pendidikan Kabupaten MAros menunjukkan peningkatan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 indeks pendidikan sebesar 64,08 kemudian emingkat hingga mencapai 65,54 pada tahun 2020. Indeks pendidikan diperoleh dengan menggunakan standarisasi nilai maksimum dan minum dari data harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (BPS).

Grafik 2.14
Indeks Pendidikan Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



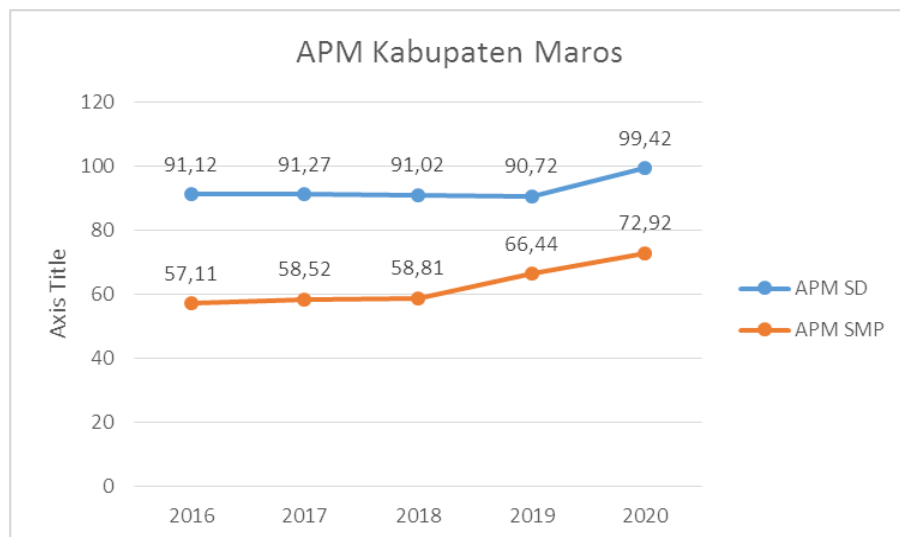
Sumber : BPS Kab. Maros (Diolah), 2021



Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. APM mengukur partisipasi penduduk standar usia dijenjang pendidikan tertentu dengan standar usia siswa dijenjang tersebut. Khusus APM jenjang SMA/MA/SMK terhitung 1 januari 2017 telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Perkembangan APM Kabupaten Maros menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2016-2020, walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Angka APM tingkat SD selalu berada diatas angka APM tingkat SMP. APM SD Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebesar 91,12%, sedangkan APM SMP di tahun yang sama hanya sebesar 57,11%. Pada tahun 2020, APM SD meningkat hingga 99,42%, sedangkan APM SMP mencapai 72,92%. Rekapitulasi data perkembangan APM Kabupaten Maros tahun 2016-2020 disajikan pada grafik berikut :

Grafik 2.15
Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021

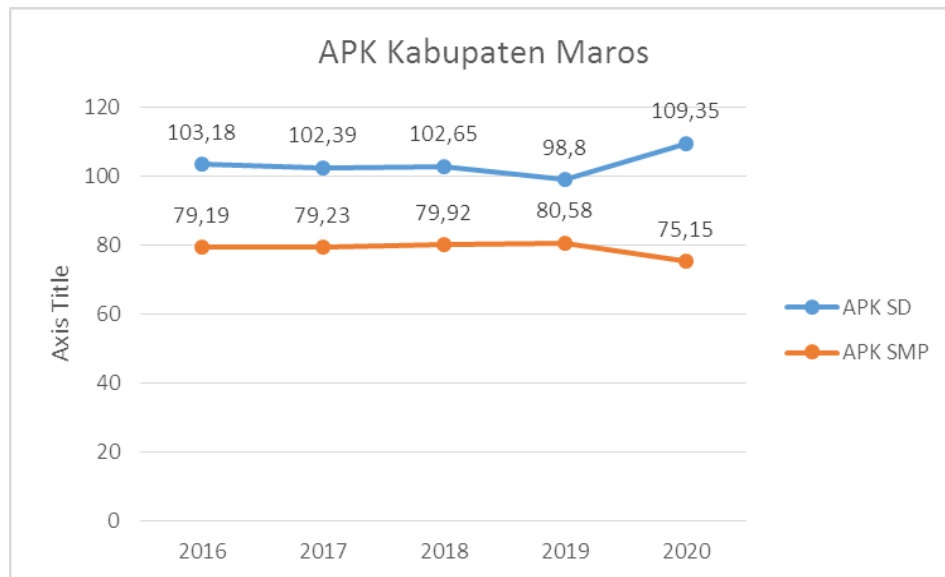
Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang menempuh pendidikan dijenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. APK berfungsi untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat Pendidikan, sekaligus merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Perkembangan APK Kabupaten Maros tingkat SD dan SMP menunjukkan tren yang berbeda. APK tingkat SD menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 APM SD Kabupaten Maros sebesar 103,18% kemudian



meningkat menjadi 109,35% pada tahun 2020. Sedangkan APK SMP Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2016 APK SMP Kabupaten Maros sebesar 79,19 % kemudian pada tahun 2020 menurun hingga 75,15%. Perkembangan APK Kabupaten Maros selama kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.16
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021

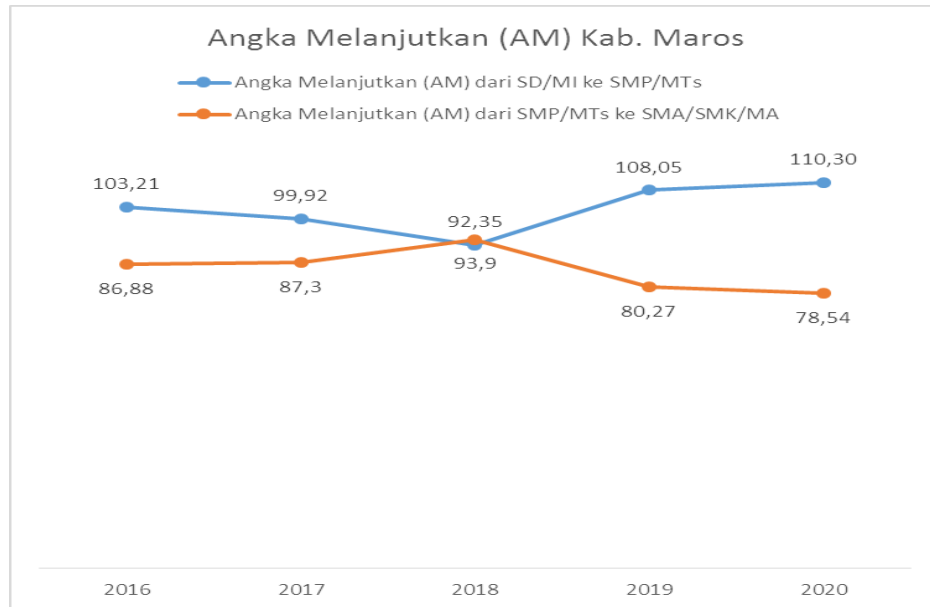
Angka Melanjutkan (AM) adalah jumlah siswa yang lulus ujian jenjang tertentu terhadap jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang selanjutnya. AM merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur rata-rata lama sekolah antar jenjang pendidikan. Angka melanjutkan (AM) diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dengan jumlah siswa yang lulus ujian.

Angka melanjutkan SD/MI ke jenjang SMP Kabupaten Maros menunjukkan tren yang berfluktuatif, dimana pada tahun 2016 angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs sebesar 103,21%, tahun 2018 AM SD/MI mengalami penurunan hingga 92,35%, kemudian pada tahun 2020 mencapai 110,29%. Hal ini menunjukkan adanya siswa SD dari luar Kabupaten Maros yang melanjutkan sekolah tingkat SMP di Kabupaten Maros. Sedangkan AM dari tingkat SMP/MTs ke SMA/SMK/MA juga menunjukkan angka yang berfluktuatif, dimana pada tahun 2016 AM SMP/MTs sebesar 86,88% kemudian pada tahun 2020 menurun hingga mencapai 78,53%. Pada tahun 2018 AM SMP/MTs mencapai 93,90%, namun kembali mengalami penurunan pada dua tahun terakhir. Hal ini menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang menamatkan pendidikan hanya sampai pada jenjang SMP. Perkembangan Angka



Melanjutkan (AM) Kabupaten Maros selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.17
Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021

Angka Putus Sekolah (APS) menunjukkan tingkat putus sekolah disuatu jenjang pendidikan. Pada tahun 2016, APS SD Kabupaten Maros sebesar 0,3 % kemudian menurun hingga 0,29% pada tahun 2020. Sedangkan APS SMP Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebesar 0,15% kemudian mencapai 0,11% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan masih adanya masyarakat yang tidak menamatkan sekolahnya baik pada tingkat SD maupun pada tingkat SMP.

Grafik 2.18
Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021

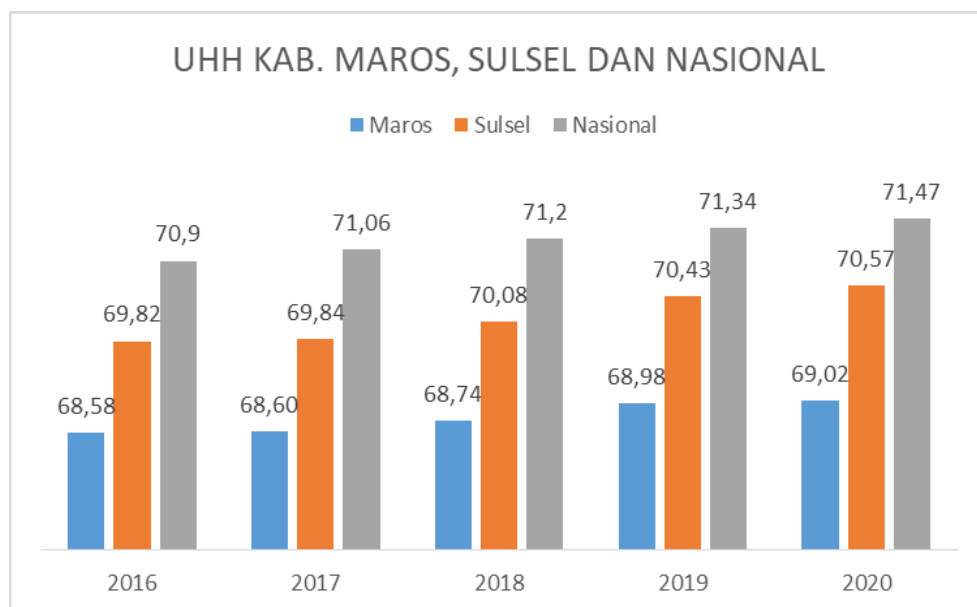


Peningkatan APM dan APK tingkat SD yang cukup signifikan disebabkan karena tingkat kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan jenjang pendidikan pada tingkat SD sudah cukup tinggi, selain itu ketersediaan sekolah di seluruh kecamatan juga merupakan faktor yang menentukan tingginya APM dan APK tingkat SD Kabupaten Maros. Berbanding terbalik dengan APM dan APK SD, APM dan APK SMP menunjukkan angka yang tidak terlalu tinggi, dengan kata lain masih terdapat penduduk usia 13-15 di Kabupaten Maros yang belum menempuh tingkat pendidikan SMP. Masih adanya Angka Putus Sekolah (APS) dan rendahnya Angka Melanjutkan (AM) sekolah disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih cukup rendah terhadap pendidikan lanjutan, sehingga sebagian besar masyarakat, utamanya yang bermukim di wilayah pedesaan beranggapan bahwa menyelesaikan pendidikan tingkat SD sudah cukup memadai.

2.2.2.2 Umur Harapan Hidup (UHH)

Salah satu indeks komposit penyusun IPM adalah derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah, salah satunya dapat diukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH) dan penurunan balita gizi buruk. Perkembangan UHH Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional tahun 2016-2020 disajikan pada grafik berikut :

Grafik 2.19
Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Maros, 2021

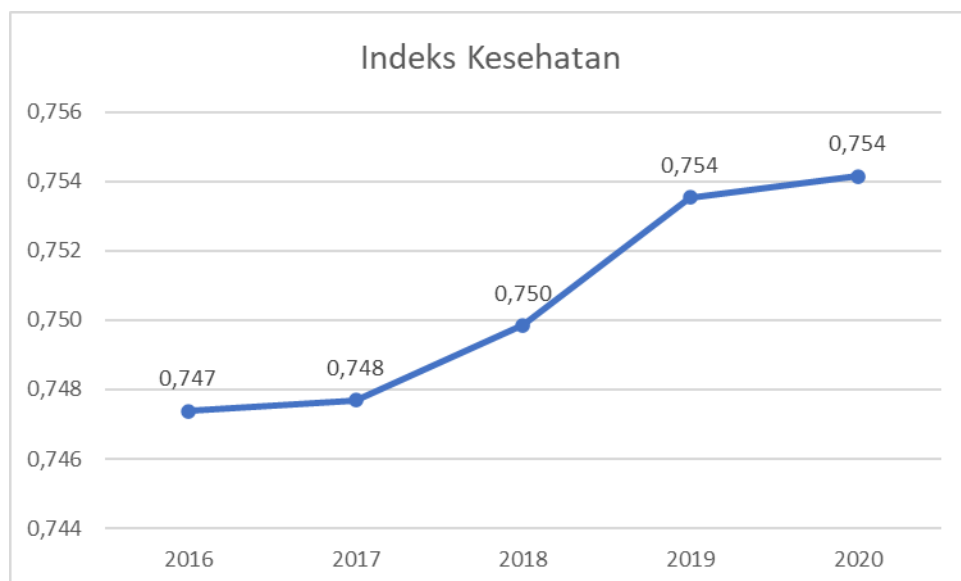
Umur Harapan Hidup Kabupaten Maros masih lebih rendah dibandingkan UHH provinsi dan nasional. Namun demikian, secara umum UHH Kabupaten Maros



menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 UHH Kabupaten Maros sebesar 68,58 tahun kemudian meningkat hingga mencapai 69,02 tahun pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang lahir pada tahun 2020 diharapkan memiliki umur kurang lebih 70 tahun.

Seperti halnya indeks pendidikan, Indeks Kesehatan juga merupakan salah satu komponen penyusun IPM, semakin tinggi nilai indeks Kesehatan maka akan semakin tinggi pula IPM. Indeks Kesehatan dihitung dengan menggunakan standarisasi nilai maksimum dan minimum umur harapan hidup. Indeks Kesehatan Kabupaten Maros juga menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020, walaupun peningkatannya sangat kecil. Pada tahun 2016 indeks Kesehatan sebesar 0,74, kemudian meningkat hingga mencapai 0,75 pada tahun 2020.

Grafik 2.20
Indeks Kesehatan Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Maros (Diolah), 2021

Untuk mencapai angka UHH yang diharapkan maka diperlukan perbaikan gizi bagi masyarakat, utamanya bagi balita. Status gizi balita di Kabupaten Maros pada umumnya menunjukkan kemajuan yang signifikan, ditandai dengan rendahnya angka prevalensi gizi buruk pada balita. Pada tahun 2016 prevalensi balita gizi buruk di Kabupaten Maros sebesar 0,01%, kemudian pada tahun 2018 sedikit meningkat 0,02%. Pada tahun 2020 prevalensi balita gizi buruk kembali menurun sebesar 0,01%. Namun seluruh balita bergizi buruk tersebut telah mendapatkan perawatan yang sesuai standar. Perkembangan prevalensi gizi buruk Kabupaten Maros selama kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.22
Prevalensi Gizi Buruk Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Balita Gizi Buruk	6	6	11	6	3
2	Jumlah Balita	49.670	50.216	50.718	51.225	51.738
3	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup menunjukkan data yang berfluktuatif setiap tahunnya, namun secara umum apabila dibandingkan dengan tahun 2016, AKI di Kabupaten Maros cenderung menurun. Pada tahun 2016, Angka Kematian Ibu sebesar 88,50 per 100.000 kelahiran, sedangkan pada tahun 2020, Angka Kematian Ibu sebesar 56,49 per 100.000 kelahiran, angka ini kembali mengalami peningkatan dibandingkan dengan AKI tahun 2019 yang hanya sebesar 44,64.

Tabel 2.23
Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	5	6	5	3	4
2	Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama	5.650	5.638	7.192	7.153	7.511
3	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	88,50	106,42	69,52	44,64	56,49

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

Selain Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi (AKB) juga merupakan indikator yang sangat menentukan dalam pencapaian komposit harapan hidup yang lebih baik. AKB Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan selama kurun waktu 2016-2020. Pada tahun 2016, AKB Kabupaten Maros sebanyak 8 orang per 1.000 kelahiran, sedangkan pada tahun 2020 menurun hingga 3 orang per 1.000 kelahiran. Hal ini menunjukkan pemberian gizi oleh puskesmas dan posyandu kepada ibu hamil dan bayi dalam kandungan sudah semakin baik.



Tabel 2.24
Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

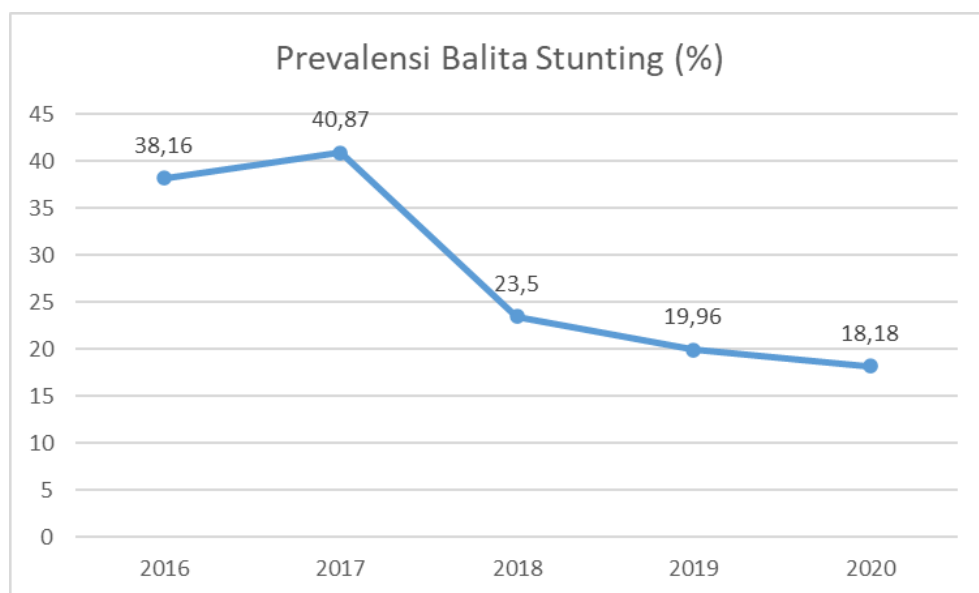
No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang dari 1 tahun) pada tahun tertentu	47	40	39	32	23
2	Jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu	5.650	5.638	7.192	7.153	7.511
3	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	8,32	7,09	5,42	4,46	3,11

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

Selain indikator diatas, indikator yang harus mendapat perhatian adalah *stunting* (kerdil), yaitu kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan umur bersangkutan. Balita *stunting* termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi.

Prevalensi balita *stunting* menunjukkan perkembangan yang makin baik dari tahun 2016 hingga tahun 2020, walaupun angka prevalensinya masih cukup tinggi. Pada tahun 2016 prevalensi balita *stunting* di Kabupaten Maros mencapai 38,16%, kemudian menurun hingga 18,18% pada tahun 2020. Semakin menurunnya prevalensi balita *stunting* ini disebabkan karena pemberian gizi yang cukup dan seimbang kepada ibu hamil serta bayi yang baru lahir.

Grafik 2.21
Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021



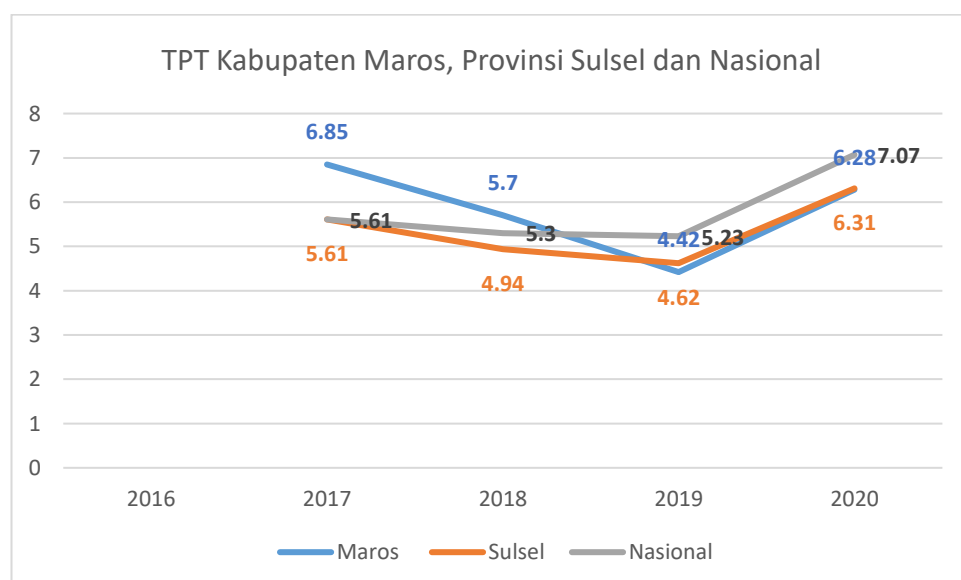
2.2.2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kabupaten Maros pada tahun 2016 hingga tahun 2019 menunjukkan tren menurun, namun pada tahun 2020 tingkat pengangguran kembali meningkat akibat tingginya tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pandemi Covid-19. Pada tahun 2017, TPT Kabupaten Maros sebesar 6,85%, kemudian menurun pada tahun 2018 hingga 5,70%, lalu pada tahun 2019 menurun hingga mencapai 4,42%. Pada tahun 2020, TPT kembali meningkat menjadi 6,28 persen.

TPT Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 6,28 persen berada di bawah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 6,31%, dan juga di bawah nasional sebesar 7,07%. Kondisi ini disebabkan pada tahun penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Maros masih cukup tinggi, dengan adanya Grand Mall. Selain itu tumbuhnya sektor-sektor usaha, utamanya rumah makan dan café yang berada di sekitar kawasan kuliner Pantai Tak Berombak (PTB) juga banyak menyerap tenaga kerja.

Gambaran perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Maros, Sulawesi Selatan, dan Nasional selama kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik 2.22
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

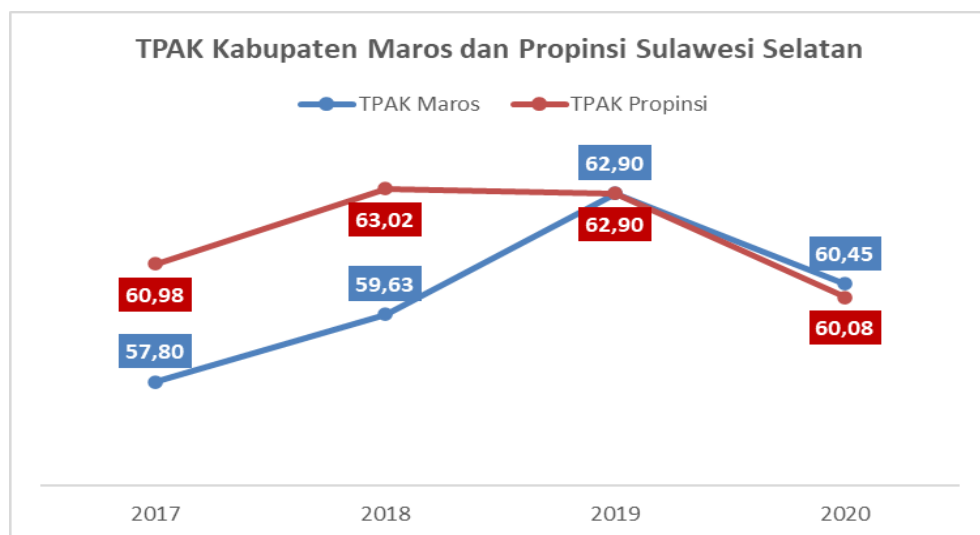


2.2.2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah jumlah penduduk angkatan kerja dibagi dengan jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun). TPAK Kabupaten Maros juga menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2017 hingga tahun 2019. Pada tahun 2016 sebesar 57,80 %, kemudian meningkat hingga mencapai 62,90 % pada tahun 2019. Pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyaknya perusahaan yang tutup akibat pembatasan skala besar, akibatnya TPT meningkat dan TPAK menurun. Pada tahun 2020 TPAK kabupaten Maros sebesar 60,45 %.

Capaian TPAK Kabupaten Maros berada dibawah capaian Propinsi Sulawesi Selatan selama tahun 2017 hingga 2018. Kemudian sejak tahun 2020 capaian TPAK Kabupaten Maros berada di atas Propinsi Sulawesi Selatan

Grafik 2.23
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Maros,
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

2.2.2.5 Rasio Penduduk Yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan tenaga kerja atau gambaran permintaan tenaga kerja.

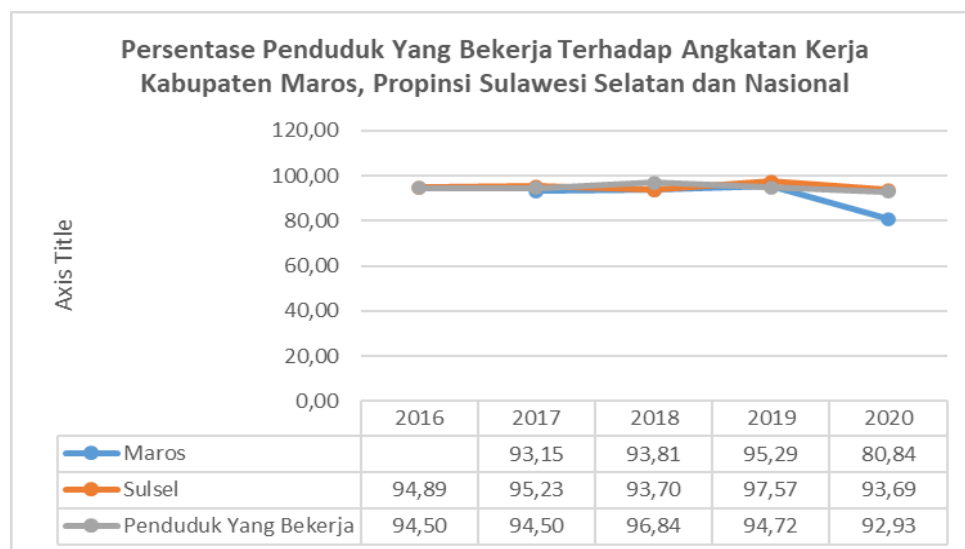
Rasio penduduk yang bekerja Kabupaten Maros pada tahun 2017 sebesar 93,15 % kemudian meningkat pada tahun 2018 sebesar 93,81 % dan 95,29 % pada tahun 2019. Pada tahun 2020 rasio penduduk bekerja mengalami penurunan sebesar 80,84



% yang disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang berakibat banyaknya tempat usaha yang tutup dan tidak beroperasi. Seperti terlihat pada tabel dibawah rasio penduduk yang bekerja sebesar 80,84 %, ini berarti dari jumlah penduduk angkatan kerja yang ada, 80,84 % telah memperoleh pekerjaan sedangkan sisinya masih mencari pekerjaan (menganggur).

Capaian rasio penduduk yang bekerja baik Kabupaten Maros maupun Propinsi Sulawesi Selatan dan nasional menunjukkan penurunan pada tahun 2020. Capaian Kabupaten Maros masih berada di bawah capaian propinsi nasional.

Grafik 2.24
Rasio Penduduk Bekerja Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

2.2.2.6 Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tenaga kerja adalah rata-rata laju pertumbuhan PDRB per kapita tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan, sedangkan data tenaga kerja yang diperlukan adalah jumlah orang yang bekerja. Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat produktivitas tenaga kerja menghasilkan nilai tambah ekonomi

Pertumbuhan PDRB per tenaga kerja pada tahun 2017 sebesar 27,53, kemudian melambat hingga mencapai 0,90 pada tahun 2018. Pada tahun 2019 pertumbuhan mengalami kontraksi sebesar -6,71 %, namun kembali tumbuh di tahun 2020 sebesar 0,05 %. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa produktivitas tenaga kerja memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap nilai tambah ekonomi,



dikarenakan nilai jasa yang dihasilkan oleh tenaga kerja tersebut merupakan salah satu faktor utama dalam menghitung nilai tambah ekonomi.

Tabel 2.25
laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produk Domestik regional Bruto	11.954,00	12.768,32	13.558,75	13.726,28	12.233,66
2	Jumlah Tenaga Kerja	0	132.854	139.816	151.722	135.151
3	PDRB Perkapita Tenaga Kerja	0,00	96,11	96,98	90,47	90,52
4	laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja	0,00	27,73	0,90	-6,71	0,05

Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

Catatan : Dikarenakan tahun 2016 data tenaga kerja tidak dirilis oleh BPS maka pertumbuhan tahun 2017 merupakan perbandingan antara tahun 2017 dengan tahun 2015 (PDRB Perkapita tenaga kerja tahun 2015 sebesar 75,25)

2.2.2.7 Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri (BS), pekerja bebas (PB), dan pekerja keluarga (PK) terhadap total kesempatan kerja adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja baik berstatus berusaha sendiri, pekerja bebas dan pekerja keluarga terhadap total penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja (dinyatakan dalam format persentase). Indikator yang digunakan untuk melihat proporsi penduduk bekerja yang memiliki pekerjaan pada kegiatan informal.

Proporsi tenaga kerja berusaha sendiri dan bebas keluarga di Kabupaten Maros pada tahun 2017 sebesar 35,38 %, kemudian pada tahun 2018 sebesar 33,95 % dan pada tahun 2019 sebesar 31,60 %. Pada tahun 2020 proporsinya meningkat hingga mencapai 37,42 %. Meningkatnya proporsi pada tahun 2020 diakibatkan banyaknya muncu usaha-usaha baru yang dilakukan oleh masyarakat yang terkena PHK akibat penutupan usaha sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Usaha tersebut muncul dikarenakan tekanan ekonomi yang sangat hebat sehingga memaksa setiap orang untuk menciptakan pekerjaan.



Grafik 2.25
Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri dan
Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Prop Sulsel, 2021

2.2.2.8 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga pra sejahtera adalah keluarga yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap anggotanya. Sehingga dari bentuk keluarga tersebut akan menghasilkan satu fokus untuk memulihkan keadaan perekonomian saja, tanpa mementingkan sosialisasi antar keluarga. Sedangkan Keluarga Sejahtera I yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi lingkungan tempat tinggal dan transportasi.

Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebesar 51,80 %, kemudian menurun pada tahun 2017 menjadi 36,99,79%. Pada tahun 2018 persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera I kembali menurun hingga mencapai 36,99 % dan pada tahun 2019 mencapai 28,32 % dan pada tahun 2020 sebesar 21,67 %.

Penurunan keluarga pra sejahtera dan sejahtera I disebabkan dampak positif disalurkan bantuan stimulan pemerintah kepada keluarga pra sejahtera, dimana bantuan yang bersifat ekonomis produktif itu diberikan kepada masing-masing keluarga pra sejahtera sebagai pendorong untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya.



Tabel 2.26
Keluarga Pras Sejahtera dan Sejahtera I
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I	57.558	44.908	32.258	24.839	19.126
2	Jumlah Keluarga	86.180	86.688	87.196	87.719	88.245
3	Keluarga Pra Sejahtera dan Pra Sejahtera I (%)	66,79	51,80	36,99	28,32	21,67

Sumber : DPPKB Kab. MARos, 2021

2.2.2.9 Persentase PAD Terhadap Pendapatan (RP Juta)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Persentase PAD terhadap pendapatan Kabupaten Maros menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Pada tahun 2016 persentase PAD sebesar 12,93 %, kemudian pada tahun 2019 sebesar 17, 83 %. Pada tahun 2020 persentase PAD sedikit menurun hingga mencapai 16,43 %.

Menurunnya peresntase PAD terhadap pendapatan pada tahun 2020 disebabkan adanya refocusing keuangan dalam rangka penanganan COVID-19, selain itu banyaknya sumber PAD yang ditutup selama pandemi juga mengakibatkan realisasi PAD selama tahun 2020 sangat jauh menurun.

Tabel 2.27
Persentase PAD Terhadap Pendapatan
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	PAD	165.024	194.999	219.845	248.671	219.158
2	Jumlah Pendapatan Daerah	1.276.664	1.340.497	1.497.907	1.394.628	1.332.222
3	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	12,93	14,55	14,68	17,83	16,45

Sumber : BPKAD Kab. Maros, 2021

2.2.2.10 Opini BPK

Selama 5 tahun terakhir opini BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Maros adalah Wajar tanpa Pengecualian (WTP), yang artinya laporan keuangan Kabupaten Maros dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji



material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Tabel 2.28
Persentase PAD Terhadap Pendapatan
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	C&C	C&C	C&C	C&C	C&C

Sumber : BPKAD Kab. Maros, 2021

2.2.2.11 Penguatan Cadangan Pangan

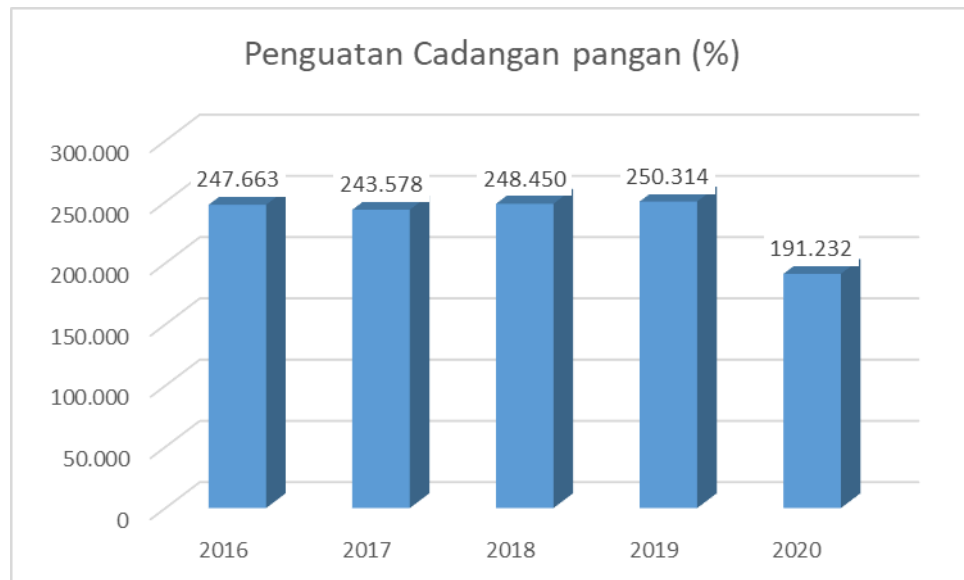
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah kabupaten, untuk dikonsumsi masyarakat, bahan baku/industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan.

Penguatan cadangan pangan memiliki peran strategis sebagai antisipasi untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan bencana alam, bencana sosial, keadaan darurat serta untuk memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional, apalagi di tengah pandemi covid-19. Keberadaan cadangan pangan daerah sangat urgen, bila Pemda memiliki cadangan pangan yang cukup tentu sangat membantu kesiapan pangan daerah dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Cadangan pangan Kabupaten Maros menunjukkan angka yang berfluktuatif selama tahun 2019 hingga tahun 2020, tahun 2016 penguatan cadangan pangan sebesar 247.633 % kemudian meningkat hingga mencapai 250.314 %. Pada tahun 2020 terdapat penurunan penguatan cadangan pangan hingga mencapai 191.232 %. Berdasarkan data-data tersebut diketahui bahwa Kabupaten Maros surplus cadangan pangan dan jumlahnya sangat cukup apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk, atau dengan kata lain Kabupaten Maros tidak akan menalami bencana kelaparan.



Grafik 2.26
Penguatan Cadangan Pangan
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Pertanian dan KP Kab. Maros, 2021

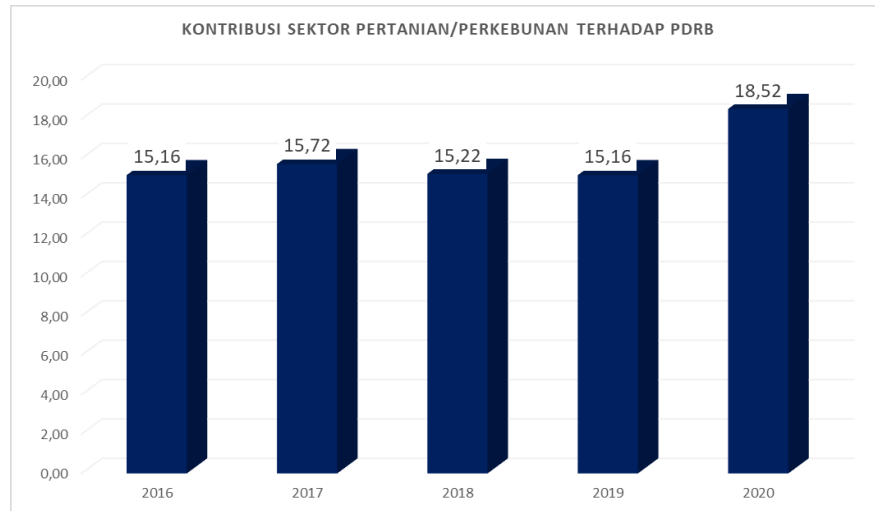
2.2.2.12 Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Selama 5 tahun terakhir, sektor yang paling besar memberikan kontribusi terhadap struktur PDRB Kabupaten Maros adalah sektor transportasi, industri dan pertanian. Tahun 2015 kontribusi sektor pertanian/perkebunan sebesar 15,16 % kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 17,72. Pada tahun 2018 terjadi penurunan kontribusi sebesar 15,22 %, kemudian menurun kembali menjadi 15,16 % pada tahun 2019. Pada tahun 2020 kontribusi sektor pertanian/perkebunan mengalami peningkatan yang signifikan dan mencapai 18,52 %.

Kontribusi sektor pertanian yang berfluktuatif hingga tahun 2019 disebabkan adanya perkembangan dari sektor lainnya dalam mendukung perekonomian Kabupaten Maros serta akibat banyaknya alih fungsi lahan pertanian yang dijadikan pemukiman. Pada tahun 2020 kontribusi sektor pertanian hingga mencapai 18% disebabkan sektor tersebut tidak terlalu terdampak akibat adanya pandemi COVID-19 dibandingkan sektor lainnya. Produksi dan jasa pertanian dan perkebunan tetap berjalan walaupun adanya pandemi.



Grafik 2.27
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

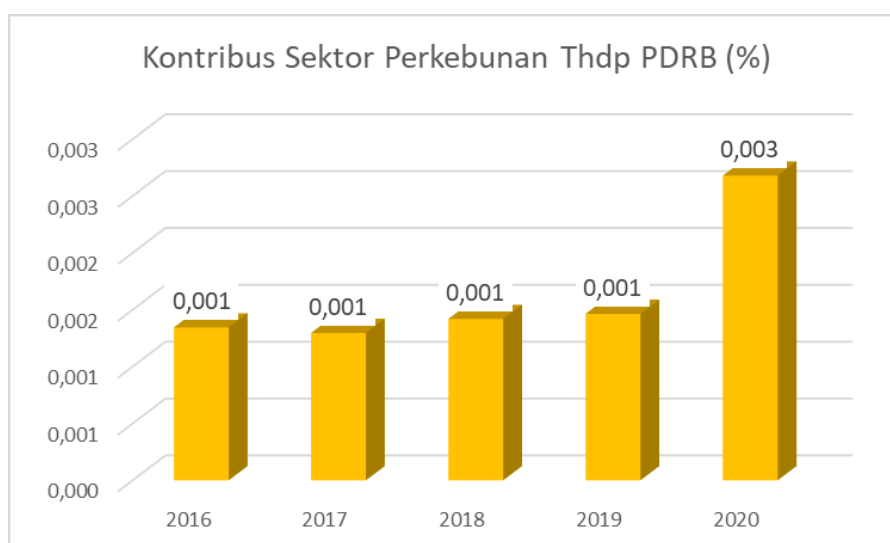


Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

2.2.2.13 Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB

Kontribusi produksi PDRB subsektor Perkebunan terhadap jumlah PDRB sektor pertanian tergolong sangat kecil, walaupun pada tahun 2020 terdapat peningkatan kontribusi. Selama tahun 2016 hingga tahun 2019, kontribusi yang diberikan dari tanaman perkebunan hanya sebesar 0,001 % kemudian meningkat hingga mencapai 0,003 % pada tahun 2020. Dengan demikian produksi subsektor perkebunan memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap struktur PDRB Kabupaten Maros

Grafik 2.28
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kab. Maros, 2021



2.2.2.14 Kontribusi Kelompok Petani Terhadap PDRB

Penghasil utama sektor pertanian di Kabupaten Maros adalah petani. Seluruh produksi dan jasa pertanian dilaksanakan oleh petani merupakan kontribusi utama dalam perhitungan PDRB sektor pertanian. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kontribusi kelompok tani terhadap PDRB sebesar 100%.

Tabel 2.29
Kontribusi Kelompok Petani Terhadap PDRB
Kabupaten Maros Tahun 2019 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok tani (ton)	486.277	485.366	495.073	504.974	437.041
2	Jumlah produksi padi/bahan pangan utama lokal di daerah	486.277	485.366	495.073	504.974	437.041
3	Kontribusi Kelompok Petani Terhadap PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : DPKP Kab. Maros, 2021

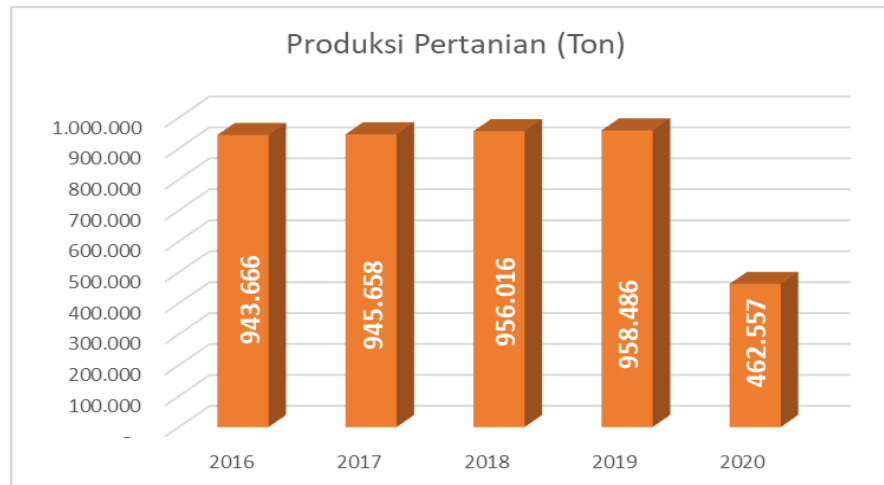
2.2.2.15 Produksi Sektor Pertanian

Produksi sektor pertanian Kabupaten Maros menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. Pada tahun 2016 jumlah produksi pertanian sebesar 943.666 ton, kemudian pada tahun 2020 meningkat hingga 958.486 ton. Pada tahun 2020, produksi pertanian mengalami penurunan cukup besar hingga mencapai 462.557 ton.

Penurunan produksi diakibatkan banyak lahan swaha yang berubah fungsi menjadi lahan pemukiman, utamanya yang berada di kecamatan-kecamatan ang berbatasan dengan Kota Makassar. Selain itu waktu panen yang bergeser ke tahun berikutnya juga merupakan faktor penyebab sektor pertanian mengalami penurunan pada tahun 2020, akibatnya waktu panen yang harus nya dilakukan pada tahun 2020, akan bergeser ke tahun 2021. Diharapkan pada tahun 2021 produksi akan Kembali meningkat.



Grafik 2.29
Produksi Pertanian Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : DPKP Kab. Maros, 2021

2.2.2.16 Produksi Sektor Perkebunan

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai; mengolah, dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Tanaman yang ditanam bukanlah tanaman yang menjadi makanan pokok maupun sayuran untuk membedakannya dengan usaha ladang dan hortikultura sayur mayur dan bunga. Tanaman yang ditanam umumnya berukuran besar dengan waktu penanaman yang relatif lama, antara kurang dari setahun hingga tahunan

Tanaman perkebunan Kabupaten Maros terdiri dari komoditi tanaman kelapa, kopi, kakao. Jumlah produksi tanaman perkebunan relative kecil, dimana pada tahun 2016 hingga tahun 2017 produksi sebesar 759,20 ton, kemudian menurun hingga 759 ton pada tahun 2018. Pada tahun 2019 produksi kembali menurun hingga mencapai 761 ton dan pada tahun 2020 menurun hingga 262 ton. Penurunan produksi perkebunan diakibatkan banyaknya lahan yang di konversi menjadi lahan untuk tanaman sayuran dan horti lainnya. Lamanya proses panen untuk tanaman perkebunan menyebabkan banyak petani yang menanami kebun dengan tanaman sayuran.



Tabel 2.30
Jumlah produksi Komoditas perkebunan
Kabupaten Maros Tahun 2019 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kelapa	125,00	125,00	126,43	126,00	21,00
2	Kopi	47,40	47,40	50,71	48,00	70,00
3	Kakao	586,80	586,80	581,87	587,00	171,00
4	Jumlah produksi Komoditas perkebunan	759,20	759,20	759,01	761,00	262,00

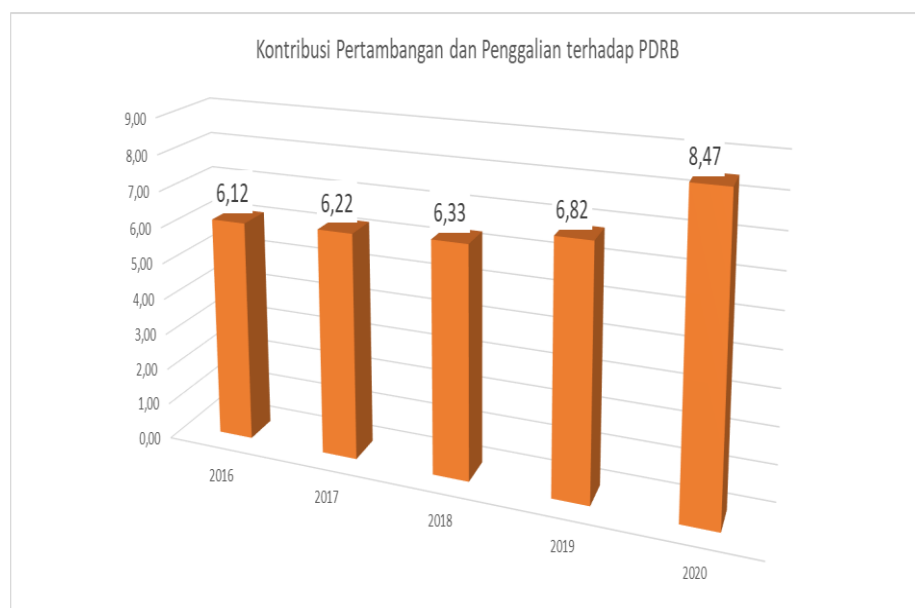
Sumber : DPKP Kab. Maros, 2021

2.2.2.17 Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten Maros tidak terlalu besar. Rata-rata kontribusi sektor pertambangan sebesar 6,41 % terhadap PDRB Kabupaten Maros. Pada tahun 2016 kontribusi sektor pertambangan sebesar 6,05 %, kemudian pada tahun 2020 meningkat hingga mencapai 8,47 %.

Tumbuhnya sektor pertambangan dengan cukup pesat pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sektor pertambangan sangat diminati oleh investor untuk berinvestasi pada sektor tersebut, namun perkembangan sektor ini harus mendapatkan perhatian khusus dikarenakan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari usaha pertambangan yang cukup besar.

Grafik 2.30
Kontribusi Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

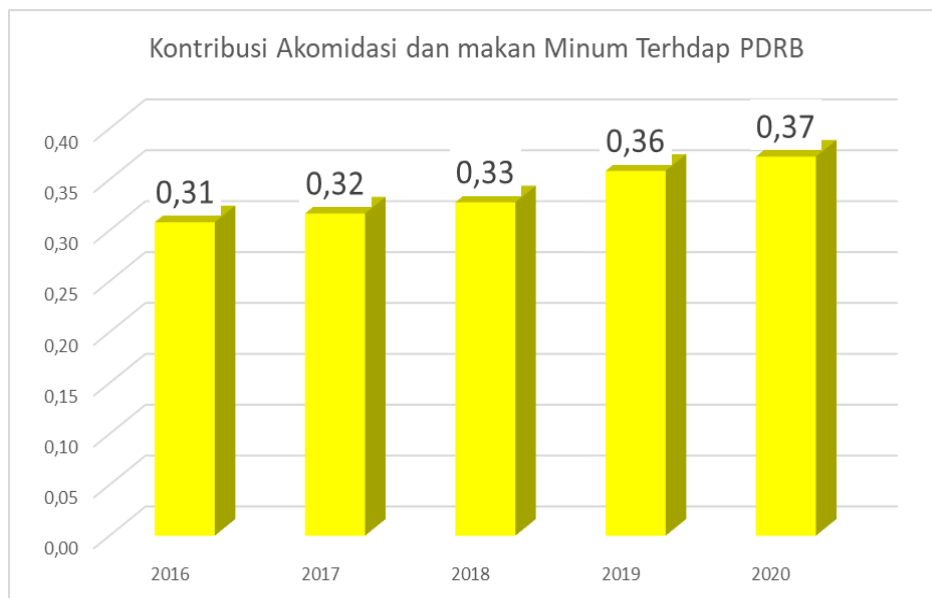


2.2.2.18 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

Untuk PDRB sektor pariwisata tidak disebutkan secara eksplisit, namun sektor pariwisata dimasukkan dalam sektor akomodasi dan makan minum, dimana yang dimaksud akomodasi dan makan minum dalam hal ini adalah akomodasi yang disiapkan bagi para pelancong serta makan dan minuman yang langsung dapat dikonsumsi.

Kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap PDRB juga tidak terlalu besar. Pada tahun 2016 kontribusi sebesar 0,31 %, kemudian meningkat menjadi 0,37 % pada tahun 2020. Tumbuhnya kontribusi sektor ini disebabkan bermunculannya usaha-usaha rumah makan dan cafe di sekitar kawasan kuliner PTB serta jalan poros trans Sulawesi. Adanya Mall yang didalamnya banyak terdapat stan makanan juga menjadi tumbuhnya sektor tersebut.

Grafik 2.31
Kontribusi Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

2.2.2.19 Kontribusi Sektor Perikanan dan Kelautan Terhadap PDRB

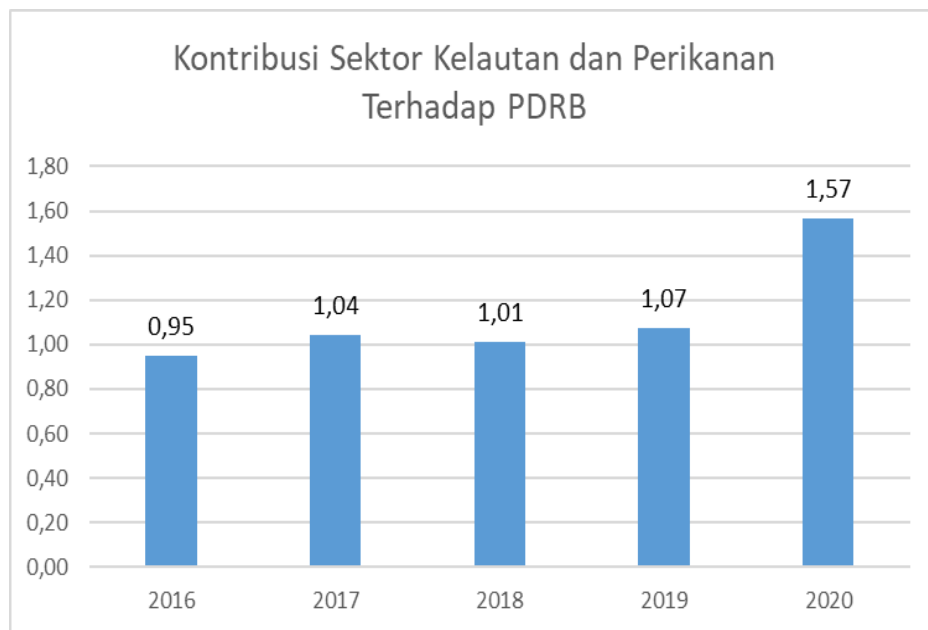
Perikanan dan kelautan dalam struktur PDRB merupakan subsektor dari sektor pertanian. Untuk Kabupaten Maros subsektor perikanan lebih banyak memberikan kontribusi melalui perikanan budidaya dibandingkan perikanan tangkap.

Dikarenakan perikanan merupakan subsektor, maka kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Maros cukup kecil. Pada tahun kontribusi terhadap PDRB sebesar 0,95 %, kemudian meningkat hingga mencapai 1,57 % pada tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan sektor pertanian, maka kontribusi subsektor perikanan



terhadap PDRB sektor pertanian cukup besar. Pada tahun 2016 kontribusi subsektor perikanan sebesar 6,27 % kemudian meningkat hingga menjadi 8,46 % pada tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan adanya peningkatan produksi pada perikanan budidaya yang cukup signifikan

Grafik 2.32
Kontribusi Perikanan dan Kelautan Terhadap PDRB
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

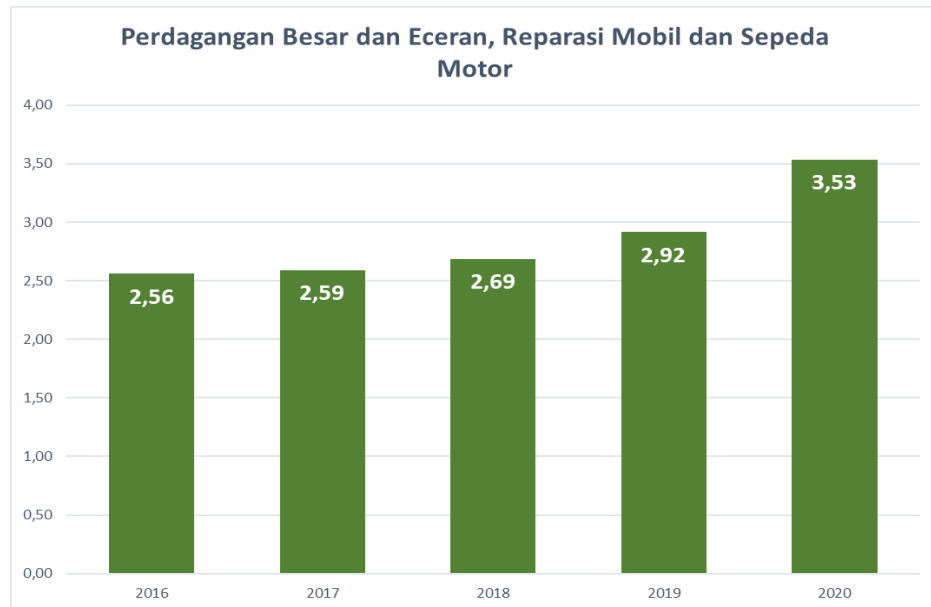
2.2.2.20 Kontribusi Sektor Perikanan dan Kelautan Terhadap PDRB

Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar menukar barang dinamakan barter yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang. Pembeli akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Maros mengalami tren peningkatan selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 kontribusi sektor perdagangan sebesar 2,56 % kemudian meningkat hingga mencapai 3,53 % pada tahun 2020. Cukup pesatnya peningkatan kontribusi dari sektor perdagangan terhadap PDRB disebabkan banyaknya tumbuh usaha-usaha ekonomi kreatif selama tahun 2020 akibat penutupan perusahaan ataupun tempat-tempat usaha berskala besar. Selain itu banyaknya bantuan pemerintah yang diberikan kepada usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah juga memberikan peranan yang cukup signifikan terhadap perdagangan di Kabupaten Maros.



Grafik 2.33
Kontribusi Perikanan dan kelautan Terhadap PDRB
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

2.2.2.21 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Industri adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi, dan distribusinya sebagai kegiatan utama. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan (ekonomi) yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah.

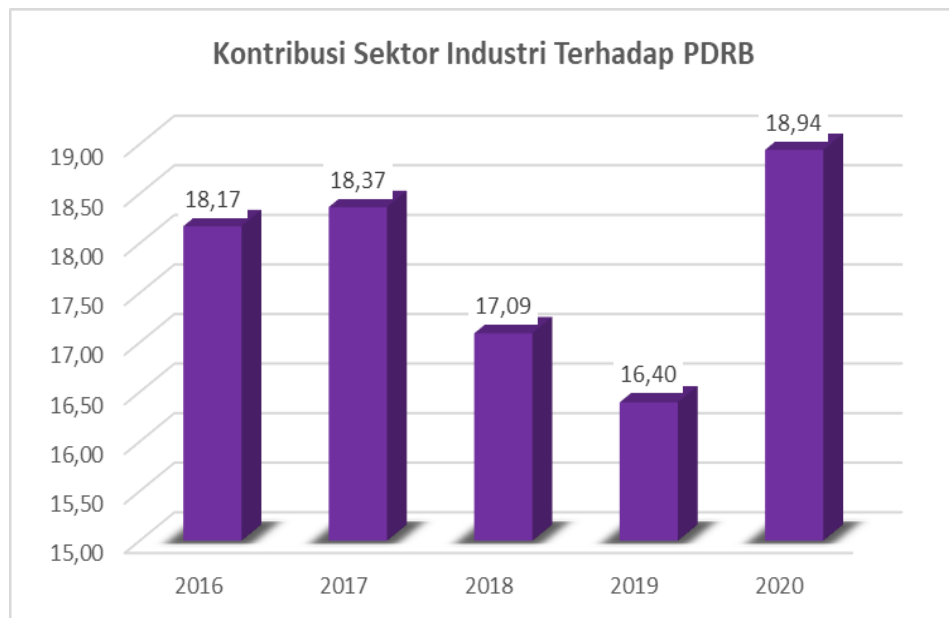
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Maros menunjukkan tren yang berfluktuatif namun cenderung menurun selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 kontribusi sebesar 18,17 % kemudian meningkat sebesar 18,37 % pada tahun 2017. Pada tahun 2019 kontribusi sektor industri menurun hingga mencapai 17,09 % dan pada tahun 2019 kembali menurun sebesar 16,40 % . pada tahun 2020 kontribusi sektor industri meningkat pesat hingga mencapai 18,94 %.

Selama tahun 2016 hingga tahun 2019 kontribusi sektor industri menurun disebabkan lesunya industri. Peningkatan kontribusi sektor industri pada tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh produksi industri besar seperti Semen Bosowa dan Pabrik The Gelas. Sedangkan pada tahun 2020 sektor industri mengalami



peningkatan diakibatkan banyaknya tumbuh industry-industri kecil yang baru, sedangkan industry-industri besar banyak yang berhenti beroperasi selama pandemi tahun 2020.

Grafik 2.34
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

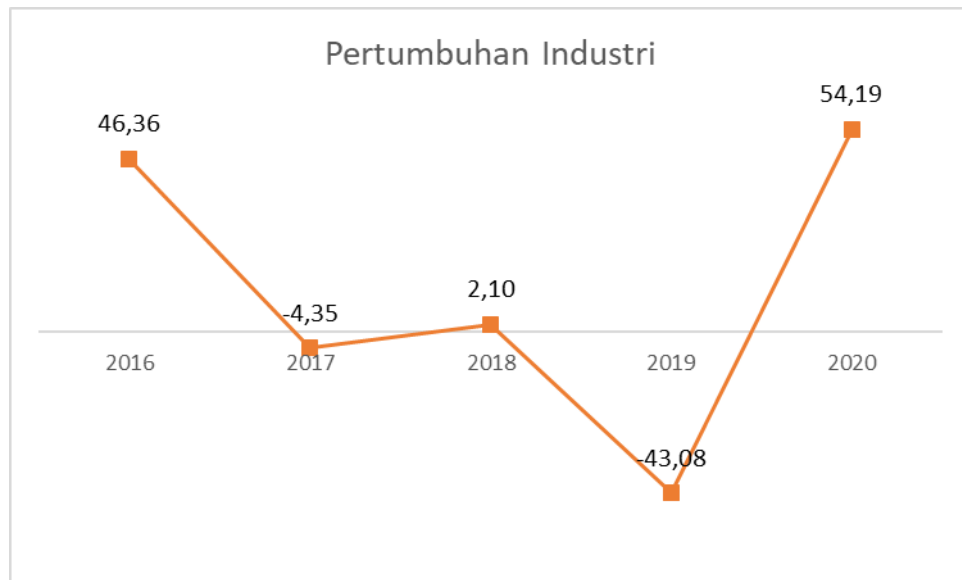
2.2.2.22 Pertumbuhan Industri

Industri adalah bidang yang menggunakan keterampilan, dan ketekunan kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi, dan distribusinya sebagai dasarnya. Tipe industri di Kabupaten Maros umumnya adalah industri menengah dan kecil. Jumlah industri setiap tahunnya berfluktuasi.

Pada tahun 2016 jumlah industri di kabupaten Maros sebanyak 322 industri, kemudian berkurang menjadi 308 industri 2017 dan pada tahun 2018 sebanyak 314 industri. Pada tahun 2019 terjadi penurunan jumlah industri hingga menjadi 179 industri kemudian bertambah menjadi 276 pada tahun 2020. Pertumbuhan industri di kabupaten Maros selama tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan angka yang berfluktuatif. Penurunan jumlah industri pada tahun 2019 disebabkan pendataan ulang yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal terhadap industri kecil yang masih aktif.



Grafik 2.35
Pertumbuhan Industri
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : DMPTSP Kab. Maros, 2021

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan dan pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya insani, terutama diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas tinggi. Di samping itu, pembangunan seni, budaya dan olahraga juga dijadikan sebagai alat untuk menunjukkan eksistensi bangsa melalui pembinaan prestasi yang setinggi-tingginya.

Tabel 2.31
Perkembangan Kesenian, Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Maros
Kabupaten Maros Tahun 2020

NO	Kecamatan	Jumlah Grup Kesenian Per.10.000 penduduk	Jumlah Gedung Kesenian Per 10.000 penduduk	Jumlah Club Olahraga 10.000 Penduduk	Jumlah Gedung Olahraga Per 10.000 Penduduk
1	Mandai	2	-	2	-
2	Moncongloe	-	-	1	-
3	Maros Baru	-	-	1	-
4	Marusu	-	-	2	-
5	Turikale	3	1	8	-
6	Lau	2	-	1	-
7	Bontoa	2	-	1	-
8	Bantimurung	3	-	3	-
9	Simbang	2	-	2	-
10	Tanralili	-	-	1	-
11	Tompobulu	-	-	1	-



12	Camba	-	-	1	-
13	Cenrana	-	-	1	-
14	Mallawa	-	-	1	-
JUMLAH		14	1	27	-

Sumber : Dispora dan Disbudpar Kab. Maros, 2021

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.3.1.1 Pendidikan

2.3.1.1.1 Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani.

Pada tahun 2016 pendidikan anak usia dini Kabupaten Maros sebesar 36,74 % dengan jumlah siswa sebanyak 7.795 orang, kemudian pada tahun 2019 meningkat hingga mencapai 38,02 % dengan jumlah siswa sebanyak 8.169. Pada tahun 2020 terdapat pendurunan anak yang mengikuti pendidikan usia dini, jumlah siswa pada tahun 2020 sebanyak 11.432 orang dengan persentase sebesar 53,23 %.

Secara umum partisipasi anak-anak pada pendidikan anak usia dini sangat kurang, rata-rata anak yang mengikuti hanya 8 ribu anak dari 21 ribu penduduk usia 4-6 tahun. Hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang menganggap pendidikan usia dini tidaklah penting sehingga banyak anak-anak yang memulai tahap pendidikan langsung pada tingkat dasar (SD).

Tabel 2.32
Persentase Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	jumlah siswa pada jenjang TK/RA/PA	7.795	8.008	8.088	8.169	11.432
2	Jumlah anak usia 4 - 6 tahun	21.214	21.318	21.408	21.486	21.475
3	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	36,74	37,56	37,78	38,02	53,23

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021



Tabel 2.33
Jumlah Peserta Didik Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)

NO	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA DIDIK		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Bantimurung	488	351	839
2	Camba	261	191	452
3	Cenrana	284	289	573
4	Lau	416	291	707
5	Mallawa	444	303	747
6	Mandai	475	330	805
7	Maros Baru	507	379	886
8	Bontoa	542	410	952
9	Marusu	558	377	935
10	Moncongloe	519	315	834
11	Simbang	410	346	756
12	Tanralili	611	573	1184
13	Tompobulu	280	216	496
14	Turikale	734	532	1266
JUMLAH		6.529	4.903	11.432

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021

2.3.1.1.2 Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah persentase siswa pada tingkat akhir pada setiap jenjang pendidikan yang lulus dari jenjang pendidikan tersebut. Angka kelulusan untuk tingkat pendidikan dasar menunjukkan kondisi yang cukup baik. Dimana pada tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan persentase diatas 99 %. Hal ini menunjukkan bahwa hamper seluruh siswa dapat memahami materi pendidikan yang diberikan, walaupun pada tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19, ujian kelulusan untuk seluruh tingkatan pendidikan dsar ditiadaka, dimana tingkat kelulusan hanya berpatokan kepada nilai angka tertinggi yang diperoleh siswa tersebut.

Tabel 2.34
Angka Kelulusan kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelulusan pada jenjang SD/MI	6.732	6.847	6.666	6.750	6.820
2	Jumlah siswa tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun sebelumnya	6.756	6.851	6.751	7.040	6.841
5	AL SD/MI	99,64	99,94	98,74	95,88	99,69
6	Jumlah kelulusan pada jenjang SMP/MTs	6213	6.236	6.284	6.367	6.430



No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
7	Jumlah siswa tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun sebelumnya	6269	6.241	6.293	6.374	6.434
8	AL SMP/MTs	99,11	99,92	99,86	99,89	99,94
9	AL MAROS	99,38	99,93	99,30	97,89	99,82

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021

2.3.1.1.3 Angka Pendidikan Ditamatkan

Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT) merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. APT Kabupaten MARos pada tahun 2017 sebesar 57,93 %, kemudian meningkat hingga mencapai 63,73 % pada tahun 2019. Pada tahun 2020 terdapat penurunan APT dengan persentase sebesar 57,53 %.

Penurunan APT pada tahun 2020 disebabkan adanya migrasi penduduk yang cukup tinggi yang terjadi di wilayah kecamatan yang berbatasan dengan Kota Makassar, seperti Kecamatan Moncongloe, Mandai dan Marusu. Hal ini dapat terlihat dengan jumlah penduduk 15 tahun yang memiliki pendidikan pada tahun 2020 sebesar 166.446 orang, meningkat dibandingkan tahun 2019.

Tabel 2.35
Angka Pendidikan Ditamatkan
kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas menurut tingkat pendidikan tertinggi yang di tamatkan	-	142.621	149.049	160.973	166.446
2	Jumlah Penduduk 15 keatas	242.790	246.179	249.456	252.588	289.309
3	Angka Pendidikan Yang Ditamatkan	-	57,93	59,75	63,73	57,53

2.3.1.1.4 Jumlah Sekolah Pendidikan Dasar

Ketersediaan sarana prasarana Pendidikan juga merupakan faktor penting dalam upaya pemerataan dan perluasan pendidikan, baik dari ketersediaan sekolah, kelas ataupun guru. Dengan demikian jika ketersediaan ruang kelas dan guru pengajar masih kurang memadai maka dibutuhkan perhatian untuk memperlancar proses belajar mengajar pada tingkat Pendidikan Dasar. Data



ketersediaan sekolah pada tingkat Pendidikan dasar di Kabupaten Maros tahun 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.36
Jumlah Sekolah SD, SMP, MI dan MTs
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD	286	260	260	237	264
2	SMP	115	73	73	69	76
3	MI	28	28	28	28	28
4	MTs	44	44	44	46	46
JUMLAH		473	405	405	380	414

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021

Tabel 2.37
Jumlah Sekolah SD, SMP, MI dan MTs Per Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Kecamatan/Sekolah	SD	SMP	MI	MTs
1	Mandai	19	7	3	3
2	Moncongloe	8	5	1	2
3	Maros Baru	18	6	1	3
4	Marusu	14	4	3	4
5	Turikale	26	8	3	5
6	Lau	16	6	1	5
7	Bontoa	25	6	2	2
8	Bantimurung	27	6	3	5
9	Simbang	19	4	3	4
10	Tanralili	20	3	2	3
11	Tompu Bulu	14	6	3	6
12	Camba	21	6	1	2
13	Cenrana	20	5	1	1
14	Mallawa	17	4	1	1
Maros		264	76	28	46

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021

2.3.1.1.5 Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.

Berdasarkan rasio ketersediaan sekolah dasar (SD) pada tahun 2016, menunjukkan bahwa rasio sekolah dibandingkan jumlah penduduk usia 7-12 sebesar 67,25 sekolah untuk 10.000 penduduk, kemudian meningkat hingga mencapai 68,92 sekolah untuk 10.000 penduduk. Rasio ketersediaan SD tahun 2020 sedikit lebih tinggi dikarenakan adanya regrouping yang dilakukan pada tahun



2019, dimana terdapat beberapa sekolah yang dipisahkan dikarenakan jaraknya yang terlalu jauh. Secara umum ketersediaan SD tahun 2020 di Kabupaten Maros masih cukup memadai dari segi jumlah sehingga tidak terjadi penumpukan siswa pada sekolah (*over kapasitas*).

Sebaliknya untuk sekolah SMP masih diperlukan penambahan gedung sekolah, dikarenakan jumlah sekolah sangat sedikit dibandingkan jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun. Pada tahun 2016 rasio ketersediaan SMP sebesar 65,92 sekolah untuk 10.000 penduduk kemudian pada tahun 2020 sebesar 49,30 sekolah untuk 10.000 penduduk. Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai 2020 sebanyak 124 orang, disisi lain jumlah Gedung SMP justru mengalami penurunan dari 159 gedung sekolah di tahun 2016 menjadi 122 gedung pada tahun 2020.

Penurunan jumlah sekolah baik itu SD/MI maupun SMP/MTs, disebabkan adanya penggabungan beberapa sekolah menjadi satu sekolah. Penggabungan ini dilakukan karena jarak antara satu sekolah dengan sekolah lainnya yang cukup dekat sedangkan jumlah siswa yang bersekolah di tempat tersebut sangat sedikit

Secara keseluruhan, ketersediaan sekolah di jenjang SD sudah cukup memadai, namun tidak demikian halnya dengan ketersediaan sekolah tingkat SMP. Rasio ketersediaan sekolah dibandingkan jumlah penduduk usia sekolah Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.38
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

NO	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
	SD/MI					
1	Jumlah Gedung Sekolah	260	288	288	265	292
2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7 – 12 Tahun	38.661	38.829	39.085	41.474	42.368
3	Rasio	67,25	74,17	73,69	63,90	68,92
	SMP / MTs					
4	Jumlah Gedung Sekolah	159	117	117	115	122
5	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13 – 15 Tahun	24.621	24.690	24.590	24.690	24.745
6	Rasio	64,58	47,39	47,58	46,58	49,30



7	Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Pendidikan Dasar	65,92	60,78	60,63	55,24	59,11
---	--	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021

2.3.1.1.6 Ketersediaan Sekolah Dalam Kondisi Baik

Selain ketersediaan Gedung sekolah, kondisi fasilitas pendidikan juga merupakan faktor yang sangat penting dalam peningkatan kualitas Pendidikan. Sekolah SD/MI maupun SMP/MTs dalam kondisi baik, meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah kondisi sekolah (SD/MI dan SMP/MTs) dalam keadaan baik sebesar 91,47% kemudian meningkat hingga mencapai 95,59% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena sektor pendidikan utamanya sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional dan Kabupaten Maros selama sepuluh tahun terakhir. Kondisi sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Maros kurun waktu tahun 2016- 2020 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.39

Ketersediaan Sekolah dan Kondisi Sekolah Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sekolah pendidikan SD/MI kondisi baik	290	275	254	226	281
2	Jumlah sekolah seluruh SD/MI	314	288	263	237	292
	Sekolah SD/MI dalam kondisi baik (%)	92,66	95,38	96,54	95,39	96,23
3	Jumlah sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi baik	145	109	111	108	117
4	Jumlah sekolah seluruh SMP/MTs	159	117	117	115	122
	Sekolah SMP/MTs dalam kondisi baik (%)	90,28	90,27	93,15	91,89	94,95
	Total Sekolah dalam Kondisi Baik (%)	91,47	92,83	94,85	93,64	95,59

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021

2.3.1.1.7 Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio guru terhadap murid Kabupaten Maros menunjukkan angka yang cenderung menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2016 rasio guru terhadap murid pendidikan dasar (SD dan SMP) sebesar 890 guru untuk setiap 10.000 murid atau 1 orang guru menagani 11 orang murid. Pada tahun 2020, rasio guru terhadap murid mencapai 637 guru untuk setiap 10.000 orang murid atau 1 guru menangani 16 orang murid.



Secara umum kondisi rasio guru terhadap murid di Kabupaten Maros tergolong ideal (baik), dikarenakan rasio guru terhadap murid yang seimbang adalah 1 guru berbanding 20 murid. Namun apabila dilihat dari tren data yang ada maka harus menjadi perhatian, dikarenakan berdasarkan data tersebut terlihat bahwa semakin tahun jumlah guru semakin berkurang, sedangkan jumlah murid yang harus ditangani terus meningkat. Rasio guru terhadap murid SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Maros selama kurun waktu tahun 2016- 2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.40
Rasio Ketersediaan Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
I	SD					
1	Jumlah Guru	2.695	2.375	2.358	2.270	2.361
2	Jumlah Murid	35.227	35.441	35.578	40.163	44.119
3	Rasio	765,04	670,13	662,77	565,20	535,10
II	SMP					
1	Jumlah Guru	1.152	1.103	1.058	1.074	1.149
2	Jumlah Murid	11.349	11.346	11.333	15.208	15.520
3	Rasio	1.015,07	972,15	933,56	706,21	740,34
	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	890,05	821,14	798,16	635,70	637,72

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021

Tabel 2.41
Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Dasar Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah Guru SD	Jumlah Murid SD/MI/S LB/ Paket A	Rasio Guru /Murid SD	Jumlah Guru SMP	Jumlah Murid SMP	Rasio Guru /Murid SD	Rasio Guru dan Murid Pendidikan dasar
1	Mandai	253	9.507	266,12	124	2.120	584,91	425,51
2	Maros Baru	152	5.720	265,73	69	716	963,69	614,71
3	Bontoa	201	6.219	323,20	74	971	762,10	542,65
4	Bantimurung	216	6.694	322,68	102	1.131	901,86	612,27
5	Tanralili	172	6.319	272,19	45	1.963	229,24	250,72
6	Camba	142	2.436	582,92	73	1.807	403,98	493,45
7	Mallawa	118	2.512	469,75	45	807	557,62	513,68
8	Moncongloe	93	3.669	253,48	54	1.631	331,09	292,28
9	Turikale	302	10.562	285,93	120	1.030	1165,05	725,49
10	Marusu	162	6.568	246,65	71	790	898,73	572,69
11	Lau	161	6.174	260,77	121	659	1836,12	1048,44
12	Simbang	149	4.938	301,74	72	784	918,37	610,05
13	Tompobulu	104	3.338	311,56	38	597	636,52	474,04
14	Cenrana	136	2.907	467,84	58	514	1128,40	798,12
	Maros	2.361	44.119	535,14	1.149	15.520	740,34	637,74

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021

**2.3.1.1.8 Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata**

Rasio guru/murid per kelas rata-rata adalah perbandingan antara jumlah guru, siswa dengan jumlah kelas atau kelompok belajar. Indikator ini mempunyai kegunaan untuk mengetahui rata-rata daya tampung guru dan siswa dalam satu kelas.

Rasio guru/murid terhadap kelas rata-rata di Kabupaten Maros menunjukkan angka yang terbilang ideal, dimana daya tampung per kelas maksimal 32 murid. Berdasarkan data tahun 2016-2020, jumlah guru sekolah Pendidikan dasar per kelas rata-rata 1 sampai 2 orang, dengan jumlah murid per kelas antara 21 sampai 34 orang. Hal ini berarti ketersediaan ruang kelas sudah cukup memadai dengan jumlah guru dan murid yang ada. Rasio guru/murid per kelas rata-rata di Kabupaten Maros kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42
Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah guru sekolah pendidikan dasar	3.847	3.478	3.416	3.344	3.510
2	Jumlah murid pendidikan dasar	46.576	46.787	46.911	55.371	59.639
3	Jumlah Kelas	2.229	1.947	1.797	1.629	1.980
4	Jumlah Guru sekolah pendidikan dasar per kelas	1,73	1,79	1,90	2,05	1,77
5	Jumlah murid pendidikan dasar per kelas	20,90	24,03	26,11	33,99	30,12

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021

Pada tahun 2020, rasio guru/murid per kelas rata-rata tertinggi berada di Kecamatan Mallawa dengan nilai 56,71 kelas untuk setiap 1.000 guru/murid. Sedangkan rasio terendah berada di Kecamatan Turikale dengan rasio 26,20 kelas untuk setiap 1.000 guru/murid. Kondisi rasio guru/murid per kelas rata-rata setiap kecamatan di Kabupaten Maros tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43
Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Guru Pendidikan Dasar	Jumlah Siswa Pendidikan Dasar	Jumlah Kelas Pendidikan Dasar	Rasio Guru Per Kelas	Rasio Siswa Per Kelas	Rasio Guru/Murid Per Kelas rata-Rata Sekolah Dasar
Mandai	377	11.627	153	2,46	75,99	32,42
Moncongloe	221	6.436	69	3,20	93,28	34,34
Maros Baru	275	7.190	132	2,08	54,47	38,25
Marusu	318	7.825	114	2,79	68,64	40,64



Turikale	217	8.282	198	1,10	41,83	26,20
Lau	215	4.243	120	1,79	35,36	50,67
Bontoa	163	3.319	180	0,91	18,44	49,11
Bantimurung	147	5.300	198	0,74	26,77	27,74
Simbang	422	11.592	144	2,93	80,50	36,40
Tanralili	233	7.358	141	1,65	52,18	31,67
Tompu Bulu	282	6.833	120	2,35	56,94	41,27
Camba	221	5.722	150	1,47	38,15	38,62
Cenrana	142	3.935	141	1,01	27,91	36,09
Mallawa	194	3.421	120	1,62	28,51	56,71
Maros	3.510	59.639	1.980	1,77	30,12	58,85

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021

2.3.1.1.9 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15-24 Tahun

Melek huruf adalah adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi. Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas.

Angka melek huruf Kabupaten Maros mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, penduduk usia 15-24 tahun yang melek huruf sebesar 95,55%, kemudian meningkat pada tahun 2020 sebesar 99,66%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk usia 15-24 tahun di Kabupaten Maros telah memiliki kemampuan membaca dan menulis.

Tingginya angka melek huruf pada penduduk usia 15-24 tahun di Kabupaten Maros disebabkan karena hampir seluruh penduduk pada usia tersebut telah mengenyam pendidikan terakhir setingkat SD, dimana pada tingkatan sekolah tersebut, setiap siswa diwajibkan memiliki kemampuan baca tulis. Perkembangan angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun selama kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.44
Angka Melek Huruf Penduduk usia 15-24 Tahun
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Banyaknya penduduk usia 15-24 yang melek huruf	61.200	62.400	62.800	64.706	64.707
2	Banyaknya penduduk usia 15-24	64.049	64.425	64.655	64.732	64.733



3	Angka Melek Huruf Penduduk usia 15-24 Tahun (Perempuan dan Laki-Laki)	95,55	96,86	97,13	99,96	99,96
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021

2.3.1.1.10 Angka Melek Huruf Penduduk Usia Diatas 15 Tahun

Angka melek huruf penduduk berusia diatas 15 tahun adalah jumlah penduduk berumur diatas 15 tahun yang dapat membaca dan menulis dengan lancar dan jelas. Seperti halnya dengan angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf di Kabupaten Maros juga menunjukkan persentase yang cukup tinggi. Pada tahun 2016 angka melek huruf sebesar 99,99% kemudian sedikit menurun pada tahun 2020 dengan persentase sebesar 99,80%. Penurunan ini disebabkan terdapat beberapa orang penduduk usia 75 tahun keatas yang tidak memiliki kemampuan baca tulis dan tidak dapat lagi mengikuti pendidikan kesetaraan disebabkan umur dan kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Perkembangan angka melek huruf penduduk usia diatas 15 tahun selama kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.45
Angka Melek Huruf Penduduk Usia > 15 Tahun
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk berusia > 15 tahun	242.766	246.130	248.932	250.643	254.604
2	Jumlah penduduk berusia > 15 tahun melek huruf	242.790	246.179	249.456	252.588	255.114
3	Penduduk Usia > 15 tahun melek huruf (Tidak Buta Aksara)	99,99	99,98	99,79	99,23	99,80

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021

2.3.1.1.11 Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV adalah tingkat pendidikan setiap guru yang telah menempuh jenjang S1 dan D-IV. Pada tahun 2016 jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 22,61 %. Sedangkan pada tahun 2020 meningkat hingga mencapai 88,87 %. Terdapat peningkatan kualifikasi guru yang memenuhi S1/D-IV, walaupun terdapat pengurangan jumlah guru secara keseluruhan.



Tabel 2.46
Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV	870	2236	3192	2862	3119
Jumlah guru (SD/MI+SMP/MTs)	3.847	3.478	3.416	3.344	3.510
Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	22,61	64,28	93,43	85,58	88,87

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2 Kesehatan

Kualitas sumberdaya manusia sangat dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat salah satunya ditandai dengan meningkatnya Angka harapan Hidup (AHH) dan Perilaku Masyarakat Hidup Bersih dan sehat (PHBS) serta penyediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga atau kelompok atau masyarakat yang mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.

2.3.1.2.1 Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah jumlah bayi yang lahir hidup per 1000 kelahiran bayi. Kondisi AKHB di Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebesar 991,68 bayi lahir hidup dari 1000 bayi yang lahir, kemudian meningkat menjadi 996,89 kelahiran hidup setiap 1.000 bayi yang lahir di tahun 2020. Hal ini menunjukkan intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap kondisi kesehatan ibu mengandung cukup baik sehingga angka kematian bayi dapat ditekan. Dengan demikian angka kelahiran hidup bayi cukup tinggi. Beberapa intervensi yang dilakukan diantaranya pemberian vitamin dan peningkatan gizi, baik pada ibu yang mengandung maupun kepada bayi baru lahir. Di samping itu, tingkat kecukupan bidan dan polindes, kecukupan dokter dan puskesmas di tingkat kecamatan terus mendapat perhatian. Gambaran perkembangan angka kelangsungan hidup bayi selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Grafik 2.36
Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.2 Angka Kematian Balita

Angka Kematian Balita adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun pada tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). Angka Kematian Balita Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 3 balita per 1000 anak umur 0-4 tahun, dengan jumlah balita yang meninggal sebanyak 23 orang. Angka tersebut menunjukkan penurunan yang cukup signifikan jika dilihat dari angka kematian bayi pada tahun-tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2016, Angka Kematian Balita sekitar 9 balita/1000 kelahiran hidup, dengan jumlah balita yang meninggal sekitar 50 orang.

Penurunan angka kematian balita ini disebabkan program pemberian gizi dan imunisasi yang lengkap kepada balita berjalan dengan baik, dimana ibu dan balita tersebut diberikan akses yang seluas-luasnya oleh Pemerintah Kabupaten Maros untuk mendapatkan imunisasi lengkap serta gizi tambahan melalui pelayanan di puskesmas maupu di posyandu. Gambaran perkembangan angka kematian bayi Kabupaten Maros selama kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.47
Angka Kematian Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kematian balita (berumur kurang dari 5 tahun) pada satu tahun tertentu	50	42	41	34	23



2	Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu	5.650	5.638	7.192	7.153	7.511
3	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	8,85	7,45	5,70	4,76	3,11

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.3 Angka Kematian Neonatal (AKN)

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah banyaknya kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama (dinyatakan dengan per 1000 kelahiran hidup) setelah dilahirkan. Umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan.

Kematian neonatal sebagian besar terjadi pada jarak kelahiran dengan kelahiran sebelumnya kurang dari 12 bulan. Di samping itu bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram juga beresiko mengalami kematian neonatal. Untuk mengurangi resiko terjadinya kematian neonatal perlu dilakukan pembinaan dan intervensi pada ibu hamil yang berpendidikan rendah, serta pembinaan untuk mengatur jarak kelahiran lebih dari 12 bulan.

Angka Kematian Neonatal Kabupaten Maros menunjukkan penurunan yang cukup signifikan selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 AKN sebesar 6 balita setiap 1.000 kelahiran hidup, dengan jumlah bayi yang meninggal sebanyak 34 bayi. Sedangkan pada tahun 2020, AKN Kabupaten Maros sekitar 2-3 balita per 1.000 kelahiran, dengan jumlah bayi yang meninggal sebanyak 21 bayi. Perkembangan angka kematian neonatal Kabupaten Maros selama kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.48
Angka Kematian Neonatal Per 1.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang dari 1 Bulan) pada satu tahun tertentu	34	33	32	21	21
2	Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu	5.650	5.638	7.192	7.153	7.511
3	Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup	6,02	5,85	4,45	2,98	2,82

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021



2.3.1.2.4 Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Keberadaan Posyandu yang lebih dekat dengan masyarakat, maka diharapkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai. Idealnya satu posyandu melayani tidak lebih dari 100 balita.

Jumlah posyandu di Kabupaten Maros menunjukkan tren positif selama kurun waktu tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 jumlah posyandu sebanyak 395 unit, kemudian meningkat hingga mencapai 506 unit pada tahun 2020. Berdasarkan data rasio posyandu yang terlihat pada tabel di bawah, maka diketahui bahwa pada tahun 2020 jumlah posyandu di kabupaten Maros sudah cukup ideal, dimana 1 posyandu dapat melayani 83 balita (11,99 posyandu per 1.000 orang balita).

Meningkatnya rasio posyandu disebabkan Pemerintah Kabupaten Maros bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK aktif melakukan pendirian posyandu-posyandu di daerah pedesaan, utamanya yang cukup sulit terjangkau oleh pelayanan puskesmas. Selain melakukan pendirian Posyandu, Pemerintah bersama PKK juga aktif melakukan perekrutan kader posyandu yang akan melakukan pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan rasio posyandu per satuan balita Kabupaten Maros selama kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.49
Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah posyandu	395	399	404	496	506
2	Jumlah balita	49.670	50.216	42.238	42.238	42.238
3	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	7,95	7,95	9,56	11,75	11,99

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.5 Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Poliklinik Per Satuan Penduduk

Rasio puskesmas, puskesmas pembantu, dan poliklinik Kabupaten Maros selama kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan tren peningkatan. Meningkatnya rasio puskesmas, puskesmas pembantu, dan poliklinik menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan semakin meningkat. Berdasarkan rasio tersebut dapat diketahui bahwa pelayanan kesehatan penduduk di Kabupaten Maros, baik melalui



puskesmas, puskesmas pembantu maupun melalui poliklinik yang dikelola oleh swasta dapat menjangkau hampir seluruh penduduk Kabupaten Maros.

Pada tahun 2016 rasio puskesmas, pustu dan poliklinik sebesar 0,12, dengan jumlah puskesmas, pustu dan poliklinik sebanyak 40 unit. Pada tahun 2020 rasio rasio puskesmas, pustu dan poliklinik kemudian meningkat menjadi 0,19, dengan jumlah puskesmas, pustu dan poliklinik sebanyak 73 unit. Perkembangan rasio puskesmas, puskesmas pembantu, dan poliklinik per satuan penduduk Kabupaten Maros selama kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.50
Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik Per Satuan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Puskesmas, Pustu, Poliklinik	40	40	48	51	73
2	Jumlah Penduduk	342.890	346.383	349.822	353.121	391.774
3	Rasio Puskesmas, Pustu, Poliklinik Per Satuan Penduduk	0,12	0,12	0,14	0,14	0,19

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

Tabel 2.51
Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik Per Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Kecamatan	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Klinik
1	Mandai	1	4	2
2	Moncongloe	1	1	0
3	Maros Baru	2	2	0
4	Marusu	1	3	1
5	Turikale	1	2	5
6	Lau	2	0	0
7	Bontoa	2	7	0
8	Bantimurung	1	4	2
9	Simbang	0	6	4
10	Tanralili	1	0	1
11	Tompobulu	1	4	0
12	Camba	1	2	0
13	Cenrana	1	2	0
14	Mallawa	1	5	0
Maros		16	42	15

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.6 Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Maros sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 tidak mengalami peningkatan, yakni sebanyak 2 unit. Disisi lain jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat. Artinya, secara umum jumlah



penduduk yang harus dilayani oleh setiap rumah sakit yang tersedia semakin bertambah. Hal ini mengakibatkan rasio rumah sakit per satuan penduduk pada tahun 2020 sedikit menurun meskipun tidak terlalu signifikan.

Berdasarkan data pada tabel di bawah ini, maka terlihat bahwa 1 rumah sakit melayani 195.887 penduduk Kabupaten Maros dengan rasio sebesar 0,005 Rumah Sakit per 1.000 penduduk. Dengan banyaknya penduduk yang harus dilayani, maka diperlukan peningkatan kapasitas atau tipe rumah sakit sehingga jumlah penduduk yang terlayani dapat lebih ditingkatkan. Perkembangan rasio rumah sakit per satuan penduduk Kabupaten Maros selama kurun waktu 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.52
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah Sakit	2	2	2	2	2
2	Jumlah Penduduk	342.890	346.383	349.822	353.121	391.774
3	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0,006	0,006	0,006	0,006	0,005

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

Tabel 2.53
Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Sakit Umum	Jumlah Rumah Sakit Khusus
1	Mandai	1	–
2	Moncongloe	–	–
3	Maros Baru	–	–
4	Marusu	–	–
5	Turikale	1	–
6	Lau	–	–
7	Bontoa	–	–
8	Bantimurung	–	–
9	Simbang	–	–
10	Tanralili	–	–
11	Tompu Bulu	–	–
12	Camba	–	–
13	Cenrana	–	–
14	Mallawa	–	–
	Maros	2	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.7 Rasio Dokter Per Jumlah Penduduk

Rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya



satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Dokter yang dimaksud dalam indikator ini adalah dokter umum.

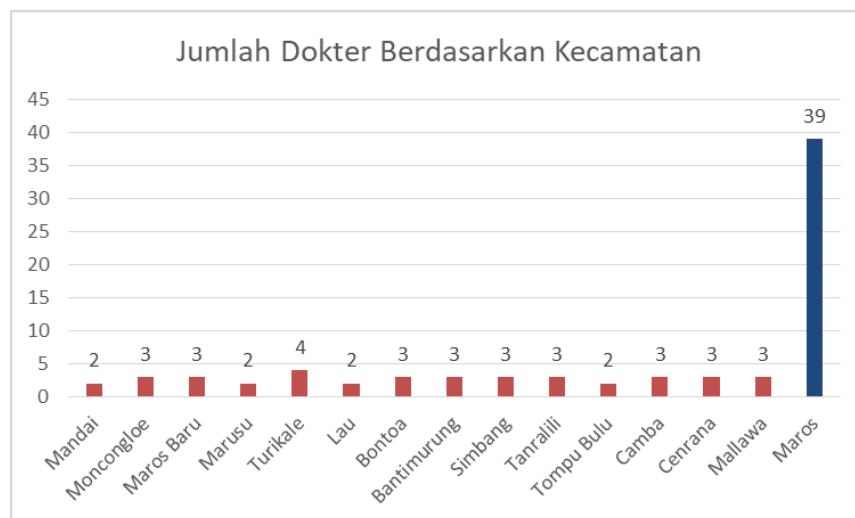
Jumlah dokter di Kabupaten Maros pada tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan penurunan. Pada tahun 2016 rasio dokter per satuan penduduk sebesar 0,28 dokter untuk setiap 1.000 penduduk, kemudian menurun menjadi 0,10 dokter untuk setiap 1.000 penduduk atau dengan kata lain 1 dokter melayani 10.000 penduduk. Penurunan rasio dokter sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 disebabkan banyak dokter yang berstatus kontrak pada tahun 2016 hingga 2018, dan pada tahun 2019 tidak memperpanjang kontrak lagi. Sehingga yang tersisa adalah dokter-dokter yang berstatus ASN. Walaupun menunjukkan tren penurunan, namun apabila dibandingkan dengan tahun 2019, pada tahun 2020 terdapat penambahan jumlah dokter sebanyak 4 orang.

Tabel 2.54
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Dokter	96	88	88	35	39
2	Jumlah Penduduk	342.890	346.383	349.822	353.121	391.774
3	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	0,28	0,25	0,25	0,10	0,10

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

Grafik 2.37
Jumlah Dokter Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.8 Rasio Tenaga Medis Per Jumlah Penduduk

Rasio tenaga medis per satuan penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk.



Jumlah tenaga medis Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebanyak 106 orang dengan rasio 0,31 tenaga medis untuk 1.000 penduduk. Jumlah tenaga medis tersebut kemudian meningkat hingga mencapai 0,57 orang untuk 1,000 penduduk pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 rasio tenaga medis menurun hingga mencapai 0,40 orang untuk 1.000 penduduk. Tenaga medis yang dimaksud dalam hal ini adalah Dokter Spesialist, Dokter Gigi.

Penurunan jumlah tenaga medis pada tahun 2020 disebabkan adanya beberapa tenaga medis utamanya dokter spesialis yang berstatus kontrak, dan pada tahun 2020 kontraknya telah habis, selain itu terdapat juga dokter yang pensiun pada tahun tersebut.

Tabel 2.55
Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga medis	106	95	147	200	156
2	Jumlah Penduduk	342.890	346.383	349.822	353.121	391.774
3	Rasio Dokter tenaga medis per Satuan Penduduk	0,31	0,27	0,42	0,57	0,40

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

Tabel 2.56
Jumlah Tenaga Medis Fasilitas Kesehatan
Kabupaten Maros 2020

No.	Nama Unit	Dokter Spesialis Dasar	Dokter Spesialis Penunjang	Dokter Spesialis Lainnya	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Jumlah (per Unit)
1	Mandai	0	0	0	2	0	2
2	Moncongloe	0	0	0	1	0	1
3	Maros Baru	0	0	0	3	0	3
4	Marusu	0	0	0	3	0	3
5	Turikale	0	0	0	3	0	3
6	Lau	0	0	0	2	0	2
7	Bontomarannu	0	0	0	2	0	2
8	Bantimurung	0	0	0	2	0	2
9	Simbang	0	0	0	2	0	2
10	Tanralili	0	0	0	1	0	1
11	Tompobulu	0	0	0	2	0	2
12	Camba	0	0	0	1	0	1
13	Cenrana	0	0	0	1	0	1
14	Mallawa	0	0	0	1	0	1
15	Rs Umum Daerah Salewangang Maros	9	11	62	22	8	112



No.	Nama Unit	Dokter Spesialis Dasar	Dokter Spesialis Penunjang	Dokter Spesialis Lainnya	Dokter Gigi	Dokter Gigi Spesialis	Jumlah (per Unit)
16	RS AU Dr. Dody Sardjoto	7	3	5	3	0	18
JUMLAH		16	14	67	51	8	156

Sumber : BPPSDMK Kemenkes, 2021

2.3.1.2.9 Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah jumlah ibu yang memiliki komplikasi kebidanan pada tahun tertentu yang kemudian ditangani oleh tenaga kesehatan. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2016 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 53,82% kemudian meningkat pada tahun 2020 sebesar 100%. Peningkatan ini disebabkan adanya pelatihan-pelatihan dan sertifikasi yang dilakukan pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan terhadap tenaga bidan sehingga tenaga bidan yang berada di Kabupaten Maros telah memiliki kualifikasi dan kualitas yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tabel 2.57
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	676	835	994	1.153	1.312
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	1.256	1.269	1.580	1.153	1.312
3	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	53,82	65,80	62,91	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.10 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Jumlah ibu bersalin yang ditangani oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebanyak 5.630 orang, dengan sasaran ibu bersalin sebanyak 5.998 orang. Cakupan pertolongan persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 93,86%. Cakupan tersebut kemudian meningkat pada tahun 2020 sebesar 94,72 pada tahun 2020 dengan jumlah ibu bersalin yang dapat ditolong sebanyak 7.328 orang dari 7.736 sasaran.

Seperti halnya indikator cakupan komplikasi kebidanan yang dapat ditangani, peningkatan cakupan pertolongan persalinan disebabkan adanya



pelatihan-pelatihan dan sertifikasi yang dilakukan pemerintah dalam hal ini dinas kesehatan terhadap tenaga bidan sehingga tenaga bidan yang berada di Kabupaten Maros telah memiliki kualifikasi dan kualitas yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Tabel 2.58
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	5.630	5.637	6.037	7.510	7.328
2	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	5.998	6.057	7.552	7.511	7.736
3	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	93,86	93,07	79,94	99,99	94,72

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.11 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Unit (UCI)

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) adalah jumlah desa/kelurahan yang telah mencapai imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (usia 0-11 bulan), ibu hamil, wanita subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, dan 1 dosis Campak.

Cakupan desa/kelurahan UCI Kabupaten Maros pada tahun 2018 telah mencapai 100%. Dimana dari 103 Desa/Kelurahan yang ada, seluruhnya telah mencapai imunisasi dasar secara lengkap (bayi, ibu hamil, PUS dan anak sekolah tingkat dasar). Namun pada tahun 2019 menurun hingga mencapai 91,26%, bahkan pada tahun 2020 cakupan UCI hanya sebesar 67,96%.

Penurunan cakupan ini disebabkan jumlah bayi yang lahir pada tahun 2019 dan 2020 tidak sebanding dengan vaksin yang tersedia sehingga tidak semua bayi yang lahir pada tahun tersebut dapat diimunisasi.



Tabel 2.59
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Unit (UCI)
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa/kelurahan UCI	85	82	103	94	70
2	Jumlah seluruh desa/kelurahan	103	103	103	103	103
3	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Unit (UCI)	82,52	79,61	100,00	91,26	67,96

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.12 Cakupan Pertolongan Cakupan Desa/Kelurahan Cakupan Desa/Kelurahan

Cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan Kabupaten Maros sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 sebesar 100 %. Pada tahun 2016, terdapat 6 kasus balita gizi buruk, kemudian menurun menjadi 3 kasus pada tahun 2020. Seluruh kasus gizi buruk yang ditemukan telah ditangani dan mendapatkan perawatan sesuai kondisi yang ada.

Tabel 2.60
Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan pada kurun waktu tertentu	6	6	11	6	3
2	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama	7	6	11	6	3
3	Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan	85,7	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.13 Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak

Persentase anak usia 1 tahun yang telah diimunisasi campak menunjukkan tren yang berfluktuatif selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 Persentase anak usia 1 tahun yang telah diimunisasi campak sebesar 113,96% disebabkan adanya anak usia tahun yang berasal dari daerah lain yang ikut diimunisasi. Sedangkan pada tahun 2020 persentase cakupan anak usai 1 tahun yang telah diimunisasi campak sebesar 93,82%.



Tabel 2.61
Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak pada suatu wilayah selama 1 tahun	6.711	13.194	13.724	13.945	13.800
2	Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama	5.889	14.483	14.446	14.582	14.709
3	Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak	113,96	91,10	95,00	95,63	93,82

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.14 Persentase *Non Polio Rate*

Surveilans *Acute Flaccid Paralysis* (AFP) adalah pengamatan yang dilakukan pada semua kasus lumpuh layuh akut (AFP) pada usia < 15 tahun yang merupakan kelompok yang rentan terhadap penyakit polio. Untuk mengukur sensitifitas penemuan kasus AFP, maka ditetapkan indikator *Non Polio AFP Rate* per 100.000 anak berusia kurang dari 15 tahun per tahun.

Non polio rate Kabupaten Maros per 100.000 penduduk berumur kurang dari 15 tahun sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 tidak mengalami banyak perubahan. Dimana kasus non polio yang ditemukan dilaporkan hingga tahun 2019 sebanyak 2 kasus kemudian 1 kasus pada tahun 2020. Dengan demikian dapat dikatakan *non polio rate* sebesar 0 kasus untuk 100.000 penduduk.

Hal ini disebabkan hampir seluruh bayi di Kabupaten Maros telah diberikan imunisasi yang lengkap, sehingga bayi-bayi tersebut memiliki antibodi yang cukup dan kuat terhadap virus polio. Selain itu penyuluhan oleh kader posyandu dan puskesmas juga memegang peranan penting, dengan adanya informasi yang diterima masyarakat, maka kesadaran masyarakat juga akan semakin tinggi untuk melakukan imunisasi.

Tabel 2.62
Persentase Non Polio Rate Per 100.000 Penduduk
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus SFP non polio yang dilaporkan	2	2	2	2	1
2	Jumlah penduduk <15 tahun	100.100	100.204	100.366	10.533	10.586
3	Non Polio Rate Per 100.000 Penduduk	0,002	0,002	0,002	0,019	0,009

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021



2.3.1.2.15 Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani

Pneumonia adalah infeksi yang memicu inflamasi pada kantong-kantong udara disalah satu atau kedua paru-paru. Pada balita pneumonia biasanya didahului gejala selesma berupa demam yang disertai batuk dan pilek, sakit kepala dan hilang nafsu makan.

Pada tahun 2016 jumlah penderita pneumonia yang ditemukan di Kabupaten Maros sebanyak 62 kasus dengan cakupan sebesar 4,77%. Kemudian meningkat pada tahun 2019 dengan jumlah penderita sebanyak 323 orang (24,14%). Pada tahun 2020 cakupan balita pneumonia yang ditangani menurun hingga mencapai 13,50% dengan jumlah penderita sebanyak 182 orang.

Tingginya kasus pneumonia pada balita di Kabupaten Maros lebih banyak dialami oleh masyarakat yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan (Pra Sejahtera) dan berada di kawasan kumuh, dimana masyarakat tersebut berada pada lingkungan tempat tinggal yang tidak higienis, tempat tinggal yang berdempetan, sehingga tidak adanya udara sirkulasi udara yang baik.

Tabel 2.63
Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita pneumonia yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu 1 tahun	62	96	102	323	182
2	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	1.300	1.313	1.326	1.338	1.350
3	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	4,77	7,31	7,69	24,14	13,50

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.16 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Secara umum jumlah penyakit baru TBC BTA yang ditemukan di Kabupaten Maros menunjukkan tren yang berfluktuatif selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Jumlah kasus pada tahun 2016 sebanyak 308 kasus kemudian menurun hingga mencapai 251 kasus pada tahun 2020. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA tahun 2016 sebesar 20,03% dan pada tahun 2020 sebesar 27,30%.

Peningkatan cakupan ini disebabkan semakin gencarnya penyuluhan dan deteksi dini yang dilakukan oleh penyuluh dan tenaga kesehatan yang berada di puskesmas dan puskesmas pembantu dengan melakukan perawatan dan



pengawasan terhadap penderita agar penyakit tersebut tidak menular kepada orang lain. Dengan demikian diharapkan jumlah perkiraan penderita baru semakin menurun setiap tahunnya.

Tabel 2.64
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penyakit baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 tahun	308	306	305	398	251
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama	1.538	1.521	1.475	984	921
3	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	20,03	20,12	20,68	40,45	27,30

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.17 Tingkat Prevalensi Tuberklosis

Tuberklosis (TB) adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan bakteri yang dapat menyerang berbagai organ, terutama paru-paru. Penyakit ini bila tidak diobati atau pengobatannya tidak tuntas dapat menimbulkan komplikasi berbahaya hingga kematian.

Prevalensi tuberklosis Kabupaten Maros tahun 2016 sebesar 103,82 kasus per 100.000 penduduk dengan jumlah kasus yang ditemukan sebesar 1.033 kasus. Kasus TBC pada tahun 2020 meningkat hingga mencapai 116,46 kasus per 100.000 penduduk dengan jumlah penderita sebanyak 456 orang.

Seperti halnya pneumonia, penyakit TB sangat ditentukan oleh kondisi lingkungan tempat tinggal dan pola hidup masyarakat. Masih tingginya kasus TB di Kabupaten Maros disebabkan masih kurangnya pemahaman di masyarakat terhadap penyakit TB yang dapat menular dan kurangnya kewaspadaan terhadap kejadian TB, sehingga banyak masyarakat yang yang menderita TB yang tidak diketahui atau terlambat diketahui. Walaupun demikian, telah dilakukan pendeteksian secara dini oleh petugas kesehatan untuk menghambat penularan serta merujuk penderita dan pengawasan terhadap penderita TBC tersebut.



Tabel 2.65
Tingkat Prevalensi Tuberklosis (Per 100.000 Penduduk)
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Banyaknya kasus penderita TB (Baru dan lama)	356	440	1.033	678	456
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	342.890	346.383	349.822	353.121	391.174
3	Tingkat Prevalensi Tuberklosis (Per 100.000 Penduduk)	103,82	127,03	295,29	192,10	116,46

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.18 Tingkat Kematian Karena Tuberklosis

Tingkat kematian penduduk yang diakibatkan oleh TBC menunjukkan tren yang meningkat selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2018 tingkat kematian karena tuberklosis sebesar 6,42 orang untuk setiap 100.000 orang penduduk yang diperiksa dengan jumlah TB yang meninggal sebanyak 2 orang. Sedangkan tahun 2020 jumlah pasien TB yang meninggal sebanyak 27 orang dengan tingkat kematian sebesar 6,99 orang untuk setiap 100.000 penduduk. Namun demikian pada tahun 2019 tidak ditemukan pasien TBC yang meninggal.

Seperti yang telah disebutkan pada tingkat prevalensi TB, tingkat kematian pada penderita TB cukup tinggi dikarenakan deteksi yang kurang cepat terhadap penderita serta pemahaman masyarakat yang sangat kurang terhadap bahaya penyakit TB tersebut. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya penderita yang terlambat mendapat pertolongan serta perawatan yang intensif.

Tabel 2.66
Tingkat Kematian Karena Tuberklosis (Per 100.000 penduduk)
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasien TB yang meninggal	22	18	15	0	27
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	342.890	346.383	349.822	353.121	391.174
3	Tingkat kematian karena Tuberklosis (Per 100.000 penduduk)	6,42	5,20	4,29	0,01	6,99

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.19 Proporsi Jumlah Kasus Tuberklosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS

DOTS merupakan strategi penanggulangan Tuberklosis di Rumah Sakit melalui pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung. DOTS adalah tempat untuk konsultasi pasien TB. Penanggulangan tuberkolosis merupakan



program nasional yang harus dilaksanakan di seluruh unit pelayanan kesehatan termasuk Rumah Sakit.

Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS pada tahun 2016 sebesar 30,30%. Dimana dari 1.538 jumlah pasien yang diperkirakan, terdapat 466 pasien TB yang mendapat pengobatan melalui DOTS. Kondisi tahun 2020 jauh meningkat dimana pasien yang diobati sebanyak 458 dari 944 pasien orang dengan proporsi 48,52 %.

Semakin menurunnya jumlah pasien rumah sakit diobati melalui program DOTS disebabkan karena penanganan penderita TBC saat ini lebih banyak diarahkan ke puskesmas di wilayah kecamatan, sehingga mengurangi beban rumah sakit dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

Seluruh kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam DOTS telah diobati dan dinyatakan sembuh. Dengan demikian dengan jumlah penderita penyakit TB yang terdeteksi pada tahun 2020 sebanyak 170 orang seluruhnya dapat diobati dan dinyatakan sembuh. Demikian halnya pada tahun 2019 dan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.67
Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	466	528	1.063	428	458
2	Jumlah pasien baru TB paru dan BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut	1.538	1.521	1.475	984	944
3	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS	30,30	34,71	72,10	43,50	48,52

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.20 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penyakit DBD atau *Denggue Hemorrhagic Fever* adalah penyakit yang dapat membuat suhu tubuh penderita menjadi sangat tinggi dan pada umumnya disertai sakit kepala, nyeri sendi, otot dan tulang, serta nyeri di bagian belakang mata. Penyakit DBD disebabkan oleh virus *dengue* yang penyebarannya terjadi melalui gigitan nyamuk *Aedes Aegypti* dan *Aedes Albopictus*.

Jumlah kasus DBD yang ditemukan pada tahun 2016 sebanyak 643 kasus, kemudian menurun pada tahun 2020 sebanyak 255 kasus. Banyaknya kasus yang



ditemukan diakibatkan gencarnya deteksi dini dan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kesehatan di masyarakat, utamanya masyarakat yang berada di pemukiman wilayah kumuh.

Keseluruhan kasus yang ditemukan telah ditangani sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, sehingga cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD pada selama kurun waktu 2016-2020 mencapai 100%.

Tabel 2.68
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah kerja selama 1 tahun	634	253	188	150	255
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama	634	253	188	150	255
3	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.21 Penderita Diare Yang Ditangani

Diare adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang lembek atau cair. Selama tahun 2016 jumlah penderita diare yang ditemukan sebanyak 4.293 kasus, sedangkan pada tahun 2020 meingkat menjadi sebesar 5.725 kasus.

Dari jumlah kasus penderita diare yang ditemukan tersebut penderita yang dapat ditangani pada tahun 2016 sebesar 31,58%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 39,62%. Masih tingginya kasus diare di Kabupaten Maros disebabkan perilaku hidup masyarakat yang kurang baik serta sanitasi lingkungan yang buruk.

Tabel 2.69
Penderita Diare Yang Ditangani Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu 1 tahun	4.293	4.472	4.500	11.158	5.715
2	Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10 % dari angka keskitan diare x jumlah penduduk)	13.592	13.592	14.167	14.302	14.425
3	Penderita Diare Yang Ditangani	31,58	32,90	31,76	78,02	39,62

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.22 Angka Kejadian Malaria



Malaria adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk dari manusia atau hewan lain. Malaria biasanya menyebabkan gejala demam, kelelahan, muntah, dan sakit kepala. Dalam kasus yang parah, malaria dapat menyebabkan kulit kuning, kejang, koma bahkan kematian.

Angka kejadian malaria pada tahun 2016 di Kabupaten Maros sebesar 10 kasus per 100.000 penduduk (69 penderita), kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 20 orang penderita untuk setiap 100.000 penduduk (78 orang penderita).

Tingginya kasus malaria disebabkan banyak orang yang terinfeksi malaria belum terdeteksi dan terus menularkan kepada orang lain, Selain itu juga, orang yang sudah sembuh gampang terinfeksi kembali, karena tidak melakukan pencegahan seperti menggunakan kelambu ataupun kalau terinfeksi tidak berobat.

Tabel 2.70
Angka Kejadian Malaria Per 100.000 Penduduk
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu	69	193	153	79	78
2	Jumlah penduduk pada pertengahan tahun	342.890	346.383	349.822	353.121	391.174
3	Angka Kejadian Malaria	20,12	55,72	43,74	22,30	20,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.23 Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria

Proporsi anak balita demam yang diobati dengan ACT (Artemisinin Combination Therapy) pada tahun 2016, tahun 2018 dan 2019 sebesar 0%. Dikarenakan dari keseluruhan penderita positif malaria, penyembuhannya tidak menggunakan metode ACT. Sedangkan pada tahun 2017, dari 193 penderita positif malaria yang ditemukan jumlah penderita yang diobati menggunakan ACT sebanyak 1 orang. Pada tahun 2020, keseluruhan penderita malaria mendapatkan pengobatan dengan metode ACT sehingga cakupannya sebesar 100%.



Tabel 2.71
Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati
Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penderita diobati dengan ACT dalam 1 tahun	0	1	0	170
2	jumlah Penderita positif dalam 1 tahun	69	193	153	170
3	Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat	0	0,52	0	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.24 Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi

Jumlah pasien HIV/AIDS Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebanyak 7 orang, kemudian meningkat hingga mencapai 20 orang pada tahun 2020. Prevalensi HIV/AIDS pada tahun 2020 sebesar 0,01% dari total penduduk.

Pertambahan jumlah penderita ini kemungkinan banyak terjadi pada kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar, sehingga Makassar diduga menjadi penyebab bertambahnya penderita HIV dan AIDS di Maros. Rata-rata penderita penyakit ini berasal dari kota dan kecamatan yang berbatasan dengan Makassar.

Tabel 2.72
Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	7	19	20	20	20
2	Jumlah penduduk di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	342.890	346.383	349.822	353.121	391.174
3	Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.25 Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang Bahaya HIV/AIDS

Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang bahaya HIV/AIDS pada tahun 2017 di Kabupaten Maros sebesar 1.067 orang dari 65.149 orang total penduduk usia 15-24 tahun. Dengan demikian proporsi penduduk yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS sebesar 1,58%. Kondisi pada tahun 2020 meningkat sangat signifikan dibandingkan tahun 2017, dimana dari 67.677 jumlah penduduk usia 15-24 orang,



terdapat 4.812 orang yang memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang HIV/AIDS atau sebesar 7,11%.

Walaupun terjadi peningkatan secara proporsi, namun secara umum jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang mengetahui pengetahuan yang komprehensif tentang HIV/AIDS sangat sedikit. Hal ini disebabkan kegiatan penyuluhan dan informasi tentang HIV/AIDS di Kabupaten Maros sangat terbatas dan hanya dilakukan pada wilayah kecamatan yang dianggap rawan akan penyakit tersebut, seperti kecamatan yang berada di wilayah perkotaan dan berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Kegiatan penyuluhan dan penyebarluasan informasi belum dilakukan pada kecamatan-kecamatan yang berada di pelosok wilayah Kabupaten Maros.

Tabel 2.73

Proporsi Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang mempunyai pengetahuan komprehensif tentang bahaya penyakit HIV/AIDS di satu wilayah pada waktu tertentu	0	1.067	3.024	3.127	4.812
2	Jumlah penduduk usia 15-24 tahun di satu wilayah pada waktu yang sama	65.149	67.361	66.466	67.093	67.677
3	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS	0,00	1,58	4,55	4,66	7,11

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.26 Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah jumlah bayi yang berkunjung di pelayanan kesehatan dan memperoleh pelayanan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Pada tahun 2016 jumlah bayi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di Kabupaten Maros sebanyak 5.530 orang dengan cakupan sebesar 96,93%. Cakupan pada tahun 2020 lebih rendah dibandingkan tahun 2016, dimana dari 7,817 bayi yang lahir terdapat 7.484 bayi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar (95,74%).

Penurunan cakupan ini disebabkan bukan akibat kurangnya pelayanan ataupun komposisi vaksin di posyandu dan puskesmas, namun lebih disebabkan tidak adanya waktu dari ibu-ibu yang memiliki bayi untuk membawa anaknya ke



posyandu dan puskesmas dikarenakan sebagian besar dari ibu-ibu tersebut memiliki pekerjaan.

Tabel 2.74
Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	5.530	5.200	6.173	7.285	7.484
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	5.705	5.600	7.307	7.285	7.817
3	Cakupan Kunjungan bayi	96,93	92,86	84,48	100,00	95,74

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.27 Cakupan Puskesmas

Cakupan puskesmas adalah jumlah puskesmas yang berada di setiap kecamatan dalam suatu wilayah tertentu. Cakupan puskesmas Kabupaten Maros sejak tahun 2016 sebesar 100%. Dengan demikian setiap kecamatan di Kabupaten Maros telah memiliki puskesmas, namun jenis pelayanan yang dapat diberikan puskesmas tersebut berbeda-beda tergantung dari karakteristik wilayah kecamatan dimana puskesmas tersebut berada.

Tabel 2.75
Cakupan Puskesmas Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Puskesmas	14	14	14	14	14
2	Jumlah Seluruh Kecamatan	14	14	14	14	14
3	Cakupan Puskesmas	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

Tabel 2.76
Jumlah Puskesmas Menurut Jenisnya Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Nama Puskesmas	Kecamatan	Kode Puskesmas	Jenis Puskesmas
1	Bantimurung	Bantimurung	1070505	Rawat Inap
2	Bontomarannu	Bontoa	1070504	Non Rawat Inap
3	Camba	Camba	1070509	Rawat Inap
4	Cenrana	Cenrana	1070510	Non Rawat Inap
5	Lau	Lau	1070503	Rawat Inap
6	Mallawa	Mallawa	1070511	Rawat Inap
7	Mandai	Mandai	1070498	Rawat Inap
8	Maros baru	Maros baru	1070500	Non Rawat Inap
9	Marusu	Marusu	1070501	Non Rawat Inap
10	Moncongloe	Moncongloe	1070499	Non Rawat Inap
11	Simbang	Simbang	1070506	Non Rawat Inap
12	Tanralili	Tanralili	1070507	Rawat Inap
13	Tompobulu	Tompobulu	1070508	Non Rawat Inap
14	Turikale	Turikale	1070502	Non Rawat Inap

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021



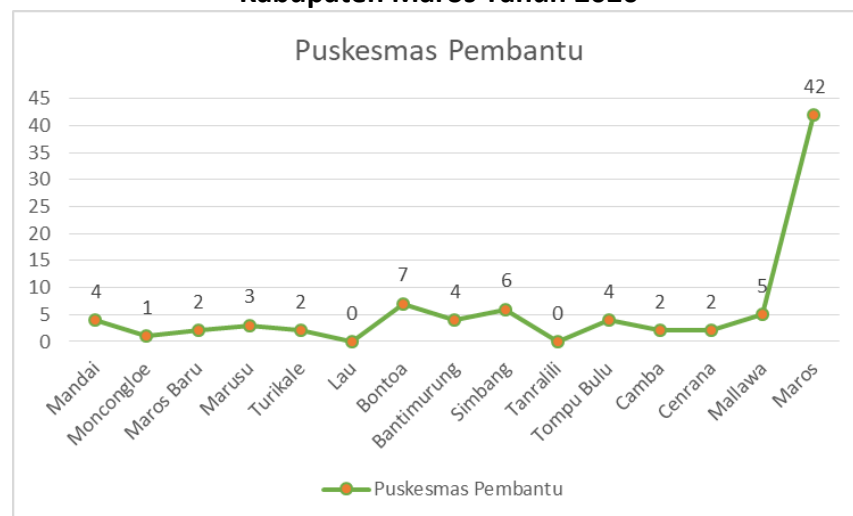
2.3.1.2.28 Cakupan Pembantu Puskesmas

Jumlah pembantu puskesmas di Kabupaten Maros sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 jumlahnya sama, yaitu 26 unit yang tersebar di 103 desa/kelurahan dengan cakupan sebesar 25,24%. Pada tahun 2019 dibangun 5 unit puskesmas pembantu sehingga cakupannya mencapai 30,10% kemudian pada tahun 2020 terdapat penambahan puskesmas pembantu sebanyak 5 unit sehingga total puskesmas pembantu sebanyak 42 unit, dengan cakupan sebesar 40,78%.

Tabel 2.77**Jumlah Puskesmas Pembantu Kabupaten Maros Tahun 2016-2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pembantu Puskesmas	26	26	26	31	42
2	Jumlah Seluruh Desa	103	103	103	103	103
3	Cakupan Pembantu Puskesmas	25,24	25,24	25,24	30,10	40,78

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

Grafik 2.38**Jumlah Puskesmas Pembantu Menurut Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020**

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.29 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Kunjungan Antenatal K4 adalah kontak ibu hamil dengan tenaga profesional untuk mendapatkan pelayanan *antenatal care* sesuai standar yang ditetapkan, yaitu minimal 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan dua kali trimester ketiga.

Cakupan kunjungan ibu hamil Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebanyak 85,64%, dengan sasaran ibu hamil 6.274 orang, kemudian pada tahun 2020 cakupan kunjungan K4 ibu hamil mencapai 91,59% dengan sasaran ibu hamil sebanyak 7.868 orang. Tingginya cakupan kunjungan ibu hamil K4 di fasilitas pelayanan kesehatan



disebabkan sosialisasi dan penyuluhan terhadap pentingnya imunisasi bagi bayi serta pemeriksaan kesehatan bagi ibu melahirkan telah cukup baik dilakukan, ditambah kesadaran dari masyarakat sendiri yang sudah cukup tinggi untuk meningkatkan kualitas kesehatan sejak dini.

Tabel 2.78
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 di suatu wilayah kerja pada waktu tertentu	5.373	5.775	6.175	7.019	7.206
2	Jumlah sasaran ibu hamil di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	6.274	6.345	7.911	7.868	7.868
3	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	85,64	91,02	78,06	89,21	91,59

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.30 Cakupan Pelayanan Nifas

Nifas adalah periode 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya 3 kali, yaitu pada 6 jam pasca persalinan sampai dengan 3 hari, pada minggu ke 2 dan minggu ke 4.

Jumlah peserta ibu nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar pada tahun 2016 sebanyak 5.628 orang dari 5.998 orang ibu nifas yang ada di Kabupaten Maros (93,83%). Kemudian pada tahun 2020 jumlah ibu nifas yang memperoleh pelayanan sebanyak 8.001 orang dengan jumlah sasaran sebanyak 8.007 orang (99,93%).

Tingginya cakupan pelayanan nifas di fasilitas pelayanan kesehatan disebabkan sosialisasi dan penyuluhan terhadap pentingnya imunisasi bagi bayi serta pemeriksaan kesehatan bagi ibu melahirkan telah dilakukan cukup baik, ditambah kesadaran dari masyarakat sendiri yang sudah cukup tinggi untuk meningkatkan kualitas kesehatan sejak dini.

Tabel 2.79
Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Peserta Ibu Nifas yang memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	5.628	5.543	5.943	7.511	8.001
2	Seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	5.998	6.037	7.552	7.511	8.007
3	Cakupan Pelayanan Nifas	93,83	91,82	78,69	100,00	99,93

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021



2.3.1.2.31 Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin

Makanan Pendamping (MP) ASI adalah makanan atau minuman yang mengandung gizi diberikan kepada bayi/anak untuk memenuhi kebutuhannya. MP-ASI diberikan pada anak usia 4 bulan sampai 24 bulan. MP-ASI merupakan makanan peralihan dari ASI ke makanan keluarga.

Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI tahun 2016 sebanyak 1.176 orang, dengan jumlah seluruh anak usia 6-24 tahun keluarga miskin sebanyak 1.329 orang. Cakupan pemberian MP-ASI tahun 2016 sebesar 88,49%. Pada tahun 2020 cakupan pemberian makanan pendamping asi sebesar 94,02%, dengan jumlah sasaran sebanyak 1.124 orang.

Cukup tingginya cakupan pemberian makanan pendamping ASI di Kabupaten Maros disebabkan telah dilaksanakannya penyuluhan dasar-dasar Pemberian MP ASI dan Pelatihan pembuatan MP ASI rumahan kepada penduduk miskin. Kegiatan ini dilakukan oleh PKK dan Posyandu dengan dukungan Dinas Kesehatan Kabupaten Maros. Namun demikian masih diperlukan dukungan dari berbagai pihak utamanya dari dinas sosial dan dinas administrasi kependudukan dan catatan sipil dalam rangka penetapan jumlah sasaran masyarakat miskin sehingga diharapkan seluruh sasaran dapat terlayani (100%).

Tabel 2.80
Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anak usia 6-24 bulan keluarga miskin yang mendapat MP-ASI	1.176	1.086	956	1.102	1.057
2	Jumlah seluruh anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	1.329	1.249	1.099	1.111	1.124
3	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin	88,49	86,95	86,95	99,16	94,02

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.32 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Penjaringan kesehatan peserta didik merupakan salah satu indikator standar pelayanan minimal yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah. Penjaringan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan peserta didik, perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala.



Cakupan peserta didik yang diperiksa kesehatannya pada tahun 2016 sebesar 4,10% dengan jumlah sasaran sebanyak 6.044 orang, kemudian meningkat tajam pada tahun 2020 hingga mencapai 91,48% dengan jumlah sasaran 8.604 orang murid SD.

Penyebab belum maksimalnya capaian penjarangan kesehatan siswa SD adalah kerjasama dan koordinasi lintas sektor terutama dengan kepala sekolah dasar yang ada di desa dalam upaya pelaksanaan usaha kesehatan sekolah. Sehingga dalam rangka meningkatkan kemampuan hidup sehat dan bersih siswa sekolah dasar SD di Kabupaten Maros dalam hal ini di 14 puskesmas, maka puskesmas telah melakukan penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat di wilayahnya masing-masing. Penjarangan kesehatan siswa SD dan setingkat adalah pemeriksaan kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut siswa SD dan setingkat melalui penjarangan kesehatan terhadap murid kelas satu sampai dengan kelas enam.

Tabel 2.81
Cakupan Penjarangan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	5.320	6.178	6.178	6.378	7.871
2	Jumlah murid SD dan setingkat di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama	6.044	7.092	7.192	7.866	8.604
3	Cakupan Penjarangan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	88,02	87,11	85,90	81,08	91,48

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.2.33 Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam

Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

Cakupan desa/kelurahan yang mengalami KLB dan telah dilakukan penyelidikan oleh kabupaten pada tahun 2016 sebesar 100%, dengan jumlah desa yang diselidiki/ditangani sebanyak 10 desa. Pada Tahun 2020 dengan adanya



pandemi COVID-19, seluruh desa dan kelurahan mengalami KLB dan telah dilakukan penyelidikan epidemiologi.

Tabel 2.82
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	jumlah KLB di Desa/Kelurahan yang ditangani > 24 jam dalam periode tertentu	4	4	4	8	103
2	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	4	5	10	10	103
3	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 Jam	100	80	40	80	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.1.3.1 Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan keseluruhan. Berdasarkan kondisi jalan, maka jalan dibagi atas beberapa kategori jalan yakni kondisi baik, rusak sedang, rusak dan rusak berat.

Panjang jalan di Kabupaten Maros secara keseluruhan baik jalan yang berada pada kewenangan negara, provinsi maupun kabupaten sebesar 1.406,96 pada tahun 2016 kemudian meningkat menjadi 1.174 km pada tahun 2020, dengan rincian panjang jalan negara sebesar 88 km, panjang jalan provinsi sebesar 54 km dan panjang jalan kabupaten sebesar 1.032 km.

Pada tabel di bawah ini, data panjang jalan dalam kondisi baik yang disajikan adalah data kondisi jalan kewenangan kabupaten, dikarenakan data untuk kondisi jalan negara dan provinsi tidak tersedia. Pada tahun 2016 proporsi panjang jalan dalam kondisi baik (km) sebesar 0,52 km kemudian meningkat hingga mencapai 0,76 km pada tahun 2020.

Meningkatnya panjang jalan dalam kondisi baik disebabkan prioritas Pemerintah Kabupaten Maros selama 10 tahun terakhir adalah memperbaiki dan meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan dan peningkatan jalan.



Tabel 2.83
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi baik (Km)
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang jalan dalam kondisi baik (Km)	726,39	755,77	781,77	806,93	886,61
2	Panjang jalan seluruhnya (Km)	1.406,96	1.149,29	1.335,00	1.174,00	1.174,00
3	Proporsi Panjang Jaringan jalan dalam Kondisi baik (Km)	0,52	0,66	0,59	0,69	0,76

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021

2.3.1.3.2 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Penduduk

Panjang jalan di Kabupaten Maros (kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten) sejak tahun 2016 sebesar 1.406,96 km, kemudian meningkat menjadi 1.149,20 km pada tahun 2017. Pada tahun 2018 panjang jalan sebesar 1.335 km kemudian 1.174 km pada tahun 2019 dan 2020.

Dikarenakan perubahan panjang jalan yang tidak terlalu besar, maka rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk juga tidak terlalu besar perubahannya setiap tahun. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 sebesar 0,004 kemudian pada tahun 2020 rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk sebesar 0,003. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap 1 km jalan di Kabupaten Maros dapat melayani akses 260 – 350 orang penduduk.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kondisi panjang jalan yang ada belum cukup pada untuk melayani akses penduduk di Kabupaten Maros. Hal ini mengakibatkan seringnya terjadi kemacetan di jalan, utamanya jalan-jalan poros trans kabupaten/provinsi.

Tabel 2.84
Rasio Panjang jalan dengan Jumlah Penduduk
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah panjang jalan	1.407	1.149	1.335	1.174	1.174
2	Jumlah Penduduk	342.890	346.383	349.822	353.121	391.774
3	Rasio Panjang jalan dengan Jumlah Penduduk	0,004	0,003	0,004	0,003	0,003

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021

2.3.1.3.3 Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)

Panjang jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Maros pada tahun 2020 sepanjang 1.289,8 km, namun pada tahun 2017 setelah dilakukan survey dan



pengukuran kembali, panjang jalan kewenangan Kabupaten Maros sepanjang 1.032,13 km. Proporsi jalan kabupaten dalam kondisi baik pada tahun 2016 sebesar 47,23% kemudian meningkat pada tahun 2020 sebesar 81,99%.

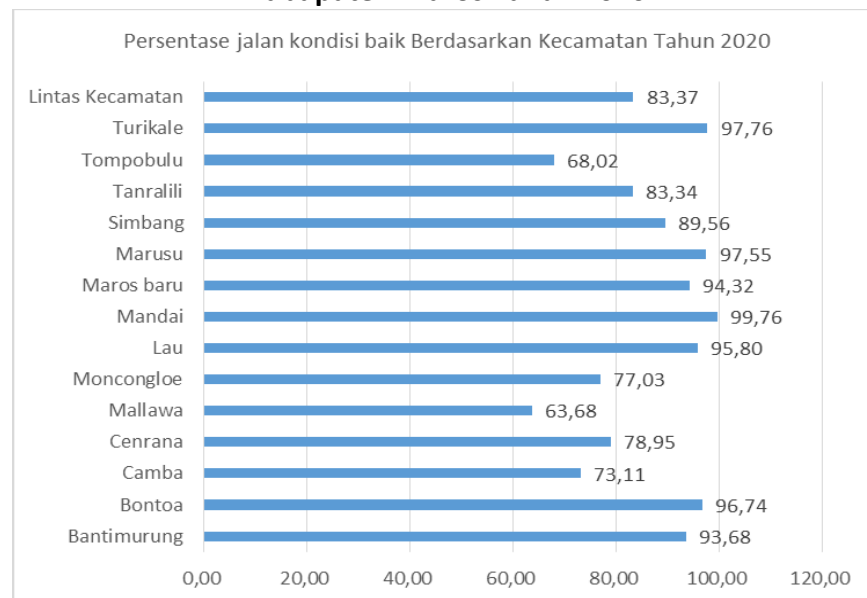
Peningkatan kondisi jalan ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Maros telah memprioritaskan perbaikan infrastruktur, utamanya jalan selama 10 tahun terakhir, utamanya jalan-jalan yang memiliki konektivitas antara wilayah kecamatan, antar desa serta dusun.

Tabel 2.85
Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	609,23	638,61	664,61	818,96	846,24
2	panjang seluruh jalan kabupaten	1.289,8	1.032,13	1.032,13	1.032,13	1.032,13
3	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)	47,23	61,87	64,39	79,35	81,99

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021

Grafik 2.39
Persentase jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020



Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021

2.3.1.3.4 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah jumlah rumah tinggal berakses sanitasi terhadap jumlah rumah tinggal. Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi diantaranya;



fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah/air bekas dan pembuangan sampah.

Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Maros menunjukkan adanya peningkatan terhadap rumah yang dapat mengakses sanitasi selama 5 tahun. Pada tahun 2016 tercatat persentase rumah tinggal berakses sanitasi terhadap jumlah rumah tinggal sebesar 67,13%, dan pada tahun 2020 naik menjadi 94,36% .

Cukup tingginya persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Maros disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki rumah dengan fasilitas yang sesuai standar kesehatan sudah cukup tinggi. Selain itu Pemerintah Kabupaten Maros melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah memprogramkan kegiatan pemasangan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) masyarakat melalui sambungan rumah (SR) penduduk, utamanya rumah-rumah yang berada di wilayah kumuh dan pedesaan.

Tabel 2.86
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kabupaten Maros
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi	51.902	54.188	56.474	58.756	76.606
2	Jumlah rumah tinggal	77.313	78.441	79.586	80.382	81.186
3	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	67,13	69,08	70,96	73,10	94,36

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021

2.3.1.3.5 Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik

Luas jaringan irigasi teknis Kabupaten Maros sebesar 9.094 ha pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Luas jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 2.534 ha pada tahun 2016 kemudian meningkat hingga mencapai 7.159 ha pada tahun 2020. Dengan demikian persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik tahun 2016 sebesar 27,90% dan pada tahun 2020 mencapai 78,72%.

Secara umum kondisi irigasi di Kabupaten Maros masih memerlukan perhatian yang khusus, dimana masih banyaknya irigasi yang belum berfungsi dengan maksimal. Hal ini disebabkan masih banyak saluran irigasi utamanya irigasi tersier yang langsung menuju sawah masyarakat masih berupa saluran tanah sehingga terjadi banyak kebocoran pada saluran.



Tabel 2.87
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (ha)	2.534	3.417	4.332	5.589	7.159
2	Luas irigasi kabupaten maros (ha)	9.094	9.094	9.094	9.094	9.094
3	Persentase irigasi kabupaten dalam Kondisi baik	27,9	37,6	47,60	61,46	78,72

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021

Tabel 2.88
Kondisi Jaringan Irigasi Berdasarkan Daerah Irigasi
Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Nama Daerah Irigasi (Di)	Lokasi (Desa/Kec)	Luas Areal (Ha)	Baik %	Kondisi Jaringan		
					Rusak Ringan %	Rusak Sedang %	Rusak Berat %
1	D.I. Allorengge	Desa Cenrana Baru/Kec. Cenrana	22,00				
	Bendung			100,00	0,00	0,00	0,00
	Saluran Primer			0,50	0,00	0,00	0,00
	Saluran Sekunder			0,00	0,00	0,00	0,00
	Bangunan Pembagi			40,00	0,00	0,00	60,00
	Pintu Air			100,00	0,00	0,00	0,00
2	D.I Assobung Parea	Desa Laiya/Kec. Cenrana	38,00				
	Bendung			100,00	0,00	0,00	0,00
	Saluran Primer			88,70	0,00	0,00	11,30
	Saluran Sekunder			0,00	0,00	0,00	100,00
	Bangunan Pembagi			50,00	0,00	0,00	50,00
	Pintu Air			50,00	0,00	50,00	0,00
3	D.I Babang Bua	Desa Limapoccoe/Kec. Cenrana	63,00				
	Bendung			100,00	0,00	0,00	0,00
	Saluran Primer			93,67	0,00	0,00	6,33
	Saluran Sekunder			0,00	0,00	0,00	0,00
	Bangunan Pembagi			100,00	0,00	0,00	0,00
	Pintu Air			100,00	0,00	0,00	0,00
4	D.I Balocci	Desa Benteng Gajah/Kec. Tompobulu	25,00				
	Bendung			100,00	0,00	0,00	0,00
	Saluran Primer			84,84	1,90	0,00	13,27
	Saluran Sekunder			0,00	0,00	0,00	0,00
	Bangunan Pembagi			60,00	0,00	0,00	40,00
	Pintu Air			50,00	50,00	0,00	0,00
5	D.I Batu Putih	Desa Gattareng Matinggi/Kec. Mallawa	34,00				
	Bendung			100,00	0,00	0,00	0,00
	Saluran Primer			93,74	0,00	0,00	6,26
	Saluran Sekunder			0,00	0,00	0,00	0,00
	Bangunan Pembagi			60,00	0,00	0,00	40,00
	Talang			50,00	0,00	0,00	50,00
Pintu Air	50,00	50,00	0,00	0,00			
6	D.I Bonto Panno	Desa Toddopulia / Kec. Tanralili	107,00				



No	Nama Daerah Irigasi (Di)	Lokasi (Desa/Kec)	Luas Areal (Ha)	Baik %	Kondisi Jaringan		
					Rusak Ringan %	Rusak Sedang %	Rusak Berat %
	Bendung			100,00	0,00	0,00	0,00
	Saluran Primer			100,00	0,00	0,00	0,00
	Saluran Sekunder			88,28	0,00	0,00	11,72
	Bangunan Pembagi			60,00	0,00	0,00	40,00
	7	D.I. Bottoe	Desa Cenrana/Kec. Camba	29,00			
	Bendung			100,00	0,00	0,00	0,00
	Saluran Primer			100,00	0,00	0,00	0,00
	Saluran Sekunder			100,00	0,00	0,00	0,00
	Bangunan Pembagi			50,00	0,00	0,00	50,00
	Pintu Air			100,00	0,00	0,00	0,00
8	D.I. Bulu - Bulu	Desa Mattampapole/Kec. Mallawa	55,00				
	Bendung			100,00	0,00	0,00	0,00
	Saluran Primer			89,36	0,00	0,00	10,64
	Saluran Sekunder			100,00	0,00	0,00	0,00
	Bangunan Pembagi			50,00	0,00	0,00	50,00
	Pintu Air			100,00	0,00	0,00	0,00
9	D.I. Bulu Lohe	Desa Rompegading/Kec. Cenrana	55,00				
	Bendung			100,00	0,00	0,00	0,00
	Saluran Primer			92,07	0,00	0,00	7,93
	Saluran Sekunder			100,00	0,00	0,00	0,00
	Bangunan Pembagi			50,00	0,00	0,00	50,00
	Pintu Air			100,00	0,00	0,00	0,00
10	D.I. Bulu Mallapo	Desa Cenrana Baru/Kec. Cenrana	38,00				
	Bendung			100,00	0,00	0,00	0,00
	Saluran Primer			100,00	0,00	0,00	0,00
	Saluran Sekunder			100,00	0,00	0,00	0,00
	Bangunan Pembagi			50,00	0,00	0,00	50,00
	Pintu Air			100,00	0,00	0,00	0,00
11	D.I. Bulu Marapa	Desa Tompobulu/Kec. Tompobulu	281,00				
	Bendung			100,00	0,00	0,00	0,00
	Saluran Primer			93,67	0,00	0,00	6,33
	Saluran Sekunder			0,00	0,00	0,00	0,00
	Bangunan Pembagi			30,00	0,00	0,00	70,00
	Talang			65,00	0,00	0,00	35,00
	Pintu Air			75,00	0,00	0,00	25,00
12	D.I. Bunga Eja	Desa Tukamasea/Kec. Bantimurung	65,00				
	Bendung			100,00	0,00	0,00	0,00
	Saluran Primer			94,05	0,00	0,00	5,95
	Saluran Sekunder			87,29	0,00	0,00	12,71
	Bangunan Pembagi			50,00	0,00	0,00	50,00
13	D.I. Cempniga	Kel. Pattiro Deceng/Kec. Camba	195,00				
	Bendung			100,00	0,00	0,00	0,00
	Saluran Primer			100,00	0,00	0,00	0,00
	Saluran Sekunder			63,96	0,00	0,00	36,04
	Bangunan Pembagi			33,33	0,00	0,00	66,67



No	Nama Daerah Irigasi (Di)	Lokasi (Desa/Kec)	Luas Areal (Ha)	Baik %	Kondisi Jaringan		
					Rusak Ringan %	Rusak Sedang %	Rusak Berat %
	Pintu Air			100,00	0,00	0,00	0,00
14	D.I Cenrana	Desa Cenrana/Kec. Camba	100,00				
	Bendung			100,00	0,00	0,00	0,00
	Saluran Primer			100,00	0,00	0,00	0,00
	Saluran Sekunder			96,86	0,00	0,00	3,14
	Bangunan Pembagi			100,00	0,00	0,00	0,00
	Pintu Air			50,00	0,00	0,00	50,00
15	D.I Jampue	Desa Gattareng Matinggi/Kec. Mallawa	10,00				
	Bendung			50,00	0,00	0,00	50,00
	Saluran Primer			0,00	0,00	0,00	100,00
	Saluran Sekunder			85,95	0,00	0,00	14,05
	Bangunan Pembagi			90,00	0,00	0,00	10,00
16	D.I Kacici	Desa Toddolimae/Kec. Tompobulu	152,00				
	Bendung			100,00	0,00	0,00	0,00
	Saluran Primer			70,73	0,00	0,00	29,27
	Saluran Sekunder			100,00	0,00	0,00	0,00
	Bangunan Pembagi			60,00	0,00	0,00	40,00
	Pintu Air			100,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021

2.3.1.3.6 Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi adalah panjang saluran irigasi dibandingkan dengan luas lahan budidaya pertanian. Data ini digunakan untuk melihat sebesar besar cakupan lahan pertanian yang dapat diairi oleh saluran irigasi yang ada.

Rasio jaringan irigasi Kabupaten Maros menunjukkan angka yang cenderung meningkat selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 rasio jaringan irigasi sebesar 0,26 km/ha kemudian meningkat menjadi 0,39 km/ha pada tahun 2020.

Walaupun angka rasio jaringan irigasi menunjukkan peningkatan namun luas lahan budidaya pertanian mengalami penurunan yang cukup besar. Tahun 2016 luas lahan budidaya pertanian sebesar 60.406 ha, kemudian menurun hingga mencapai 44.125 ha pada tahun 2020. Hal ini disebabkan banyaknya pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman, perdagangan, industri, dan lain sebagainya.

Selain itu, panjang saluran irigasi juga menunjukkan penurunan apabila dibandingkan panjang saluran irigasi tahun 2018 hingga tahun 2019. Hal ini



disebabkan terdapat beberapa Daerah Irigasi (DI) yang kewenangannya diambil alih oleh provinsi.

Tabel 2.89
Rasio Jaringan Irigasi (km/ha) Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang Saluran irigasi (km)	158,8	197,49	197,04	196,35	171,32
2	Luas lahan budidaya pertanian (ha)	60.408	60.408	50.523	43.633	44.125
3	Rasio jaringan irigasi (km/ha)	0,26	0,33	0,39	0,45	0,39

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021

2.3.1.3.7 Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Persentase penduduk berakses air minum adalah perbandingan jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum dibagi dengan jumlah penduduk. Syarat dari air minum menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Yang dimaksud dengan air bersih adalah air minum yang berasal dari air mineral, pipa air/PAM, pompa air, sumur, mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai dengan standar kebutuhan minimal.

Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum di Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebesar 60,55%, kemudian meningkat hingga mencapai 90,85% pada tahun 2020.

Tabel 2.90
Persentase penduduk Berakses Air Minum
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penduduk berakses air minum	207.608	216.751	225.894	235.037	355.927
2	jumlah penduduk	342.890	346.383	349.822	353.121	391.774
3	Persentase penduduk Berakses Air Minum	60,55	62,58	64,57	66,56	90,85

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021

2.3.1.3.8 Persentase Areal Kawasan Kumuh

Kawasan kumuh adalah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin. Diberbagai kawasan kumuh penduduk tinggal di kawasan yang sangat berdekatan sehingga sangat sulit untuk dilewati kendaraan. Kurangnya pembuangan sampah juga mengakibatkan sampah yang bertumpuk-tumpuk.



Luas areal kawasan kumuh pada tahun di Kabupaten Maros berada di Kecamatan Turikale dengan luas 103,78 ha yang disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Maros tahun 2014 dan 2019. Pada tahun 2016, dikarenakan kegiatan penanganan kawasan kumuh baru sehingga persentase areal kawasan kumuh sebesar 6,41% kemudian menurun pada tahun 2020 hingga mencapai 6,26%.

Penurunan areal kawasan kumuh ini disebabkan penanganan kawasan kumuh merupakan salah satu prioritas program kegiatan yang dilaksanakan selama kurang lebih lima tahun terakhir. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk penanganan kawasan kumuh adalah pembangunan rumah layak huni, penataan jalan lingkungan, perbaikan sanitasi, dan penyediaan akses air minum bagi masyarakat yang tinggal dalam areal kawasan kumuh tersebut.

Tabel 2.91
Persentase Areal Kawasan Kumuh Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Kawasan kumuh	103,78	102,83	102,13	101,6	101,3
2	Luas wilayah	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619
3	Persentase Areal Kawasan Kumuh	6,41	6,35	6,31	6,28	6,26

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021

2.3.1.3.9 Fasilitas Pengurangan Sampah Di Perkotaan

Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang atau pembuangan dari material sampah. Salah satu cara untuk mengelola sampah adalah dengan menyediakan fasilitas pengurangan sampah di suatu wilayah.

Fasilitas pengurangan sampah yang tersedia di Kabupaten Maros, rasionya cukup kecil dibandingkan dengan volume sampah yang dihasilkan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 rasio fasilitas pengurangan sampah sebesar 0,22 m³, sedangkan pada tahun 2020 sedikit meningkat menjadi 0,27 m³.

Tabel 2.92
Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Volume sampah di perkotaan mengalami guna ulang, daur ulang, pengelolaan di tempat pengelolaan sampah sebelum masuk TPA	1.065	1.226	1.334	1.411	1.471
2	Total volume sampah	4.794	4.844	4.899	5.040	5.491
3	Fasilitas Pengurangan Sampah di Perkotaan	0,22	0,25	0,27	0,28	0,27



Sumber : DLH Kab. Maros, 2021

2.3.1.3.10 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Rasio tempat pemakaman umum adalah jumlah tempat pemakaman umum (TPU) yang disediakan dan berada di bawah pengawasan, pengelolaan pemerintah daerah dibagi dengan jumlah penduduk pada daerah atau suatu wilayah tertentu.

Jumlah tempat pemakaman umum di Kabupaten Maros hingga tahun 2020 sebanyak 1 tempat pemakaman umum dengan jumlah daya tampung kurang lebih 600 orang. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 391.774 jiwa, maka rasio tempat pemakaman umum di Kabupaten Maros sebesar 0,15.

Apabila dilihat jumlah daya tampung tempat pemakaman umum dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka terlihat bahwa daya tampung tempat pemakaman umum masih sangat kecil. Hal ini disebabkan sulitnya menemukan lokasi yang cukup luas sebagai tempat pemakaman umum. Tempat Pemakaman Umum di Kabupaten Maros lebih banyak tersebar dengan luasan yang kecil.

Tabel 2.93
Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan penduduk
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum	-	600,00	600,00	600,00	600,00
2	Jumlah Penduduk (n)	342.890	346.383	349.822	353.121	391.774
3	Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan penduduk	0,00	0,17	0,17	0,17	0,15

Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2021

2.3.1.3.11 Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah jumlah tempat ibadah seluruh umat beragama terhadap jumlah penduduk. Rasio tempat ibadah menunjukkan penurunan selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 rasio tempat ibadah persatuan penduduk sebesar 2,23 kemudian menurun hingga mencapai 2,12 pada tahun 2020. Walaupun rasio menurun, namun apabila dilihat dari jumlah tempat ibadah terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah tempat ibadah, dimana pada tahun 2016 jumlah tempat ibadah sebesar 765 unit kemudian meningkat menjadi 829 unit pada tahun 2020.



Menurunnya rasio tempat ibadah menunjukkan bahwa peningkatan jumlah tempat ibadah tidak sebanding dengan penambahan jumlah penduduk yang sangat pesat. Peningkatan jumlah penduduk ini banyak dipengaruhi oleh migrasi penduduk, utamanya pada daerah-daerah yang berbatasan dengan Kota Makassar.

Tabel 2.94
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Tempat Ibadah	765	638	765	829	829
2	Jumlah Penduduk	342.890	346.383	349.822	353.121	391.774
3	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk	2,23	1,84	2,19	2,35	2,12

Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

Tabel 2.95
Jumlah Tempat Ibadah Berdasarkan Jenis dan Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Kecamatan	Masjid	Musholla	Gereja Protestan	Gereja Katolik
1	Mandai	69	9	1	1
2	Moncongloe	43	8	1	1
3	Maros Baru	43	9	-	-
4	Marusu	37	6	1	1
5	Turikale	60	18	1	1
6	Lau	44	8	-	-
7	Bontoa	49	8	-	-
8	Bantimurung	69	7	-	-
9	Simbang	54	5	-	1
10	Tanralili	58	7	2	-
11	Tompobulu	47	4	1	-
12	Camba	53	3	-	-
13	Cenrana	47	3	1	-
14	Mallawa	42	5	-	-
Jumlah		715	100	8	5

Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

2.3.1.3.12 Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Rasio ruang terbuka hijau per satuan wilayah adalah perbandingan luas terbuka hijau ber HPL/HGB dibandingkan dengan luas wilayah. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Pada tahun 2016 rasio ruang terbuka hijau di Kabupaten Maros sebesar 0,71. Dimana dari 34.256 ha luas wilayah yang ber HPL/HGB, 24.205,75 ha merupakan areal ruang terbuka hijau. Pada tahun 2020, rasio RTH perluas wilayah



HPL/HGB meningkat menjadi 1,06 dengan luasan RTH sebesar 36.311,36 ha. Peningkatan luas RTH ini disebabkan ada beberapa pembangunan taman dan hutan kota di wilayah perkotaan.

Tabel 2.96
Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas ruang terbuka hijau (Ha)	24.206,50	24.207,25	25.418,14	27.959,95	36.311,36
2	Luas wilayah ber HPL/HGB	34.256	34.256	34.256	34.256	34.256
3	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0,71	0,71	0,74	0,82	1,06

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021

2.3.1.3.13 Rasio Bangunan Ber-IMB

Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan adalah jumlah bangunan yang memiliki IMB terhadap seluruh jumlah bangunan. Rasio bangunan ber IMB Kabupaten Maros tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan peningkatan yang cukup pesat. Pada tahun 2016 rasio IMB per satuan bangunan sebesar 0,09 kemudian meningkat hingga menjadi 0,45.

Peningkatan ini disebabkan adanya sosialisasi dan aturan yang tegas yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Maros untuk masyarakat ataupun pengusaha yang akan mendirikan bangunan agar memiliki izin, dikarenakan apabila didapatkan ada bangunan yang tidak memiliki izin maka bangunan tersebut akan dirubuhkan.

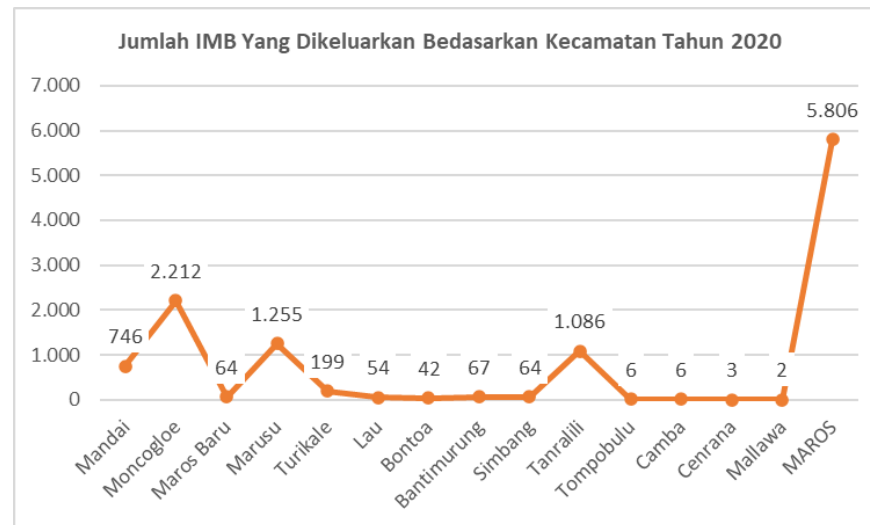
Tabel 2.97
Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah bangunan ber-IMB	6.836	19.660	25.073	30.805	36.612
2	Jumlah bangunan	77.313	78.441	79.586	80.747	81.877
3	Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan	0,09	0,25	0,32	0,38	0,45

Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Maros, 2021



Tabel 2.40
Jumlah IMB Yang Dikeluarkan Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Maros 2020



Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Maros, 2021

2.3.1.3.14 Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya

Ruang publik adalah ruang atau tempat yang dapat diakses atau dimanfaatkan oleh warga atau masyarakat secara cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya, dan bisa dipergunakan bersama-sama oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok. Luas ruang publik yang tersedia di Kabupaten Maros kurang lebih seluas 21.278,20 ha. Hingga saat ini belum ada ruang publik yang berubah peruntukannya menjadi fungsi lain.

Tabel 2.98
Persentase Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ruang publik yang berubah fungsi (Ha)	0	0	0	0	0
2	Jumlah ruang publik yang tersedia (Ha)	21.278,20	21.278,20	21.278,20	21.278,20	21.278,20
3	Ruang Publik Yang Berubah Peruntukannya	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021

2.3.1.3.15 Ketaatan Terhadap RTRW

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW.

Penurunan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Maros selama 5 (lima) tahun terakhir



menunjukkan adanya kesadaran masyarakat tentang tata ruang yang ada serta keterbukaan informasi tentang tata ruang yang ada. Ketaatan terhadap RTRW pada tahun 2016 sebesar 1,11%, kemudian terus meningkat hingga mencapai 2,83% pada tahun 2020.

Tabel 2.99
Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi RTRW	1.606	2.106	2.683	3.159	4.107
2	Rencana Peruntukan	145.310	145.310	145.310	145.310	145.310
3	Ketaatan Terhadap RTRW	1,11	1,45	1,85	2,17	2,83

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021

2.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Pemukiman

2.3.1.4.1 Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk yang ada pada wilayah tersebut. Rasio rumah layak huni Kabupaten Maros hingga tahun 2020 masih cukup rendah, yakni 0,12. Angka ini tidak mengalami perubahan yang signifikan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Kecilnya rasio rumah layak huni di Kabupaten Maros dikarenakan rasio layak huni diperoleh dari perbandingan antara jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk (Sesuai dengan perhitungan indikator pada Permendagri 86).

Tabel 2.100
Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah layak huni	46.255	47.758	37.859	55.252	48.403
2	Jumlah penduduk	342.890	346.759	349.759	353.851	391.774
3	Rasio Rumah Layak huni	0,13	0,14	0,11	0,16	0,12

Sumber : Dinas PKPP Kab. Maros, 2021

Tabel 2.101
Data Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Turikale	961	543	407	407	106
2	Maros Baru	2.072	2.072	2.072	2.072	2.072
3	Mandai	3.010	2.960	2.960	2.960	2.960
4	Moncongloe	1.819	1.819	1.819	1.819	1.819
5	Camba	2.653	2.653	2.553	2.653	2.653
6	Cenrana	2.615	2.498	2.486	2.496	2.496
7	Bantimurung	4.909	4.909	4.909	4.909	4.909
8	Simbang	2.630	2.630	2.630	2.630	2.630
9	Marusu	2.795	2.796	2.796	2.796	2.796
10	Lau	2.717	2.717	2.617	2.617	2.617
11	Bontoa	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370
12	Tanralili	.3009	3.009	3.009	3.009	3.009



No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
13	Tompobulu	2.315	2.315	2.315	2.315	2.315
14	Mallawa	2.218	2.168	2.168	2.168	2.168
Jumlah		38.115	37.457	37.221	37.221	36.920

Sumber : Dinas PKPP Kab. Maros, 2021

2.3.1.4.2 Rasio Permukiman Layak Huni

Rasio permukiman layak huni adalah perbandingan luas permukiman layak huni dengan luas permukiman secara keseluruhan. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian, dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Pada tahun 2016 rasio pemukiman layak huni Kabupaten Maros sebesar 0,97 kemudian meningkat hingga mencapai 0,98 pada tahun 2020. Rasio permukiman layak huni di Kabupaten Maros belum mencapai angka 1 dikarenakan masih adanya permukiman kumuh seluas 103 ha yang masih harus dilakukan penataan dan perbaikan sehingga dapat dikategorikan sebagai permukiman layak huni. Perkembangan kondisi permukiman Kabupaten Maros selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.102
Rasio Permukiman Layak Huni
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas permukiman layak huni	3.682	4.062	4.479	4.938	5.442
2	luas wilayah permukiman	3.786	4.165	4.581	5.039	5.543
3	Rasio Permukiman Layak Huni	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98

Sumber : Dinas PKPP Kab. Maros, 2021

2.3.1.4.3 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Ketersediaan rumah layak huni adalah jumlah rumah layak huni yang terdapat pada suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah seluruh rumah yang ada. Jumlah rumah layak huni di Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebanyak 46.255 unit dari 84.370 unit rumah yang ada, dengan persentase sebesar 54,82 persen. Meningkatnya jumlah rumah layak huni seiring dengan meningkatnya jumlah unit rumah yang ada. Dengan demikian hingga tahun 2020 jumlah rumah layak huni di Kabupaten Maros sebanyak 48.403 unit rumah atau 56,73 persen dari jumlah rumah yang ada.



Secara umum, persentase rumah layak huni dari total rumah yang ada di Kabupaten Maros diatas 50 persen. Masih terdapat sekitar 43 persen rumah layak huni di Kabupaten Maros yang disebabkan pesatnya pertumbuhan penduduk di wilayah perbatasan dengan kota Makassar sehingga banyak masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap tempat tinggal yang representatif. Hal ini menyebabkan masyarakat tersebut membangun rumah yang seadanya saja. Dengan demikian pemerintah masih sangat perlu mengupayakan peningkatan rumah layak huni, terutama pada lapisan masyarakat bawah.

Tabel 2.103
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah seluruh rumah layak huni pada suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	46.255	47.758	37.859	55.252	48.403
2	Jumlah seluruh rumah	84.370	85.305	75.336	84.370	85.323
3	Cakupan ketersediaan Rumah Layak huni	54,82	55,98	50,25	65,48	56,73

Sumber : Dinas PKPP Kab. Maros, 2021

2.3.1.4.4 Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau adalah perbandingan antara jumlah rumah layak huni yang terjangkau dan dapat ditempati oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan jumlah MBR pada kurun waktu tertentu.

Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau pada tahun 2016 sebesar 1,57 % dengan jumlah MBR yang menempati rumah layak huni sebanyak 598 MBR, kemudian meningkat menjadi 6,95 % dengan jumlah MBR yang menempati rumah layak huni sebanyak 2.517 MBR pada tahun 2020.

Semakin banyaknya MBR yang menempati rumah layak huni disebabkan semakin gencarnya pembangunan rumah layak huni di Kabupaten Maros sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Pesatnya pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dapat dilaksanakan dikarenakan adanya dukungan dana dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).



Tabel 2.104
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu	598	1.256	1.492	2.017	2.517
2	Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu	38.115	37.457	37.221	36.698	36.196
3	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	1,57	3,35	4,01	5,50	6,95

Sumber : Dinas PKPP Kab. Maros, 2021

2.3.1.4.5 Persentase Permukiman Yang Tertata

Permukiman tertata adalah permukiman perkotaan dan pedesaan yang serasi, harmoni, saling menunjang dan mendukung. Persentase areal permukiman yang tertata di Kabupaten Maros sudah sangat baik, dimana pada tahun 2016 sudah mencapai 97,26 %, kemudian meningkat 98,18 % pada tahun 2020.

Masih adanya permukiman yang tidak tertata disebabkan masih terdapat permukiman kumuh di Kecamatan Turikale, namun sejak tahun 2018 hingga saat ini telah dilakukan pembenahan terhadap permukiman kumuh tersebut. Perkembangan permukiman yang tertata di Kabupaten Maros selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.105
Persentase Permukiman Yang Tertata
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas areal permukiman tertata	3.682	4.062	4.479	4.938	5.442
2	Luas areal permukiman keseluruhan	3.786	4.165	4.581	5.039	5.543
3	Persentase Permukiman Yang Tertata	97,26	97,53	97,77	98,00	98,18

Sumber : Dinas PKPP Kab. Maros, 2021

2.3.1.4.6 Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan

Areal kawasan kumuh di Kabupaten Maros berada di Kecamatan Turikale dengan luas 103,78 ha, yang disahkan melalui Surat Keputusan(SK) Bupati Maros tahun 2014 dan 2019. Pada tahun 2016 persentase kawasan kumuh perkotaan sebesar 3,14 % dengan luas lingkungan permukiman kumuh yang tertangani sebesar 3,26 ha. Pada tahun 2020 persentase luasan permukiman kumuh



perkotaan sebesar 31,25 % dengan jumlah luasan permukiman kumuh yang tertangani sebesar 31,66 ha.

Penurunan areal kawasan kumuh ini disebabkan penanganan kawasan kumuh merupakan salah satu prioritas program kegiatan yang dilaksanakan selama lima tahun terakhir. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk penanganan kawasan kumuh adalah pembangunan rumah layak huni, penataan jalan lingkungan, perbaikan sanitasi, dan penyediaan akses air minum bagi masyarakat yang tinggal dalam areal kawasan kumuh tersebut.

Tabel 2.106
Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

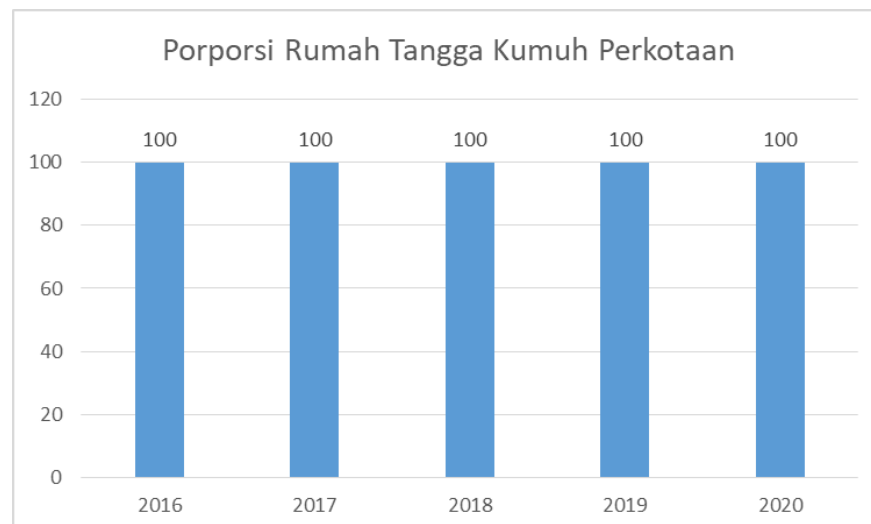
No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luasan permukiman kumuh yang tertangani	3,26	4,73	4,73	26,78	31,66
2	Luas permukiman kumuh	103,78	102,83	102,13	101,60	101,30
3	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	3,14	4,60	4,63	26,36	31,25

Sumber : Dinas PKPP Kab. Maros, 2021

2.3.1.4.7 Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Rumah tangga kumuh adalah rumah tangga yang tidak memiliki akses air minum (air minum layak), akses sanitasi (sanitasi layak). Rumah tangga kumuh di Kabupaten Maros seluruhnya berada di wilayah perkotaan, dengan demikian proporsi rumah tangga kumuh perkotaan sebesar 100 %.

Grafik 2.41
Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas PKPP Kab. Maros, 2021



2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.3.1.5.1. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan (K3))

Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3) adalah suatu kondisi lingkungan lingkungan yang dinamis yang menimbulkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dalam tata hidup bersama. Kemudian bersih, sehat dan segar yang terasa tampak di seluruh ruangan kerja dan halaman.

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kabupaten Maros menunjukkan kondisi yang sangat baik, dimana hampir seluruh pelanggaran dapat diselesaikan dengan baik. Pada tahun 2016 tingkat penyelesaian pelanggaran K3 sebesar 100 % dan pada tahun 2020 sebesar 98,75 %.

Terselesaikannya tingkat pelanggaran K3 di Kabupaten Maros dengan persentase diatas 95 % disebabkan adanya koordinasi yang massif antara Pemerintah Kabupaten Maros dengan *stacke holder* terkait, utamanya pihak kementerian baik dari TNI maupun Polri dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Selain itu pendekatan yang persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat juga dilakukan untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Tabel 2.107
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Pelanggaran K3 yang terselesaikan	53	39	30	24	21
Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP	53	39	31	25	21
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	100,00	100,00	96,77	96,00	100,00

Sumber : Satpol PP & Damkar Kab. Maros, 2021

2.3.1.5.2. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota

Cakupan pelayanan bencana kebakaran adalah jumlah kasus kebakaran yang dapat ditangani oleh satuan pemadam kebakaran kabupaten/kota dalam waktu maksimal 15 menit sejak laporan masuk.

Cakupan pelayanan kebakaran di Kabupaten Maros pada tahun 2020 menunjukkan kondisi yang cukup baik, walaupun cakupannya menunjukkan



penurunan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 cakupan pelayanan kebakaran sebesar 92,33 %, tahun 2018 sebesar 100 %, kemudian menurun hingga mencapai 88,00 % pada tahun 2020. Menurunnya cakupan pelayanan ini disebabkan adanya armada yang mengalami kerusakan pada tahun 2020 sehingga tidak dapat digunakan lagi. Dengan demikian cakupan wilayah yang dapat terlayani juga berkurang.

Tabel 2.108
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran	1.495	1.546	1.603	1.619,12	1.424,82
2	Luas wilayah kabupaten/kota	1.619,12	1.619,12	1.619,12	1.619,12	1.619,12
3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	92,33	95,48	99,00	100,00	88,00

Sumber : Satpol PP & Damkar Kab. Maros, 2021

2.3.1.5.3. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran

Waktu tanggap atau lebih dikenal dengan *response time* adalah total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman (biasa ditandai dengan keluarnya air/ penyemprotan air pertama). Komponen waktu yang dihitung dalam *response time* ini adalah waktu pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran (*dispatch time*), waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran dan waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk memadamkan.

Tingkat waktu tanggap manajemen kebakaran Kabupaten Maros menunjukkan peningkatan yang sangat baik sejak tahun 2016. Capaiannya pun berada diatas 95 %. Pada tahun 2016 tingkat waktu tanggap sebesar 97,01 %, kemudian meningkat hingga mencapai 100 % pada tahun 2020.

Tingginya waktu tanggap terhadap adanya kebakaran di Kabupaten Maros disebabkan karena tingkat keahlian petugas pemadam kebakaran yang sudah terlatih dan bersertifikat dalam menghadapi bencana kebakaran, selain itu telah diterapkannya *Standar Operational Procedure (SOP)* dalam penanganan bahaya kebakaran juga berdampak terhadap tingkat waktu tanggap penanganan kasus kebakaran.



Tabel 2.109
Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*)
Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	65	51	53	50	45
2	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK	67	52	54	50	45
3	Tingkat Waktu tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran	97,01	98,08	98,15	100,00	100,00

Sumber : Satpol PP & Damkar Kab. Maros, 2021

2.3.1.5.4. Persentase penegakan PERDA

Salah satu tugas dan fungsi utama Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan Peraturan Daerah (Perda). Jumlah pelanggaran Perda di Kabupaten Maros relatif sedikit dan keseluruhan pelanggaran tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Pada tahun 2016 persentase penegakan Perda sebesar 95 % kemudian meningkat hingga menjadi 100 % pada tahun 2017 hingga tahun 2020.

Capaian penegakan Perda yang mencapai 100 % ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini Satpol PP rutin melakukan patroli dan melakukan tindakan terhadap masyarakat yang melanggar Perda. Selain itu koordinasi yang dilakukan dengan *stake holder* terkait serta sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat juga merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran perda.

Tabel 2.110
Persentase penegakan PERDA
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA	4	2	1	1	1
2	Jumlah pelanggaran PERDA	4	2	1	1	1
3	Persentase penegakan PERDA	95	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP & Damkar Kab. Maros, 2021



2.3.1.6. Sosial

2.3.1.6.1. Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan sosial pada tahun 2016 masih 0 persen, kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 13,04 % dengan jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sebanyak 7 PMKS. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 57,69% dengan jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sebanyak 15 PMKS dari 26 PMKS yang seharusnya menerima bantuan.

Masih rendahnya PMKS yang mendapatkan bantuan disebabkan tidak meratanya persebaran potensi dan sumber kesejahteraan sosial di Kabupaten Maros sehingga masih banyak PMKS yang belum tertangani. Perkembangan PMKS yang memperoleh bantuan sosial selama tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.111
Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan	0	3	5	7	15
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	0	23	27	26	26
3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	0,00	13,04	18,52	26,92	57,69

Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2021

2.3.1.6.2. Persentase PMKS Yang Tertangani

Persentase PMKS yang tertangani di Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebesar 6 %, dengan jumlah PMKS yang tertangani sebanyak 3 PMKS. Pada tahun 2020 persentase PMKS yang tertangani mencapai 57,69 % dengan jumlah PMKS yang tertangani sebanyak 5 PMKS. Masih rendahnya persentase PMKS yang tertangani disebabkan banyaknya PMKS yang berasal dari Kota Makassar yang masuk dalam wilayah Kabupaten Maros.



Tabel 2.112
Persentase PMKS Yang Tertangani
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang tertangani	3,00	3,00	4,00	5,00	15,00
2	Jumlah PMKS yang ada	50,00	23,00	27,00	26,00	26,00
3	Persentase PMKS yang tertangani	6,00	15,00	14,81	19,23	57,69

Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2021

2.3.1.6.3. Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar

PMKS yang mendapatkan bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar adalah jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2017 sebesar 11,54 % kemudian meningkat menjadi 13,04 % pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2020, dari 26 PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial, terdapat 15 PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar atau sebesar 57,69 persen.

Tabel 2.113
Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Dalam Hal Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun	0,00	3,00	3,00	5,00	15,00
2	Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	0,00	26,00	23,00	21,00	26,00
3	Persentase PMKS Skala Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	0,00	11,54	13,04	23,81	57,69

Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2021

2.3.1.6.4. Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Ekonomi Sejenis Lainnya

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan



Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga.

Jumlah panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE pada tahun 2017 sebesar 3,85 %, dimana dari 26 panti sosial yang terdapat di Kabupaten Maros hanya 1 yang mendapatkan bantuan. Persentase panti yang mendapat bantuan kemudian meningkat pada tahun 2018 sebesar 13,64 % dan 22,22 % pada tahun 2019. Pada tahun 2020 terdapat 8 panti sosial yang mendapatkan menerima program pemberdayaan sosial melalui KUBE atau 53,33 persen dari dari 15 panti sosial panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis.

Tabel 2.114
Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	0,00	1,00	3,00	4,00	8,00
2	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	0,00	26,00	22,00	18,00	15,00
3	Persentase Panti Sosial Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya	0,00	3,85	13,64	22,22	53,33

Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2021

2.3.1.6.5. Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial

Panti Sosial mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial agar mampu berperan aktif, berkehidupan dalam masyarakat, rujukan regional, pengkajian dan penyiapan standar pelayanan, pemberian informasi serta koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2016 persentase panti sosial yang menyediakan pelayanan kesehatan sebesar 85,71 %, dimana dari 14 panti sosial yang ada di Kabupaten



Maros, 12 panti diantaranya telah menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan. Sedangkan pada tahun 2020 persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana kesehatan sebesar 53,33 %. Jumlah panti sosial pada tahun 2020 sebanyak 15 panti, dan 8 panti diantaranya telah menyediakan sarana prasarana layanan kesehatan.

Tersedianya sarana dan prasarana layanan kesehatan pada panti sosial disebabkan Pemerintah Kabupaten Maros melalui Dinas Sosial telah melaksanakan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana di setiap panti sosial, utamanya sarana dan prasarana pelayanan dasar. Meskipun demikian masih perlu adanya peningkatan sarana prasarana panti sosial, terutama dalam hal pelayanan kesehatan sosial.

Tabel 2.115
Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	12,00	12,00	8,00	10,00	8,00
2	Jumlah panti osial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	14,00	14,00	14,00	14,00	15,00
3	Persentase Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial	85,71	85,71	57,14	71,43	53,33

Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2021

2.3.1.6.6. Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat [WKSBM] adalah sistem kerjasama antar keperangkat pelayanan sosial diakar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.

Jumlah WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial pada tahun 2016 hingga tahun 2020 sebanyak 2 (dua) dari 6 (enam) WKBSM yang ada di Kabupaten Maros. Persentase WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial sebesar 33,33 persen.



Tabel 2.116
Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM)
Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
3	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33

Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2021

2.3.1.6.7. Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat pada tahun 2016 sebesar 31,20 %, kemudian pada tahun 2017 hingga tahun 2020 persentase korban bencana yang memperoleh bantuan sosial sebesar 100 %. Hal ini menunjukkan kesiapan dan kesigapan pemerintah dalam penanganan bencana, terutama dalam penyaluran bantuan selama masa tanggap darurat telah dilakukan secara maksimal.

Tabel 2.117
Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial
Selama Masa Tanggap Darurat Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap dalam 1 (satu) tahun	2.540	2.435	2.435	2.600	138
2	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap dalam 1 (satu) tahun	8.142	2.435	2.435	2.600	138
3	Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	31,20	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2021



2.3.1.6.8. Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap

Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap pada tahun 2016 sebesar 0 % kemudian tahun 2017 sebesar 20 % dan meningkat hingga mencapai 100 % pada tahun 2019. Sementara data tahun 2020 menunjukkan bahwa tidak ada korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.

Tabel 2.118
Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun	0,00	1,00	0,00	10,00	0,00
2	Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun	5,00	5,00	5,00	10,00	0,00
3	Persentase Korban Bencana Yang Dievakuasi Dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap	0,00	20,00	0,00	100,00	0,00

Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2021

2.3.1.6.9. Persentase Penyandang Cacat Fisik dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warga negaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO No.102 tahun 1952. Utamanya dari bidang kesejahteraan sosial yang memperhatikan perlindungan sosial, atau perlindungan



terhadap kondisi yang diketahui sosial, termasuk kemiskinan, usia lanjut, kecacatan, pengangguran, keluarga, anak-anak, dan lain-lain.

Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia yang mendapatkan jaminan sosial pada tahun 2016 sebesar 100 %, kemudian menurun hingga mencapai 88,89 % pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020, persentasenya kembali meningkat hingga mencapai 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 keseluruhan penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial telah menerima jaminan sosial.

Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia yang menerima jaminan sosial selama tahun 2016-2020 menunjukkan tren data yang berfluktuatif. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia sedangkan jumlah sasaran yang akan diberikan jaminan sosial cukup banyak.

Tabel 2.119
Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental Serta Lansia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial abupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun	125	150	175	200	233
2	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun	125	200	225	225	233
3	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100,00	75,00	77,78	88,89	100,00

Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2021

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Tenaga Kerja

2.3.2.1.1 Angka Sengketa Pengusaha Pekerja Per Tahun

Sengketa antara pengusaha dan pekerja terjadi apabila ada hak-hak atau kewajiban salah satu pihak yang tidak dipenuhi, sehingga mengakibatkan terjadinya tuntutan hukum yang harus diselesaikan melalui pengadilan atau lembaga hukum lainnya.



Angka Sengketa pengusaha-pekerja per tahun di Kabupaten Maros menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2016 angka sengketa sebesar 31,67 kasus untuk setiap 1.000 perusahaan, kemudian meningkat menjadi 47,50 kasus untuk setiap 1.000 perusahaan.

Semakin meningkatnya sengketa antara pengusaha dan pekerja ini disebabkan karena adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan perusahaan yang berdampak terhadap kesejahteraan para pekerja, sehingga timbul perselisihan antara pekerja dan pengusaha yang berujung dengan sengketa.

Tabel 2.120
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sengketa pengusaha pekerja	7	5	10	15	15
2	Jumlah perusahaan	221	230	257	270	320
3	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	31,67	21,74	38,91	55,56	47,50

Sumber : Disnakertrans Kab. Maros, 2021

2.3.2.1.2 Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)

Persentase kasus sengketa antara pengusaha dan pekerja di Kabupaten Maros yang dapat diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) sampai dengan tahun 2016 mencapai 57%, kemudian meningkat hingga mencapai 67% pada tahun 2020.

Masih rendahnya kasus antara pengusaha dan pekerja yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) disebabkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan berdampak terhadap tingkat kesejahteraan pekerja, sehingga pekerja memilih menyelesaikan kasus melalui ranah hukum atau pengadilan.

Tabel 2.121
Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kasus yang diselesaikan melalui perjanjian bersama (PB)	4	6	9	6	10
2	Jumlah kasus yang dicatatkan	7	6	10	12	15
3	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	57	100	90	50	67

Sumber : Disnakertrans Kab. Maros, 2021



2.3.2.1.3 Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan

Besaran pencari kerja adalah jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten Maros dan ditempatkan sesuai dengan lowongan pekerjaan yang tersedia. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dapat dilihat berdasarkan jumlah kartu pencari kerja (kartu kuning) yang dikeluarkan.

Walaupun capaian pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan dengan *skill* dan disiplin ilmu yang dimiliki masih cukup rendah, namun secara umum besarnya menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 besaran pencari kerja yang ditempatkan sebesar 16,31% kemudian meningkat pada tahun 2020 hingga mencapai 23,27%.

Masih rendahnya peyerapan tenaga kerja di Kabupaten Maros disebabkan karena tingkat kapasitas dan kualitas tenaga kerja yang terdaftar tidak sesuai dengan syarat yang diinginkan oleh perusahaan, atau dengan kata lain, kualitas tenaga kerja di Kabupaten Maros masih rendah baik dari segi pendidikan maupun keterampilan sehingga banyak tenaga kerja yang terdaftar namun belum memiliki pekerjaan.

Tabel 2.122
Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	29	93	130	200	465
2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar	637	1249	1350	1500	2000
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	4,55	7,45	9,63	13,33	23,27

Sumber : *Disnakertrans Kab. Maros, 2021*

2.3.2.1.4 Keselamatan dan Perlindungan

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah institusi maupun lokasi proyek. Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja.

Jumlah perusahaan yang telah menerapkan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada tahun 2016 sebanyak 23 perusahaan dari 221 perusahaan yang ada. Dengan demikian keselamatan dan perlindungan pada tahun 2016 sebesar 10,14%. Pada tahun 2020 jumlah perusahaan yang telah menerapkan K3 sebanyak 320 perusahaan dengan persentase 100%.



Capaian perusahaan yang menerapkan K3 sebesar 100% pada tahun 2020 disebabkan adanya aturan yang mewajibkan perusahaan untuk menerapkan K3 dalam kegiatan operasionalnya. Apabila perusahaan tersebut tidak menerapkan K3, maka izinnnya dapat dicabut.

Tabel 2.123
Keselamatan dan Perlindungan Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) pada tahun n	23	35	40	52	320
2	Jumlah perusahaan di wilayah kabupaten selama tahun n	221	230	257	270	320
3	Keselamatan dan perlindungan	10,41	15,22	15,56	19,26	100,00

Sumber : *Disnakertrans Kab. Maros, 2021*

2.3.2.1.5 Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

Sejak tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Maros dan BPJS Ketenagakerjaan telah menjalin kerjasama tentang kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam pemberian layanan. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan pada tahun 2016 sebesar 66,12%, kemudian meningkat hingga mencapai 75,46% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 besaran pekerja/buruh peserta BPJS ketenagakerjaan turun hingga sebesar 48,25%.

Menurunnya jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020 disebabkan banyak perusahaan yang tutup akibat pandemi COVID-19. Akibat adanya larangan beraktifitas yang cukup lama selama tahun 2020, mengakibatkan banyak pelaku usaha bangkrut hingga akhirnya menutup usahanya yang kemudian berdampak terhadap pemutusan hubungan kerja karyawan/buruh.

Tabel 2.124
Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pekerja/buruh jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan	8.050	10.160	11.176	12.294	8.333
2	Jumlah pekerja/buruh	12.175	14.500	15.370	16.292	17.270



No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
3	Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Jamsostek (BPJS Ketenakerjaan)	66,12	70,07	72,71	75,46	48,25

Sumber : Disnakertrans Kab. Maros, 2021

2.3.2.1.6 Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Daerah

Perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah disebabkan karena kurang pemahannya buruh dan pengusaha terhadap kebijakan tersebut. Selain itu kurangnya sosialisasi kebijakan tersebut menyebabkan informasi-informasi yang dianggap penting tidak sampai ke buruh atau pengusaha. Pada tahun 2017 dan 2019 jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha terkait kebijakan pemerintah daerah sebanyak 1 kasus, namun kasus tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Tabel 2.125
Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda pada tahun n	0	1	0	1	0
2	Jumlah kejadian perselisihan buruh dan pengusaha dengan kebijakan pemda	0	1	0	1	0
3	Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah	0	100	0	100	0

Sumber : Disnakertrans Kab. Maros, 2021

2.3.2.1.7 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi

Tenaga kerja yang terampil adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kualitas dan kemampuan yang dimilikinya. Untuk menjaga agar kemampuan tenaga kerja tersebut berada pada level yang diinginkan, maka diperlukan pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi terhadap para tenaga kerja tersebut.

Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Kabupaten Maros pada tahun 2017 sebesar 50%, dengan jumlah tenaga kerja yang dilatih sebanyak 30 orang kemudian pada tahun 2020 sedikit menurun menjadi 36,49% dengan jumlah tenaga kerja yang dilatih sebanyak 77 orang.



Menurunnya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan pada tahun 2020 disebabkan adanya *refocusing* anggaran akibat pandemi COVID-19, sehingga jumlah tenaga kerja yang dilatih menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Tabel 2.126
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	0	30	60	90	77
2	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kompetensi	0	60	150	200	210
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	0	50,00	40,00	45,00	36,49

Sumber : Disnakertrans Kab. Maros, 2021

2.3.2.1.8 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat di Kabupaten Maros pada tahun 2017 sebesar 30 orang dengan besaran sebesar 20%. Pada tahun 2020, jumlah tenaga kerja yang memperoleh pelatihan sebanyak 121 orang dengan besaran sebesar 69,00%.

Menurunnya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan pada tahun 2020 disebabkan adanya *refocusing* anggaran akibat pandemi COVID-19, sehingga jumlah tenaga kerja yang dilatih menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Tabel 2.127
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	0	30	70	120	121
2	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis Masyarakat	0	150	150	150	175
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	0	20,00	46,67	80,00	69,00

Sumber : Disnakertrans Kab. Maros, 2021

2.3.2.1.9 Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan

Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan di Kabupaten Maros pada tahun 2017 hingga tahun 2018 sebanyak 30 orang dengan besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan sebesar 30%. Pada



tahun 2020 terdapat peningkatan jumlah tenaga kerja yang dilatih sebanyak 60 orang, dengan besaran tenaga kerja yang dilatih sebesar 60,00%.

Tabel 2.128
Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	0	30	30	30	60
2	Jumlah pendaftar pelatihan berbasis kewirausahaan	0	100	100	100	100
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	0	30,00	30,00	30,00	60,00

Sumber : Disnakertrans Kab. Maros, 2021

2.3.2.1.10 Rasio Lulusan S1/S2/S3

Rasio lulusan S1/S2/S3 adalah jumlah penduduk yang pendidikan terakhirnya berada pada tingkatan pendidikan tinggi, dibandingkan dengan jumlah penduduk keseluruhan pada wilayah tersebut. Rasio penduduk lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Maros hingga tahun 2016 mencapai 4,83 orang per 1.000 penduduk. Sedangkan pada tahun 2020 rasio lulusan S1/S2/S3 sebesar 5,09.

Masih rendahnya jumlah penduduk dengan lulusan perguruan tinggi di Kabupaten Maros secara umum dapat terlihat dari rata-rata lama sekolah Kabupaten Maros yang masih berada di angka 7 tahun. Penduduk Kabupaten Maros yang berada di wilayah pelosok masih memegang kepercayaan bahwa pendidikan tinggi tidak terlalu penting.

Tabel 2.129
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah lulusan S1/S2/S3	16.570	14.151	14.151	14.576	19.934
2	Jumlah penduduk	342.890	346.383	349.822	353.121	391.774
3	Rasio Lulusan S1/S2/S3	4,83	4,09	4,05	4,13	5,09

Sumber : Disnakertrans Kab. Maros, 2021

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.3.2.2.1 Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah

Persentase perempuan di lembaga pemerintah adalah jumlah proporsi perempuan yang ada pada lembaga pemerintah dibandingkan dengan jumlah total pekerja perempuan yang ada pada suatu wilayah.

Pada tahun 2016 persentase perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Maros sebesar 7,53%, kemudian meningkat menjadi 18,06% pada tahun



2020. Jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah sebesar 4.180 orang pada tahun 2016 dan pada tahun 2020 sebesar 7.410 orang.

Penambahan jumlah pekerja perempuan dari tahun 2017 hingga tahun 2020 berhubungan dengan jumlah penerimaan Aparatur Sipil Negara yang tidak terlalu banyak pada periode tahun 2017 hingga tahun 2020, bahkan pada tahun 2019 dan tahun 2020 tidak ada penerimaan ASN.

Tabel 2.130
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	4.180	7.344	7.366	7.388	7.410
2	Jumlah pekerja perempuan	55.512	43.595	42.723	41.869	41.031
3	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	7,53	16,85	17,24	17,65	18,06

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

2.3.2.2.2 Proporsi Kursi Yang Diduduki Perempuan di DPRD

Jumlah perempuan yang menduduki kursi DPRD di Kabupaten Maros berdasarkan hasil Pilkada Calon Legislatif tahun 2019 hingga tahun 2024 sebanyak 9 orang dengan total kursi keanggotaan DPRD di Kabupaten Maros sebanyak 35 kursi. Dengan demikian persentase kursi yang diduduki perempuan di DPRD periode 2019-2024 sebanyak 25,71%.

Bertambahnya jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Maros memperlihatkan bahwa semakin banyak masyarakat yang mempercayakan wakilnya di DPRD kepada perempuan.

Tabel 2.131
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	7	7	7	9	9
2	Jumlah total kursi di keanggotaan DPR	35	35	35	35	35
3	Persentase Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD	20,00	20,00	20,00	25,71	25,71

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021



2.3.2.2.3 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Persentase perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan pada lembaga swasta dibandingkan dengan jumlah seluruh pekerja perempuan yang ada pada suatu wilayah tertentu.

Persentase pekerja perempuan di lembaga swasta pada tahun 2016 sebesar 92,47%, kemudian menurun hingga mencapai 81,94% pada tahun 2020. Jumlah pekerja perempuan swasta pada tahun 2016 sebanyak 51.332 orang, kemudian menurun hingga mencapai 33.621 orang pada tahun 2020.

Tabel 2.132
Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pekerja perempuan di lembaga swasta	51.332	36.251	35.357	34.481	33.621
2	Jumlah pekerja perempuan	55.512	43.595	42.723	41.869	41.031
3	Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta	92,47	83,15	82,76	82,35	81,94

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

2.3.2.2.4 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang disingkat dengan KDRT adalah jenis kekerasan yang terjadi diantara pasangan, anak, atau anggota keluarga lainnya. KDRT dapat mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis korbannya.

Rasio KDRT Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 rasio KDRT sebesar 0,04 dengan kasus KDRT yang dilaporkan sebanyak 32 kasus. Sedangkan pada tahun 2020 menurun hingga mencapai 0,01 dengan kasus KDRT yang dilaporkan sebanyak 6 kasus.

Penurunan jumlah kasus KDRT disebabkan karena kesadaran yang cukup tinggi di masyarakat, ataupun jumlah kasus yang dilaporkan sangat sedikit. Hal ini dikarenakan KDRT masih dianggap sebagai aib oleh sebagian besar masyarakat, sehingga kejadiannya ditutupi dan tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Tabel 2.133
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KDRT	32	51	38	28	6
2	Jumlah rumah tangga	85.723	87.437	89.186	90.970	92.789
3	Rasio KDRT	0,04	0,06	0,04	0,03	0,01

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021



2.3.2.2.5 Persentase Tenaga Kerja Di Bawah Umur

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan. Persentase tenaga kerja dibawah umur adalah proporsi pekerja anak usia 5-14 tahun terhadap jumlah pekerja 5 tahun keatas.

Kabupaten Maros sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 tidak memiliki tenaga kerja di bawah umur (0%). Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Maros telah berkomitmen dan memberikan peringatan terhadap perusahaan ataupun pelaku usaha untuk tidak menggunakan tenaga kerja di bawah umur, dan akan diberikan sanksi pencabutan izin usaha serta pidana bagi perusahaan dan pelaku usaha yang melanggar.

Tabel 2.134
Persentase Jumlah Tenaga Kerja dibawah Umur
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pekerja anak usia 5-14 tahun	0	0	0	0	0
2	Jumlah pekerja usia 5 tahun keatas	0	0	0	0	0
3	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

2.3.2.2.6 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan antara pria dan wanita umumnya berbeda. Biasanya partisipasi wanita lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini erat kaitannya dengan sistem nilai masyarakat, bahwa pria memikul kewajiban untuk mencari nafkah.

Partisipasi angkatan kerja perempuan Kabupaten Maros tahun 2016 sebesar 40,41%, dengan jumlah angkatan kerja sebesar 51.004 orang. Sedangkan pada tahun 2020, partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar 43,63% dengan jumlah angkatan kerja sebesar 60.013 orang.

Masih rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan disebabkan pemahaman di masyarakat bahwa perempuan tidak perlu memiliki pekerjaan, utamanya perempuan yang sudah berkeluarga. Selain itu rendahnya tingkat



pendidikan yang dimiliki juga memberikan pengaruh terhadap rendahnya angkatan kerja perempuan.

Tabel 2.135
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angkatan Kerja Perempuan	51.004	48.071	51.917	56.070	60.013
2	Penduduk Usia Kerja Perempuan	126.217	128.064	129.766	131.064	137.546
3	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	40,41	37,54	40,01	42,78	43,63

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

2.3.2.2.7 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih dalam unit pelayanan terpadu Kabupaten Maros pada tahun 2016 tercatat sebanyak 21 orang, kemudian meningkat pada tahun 2017 sebanyak 79 orang. Pada tahun 2020 jumlah pengaduan menurun hingga mencapai 6 pengaduan/laporan.

Seluruh laporan atau pengaduan yang masuk dalam unit pelayanan telah ditindaklanjuti sehingga cakupannya mencapai 100%. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Pemerintah Kabupaten Maros telah memiliki komitmen dan perhatian terhadap perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 2.136
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	21	79	6	6	6
2	Jumlah laporan/pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu	21	79	6	6	6
3	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021



2.3.2.2.8 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Jumlah korban kekerasan, baik perempuan maupun anak-anak yang mendapatkan pelayanan di puskesmas oleh tenaga kesehatan terlatih telah tertangani seluruhnya, sehingga cakupan pelayanannya mencapai angka 100% sejak tahun 2017 hingga tahun 2020. Pada tahun 2017 terdapat 10 kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian pada tahun 2020 menurun hingga menjadi menjadi 4 kasus.

Tertanganinya korban kasus kekerasan perempuan dan anak di fasilitas kesehatan disebabkan petugas kesehatan, baik yang berada di puskesmas maupun yang berada di RSUD Salewangang telah memiliki kapasitas dan kualifikasi untuk penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

Tabel 2.137
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah korban KTP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tata laksana KTP/A atau PPT/PKT di RS di suatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu	0	10	8	6	4
2	Jumlah seluruh korban KTP/A yang terdata datang ke puskesmas mampu tatalaksana kasus KTp/A dan ke RS disuatu wilayah kerja tertentu dalam kurun waktu tertentu	0	10	8	6	4
3	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	0	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

2.3.2.2.9 Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Unit Pelayanan Terpadu

Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial pada tahun 2017 sebanyak 28 orang, kemudian pada tahun 2018 sebanyak 26 orang. Pada tahun 2020 jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan sebanyak 22 orang. Seluruh korban kekerasan, baik perempuan maupun anak-anak yang memerlukan rehabilitasi sosial telah mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga cakupan layanan pada tahun 2017 hingga tahun 2020 mencapai 100%.



Tabel 2.138
Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial Yang Diberikan Oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos	0	28	26	24	22
2	Jumlah korban kekerasan yang membutuhkan rehabsos	0	28	26	24	22
3	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam unit pelayanan terpadu	0	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

2.3.2.2.10 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Jumlah korban kekerasan baik perempuan maupun anak-anak di Kabupaten Maros masih cukup tinggi. Pada tahun 2016 jumlah korban kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum sebanyak 34 orang kemudian menurun hingga mencapai 2 orang pada tahun 2020. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 mencapai 100%.

Seluruh anak dan korban kekerasan mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan disebabkan karena pada unit pelayanan terpadu Kabupaten Maros telah tersedia tenaga-tenaga psikiater, tenaga kesehatan, dan ahli hukum yang akan memerikan bantuan dan pelayanan secara maksimal dan tuntas.

Tabel 2.139
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Bantuan Hukum Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah korban mendapat layanan bantuan hukum	34	18	6	4	2
2	Jumlah korban yang membutuhkan bantuan hukum	34	18	6	4	2
3	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan bantuan Hukum	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021



2.3.2.2.11 Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 cakupan pemulangan sebesar 59,37%, kemudian meningkat hingga menjadi 100% pada tahun 2020. Jumlah perempuan dan anak yang mendapatkan layanan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 sebanyak 152 orang dengan jumlah korban yang tercatat sebanyak 192 orang.

Setelah mendapatkan perawatan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, Pemerintah Kabupaten Maros tetap melakukan pendampingan dengan melakukan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan ke keluarga masing-masing dengan tujuan agar para korban dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya.

Tabel 2.140
Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pemulangan	19	28	32	34	40
2	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT	32	40	40	40	40
3	Cakupan Layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	59,37	70,00	80,00	85,00	100,00

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

2.3.2.2.12 Cakupan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebanyak 32 orang. Dari jumlah korban tersebut, jumlah yang disatukan kembali ke keluarga dan masyarakat sebanyak 20 orang (62,50%). Pada tahun 2020 Cakupan layanan reintegrasi sosial sebesar 100%, dimana jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang dikembalikan ke keluarga masing-masing sebanyak 40 orang.

Tabel 2.141
Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan
Anak Korban Kekerasan Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang disatukan kembali ke keluarga, keluarga pengganti dan masyarakat lainnya	20	28	32	34	40



2	Jumlah perempuan dan anak korban kekerasan yang tercatat di UPT	32	40	40	40	40
3	Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	62,50	70,00	80,00	85,00	100

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

2.3.2.2.13 Rasio APM Perempuan / Laki-Laki SD

Rasio Angka Partisipasi Murni (RPAM) anak perempuan terhadap anak laki-laki di tingkat pendidikan dasar adalah perbandingan APM murid perempuan terhadap APM murid laki-laki. Indikator ini digunakan untuk melihat kesempatan memperoleh pendidikan antara laki-laki dan perempuan yang menunjukkan keadilan gender dalam bidang pendidikan.

Rasio APM SD perempuan dan laki-laki pada tahun selama tahun 2016 hingga tahun 2017 berada di bawah 100. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jumlah siswa laki-laki tingkat SD lebih sedikit dibandingkan siswa SD perempuan. Sedangkan pada tahun 2018 hingga tahun 2020 rasio APM menunjukkan angka diatas 100, dengan demikian jumlah siswa perempuan pada tingkat SD pada tahun 2018 hingga tahun 2020 lebih banyak dibandingkan siswa laki-laki.

Lebih banyaknya penduduk jenis kelamin perempuan yang bersekolah pada tingkat SD dibandingkan laki-laki disebabkan motivasi penduduk perempuan untuk belajar lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

Tabel 2.142
Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	APM SD-Perempuan	86,24	94,61	100,00	100,00	99,63
2	APM SD Laki-Laki	99,39	100,00	99,47	99,50	99,25
3	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SD	86,77	94,61	100,53	100,50	100,38

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

2.3.2.2.14 Rasio APM Perempuan/Laki-Laki SMP

Rasio APM SMP perempuan dan laki-laki pada tahun selama tahun 2016 berada di diatas 100. Demikian juga pada tahun 2019 dan 2020, rasio APM SMP perempuan terhadap laki-laki sebesar 106,74 dan 109,14. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah siswa laki-laki pada tingkat SMP lebih sedikit dibandingkan siswa perempuan. Sedangkan pada tahun 2018 hingga tahun 2019 rasio APM



menunjukkan angka dibawah 100, dengan demikian jumlah siswa perempuan pada tingkat SMP pada tahun 2018 hingga tahun 2019 lebih sedikit dibandingkan siswa laki-laki.

Lebih banyaknya perempuan yang bersekolah pada tingkat SMP dibandingkan laki-laki disebabkan motivasi penduduk perempuan untuk belajar lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Di samping itu, anak laki-laki setelah tamat SD tidak melanjutkan lagi ke jenjang berikutnya dikarenakan mereka membantu orang tuanya dalam menopang perekonomian keluarga.

Tabel 2.143
Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	APM SMP-Perempuan	78,17	74,00	69,59	74,46	76,21
2	APM SMP Laki-Laki	71,45	75,37	74,21	69,76	69,83
3	Rasio APM Perempuan/Laki-Laki di SMP	109,41	98,18	93,77	106,74	109,14

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

2.3.2.2.15 Rasio APM Melek Huruf Perempuan Terhadap laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun

Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki kelompok usia 14-24 tahun adalah perbandingan jumlah anak perempuan terhadap anak laki-laki yang melek huruf atau dapat membaca dan menulis. Apabila rasio kurang dari 100 maka jumlah penduduk perempuan yang melek huruf lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk laki-laki, demikian sebaliknya apabila rasio >100 maka jumlah penduduk perempuan yang melek huruf lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki penduduk usia 15-24 tahun pada tahun 2016 sebesar 93,23%. Dengan demikian jumlah penduduk laki-laki lebih banyak yang melek huruf dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2020 rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki sebesar 100%. Hal ini memperlihatkan bahwa seluruh penduduk 15-24 tahun, baik laki-laki maupun perempuan telah memiliki kemampuan membaca dan menulis.

Tabel 2.144
Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap laki-Laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	AMH 15-24 Perempuan	86,99	99,66	100,00	100,00	100,00
2	AMH 15-24 Laki-Laki	93,31	100,00	100,00	100,00	100,00



3	Rasio Melek Huruf Perempuan Terhadap Laki-laki Pada Kelompok Usia 15-24 Tahun	93,23	99,66	100,00	100,00	100,00
---	---	-------	-------	--------	--------	--------

Sumber : Dinas Pemb. Perempuan dan Perlind. Anak Kab. Maros, 2021

2.3.2.3 Pangan

2.3.2.3.1 Ketersediaan pangan Utama

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan adalah dengan mengukur rasio ketersediaan dengan konsumsi pangan. Rasio pangan ini berguna sebagai masukan untuk memperbaiki dan meningkatkan penyediaan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.

Untuk mengetahui ketersediaan pangan utama, maka terlebih dahulu harus diketahui kebutuhan pangan utama. Kebutuhan pangan utama diperoleh dari perkalian antara jumlah penduduk dengan konstanta (0,109 ton) yang merupakan kebutuhan pangan tiap orang per tahun. Kebutuhan pangan Kabupaten Maros tahun 2016 sebesar 37.375 ton, kemudian meningkat menjadi 42.703 ton pada tahun 2020.

Tabel 2.145
Kebutuhan Pangan Utama Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kebutuhan pangan (ton)	0,109	0,109	0,109	0,109	0,109
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	342.890	346.383	349.822	353.121	391.774
3	Kebutuhan Pangan Utama	37.375	37.756	38.131	38.490	42.703

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Maros, 2021

Ketersediaan pangan utama dihitung berdasarkan kebutuhan pangan serta jumlah cadangan pangan yang tersedia. Ketersediaan pangan utama Kabupaten Maros menunjukkan persentase yang melebihi 100%. Pada tahun 2016 ketersediaan pangan utama sebesar 662,64%, sedangkan pada tahun 2020 persentase ketersediaan pangan utama sebesar 447,81%.

Persentase pangan utama yang lebih besar dari 100% menunjukkan bahwa Kabupaten Maros mengalami surplus untuk ketersediaan pangan utama, walaupun terdapat penurunan produksi pada tahun 2020. Tingginya produksi pangan utama ini disebabkan adanya PERDA tentang larangan alih fungsi lahan produktif serta pembangunan saluran irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan produksi petani. Adapun penurunan produksi pada tahun 2020, disebabkan oleh kondisi cuaca yang cukup ekstrim yang menyebabkan waktu panen bergeser ke tahun berikutnya.



Tabel 2.146
Ketersediaan Pangan Utama Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah cadangan pangan (ton)	247.663	243.578	248.450	250.314	191.232
2	Jumlah kebutuhan pangan (ton)	37.375	37.756	38.131	38.490	42.703
3	Ketersediaan Pangan Utama (%)	662,64	645,14	651,58	650,33	447,81

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Maros, 2021

2.3.2.4 Pertanian

2.3.2.4.1 Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Sertifikat adalah informasi terkait dengan barang atau sesuatu yang kita punya. Sertifikat juga dapat menjadi bukti kepemilikan suatu barang. Informasi ini dijelaskan secara tertulis dan mempunyai kekuatan yang sah dan tidak bisa diganggu gugat.

Pada tahun 2016 persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Maros sebesar 7,99%, atau seluas 12.943 ha. Pada tahun 2020 luas lahan bersertifikat meningkat menjadi 23.801 ha atau 14,07% dari total luas wilayah Kabupaten Maros.

Meningkatnya persentase luas lahan yang bersertifikat karena adanya program dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara dalam penyelenggaraan sertifikat gratis bagi masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang melaksanakan pengurusan sertifikat. Selain Pemerintah Kabupaten Maros juga melakukan sertifikasi terhadap seluruh asset baik tanah maupun bangunan.

Tabel 2.147
Persentase Luas Lahan Bersertifikat Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah luas lahan bersertifikat (Ha)	12.943	16.445	19.942	20.764	23.801
2	Jumlah luas wilayah (Ha)	161.912	161.912	161.912	161.912	161.912
3	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	7,99	10,16	12,32	12,82	14,70

Sumber : Dinas Perum, Pertanahan dan Kawasan Pemukiman Kab. Maros, 2021

2.3.2.4.2 Penyelesaian Izin Lokasi

Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan perusahaan tersebut untuk menjalankan kegiatan usahanya dalam rangka kegiatan penanaman modal. Pada tahun 2016 hingga tahun 2020, penyelesaian izin lokasi di Kabupaten Maros sebesar 100%. Dimana setiap izin lokasi



yang diajukan oleh perusahaan dalam rangka penanaman modal telah diterbitkan izin oleh dinas terkait.

Tabel 2.148
Persentase Penyelesaian Izin Lokasi Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah izin lokasi	8	34	35	40	31
2	Permohonan izin lokasi	8	34	35	40	31
3	Penyelesaian Izin Lokasi	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Maros, 2021

Grafik 2.42
Jumlah Izin Lokasi Yang Diterbitkan Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020



Sumber : DPMPTSP Kab. Maros, 2021

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

2.3.2.5.1 Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Tujuan disusunnya RPPLH adalah untuk menjaga kelestarian lingkungan agar dapat dimanfaatkan hingga generasi berikutnya. Kabupaten Maros hingga saat ini belum memiliki dokumen RPPLH. Belum adanya dokumen RPPLH di Kabupaten Maros disebabkan adanya refokusing anggaran akibat pandemi COVID-19.



Tabel 2.149
Tersedianya Dokumen RPPLH Kabupaten Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten (*)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maros, 2021

2.3.2.5.2 Terintegrasinya Dokumen RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Kabupaten Maros belum memiliki dokumen RPPLH sehingga otomatis belum ada integrasi antara dokumen perencanaan pembangunan dengan RPPLH.

Tabel 2.150
Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maros, 2021

2.3.2.5.3 Terselenggaranya KLHS Untuk K/R/P Tingkat Kabupaten

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Pada penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026, Kabupaten Maros telah menyusun dokumen KLHS yang digunakan sebagai dokumen pendukung terkait kondisi dan masalah lingkungan di Kabupaten Maros.

Tabel 2.151
Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Terselenggaranya KLHS Untuk K/R/P Tingkat Daerah Kabupaten	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maros, 2021

2.3.2.5.4 Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air

Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi dan biologisnya. Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan biota air dan manusia. Salah satu cara untuk mengukur tingkat



kualitas air adalah dengan menggunakan metode perhitungan Indeks Kualitas Air. Tingkat pencemaran air di Kabupaten Maros berada di kategori cemar ringan berdasarkan pengambilan sampel yang dilakukan pada Sungai Maros, Sungai Bantimurung, Sungai Pute dan Sungai Rammang-Rammang.

Tabel 2.152
Indeks Pencemaran Air Sungai Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Lokasi	Indeks Pencemaran (Pij)	Ket.
1	Sungai Maros		
	a. Hulu	2.609	Cemar Ringan
	b. Tengah	3.239	Cemar Ringan
	c. Hilir	2.077	Cemar Ringan
2	Sungai Bantimurung		
	a. Hulu	1.563	Cemar Ringan
	b. Tengah	1.207	Cemar Ringan
	c. Hilir	3.196	Cemar Ringan
3	Sungai Pute		
	a. Hulu	2.358	Cemar Ringan
	b. Tengah	1.388	Cemar Ringan
	c. Hilir	4.604	Cemar Ringan
4	Sungai Rammang-rammang		
	a. Hulu	1.771	Cemar Ringan
	b. Tengah	1.377	Cemar Ringan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maros, 2021

Dari hasil pengukuran indeks pencemaran di beberapa sungai, diperoleh data bahwa nilai indeks kualitas air pada tahun 2020 sebesar 50 (nilai indeks) dengan kategori cemar ringan.

Tabel 2.153
Nilai Rata-Rata Indeks Kualitas Air Sungai Kabupaten Maros Tahun 2020

Mutu Air	Jumlah Titik Sampling Air Sungai	Persentase Pemenuhan Mutu air	Bobot Nilai Indeks	Nilai Indeks Per Mutu Air
Memenuhi	0	0%	70	0
Cemar Ringan	11	100%	50	50
Cemar Sedang	0	0%	30	0
Cemar Berat	0	0%	10	0
Total	11		Nilai IKA	50

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maros, 2021

Selama tahun 2016 hingga tahun 2020, indeks kualitas air Kabupaten Maros berada pada kategori pencemaran sedang hingga ringan. Pada tahun 2016 nilai rata-rata hasil pengukuran indeks pencemaran air sebesar 45. Kemudian pada tahun 2020 nilai rata-rata indeks kualitas air sebesar 50.



Tabel 2.154
Nilai Rata-Rata Hasil Perhitungan Indeks Pencemaran Air
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Hasil Pengukur Indeks Kualitas air	sedang	sedang	Ringan	Ringan	Ringan
2	Nilai rata-rata hasil perhitungan indeks pencemaran air	45,00	47,00	50,00	50,00	50,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maros, 2021

2.3.2.5.5 Peningkatan Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. Indeks Kualitas Udara dihitung berdasarkan emisi dari dua polutan udara yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NO_x).

Hasil pengukuran indeks kualitas udara Kabupaten Maros menunjukkan kondisi yang berada pada kategori sedang. Namun apabila dilihat dari Indeks Kualitas Udara, terlihat tren peningkatan menuju kategori tidak sehat. Indeks Kualitas Udara Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebesar 78,33, kemudian meningkat menjadi 83,89 pada tahun 2020.

Berdasarkan data yang tersedia, diketahui kualitas udara di Kabupaten Maros berada pada kategori unggul. Dimana pada kategori tersebut kondisi udara di Kabupaten Maros sangat baik.

Tabel 2.155
Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Leu	0,49	0,23	0,27	0,26	0,39
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	78,33	92,78	90,56	91,11	83,89
3	Kategori	Baik	Unggul	Unggul	Unggul	Sangat Baik

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maros, 2021

leu : Rata-rata (SO₂ hasil pemantauan dibagi mutu baku udara ambien SO₂ Ref EU, dan NO₂ hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien NO₂ Ref EU). Baku mutu udara ambien referensi EU untuk NO₂ adalah 40 µg/m³ dan SO₂ adalah 20 µg/m³. Baku mutu udara ambien nasional (pengukuran 1 tahun) untuk NO₂ adalah 100 µg/m³ dan SO₂ adalah 60 µg/m³.

2.3.2.5.6 Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Tutupan lahan adalah kondisi kenampakan biofisik permukaan bumi yang diamati. Penggunaan lahan adalah pengaturan, kegiatan dan input terhadap jenis tutupan lahan tertentu yang menghasilkan sesuatu. Indeks Kualitas Tutupan lahan dihitung berdasarkan luas tutupan hutan dan tutupan lahan. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebesar 50,33. Kemudian



menurun pada menjadi 48,99 pada tahun 2020. Menurunnya luas tutupan hutan diakibatkan adanya pembukaan lahan hutan oleh masyarakat sekitar untuk dijadikan lahan perkebunan.

Tabel 2.156
Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Tutupan Hutan (Ha)	60.900	60.900	60.900	58.540	58.540
2	Tutupan hutan	0,376	0,376	0,376	0,362	0,362
3	IKTL	50,33	50,33	50,33	48,99	48,99

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maros, 2021

2.3.2.5.7 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

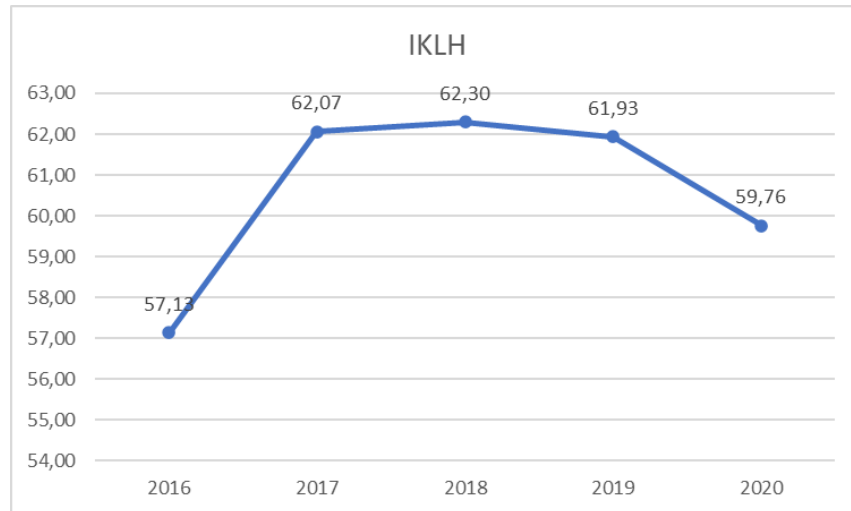
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikankesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH merupakan ekspresi dari kondisi lingkungan hidup suatu daerah. Diukur dari 3 anasir yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan hutan.

IKLH Kabupaten Maros menunjukkan peningkatan apabila berdasarkan xapaian IKLH tahun 2016 dengan IKLH Tahun 2020. Namun secara umum IKLH Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 IKLH Kabupaten Maros sebesar 57,13 kemudian meningkat pada tahun 2017 sebesar 62,07 dan tahun 2018 sebesar 62,30. Pada tahun 2019 IKLH Kabupaten Maros mengalami penurunan sebesar 61,93 dan pada tahun 2020 kembali menurun sebesar 59,76.

Penurunan IKLH Kabupaten Maros disebabkan oleh Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Udara (IKU). Penurunan IKTL akibat adanya penurunan luas tutupan hutan setiap tahunnya akibat penggunaan lahan hutan oleh masyarakat sebagai lahan perkebunan. Sedangkan Indeks Kualitas Udara juga menunjukkan peningkatan menuju udara yang tidak sehat sehingga mempengaruhi kualitas lingkungan hidup. Untuk indeks pencemaran air, walaupun menunjukkan peningkatan namun peningkatan pencemaran sangat sedikit dan masih masuk kategori cemar ringan.



Garfik 2.43
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maros, 2021

2.3.2.5.8 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan Izin PPH dan PUU LH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten. Pada tahun tahun 2016 kegiatan pembinaan dan pengawasan terkait izin PPH dan PUU LH mencapai 37 %, kemudian meningkat pada tahun 2017 sebesar 71,11 %. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 persentase pembinaan dan pengawasan terkait izin lingkungan PPH dan PUU LH mencapai 100 %.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan yang mengajukan izin lingkungan melalui pemeriksaan langsung di lapangan terhadap kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa usaha yang dilakukan perusahaan tersebut sesuai dengan izin yang diberikan.

Capaian pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan izin lingkungan dapat mencapai 100% selama tiga tahun terakhir disebabkan Pemerintah Kabupaten Maros sangat berkomitmen untuk menjaga iklim usaha dan investasi yang di Kabupaten Maros, sehingga diharapkan tidak adanya keberatan dari masyarakat terhadap setiap kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan.



Grafik 2.44
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan Izin PPH dan PUU LH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maros, 2021

2.3.2.5.9 Peningkatan Kapasitas dan Sarana dan Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan (PPLHD)

Pejabat Pengawas Pengawas Lingkungan (PPLHD) memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan hidup dalam lingkungan Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugasnya PPLHD harus dilengkapi dengan pengetahuan dan kompetensi yang baik tentang lingkungan serta sarana dan prasarana yang memadai. Jumlah PPLHD yang telah dilatih di Kabupaten Maros pada tahun 2016 hingga tahun 2020 sebanyak 1 orang.

Tabel 2.157
Jumlah Sarana Prasarana PPLHD Yang Memenuhi Standar Minimum Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PPLHD Yang dilatih dan/atau di bina	1	1	1	1	1
2	Jumlah sarana prasarana PPLHD yang memenuhi standar minimum	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maros, 2021

2.3.2.5.10 Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup

Penghargaan lingkungan hidup ada penghargaan yang diberikan kepada orang atau kelompok atas jasanya dalam melaksanakan pelestarian lingkungan



hidup. Pelaksanaan pemberian penghargaan lingkungan hidup di Kabupaten Maros telah dilaksanakan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020.

Penghargaan lingkungan, yang dalam hal ini adalah adipura, merupakan dampak dari usaha Pemerintah Kabupaten Maros untuk menjaga kelestarian lingkungan dan dengan cara pembersihan saluran drainase, membersihkan dan menjaga lingkungan sekitar, tidak membuang sampah sembarangan di jalan, sungai dan jembatan, memilah sampah organik dan an organik, penanaman pohon dan pot bunga untuk penghijauan.

Tabel 2.158
Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maros, 2021

2.3.2.5.11 Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota

Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan yang terbitkan setiap tahunnya di Kabupaten Maros telah ditindaklanjuti, sehingga cakupannya mencapai 100%. Jumlah pengaduan pada tahun 2016 sebanyak 7 pengaduan, kemudian meningkat pada tahun 2017 dan tahun 2018 menjadi 9 pengaduan, kemudian pada tahun 2019 dan tahun 2020 mencapai 13 pengaduan.

Setiap pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan ditindaklanjuti dengan cara melakukan pemeriksaan langsung di lapangan, apabila ditemukan pelanggaran maka Pemerintah Kabupaten Maros akan menyerahkannya kepada pihak kepolisian sebagai pihak yang berhak untuk melakukan tindakan hukum.

Tabel 2.159
Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan,
Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha Dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengaduan masyarakat yang ditangani	7	9	9	13	13
2	Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	7	9	9	13	13
3	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi	100	100	100	100	100



usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota					
--	--	--	--	--	--

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maros, 2021

2.3.2.5.12 Timbulan Sampah Yang Tertangani

Volume timbulan sampah di Kabupaten Maros meningkat setiap tahunnya dengan pesat. Hal ini disebabkan jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya serta bertambahnya jumlah pemukiman di daerah perkotaan.

Pada tahun 2016 persentase timbulan sampah yang tertangani sebesar 30% dengan jumlah volume sampah sebesar 61.036 m³. Sedangkan pada tahun 2020 persentase timbulan sampah yang tertangani meningkat pesat hingga mencapai 89,04%, dengan jumlah volume sampah yang tertangani sebesar 190.760 m³.

Tingginya timbulan sampah yang tertangani di Kabupaten Maros disebabkan cukup banyaknya armada pengangkut sampah yang tersedia, baik berupa mobil pengangkut sampah maupun motor tiga roda. Selain itu Pemerintah Kabupaten Maros juga memiliki petugas sampah yang cukup banyak, sehingga kegiatan pembersihan sampah di pinggir jalan serta di rumah penduduk secara maksimal.

Tabel 2.160
Timbulan Sampah Yang Ditangani (%) Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Volume timbulan sampah yang ditangani (m3)	61.036	179.677	182.779	186.682	190.760
2	Total timbulan sampah (m3)	203.454	205.509	207.585	209.682	214.229
3	Timbulan Sampah Yang Ditangani (%)	30,00	87,43	88,05	89,03	89,04

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maros, 2021

Jumlah timbulan sampah yang terbanyak berada di Kecamatan Mandai dengan jumlah timbulan sebesar 28.321 m³. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk di Kecamatan Mandai pada tahun 2020 merupakan yang terbesar di Kabupaten Maros dengan jumlah 48.541 jiwa.

Tabel 2.161
Timbulan Sampah Yang Ditangani (%) Kabupaten Maros Tahun 2020

Kecamatan	Penduduk Jiwa	Jumlah Sampah (Kg)		Jumlah Sampah (m ³)	
		Timbulan	Tertangani	Timbulan	Tertangani
Turikale	48.541	7.086.986	6.787.112	26.543	25.420
Mandai	51.793	7.561.778	5.683.382	28.321	21.286
Marusu	34.319	5.010.574	4.077.652	18.766	15.272
Lau	27.542	4.021.132	4.085.437	15.060	15.301
Bantimurung	32.831	4.793.326	4.563.566	17.953	17.092



Kecamatan	Penduduk Jiwa	Jumlah Sampah (Kg)		Jumlah Sampah (m ³)	
		Timbulan	Tertangani	Timbulan	Tertangani
Maros Baru	28.364	4.141.144	4.066.182	15.510	15.229
Bontoa	30.598	4.467.308	4.145.632	16.731	15.527
Simbang	25.544	3.729.424	3.353.532	13.968	12.560
Tanralili	30.950	4.518.700	3.447.111	16.924	12.911
Tompobulu	15.945	2.327.970	2.191.086	8.719	8.206
Moncongloe	23.742	3.466.332	2.489.774	12.983	9.325
Cenrana	14.221	2.076.266	2.139.251	7.776	8.012
Camba	14.574	2.127.804	2.029.791	7.969	7.602
Mallawa	12.811	1.870.406	1.873.359	7.005	7.016
Total	391.774	57.199.150	50.932.867	214.229	190.760

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maros, 2021

2.3.2.5.13 Persentase Jumlah Sampah Yang Dikurangi Melalui 3R

Sampah yang berkurang melalui 3R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dll. Jumlah sampah yang dikelola melalui sistem 3R di Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebesar 0,47% dengan jumlah sampah yang berkurang melalui 3R sebanyak 963 ton, kemudian meningkat hingga menjadi 0,43% dengan jumlah sampah yang berkurang sebesar 913 ton.

Sampah yang berkurang melalui 3R melalui bank sampah dan kompos. Kapasitas dan bank sampah Kabupaten Maros sebesar 2 ton/hari sehingga dalam setahun dapat menampung 530 ton. Kemudian melalui pengomposan dengan daya tampung 0,5 ton/hari, sehingga daya tampung dalam setahun sebesar 182,5 ton. Daya tampung pengelolaan sampah melalui 3R masih sangat kecil dibandingkan produksi sampah yang terus bertambah setiap harinya.

Tabel 2.162
Persentase Jumlah Sampah Yang Berkurang Melalui 3R (%)
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sampah yang berkurang melalui 3R adalah jumlah sampah yang dikelola melalui aktifitas 3R seperti bank sampah, pusat daur ulang, pengomposan, dan lain-lain dan tidak diangkut ke TPA atau dibuang ke lingkungan (m ³)	965	1.053	913	913	913
2	Total timbunan sampah (m ³)	203.454	205.509	207.585	209.682	211.229
3	Persentase Jumlah Sampah Yang Berkurang Melalui 3R	0,47	0,51	0,44	0,44	0,43

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maros, 2021



2.3.2.5.14 Persentase Cakupan Areal Pelayanan

Cakupan areal pelayanan adalah luas areal yang mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah. Sejak tahun 2016 luas areal yang dilayani pengelolaan sampah sebesar 171,29 km², dengan persentase 10,58%. Pada tahun 2018 hingga tahun 2020 persentase areal pelayanan sebesar 12,69% dengan luas areal pelayanan sebesar 205,45 km². Persentase areal pelayanan pengelolaan sampah tidak berubah dari tahun 2018 hingga tahun 2020 disebabkan areal seluas 205,45 km² adalah luas areal yang dihuni oleh penduduk.

Tabel 2.163
Persentase Cakupan Area Pelayanan (%) Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas area pelayanan pengelolaan sampah (km ²)	171,29	188,29	205,45	205,45	205,45
2	Luas area kabupaten/kota (km ²)	1619,12	1619,12	1619,12	1619,12	1619,12
3	Persentase cakupan area pelayanan	10,58	11,63	12,69	12,69	12,69

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maros, 2021

2.3.2.5.15 Persentase Sampah Yang Tertangani

Persentase jumlah sampah yang ditangani besarnya hampir sama dengan persentase volume sampah yang ditangani. Hal ini disebabkan jumlah sampah dengan volume sampah sama jumlahnya (1m³ = 0,25 ton). Persentase jumlah sampah yang ditangani di Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebesar 3,00%, kemudian meningkat menjadi 9,03 % pada tahun 2020.

Persentase sampah yang tertangani cukup tinggi di Kabupaten Maros disebabkan cukup banyaknya armada pengangkut sampah yang tersedia, baik berupa mobil pengangkut sampah maupun motor tiga roda. Selain itu Pemerintah Kabupaten Maros juga memiliki petugas sampah yang cukup banyak, sehingga kegiatan pembersihan sampah di pinggir jalan serta di rumah penduduk secara maksimal.

Tabel 2.164
Persentase Cakupan Area Pelayanan (%) Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah sampah yang tertangani (ton)	1.526	4.492	4.569	4.667	4.769
2	Total jumlah timbunan sampah di kabupaten/kota (ton)	50.864	51.377	51.896	52.421	52.807
3	Persentase Jumlah Sampah yang tertangani	3,00	8,74	8,81	8,90	9,03

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maros, 2021



2.3.2.5.16 Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota

Operasionalisasi TPA/TPST/SPA berhubungan dengan program Adipura. Nilai TPA di Kabupaten Maros Tahun 2016 sebesar 78,71 dan tahun 2017-2020 sebesar 89,79%.

Tabel 2.165
Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai TPA (Program Adipura) \geq 71	78,71	89,79	89,79	89,79	89,79

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Maros, 2021

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

2.3.2.6.1 Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk

Rasio penduduk ber KTP menunjukkan jumlah penduduk wajib KTP (umur 17 tahun keatas) pada suatu wilayah yang telah memiliki KTP. Rasio penduduk ber KTP di Kabupaten Maros baru dapat dihitung pada tahun 2017 dikarenakan pada tahun 2016 sistem informasi kependudukan masih tahap pengembangan.

Pada tahun 2017 rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk sebesar 0,88 kemudian sedikit meningkat hingga mencapai 0,98 pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 rasio penduduk ber KTP kembali menurun dengan rasio sebesar 0,86.

Penurunan rasio penduduk ber KTP pada tahun 2020 disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pelayanan di kantor pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Maros mengalami penutupan selama bulan maret hingga mei 2020. Walaupun pelayanan dilakukan secara online, namun pelayanan KTP yang dapat diberikan kepada masyarakat sangat terbatas.

Tabel 2.166
Rasio Penduduk Ber KTP Persatuan Penduduk
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk usia > 17 Tahun Yang Ber KTP	-	246.872	259.707	266.333	239.236
2	Jumlah penduduk usia . 17 Tahun atau telah menikah	-	279.399	268.811	271.768	278.650
3	Rasio Penduduk Ber KTP Persatuan Penduduk	-	0,88	0,97	0,98	0,86

Sumber : Dinas Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Maros, 2021



Tabel 2.167
Jumlah Penduduk Yang Memiliki KTP Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Kecamatan	Penduduk Wajib KTP		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Mandai	14.997	15.353	30.330
2	Camba	4.488	4.891	9.379
3	Bantimurung	9.901	10.660	20.561
4	Maros Baru	6.640	8.701	17.341
5	Bontoa	9.374	9.789	19.136
6	Mallawa	4.128	4.312	8.440
7	Tanralili	9.383	9.496	18.879
8	Marusu	10.119	10.461	20.580
9	Simbang	7.916	8.258	16.174
10	Cenrana	4.620	5.067	9.687
11	Tompobulu	4.499	4.476	8.975
12	Lau	8.559	8.917	17.476
13	Moncongloe	5.734	5.843	11.577
14	Turikale	14.934	15.758	30.701
Maros		117.254	121.982	239.236

Sumber : Dinas Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Maros, 2021

2.3.2.6.2 Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Rasio bayi berakte kelahiran adalah jumlah bayi yang memiliki dokumen akte kelahiran. Jumlah bayi yang lahir di Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebanyak 12.274 orang, dari jumlah tersebut jumlah bayi yang telah memiliki dokumen akte kelahiran sebanyak 11.715 orang, dengan demikian rasio bayi berakte kelahiran pada tahun 2016 sebesar 0,95. Pada tahun tahun 2019 rasio bayi berakte kelahiran meningkat hingga mencapai 0,98, namun pada tahun 2020 rasio bayi berakte kelahiran menurun menjadi 0,91.

Seperti halnya dokumen KTP, penurunan penerbitan akta kelahiran juga disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan pelayanan di kantor pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Maros mengalami penutupan selama bulan maret hingga mei 2020.

Tabel 2.168
Rasio Bayi Berakte kelahiran Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah bayi berakte kelahiran	11.715	12.961	14.406	16.010	16.353
2	Jumlah bayi	12.274	13.501	14.852	16.337	17.970
3	Rasio Bayi Berakte kelahiran	0,95	0,96	0,97	0,98	0,91

Sumber : Dinas Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Maros, 2021



2.3.2.6.3 Pasangan Berakte Nikah

Jumlah pasangan yang memiliki akte nikah yang terdapat di Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil adalah pasangan yang beragama non muslim, dikarenakan data untuk akte nikah bagi penduduk yang beragama muslim berada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros.

Rasio pasangan yang memiliki akte nikah di Kabupaten Maros cukup kecil, dimana pada tahun 2017 rasio nya sebesar 0,17, yang berarti dari 94.400 pasangan nikah di Kabupaten Maros, hanya 15.700 pasangan yang memiliki akte. Pada tahun 2020 rasio pasangan berakte nikah Kabupaten Maros meningkat menjadi 0,53 dengan jumlah pasangan yang memiliki akte sebanyak 49.592 pasangan.

Rasio pasangan berakte nikah sangat kecil apabila dilihat dari jumlah pasangan yang telah menikah. Hal ini disebabkan data yang berada di Kantor Kementerian Agama belum terintegrasi dengan data yang berada di Dinas Dukcapil Kabupaten Maros. Pada tahun 2020 telah dilakukan MOU antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros dan Dinas Dukcapil dalam hal integrasi data sehingga nantinya seluruh pasangan yang memiliki akte nikah dapat tercatat di Sistem Dinas Dukcapil baik muslim maupun non muslim.

Tabel 2.169
Rasio Penduduk Ber KTP Persatuan Penduduk
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasangan nikah berakte nikah	-	15.700	17.426	25.000	49.592
2	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	-	94.400	93.535	94.325	94.410
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	-	0,17	0,19	0,27	0,53

Sumber : Dinas Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Maros, 2021

Tabel 2.170
Jumlah Penduduk Berdasarkan Perkawinan Tercatat Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Kecamatan	Bayi Memiliki Akte Lahir		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Mandai	3.597	2.654	7.251
2	Camba	717	720	1.437
3	Bantimurung	1.866	1.870	3.736
4	Maros Baru	1.782	1.795	3.577
5	Bontoa	2.198	2.315	4.513
6	Mallawa	632	623	1.255
7	Tanralili	2.433	2.433	4.866
8	Marusu	2.185	2.176	4.361
9	Simbang	1.603	1.642	3.245



10	Cenrana	824	822	1.646
11	Tompobulu	706	700	1.406
12	Lau	1.665	1.680	3.345
13	Moncongloe	1.364	1.385	2.749
14	Turikale	3.088	3.117	6.205
Maros		24.660	24.932	49.592

Sumber : Dinas Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Maros, 2021

2.3.2.6.4 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten

Database kependudukan adalah data-data yang menerangkan legalitas penduduk dalam suatu wilayah, seperti Nomor Induk kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Nikah, dll. Keseluruhan database ini terangkum dalam Sistem Informasi Kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros.

Tabel 2.171
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Dinas Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Maros, 2021

2.3.2.6.5 Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Kabupaten Maros telah menerapkan KTP Nasional dengan basis Nomor Induk kependudukan. Namun belum seluruh penduduk Kabupaten Maros memiliki E-KTP walaupun jumlahnya sangat kecil. Hal ini disebabkan ada beberapa penduduk yang tinggal di pelosok desa dan sudah berumur yang tidak melakukan perekaman ulang untuk memperoleh E-KTP.

Tabel 2.172
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten
Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Maros, 2021

2.3.2.6.6 Cakupan Penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Cakupan penertiban Kartu Penduduk adalah jumlah kartu penduduk yang diterbitkan. Penertiban KTP harus sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan



tujuan agar setiap penduduk tidak memiliki KTP ganda. Dengan demikian dapat diketahui jumlah penduduk yang pasti dalam suatu wilayah berdasarkan dokumen administrasi kependudukan yang dimilikinya (KTP).

Cakupan penertiban KTP di Kabupaten Maros sudah cukup baik. Pada tahun 2017 sebesar 88,95%, kemudian meningkat menjadi 97,99% pada tahun 2018. Namun pada tahun 2020 cakupan penertiban KTP sedikit menurun hingga mencapai 88,58% dengan jumlah KTP yang diterbitkan sebanyak 239.236 lembar.

Rendahnya capaian pada tahun 2020 disebabkan adanya penutupan kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Maros selama bulan Maret hingga September tahun 2020 serta diberhentikannya pelayanan perekaman KTP keliling diakibatkan Pandemi Covid-19. Akibat dari penutupan kantor tersebut, jumlah masyarakat yang akan melakukan. Walaupun pada bulan Oktober hingga Desember pelayanan Kembali dibuka, namun jumlah masyarakat yang akan melakukan perekaman KTP sangat dibatasi.

Tabel 2.173
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah KTP Ber-NIK Yang Diterbitkan	-	248.512	263.399	271.768	239.236
2	Jumlah penduduk wajib KTP	-	279.399	268.811	271.768	270.091
3	Cakupan Penertiban Kartu Tanda Penduduk (KTP)	-	88,95	97,99	93,00	88,58

Sumber : Dinas Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Maros, 2021

Tabel 2.174
Jumlah Penduduk Wajib KTP Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Kecamatan	Penduduk Wajib KTP		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Mandai	17.181	17.380	34.561
2	Camba	5.311	5.735	11.046
3	Bantimurung	11.357	11.921	23.278
4	Maros Baru	9.981	9.904	19.885
5	Bontoa	10.817	11.110	21.927
6	Mallawa	4.824	4.998	9.822
7	Tanralili	10.889	10.909	21.798
8	Marusu	11.171	11.491	22.662
9	Simbang	8.750	9.116	17.866
10	Cenrana	5.231	5.588	10.819
11	Tompobulu	5.549	5.479	11.028
12	Lau	9.413	9.713	19.126
13	Moncongloe	6.572	6.650	13.222



14	Turikale	16.175	16.876	22.051
MAROS		133.221	136.870	270.091

Sumber : Dinas Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Maros, 2021

2.3.2.6.7 Cakupan Penertiban Akte Kelahiran

Akte Kelahiran adalah Bukti Sah mengenai Status dan Peristiwa Kelahiran Seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bayi yang dilaporkan kelahirannya akan terdaftar dalam Kartu Keluarga dan diberi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Dasar untuk memperoleh Pelayanan Masyarakat Lainnya.

Jumlah penduduk lahir yang memperoleh akte kelahiran di Kabupaten Maros menunjukkan penambahan yang cukup baik. Pada tahun 2016 cakupan penertiban akta kelahiran sebesar 95,45%, dimana dari 12.274 jumlah kelahiran di tahun 2015. Jumlah penduduk yang memiliki akte lahir sebanyak 11.715 orang. Pada tahun 2020 cakupan penertiban akte kelahiran menurun hingga menjadi 83,39%. Menurunnya cakupan penertiban akte kelahiran juga disebabkan oleh pandemic COVID-19

Tabel 2.175
Cakupan Penertiban Akta Kelahiran
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di tahun bersangkutan	11.715	11.867	11.851	11.980	10.200
2	Jumlah kelahiran di tahun bersangkutan	12.274	12.115	12.069	12.110	12.231
3	Cakupan Penertiban Akta Kelahiran	95,45	97,95	98,19	98,93	83,39

Sumber : Dinas Adm. Kependudukan dan Capil Kab. Maros, 2021

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.3.2.7.1 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik

Dalam rangka memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat di desa, diperlukan sarana prasarana perkantoran yang baik. Hal ini diperlukan agar masyarakat yang memerlukan pelayanan di kantor-kantor desa merasa nyaman dan terlayani dengan baik.

Jumlah Desa di Kabupaten Maros sebanyak 80 desa yang tersebar di 14 kecamatan yang ada. Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik di Kabupaten Maros memerlukan perhatian khusus. Walaupun



persentasenya sudah mencapai 80%. Cakupan sarana perkantoran desa dalam kondisi baik pada tahun 2016 sebesar 82,50% kemudian meningkat menjadi 86,35% pada tahun 2020. Dari 80 kantor desa yang ada, masih ada 11 kantor desa yang harus diperbaiki dengan kategori kurang layak.

Perbaikan kantor desa merupakan tanggung jawab desa itu sendiri dikarenakan perbaikannya berada dalam porsi anggaran dana desa yang dikelola oleh desa tersebut. Pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini Dinas PMD hanya melakukan fasilitasi terkait pelaksanaan kegiatan yang bersifat fisik, termasuk kegiatan perbaikan kantor desa dengan Dinas Pekerjaan Umum

Tabel 2.176
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa Yang Baik
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kantor pemerintah desa yang baik	66	66	66	69	69
2	Jumlah seluruh pemerintahan desa	80	80	80	80	80
3	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa Yang Baik	82,5	82,5	82,5	86,25	86,25

Sumber : Dinas PMD Kab. Maros, 2021

Tabel 2.177
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa Yang Baik
Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Kabupaten/ Kecamatan/ Kelurahan/ Desa	Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik				
		Baik	Kurang Baik	Tidak Layak	Jumlah	% Baik
	Maros	69	11	0	80	86,25
1	Bantimurung	6	0	0	6	100,00
2	Bontoa	5	3	0	8	62,50
3	Camba	5	1	0	6	83,33
4	Cenrana	7	0	0	7	100,00
5	Lau	2	0	0	2	100,00
6	Mallawa	10	0	0	10	100,00
7	Mandai	4	0	0	4	100,00
8	Maros Baru	3	1	0	4	75,00
9	Marusu	6	1	0	7	85,71
10	Moncongloe	5	0	0	5	100,00
11	Simbang	5	1	0	6	83,33
12	Tanralili	6	1	0	7	85,71
13	Tompobulu	5	3	0	8	62,50
14	Turikale	0	0	0	0	0,00

Sumber : Dinas PMD Kab. Maros, 2021

**2.3.2.7.2 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dibentuk dalam rangka menciptakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, lembaga pemerintah dan lembaga kemasyarakatan harus dapat saling bekerja sama agar tujuan pemerintahan dapat terealisasi dengan optimal. LPM merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan partisipasi masyarakat di bidang pembangunan.

Rata-rata kelompok binaan LPM di Kabupaten Maros dari tahun 2016 hingga tahun 2020 sebanyak 1 LPM, dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap desa dan kelurahan yang di Kabupaten Maros telah memiliki LPM.

Tabel 2.178
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kelompok Binaan LPM	103	103	103	103	103
2	Jumlah LPM	103	103	103	103	103
3	Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas PMD Kab. Maros, 2021

Tabel 2.179
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Kecamatan	Binaan Kelompok LPM			
		Jumlah	Aktif	Persen	Rata-Rata
1	Bantimurung	8	8	100	1
2	Bontoa	9	9	100	1
3	Camba	8	8	100	1
4	Cenrana	7	7	100	1
5	Lau	6	6	100	1
6	Mallawa	11	11	100	1
7	Mandai	6	6	100	1
8	Maros Baru	7	7	100	1
9	Marusu	7	7	100	1
10	Moncongloe	5	5	100	1
11	Simbang	6	6	100	1
12	Tanralili	8	8	100	1
13	Tompobulu	8	8	100	1
14	Turikale	7	7	100	1
MAROS		103	103	100	1

Sumber : Dinas PMD Kab. Maros, 2021

**2.3.2.7.3 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK**

PKK ada adalah singkatan dari Pembinaan Keluarga Sejahtera adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pemberdayaan keluarga meliputi segala upaya bimbingan, pembinaan dan pemberdayaan agar keluarga dapat hidup sejahtera, maju dan mandiri.

Rata-rata kelompok binaan PKK di Kabupaten Maros tahun 2016 hingga tahun 2020 sebesar 9,58%, dimana jumlah PKK sebanyak 118 PKK dengan jumlah kelompok binaan PKK sebanyak 1.131. Stagnannya jumlah kelompok binaan PKK selama 5 tahun terakhir dikarenakan jumlah kelompok binaan sudah mencapai batas maksimal sehingga tidak ada penambahan.

Tabel 2.180
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok binaan PKK	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131
2	Jumlah PKK	118	118	118	118	118
3	Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58

Sumber : Dinas PMD Kab. Maros, 2021

Tabel 2.181
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Kecamatan	Kelompok LPM			
		Jumlah	Aktif	Persen	Rata-Rata
1	Bantimurung	1.130	1.130	100	8,22
2	Bontoa	74	74	100	11,70
3	Camba	117	117	100	8,22
4	Cenrana	74	74	100	7,88
5	Lau	63	63	100	7,86
6	Mallawa	55	55	100	9,75
7	Mandai	117	117	100	15,71
8	Maros Baru	110	110	100	8,50
9	Marusu	68	68	100	8,25
10	Moncongloe	66	66	100	9,00
11	Simbang	54	54	100	10,14
12	Tanralili	71	71	100	10,56
13	Tompobulu	95	95	100	7,56
14	Turikale	68	68	100	12,25
MAROS		98	98	100	9,58

Sumber : Dinas PMD Kab. Maros, 2021



2.3.2.7.4 Persentase LSM Aktif

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Persentase LSM yang aktif di Kabupaten Maros menunjukkan tren positif selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Persentase LSM aktif pada tahun 2016 sebesar 69,53% kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 100%.

Tabel 2.182
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK
Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah LSM Aktif	9	10	12	16	16
2	Jumlah Seluruh LSM	13	14	16	16	16
3	Persentase LSM Aktif	69,23	71,43	75,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Kesbangpol Kab. Maros, 2021

2.3.2.7.5 Persentase Posyandu Aktif

Pos pelayanan terpadu adalah (Posyandu) adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu merupakan salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (IBM).

Jumlah posyandu di Kabupaten Maros terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun persentase posyandu aktif sebesar 74,94%, kemudian meningkat menjadi 100% pada tahun 2020. Selain persentase posyandu yang aktif mencapai 100%, selama tahun 2016 hingga tahun 2020 posyandu di Kabupaten Maros terus bertambah, dimana pada tahun 2016 jumlah posyandu sebanyak 395 kemudian pada tahun 2020 menjadi 410 posyandu.

Semakin banyaknya posyandu dan keaktifan yang mencapai 100% disebabkan giatnya PKK Kabupaten Maros dalam meningkatkan kuantitas dan pelayanan posyandu, utamanya kader-kader posyandu. Kader-kader posyandu tersebut diberikan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di desa dan kelurahan.



Tabel 2.183
Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Posyandu Aktif	296	312	370	375	382
2	Jumlah Seluruh Posyandu	395	399	403	375	382
3	Persentase Posyandu Aktif	74,94	78,20	91,91	100,00	100,00

Sumber : Dinas PMD Kab. Maros, 2021

Tabel 2.184
Persentase Posyandu Aktif
Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Kecamatan	Posyandu Aktif		
		Jumlah	Aktif	Persen
1	Bantimurung	38	38	100
2	Bontoa	40	40	100
3	Camba	21	21	100
4	Cenrana	18	18	100
5	Lau	25	25	100
6	Mallawa	34	34	100
7	Mandai	27	27	100
8	Maros Baru	16	16	100
9	Marusu	22	22	100
10	Moncongloe	15	15	100
11	Simbang	29	29	100
12	Tanralili	40	40	100
13	Tompobulu	31	31	100
14	Turikale	26	26	100
MAROS		382	382	100

Sumber : Dinas PMD Kab. Maros, 2021

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.3.2.8.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Maros mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,20%. Tahun 2020 setelah diadakan sensus penduduk dimana BPS bekerja sama dengan Dinas Dukcapil diperoleh jumlah penduduk sebesar 391.774 orang dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,01%.

Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Maros pada tahun 2020 disebabkan banyaknya migrasi penduduk dari Kota Makassar ke Kabupaten Maros. Banyak migrasi terjadi di kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar yaitu Kecamatan Mandai dan Kecamatan Marusu.



Tabel 2.185
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pt	342.890	346.383	349.822	353.121	391.774
2	Po	319.002	319.002	319.002	319.002	319.002
3	t	6	7	8	9	10
4	pt/po	1,07	1,09	1,10	1,11	1,23
5	1/t	0,17	0,14	0,13	0,11	0,10
6	ln(Pt/po)	0,07	0,08	0,09	0,10	0,21
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,20	1,18	1,15	1,13	2,01

Sumber : BPS dan Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Keterangan :

- Pt : Jumlah Penduduk pada tahun t
- Po : Jumlah penduduk pada tahun dasar (2010)
- T : Jangka waktu
- R : Laju Pertumbuhan Penduduk

2.3.2.8.2 Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*)

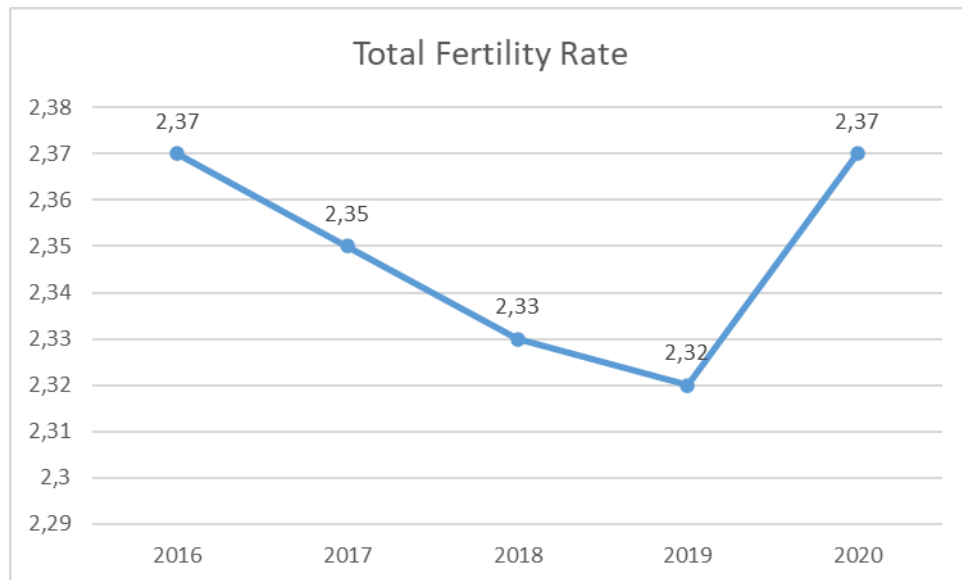
Angka Kelahiran Total atau *Total Fertility Rate* yang sering disingkat TFR adalah jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (antara umur 15-49 tahun).

Angka kelahiran total penduduk Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan selama tahun 2016 hingga tahun 2019, namun meningkat pada tahun 2020. Pada tahun 2016 angka TFR Kabupaten Maros sebesar 2,37 kemudian menurun hingga mencapai 2,32 pada tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 angka TFR kabupaten Maros meningkat hingga mencapai 2,37. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa ibu yang berusia 15-49 tahun di Kabupaten Maros memiliki anak sebanyak 2-3 orang.

Meningkatnya angka TFR pada tahun 2020 disebabkan tingkat pendidikan wanita berusia 15-49 tahun yang masih cukup rendah serta. Banyak wanita yang putus sekolah setelah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar. Selain itu masih adanya budaya masyarakat untuk menikahkan anak perempuan pada usia muda juga merupakan salah satu penyebab tingginya angka TFR di Kabupaten Maros



Grafik 2.45
Angka Kelahiran Total Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2020



Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Tabel 2.186
Angka Kelahiran Total (TFR) Kabupaten Maros 2020

URAIAN			
Umur Perempuan	Jumlah Perempuan	Jumlah Kelahiran	ASFR
1	2	3	4
15-19	17.675	2.327	13,17
20-24	16.040	8.064	50,27
25-29	15.919	12.304	77,29
30-34	15.288	12.849	84,05
35-39	13.671	12.924	94,54
40-44	13.089	11.395	87,06
45-49	13.266	9.089	68,51
TFR			2,37

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

2.3.2.8.3 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB

Kampung KB sebagai wahana pemberdayaan masyarakat adalah sebuah program dari BKKBN untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Untuk mewujudkan Kampung KB sesuai dengan standar yang diinginkan maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) sebagai *leading sector* harus bekerja sama dengan Perangkat Daerah lainnya. Pada tahun 2016 belum ada perangkat daerah yang berperan dalam pembentukan kampung, kemudian pada tahun 2017 persentase perangkat daerah yang berperan dalam



pembangun sebesar 9,09%. Pada tahun 2020 persentase perangkat daerah yang berpartisipasi dalam pembangunan kampung KB sebesar 22,22%

Tabel 2.187
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan)
Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB
Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat daerah yang berperan aktif di kampung KB	0	4	7	10	10
2	Jumlah seluruh perangkat daerah	44	44	44	44	44
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB	0,00	9,09	15,91	22,73	22,22

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

2.3.2.8.4 Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

Pengendalian penduduk adalah suatu usaha untuk mempengaruhi pertumbuhan penduduk kearah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan. Usaha ini dilakukan melalui suatu kebijaksanaan pemerintah di bidang kependudukan. Salah satu cara untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk adalah dengan menyusun dokumen Rancangan Induk Pengendalian penduduk.

Penyusunan dan pemanfaatan Rencana Induk Pengendalian penduduk dalam tentu memerlukan peran serta dari berbagai pihak, termasuk Perangkat Daerah yang berhubungan dengan perencanaan dan kependudukan. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk sampai tahun 2016 sebesar 31,82%, dimana dari 44 perangkat daerah yang ada, 14 PD diantaranya ikut serta dalam penyusunan atau ikut memanfaatkan dokumen tersebut. Pada tahun 2020 jumlah PD yang memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk sebanyak 11 PD dengan persentase sebesar 24,44.

Jumlah perangkat daerah yang menggunakan rancangan induk pengendalian penduduk tergantung dari kegiatan yang dilaksanakan PD tersebut, apabila kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian penduduk telah selesai maka PD tersebut tidak memerlukan lagi rancangan induk tersebut.



Tabel 2.188
Persentase Perangkat Daerah (Badan/Dinas) Yang Menyusun Dan
Memfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk
Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat daerah yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	14	23	32	41	11
2	Jumlah seluruh perangkat daerah	44	44	44	44	44
3	Persentase Perangkat Daerah (Badan/Dinas) Yang Menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	31,82	52,27	72,73	93,18	24,44

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

2.3.2.8.5 Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Penduduk

Untuk dapat mencapai sasaran pengendalian penduduk yang diharapkan, sesuai dengan target dalam Rancangan Induk Pengendalian Penduduk. Maka diperlukan payung hukum yang kuat agar seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kependudukan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) dapat berpedoman pada Rancangan Induk pengendalian Penduduk.

Kabupaten Maros belum memiliki kebijakan baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah terkait pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk.

Tabel 2.189
Persentase Perangkat Daerah (Badan/Dinas)
Yang Menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk
Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) Yang Mengatur Tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

2.3.2.8.6 Jumlah Sektor Yang Menyetujui dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan

Parameter dan proyeksi penduduk sangat penting diketahui dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan. Dikarenakan dengan data tersebut, dapat ditetapkan kebijakan-kebijakan yang akan diambil kemudian sesuai dengan kondisi penduduk di masa datang. Jumlah sektor yang menyetujui dan memanfaatkan data profil di Kabupaten Maros hingga tahun 2018 sebanyak 7 sektor.



Tabel 2.190
Jumlah Sektor Yang Menyetujui dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Sektor Yang Menyetujui dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan	7	7	7	7	7

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

2.3.2.8.7 Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal Yang Melakukan Pendidikan Kependudukan

Bicara kependudukan tidak hanya bicara tentang jumlah, struktur umur, pertumbuhan, persebaran mobilitas dan penyebaran saja, namun juga mencakup, kualitas, kondisi kesejahteraan dan juga politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, serta lingkungan. Dalam konteks tersebut, peranan pendidikan Kependudukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kependudukan menjadi sangat penting dan strategis, karena isu dan permasalahan kependudukan bersifat universal dan memiliki spektrum yang sangat luas. Kerjasama dengan penyelenggara pendidikan tentang kependudukan telah dilakukan di Kabupaten Maros. Kerjasama ini dilakukan dengan Dinas Pendidikan dengan pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan untuk sekolah lanjutan pertama. Selain itu telah dilakukan distribusi modul dan buku tentang kependudukan ke sekolah sekolah, baik SD maupun SMP.

Tabel 2.191
Jumlah Sektor Yang Menyetujui dan Memanfaatkan Data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal yang melakukan Pendidikan Kependudukan	0	0	0	2	14

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

2.3.2.8.8 Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga sangat erat hubungannya dengan angka kelahiran total (TFR). Rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Maros sebanyak 1-2 orang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program keluarga



berencana berjalan dengan baik dikarenakan jumlah anak per keluarga tidak lebih dari 2 orang.

Cukup rendahnya rata-rata jumlah anak perkeluarga disebabkan Pemerintah Kabupaten Maros gencar melakukan sosialisasi terhadap masyarakat secara umum dan pasangan usia subur secara khusus tentang pentingnya program KB dalam keluarga serta distribusi alat kontrasepsi yang merata ke seluruh kecamatan.

Tabel 2.192
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Anak	139.994	141.281	144.083	139.707	138.908
2	Jumlah Keluarga	86.435	87.196	88.940	90.719	90.707
3	Rata-rata Jumlah anak per keluarga	1,62	1,62	1,62	1,54	1,53

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Tabel 2.193
Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Jumlah Anak	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga
1	Mandai	8.713	14.135	1,62
2	Camba	4.093	4.527	1,11
3	Bantimurung	8.624	13.413	1,56
4	Maros Baru	6.448	10.215	1,58
5	Bontoa	7.591	11.910	1,57
6	Mallawa	3.532	4.500	1,27
7	Tanralili	7.354	10.842	1,47
8	Marusu	7.553	11.899	1,58
9	Simbang	6.479	9.793	1,51
10	Cenrana	3.937	5.344	1,36
11	Tompobulu	4.130	6.574	1,59
12	Lau	7.092	11.192	1,58
13	Moncong Loe	4.809	8.370	1,74
14	Turikale	10.352	16.194	1,56
JUMLAH		90.707	138.908	1,53

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

2.3.2.8.9 Rasio Akseptor KB

Akseptor KB adalah anggota masyarakat yang mengikuti gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi. Akseptor KB lebih disarankan untuk Pasangan Usia Subur (PUS) dengan menggunakan alat kontrasepsi, karena pada pasangan usia subur inilah yang lebih berpeluang besar untuk menghasilkan keturunan dan dapat meningkatkan angka kelahiran.



Rasio akseptor KB Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebesar 56,95% dimana dari 54.018 PUS yang ada, 30.763 adalah akseptor KB. Pada tahun 2020 rasio akseptor KB meningkat hingga mencapai 70,05%, dimana dari 64.682 PUS yang ada, 45.307 adalah akseptor KB.

Tingginya jumlah akseptor KB di Kabupaten Maros disebabkan kesadaran masyarakat, utamanya PUS yang cukup tinggi untuk ikut program KB, selain itu program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa sosialisasi program KB serta manfaatnya, distribusi alat kontrasepsi hingga ke pelosok juga sangat mempengaruhi peningkatan akseptor KB.

Tabel 2.194
Rasio Akseptor KB Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Akseptor KB	30.763	31.125	35.521	35.927	45.307
2	Jumlah pasangan usia subur	54.018	54.159	54.321	54.484	64.682
3	Rasio Akseptor KB	56,95	57,47	65,39	65,94	70,05

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Tabel 2.195
Jumlah Akseptor KB Berdasarkan Peserta dan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Kecamatan	Akseptor KB		Total
		Peserta KB Aktif Desember 2020	Peserta KB Baru Desember 2020	
1	Mandai	4.680	43	4.723
2	Camba	1.482	9	1.491
3	Bantimurung	3.578	16	3.594
4	Maros Baru	3.207	23	3.230
5	Bontoa	3.432	40	3.472
6	Mallawa	1.456	28	1.484
7	Tanralili	3.308	52	3.360
8	Marusu	4.074	38	4.112
9	Simbang	4.772	19	4.791
10	Cenrana	1.834	11	1.845
11	Tompobulu	1.495	36	1.531
12	Lau	3.469	18	3.487
13	Moncongloe	2.453	24	2.477
14	Turikale	5.688	22	5.710
JUMLAH		44.928	379	45.307

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

2.3.2.8.10 Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun

Pengaturan kelahiran yang dikenal pula sebagai kontrasepsi dan pengaturan fertilitas, merupakan metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Perencanaan, pembekalan dan penggunaan kontrasepsi disebut keluarga



berencana. Jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Maros menunjukkan perkembangan yang cukup baik setiap tahunnya.

Pada tahun 2016 jumlah peserta KB aktif sebanyak 33.831 PUS dari 54.018 PUS yang ada, sehingga angka pemakaian kontrasepsi sebesar 62,63%. Kemudian meningkat menjadi 44.928 PUS yang menjadi peserta KB aktif dari 64.682 PUS yang ada, sehingga angka pemakaian kontrasepsi pada tahun 2020 sebesar 69,46%.

Tabel 2.196
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49
Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Peserta KB Aktif	33.831	33.703	35.081	35.573	44.928
2	Jumlah pasangan usia subur	54.018	54.159	54.321	54.484	64.682
3	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49	62,63	62,23	64,58	65,29	69,46

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Tabel 2.197
Jumlah Peserta KB Aktif Berdasarkan Alat Kontrasepsi dan Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Kecamatan	Total PUS	Mix Kontrasepsi							Jumlah Peserta KB Aktif
			IUD	MOW	MOP	KDM	IMP	STK	PIL	
1	Mandai	6.862	490	230	52	98	289	2.510	1.011	4.680
2	Camba	2.169	53	15	19	7	295	603	490	1.482
3	Bantimurung	4.963	105	73	1	39	435	1.747	1.178	3.578
4	Maros Baru	4.473	191	40	40	65	289	1.580	1.002	3.207
5	Bontoa	5.082	45	30	20	37	670	2.106	524	3.432
6	Mallawa	2.060	50	40	2	29	288	557	490	1.456
7	Tanralili	5.125	170	54	2	87	590	1.480	925	3.308
8	Marusu	5.729	271	73	6	11	425	2.610	678	4.074
9	Simbang	6.283	36	6	45	282	2487	958	958	4.772
10	Cenrana	2.613	56	23	13	64	425	817	436	1.834
11	Tompobulu	2.396	31	12	2	20	422	597	411	1.495
12	Lau	4.991	134	44	72	14	750	1.520	935	3.469
13	Moncongloe	3.755	114	47	5	12	525	1.175	575	2.453
14	Turikale	8.181	521	132	59	342	476	2.564	1.594	5.688
JUMLAH		64.682	2.267	819	338	1.107	8.366	20.824	11.207	44.928

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

2.3.2.8.11 Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1.000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)

Angka Kelahiran Remaja (ASFR) adalah Banyaknya kelahiran per 1.000 wanita pada kelompok usia tertentu antara 15-49 tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dan wanita usia subur menurut umurnya.



Jumlah kelahiran remaja di Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebanyak 1.605 orang dengan Angka kelahiran remaja sebesar 95,10 orang per 1000 perempuan. Pada tahun 2018 angka ini meningkat hingga mencapai 393,10 orang per 1.000 perempuan. Pada tahun tahun 2020 ASFR Kabupaten Maros menurun hingga mencapai 131,67 orang per 1.000 perempuan dengan jumlah kelahiran dari perempuan pada umur 15-19 tahun sebanyak 2.327 orang.

Masih cukup tingginya jumlah perempuan yang melahirkan pada kelompok umur 15-19 tahun di Kabupaten Maros disebabkan masih adanya budaya masyarakat, utamanya masyarakat yang berada di pelosok desa yang menikahkan anak perempuannya pada usia muda, dengan anggapan bahwa perempuan tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi, dapat membaca dan menulis sudah dirasakan cukup. Di samping itu, masih berlaku pemikiran bahwa perempuan yang telah memasuki masa akil baliq harus segera dinikahkan.

Tabel 2.198
Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1000 Perempuan
Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19) Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kelahiran dari perempuan pada kelompok umur 15-19 tahun	1.605	2.143	6.459	5.944	2.327
2	Jumah penduduk perempuan kelompok umur 15-19 tahun pada pertengahan tahun yang sama	16.877	16.347	16.432	16.511	17.675
3	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) Per 1000 Perempuan Usia 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	95,10	131,09	393,10	360,00	131,67

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

2.3.2.8.12 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka usia perkawinan dini.

Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun pada tahun 2016 sebesar 2,11% kemudian menurun hingga mencapai 0,51% pada tahun 2020. Jumlah PUS dengan istri dibawah 20 tahun pada tahu 1.141 PUS pada tahun 2016 kemudian menurun hingga mencapai 330 PUS pada tahun 2020.



Menurunnya cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang cukup tinggi yang dimiliki setiap pasangan, sehingga pengetahuan tentang umur yang ideal untuk menikah telah dimiliki oleh pasangan tersebut. Selain itu sosialisasi serta pelatihan yang dilakukan DPPKB ke sekolah-sekolah dan kepada masyarakat umum juga sangat membantu dalam menurunkan angka cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun.

Tabel 2.199
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah di Bawah 20 Tahun Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang dari 20 tahun	1.141	880	679	283	325
2	Jumlah pasangan usia subur	54.018	54.159	54.321	54.484	64.682
3	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah di Bawah 20 Tahun	2,11	1,63	1,25	0,52	0,51

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Tabel 2.200
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah PUS Istri < 20 Tahun	Total PUS	%
1.	Mandai	14	6.862	0,20
2.	Camba	16	2.169	0,74
3.	Bantimurung	35	4.963	0,71
4.	Maros Baru	17	4.473	0,38
5.	Bontoa	22	5.082	0,43
6.	Mallawa	1	2.060	0,05
7.	Tanralili	29	5.125	0,57
8.	Marusu	75	5.729	1,31
9.	Simbang	21	6.283	0,33
10.	Cenrana	12	2.613	0,46
11.	Tompobulu	24	2.396	1,00
12.	Lau	30	4.991	0,60
13.	Moncong Loe	14	3.755	0,37
14.	Turikale	15	8.181	0,18
KABUPATEN		325	64.682	0,51

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

2.3.2.8.13 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Yang Ingin Ber KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi (*unmet need*) didefinisikan sebagai kesenjangan antara niat wanita usia reproduksi dengan perilaku penggunaan kontrasepsi. Beberapa wanita yang menikah dan tidak menikah ingin menghindari kehamilan tetapi tidak menggunakan kontrasepsi.



Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi menunjukkan tren yang berfluktuatif selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 cakupan PUS mencapai 27,24%, kemudian menurun hingga mencapai 25,81% pada tahun 2017 dan 13,74% pada tahun 2018. Pada tahun 2019 cakupan PUS *Ummet Need* meningkat hingga mencapai 14,49%, kemudian menurun Kembali pada tahun 2020 dengan cakupan sebesar 14,08%.

Tabel 2.201
Cakupan PUS Yang Ingin Ber KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani	14.716	13.978	7.464	7.895	9.104
2	Jumlah pasangan usia subur	54.018	54.159	54.321	54.484	64.682
3	Cakupan PUS Yang Ingin Ber KB Tidak Terpenuhi (<i>Unmet Need</i>)	27,24	25,81	13,74	14,49	14,08

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Tabel 2.202
Cakupan PUS Yang Ingin Ber KB Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)
Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Kecamatan	Unmet Need		
		Ingin Anak Tunda	Tidak Ingin Anak Lagi	Total
1	Mandai	577	682	1.259
2	Camba	24	12	36
3	Bantimurung	386	220	606
4	Maros Baru	373	409	782
5	Bontoa	339	314	653
6	Mallawa	188	174	362
7	Tanralili	513	481	994
8	Marusu	500	490	990
9	Simbang	282	302	584
10	Cenrana	142	80	222
11	Tompobulu	196	130	326
12	Lau	311	366	677
13	Moncongloe	384	255	639
14	Turikale	430	544	974
JUMLAH		4.645	4.459	9.104

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

2.3.2.8.14 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang

Alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP) adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang yang meliputi IUD, implant dan kontrasepsi mantap. Disamping mempercepat penurunan angka kelahiran, penggunaan kontrasepsi jangka panjang juga efisien karena dapat dipakai dalam waktu yang lama serta lebih aman dan efektif.



Persentase penggunaan MKJP di Kabupaten Maros menunjukkan tren peningkatan selama 5 tahun terakhir (2016-2020). Persentase penggunaan MKJP pada tahun 2016 sebesar 10,54%, kemudian meningkat menjadi 26,02% pada tahun 2020. Namun demikian apabila dilihat dari jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP, terlihat bahwa jumlahnya sangat sedikit. Hal ini disebabkan banyak akseptor yang lebih memilih menggunakan kontrasepsi jangka pendek seperti Pil, Suntik dan kondom.

Tabel 2.203
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	3.244	3.657	6.234	7.444	11.790
2	Jumlah akseptor KB	30.763	31.125	35.521	35.927	45.307
3	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang	10,54	11,75	17,55	20,72	26,02

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Tabel 2.204
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang
Berdasarkan Metode dan Kecamatan
Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Peserta MKJP	MKJP			
			IUD	MOW	MOP	IMP
1	Mandai	1.061	490	230	52	289
2	Camba	382	53	15	19	295
3	Bantimurung	614	105	73	1	435
4	Maros Baru	560	191	40	40	289
5	Bontoa	765	45	30	20	670
6	Mallawa	380	50	40	2	288
7	Tanralili	816	170	54	2	590
8	Marusu	775	271	73	6	425
9	Simbang	2.574	36	6	45	2.487
10	Cenrana	517	56	23	13	425
11	Tompobulu	467	31	12	2	422
12	Lau	1.000	134	44	72	750
13	Moncongloe	691	114	47	5	525
14	Turikale	1.188	521	132	59	476
JUMLAH		11.790	2.267	819	338	8.366

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

2.3.2.8.15 Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi adalah jangka waktu pemakaian alat kontrasepsi oleh Pasangan Usia Subur. Semakin panjang keberlangsungan pemakaian alat kontrasepsi oleh PUS, semakin baik.



Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi sebesar 72,02% kemudian menurun hingga mencapai 43,60% pada tahun 2020.

Tabel 2.206
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	22.156	22.299	18.371	18.912	19.754
2	Jumlah akseptor KB	30.763	31.125	35.521	35.927	45.307
3	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	72,02	71,64	51,72	52,64	43,60

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Tabel 2.207
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Bukan Peserta KB Aktif
Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Kecamatan	Total PUS	PUS Bukan Peserta KB Aktif				Jumlah
			Hamil	Ingin Anak Segera	Ingin Anak Tunda	Tidak Ingin Anak Lagi	
1	Mandai	6.862	111	812	577	682	2182
2	Camba	2.169	36	615	24	12	687
3	Bantimurung	4.963	207	572	386	220	1.385
4	Maros Baru	4.473	145	339	373	409	1.266
5	Bontoa	5.082	165	832	339	314	1.650
6	Mallawa	2.060	83	159	188	174	6.04
7	Tanralili	5.125	131	692	513	481	1.817
8	Marusu	5.729	166	499	500	490	1.655
9	Simbang	6.283	166	761	282	302	1.511
10	Cenrana	2.613	54	503	142	80	779
11	Tompobulu	2.396	115	460	196	130	901
12	Lau	4.991	273	572	311	366	1.522
13	Moncong Loe	3.755	91	572	384	255	1.302
14	Turikale	8.181	115	1.404	430	544	2.493
Jumlah		64.682	1.858	8.792	4.645	4.459	19.754

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

2.3.2.8.16 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ber-KB

Bina keluarga balita adalah kegiatan yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, yang dilaksanakan oleh sejumlah kader dan berada ditingkat RW, dengan kata lain Bina Keluarga Balita (BKB) adalah upaya peningkatan



pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan anak balita.

Cakupan anggota BKB yang ber KB Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebesar 13,76%, kemudian mencapai 18,29% pada tahun 2020. Berdasarkan data yang ada pada Tabel 2. Dibawah ini, diketahui bahwa jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena semakin pahamnya anggota kelompok BKB tentang program KB, sehingga anggota kelompok BKB tersebut telah dapat mengatur jarak umur antara anak pertama dan kedua dan seterusnya, sehingga setiap anak memiliki masa tumbuh kembang yang cukup baik.

Tabel 2.208
Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber - KB
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok BKB yang ber-KB	4.233	4.313	5.147	7.067	8.287
2	Jumlah akseptor KB	30.763	31.125	35.521	35.927	45.307
3	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber – KB	13,76	13,86	14,49	19,67	18,29

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

2.3.2.8.17 Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja ber-KB

Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan program strategis dalam upaya menyiapkan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dalam lingkungan masyarakat. Program BKR merupakan upaya meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan orang tua dan anggota lain dalam membina tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja.

Cakupan anggota BKR ber-KB selama tahun 2016 hingga tahun 2020 di Kabupaten Maros menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016 cakupan anggota BKR ber-KB sebesar 7,24%, kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 12,77%. Walaupun secara umum cakupannya meningkat, namun apabila dibandingkan dengan jumlah akseptor KB, jumlah anggota kelompok BKR yang ber – KB jumlah sangat sedikit. Hal ini disebabkan



Tabel 2.209
Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber - KB
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok BKR yang ber-KB	2.227	2.781	4.049	4.667	5.786
2	Jumlah akseptor KB	30.763	31.125	35.521	35.927	45.307
3	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Ber-KB	7,24	8,93	11,40	12,99	12,77

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

2.3.2.8.18 Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia ber-KB

Bina Keluarga Lansia (BKL) adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Cakupan anggota BKL yang ber-KB juga meningkatkan peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2016 hingga tahun 2020, walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2016 cakupan BKL ber-KB sebesar 4,49%, kemudian sedikit meningkat hingga mencapai 5,56 tahun 2020. Jumlah anggota BKL ber-KB cukup sedikit dikarenakan jumlah penduduk lansia yang memang tidak banyak, selain itu dikarenakan faktor umur, banyak anggota BKL merasakan tidak perlu ber-KB karena menganggap bahwa dirinya tidak dapat berproduksi lagi.

Tabel 2.210
Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber - KB
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah anggota kelompok BKL yang ber-KB	1.381	1.454	1.680	1.814	2.519
2	Jumlah akseptor KB	30.763	31.125	35.521	35.927	45.307
3	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Ber- KB	4,49	4,67	4,73	5,05	5,56

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

2.3.2.8.19 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Di Setiap Kecamatan

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) merupakan pelayanan konseling keluarga untuk mendukung pembinaan keluarga yang telah diselenggarakan oleh masyarakat. Kebahagiaan keluarga sangat tergantung kualitas setiap individu anggota keluarga yang di pengaruhi beberapa aspek antara lain kesiapan remaja dalam menuju jenjang rumah tangga.



Persentase PPKS di Kabupaten Maros hingga tahun 2016 sebesar 21,43% dengan jumlah PPKS sebanyak 3 PPKS, kemudian pada tahun 2020 persentasenya meningkat hingga mencapai 50% dengan jumlah PPKS yang terbentuk sebanyak 7 PPKS. Jumlah PPKS yang terbentuk pada tahun 2020 sudah sangat mencukupi dikarenakan terdapat beberapa kecamatan yang letaknya berdekatan sehingga 1 PPKS dapat melayani beberapa kecamatan yang letaknya berdekatan.

Tabel 2.211
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PPKS	3	3	4	4	7
2	Jumlah Kecamatan	14	14	14	14	14
3	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Setiap kecamatan	21,43	21,43	28,57	28,57	50,00

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

2.3.2.8.20 Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa

Pusat informasi dan konseling (PIK) adalah suatu wadah kegiatan PKBR yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja dan mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan mahasiswa serta kegiatan-kegiatan penunjang lainnya.

Apabila dibandingkan dengan jumlah kecamatan, cakupan remaja dalam PIK sebesar 100%, dikarenakan pada seluruh kecamatan telah terbentuk PIK. Namun untuk mengetahui cakupan PIK yang sebenarnya, maka yang dihitung adalah jumlah sekolah yang telah memiliki PIK. Apabila cakupan PIK dihitung berdasarkan sekolah maka diperoleh data pada tahun 2016 cakupan PIK sebesar 40,83% kemudian meningkat menjadi 45,48% pada tahun 2020.

Walaupun mengalami peningkatan namun jumlah PIK yang terbentuk belum mencakup keseluruhan sekolah yang ada di Kabupaten Maros. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Dinas PPKB dalam melatih remaja dan mahasiswa agar memiliki kompetensi untuk mengelola PIK di sekolah masing-masing. Selain itu lokasi sekolah-sekolah yang cukup jauh di pedalaman juga menjadi kendala tersendiri.

Tabel 2.212
Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PIK R/M	147	160	168	167	167
2	Jumlah Sekolah	429	361	336	306	368



3	Cakupan Remaja Dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	34,27	44,32	50,00	54,58	45,38
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

2.3.2.8.21 Cakupan PKB/PLKB Yang Digunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk

Cakupan PKB/PLKB yang digunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah mencapai 100% setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah PKB dan PLKB Kabupaten Maros sebanyak 87 kelompok, kemudian meningkat menjadi 138 kelompok pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Cakupan PKB dan PLKB yang digunakan sebesar 100%

Tabel 2.213
Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan	87	138	138	138	138
2	Jumlah PKB/PLKB	87	138	138	138	138
3	Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengendalian Penduduk	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

2.3.2.8.22 Cakupan PUD Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Usaha Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber KB Mandiri

Usaha Peningkatan Pendapatan Usaha Keluarga Sejahtera (UPPKS) adalah kelompok usaha ekonomi produktif yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, baik pasangan usia subur yang sudah ber KB maupun yang belum ber-KB dalam rangka meningkatkan tahapan kesejahteraan.

Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber KB Mandiri pada tahun 2016 sebesar 61,64% kemudian meningkat hingga mencapai 68,41% pada tahun 2020. Semakin banyaknya anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri disebabkan sosialisasi yang diselenggarakan Dinas PPKB bahwa dengan ber KB, maka anggota keluarga yang harus dihidupi tidak banyak sehingga beban juga



semakin kecil. Dengan demikian anggota kelompok dapat meningkatkan pendapatan hingga dapat mencapai keluarga sejahtera.

Tabel 2.214
Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Usaha Sejahtera (UPPKS) Yang Ber-KB Mandiri Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Anggota kelompok UPPKS yang Ber-KB Mandiri	1.139	1.242	1.353	1.475	1.660
2	Jumlah Anggota kelompok UPPKS	1.848	1.981	2.120	2.268	2.427
3	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Usaha Sejahtera (UPPKS) Yang Ber-KB Mandiri	61,64	62,67	63,85	65,04	68,41

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

2.3.2.8.23 Rasio Petugas Pembantu Pembinaan KB Desa (PPKBD) di Setiap Desa/Kelurahan

Peran Petugas Pembantu Pembinaan sebagai penyedia fasilitas khususnya tentang fasilitas keluarga berencana yang terdiri dari tempat, obat-obatan dan alat peraga edukasi kontrasepsi. Sedangkan penerima layanan terdiri dari masyarakat yang merupakan Pasangan Usia Subur dan Wanita Usia Subur. Peran PPKBD juga mendapat tugas tambahan yang merupakan UPPKS dan memberikan pembinaan kepada masyarakat yaitu bina keluarga balita, bina keluarga remaja dan bina lingkungan keluarga. Seluruh desa dan kelurahan yang berada di Kabupaten Maros sebanyak 103 desa/kelurahan telah memiliki PPKBD sehingga rasionya telah mencapai 100.

Tabel 2.215
Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah petugas pembantu pembina KB desa	103	103	103	103	103
2	Jumlah desa/kelurahan	103	103	103	103	103
3	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

2.3.2.8.24 Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk memenuhi Permintaan Masyarakat

Cakupan ketersediaan obat dan alat kontrasepsi (alokon) di Kabupaten Maros pada tahun 2016 hingga 2019 telah melebihi perkiraan permintaan masyarakat. Dengan kata lain ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi



untuk Kabupaten Maros telah over target. Cakupan ketersediaan dan distribusi alokon menunjukkan tren penurunan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 cakupan ketersediaan dan distribusi alokon sebesar 198,71% kemudian menurun hingga mencapai 66,56% pada tahun 2020.

Menurunnya jumlah alokon yang tersedia di faskes pada tahun 2020 diakibatkan adanya penutupan bandara dan pembatasan aktivitas masyarakat pada bulan Maret hingga September tahun 2020 karena adanya pandemic Covid-19. Pada tahun 2020 jumlah alokon yang tersedia di kabupaten sebanyak 28.145 alokon, sedangkan kebutuhan masyarakat sebesar 42.285 alokon.

Tabel 2.216
Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah alokon per mix kontrasepsi yang tersedia di faskes dan gudang alokon kab/kota	66.495	66.495	83.092	64.096	28.145
2	Perkiraan permintaan masyarakat	33.463	39.093	42.611	46.446	42.285
3	Cakupan Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi Untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat	198,71	170,09	195,00	138,00	66,56

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Tabel 2.217
Jenis Alat dan Obat Kontrasepsi Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Faskes/Gudang	Jenis Alokon					Jumlah
		IUD	KDM	IMP	STK	PIL	
1	Hj. Hasnah Abbas	0	10	12	158	461	641
2	Klinik Andarista Medika	0	12	10	0	391	413
3	Klinik Arifah Medika	15	3	10	160	0	188
4	Klinik Asy' Syifa	25	139	9	0	394	567
5	Klinik Pratama Pataraja	0	6	0	184	290	480
6	Klinik Syamsinar	13	11	9	236	230	499
7	Puskesmas Mandai	14	17	15	228	72	346
8	RS. AU Dr Dody Sardjoto	2	26	19	155	408	610
9	Pkm Camba	23	14	16	250	336	639
10	Pkm Bantimurung	15	9	5	310	18	357
11	Pkm Maros Baru	39	17	17	248	346	667
12	Pkm Bonto Marannu	39	4	17	126	114	300
13	Pkm Mallawa	24	21	19	364	364	792
14	Klinik Kb Sudirman	5	12	7	197	0	221
15	Puskesmas Tanralili	16	15	6	308	3	348
16	Pkm Marusu	12	9	10	200	100	331
17	Pkm Simbang	12	19	16	203	98	348
18	Pkm Cenrana	23	10	13	320	32	398



No	Faskes/Gudang	Jenis Alokasi					Jumlah
		IUD	KDM	IMP	STK	PIL	
19	Pkm Tompobulu	23	3	1	80	50	157
20	Pkm Lau	15	11	1	354	406	787
21	Pkm Moncongloe	15	13	19	328	94	469
22	Pkbrs Salewangang	0	9	19	20	120	168
23	Pkm Turikale	61	3	17	127	69	277
24	Klinik Anindhita	7	12	5	309	564	897
25	Klinik Kimia Farma	9	17	9	186	99	320
26	Gudang	276	14	1.045	1.1560	700	13.595
JUMLAH		516	144	1.179	1.4343	2.658	24.815

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

2.3.2.8.25 Persentase Faskes dan Jejaringnya (Di Seluruh Tingkat Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan

Persentase faskes dan jaringannya yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan KBKR telah mencapai 100%, dengan demikian semua fasilitas kesehatan (faskes) dan jejaring yang ada di Kabupaten Maros telah memberikan pelayanan KBKR. Jumlah faskes dan jejaringnya yang bekerjasama dengan BPJS di Kabupaten Maros sebanyak 53 Unit, kemudian meningkat hingga mencapai 55 unit pada tahun 2019 hingga tahun 2020.

Tabel 2.218
Persentase Faskes dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah faskes dan jejaring yang bekerjasama dengan BPJS	20	20	20	21	21
2	Jumlah faskes dan jejaring	25	25	25	25	25
3	Persentase Faskes dan jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama dengan BPJS dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan	80	80	80	84	84

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Tabel 2.219
Jumlah Faskes Yang Bekerjasama dengan BPJS Yang Memberikan Pelayanan KBKR Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Kecamatan	Jenis Faskes Yang Bekerja sama					Jumlah Total Faskes yang bekerjasama sama	Jumlah Total Faskes	Cakupan (%)
		RS (Ada SK PKBRS)	RS (Belum Ada SK PKBRS)	PKM	Praktik Dokter	Lainnya			
1	Mandai	0	1	2	1	2	6	8	75,00
2	Camba	0	0	1	0	0	1	1	100,00
3	Bantimurung	0	0	1	0	0	1	1	100,00
4	Maros Baru	0	0	1	0	0	1	1	100,00
5	Bontoa	0	0	1	0	0	1	1	100,00



No	Kecamatan	Jenis Faskes Yang Bekerja sama					Jumlah Total Faskes yang bekerja sama	Jumlah Total Faskes	Cakupan (%)
		RS (Ada SK PKBRS)	RS (Belum Ada SK PKBRS)	PKM	Praktik Dokter	Lainnya			
6	Mallawa	0	0	1	0	0	1	1	100,00
7	Tanralili	0	0	1	1	0	2	2	100,00
8	Marusu	0	0	1	0	0	1	1	100,00
9	Simbang	0	0	1	0	0	1	1	100,00
10	Cenrana	0	0	1	0	0	1	1	100,00
11	Tompobulu	0	0	1	0	0	1	1	100,00
12	Lau	0	0	0	0	0	0	1	0,00
13	Moncong Loe	0	0	1	0	0	1	1	100,00
14	Turikale	1	0	1	0	1	3	4	75,00
	Maros	1	1	14	2	3	21	25	84,00

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

2.3.2.8.26 Cakupan Penyediaan Data Mikro Keliarga di Setiap Desa

Data mikro diperlukan agar tersedia kependudukan dan keluarga yang lengkap dan akurat sehingga indikator-indikator pembangunan yang berhubungan dengan kependudukan dan keluarga dapat teridentifikasi dalam rangka melakukan intervensi pembangunan (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga) KKBPK apabila diperlukan. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa Kabupaten Maros telah mencapai 100%.

Tabel 2.220
Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah informasi data mikro keluarga yang tersedia	40	40	40	40	40
2	Jumlah seluruh informasi data mikro keluarga	40	40	40	40	40
3	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

2.3.2.8.27 Persentase Remaja Terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)

Masa remaja adalah masa yang sangat rentan terkena IMS dikarenakan perkembangan hormonal yang mempengaruhi perkembangan fisik, psikologis sedikit banyak menyebabkan remaja mulai menunjukkan ketertarikan pada aktivitas seksual. Pemahaman yang tepat dan informasi yang jelas tentang masalah seksual dapat menghindarkan remaja dari resiko tertular IMS.

Kasus remaja yang terkena IMS ditemukan pada tahun 2016 sebanyak 2 kasus dan pada tahun 2017 sebanyak 1 kasus. Untuk tahun 2020 tidak ditemukan kasus adanya remaja yang terkena IMS.



Tabel 2.221
Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah remaja yang terkena infeksi menular seksual (IMS)	2	1	0	0	0
2	Jumlah remaja	64.049	64.425	64.655	64.732	64.733
3	Persentase Remaja Terkena Infeksi Menular seksual (IMS)	0,003	0,002	0,000	0,000	0,000

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

2.3.2.8.28 Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita dan Anak Yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang anak

Kesadaran dan pemahaman orangtua terhadap proses tumbuh-kembang anak jelas memiliki peran penting terhadap masa depan anak-anak. Jumlah keluarga yang memiliki balita di Kabupaten Maros pada tahun 2016 cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sebesar 10,81% kemudian meningkat pada tahun 2020 hingga mencapai 15,36%.

Peningkatan ini disebabkan Dinas PPKB sangat proaktif dalam meningkatkan kemampuan pengasuhan orangtua/keluarga. Sehubungan dengan hal itu, Dinas PPKB mengadakan penyuluhan tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak bertempat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, sikap dan keterampilan orang tua/keluarga dalam mengasuh anak dari masa kehamilan, setelah lahir sampai balita, dengan berharap bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara kesehatan keluarga terutama anak secara holistik (menyeluruh) terutama dari stunting.

Tabel 2.222
Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang	5.471	5.883	6.326	6.215	5.780
2	Jumlah keluarga mempunyai balita dan anak	50.602	46.782	43.507	40.462	37.629
3	Cakupan Keluarga Yang mempunyai Balita dan Anak Yang Memahami dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	10,81	12,58	14,54	15,36	15,36

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021



2.3.2.8.29 Rata-Rata Angka Usia Kawin Pertama

Usia kawin pertama adalah usia dimana seseorang melakukan hubungan intim untuk pertama kalinya. Usia kawin pertama dalam suatu pernikahan berarti umur mulai berhubungan kelamin antara individu wanita yang terikat dalam suatu lembaga perkawinan. Rendahnya umur perkawinan pertama pada wanita disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi. Usia kawin Pertama di Kabupaten Maros rata-rata 25-26 tahun selama tahun 2016 hingga tahun 2020.

Grafik 2.46
Angka Usia Kawin Pertama



Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021

Tabel 2.223
Median Usia Kawin Pertama Perempuan Yang Pernah Menikah Umur (25 - 49) Tahun Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Kecamatan	Perempuan Pernah Menikah Per Kelompok Umur (25-49)	Janda	Median Usia Kawin Pertama Perempuan
1	Mandai	4.946	1.500	3.223
2	Camba	1.515	1.373	1.444
3	Bantimurung	4.655	2.412	3.534
4	Maros Baru	3.190	1.386	2.288
5	Bontoa	3.636	1.656	2.646
6	Mallawa	1.281	9.59	1.120
7	Tanralili	4.764	1.627	3.196
8	Marusu	4.084	1.656	2.870
9	Simbang	3.156	1.794	2.475
10	Cenrana	1.980	947	1.464
11	Tompobulu	2.020	953	1.487
12	Lau	3.858	1.711	2.785
13	Moncongloe	3.125	904	2.015
14	Turikale	5.649	2.452	4.051
Jumlah		47.859	21.330	34.595

Sumber : Dinas PPKB Kab. Maros, 2021



2.3.2.9 Perhubungan

2.3.2.9.1 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Jumlah arus penumpang umum adalah jumlah penumpang yang tercatat setiap tahunnya, baik pada penumpang untuk angkutan umum darat, laut maupun udara. Jumlah arus penumpang umum Kabupaten Maros didominasi oleh penumpang pesawat udara. Tahun 2016 jumlah penumpang di Kabupaten Maros sebanyak 16.202.191. Pada tahun 2019, jumlah penumpang angkutan umum sebanyak 13.59.492 orang. Jumlah penumpang angkutan umum pada tahun 2020 sebesar 1.797.772 orang.

Pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah penumpang pada angkutan umum yang disebabkan adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Akibat pandemi tersebut terjadi penutupan bandara, terminal dan seluruh operasional angkutan umum dihentikan selama kurang lebih 4 bulan.

Tabel 2.224
Jumlah Penumpang Angkutan Umum
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah arus penumpang umum Bis	2.191	2.224	2.257	2.291	200
2	Jumlah arus penumpang angkutan umum Pesawat Udara	12.700.000	12.282.000	12.662.215	13.054.201	1.797.572
3	Jumlah Penumpang Angkutan Umum	12.702.191	12.284.224	12.664.472	13.056.492	1.797.772

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Maros, 2021

Tabel 2.225
Jumlah Penumpang Angkutan Umum Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Jurusan	Jumlah Penumpang	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Mallawa	21	35
2	Camba	12	24
3	Cenrana	45	35
4	Bantimurung	17	11
5	Mandai*	1.075.378	722.194
Total		1.075.473	722.299

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Maros, 2021

*) Bandara Intl. Sultan Hasanuddin



2.3.2.9.2 Rasio Ijin Trayek

Ijin trayek adalah ijin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

Rasio izin trayek Kabupaten Maros menunjukkan tren yang berfluktuatif selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 rasio ijin trayek sebesar 0,0014 dengan jumlah izin yang dikeluarkan sebanyak 493 izin. Pada tahun 2020 rasio izin trayek yang dikeluarkan sebesar 0,0003 dengan jumlah izin yang dikeluarkan sebesar 123 izin.

Penurunan izin trayek yang dikeluarkan disebabkan banyaknya angkutan umum yang berhenti beroperasi diakibatkan banyaknya angkutan *online* yang lebih banyak digunakan masyarakat, selain itu pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19 jumlah angkutan umum yang berhenti beroperasi juga bertambah.

Tabel 2.226
Rasio Ijin Trayek Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan	493	304	225	166	123
2	Jumlah Penduduk	342.890	346.383	349.822	353.121	391.774
3	Rasio Ijin Trayek	0,0014	0,0009	0,0006	0,0005	0,0003

Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Maros, 2021

2.3.2.9.3 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Uji KIR adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan. Kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan. Jumlah uji KIR yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kabupaten Maros untuk angkutan umum menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2015, jumlah uji KIR angkutan umum sebanyak 1.108 kendaraan, kemudian pada tahun 963 kendaraan lalu pada tahun 2017 sebanyak 705 kendaraan dan pada tahun 2018 mencapai 382 kendaraan. Pada tahun 2019 dan 2020 Uji KIR tidak dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan disebabkan tidak adanya sarana gedung untuk melaksanakan kegiatan serta peralatan yang tidak memadai.



Tabel 2.227
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah uji KIR angkutan umum	963	705	668	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Maros, 2021

2.3.2.9.4 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

Pelabuhan, terminal atau bandara udara adalah sarana/tempat yang digunakan sebagai kegiatan perusahaan untuk menaikkan dan menurunkan barang atau penumpang. Pelabuhan, terminal dan Bandar udara biasanya diperlukan bagi daerah-daerah untuk dapat berkembang karena kelancaran transportasi baik udara, laut maupun darat sangat bergantung pada ketersediaan sarana tersebut.

Kabupaten Maros tidak memiliki terminal bus dan terminal laut. Yang terdapat di Kabupaten Maros hanya Terminal C yang melayani angkutan umum antar kecamatan dan desa. Kabupaten Maros memiliki Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin yang terletak di Kecamatan Mandai.

Tabel 2.228
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pelabuhan laut	0	0	0	0	0
2	Jumlah Terminal Bus	0	0	0	0	0
3	Jumlah Pelabuhan Udara	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Maros, 2021

2.3.2.9.5 Persentase Layanan Angkutan Darat

Layanan angkutan darat adalah jumlah masyarakat yang dapat dilayani dengan angkutan darat yang tersedia pada suatu wilayah atau daerah. Persentase layanan angkutan darat Kabupaten Maros cukup kecil apabila dilihat dari jumlah penumpang yang harus dilayani. Pada tahun 2016 persentase layanan angkutan darat sebesar 68,55% kemudian meningkat hingga mencapai 80,23% pada tahun 2019. Tahun 2020 akibat adanya pandemi persentase layanan angkutan darat menurun sangat drastis hingga mencapai 11,00%.

Tabel 2.229
Persentase Layanan Angkutan Darat Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Angkutan darat	1.502	1.553	1.751	1.838	22
2	Jumlah penumpang angkutan darat	2.191	2.224	2.257	2.291	200



No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
3	Persentase Layanan Angkutan Darat	68,55	69,83	77,57	80,23	11,00

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Maros, 2021

2.3.2.9.6 Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Kabupaten Maros setiap tahunnya menunjukkan tren penurunan. Hal ini disebabkan jumlah angkutan yang tidak memiliki KIR setiap tahun terus menurun, namun jumlah angkutan umum juga jumlahnya semakin sedikit.

Pada tahun 2016 persentase kepemilikan KIR sebesar 10,99%, kemudian menurun hingga menjadi 4,19% pada tahun 2019 persentase kepemilikan KIR meningkat hingga mencapai 8,92% disebabkan jumlah angkutan umum yang bertambah sedangkan Dinas Perhubungan tidak memiliki sarana dan prasarana yang memenuhi standar yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan maka pengujian KIR tidak dapat dilaksanakan.

Pada tahun 2020 persentase kepemilikan KIR meningkat sangat signifikan hingga mencapai 100%. Hal ini disebabkan banyaknya angkutan umum yang berhenti beroperasi akibat pandemi sehingga yang tertinggal sebanyak 22 unit angkutan umum, dan keseluruhannya telah memiliki KIR.

Tabel 2.230
Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR pada tahun n	165	123	77	164	22
2	Jumlah angkutan umum pada tahun n	1.502	1.553	1.751	1.838	22
3	Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum	10,99	7,92	4,40	8,92	100,00

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Maros, 2021

2.3.2.9.7 Pemasangan Rambu-Rambu

Rambu-rambu adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan.

Persentase pemasangan rambu di Kabupaten Maros telah mencapai 100%, namun ini untuk satu jenis rambu-rambu saja. Pada tahun 2015 jumlah rambu-rambu yang terpasang sebanyak 200 unit, kemudian pada tahun 2016 sebanyak 140 unit dan pada tahun 2018 sebanyak 90 unit. Pada tahun

**2.3.2.9.8 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan**

Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan digunakan untuk kemampuan jalan tersebut untuk menampung jumlah kendaraan yang ada. Hal ini berhubungan dengan tingkat kemacetan jalan. Rasio Panjang jalan perjumlah kendaraan pada tahun 2016 sebesar 0,13 % kemudian menurun hingga mencapai 0,02 % pada tahun 2020.

Menurunnya rasio disebabkan jumlah panjang jalan yang tidak bertambah sedangkan jumlah kendaraan semakin bertambah setiap tahunnya. Dengan demikian dapat diketahui bahwa tingkat kemacetan di Kabupaten Maros akan semakin tinggi setiap tahunnya.

Tabel 2.231
Rasio Panjang jalan Per Jumlah Kendaraan
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Panjang jalan	1.290	1.032	1.032	1.032	1.032
2	Jumlah kendaraan	9.437	10.398	13.180	15.526	44.327
3	Rasio Panjang jalan Per Jumlah Kendaraan	0,13	0,09	0,07	0,06	0,02

Sumber : Dinas PUPR dan Dispenda Prov Sulsel, 2021

Tabel 2.232
Rasio Panjang jalan Per Jumlah Kendaraan Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Kecamatan	Panjang Jalan	Jumlah Kendaraan		Rasio
			Roda 2	Roda 4	
1	Bantimurung	63,64	3.022	579	0,02
2	Camba	94,05	893	188	0,09
3	Cenrana	69,32	648	131	0,09
4	Lau	10,07	2.496	414	0,00
5	Mallawa	143,17	612	126	0,19
6	Mandai	41,02	7.069	1.928	0,00
7	Maros Baru	31,18	2.216	343	0,01
8	Bontoa	43,36	2.078	192	0,02
9	Marusu	36,85	3.403	810	0,01
10	Moncongloe	39,38	1.996	415	0,02
11	Simbang	48,87	2.035	354	0,02
12	Tanralili	61,57	3.111	487	0,02
13	Tompobulu	95,37	670	137	0,12
14	Turikale	39,76	6.602	2.372	0,00
15	Lintas Kecamatan	214,52	36.851	8.476	0,00
MAROS		1.032,13	36.851	8.476	0,02

Sumber : Dinas PUPR dan Dispenda Prov Sulsel, 2021

**2.3.2.9.9 Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara Terminal Tahun**

Jumlah barang dan orang yang melalui dermaga, terminal/bandara tahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, utamanya untuk jumlah orang dan barang yang terangkut melalui Bandar udara Hasanuddin.

Meningkatnya jumlah barang yang terangkut pada tahun 2020 walaupun adanya pandemi COVID-19 disebabkan banyak pergerakan barang yang terangkut melewati bandara Sultan Hasanuddin. Pergerakan barang ini adalah barang-barang yang di pesan masyarakat melalui aplikasi belanja online serta alat-alat medis, obat-obatan serta keperluan medis lainnya yang didatangkan dari luar Sulawesi Selatan dalam rangka penanganan COVID-19.

Tabel 2.233
Rasio Panjang jalan Per Jumlah Kendaraan
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bandara					
	Jumlah orang terangkut (Jiwa)	12.700.000	12.282.000	12.662.215	13.054.201	1.797.572
	Jumlah barang terangkut (Ton)	72.390.000	84.357.000	100.727.190	120.274.155	143.614.374
2	Dermaga					
	Jumlah orang terangkut (Jiwa)	0	0	0	0	0
	Jumlah barang terangkut (Ton)	45	50	65	85	111
3	Terminal					
	Jumlah orang terangkut (Jiwa)	2.191	2.224	2.257	2.291	200
	Jumlah barang terangkut (Ton)	0	0	0	0	0
4	Jumlah orang terangkut (Jiwa)	12.702.191	12.284.224	12.664.472	13.056.492	1.797.772
	Jumlah barang terangkut (Ton)	72.390.045	84.357.050	100.727.256	120.274.240	143.614.485

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Maros, 2021



2.3.2.9.10 Tingkat Kecelakaan

Tingkat kecelakaan adalah jumlah dari banyaknya kecelakaan untuk setiap kilometer jalan pada setiap tahunnya. Tingkat kecelakaan di Kabupaten Maros masih cukup tinggi sejak tahun 2016 hingga tahun 2020, walaupun trennya semakin menurun. Hal ini terlihat dari persentase tingkat kecelakaan pada tahun 2016 sebesar 3,61%. Kemudian pada tahun 2017 sebesar 0,27%. Tingkat kecelakaan kemudian meningkat pada tahun 2018 sebesar 2,83%, lalu kembali turun pada tahun 2019 sebesar 2,09% dan pada tahun 2020 sebesar 0,36%. Pada umumnya jumlah kecelakaan yang terjadi melibatkan angkutan umum khususnya mobil angkutan (Truck) dan sepeda motor.

Walaupun tingkat kecelakaan menurun, namun jumlah korban meninggal akibat kecelakaan tersebut cukup banyak. Pada tahun 2020 jumlah korban meninggal sebanyak 38 orang, luka berat 13 orang dan luka ringan sebanyak 207 orang. Dengan demikian dari 158 kejadian kecelakaan pada tahun 2020, hampir seluruhnya merupakan kecelakaan yang berat.

Tabel 2.234
Tingkat kecelakaan Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas	341	493	373	324	158
2	Jumlah kendaraan	9.437	10.398	13.180	15.526	44.327
3	Tingkat kecelakaan	3,61	4,74	2,83	2,09	0,36

Sumber : Polres Maros dan Dispenda Prov. Sulsel, 2021

Tabel 2.235
Jumlah Kecelakaan Berdasarkan kecamatan Serta Jumlah Korban Jiwa Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Kecelakaan	Korban		
			Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan
1	Mallawa	1	1	0	2
2	Camba	9	5	0	10
3	Bantimurung	13	3	1	40
4	Lau	11	4	1	12
5	Turikale	31	9	3	32
6	mandai	28	5	4	37
7	Cenrana	7	2	8	9
8	Tanralili	10	1	8	10
9	Moncongloe	10	1	2	10
10	Tompobulu	7	1	2	8
11	Simbang	11	1	0	10
12	Marusu	11	3	0	14
13	Bontoa	9	2	0	13
Jumlah		158	38	29	207

Sumber : Polres Maros, 2021



2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

2.3.2.10.1 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Masyarakat di Tingkat Kecamatan

Kelompok informasi masyarakat adalah lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh, dan untuk masyarakat yang secara khusus berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Dengan kata lain Kelompok Informasi Masyarakat bertujuan untuk memberikan nilai tambah. Jumlah KIM yang dibentuk sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada. Kabupaten Maros pada tahun 2017 telah melakukan pembentukan KIM pada setiap kecamatan yang ada sehingga cakupan pengembangan dan pemberdayaannya mencapai 100%.

Tabel 2.236
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok Informasi masyarakat di Tingkat Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat	0	14	14	14	14
2	Jumlah Kecamatan yang ada dalam kab/kota	14	14	14	14	14
3	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok Informasi masyarakat di Tingkat Kecamatan	0	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Maros, 2021

2.3.2.10.2 Cakupan Layanan Telekomunikasi

Cakupan layanan telekomunikasi adalah luas areal atau wilayah yang dapat terjangkau atau terlayani komunikasi dan telekomunikasi termasuk fasilitas internet. Dari 14 (empat belas) Kecamatan yang ada di Kabupaten Maros, hampir seluruhnya telah terjangkau oleh layanan telekomunikasi. Pada tahun 2017 cakupan layanan telekomunikasi sebesar 4,98 % dengan luas wilayah yang tercover sebesar 8.066 km², kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 77,74% dengan luas wilayah tercover sebesar 1.257 km².

Cakupan layanan belum mencapai 100% dikarenakan adanya beberapa desa/kelurahan yang memiliki kondisi geografis yang sangat sulit untuk dilakukan pemasangan tower serta peralatan telekomunikasi seperti desa/kelurahan yang berada di areal ketinggian dengan akses yang cukup sulit serta di wilayah yang berada di lembah karst sehingga sangat tidak memungkinkan untuk mendapatkan layanan komunikasi dengan baik.



Tabel 2.237
Cakupan Layanan Telekomunikasi Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas wilayah yang tercoverage (km ²)	0	8.066	10.857	13.333	1.257
2	Luas wilayah keseluruhan (km ²)	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619
3	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0,00	4,98	6,71	8,23	77,74

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Maros, 2021

Tabel 2.238
Cakupan Layanan Telekomunikasi Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas	Luas wilayah tercoverage	Cakupan
1	Bontoa	93,52	93,52	100
2	Lau	73,83	73,83	100
3	Turikale	29,93	29,93	100
4	Mandai	49,11	49,11	100
5	Maros Baru	53,76	53,76	100
6	Marusu	53,73	53,73	100
7	Moncongloe	46,87	24,38	52,01
8	Tanralili	89,45	89,45	100
9	Simbang	105,31	105,31	100
10	Cenrana	180,97	80,72	44,60
11	Camba	145,36	102,36	70,41
12	Mallawa	235,92	140,71	59,64
13	Tompobulu	287,66	99,12	34,45
14	Bantimurung	173,70	173,31	99,77
MAROS		1.619,12	1.258,69	77,74

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Maros, 2021

2.3.2.10.3 Persentase Penduduk Yang Menggunakan Telepon Seluler

Telepon merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting pada jaman sekarang ini, dikarenakan fungsinya yang tidak hanya digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi (*Smartphone*). Persentase penduduk Kabupaten Maros yang menggunakan telepon seluler menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 sebesar 55,06% dengan jumlah penduduk yang menggunakan HP sebanyak 188.805 orang. Pada tahun 2020 jumlah penduduk yang menggunakan HP meningkat sebanyak 337.552 orang dengan persentase sebesar 86,16%.

Seperti halnya listrik, HP juga saat ini juga merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat umum. Fungsi utama dari handphone adalah sebagai alat komunikasi melalui suara dan pesan singkat (SMS). Selanjutnya handphone



berfungsi untuk menangkap siaran radio, televisi. Juga dilengkapi dengan fungsi audio, kamera, video, game, serta layanan internet. Dengan semakin banyaknya fungsi HP tersebut maka masyarakat saat ini semakin banyak yang menggunakan HP.

Tabel 2.239
Persentase Penduduk Yang Menggunakan Telepon Selular
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon	188.805	268.689	275.800	273.810	337.552
2	Jumlah penduduk	342.890	346.383	349.822	353.121	391.774
3	Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon	55,06	77,57	78,84	77,54	86,16

Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

2.3.2.10.4 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet

Internet adalah seluruh jaringan komunikasi yang menggunakan media elektronik, yang saling terhubung menggunakan *standard system global Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP)* sebagai protocol pertukaran paket. Pada saat sekarang ini, kebutuhan akan internet sudah sangat tinggi diakibatkan kebutuhan masyarakat akan informasi yang juga sangat besar.

Proporsi rumah tangga dengan akses internet di Kabupaten Maros masih sangat kecil. Pada tahun 2016 proporsi rumah tangga dengan akses internet sebesar 0,27 dengan kata lain dari 85.723 jumlah RT di kabupaten Maros, 23.217 diantara telah memiliki akses terhadap internet. Pada tahun 2020 proporsi semakin meningkat hingga mencapai 0,71 dimana dari 97.944 RT, 69.955 RT diantara telah memiliki akses internet.

Semakin meningkatnya jumlah RT yang dapat mengakses internet disebabkan semakin banyaknya sarana prasarana telekomunikasi yang tersedia, baik yang disediakan oleh pihak swasta maupun oleh pemerintah yang dalam hal ini oleh Dinas Kominfo Kabupaten Maros.

Tabel 2.240
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet
Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses internet	23.217	27.541	32.742	36.892	69.955
2	Jumlah rumah tangga	85.723	87.437	89.186	90.970	97.944
3	Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet	0,27	0,31	0,37	0,41	0,71

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Maros, 2021



Tabel 2.241
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah RT	Jumlah RT yang memiliki akses internet	Proporsi
1	Bontoa	7.650	5.976	0,78
2	Lau	6.886	5.546	0,80
3	Turikale	12.135	9.562	0,78
4	Mandai	12.948	8.615	0,66
5	Marusu	8.580	6.146	0,71
6	Tanralili	7.738	6.265	0,80
7	Moncongloe	5.936	1.604	0,27
8	Tompobulu	3.986	951	0,23
9	Simbang	6.386	5.619	0,87
10	Maros Baru	7.091	5.381	0,75
11	Bantimurung	8.208	7.161	0,87
12	Cenrana	3.555	2.082	0,58
13	Camba	3.644	2.986	0,81
14	Mallawa	3.203	2.061	0,64
MAROS		97.944	69.955	0,71

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Maros, 2021

2.3.2.10.5 Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Komputer Pribadi

Seperti halnya telepon dan internet, komputer adalah salah satu sarana yang diperlukan masyarakat kehidupan sehari-hari pada jaman sekarang ini. Hampir seluruh masyarakat sekarang ini memiliki komputer/laptop. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi pada tahun 2017 sebesar 0,82 kemudian menurun pada tahun 2018 sebesar 0,65. Pada tahun 2020 proporsi RT yang menggunakan komputer pribadi meningkat hingga mencapai 0,85.

Peningkatan jumlah RT yang menggunakan komputer pribadi disebabkan kebutuhan akan teknologi yang semakin meningkat, di era transformasi digital hampir seluruh kegiatan masyarakat berhubungan dengan internet yang memerlukan komputer sebagai perangkat penghubung.

Tabel 2.242
Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Internet
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah tangga yang menggunakan komputer pribadi	-	71.607	58.346	70.538	84.378
2	Jumlah rumah tangga	85.723	87.437	89.186	90.970	97.944
3	Proporsi Rumah Tangga yang memiliki komputer pribadi	-	0,82	0,65	0,78	0,85

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Maros, 2021



2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.3.2.11.1 Persentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan asas kekeluargaan. Persentase koperasi yang aktif di Kabupaten Maros menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik.

Pada tahun persentase koperasi aktif sebesar 74,34% kemudian hingga mencapai 77,08% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 persentase koperasi aktif menurun hingga mencapai 69,71%. Menurunnya persentase koperasi aktif pada tahun 2020 disebabkan karena jumlah koperasi aktif jumlahnya bertambah, yang mana hal tersebut akibat adanya pandemic COVID-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan banyak koperasi yang berhenti beroperasi.

Tabel 2.243
Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Koperasi Aktif	255	259	262	269	244
2	Jumlah seluruh koperasi	343	346	347	349	350
3	Persentase Koperasi Aktif	74,34	74,86	75,50	77,08	69,71

Sumber : Dinas Kopumdag Kab. Maros, 2021

Tabel 2.244
Persentase Koperasi Aktif Berdasarkan Kecamatan
Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Koperasi aktif	Jumlah Koperasi Tidak aktif	Total Koperasi	Persentase Koperasi Aktif
1	Turikale	75	38	113	66,37
2	Tompobulu	9	8	17	52,94
3	Tanralili	16	2	18	88,89
4	Simbang	6	1	7	85,71
5	Moncongloe	7	0	7	100,00
6	Marusu	11	7	18	61,11
7	Maros Baru	15	6	21	71,43
8	Mandai	40	13	53	75,47
9	Mallawa	3	2	5	60,00
10	Lau	19	12	31	61,29
11	Cenrana	5	4	9	55,56
12	Camba	10	3	13	76,92
13	Bontoa	11	4	15	73,33
14	Bantimurung	17	6	23	73,91
	Maros	244	106	350	69,71

Sumber : Dinas Kopumdag Kab. Maros, 2021



2.3.2.11.2 Persentase Usaha Mikro Dan Kecil

Usaha mikro adalah badan usaha perorangan yang memiliki kriteria sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yakni: 1) Memiliki aset atau kekayaan bersih hingga Rp 50 juta, tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha, 2) Omzet penjualan tahunan hingga Rp 300 juta. Sementara, berdasarkan perkembangannya, usaha mikro diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 1) *Livelihood*, yakni usaha mikro yang sifatnya untuk mencari nafkah semata. Jenis usaha mikro yang satu ini dikenal luas sebagai sektor informal. Contohnya, pedagang kaki lima, 2) *Micro*, yakni usaha mikro yang sudah cukup berkembang, namun memiliki sifat kewirausahaan dan belum bisa menerima pekerjaan subkontraktor serta belum bisa melakukan kegiatan ekspor.

Usaha mikro dan kecil Kabupaten Maros mendominasi jumlah UKM di Kabupaten Maros. Pada tahun 2019 persentase usaha mikro dan kecil sebesar 92,26% dimana dari 30.963 UKM yang ada di Kabupaten Maros, 28.875 diantaranya adalah usaha mikro dan kecil. Pada tahun 2020 persentase usaha mikro dan kecil sebesar 100 % dengan jumlah usaha mikro dan kecil sebanyak 17.500 unit.

Walaupun persentase meningkat, jumlah UKM dan usaha mikro kecil pada tahun 2020 menurun. Hal ini disebabkan adanya pandemic COVID-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan banyak UKM yang berhenti beroperasi. Selain itu penurunan jumlah UMKM juga disebabkan adanya pendataan ulang yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan kabupaten Maros terhadap UMKM yang aktif dan tidak aktif.

Tabel 2.245
Persentase Usaha Mikro dan kecil
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah usaha mikro dan kecil	28.875	30.377	31.087	30.963	17.500
2	Jumlah seluruh UKM	30.963	31.465	31.274	31.003	17.500
3	Persentase Usaha Mikro dan kecil	93,26	96,54	99,40	99,87	100,00

Sumber : Dinas Kopumdag Kab. Maros, 2021

2.3.2.12 Penanaman Modal

2.3.2.12.1 Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Investor adalah orang perorangan atau lembaga baik domestik maupun non domestik yang melakukan suatu investasi (bentuk penanaman modal sesuai



dengan jenis investasi yang dipilihnya) baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Jumlah investor nasional baik PMDN maupun PMA yang menanamkan modalnya di Kabupaten Maros menunjukkan tren positif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2016 jumlah investor yang menanamkan modalnya sebanyak 19 investor, kemudian bertambah menjadi 20 investor pada tahun 2017. Pada tahun 2020 jumlah investor di kabupaten Maros sebanyak 35 investor.

Walaupun jumlah investor meningkat setiap tahunnya, namun secara umum jumlah investor yang berinvestasi di Kabupaten Maros sangat sedikit apabila dibandingkan dengan potensi investasi yang tersedia. Hal ini disebabkan masih kurangnya informasi tentang peluang investasi di Kabupaten Maros, selain itu penilaian investor tentang proses perizinan yang berbelit-belit masih sangat mempengaruhi keputusan investor tersebut untuk berinvestasi.

Tabel 2.246
Jumlah Investor Berskala nasional (PMDN/PMA)
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Investor Berskala nasional (PMDN/PMA)	19	20	25	29	35

Sumber : Dinas PMPTSP kab. Maros, 2021

2.3.2.12.2 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Nilai investasi yang ditanamkan investor di Kabupaten Maros menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2016 nilai investasi berdasarkan harga belaku sebesar 3,7 trilyun, kemudian 2019 sebesar 5 trilyun dan diperkirakan pada tahun 2020 jumlah investasi di Kabupaten Maros sebesar 5,6 trilyun. Walaupun investasi yang ditanamkan oleh investor sifatnya *multiyear*, namun apabila dilihat dari nilai investasi maka jumlah investasi tersebut masih sangat kecil.

Masih kecilnya nilai investasi di Kabupaten Maros dikarenakan kurangnya informasi tentang peluang investasi di Kabupaten Maros, selain itu penilaian investor tentang proses perizinan yang berbelit-belit masih sangat mempengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi.



Tabel 2.247
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp Juta)
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Nilai Investasi Berskala nasional (PMDN/PMA)	3.711.284	4.282.022	4.558.035	5.066.845	5.674.866

Sumber : Dinas BPS Prop Sulsel (ICOR MAMMINASATA), 2021

2.3.2.12.3 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Maros, baik dalam negeri maupun asing. Rasio tenaga kerja yang bekerja pada Penanaman Modal Asing (PMS)/Penanaman Modal Dalam negeri (PMDN) pada tahun 2016 sebesar 8,00 kemudian meningkat menjadi 31,21 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 rasio daya serap tenaga kerja sebesar 8,22%.

Menurunnya rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2020 disebabkan adanya pembatasan pergerakan akibat pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap operasional PMA/PMDN dan mengakibatkan pengurangan tenaga kerja.

Tabel 2.248
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	152	125	583	905	288
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	19	20	25	29	35
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	8,00	6,26	23,30	31,21	8,22

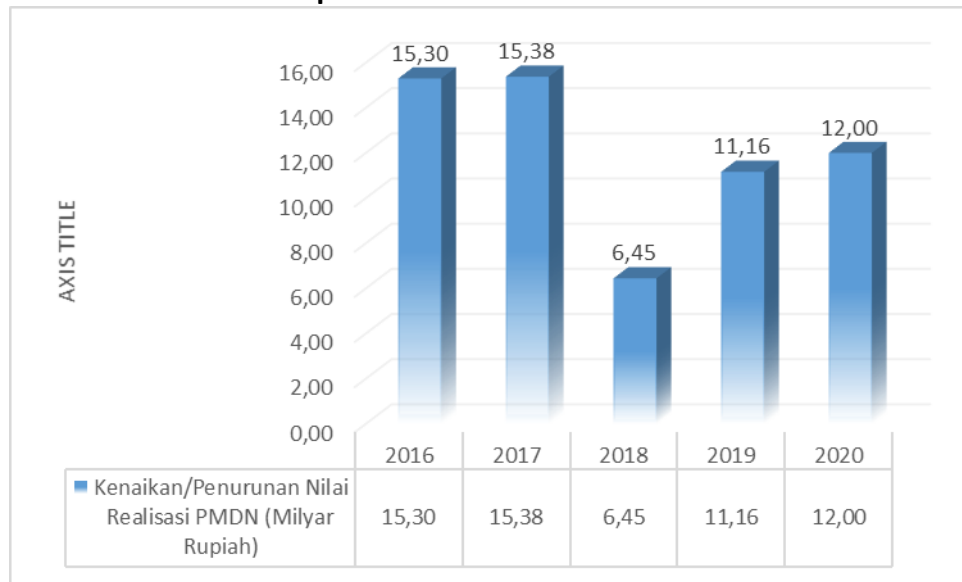
Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Maros, 2021

2.3.2.12.4 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)

Realisasi jumlah nilai investasi yang ditanamkan oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Maros menunjukkan tren yang berfluktuatif. Pada tahun 2016 pertumbuhan PMDN sebesar 15,30 %, kemudian tumbuh sebesar 15,38 % pada tahun 2017. Pada tahun 2018 terjadi pelambatan realisasi PMDN sebesar 6,45 %, namun pada tahun 2019 kembali berakselerasi hingga mencapai 11,16 %. Untuk tahun 2020 diperkirakan kenaikan PMDN sebesar 12 %.



Grafik 2.47
Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)
Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2020



Sumber : Dinas BPS Prop Sulsel (ICOR MAMMINASATA), 2021

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

2.3.2.13.1 Persentase Organisasi Pemuda aktif

Organisasi pemuda adalah lembaga yang menghimpun segenap potensi anak muda baik mahasiswa maupun anak sekolah yang masuk kategori pemuda bahkan mereka yang tidak menjadi anak terdidik. Jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Maros sampai dengan tahun 2020 sebanyak 147 organisasi dengan persentase organisasi yang aktif mencapai 100%.

Dari data tersebut diketahui bahwa para pemuda di Kabupaten Maros memiliki keinginan dan kemampuan untuk berorganisasi yang cukup tinggi. Kondisi ini juga ditunjang dengan berbagai program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melakukan pembinaan terhadap para pemuda di Kabupaten Maros.

Tabel 2.249
Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	147	147	147	147	147
2	Jumlah seluruh organisasi pemuda	147	147	147	147	147
3	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	100	100	100	100	100

Sumber : Dispora Kab. Maros, 2021



2.3.2.13.2 Persentase Wirausaha Muda

Wirausahawan adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Persentase wirausaha muda di Kabupaten Maros sebesar 9,12% pada tahun 2016 dengan jumlah wirausaha muda sebanyak 295 wirausaha, kemudian meningkat pada tahun 2018 hingga tahun 2020 sebesar 8,58% dengan jumlah wirausaha muda sebanyak 309 wirausaha.

Tidak adanya penambahan wirausaha muda disebabkan beberapa hal, diantaranya; kurangnya minat pemuda untuk menjadi wirausaha, kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan serta tidak adanya sistem pendidikan yang menanamkan kewirausahaan sejak dini.

Tabel 2.250
Persentase Wirausaha Muda Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah wirausaha muda	295	309	309	309	309
2	Jumlah seluruh wirausaha	3.235	3.285	3.600	3.600	3.600
3	Persentase Wirausaha Muda	9,12	9,41	8,58	8,58	8,58

Sumber : Dispora Kab. Maros, 2021

2.3.2.13.3 Cakupan Pembinaan Olahraga

Jumlah cabang olahraga yang terdaftar pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan KONI kabupaten Maros sampai tahun 2020 berjumlah 27 cabang sehingga cakupan pembinaan olahraga mencapai 100%. Ke-27 cabang olahraga tersebut telah mendapatkan pembinaan baik secara materi maupun pelatihan dan pembinaan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Tabel 2.251
Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	0	27	27	27	27
2	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	27	27	27	27	27
3	Cakupan Pembinaan Olahraga	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dispora Kab. Maros, 2021



2.3.2.13.4 Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi

Pelatih adalah seseorang yang bertugas untuk mempersiapkan fisik dan mental olahragawan maupun kelompok olahragawan. Pelatih mengatur taktik, strategi, pelatihan fisik dan menyediakan dukungan moral kepada atlet. Untuk menjadi pelatih yang resmi dan mendampingi olahragawan atau kelompok olahragawan dalam suatu pertandingan, pelatih tersebut haruslah memiliki sertifikat/lisensi kepelatihan.

Jumlah pelatih seluruh cabang olahraga di Kabupaten Maros sampai tahun 2020 sebanyak 77 orang. Keseluruhan pelatih tersebut telah memiliki sertifikat sehingga cakupan pelatih yang bersertifikasi di Kabupaten Maros sebesar 100%.

Tabel 2.252
Cakupan Pelatih Bersertifikat Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pelatih bersertifikat	77	77	77	77	77
2	jumlah seluruh pelatih	77	77	77	77	77
3	Cakupan Pelatih Yang Bersertifikasi	100	100	100	100	100

Sumber : *Dispora Kab. Maros, 2021*

2.3.2.13.5 Cakupan Pembinaan Atlet Muda

Atlet adalah seseorang yang mahir dalam berolahraga dan bentuk lain dari latihan fisik. Pembinaan terhadap atlet muda baru dilaksanakan pada tahun 2017, dimana terdapat 15 atlet yang dibina dengan cakupan sebesar 3,54%. Cakupan pembinaan terhadap atlet muda kemudian sedikit meningkat pada tahun 2019 hingga mencapai 10,61% dengan jumlah atlet yang dibina sebanyak 45 orang. Pada tahun 2020 tidak dilaksanakan kegiatan pembinaan dikarenakan adanya *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.

Tabel 2.253
Cakupan Pembinaan Atlet Muda Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah atlet pelajar yang dibina	0	15	30	45	45
2	jumlah seluruh atlet pelajar	424	424	424	424	424
3	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	0,00	3,54	7,08	10,61	10,61

Sumber : *Dispora Kab. Maros, 2021*

2.3.2.13.6 Jumlah Atlet Berprestasi

Jumlah atlet yang berprestasi dalam hal ini adalah atlet yang telah memiliki prestasi pada tingkat provinsi, nasional dan internasional. Kabupaten Maros memiliki 2 orang atlet yang telah memiliki prestasi pada tingkat nasional dan



internasional. Sedangkan untuk tingkat regional atau Provinsi, jumlah atlet yang berprestasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 27 orang pada tahun 2016 hingga mencapai 115 orang pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 terdapat 30 orang atlet yang memiliki prestasi pada tingkat propinsi.

Jumlah atlet yang berprestasi pada tingkat nasional dan internasional masih sangat kurang, hal ini disebabkan masih sangat minimnya sarana dan prasarana olahraga, khususnya di Kabupaten Maros yang memiliki standar untuk meningkatkan prestasi. Selain itu keberlanjutan pembinaan dan prestasi atlet hingga mencapai level nasional juga belum berjalan dengan baik.

Tabel 2.254
Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional dalam satu tahun	1	1	1	1	2
2	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat regional/propinsi dalam satu tahun	27	29	115	30	30
3	Jumlah Atlet Berprestasi	28	30	116	31	32

Sumber : *Dispora Kab. Maros, 2021*

2.3.2.13.7 Persentase Cabang Olahraga Berprestasi

Jumlah cabang olahraga yang berprestasi menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Persentase cabang olahraga yang berprestasi pada tahun 2016 sebesar 22,22. Pada tahun 2017 terjadi penurunan persentase menjadi 14,81%. Namun pada tahun 2018 persentase cabang olahraga berprestasi kembali meningkat, bahkan mencapai 77,78%. Sedangkan pada tahun 2019 dan persentasenya kembali menurun hingga mencapai 29,63%. Kecilnya presentase cabang olahraga yang berprestasi lebih disebabkan jumlah *even* olahraga yang diselenggarakan sangat kurang pada tahun tersebut.

Tabel 2.255
Persentase Cabang Olahraga Berprestasi
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun	6	4	21	8	8
2	Jumlah seluruh cabor	27	27	27	27	27
3	Persentase cabor berprestasi	22,22	14,81	77,78	29,63	29,63

Sumber : *Dispora Kab. Maros, 2021*



2.3.2.14 Statistik

2.3.2.14.1 Tersedianya Sistem Data Statistik Yang Terintegrasi

Sistem data dan statistik yang terintegrasi adalah sistem yang terhubung dengan seluruh sistem yang ada, dengan tujuan agar dapat memudahkan pelayanan informasi kepada masyarakat akan data dan statistik. Sejak adanya Permendagri 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dimana dalam Permendagri tersebut dikatakan bahwa SIPD merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk menghimpun dan mengolah data baik makro maupun sektoral. Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai wali data telah mengoperasikan aplikasi SIPD tersebut, namun dikarenakan SIPD masih dalam proses pengembangan, maka pengoperasiannya belum berjalan maksimal.

Tabel 2.256
Tersedianya Sistem Data Statistik Yang Terintegrasi
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Sistem data Statistik Yang Terintegrasi	tidak	tidak	tidak	ada	ada

Sumber : Dinas Kominfo kab. Maros, 2021

2.3.2.14.2 Buku Kabupaten Dalam Angka

Untuk menggambarkan kondisi Kabupaten Maros, Badan Pusat Statistik bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Maros telah menyusun suatu buku yang memuat informasi-informasi umum tentang kondisi Kabupaten Maros, baik dari segi ekonomi, sosial, pemerintahan, keuangan dan aspek-aspek lainnya yang dianggap penting.

Tabel 2.257
Buku “ Kabupaten Dalam Angka “ Kabupaten Maros
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Buku " Kabupaten Dalam Angka "	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Dinas Kominfo kab. Maros, 2021

2.3.2.14.3 Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Seperti halnya buku “ Kabupaten Dalam Angka “, BPS bersama Pemerintah Kabupaten Maros juga menyusun buku yang memuat tentang kondisi perekonomian makro Kabupaten Maros. Dalam buku ini termuat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros, sektor-sektor yang menjadi struktur pertumbuhan



ekonomi serta faktor-faktor yang menjadi penyebab melajunya atau melambatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros.

Tabel 2.258
Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Dinas Kominfo kab. Maros, 2021

2.3.2.15 Persandian

2.3.2.15.1 Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah

Selain menjalankan urusan komunikasi dan informatika, serta statistik, Diskominfo Kabupaten Maros juga melaksanakan urusan persandian. Secara umum, urusan persandian meliputi kegiatan pengamanan atau melindungi informasi. Tujuan pengelolaan persandian pengelolaan informasi yaitu informasi dengan dampak memiliki nilai yang penting bagi instansi, menghambat tugas pokok instansi, kerusakan aset organisasi tinggi pengaruhnya bagi instansi, terganggunya penyelenggaraan instansi dan menimbulkan kerugian bagi instansi pemerintah.

Pada tahun 2019 Kabupaten Maros baru menerapkan sistem persandian terhadap seluruh proses keluar masuknya surat dalam lingkup Pemerintah. Sistem ini telah diterapkan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada.

Tabel 2.259
Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	0	0	0	45	45
2	Jumlah total perangkat daerah	45	45	45	45	45
3	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	0	0	0	100	100

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Maros, 2021



2.3.2.16 Kebudayaan

2.3.2.16.1 Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Seni dan budaya merupakan dua hal yang saling berkaitan dan sangat sulit dipisahkan. Karena di setiap seni pasti mengandung kebudayaan yang khas, begitu juga sebaliknya pada setiap kebudayaan pasti mengandung nilai seni. Penyelenggaraan festival seni dan budaya terus digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Setiap tahun diselenggarakan 3-4 kali festival budaya. Pada tahun 2016 jumlah penyelenggaraan seni budaya sebanyak 4 kali, kemudian menurun pada tahun 2017 sebanyak 2 kali kemudian pada tahun 2018 dan 2019 jumlah penyelenggaraan seni budaya menjadi 3 kali. Untuk tahun 2020 tidak diselenggarakan festival dikarenakan adanya larang melakukan kegiatan yang mengundang kerumunan akibat ada wabah COVID-19.

Tabel 2.260
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	2	3	3	0

Sumber : Disbudpar Kab. Maros, 2021

2.3.2.16.2 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan lainnya.

Benda, Situs dan kawasan yang dilestarikan di Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebesar 19,95% dimana dari 411 item, 82 item diantaranya telah dilestarikan. Pada tahun 2108 hingga tahun 2020 jumlah item yang telah dilestarikan sebanyak 157 item, sehingga benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan mencapai 38,20%.

Tabel 2.261
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	82	131	144	157	157



2	Total benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	411	411	411	411	411
3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan	19,95	31,87	35,04	38,20	38,20

Sumber : Disbudpar Kab. Maros, 2021

Tabel 2.262
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dipelihara
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Nama Benda, Situs Dan Kawasan	Bulan Dan Tahun Penetapan	Dipelihara	Tidak Dipelihara
1.	Leang Burung I	Desember 2016	√	-
2.	Leang Burung II	Desember 2016	√	-
3.	Leang Pangie	Desember 2016	√	-
4.	Leang Sampeang	Desember 2016	√	-
5.	Leang Bettue	Desember 2016	√	-
6.	Leang Ulu Leang	Desember 2016	√	-
7.	Leang Ambe Paco	Desember 2016	√	-
8.	Leang Alla Pusae	Desember 2016	√	-
9.	Leang Ulu Wae	Desember 2016	√	-
10.	Leang Pajae	Desember 2016	√	-
11.	Leang Pattae	Desember 2016	√	-
12.	Leang Petta Kere	Desember 2016	√	-
13.	Leang Tinggi Ada	Desember 2016	√	-
14.	Leang Bara Tedong I	Desember 2016	√	-
15.	Leang Bara Tedong II	Desember 2016	-	√
16.	Leang Alla Berang	Desember 2016	√	-
17.	Leang Pellenge	Desember 2016	√	-
18.	Leang Bara Jarang	Desember 2016	√	-
19.	Leang Pabbuno Juku	Desember 2016	√	-
20.	Leang Jarie	Desember 2016	√	-
21.	Leang Tampuang	Desember 2016	√	-
22.	Leang Saripa	Desember 2016	√	-
23.	Leang Karrasa	Desember 2016	√	-
24.	Leang Kado'	Desember 2016	√	-
25.	Kawasan Gua Prasejarah Leang-leang	Desember 2016	√	-
26.	Kawasan Gua Prasejarah Samangki`	Desember 2016	√	-
27.	Kawasan Gua Prasejarah Bulu Sipong	Desember 2016	√	-
28.	Leang Bulu Sipong 1	Desember 2016	√	-
29.	Leang Bulu Sipong 2	Desember 2016	√	-
30.	Leang Bulu Sipong 3	Desember 2016	√	-
31.	Leang Monroe	Desember 2016	√	-
32.	Leang Cempae	Desember 2016	-	√
33.	Kawasan Gua Prasejarah Rammang-rammang	Desember 2016	√	-
34.	Leang Batu Tianang	Desember 2016	√	-
35.	Leang Karama	Desember 2016	√	-
36.	Leang Pasaung	Desember 2016	√	-
37.	Kawasan Gua Prasejarah Bulu Kamase	Desember 2016	√	-
38.	Leang Bulu Tengngae	Desember 2016	√	-



No	Nama Benda, Situs Dan Kawasan	Bulan Dan Tahun Penetapan	Dipelihara	Tidak Dipelihara
39.	Leang Bulu Kamase	Desember 2016	√	-
40.	Leang Pannampu 1	Desember 2016	√	-
41.	Leang Pannampu 2	Desember 2016	√	-
42.	Leang Bungaeja 1	Desember 2016	√	-
43.	Leang Bungaeja 2	Desember 2016	√	-
44.	Kawasan Gua Prasejarah Mandauseng	Desember 2016	√	-
45.	Leang Mandauseng	Desember 2016	√	-
46.	Leang Botto	Desember 2016	√	-
47.	Kawasan Gua Prasejarah Lambatorang	Desember 2016	√	-
48.	Leang Pucu	Desember 2016	√	-
49.	Leang Wanuae	Desember 2016	√	-
50.	Leang Timpuseng	Maret 2017	√	-
51.	Leang Jarie	November 2017	√	-
52.	Leang Samongkeng I	November 2017	√	-
53.	Leang Bulu Sipong I	November 2017	√	-
54.	Leang Pettae	November 2017	√	-
55.	Leang Pettakere	November 2017	√	-
56.	Situs Bangunan Kantor Pos Maros	Maret 2018	√	-
57.	Situs Bangunan Museum Daerah Maros	Maret 2018	√	-
58.	Situs Bangunan Behearder Huis Van Berawing Maros	Februari 2018	√	-
59.	Gua Lambatorang	Februari 2019	√	-
60.	Gua Batu Karopa	April 2019	√	-
61.	Gua Tampuang	Juni 2019	√	-
62.	Gua Panninge Mallawa	Januari 2019	√	-

Sumber : Disbudpar Kab. Maros, 2021

2.3.2.16.3 Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi

Untuk menyandang predikat cagar budaya, suatu benda yang diduga cagar budaya harus melalui serangkaian proses sebelum ditetapkan sebagai cagar budaya. Proses tersebut meliputi pendaftaran, pengkajian, dan akhirnya penetapan. Selain itu, cagar budaya juga harus melewati proses pemeringkatan

Kegiatan revitalisasi dan inventarisasi karya budaya untuk Kabupaten Maros baru dilaksanakan pada tahun 2018, sehingga pada tahun 2015 hingga 2017 belum ada karya budaya yang di inventarisasi dan revitalisasi. Pada tahun 2018 karya budaya yang di revitalisasi dan inventarisasi sebanyak 3 item. Pada tahun 2020 tidak dilakukan inventarisasi karya budaya.



Tabel 2.263
Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	0	0	3	3	3

Sumber : Disbudpar Kab. Maros, 2021

2.3.2.16.4 Jumlah Cagar Budaya Yang Di247kelola Secara Terpadu

Jumlah cagar budaya yang dikelola secara sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 sebanyak 63 cagar budaya.

Tabel 2.264
Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu	63	63	63	73	83

Sumber : Disbudpar Kab. Maros, 2021

2.3.2.17 Perpustakaan

2.3.2.17.1 Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Perpustakaan adalah tempat untuk mengakses informasi dalam format apapun, apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan tersebut atau tidak. Selain kumpulan buku tercetak, sebagian buku dan koleksinya dalam bentuk digital (bentuk data yang bias diakses lewat jaringan computer).

Kabupaten Maros memiliki perpustakaan daerah yang cukup representif dan memiliki cukup banyak koleksi buku. Jumlah kunjungan pengunjung di perpustakaan baik yang diperputakaan daerah maupun perpustakaan yang berada di sekolah-sekolah pada tahun 2016 sebesar 0,08% dengan jumlah kunjungan sebanyak 23.020 orang, kemudian pada tahun 2019 meningkat hingga mencapai 0,10% dengan jumlah pengunjung 29.232 orang. Jumlah kunjungan sedikit menurun pada tahun 2020 hingga mencapai 0,08%.

Menurunnya kunjungan pada tahun 2020 bukan disebabkan karena menurunnya minat baca masyarakat, namun dikarenakan ditutupnya seluruh fasilitas umum, termasuk peprustakaan akibat adanya pandemic COVID-19.



Tabel 2.265
Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun	23.020	23.725	26.335	29.232	24.475
2	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	280.410	283.136	285.739	288.166	290.350
3	Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	0,08	0,08	0,09	0,10	0,08

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Maros, 2021

Tabel 2.266
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Kecamatan	PEMUSTAKA L / KEC	PEMUSTAKA P / KEC	JML (L+P)
1	Bantimurung	461	719	1.180
2	Bontoa	756	1.216	1.972
3	Camba	339	464	803
4	Cenrana	351	612	963
5	Lau	208	357	565
6	Mallawa	358	590	948
7	Mandai	212	371	583
8	Maros Baru	403	681	1.084
9	Marusu	331	580	911
10	Moncong Loe	362	633	995
11	Simbang	314	545	859
12	Tanralili	444	512	956
13	Tompobulu	538	814	1.352
14	Turikale	259	717	976
TOTAL - KEC		5.336	8.811	14.147
PERPUSDA		3.227	7.083	10.310
TOTAL KEC + PERPUSDA		8.563	15.894	24.457

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Maros, 2021

2.3.2.17.2 Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah

Koleksi buku yang tersedia di Kabupaten Maros cukup banyak. Pada tahun 2016 koleksi buku di perpustakaan daerah Kabupaten Maros sebesar 0,10, yang berarti setiap 1 judul buku terdiri dari 10 eksemplar buku. Koleksi buku yang tersedia kemudian meningkat dengan pesat pada tahun 2020, dimana perbandingan perbandingan 1 judul buku terdiri 2 eksemplar buku (rasio 0,41). Berdasarkan data tersebut, diketahui perpustakaan Kabupaten Maros memiliki koleksi judul buku yang cukup banyak, namun jumlah eksemplar buku yang cukup sedikit.



Tabel 2.267
Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	1.624	1.425	6.425	11.425	14.606
2	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	15.973	20.973	25.973	30.973	35.973
3	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah	0,10	0,07	0,25	0,37	0,41

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Maros, 2021

2.3.2.17.3 Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk

Jumlah perpustakaan di Kabupaten Maros mengalami peningkatan jumlah dalam 5 tahun terakhir (2016-2020). Ditambah dengan perpustakaan sekolah, jumlah perpustakaan pada tahun 2016 hingga tahun 2017 sebanyak 373 perpustakaan. Kemudian bertambah pada tahun 2018 sejumlah 375 perpustakaan. Pada tahun 2020 jumlah perpustakaan bertambah 1 perpustakaan yaitu perpustakaan khusus ibu dan anak sehingga jumlah perpustakaan sebanyak 376 unit.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya, maka rasio perpustakaan tentunya semakin menurun. Pada tahun 2016 rasio perpustakaan Kabupaten Maros sebesar 1,09, kemudian tahun 2017 sebesar 1,07. Pada tahun 2020 rasio perpustakaan sebesar 0,96. Berdasarkan hal tersebut jumlah perpustakaan di Kabupaten Maros dalam hal jumlah dirasakan masih sangat memadai untuk melayani masyarakat Kabupaten Maros.

Tabel 2.268
Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perpustakaan	373	373	375	375	376
2	Jumlah Penduduk	342.890	346.383	349.822	353.121	391.774
3	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	1,09	1,08	1,07	1,06	0,96

2.3.2.17.4 Jumlah Rata-Rata Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

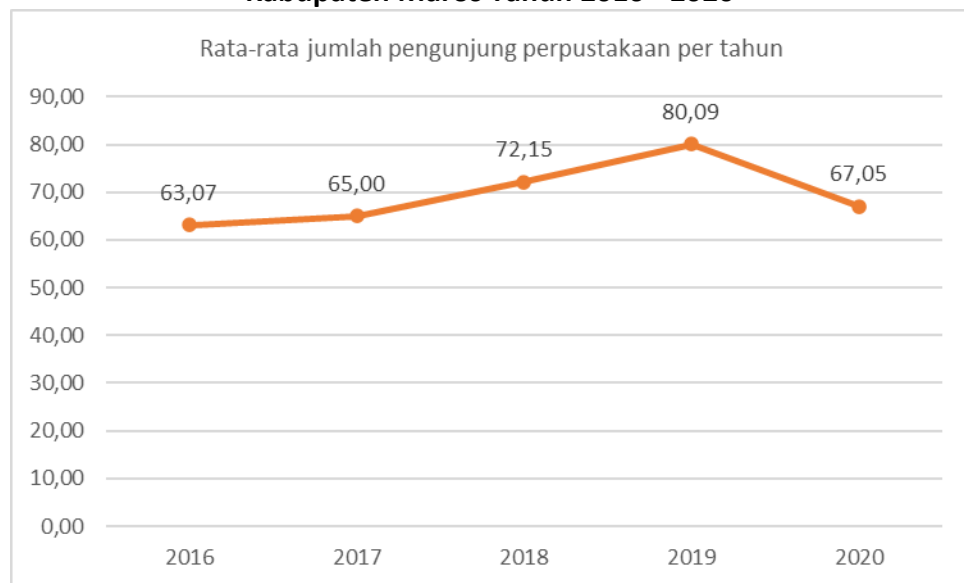
Minat baca penduduk Kabupaten Maros menunjukkan peningkatan yang cukup baik setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari rata-rata pengunjung perpustakaan setiap tahunnya. Pada tahun 2016, rata-rata pengunjung perpustakaan daerah Kabupaten Maros sebesar 63 orang per hari, kemudian



meningkat pada tahun 2019 hingga mencapai 80 orang per hari. Sedangkan pada tahun 2020 rata-rata pengunjung berkurang hingga mencapai 67 orang per hari.

Menurunnya rata-rata kunjungan pada tahun 2020 bukan disebabkan karena menurunnya minat baca masyarakat, namun dikarenakan ditutupnya seluruh fasilitas umum, termasuk peprustakaan akibat adanya pandemi COVID-19.

Grafik 2.48
Rata-rata Jumlah Pengunjung Per Tahun
Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2020



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Maros, 2021

2.3.2.17.5 Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat

Pustakawan ialah seseorang yang bekerja di perpustakaan dan membantu orang menemukan buku, majalah, dan informasi lain. Pada tahun 2000-an, pustakawan juga mulai membantu orang menemukan informasi menggunakan komputer, basis data elektronik, dan peralatan pencarian di internet. Terdapat berbagai jenis pustakawan, antara lain pustakawan anak, remaja, dewasa, sejarah, hukum, dsb. Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat yang terdapat pada perpustakaan daerah Kabupaten Maros sebanyak pada tahun 2018 sebanyak 4 orang kemudian bertambah menjadi 5 orang pada tahun 2019 dan 2020.



Tabel 2.269
Jumlah Seluruh Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai
Yang Memiliki Sertifikat Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	0	0	4	5	5
2	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis an penilai	0	0	4	5	5
3	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis, dan Penilai Yang Memiliki Sertifikat	0	0	100	100	100

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Maros, 2021

2.3.2.18 Kearsipan

2.3.2.18.1 Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengelolaan arsip secara baku adalah pengelolaan arsip yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum. Pengelolaan arsip pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Maros sampai tahun 2020 telah mencapai 100%, artinya seluruh OPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip sesuai aturan yang berlaku.

Tabel 2.270
Persentase perangkat daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	43	41	45	45	45
2	Jumlah perangkat daerah	45	45	45	45	45
3	Persentase perangkat daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	95,56	91,11	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Maros, 2021

2.3.2.18.2 Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan

Untuk meningkatkan kualitas pengelola arsip maka telah diadakan beberapa kegiatan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten



Maros. Kegiatan tersebut antara lain Pelatihan Pengelolaan Arsip Secara Baku bagi aparat pengelola arsip di setiap OPD. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut, pengelolaan arsip OPD dapat lebih baik lagi kedepannya.

Tabel 2.271
Persentase perangkat daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kersipan	3	3	3	5	5

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Maros, 2021

2.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1 Pariwisata

2.3.3.1.1 Kunjungan Wisata

Kabupaten Maros merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki beberapa objek wisata yang cukup terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Objek wisata tersebut telah dikunjungi oleh banyak wisatawan, baik mancanegara maupun domestik. Kunjungan wisata secara umum mengalami peningkatan selama tahun 2016 hingga tahun 2019 dan capaian kunjungan wisatawan selalu melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2020 jumlah wisatawan yang berkunjung mengalami penurunan akibat adanya pandemi COVID-19.

Tahun 2016 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Maros sebanyak 337.533 orang dengan capaian kunjungan sebesar 92,22%. Pada tahun 2019 jumlah kunjungan wisata sebanyak 504.710 orang dengan capaian sebesar 100,94%. Pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisata menurun sangat drastis dikarenakan seluruh destinasi wisata mengalami penutupan selama kurang lebih 6 bulan, bahkan setahun.

Tabel 2.272
Kunjungan Wisata Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah capaian kinerja kunjungan wisata se kabupaten/kota	337.533	307.036	311.651	504.710	238.456
2	Jumlah kunjungan wisata yang direncanakan se kabupaten/kota	366.000	337.533	334.039	500.000	531.780
3	Kunjungan Wisata	92,22	90,96	93,30	100,94	44,84

Sumber : Disbudpar Kab. Maros, 2021



Tabel 2.273
Kunjungan Wisatawan Berdasarkan Objek Wisata
Kabupaten Maros Tahun 2019 - 2020

No	Objek Wisata	2019		2020	
		Domestik	M mancanegara	Domestik	M mancanegara
1	TWA Bantimurung	375.018	519	194.786	61
2	Water Park	45.473	-	11.962	-
3	Taman Pra Sejarah	32.236	714	7.001	129
4	Rammang-Rammang	47.100	3.590	24.032	485
MAROS		499.827	4.883	237.781	675

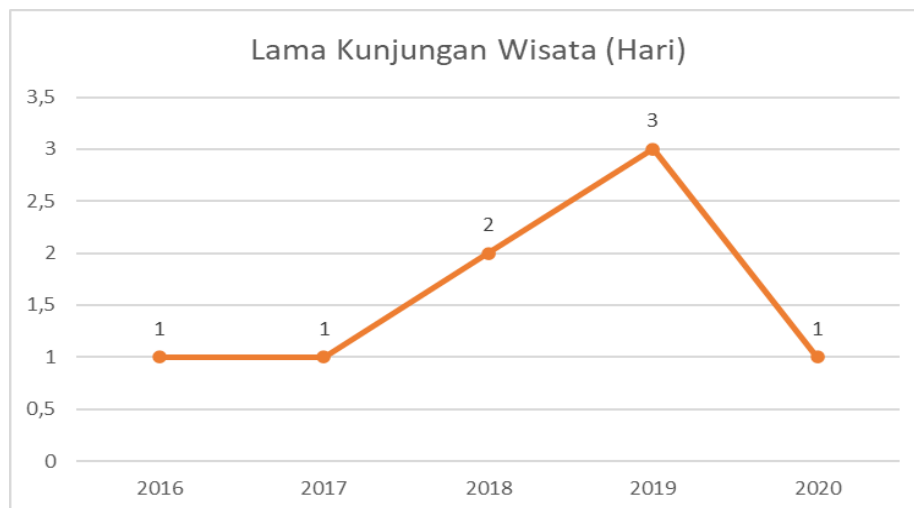
Sumber : Disbudpar Kab. Maros, 2021

2.3.3.1.2 Lama Kunjungan Wisata

Walaupun Kabupaten Maros memiliki objek wisata yang cukup terkenal yang banyak jumlahnya, namun dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Maros yang sangat dekat dengan Kota Makassar serta menjadi wilayah perlintasan untuk menuju ke kabupaten lain, maka hampir seluruh wisatawan, utamanya mancanegara hanya berkunjung selama 1 hari, sedangkan wisatawan yang berkunjung lebih dari 1 hari adalah wisatawan domestik yang melakukan kegiatan *outbond* dalam kawasan objek wisata

Melihat cukup banyaknya objek wisata di Kabupaten Maros, utamanya wisata alam dan cagar budaya, maka rata-rata pengunjung berkunjung di Kabupaten Maros sebanyak 1 – 2 hari.

Grafik 2.49
Lama Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020



Sumber : Disbudpar Kab. Maros, 2021



2.3.3.1.3 PAD Sektor Pariwisata

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros. Objek-objek wisata yang ada utamanya Taman Wisata Alam Bantimurung dan Rammang-Rammang merupakan objek yang banyak dikunjungi wisatawan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata menunjukkan tren penurunan setiap tahunnya apabila dibandingkan dengan total PAD Kabupaten Maros, namun apabila dilihat dari besaran PAD yang dihasilkan maka jumlah PAD dari sektor pariwisata meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2019, kecuali pada tahun 2020. PAD sektor pariwisata pada tahun 2016 sebesar 4,79% dengan jumlah PAD sebesar 8.340 milyar, kemudian pada tahun 2019 PAD sektor pariwisata menurun hingga mencapai 3,39% dengan jumlah PAD sebesar 9.037 milyar. Untuk tahun 2020 dikarenakan ada *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan COVID-19, maka target PAD Kabupaten Maros dari sektor pariwisata juga mengalami revisi.

Tabel 2.274
PAD Sektor Pariwisata (Rp Juta) Kabupaten Maros Tahun 2019 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	PAD Sektor Pariwisata	8.430	8.041	7.870	9.037	4.788
2	Total PAD	176.119	194.999	228.149	266.934	219.158
3	PAD Sektor Pariwisata	4,79	4,12	3,45	3,39	2,18

Sumber : Disbudpar Kab. Maros, 2021

2.3.3.2 Pertanian

2.3.3.2.1 Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Lainnya Per Hektar

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten yang memiliki pengusahaan pertanian strategis di Provinsi Sulawesi Selatan. Padi merupakan produk unggulan di sektor pertanian. Produktivitas tanaman padi dan bahan pangan lainnya pada tahun 2016 sebesar 52,19 ton/ha, kemudian meningkat hingga mencapai 63,06 ton/ha pada tahun 2019. Pada tahun 2020 produktivitas menurun hingga mencapai 53,97 ton/ha.

Walaupun dampak dari pandemi COVID-19 terhadap sektor pertanian tidak sebesar dan separah sektor lainnya, namun keadaan tersebut tetap mempengaruhi sektor pertanian. Hal ini dapat terlihat dari menurunnya produktivitas pada tahun 2020, dimana hampir seluruh komoditi mengalami penurunan produksi.



Tabel 2.275
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Lainnya Per Hektar
Kabupaten Maros Tahun 2019 – 2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (Ton)	518.907,51	486.277,41	485.365,56	495.072,86	515.073,82	437.040,95
	- Padi Sawah	386.858,70	399.456,80	392.868,20	400.725,56	416.914,88	308.438,53
	- Padi Ladang	73.649,50	12.236,80	18.347,54	18.714,49	19.470,56	10.937,49
	- Jagung	6.490,37	37.559,92	37.253,59	37.998,66	39.533,81	66.159,18
	- Kedelai	5.147,80	4.737,76	1.140,95	1.163,77	1.210,79	572,33
	- Kacang Tanah	1.352,28	1.866,47	1.263,44	1.288,71	1.340,77	2.722,22
	- Kacang Hijau	918,47	703,98	762,19	777,43	808,84	278,97
	- Ubi Kayu	29.869,11	19.350,02	19.922,42	20.320,87	21.141,83	17.769,99
- Ubi Jalar	14.621,28	10.365,66	13.807,23	14.083,37	14.652,34	30.162,24	
2	Luas Areal Tanam Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (Ha)	9.078	9.317	9.508	7.951	8.169	8.098
	- Padi Sawah	52.139	58.437,00	58.437,00	49.363,00	9.334,39	48.436,00
	- Padi Ladang	13.410	1.901,00	1.971,00	1.160,00	2.669,00	2.760,00
	- Jagung	1.216	8.239,00	9.858,00	9.556,00	9.747,12	11.287,00
	- Kedelai	2.772	2.390,00	2.390,00	687,00	700,74	293,00
	- Kacang Tanah	744	960,00	969,00	726,00	740,52	1.029,00
	- Kacang Hijau	496	566,00	556,00	350,88	357,90	255,00
	- Ubi Kayu	1.450	1.579,00	1.426,00	1.628,00	1.660,56	587,00
- Ubi Jalar	393	464,00	460,00	136,00	138,72	139,00	
3	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lainnya Per Hektar	57,16	52,19	51,05	62,27	63,06	53,97

Sumber : DPKP Kab. Maros, 2021

2.3.3.2.2 Cakupan Bina Kelompok Tani

Unsur utama dalam pengelolaan pertanian adalah petani itu sendiri. Untuk meningkatkan produksi selain pengolahan lahan, kemampuan petani pun juga harus ditingkatkan. Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan pemerintah pada tahun 2016 sebanyak 208 petani dengan cakupan sebesar 22,10%. Kemudian bertambah menjadi 898 kelompok dengan cakupan sebesar 69,13.

Bantuan yang diberikan kepada petani sifatnya bermacam-macam, baik berupa bantuan alsintan, bibit, pupuk bahkan bantuan modal untuk pemasaran hasil pertanian.



Tabel 2.276
Cakupan Bina Kelompok Tani Kabupaten Maros Tahun 2019 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Kelompok tani yang mendapat bantuan pemda	208	172	244	880	898
2	Jumlah Kelompok tani	941	941	1.141	1.141	1.299
3	Cakupan bina kelompok tani	22,10	18,28	21,38	77,13	69,13

Sumber : DPKP Kab. Maros, 2021

2.3.3.3 Kehutanan

Urusan kehutanan pada tahun 2017, sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, urusan kehutanan telah menjadi wewenang dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menyebabkan kondisi terbaru tentang kehutanan sangat terbatas informasi atau datanya.

Kabupaten Maros memiliki kawasan hutan seluas 23.005,87 hektar. Kawasan in terbagi atas hutan lindung, suaka alam, dan hutan produksi. Kawasan hutan terluas adalah suaka alam dan pelestarian alam dengan luas 21.397,12 hektar. Hutan produksi di Kabupaten Maros terbagi atas hutan produksi terbatas dan hutan produksi biasa. Hutan produksi terbatas memiliki luasan 6.308,69 hektar, sedangkan hutan produksi biasa memiliki luasan 16.747,08 hektar. Hutan produksi di Kabupaten Maros memproduksi hasil hutan berupa kayu bulat dan kayu gergajian.

2.3.3.4 Energi dan Sumberdaya Mineral

2.3.3.4.1 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan listrik dapat terlihat dari jumlah pelanggan listrik (PLN). Jumlah rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Maros pada 2016 sebesar 82,54% dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebesar 70.754 RT. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik pada tahun 2019 meningkat hingga mencapai 96,12% dengan jumlah RT pengguna sebanyak 87.442 RT. Untuk tahun 2020 diperkirakan persentase RT menggunakan listrik sebesar 98,20% dengan RT pengguna sebesar 96.868 RT.

Semakin meningkatnya jumlah RT yang menggunakan listrik menunjukkan bahwa listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat. Selain itu semakin meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat juga berdampak terhadap kemampuan masyarakat untuk menggunakan listrik sebagai sumber penerangan.



Tabel 2.277
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020*

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020*
1.	Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik	70.754	74.999	79.499	87.442	96.868
2.	Jumlah Rumah Tangga	85.723	87.437	89.186	90.970	97.944
3.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik	82,54	85,77	89,14	96,12	98,90

Sumber : PLN Kab. Maros (Diolah), 2020

*) Angka Sementara

2.3.3.4.2 Ketersediaan Daya Listrik

Kapasitas listrik terpasang merupakan sebuah rumah dari suatu tempat, sedangkan daya listrik adalah rombongan tamu yang menumpang di tempat tersebut selama jangka waktu tertentu. Misalnya, sebuah rumah memiliki daya tampung 1300 tamu untuk menginap

Ketersediaan listrik Kabupaten Maros selama tahun 2016 hingga tahun 2019 cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari daya terpasang yang dibandingkan dengan produksi listrik yang disediakan oleh PLN. Pada tahun 2016 daya terpasang sebesar 175.626.750 Kw, kemudian pada tahun 2017 daya terpasang sebesar 186.914.639 Kw. Pada tahun tahun 2019, daya terpasang Kembali meningkat hingga mencapai 203.398.189 kw.

Berdasarkan data yang ada tabel dibawah, diketahui bahwa produksi listrik Kabupaten Maros masih lebih tinggi dibandingkan dengan daya terpasang. Dengan demikian dapat diketahui bahwa penduduk Kabupaten Maros tidak akan kekurangan listrik dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan.

Tabel 2.278
Ketersediaan Daya Listrik Kabupaten Maros

Tahun	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik terjual (KWh)	Susu/Hilang (KWh)
2016	175.626.750	369297.158	345.897.612	19.551.478
2017	189.914.639	500.194.400	476.499.864	23.694.536
2018	196.844.789	-	-	-
2019	203.398.189	-	-	-
2020	213.645.173	-	-	-

Sumber : PLN Kab. Maros (Diolah), 2021



2.3.3.5 Perdagangan

2.3.3.5.1 Ekspor Bersih Perdagangan

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Maros, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili wilayah lain, baik itu kabupaten lain dalam satu propinsi ataupun propinsi lain, ataupun luar negeri. Termasuk pula ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar, awak kapal yang singgah dan sebagainya.

Secara umum nilai ekspor bersih Kabupaten Maros menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2019 yang mengalami penurunan. Pada tahun 2016 nilai ekspor bersih sebesar 4,15 triliun rupiah, kemudian meningkat menjadi 4,4 triliun pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2018 ekspor bersih sebesar 4,87 triliun. Pada tahun 2019 ekspor bersih menurun hingga mencapai 4,58 triliun.

Tabel 2.279
Ekspor Bersih Berdasarkan ADHB dan ADHK
Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Ekspor bersih ADHB	4.155.029	4.408.385	4.873.657	4.581.698
2	Ekspor bersih ADHK	2.619.868	2.946.396	3.188.400	2.603.690
3	Proporsi	23,26	22,68	22,87	20,17

Sumber : BPS Kab. Maros, 2020

2.3.3.5.2 Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha

Kelompok pedagang/usaha informal yang telah mendapatkan bantuan pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam rangka membantu meningkatkan produksi dan pendapatan pedagang sebanyak 4.487 kelompok pada tahun 2017, kemudian pada tahun 2018 sebanyak 1.222 pedagang. Cakupan bina pedagang/usaha informal pada tahun 2017 sebesar 73,67% kemudian pada tahun 2018 sebesar 85,94% dan 86,71% pada tahun 2019. Pada 2020 jumlah pedagang yang mendapatkan bantuan sebanyak 4.328 pedagang dengan cakupan 78,49%.

Jumlah pedagang yang mendapatkan bantuan cukup banyak pada tahun 2020 disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak pedagang yang mengalami kerugian. Peran Pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini adalah memberikan data jumlah pedagang kepada pemerintah pusat agar dapat menerima bantuan.



Tabel 2.280
Cakupan Bina Pedagang/Usaha Informal
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan Pemda	120	4.487	1.222	1.305	4.328
2	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal	234	6.091	1.422	1.505	5.514
3	Cakupan Bina Pedagang/Usaha Informal	51,28	73,67	85,94	86,71	78,49

Sumber : Dinas Kopumdag Kab. Maros, 2021

2.3.3.6 Perindustrian

2.3.3.6.1 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Kelompok pengrajin merupakan bagian dari dunia usaha yang sangat penting untuk perkembangan industri, utamanya industri kecil dan menengah. Untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pengrajin maka diperlukan bantuan dari Pemerintah Daerah baik berupa bantuan modal, maupun bantuan pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk. Jumlah kelompok pengrajin yang telah mendapatkan bantuan Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebesar 50% kemudian pada tahun 2017 sebesar 42,86% dan pada tahun 2018 sebesar 50%. Pada tahun 2019 cakupan bina kelompok pengrajin sebesar 75% dan pada tahun 2020 sebesar 100%.

Cakupan bina kelompok pengrajin menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Maros yang dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP melakukan beberapa bantuan terhadap pengrajin yang memiliki potensi yang baik, berupa peningkatan kapasitas pengrajin dalam rangka penungkatan kualitas produk, kemudian bantuan pengemasan produk yang dihasilkan pengrajin.

Tabel 2.281
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan pemda	4	6	4	6	8
2	Jumlah kelompok pengrajin	8	14	8	8	8
3	Cakupan bina kelompok pengrajin	50,00	42,86	50,00	75,00	100,00

Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Maros, 2021



2.3.3.7 Transmigrasi

2.3.3.7.1 Persentase Transmigran Swakarsa

Transmigrasi swakarsa adalah transmigrasi yang dilaksanakan atas kemauan dan biaya sendiri sedangkan pemerintah hanya menyediakan lahan untuk bertani atau mendirikan rumah untuk tempat tinggalnya.

Lokasi transmigrasi saat ini yang berada di Kabupaten Maros hanya satu yaitu yang terletak di Kecamatan Tompobulu. Jumlah rumah tangga yang menempati lokasi tersebut awalnya 150 KK, namun pada saat ini belum dilakukan pendataan kembali. Tipe transmigrasi yang ada di Kabupaten Maros bukan termasuk transmigrasi swakarsa, sehingga persentase transmigran swakarsa hingga tahun 2020 sebesar 0%.

2.3.3.8 Kelautan dan perikanan

2.3.3.8.1 Produksi Perikanan

Produksi sektor perikanan Kabupaten Maros menunjukkan tren yang sangat baik, bahkan realisasi melebihi target yang telah ditetapkan. Produksi perikanan Kabupaten Maros meliputi perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang dilakukan oleh nelayan. Produksi perikanan Kabupaten Maros terbagi atas produksi perikanan laut dan perikanan budidaya.

Capaian produksi perikanan pada tahun 2016 sebesar 97,00 kemudian meningkat hingga mencapai 113,27% pada tahun 2020. Berdasarkan tabel 2. dibawah diperoleh data bahwa produksi perikanan budidaya di Kabupaten Maros sangat besar apabila dibandingkan dengan produksi perikanan tangkap.

Tabel 2.282
Persentase Produksi Perikanan Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah produksi ikan (Ton)	27.724	28.229	30.108	48.637	38.085
2	Target Produksi ikan daerah (Ton)	28.581	29.146	29.782	30.302	30.895
3	Persentase Produksi perikanan (%)	97,00	96,85	101,09	160,51	123,27

Sumber : Dinas Perikanan kab. Maros, 2021



Tabel 2.283
Produksi Perikanan Berdasarkan Jenisnya
di Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Perikanan Tangkap	15.238,70	15.395,50	15.728,80	21.151,80	13.051,60
2	Perikanan Budidaya	12.485,70	12.833,80	14.378,70	27.485,20	25.033,80

Sumber : Dinas Perikanan kab. Maros, 2021

2.3.3.8.2 Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan adalah jumlah ikan (kg) yang dikonsumsi oleh masyarakat pertahunnya. Konsumsi ikan ini berhubungan kesehatan seperti meningkatkan kemampuan otak, dapat mencegah serangan penyakit, dan beberapa manfaat lainnya. Seperti halnya produksi ikan, konsumsi ikan di Kabupaten Maros juga telah mencapai 100%, apabila dihitung dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan ikan merupakan salah satu makanan pokok dan menu favorit masyarakat Kabupaten Maros.

Tabel 2.284
Konsumsi Ikan Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah konsumsi ikan (Kg)	40,03	40,4	40,91	41,29	41,68
2	Target konsumsi ikan daerah (Kg)	40,09	40,49	40,89	41,28	41,68
3	Konsumsi Ikan	99,85	99,78	100,05	100,02	100,00

Sumber : Dinas Perikanan kab. Maros, 2021

2.3.3.8.3 Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan bina kelompok nelayan adalah jumlah nelayan yang mendapatkan bantuan pemerintah. Jumlah kelompok nelayan di Kabupaten maros sebanyak 316 kelompok hingga tahun 2020, dimana dari total kelompok nelayan tersebut jumlah kelompok yang telah mendapatkan bantuan sebanyak 123 kelompok.

Cakupan bina kelompok nelayan Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebesar 4,30% dengan jumlah kelompok yang menerima bantuan sebanyak 41 kelompok, pada tahun 2020 cakupan meningkat hingga mencapai 38,92% dengan jumlah kelompok yang telah menerima bantuan sebanyak 123 kelompok.

Pemerintah Kabupaten Maros telah memiliki komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dengan nelayan, sehingga setiap tahunnya dialokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas SDM nelayan maupun bantuan sarana prasarana baik untuk nelayan tangkap maupun pembudidaya. Beberapa bantuan yang diberikan adalah bantuan jaring tangkap dan bibit ikan.



Tabel 2.285
Cakupan Bina Kelompok Nelayan
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan pemda	41	68	98	111	123
2	Jumlah kelompok nelayan	256	266	276	296	316
3	Cakupan bina kelompok nelayan	16,02	25,56	35,51	37,50	38,92

Sumber : Dinas Perikanan kab. Maros, 2021

2.3.3.8.4 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Jumlah produksi ikan di Kabupaten Maros seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Dari produksi ikan tersebut tentu tidak semuanya berasal dari sektor perikanan budidaya, namun juga berasal dari sektor perikanan tangkap, dalam hal ini kontribusi kelompok nelayan.

Produksi perikanan kelompok nelayan Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebesar 54,35%, kemudian pada tahun 2020 sedikit menurun hingga mencapai 52,32%. Walaupun persentase produksi mengalami penurunan, namun jumlah produksi perikanan tangkap menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 jumlah produksi sebesar 15.424 ton kemudian meningkat hingga mencapai 16.164 ton pada tahun 2020. Turunnya persentase produksi kelompok nelayan disebabkan produksi ikan di daerah lebih banyak dihasilkan oleh perikanan budidaya.

Tabel 2.286
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah produksi ikan (ton) kontribusi hasil kelompok nelayan	15.424	15.625	15.790	15.976	16.164
2	Jumlah produksi ikan di daerah	28.380	29.792	29.782	30.302	30.895
3	Produksi perikanan kelompok nelayan	54,35	52,45	53,02	52,72	52,32

Sumber : Dinas Perikanan kab. Maros, 2021

**2.3.3.8.5 Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Aman**

Potensi lestari adalah pemanfaatan perikanan yang berkelanjutan dan tak pernah habis sehingga dapat diambil hasil panen di tahun berikutnya. Produksi tangkapan ikan Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebesar 74,55% kemudian meningkat menjadi 81,88% pada tahun 2020. Meningkatnya proporsi tangkapan disebabkan jumlah tangkapan ikan juga mengalami peningkatan namun masih dalam batasan yang aman.

Tabel 2.287
Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Aman
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tangkapan ikan	15.424	15.625	15.790	15.976	16.164
2	80 % dari tangkapan maksimum lestari	20.690	20.449	20.211	20.001	19.742
3	Proporsi Tangkapan Ikan Yang Berada Dalam Batasan Biologis Yang Aman	74,55	76,41	78,13	79,88	81,88

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Maros, 2021

2.3.4. Penunjang Urusan**2.3.4.1 Perencanaan Pembangunan****2.3.4.1.1 Tersedianya Dokumen RPJPD Yang Ditetapkan Dengan PERDA**

RPJPD atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan makro yang berisi visi, misi dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 tahun. Dokumen RPJPD merupakan kesepakatan/komitmen kebijakan yang mengikat namun fleksibel dalam tahapan pelaksanaannya. RPJPD menjadi tahap dasar bagi siapapun termasuk para calon pemimpin dalam membuat visi dan misi guna membangun suatu daerah. RPJPD Kabupaten Maros disusun pada tahun 2005 dan berlaku hingga tahun 2025. RPJPD Kabupaten Maros ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007.

Tabel 2.288
Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Bappeda Kab. Maros, 2021



2.3.4.1.2 Tersedianya Dokumen RPJMD Yang Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA

RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu selama 5 tahun, RPJMD berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Maros telah disusun pada tahun 2016 dan berakhir pada tahun 2021 dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016.

Tabel 2.289
Tersedianya Dokumen RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Bappeda Kab. Maros, 2021

2.3.4.1.3 Tersedianya Dokumen RKPD Yang Ditetapkan Dengan PERKADA

RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yaitu dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara: 1. perencanaan, 2. penganggaran, 3. pelaksanaan, dan 4. pengawasan. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. RKPD memuat: 1). Rancangan kerangka ekonomi daerah, 2). Program prioritas pembangunan daerah, dan 3). Rencana kerja yang terukur, pendanaan dan prakiraan maju. Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Tabel 2.290
Tersedianya Dokumen RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD Yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Bappeda Kab. Maros, 2021

2.3.4.1.4 Tersedianya Dokumen RTRW Yang Ditetapkan Dengan PERDA

Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan



wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. RTRW Kabupaten Maros telah disusun pada tahun 2012 dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012. Pada tahun 2019 telah dilakukan penyusunan dokumen revisi RTRW, namun sampai dengan tahun 2020 dokumen tersebut masih dalam tahap finalisasi dan belum memiliki status legalitas.

Tabel 2.291
Tersedianya Dokumen Perencanaan RTRW Yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Dokumen RTRW Yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Bappeda Kab. Maros, 2021

2.3.4.1.5 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Dalam RKPD

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan selama 1 tahun yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian program-program yang telah dimasukkan dalam dokumen RPJMD haruslah tertuang dalam dokumen RKPD dan dijadikan acuan dalam menyusun kegiatan setiap tahunnya oleh seluruh pihak, utamanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pada tahun 2016 penjabaran konsistensi RPJMD kedalam RKPD sebesar 78,57%, kemudian pada tahun 2018 sebesar 43,61%. Pada tahun 2019 disebabkan karena adanya perampingan program dalam perubahan RPJMD Kabupaten Maros maka konsistensi RPJMD ke dalam RKPD meningkat sebesar 55,36%. Pada tahun 2020, jumlah persentase penjabaran sebesar 94,42%.

Jumlah program yang dimasukkan dalam RKPD besarnya berfluktuasi disebabkan program-program yang dimasukkan tersebut merupakan program prioritas yang dilaksanakan pada tahun berkenan dan menyesuaikan dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD pada tahun tersebut.

Tabel 2.292
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Ke dalam RKPD Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah program RKPD tahun berkenan	224	169	116	129	220



No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
2	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenan	266	266	266	233	233
3	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Ke dalam RKPD	84,21	63,53	43,61	55,36	94,42

Sumber : Bappeda Kab. Maros, 2021

2.3.4.1.6 Penjabaran Konsistensi Program RKPD ke Dalam APBD

Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan acuan yang harus digunakan dalam penyusunan APBD, dimana seluruh program dan kegiatan yang termuat dalam APBD haruslah tercantum juga dalam RKPD.

Pada tahun 2016 penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD sebesar 66,62%, kemudian meningkat hingga mencapai 100% pada tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada program yang dilaksanakan dalam APBD yang tidak termuat dalam dokumen RKPD.

Tabel 2.293
Penjabaran Konsistensi Program RKPD Ke dalam APBD
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah program dalam APBD tahun berkenan	149	257	281	129	220
2	Jumlah program dalam RKPD yang harus dilaksanakan tahun berkenan	224	301	304	129	220
3	Penjabaran Konsistensi Program RKPD Ke dalam APBD	66,52	85,38	92,43	100,00	100,00

Sumber : Bappeda Kab. Maros, 2021

2.3.4.2 Keuangan

2.3.4.2.1 Opini BPK terhadap Laporan keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan



(adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Selama 5 (lima) tahun terakhir opini BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Maros adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang artinya laporan keuangan Kabupaten Maros dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

2.3.4.2.2 Persentase SILPA

Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Persentase SILPA Kabupaten Maros menunjukkan angka yang cenderung meningkat dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 persentase SILPA sebesar 1,38%, kemudian meningkat hingga menjadi 8,57% pada tahun 2020.

Rendahnya serapan anggaran daerah yang berujung pada SiLPA yang tinggi disebabkan oleh pelampauan perolehan pendapatan daerah dari proyeksi yang ditentukan. Disamping itu, tidak terlaksananya kegiatan serta terlambatnya transfer dana dari pemerintah pusat juga mempengaruhi besaran serapan anggaran.

Tabel 2.294
Persentase SILPA (Rp Juta) Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Total SILPA	18.368	27.718	73.379	124.551	126.718
2	Total APBD	1.331.013	1.276.664	1.340.497	1.497.907	1.477.898
3	Persentase SILPA	1,38	2,17	5,47	8,31	8,57

Sumber : BPKAD Kab. Maros, 2021

2.3.4.2.3 Persentase Belanja Pendidikan (20 %)

Pemerintah menjamin hak atas setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, hal ini tercantum pada UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2, 3, dan Ayat 4 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, pemerintah mewajibkan setiap warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan wajib membiayainya serta pemerintah minimal mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD. Melalui instrumen kebijakan yaitu kebijakan fiskal,



pemerintah mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan. Sektor pendidikan pada dasarnya adalah anggaran fungsi pendidikan.

Alokasi dana pendidikan Kabupaten Maros mencapai lebih 20% dari total APBD Kabupaten Maros, dimana pada tahun 2016 persentase belanja pendidikan sebesar 24,09% dengan jumlah belanja sebesar 320 milyar, kemudian meningkat menjadi 25,36% dengan jumlah belanja sebesar 374 milyar. Belanja pendidikan ini banyak digunakan pada pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana sekolah.

Tabel 2.295
Persentase Belanja Pendidikan 20 % (Rp Juta)
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah belanja bidang urusan pendidikan	320.659	305.254	332.148	358.225	374.728
2	Total APBD	1.331.013	1.276.664	1.340.497	1.497.907	1.477.898
3	Persentase Belanja Pendidikan 20 %	24,09	23,91	24,78	23,92	25,36

Sumber : BPKAD Kab. Maros, 2021

2.3.4.2.4 Persentase Belanja Kesehatan (10%)

Persentase belanja kesehatan sebesar 10% adalah pemerintah daerah harus mengalokasikan minimal 10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk pembiayaan kesehatan masyarakat. Persentase belanja kesehatan pada tahun 2016 sebesar 9,75% kemudian meningkat hingga mencapai 11,26% pada tahun 2020. Peningkatan yang cukup pesat pada tahun 2020 disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan dilakukannya *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan pandemi tersebut dalam sektor kesehatan.

Tabel 2.296
Persentase Belanja Kesehatan 10% (Rp Juta)
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah belanja bidang urusan kesehatan	129.752	101.268	114.163	152.413	166.476
2	Total APBD	1.331.013	1.276.664	1.340.497	1.497.907	1.477.898
3	Persentase Belanja Kesehatan 10 %	9,75	7,93	8,52	10,18	11,26

Sumber : BPKAD Kab. Maros, 2021

**2.3.4.2.5 Perbandingan Antara Belanja Langsung dan Tidak Langsung**

Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan produktivitas kegiatan atau terkait langsung dengan tujuan organisasi. Sedangkan Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak secara langsung terkait dengan produktivitas atau tujuan organisasi.

Perbandingan belanja langsung dengan belanja tidak langsung di Kabupaten Maros menunjukkan tren peningkatan sejak tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 perbandingan belanja langsung dan tidak langsung mencapai 0,99%, kemudian meningkat hingga mencapai 1,23% pada tahun 2018. Pada tahun 2020 perbandingan antara belanja langsung dan belanja tidak langsung sebesar 0,91 persen.

Tabel 2.297
Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung
(Rp Juta) Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Belanja Langsung	724.051	625.416	688.801	656.146	649.975
2	Jumlah Belanja tidak langsung	733.598	650.204	558.932	750.729	713.663
3	Total APBD	1.331.013	1.276.664	1.340.497	1.497.907	1.477.898
4	Persentase Belanja langsung	54,40	48,99	51,38	43,80	43,98
5	Persentase Belanja tidak langsung	55,12	50,93	41,70	50,12	48,29
6	Perbandingan Antara Belanja Langsung dengan Belanja Tidak Langsung	0,99	0,96	1,23	0,87	0,91

Sumber : BPKAD Kab. Maros, 2021

2.3.4.2.6 Penetapan APBD

Penyusunan dan penetapan APBD telah dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan tahapan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Tabel 2.298
Penetapan APBD
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penetapan APBD	tepat	tepat	tepat	tepat	tepat

Sumber : BPKAD Kab. Maros, 2021

**2.3.4.2.7 Persentase Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Salah satu sumber utama PAD adalah pajak dan retribusi yang dipungut dari masyarakat sesuai usaha atau objeknya.

Pendapatan dari pajak dan retribusi memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap PAD Kabupaten Maros. Pada tahun 2016 persentase pajak dan retribusi sebesar 72,01 %, namun dikarenakan adanya aturan yang mengharuskan penghapusan beberapa jenis pajak dan retribusi maka sejak tahun 2017 persentase capaian pajak dan retribusi mengalami penurunan.

Persentase pajak dan retribusi pada tahun 2020 kembali meningkat sebesar 76,77 persen dengan total pendapatan 125,962 Milyar Rupiah. Beberapa komponen pajak dan retribusi yang mengalami penurunan karena adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat pandemi COVID-19, yang menyebabkan penutupan hampir seluruh objek pajak yang berpotensi.

Tabel 2.299
Persentase Pajak dan Retribusi Daerah
Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah (Rp Juta)
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pendapatan Pajak dan Retirbusi Daerah	118.834	87.469	111.478	134.929	125.962
2	Total Pendapatan Asli Daerah	165.024	194.999	219.845	248.671	164.064
3	Persentase Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah	72,01	44,86	50,71	54,26	76,77

Sumber : BPKAD Kab. Maros, 2021

Tabel 2.300
Persentase Realisasi Pajak Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persen
	Pendapatan Pajak Daerah	144.727.000.000,00	110.723.082.095,00	76,50
1	Pajak Hotel	1.725.000.000,00	2.025.210.911,00	117,40
2	Pajak Restoran	9.000.000.000,00	9.825.435.731,00	109,17
3	Pajak Hiburan	125.000.000,00	151.655.925,00	121,32
4	Pajak Reklame	850.000.000,00	899.333.821,00	105,80



No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persen
5	Pajak Penerangan Jalan	28.000.000.000,00	30.030.054.766,00	107,25
6	Pajak Parkir	8.000.000.000,00	6.210.598.650,00	77,63
7	Pajak Air Tanah	400.000.000,00	532.315.120,00	133,08
9	Pajak Sarang Burung Walet	27.000.000,00	8.900.000,00	32,96
10	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	31.795.000.000,00	2.399.027.210,00	7,55
11	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	25.100.000.000,00	24.340.661.910,00	96,97
12	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	39.705.000.000,00	34.299.888.051,00	86,39

Sumber : BPKAD Kab. Maros, 2021

Tabel 2.301
Persentase Realisasi Retribusi Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persen
	Pendapatan Retribusi Daerah	19.337.000.000,00	15.239.082.951,97	78,81
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	200.000.000,00	634.918.501,00	317,46
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	170.000.000,00	122.300.000,00	71,94
3	Retribusi Pelayanan Pasar	4.100.000.000,00	2.984.508.155,00	72,79
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0	0	0
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	350.000.000,00	353.580.000,00	101,02
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	250.000.000,00	159.490.000,00	63,80
7	Retribusi Tempat Pelelangan	150.000.000,00	136.891.000,00	91,26
8	Retribusi Tempat Khusus Parkir	575.000.000,00	512.894.000,00	89,20
9	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	305.000.000,00	51.500.000,00	16,89
10	Retribusi Rumah Potong Hewan	200.000.000,00	260.250.000,00	130,13
11	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	7.880.000.000,00	4.577.339.000,00	58,09
12	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	350.000.000,00	0	0
13	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.800.000.000,00	5.440.277.295,97	113,34
14	Retribusi Izin Trayek	7.000.000,00	5.135.000,00	73,36

Sumber : BPKAD Kab. Maros, 2021



2.3.4.3 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

2.3.4.3.1 Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai sangat diperlukan dalam rangka peningkatan kualitas pegawai tersebut. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan selama tahun 2016 - 2020 adalah 20 jam pelajaran setiap tahunnya.

Pendidikan dan pelatihan dalam hal ini adalah pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS, diklat dalam jabatan, diklat kepemimpinan untuk setiap tingkatan, diklat fungsional, serta diklat teknis.

Tabel 2.302
Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-Rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20	20	20	20	20

Sumber : BPKAD Kab. Maros, 2021

2.3.4.3.2 Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

Pendidikan dan pelatihan formal ASN adalah pelatihan dan pendidikan yang diikuti oleh ASN, baik dalam rangka peningkatan kualitas maupun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat atau menduduki suatu jabatan. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal di Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebesar 61,13 %, lalu pada tahun 2020 sebesar 68,29 %.

Meningkatnya jumlah ASN yang mengikuti pendidikan pelatihan menunjukkan bahwa pengembangan SDM ASN di Kabupaten Maros menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Kabupaten Maros, sehingga diharapkan nantinya ASN yang telah mengikuti pendidikan pelatihan dapat mengaplikasikan ilmunya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Tabel 2.303
Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	4.462	4.469	4.335	4.340	4.541
2	Jumlah ASN	7.299	7.120	6.844	6.750	6.650



No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
3	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	61,13	62,77	63,34	64,30	68,29

Sumber : BPKAD Kab. Maros, 2021

2.3.4.3.3 Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Pendidikan dan pelatihan yang dimaksud dalam hal ini adalah pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, yaitu pendidikan dan pelatihan yang diberikan guna memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap serta perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur.

Total pejabat yang telah mengikuti diklat struktural pada tahun 2016 sebanyak 350 orang dengan persentase sebesar 35,08 %, kemudian menurun pada tahun 2020 dengan persentase 32,99 %. Adanya penurunan jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan disebabkan seleksi yang dilakukan baik oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Maros maupun oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) cukup ketat, sehingga hanya pejabat yang dinyatakan memenuhi kualifikasi yang dapat mengikuti diklat tersebut.

Tabel 2.304
Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	350	363	321	295	278
2	Jumlah total jabatan	997	969	842	842	842
3	Persentase Pejabat ASN Yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	35,08	37,50	38,11	35,01	32,99

Sumber : BPKAD Kab. Maros, 2021

2.3.4.3.4 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah

Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan Pimpinan Tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah. Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan



kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

Tabel 2.305
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	36	36	36	36	36

Sumber : BPKAD Kab. Maros, 2021

2.3.4.3.5 Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah

Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Setiap jabatan administrasi ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Jabatan administrasi terdiri atas: jabatan administrator, bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan; jabatan pengawas, bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana, dan jabatan pelaksana, bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Tabel 2.306
Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	175	175	175	175	175

Sumber : BPKAD Kab. Maros, 2021

2.3.4.3.6 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Pada Instansi Pemerintah

Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dalam ASN terdiri atas: jabatan fungsional keahlian, terdiri dari 4 (empat) tingkatan yakni ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama; jabatan fungsional keterampilan, terdiri dari 4 (empat) tingkatan yakni penyelia, mahir, terampil, dan pemula.



Tabel 2.307
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	3.189	3.066	3.014	2.934	2.988

Sumber : BPKAD Kab. Maros, 2021

2.3.4.4 Pengawasan

2.3.4.4.1 Persentase Tindak Lanjut Temuan

Tindak lanjut temuan adalah aktivitas auditil dalam rangka memenuhi rekomendasi pemeriksa yang tertuang dalam hasil pemeriksaan. Tindak lanjut yang dilakukan sifatnya bermacam-macam, sesuai dengan hasil temuan, baik berupa tindak lanjut secara administrasi maupun perbaikan sistem sehingga nantinya akan mengurangi resiko terjadinya penyimpangan di masa mendatang.

Persentase tindak lanjut temuan pada tahun 2016 sebesar 39,17 % dimana dari 217 temuan, hanya 85 temuan yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan persentase yaitu sebesar 72 %, dimana dari 625 temuan pada tahun 2020, 450 temuan telah ditindaklanjuti.

Walaupun telah menunjukkan peningkatan, namun masih terdapat 200 temuan yang belum ditindaklanjuti. Hal ini disebabkan belum adanya komitmen yang kuat dari OPD dalam menindak lanjuti temuan yang ada kemudian rotasi pegawai yang menyebabkan adanya kesulitan dalam memperoleh data temuan yang akan ditindaklanjuti.

Tabel 2.308
Persentase Tindak Lanjut Temuan
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	85	147	328	145	450
2	Jumlah total temuan	217	339	593	197	625
3	Persentase Tindak Lanjut Temuan	39,17	43,36	55,31	73,60	72,00

Sumber : Inspektorat Kab. Maros, 2021

2.3.4.4.2 Persentase Pelanggaran Pegawai

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin ASN, baik



yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin ASN baik berupa teguran maupun berupa sanksi.

Persentase pelanggaran pegawai di Kabupaten Maros secara umum masih sangat kecil walaupun terdapat peningkatan pada tahun 2020. Pada tahun 2016 persentase pelanggaran pegawai sebesar 0,11 % dengan jumlah ASN yang dikenakan sanksi sebanyak 7 orang, sedangkan pada tahun 2020 persentase pelanggaran pegawai meningkat hingga 0,24 % dengan jumlah ASN yang dikenakan sanksi sebanyak 15 orang.

Pelanggaran yang sering dilakukan oleh ASN adalah disiplin ketaatan jam kerja, dimana masih banyak ASN yang datang dan pulang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, selain itu terdapat 1 -2 orang ASN yang melakukan pelanggaran yang cukup berat. Sanksi yang diberikan bervariasi, baik berupa penundaan pencairan tunjangan kinerja sampai dengan pemecatan.

Tabel 2.309
Persentase Pelanggaran Pegawai
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah ASN Yang dikenai sanksi	8	8	7	6	15
2	Jumlah Total ASN	7.299	7.120	6.844	6.750	6.373
3	Persentase Pelanggaran Pegawai	0,11	0,11	0,10	0,09	0,24

Sumber : Inspektorat Kab. Maros, 2021

2.3.4.4.3 Jumlah Temuan BPK

Jumlah temuan yang merupakan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan angka yang berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah temuan BPK sebanyak 28 temuan, kemudian meningkat hingga mencapai 79 temuan pada tahun 2017, kemudian menurun pada tahun 2018 sebanyak 34 temuan, dan pada tahun 2019 hanya ada 4 temuan BPK. Pada tahun 2020 jumlah temuan BPK sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni sebanyak 14 temuan.

Tabel 2.310
Jumlah Temuan BPK
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Temuan BPK	28	79	34	4	14

Sumber : Inspektorat Kab. Maros, 2021



2.3.4.5 Penelitian dan Pengawasan

2.3.4.5.1 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan

Sebelum terbentuknya Badan Kelitbangan dan Pengembangan Daerah pada tahun 2017, urusan kelitbangan berada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Namun urusan tersebut belum pernah diakomodir ke dalam kegiatan sehingga kegiatan yang berhubungan dengan kelitbangan baru termuat dalam RKPD pada tahun 2018.

Persentase implementasi rencana kelitbangan pada tahun 2018 sebesar 29,27 %, kemudian meningkat hingga mencapai 50 % pada tahun 2019 dan 24,39 % pada tahun 2020. Menurunnya persentase implementasi rencana kelitbangan pada tahun 2020 disebabkan adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap program dan kegiatan Balitbangda yang mengalami pengurangan.

Tabel 2.311
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelitbangan dalam RKPD	0	0	24	41	20
2	Jumlah kelitbangan dalam RPJMD	82	82	82	82	82
3	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	0,00	0,00	29,27	50,00	24,39

Sumber : Balitbangda Kab. Maros, 2021

2.3.4.5.2 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan adalah jumlah kelitbangan yang telah disusun dan kemudian dimanfaatkan oleh stakeholder sebesar 100 %, artinya semua kelitbangan dalam rencana kerja Balitbangda telah ditindaklanjuti. Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil kelitbangan sesuai renja perangkat daerah tahun berkenan yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan. Jumlah kelitbangan pada tahun 2018 sebanyak 24 kelitbangan, kemudian pada tahun 2019 sebanyak 41 kelitbangan dan pada tahun 2020 sebanyak 20 kelitbangan.



Tabel 2.312
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti	0	0	24	41	20
2	Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah	0	0	24	41	20
3	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	0	0	100	100	100

Sumber : Balitbangda Kab. Maros, 2021

2.3.4.5.3 Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah

Inovasi merupakan bentuk perwujudan sesuatu yang baru atau membuat pembaruan terhadap sesuatu yang sudah ada. Sampai saat ini belum terdapat perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapannya inovasi. Hal ini disebabkan belum adanya perangkat daerah yang memiliki inovasi.

Tabel 2.313
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi	0	0	0	0	0
2	Jumlah total perangkat daerah	45	45	45	45	45
3	Persentase Perangkat Daerah Yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Balitbangda Kab. Maros, 2021

2.3.4.6 Sekretariat Dewan

2.3.4.6.1 Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD

Setiap tahun DPRD wajib membuat rencana kerja sebagai bagian dari rencana kerja Sekretariat DPRD selaku satuan kerja perangkat daerah yang mengelola administrasi keuangan DPRD. Sekretariat DPRD Kabupaten Maros telah melaksanakan kegiatan penyediaan rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD.



Tabel 2.314

**Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Maros, 2021

2.3.4.6.2 Tersusunnya dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) Maupun Rencana Kerja Tahunan (RKPD)

Program dan kegiatan DPRD Kabupaten Maros yang akan dilaksanakan setiap tahunnya telah terangkum dalam dokumen perencanaan, baik dalam RPJMD maupun dalam RKPD, sehingga seluruh kegiatan DPRD Kabupaten Maros dalam rangka melakukan fungsi pengawasan, pembentukan PERDA dan anggaran dapat berjalan dengan baik.

Tabel 2.15

**Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020**

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada	Ada	ada	ada	ada

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Maros, 2021

2.3.4.6.3 Tersusunnya dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA dan dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan

Seluruh program dan kegiatan DPRD Kabupaten Maros harus terintegrasi dalam dokumen anggaran Sekretariat DPRD, dikarenakan dokumen anggaran tersebut akan dijadikan acuan untuk anggaran yang akan digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan DPRD Kabupaten Maros selama tahun berjalan.



Tabel 2.316
Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Perencanaan dan dokumen anggaran DPRD Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan PERDA dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen Perencanaan dan dokumen anggaran DPRD	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Maros, 2021

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

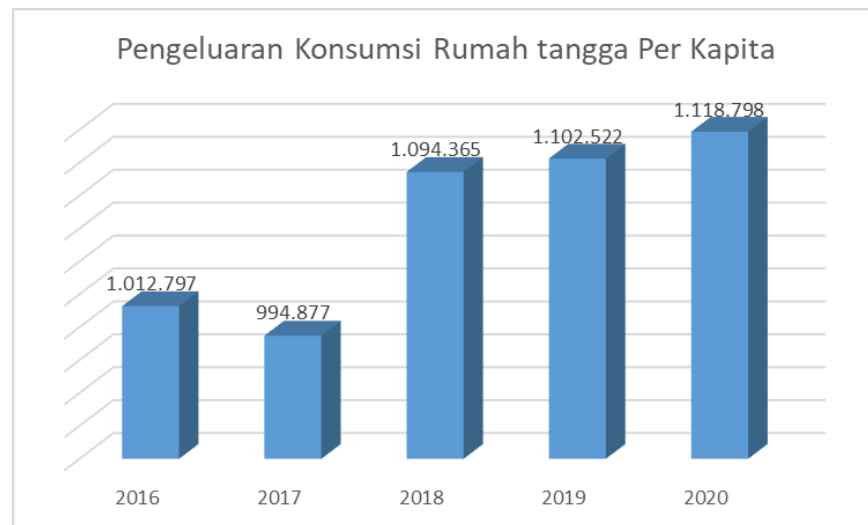
2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga disini mencakup pembelian untuk makanan dan bukan makanan (barang dan jasa) di dalam negeri maupun luar negeri. Termasuk pula disini pengeluaran lembaga nirlaba yang tujuan usahanya adalah untuk melayani keperluan rumah tangga.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga Kabupaten Maros menunjukkan tren yang berfluktuatif selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 rata pengeluaran konsumsi ruma tanggah perkapita sebesar Rp. 1.012.797, kemudian meningkat hingga mencapai Rp. 1.118.798 pada tahun 2020. Semakin meningkatnya rata-rata pengeluaran penduduk kabupaten Maros belum dapat menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk juga semakin meningkat. Hal ini disebabkan untuk memenuhi kriteria peningkatan kesejahteraan, pengeluaran dari konsumsi makanan harus lebih rendah dari pengeluaran konsumsi non makanan.



Grafik 2.50
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS Kab. Maros (Diolah), 2021

2.4.1.2 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan

Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah nilai belanja yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya (pangan dan non pangan). Pengeluaran konsumsi non pangan meliputi pendidikan, pakaian, perumahan, dan beberapa kebutuhan non pangan lainnya. Pengeluaran konsumsi non pangan Kabupaten Maros menunjukkan tren yang berfluktuatif selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan perkapita sebesar 55,62%, kemudian pada tahun 2020 persentase pengeluaran menurun hingga mencapai 51,58%. Persentase tertinggi terdapat pada tahun 2017 yaitu sebesar 57,53%.

Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa pengeluaran konsumsi perkapita penduduk di kabupaten Maros tidak jauh berbeda antara pengeluaran konsumsi pangan dan non pangan, walaupun pengeluaran konsumsi non pangan berada diatas 50%, namun persentasenya tidak mencapai 60%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk Kabupaten Maros tidak terlalu tinggi.



Grafik 2.51
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS Kab. Maros (Diolah), 2021

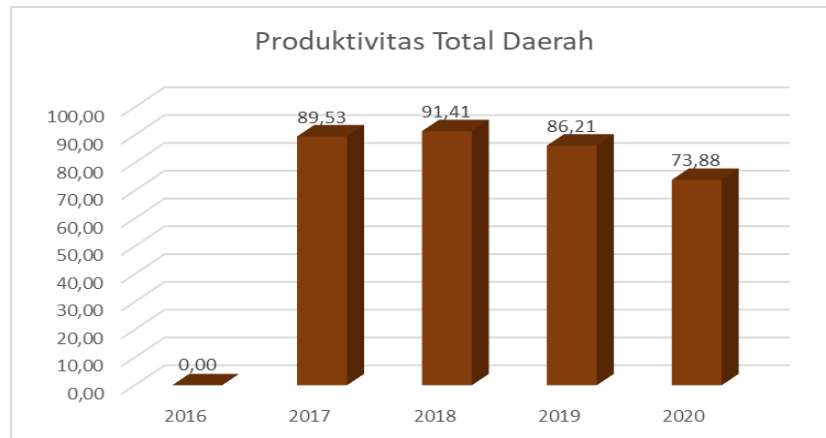
2.4.1.3 Produktivitas Total Daerah

Produktivitas total daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angka kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Produktivitas Total Daerah dapat diketahui dengan menghitung produktivitas daerah persektor (17 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah Angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. PDRB dihitung berdasarkan 9 (sembilan) sektor.

Produktivitas total daerah Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan selama tahun 2017 hingga tahun 2020 (Tahun 2016, BPS tidak merilis data tenaga kerja). Pada tahun 2017 produktivitas total daerah sebesar 89,53% kemudian meningkat pada tahun 2018 sebesar 91,41%. Pada tahun 2019 produktivitas total daerah menurun hingga mencapai 86,21% dan pada tahun 2020 sebesar 73,88%. Menurunnya produktivitas total daerah ini disebabkan melambatnya pertumbuhan PDRB Kabupaten Maros pada tahun 2019 dan bahkan berkontraksi pada tahun 2020.



Grafik 2.52
Produktivitas Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020



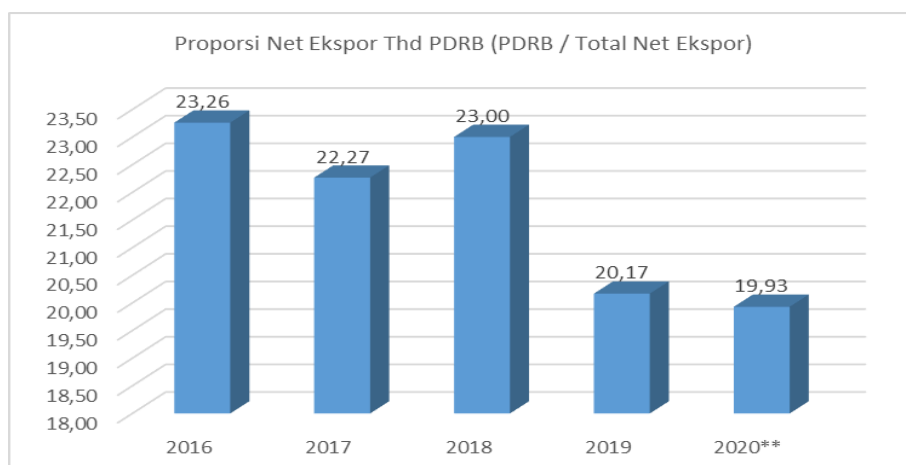
Sumber : BPS Kab. Maros (Diolah), 2021

2.4.1.4 Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)

Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB adalah indikator pengaruh relatif perdagangan internasional dalam ekonomi suatu negara. Rasio ini dihitung dengan membagi nilai agregat impor dan ekspor dalam kurun waktu tertentu dengan produk domestik bruto pada kurun waktu yang sama. Meski disebut rasio, hasil akhirnya biasanya ditampilkan dalam bentuk persentase. Rasio ini dijadikan patokan keterbukaan suatu negara terhadap perdagangan internasional.

Rasio ekspor dan impor terhadap PDRB Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 rasio ekspor dan impor terhadap PDRB sebesar 23,26% kemudian menurun hingga mencapai 19,93 % pada tahun 2020.

Grafik 2.53
Rasio Impor + Ekspor Terhadap PDRB
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020**



Sumber : BPS Kab. Maros (Diolah), 2021



***) Angka Sangat Sementara*

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah Infrastruktur

2.4.2.1 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Penduduk

Panjang jalan di Kabupaten Maros sejak tahun 2015 hingga tahun 2016 sebesar 1.290 km. Setelah dilakukan pengukuran kembali pada tahun 2017, panjang jalan Kabupaten Maros sebesar 1.032 km. Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 sebesar 0,004 km/jiwa kemudian tahun 2017 hingga 2020 sebesar 0,003 km/jiwa. Menurunnya rasio panjang jalan ini dikarenakan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya sedangkan panjang jalan praktis tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan data pada tabel dibawah dapat diketahui bahwa 1 km jalan melayani 350 sampai 378 penduduk di Kabupaten Maros. Rasio Panjang jalan ini belum dapat mencerminkan tingkat kepadatan jalan dikarenakan belum memperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

Tabel 2.317
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Penduduk Kabupaten Maros

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah panjang jalan	1.290	1.032	1.032	1.032	1.032
2	Jumlah Penduduk	342.890	346.383	349.822	353.121	391.774
3	Rasio Panjang jalan dengan Jumlah Penduduk	0,004	0,003	0,003	0,003	0,003

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021

2.4.2.2 Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah barang dan orang yang melalui dermaga, terminal/bandara pertahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, utamanya untuk jumlah orang dan barang yang terangkut melalui Bandar Udara Hasanuddin. Pada tahun 2016 jumlah orang yang terangkut sebanyak 16 juta orang, kemudian meningkat hingga mencapai 21 juta orang pada tahun 2019. Pada tahun 2020 akibat adanya penutupan bandara untuk mengangkut penumpang dan terminal selama beberapa bulan, terjadi penurunan penumpang secara signifikan, dimana jumlah penumpang yang tercatat pada tahun 2020 hanya sebesar 1,7 juta orang.

Berbeda dengan jumlah penumpang yang sangat menurun, jumlah barang yang terangkut selama tahun 2020 meningkat dengan pesat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 jumlah barang yang terangkut sebesar 72 juta ton, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 143 juta ton. Bertambahnya jumlah barang yang terangkut pada tahun 2020 dikarenakan banyaknya pembelian barang melalui *online shop* akibat pembatasan aktivitas masyarakat pada tahun 2020.



Tabel 2.318
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum
Kabupaten Maros

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah orang Yang Terangkut Angkutan Umum (jiwa)	16.202.191	17.134.224	19.168.348	21.778.223	1.797.572
2	Jumlah Barang yang terangkut angkutan umum (Ton)	72.390.045	84.357.050	100.727.256	120.274.240	143.614.485

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Maros, 2021

2.4.2.3 Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga/Bandara/Terminal Per Tahun

Jumlah barang dan orang yang melalui dermaga, terminal/bandara pertahun menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, utamanya untuk jumlah orang dan barang yang terangkut melalui Bandar Udara Hasanuddin.

Tabel 2.319
Jumlah Orang/Barang melalui Dermaga/Bandara/Terminal Pertahun
Kabupaten Maros

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bandara					
	Jumlah orang terangkut (Jiwa)	12.700.000	12.282.000	12.662.215	13.054.201	1.797.572
	Jumlah barang terangkut (Ton)	72.390.000	84.357.000	100.727.190	120.274.155	143.614.374
2	Dermaga					
	Jumlah orang terangkut (Jiwa)	0	0	0	0	0
	Jumlah barang terangkut (Ton)	45	50	65	85	111
3	Terminal					
	Jumlah orang terangkut (Jiwa)	2.191	2.224	2.257	2.291	200
	Jumlah barang terangkut (Ton)	0	0	0	0	0
4	Jumlah orang terangkut (Jiwa)	12.702.191	12.284.224	12.664.472	13.056.492	1.797.772
	Jumlah barang terangkut (Ton)	72.390.045	84.357.050	100.727.256	120.274.240	143.614.485

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Maros, 2021



2.4.2.4 Ketaatan terhadap RTRW

Ketaatan terhadap RTRW merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW.

Penurunan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Maros selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan adanya kesadaran masyarakat tentang tata ruang yang ada serta keterbukaan informasi tentang tata ruang yang ada. Ketaatan terhadap RTRW pada tahun 2016 sebesar 1,11%, kemudian terus meningkat hingga mencapai 2,83% pada tahun 2020.

Tabel 2.320

Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi RTRW	1.606	2.106	2.683	3.159	4.107
2	Rencana Peruntukan	145.310	145.310	145.310	145.310	145.310
3	Ketaatan Terhadap RTRW	1,11	1,45	1,85	2,17	2,83

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021

2.4.2.5 Luas Wilayah Industri

Kawasan Industri atau wilayah industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana serta fasilitas penunjang lain yang disediakan serta dikelola oleh suatu perusahaan kawasan industri. Luas wilayah industri Kabupaten Maros mengalami perkembangan sejak tahun 2015 hingga tahun 2018. Bahkan pada tahun 2018, penetapan kawasan industri sudah memiliki legalitas hukum melalui PERDA. Pada tahun 2015 luas wilayah industri Kabupaten Maros sebesar 102,97 Ha, kemudian pada tahun 2016 sebesar 112 Ha. Pada tahun 2017 hingga tahun 2020 luas areal wilayah industri Kabupaten Maros sebesar 200 Ha, dan masih dapat berkembang lagi sesuai Rencana Pengembangan Kawasan Industri (RPKI) 2018-2038.

Tabel 2.321

Luas Wilayah Industri Kabupaten Maros

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas Wilayah Industri (Realisasi)	102,97	112,00	122,00	122,00	122,00
2.	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	69.960,63	69.960,63	69.960,63	69.960,63	69.960,63



NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
3.	Rasio Luas wilayah industri	0,15	0,16	0,17	0,17	0,17

Sumber : DPMPTSP Kab. Maros, 2018

2.4.2.6 Luas Wilayah Kebanjiran

Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan sehingga air keluar dari sungai itu. Luas wilayah yang mengalami kebanjiran di kabupaten Maros terdiri atas Kecamatan Turikale, Bantimurung, Bontoa, Camba, Cenrana, Mandai, Maros Baru, Marusu, Moncongloe dan Tanralili. Luas wilayah kebanjiran secara umum mengalami peningkatan.

Tahun 2016 rasio wilayah kebanjiran sebesar 4,26% kemudian meningkat hingga mencapai 6,40% pada tahun 2020. Meningkatnya rasio kebanjiran ini disebabkan banyaknya lahan yang beralih fungsi menjadi pemukiman di wilayah perkotaan, sedangkan di wilayah hulu banyak terjadi pembukaan hutan untuk dijadikan lahan perladangan oleh masyarakat.

Tabel 2.322
Luas Wilayah Kebanjiran Kabupaten Maros

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas Wilayah kebanjiran	2.980	3.018	2.716	4.227	4.480
2.	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	69.961	69.961	69.961	69.961	69.961
3.	Rasio Wilayah kebanjiran	4,26	4,31	3,88	6,04	6,40

Sumber : BPBD Kab. Maros, 2021

2.4.2.7 Luas Wilayah kekeringan

Wilayah kekeringan adalah wilayah yang memiliki sumber air sangat terbatas, bahkan sumber air satu-satunya adalah air hujan. Beberapa wilayah Kecamatan di Kabupaten Maros merupakan wilayah yang tidak memiliki sumber air lain selain air hujan. Wilayah tersebut utamanya kecamatan yang berada di wilayah pesisir, seperti Kecamatan Lau dan Bontoa. Rasio luas wilayah kekeringan di Kabupaten Maros pada tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan data yang berfluktuatif. Pada tahun 2016 rasio wilayah kekeringan sebesar 20,73% kemudian meningkat hingga mencapai 45,99%, namun pada tahun 2020 luas rasio wilayah kekeringan menurun hingga menjadi 19,44%.



Cukup tingginya wilayah terdampak kekeringan pada tahun 2017 hingga tahun 2019 disebabkan cukup lamanya musim kemarau melanda Kabupaten Maros, selain itu wilayah yang terdampak memang berada pada wilayah yang berada di Kawasan pesisir dimana air tawar sangat sulit didapatkan. Pada tahun 2020 wilayah kekeringan menurun drastis disebabkan karena musim hujan yang cukup panjang melanda Kabupaten Maros, dimana pada bulan Januari hingga April kemudian Oktober hingga Desember curah hujan di Kabupaten Maros tergolong cukup tinggi.

Tabel 2.323

Luas Wilayah Kekeringan Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas Wilayah kekeringan	14.500	28.700	30.700	32.177	13.600
2.	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	69.961	69.961	69.961	69.961	69.961
3.	Rasio Wilayah kekeringan	20,73	41,02	43,88	45,99	19,44

Sumber : BPBD Kab. Maros, 2021

2.4.2.8 Luas Wilayah Perkotaan

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Wilayah yang termasuk kawasan perkotaan untuk Kabupaten Maros adalah Kecamatan Turikale dan seluruh desa/kelurahan yang merupakan ibukota kecamatan dari 13 kecamatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Maros, luas wilayah perkotaan di Kabupaten Maros sebesar 3.117,03, dengan rasio sebesar 4,46%.

Tabel 2.324

Rasio Luas Wilayah Perkotaan Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Wilayah Perkotaan (Realisasi)	3.117,02	3.117,02	3.117,02	3.117,02	3.117,02
2	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	69.961	69.961	69.961	69.961	69.961
3	Rasio Luas Wilayah Perkotaan	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46

Sumber : BPS Kab. Maros (Diolah), 2021



Tabel 2.325
Luas Wilayah Perkotaan Kabupaten Maros

No	Kecamatan/Desa/Kelurahan	Luas	Rasio
1	Turikale	2993	4,28
2	Tetebatu	4,38	0,01
3	Moncongloe Bulu	12,76	0,02
4	Baju Bodoa	3,76	0,01
5	Temappaduae	7,54	0,01
6	Maccini baji	9,48	0,01
7	Panjalingan	2,91	0,00
8	Kalabirang	5,89	0,01
9	Jenetaesa	10,08	0,01
10	Borong	4,49	0,01
11	Pucak	17,76	0,03
12	Cempaniga	6,34	0,01
13	Bengo	23,37	0,03
14	Ladange	15,26	0,02
MAROS		3.117,02	4,46

Sumber : BPS Kab. Maros (Diolah), 2021

2.4.2.9 Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jumlah bank di Kabupaten Maros sampai tahun 2020 sebanyak 21 dengan unit, dengan rincian 15 unit bank konvensional dan 2 unit bank syariah. Sedangkan unit pembiayaan di Kabupaten Maros sebanyak 6 unit yang mana keseluruhan dan unit pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan konvensional.

Tabel 2.326
Jumlah Bank Serta Pembiayaan dan Cabangnya
Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2020

No	Sektor	2016	2017	Jumlah 2018	2019	2020
1.	Bank Umum					
1.1.	Konvensional	13	13	13	13	13
1.2.	Syariah	2	2	2	2	2
Jumlah		15	15	15	15	15
2.	Pembiayaan (<i>Finance</i>)					
2.1.	Konvensional	6	6	6	6	6
2.2.	Syariah	0	0	0	0	0
Jumlah		6	6	6	6	6
TOTAL		21	21	21	21	21

Sumber : Bappeda Kab. Maros, 2021

2.4.2.10 Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabangnya

Asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua belah pihak, dimana pihak satu berkewajiban membayar iuran/kontribusi/premi. Pihak yang



lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran/kontribusi/premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat). Perusahaan asuransi yang terdapat di Kabupaten Maros pada tahun 2016 hingga tahun 2018 hanya satu yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Namun pada tahun 2019 hingga tahun 2020 bertambah menjadi 5 perusahaan. Hal ini menunjukkan tingkat perekonomian dan pendapatan masyarakat Kabupaten Maros semakin membaik setiap tahunnya.

Tabel 2.327
Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabangnya
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020

No	Sektor	Jumlah				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Perusahaan Asuransi Kerugian					
1.1.	Konvensional	1	1	1	3	3
1.2.	Syariah	0	0	0	0	0
	Jumlah	1	1	1	1	1
2.	Perusahaan Asuransi Jiwa					
2.1.	Konvensional	1	1	1	2	2
2.2.	Syariah	0	0	0	0	0
	Jumlah	1	1	0	0	0
TOTAL		2	2	2	5	5

Sumber : Bappeda Kab. Maros, 2021

2.4.2.11 Jenis dan Jumlah Restoran

Jumlah restoran yang terdapat di Kabupaten Maros mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros, jumlah restoran yang terdapat di Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebanyak 57 restoran, kemudian pada tahun 2017 sebanyak 88 restoran, dan pada tahun 2018 sebanyak 95 unit restoran, kemudian pada tahun 2019 jumlah restoran kembali meningkat hingga mencapai 134 unit. Namun pada tahun 2020 akibat adanya pandemic COVID-19 dan pembatasan pergerakan masyarakat serta penutupan fasilitas umum termasuk restoran selama beberapa bulan, mengakibatkan terdapat beberapa restoran yang mengalami kebangkrutan dan akhirnya harus menutup operasionalnya selama satu tahun.

Tabel 2.328
Jumlah Restoran Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2020

No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Mandai	36	55	60	66	17
2	Moncongloe	0	0	0	3	5
3	Maros Baru	0	0	0	4	2
4	Marusu	3	3	3	8	1



No	Kecamatan	2016	2017	2018	2019	2020
5	Turikale	18	17	21	25	37
6	Lau	0	1	1	2	11
7	Bontoa	0	0	0	5	4
8	Bantimurung	2	2	3	4	2
9	Simbang	2	2	2	2	3
10	Tanralili	0	1	1	1	2
11	Tompobulu	0	0	0	1	2
12	Camba	1	1	1	5	1
13	Cenrana	0	1	1	2	2
14	Mallawa	5	5	2	6	4
TOTAL		57	88	95	134	93

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Maros, 2021

2.4.2.12 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Air Bersih

Persentase penduduk yang menggunakan air bersih adalah perbandingan jumlah penduduk yang mendapatkan akses air bersih dibagi dengan jumlah penduduk. Syarat dari air bersih menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Yang dimaksud dengan air bersih adalah air yang berasal dari air mineral, pipa air/PAM, pompa air, sumur, mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai dengan standar kebutuhan minimal.

Sumber air bersih yang digunakan penduduk Kabupaten Maros adalah air yang bersumber dari PDAM (Perpipaan), Sumur gali terlindung, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, terminal air, penampungan air hujan, dan lain-lain. Persentase penduduk Kabupaten Maros yang memiliki akses terhadap air bersih di Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebesar 60,55%, kemudian meningkat hingga mencapai 77,96% pada tahun 2020.

Tabel 2.329
Persentase penduduk Pengguna Air Bersih
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Rumah tangga menggunakan air bersih	51.902	54.188	56.474	58.759	76.354
2	Jumlah Rumah tangga	85.723	87.437	89.186	90.970	97.944
3	Persentase penduduk Berakses Air bersih	60,55	61,97	63,32	64,59	77,96

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021



Tabel 2.330
Persentase Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih
Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah RT Yang Menggunakan Air Bersih perpipaan	Jumlah RT Yang Menggunakan Air Bersih Non Perpipaan
1	Mandai	7.327	3.123
2	Moncongloe	1.482	756
3	Maros baru	1.521	1.305
4	MARusu	1.704	3.607
5	Turikale	6.690	3.227
6	Lau	2.462	1.631
7	Bontoa	1.099	2.040
8	Bantimurung	7.028	3.154
9	Simbang	3.996	3.313
10	Tanralili	4.226	3.718
11	Tompobulu	2.191	1.697
12	Camba	3.141	124
13	Cenrana	3.770	102
14	Mallawa	1.635	287
MAROS		48.272	28.082

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021

2.4.2.13 Ketersediaan Daya Listrik

Kapasitas listrik terpasang merupakan sebuah rumah dari suatu tempat, sedangkan daya listrik adalah rombongan tamu yang menumpang di tempat tersebut selama jangka waktu tertentu. Misalnya, sebuah rumah memiliki daya tampung 1300 tamu untuk menginap

Ketersediaan listrik Kabupaten Maros selama tahun 2016 hingga tahun 2019 cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari daya terpasang yang dibandingkan dengan produksi listrik yang disediakan oleh PLN. Pada tahun 2016 daya terpasang sebesar 175.626.750 Kw, kemudian pada tahun 2017 daya terpasang sebesar 186.914.639 Kw. Pada tahun tahun 2019, daya terpasang Kembali meningkat hingga mencapai 203.398.189 kw.

Berdasarkan data yang ada tabel dibawah, diketahui bahwa produksi listrik Kabupaten Maros masih lebih tinggi dibandingkan dengan daya terpasang. Dengan demikian dapat diketahui bahwa penduduk Kabupaten Maros tidak akan kekurangan listrik dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan.

Tabel 2.331
Ketersediaan Daya Listrik Kabupaten Maros

Tahun	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik terjual (KWh)	Susu/Hilang (KWh)
2016	175.626.750	369297.158	345.897.612	19.551.478
2017	189.914.639	500.194.400	476.499.864	23.694.536



Tahun	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik terjual (KWh)	Susu/Hilang (KWh)
2018	196.844.789	-	-	-
2019	203.398.189	-	-	-
2020	213.645.173	-	-	-

Sumber : PLN Kab. Maros (Diolah), 2021

2.4.2.14 Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik dapat terlihat dari jumlah pelanggan listrik (PLN). Jumlah rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Maros pada 2016 sebesar 82,54% dengan jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik sebesar 70.754 RT. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik pada tahun 2019 meningkat hingga mencapai 96,12% dengan jumlah RT pengguna sebanyak 87.442 RT. Untuk tahun 2020 diperkirakan persentase RT menggunakan listrik sebesar 98,20 % dengan RT pengguna sebesar 96.868 RT.

Meningkatnya jumlah RT yang menggunakan listrik menunjukkan bahwa listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat. Selain itu semakin meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat juga berdampak terhadap kemampuan masyarakat untuk menggunakan listrik.

Tabel 2.332
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik
Kabupaten Maros Tahun 2016 – 2020*

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020*
1.	Total Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik	70.754	74.999	79.499	87.442	96.868
2.	Jumlah Rumah Tangga	85.723	87.437	89.186	90.970	97.944
3.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik	82,54	85,77	89,14	96,12	98,90

Sumber : PLN Kab. Maros (Diolah), 2021

*) Angka Sementara

2.4.2.15 Persentase Penduduk Yang Menggunakan Telepon Selular

Telepon merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting pada jaman sekarang ini, dikarenakan fungsinya yang tidak hanya digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi (Smartphone). Persentase penduduk Kabupaten Maros yang menggunakan telepon selular menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 sebesar 55,06% dengan jumlah penduduk yang menggunakan telepon selular sebanyak 188.805 orang. Pada tahun 2020 jumlah penduduk yang menggunakan telepon selular meningkat sebanyak 337.552 orang dengan persentase sebesar 86,16%.



Seperti halnya listrik, telepon seluler juga saat ini juga merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat umum. Fungsi utama dari handphone adalah sebagai alat komunikasi melalui suara dan pesan singkat (SMS). Selanjutnya handphone berfungsi untuk menangkap siaran radio, televisi. Juga dilengkapi dengan fungsi audio, kamera, video, game, serta layanan internet. Dengan semakin banyaknya fungsi telepon seluler tersebut maka masyarakat saat ini semakin banyak yang menggunakan telepon seluler.

Tabel 2.333
Persentase Penduduk Yang Menggunakan Telepon Selular
Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk menggunakan HP/telepon	188.805	268.689	275.800	273.810	337.552
2	Jumlah penduduk	342.890	346.383	349.822	353.121	391774
3	Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon Seluler	55,06	77,57	78,84	77,54	86,16

Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

2.4.3.1 Angka Kriminalitas Yang Tertangani

Kriminalitas atau tindak kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris.

Angka kriminalitas yang dapat ditangani oleh pihak berwajib di Kabupaten Maros pada tahun 2016 sebesar 18,75 % dengan jumlah tindakan kriminal yang dapat tertangani sebanyak 643 kasus. Pada tahun 2020 angka kriminalitas yang tertangani sebesar 14,31 % dengan jumlah angka kejadian yang tertangani sebanyak 561 kasus.

Rendahnya kejadian kriminal yang terjadi di Kabupaten Maros selama tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan bahwa secara umum tingkat keamanan di Kabupaten maros masih sangat baik, sehingga masyarakat, pengusaha dan pelaku ekonomi lainnya dapat melakukan aktivitas dan kegiatan dengan tenang.



Tabel 2.334
Angka Kriminalitas Yang Tertangani Kabupaten Maros

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tindak kriminal yang tertangani dalam 1 tahun	643	654	621	590	561
2	Jumlah penduduk	342.890	346.383	349.822	353.121	391.774
3	Angka Kriminalitas Yang Tertangani	18,75	18,88	17,76	16,71	14,31

Sumber : Satpol PP dan Polres Maros, 2021

2.4.3.2. Persentase desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa

Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya yang sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri dari desa swasembada diantaranya: Kebanyakan berlokasi di ibukota dan kecamatan, penduduk padat, tidak terikat lagi dengan adat istiadat daerah tersebut, telah memiliki fasilitas yang memadai, dan juga maju dibanding warga dari desa lainnya. Persentase desa swasembada Kabupaten Maros sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 sebesar 1,94 %, dengan jumlah desa swasembada sebanyak 2 desa.

Tabel 2.335
Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	jumlah desa berswasembada	59	59	59	59	59
2	Jumlah Desa/kelurahan	80	80	80	80	80
3	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	73,75	73,75	73,75	73,75	73,75

Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

Selain menggunakan indikator desa swasembada, indikator yang dapat digunakan untuk melihat kondisi desa kemakmuran atau kesejahteraan suatu desa adalah jumlah desa tertinggal, berkembang dan mandiri. Berdasarkan buku Indeks Pembangunan Desa yang dirilis oleh BPS Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros yang terdiri dari 80 desa memiliki jumlah desa tertinggal sebanyak 6 desa, desa mandiri sebanyak 3 desa dan desa berkembang sebanyak 71 desa.



Tabel 2.336
Jumlah Desa Tertinggal, Berkembang dan Mandiri
Kabupaten Maros Tahun 2020

No	KECAMATAN	DESA	IPD	Status Desa
1	BANTIMURUNG	ALATENGAE	70,35	Berkembang
2	BANTIMURUNG	BARUGA	69,82	Berkembang
3	BANTIMURUNG	MANGELORENG	69,83	Berkembang
4	BANTIMURUNG	MATTOANGIN	72,05	Berkembang
5	BANTIMURUNG	MINASA BAJI	72,27	Berkembang
6	BANTIMURUNG	TUKAMASEA	72,88	Berkembang
7	BONTOA	AMPEKALE	63,29	Berkembang
8	BONTOA	BONTO BAHARI	71,6	Berkembang
9	BONTOA	BONTO LEMPANGAN	70,6	Berkembang
10	BONTOA	MINASA UPA	59,87	Berkembang
11	BONTOA	PAJUKUKANG	66,75	Berkembang
12	BONTOA	SALENRANG	74,58	Berkembang
13	BONTOA	TUNIKAMASEANG	52,6	Berkembang
14	BONTOA	TUPABIRING	70,51	Berkembang
15	CAMBA	BENTENG	49,09	Tertinggal
16	CAMBA	CENRANA	59,95	Berkembang
17	CAMBA	PATTANYAMANG	45,92	Tertinggal
18	CAMBA	PATTIRO DECENG	63,14	Berkembang
19	CAMBA	SAWARU	61,18	Berkembang
20	CAMBA	TIMPUSENG	62,52	Berkembang
21	CENRANA	BAJI PAMAI	64,27	Berkembang
22	CENRANA	CENRANA BARU	56,32	Berkembang
23	CENRANA	LABUAJA	56,85	Berkembang
24	CENRANA	LAIYA	63,63	Berkembang
25	CENRANA	LEBBOTENGGAE	62,61	Berkembang
26	CENRANA	LIMAM POCOE	70,53	Berkembang
27	CENRANA	ROMPE GADING	63,09	Berkembang
28	LAU	BONTO MARANNU	79,03	Berkembang
29	LAU	MARRANNU	70,97	Berkembang
30	MALLAWA	BARUGAE	60,19	Berkembang
31	MALLAWA	BATU PUTIH	62,06	Berkembang
32	MALLAWA	BENTENGE	59,91	Berkembang
33	MALLAWA	GATTARENG MATINGGI	44,15	Tertinggal
34	MALLAWA	MATTAMPAPOLE	44,63	Tertinggal
35	MALLAWA	PADAELO	63,76	Berkembang
36	MALLAWA	SAMAENRE	52,48	Berkembang
37	MALLAWA	TELLUMPANUAE	54,31	Berkembang
38	MALLAWA	ULUDAYA	57,86	Berkembang
39	MALLAWA	WANUA WARU	47,13	Tertinggal
40	MANDAI	BAJI MANGNGAI	67,2	Berkembang



41	MANDAI	BONTO MATENE	66,54	Berkembang
42	MANDAI	PATONTONGAN	61,44	Berkembang
43	MANDAI	TENRIGANGKAE	72,66	Berkembang
44	MAROS BARU	BORI KAMASE	72,51	Berkembang
45	MAROS BARU	BORIMASUNGGU	66,46	Berkembang
46	MAROS BARU	MAJANNANG	65,72	Berkembang
47	MAROS BARU	MATTIRO TASI	68,05	Berkembang
48	MARUSU	A'BULOSIBATANG	64,49	Berkembang
49	MARUSU	BONTO MATENE	52,86	Berkembang
50	MARUSU	MARUMPA	80,43	Mandiri
51	MARUSU	NISOMBALIA	68,39	Berkembang
52	MARUSU	PABENTENGAN	67,25	Berkembang
53	MARUSU	TELLUMPOCCOE	66,37	Berkembang
54	MARUSU	TEMAPPADDAE	65,43	Berkembang
55	MONCONGLOE	BONTO BUNGA	72,37	Berkembang
56	MONCONGLOE	BONTO MARANNU	62,4	Berkembang
57	MONCONGLOE	MONCONGLOE	65,22	Berkembang
58	MONCONGLOE	MONCONGLOE BULU	68,86	Berkembang
59	MONCONGLOE	MONCONGLOE LAPPARA	67,14	Berkembang
60	SIMBANG	BONTO TALLASA	70,79	Berkembang
61	SIMBANG	JENETAESA	71,61	Berkembang
62	SIMBANG	SAMANGKI	75,77	Mandiri
63	SIMBANG	SAMBUEJA	72,27	Berkembang
64	SIMBANG	SIMBANG	66,83	Berkembang
65	SIMBANG	TANETE	67,62	Berkembang
66	TANRALILI	ALLAERE	72,86	Berkembang
67	TANRALILI	DAMAI	68,57	Berkembang
68	TANRALILI	KURU SUMANGE	70,99	Berkembang
69	TANRALILI	LEKO PANCING	79,84	Mandiri
70	TANRALILI	PURNA KARYA	67,75	Berkembang
71	TANRALILI	SUDIRMAN	74,94	Berkembang
72	TANRALILI	TODDO PULIA	69,56	Berkembang
73	TOMPU BULU	BENTENG GAJAH	60,89	Berkembang
74	TOMPU BULU	BONTO MANAI	55,37	Berkembang
75	TOMPU BULU	BONTO MANURUNG	58,36	Berkembang
76	TOMPU BULU	BONTO SOMBA	38,24	Tertinggal
77	TOMPU BULU	BONTOMATINGGI	57,77	Berkembang
78	TOMPU BULU	PUCAK	68,7	Berkembang
79	TOMPU BULU	TODDOLIMAE	65,66	Berkembang
80	TOMPU BULU	TOMPO BULU	69,23	Berkembang

Sumber BPS Prop. Sulsel, 2019



2.4.3.3. Jumlah Demonstrasi

Jumlah demonstrasi yang terjadi di kabupaten Maros selama tahun 2015 hingga tahun 2018 menunjukkan tren yang berfluktuatif. Pada tahun 2015 jumlah demonstrasi yang terjadi sebanyak 5 kasus, kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 10 kasus dan tahun 2018 kembali menurun menjadi 2 kasus. Penanganan demonstrasi ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan instansi terkait serta kepolisian dan TNI.

Tabel 2.337
Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Maros

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bidang Politik	3	0	0	3	10
2	Ekonomi	0	3	2	4	0
3	Kasus pemogokan kerja	1	7	0	6	5
4	Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa	4	10	2	13	15

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kab. Maros, 2021

2.4.3.4. Lama Proses Perijinan

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari). Jenis perijinan yang dianalisis antara lain: SIUP, TDP, IUI, TDI, IMB, HO. Dalam hal proses perijinan, lama proses perijinan pada kantor pelayanan di Kabupaten Maros dari jumlah total jenis izin yang dikeluarkan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 yakni selama 5 – 6 hari. Cukup lamanya proses perijinan ini disebabkan sebelum mengeluarkan izin yang dimaksud, diperlukan peninjauan ke lapangan untuk melihat kondisi yang ada, apakah telah sesuai dengan yang tertera dalam dokumen pengajuan izin, serta izin berjenjang mulai dari tingkat RT/RW hingga kecamatan yang harus dipenuhi oleh pemohon

Tabel 2.338
Lama Proses Perijinan Kabupaten Maros

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	SIUP	5	5	5	5	5
2.	TDP	5	5	5	5	5
3.	IUI	5	5	5	5	5
4.	TDI	5	5	5	5	5
5.	IMB	10	10	10	10	10
6.	HO/SITU	5	5	5	5	5
	Rata-Rata	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83

Sumber : DPMPTSP Kab. Maros, 2021



2.4.3.5. Peraturan Daerah (Perda) Yang Mendukung Iklim Usaha

Perda merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan.

Jumlah Perda yang terkait perijinan lalu lintas barang dan ketenaga kerjaan pada tahun 2018 hingga tahun 2020 sebanyak 11 Perda. Pada tahun 2108 telah menge;uarkan Perda terkait tenaga kerja asing.

Tabel 2.339
Peraturan Daerah Yang Mendukung Iklim Usaha Kabupaten Maros

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Perda terkait perijinan	9	9	9	9	9
2.	Jumlah Perda terkait lalu lintas barang dan jasa	1	1	1	1	1
3.	Jumlah Perda terkait ketenagakerjaan	0	0	1	1	1
TOTAL		10	10	11	11	11

Sumber : Bagian Hukum Setda Kab. Maros, 2021

2.4.3.6. Jumlah Pajak dan Retribusi

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Contoh pajak daerah yaitu: pajak penerangan jalan, pajak reklame, dan pajak restoran/hotel.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Contoh retribusi daerah yaitu: retribusi sewa tempat di pasar milik pemda, retribusi kebersihan di pasar milik pemda, retribusi parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemda, dan retribusi sejenis lainnya.

Jumlah pajak yang dipungut selama tahun 2016 hingga tahun 2020 sebanyak 11 jenis pajak, sedangkan untuk retribusi sebanyak 13 jenis retribusi.



Tabel 2.340
Jumlah Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Maros

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pajak	10	10	11	11	11
2.	Jumlah retribusi	14	14	13	13	13
TOTAL		24	24	24	24	24

Sumber : Bpkad Kab Maros, 2021

2.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

2.4.4.1 Rasio Lulusan S1/S2/S3

Rasio lulusan S1/S2/S3 adalah jumlah penduduk yang pendidikan terakhirnya berada pada tingkatan pendidikan tinggi, dibandingkan dengan jumlah penduduk keseluruhan pada wilayah tersebut. Rasio penduduk lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Maros hingga tahun 2016 mencapai 4,83 orang per 1.000 penduduk. Sedangkan pada tahun 2020 rasio lulusan S1/S2/S3 sebesar 5,09.

Masih rendahnya jumlah penduduk dengan lulusan perguruan tinggi di Kabupaten Maros secara umum dapat terlihat dari rata-rata lama sekolah Kabupaten Maros yang masih berada di angka 7 tahun. Penduduk Kabupaten Maros yang berada di wilayah pelosok masih memegang kepercayaan bahwa pendidikan tinggi tidak terlalu penting.

Tabel 2.341
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah lulusan S1/S2/S3	16.570	14.151	14.151	14.576	19.934
2	Jumlah penduduk	342.890	346.383	349.822	353.121	391.774
3	Rasio Lulusan S1/S2/S3	4,83	4,09	4,05	4,13	5,09

Sumber : Disnakertrans Kab. Maros, 2021

2.4.4.2 Rasio Ketergantungan

Tingkat ketergantungan Kabupaten Maros memperlihatkan penduduk usia produktif (15-64) tahun masih lebih banyak dibandingkan penduduk usia non produktif (< 15 tahun dan > 64 tahun). Pada tahun 2016 rasio ketergantungan sebesar 52,42 % kemudian pada tahun 2020 menurun hingga mencapai 46,40 %. Angka Tingkat Ketergantungan menunjukkan bahwa, setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Maros harus menanggung atau membiayai 46-51 orang penduduk usia non produktif. Kondisi tersebut berarti beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang berusia tidak produktif cukup rendah, dan bebannya semakin menurun selama kurun waktu 2016 hingga



2020, atau dengan kata lain Kabupaten Maros masih berada pada kategori bonus demografi.

Tabel 2.342
Rasio Ketergantungan
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penduduk < 15 Tahun	100.100	100.047	99.966	100.533	102.465
2	Penduduk > 64 Tahun	17.823	18.212	18.582	19.471	21.698
3	Penduduk Usia Tidak Produktif	117.923	118.259	118.548	120.004	124.163
4	Penduduk Usia Produktif	224.967	228.124	231.273	233.117	267.611
5	Rasio Ketergantungan	52,42	51,84	51,26	51,48	46,40

Sumber : BPS Kab. Maros, 2021

2.4.4.3 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. 2. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.

Pencapaian SPM Kabupaten MARos belum mencapai target yang dipersyaratkan dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 100 Tahun 2018, dimana target capaian SPM untuk semua indikator dan bidang adalah 100 %. Selama tahun 2018 hingga tahun 2020, capaian SPM Kabupaten Maros hanya sebesar 30 – 33 %. Hal ini disebabkan jumlah sasaran yang berubah-ubah kemudian adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan pelayanan banyak yang tidak berjalan.

Tabel 2.343
Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Bidang	Jumlah Indikator SPM	Jumlah Indikator Mencapai Target SPM		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020
1	Pendidikan	3	1	1	33,33	33,33
2	Kesehatan	12	1	1	8,33	8,33
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2	0	0	0,00	0,00
4	Perumahan Rakyat	2	0	0	0,00	0,00



No	Bidang	Jumlah Indikator SPM	Jumlah Indikator Mencapai Target SPM		Capaian (%)	
			2019	2020	2019	2020
5	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	6	2	3	33,33	50,00
6	Sosial	5	5	5	100,00	100,00
TOTAL		30	9	10	30,00	33,33

Sumber : Bappeda Kab. Maros, 2021

2.4.4.3.1. Pendidikan

Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dasar kepada publik. Pelayanan dasar sendiri merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara. Salah satu bentuk Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Maros yang telah ditetapkan SPMnya adalah Urusan Pendidikan. Jenis pelayanan berupa Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/Kota dan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan pada semua level pendidikan dasar (SD, MI, SMP, MTs).

Tabel 2.344
Pendidikan Dasar SD/MI Kabupaten Maros Tahun

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM		
		2018	2019	2020
Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100%		60,99	71,25 %
Jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%		105,48	103,66 %
Jumlah penduduk usia 7 s/d 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%/ per tahun)	100%		37,83	52,91 %

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Maros, 2021

**2.4.4.3.2 Kesehatan**

Bentuk Pelayanan Dasar lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Maros yang telah ditetapkan SPMnya adalah Urusan Kesehatan. Jenis pelayanan berupa Pelayanan Kesehatan Ibu hamil; Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin; Pelayanan Kesehatan bayi Baru lahir; Pelayanan Kesehatan Balita; Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar; Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif; Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut; Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi; Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM); Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat; Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB); Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV).

Tabel 2.345
Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Kabupaten Maros

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM		
		2018	2019	2020
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	100%		89,19	92,00
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan			91,10	90,00
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir			91,23	90,00
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar			78,24	18,00
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			71,84	40,00
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			34,20	27,00
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar			89,51	85,00
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar			29,12	25,00



Indikator	Target Nasional	Capaian SPM		
		2018	2019	2020
Cakupan penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar			99,95	101,00
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar			83,5	79,00
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan sesuai standar			42,64	34,00
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan dini HIV sesuai standar			92,00	54,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2021

2.4.4.3.3 Pekerjaan Umum

Jenis pelayanan dasar bidang urusan Pekerjaan Umum adalah pemenuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah.

Tabel 2.346
SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun Kabupaten Maros

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM		
		2018	2019	2020
Persentase penduduk/warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%		88,22	90,00
Persentase penduduk/warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic			96,16	69,19

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021

2.4.4.3.4 Perumahan Rakyat

Jenis pelayanan dasar bidang urusan Perumahan Rakyat adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.



Tabel 2.347
SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun Kabupaten Maros

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM		
		2018	2019	2020
Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	100%		-	-
Persentase penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah			-	-

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2021

2.4.4.3.5 Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Jenis pelayanan dasar bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Tabel 2. 348
SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Maros

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM		
		2018	2019	2020
Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100%		70,72	62,70
Persentase warga negara yang berada di kawasan rawan bencana mendapatkan informasi rawan bencana			100	100
Persentase warga negara yang berada di kawasan rawan bencana mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			37,50	100
Persentase warga negara yang berada pada kawasan rawan bencana mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			100	100



Indikator	Target Nasional	Capaian SPM		
		2018	2019	2020
Persentase warga negara yang berada pada kawasan rawan bencana mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			42,45	94,97

Sumber : Satpol PP Kab. Maros, 2021

2.4.4.3.6 Sosial

Bentuk Pelayanan Dasar lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Maros yang telah ditetapkan SPMnya adalah Urusan Sosial. Indikator SPM yang dipersyaratkan untuk Urusan Sosial, diantaranya; rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, rehabilitasi social dasar anak terlantar di luar panti, rehabilitasi social dasar lanjut usia telantar di luar panti, rehabilitasi social dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dan perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.

Tabel 2.349
SPM Urusan Sosial Kabupaten Maros Tahun

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM		
		2018	2019	2020
Persentase penyandang disabilitas telantar yang terpenuhi kebutuhan social dasarnya di luar panti	100%		100	100
Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan social dasarnya di luar panti			100	100
Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			100	100
Persentase tuna social (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti			100	100
Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah			100	100

Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2021



2.5 Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan

Daya dukung lingkungan merupakan batas kondisi kemampuan dari lingkungan untuk dapat menunjang kehidupan manusia. Penentuan daya dukung lingkungan dapat dijadikan sebagai patokan besarnya kemampuan suatu wilayah dengan kondisi lingkungan tertentu dapat mendukung kegiatan atau aktivitas manusia. Kebijakan pembangunan yang didasarkan dengan pertimbangan daya dukung lingkungan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih ramah terhadap lingkungan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalkan.

Banyak metode yang telah dikembangkan dalam menentukan daya dukung lingkungan suatu wilayah. Sampai saat ini metode yang kerap digunakan yaitu metode penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis pada potensi lingkungan seperti kapasitas bioekologi, kapasitas lahan, air, dan udara dalam menyerap karbondioksida. Penentuan daya dukung berbasis potensi terkadang kurang dapat menggambarkan kondisi daya dukung secara komprehensif dan kurang dapat menggambarkan data secara spasial kewilayahan. Hasil penentuan daya dukung lingkungan yang berbasis potensi ini terkadang kurang dapat dimanfaatkan secara tepat guna dalam penentuan kebijakan pembangunan di suatu daerah pada wilayah tertentu. Hal ini terjadi karena penentuan daya dukung berbasis potensi hanya menggambarkan kondisi kapasitas lingkungan berbasis wilayah administrasi saja.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menjawab kelemahan metode daya dukung berbasis potensi yaitu dengan berbasis pada jasa ekosistem. Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem dilakukan dengan mendasarkan pada manfaat yang dapat dihasilkan dari suatu ekosistem. Pendekatan nilai jasa ekosistem dalam perhitungan daya dukung lingkungan didasarkan pada fungsi dari sumberdaya alam dan lingkungan yaitu berbentuk barang (*goods*) dan pelayanan (*services*). Produk berupa barang yang dinilai berupa hasil langsung dari sumberdaya alam dan lingkungan seperti kayu, bahan tambang, minyak, gas, pangan, dan sebagainya. Sedangkan, produk jasa yang dinilai berupa hasil tidak langsung atau disebut pula jasa lingkungan (jasa ekosistem) berupa fungsi lingkungan seperti tata air, iklim, air bersih, biodiversitas, keindahan, kesejukan, dan lain sebagainya. Pendekatan nilai jasa ekosistem yang digunakan dalam perhitungan daya dukung lingkungan dapat dikategorikan dalam empat aspek yaitu:

1. Jasa penyediaan (*provisioning*);
2. Jasa pengaturan (*regulating*);



3. Jasa budaya (*cultural*);
4. Jasa pendukung (*supporting*).

Konsep perhitungan daya dukung lingkungan dengan pendekatan nilai jasa ekosistem dihitung dengan mempertimbangkan dari kondisi penggunaan atau tutupan lahan. Penggunaan atau tutupan lahan inilah yang dipertimbangkan sebagai aspek penilaian jasa ekosistem untuk berbagai aspek perhitungan daya dukung. Asumsi yang digunakan dimana setiap penggunaan lahan memiliki nilai kemampuan tersendiri dalam mendukung berbagai kebutuhan hidup manusia. Nilai kemampuan suatu sumberdaya alam dan lingkungan ditampilkan dalam bentuk nilai indeks jasa ekosistem dengan rentang nilai 0 – 1, dimana semakin mendekati 1 (satu), semakin baik fungsi wilayah dalam menyediakan jasa lingkungan.

Penilaian daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem secara gamblang dapat memperlihatkan kondisi spasial nilai manfaat dari tiap ruang pada suatu wilayah. Sebaran nilai manfaat dari setiap ruang dapat tergambar dengan jelas sehingga dalam penentuan arahan kebijakan pembangunan dapat langsung dioverlaykan untuk mengetahui kecocokan suatu ruang untuk suatu peruntukan lahan. Disamping itu, penilaian jasa ekosistem ini juga menghasilkan nilai manfaat dari suatu ruang baik secara langsung dan tidak langsung yang dapat digunakan dalam penentuan kebijakan pembangunan suatu wilayah. Penentuan kebijakan pembangunan dengan melihat nilai manfaat suatu ruang secara komprehensif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih tepat guna, efektif, dan efisien sehingga pada akhirnya kebijakan pembangunan tidak hanya berkiblat pada nilai ekonomis saja, tetapi juga aspek lingkungan dan sosial kemasyarakatan juga ikut diperhatikan.

Pada laporan ini, kajian daya dukung Kabupaten Maros akan disajikan daya dukung yang berbasis potensi dan jasa ekosistem. Untuk berbasis potensi, daya dukung ditentukan pada kemampuan lahan di Kabupaten Maros. Sementara untuk jasa ekosistem ditentukan melalui penetapan status ketersediaan air di wilayah Kabupaten dengan pendekatan jasa ekosistem.

Kemampuan lahan adalah penilaian lahan secara sistematis berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Kelas kemampuan lahan terbagi atas VIII kelas. Dari kelas I s.d. IV dapat digunakan untuk pertanian, sedangkan dari kelas V s.d. VII untuk padang rumput, kelas VIII sebaiknya secara alami sebagai hutan lindung. Masing-masing kelas dibagi lagi menjadi subkelas yaitu



subkelas erosi, subkelas genangan air, subkelas solum (penghambat perakaran) dan subkelas iklim. Subkelas dapat diuraikan lagi menjadi beberapa unit. Adapun kriteria penggunaan lahan yang diperkenankan pada setiap kelas kemampuan lahan diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.350
Kriteria Penggunaan Lahan Untuk Setiap Kemampuan Lahan

NO	KEMAMPUAN LAHAN	PENGGUNAAN LAHAN YANG DIPERKENANKAN
1	I	Semua jenis penggunaan lahan
2	II	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi
3	III	Semua jenis penggunaan lahan kecuali Psi dan Pi (hanya Psd)
4	IV	Pt, semua jenis penggembalaan, semua jenis hutan
5	V	Semua jenis penggembalaan (Pgi, Pgsd, Pgt), semua jenis hutan
6	VI	Pgsd, Pgt, semua jenis hutan
7	VII	Pgt, hutan
8	VIII	Cagar alam dan hutan lindung

Sumber : Klingebiel dan Montgomery (1961, diringkas) dan Fetton (2014)

Keterangan : Psi= Pertanian sangat intensif; Pi=Pertanian intensif; Psd=pertanian intensif sedang; Pt=Pertanian terbatas; Pgi=Penggembalaan intensif; Pgsd=Penggembalaan sedang; Pgt=Penggembalaan terbatas

1. Kelas I, tanah pada kelas ini memiliki sedikit faktor pembatas dan memiliki resiko kerusakan yang kecil. Jenis tanah pada kelas ini sangat baik dan dapat diusahakan untuk segala jenis pertanian. Tanah ini umumnya relatif datar, bahaya erosi kecil, solum tanah dalam, drainase baik, mudah diolah, penahan air yang baik dan responsif terhadap pemupukan.
2. Kelas II, tanah pada kelas ini mempunyai sedikit faktor pembatas yang dapat mengurangi pilihan penggunaannya atau membutuhkan tindakan konservasi yang sedang. Oleh sebab itu tanah pada kelas ini membutuhkan pengelolaan tanah yang cukup hati-hati meliputi tindakan konservasi, menghindari kerusakan dan memperbaiki hubungan air-udara dalam tanah bila ditanami faktor pembatas dalam kelas ini dapat merupakan satu atau kombinasi dari faktor-faktor lereng landai, kepekaan erosi sedang dan struktur tanah yang kurang baik. Adanya faktor-faktor ini tentu saja memerlukan perhatian yang agak serius jika kita ingin mengusahakan tanah, seperti pengolahan tanah secara kontur, strip cropping, pergiliran tanaman, pemupukan dan pengapuran, dan pembuatan saluran – saluran air.



3. Kelas III, tanah pada kelas ini mempunyai lebih banyak faktor pembatas daripada tanah pada kelas II, dan apabila digunakan untuk usaha pertanian akan memerlukan tindakan konservasi yang serius, yang umumnya lebih sulit baik dalam pelaksanaan maupun pemeliharannya. Faktor – faktor pembatas pada lahan kelas ini dapat berupa lereng yang agak miring, cukup peka terhadap erosi, drainase jelek, permeabilitas tanah sangat lambat, solum dangkal, kapasitas menahan air rendah, kesuburan dan produk aktifitas tanah rendah dan sulit untuk diperbaiki.
4. Kelas IV, tanah pada kelas ini merupakan faktor pembatas yang lebih besar dari pada kelas III, sehingga jenis penggunaan / jenis tanaman yang diusahakan juga sangat terbatas. Tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang cukup curam (15% - 30%), sehingga sangat peka terhadap erosi, drainase nya jelek, solumnya dangkal, dan kapasitas menahan air rendah.
5. Kelas V, tanah pada kelas ini terletak pada tempat yang datar/ agak cekung, selalu basah / tergenang air, atau terlalu banyak batu di atas permukaan tanah. Karena itu tanah pada kelas ini tidak sesuai untuk usaha pertanian tanaman semusim, namun lebih sesuai untuk ditanami dengan vegetasi permanen seperti tanaman makanan ternak/ dihutankan.
6. Kelas VI, tanah pada kelas ini terletak pada daerah yang mempunyai lereng yang cukup curam, sehingga mudah ter-erosi/ telah mengalami erosi yang sangat berat/ mempunyai solum yang sangat dangkal. Tanah pada kelas ini tidak sesuai di jadikan lahan pertanian namun lebih sesuai untuk vegetasi permanen.
7. Kelas VII, tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang cukup curang, telah tererosi berat, solum sangat dangkal dan berbatu. Karena itu tanah ini hanya cocok untuk ditanami dengan vegetasi permanen.
8. Kelas VIII, tanah pada kelas ini terletak pada lereng yang sangat curam, permukaan sangat kasar, tertutup batuan lepas/ batuan singkapan/ tanah pasir pantai. Karena itu tanah pada kelas ini dibiarkan pada keadaan alami dibawah vegetasi alami (cagar alam, hutan lindung, atau tempat rekreasi).

Tabel 2.351
Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Maros

Kelas	Luas (Ha)	Persentase (%)
II	11.340,69	7,81
III	36.454,42	25,10
IV	20.200,16	13,91
V	11.580,30	7,97
VI	47.898,59	33,60
VIII	16.846,60	11,60



Kelas	Luas (Ha)	Persentase (%)
Total	144.320,76	100,00

Sumber : Hasil Analisis Data Tim KLHS RPJMD Tahun 2020

Berdasarkan kriteria tersebut diatas dilakukan analisis kemampuan lahan di Kabupaten Maros. Hasilnya 40,84% luas lahan kelas VI, 21,04% luas lahan kelas V, 15,25% luas lahan kelas VIII, 7,84 % luas lahan kelas II, 8,93% luas lahan kelas III dan 6,11% luas lahan kelas IV. Hasil ini menunjukkan bahwa umumnya lahan di Kabupaten Maros umumnya hanya mampu untuk penggunaan semua jenis pengembalaan sedang, pengembalaan terbatas dan semua jenis hutan, selain itu juga didominasi untuk kegiatan pertanian terbatas, serta sangat sedikit yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian intensif. Berdasarkan kriteria kuantitatif kemampuan lahan dan faktor pembatas, lahan di Kabupaten Maros umumnya mengandung krikil atau batuan dan cenderung sering terjadi banjir serta erosi sedang. Selain itu kondisi drainase lahan sangat buruk sehingga sering tergenang air. Terletak pada lereng yang agak curam, ancaman erosi berat. Hanya cocok untuk padang rumput, hutan produksi terbatas tanpa adanya perlindungan. Sebaiknya dibiarkan secara alami. Adapun kecamatan yang berpotensi untuk pengembangan budidaya pertanian diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 352
Kelas Kemampuan Lahan di Kabupaten Maros

Nama Kecamatan	Luas(Ha)					
	II	III	IV	V	VI	VIII
BANTIMURUNG	0	4.388,04	0	297,64	2.275,60	8.355,07
BONTOA	0	4.957,99	0	337,73	0	643,12
CAMBA	831,09	0	582,08	1.295,38	9.043,71	191,37
CENRANA	68,84	0	7.451,10	2.080,71	10.583,81	223,81
LAU	0	4.676,22	0	20,16	0	0
MALLAWA	452,81	0	0	2.090,20	19.549,12	474,43
MANDAI	1.594,41	2.141,02	0	0	225,21	0
MAROS BARU	0	4.172,08	0	36,24	0	0
MARUSU	1.443,57	2.835,54	0	67,36	0	0
MONCONGLOE	3.057,22	984,79	0	30,84	767,98	0
SIMBANG	0	4.159,50	226,89	359,81	885,07	4.617,80
TANRALILI	2.911,19	4.030,02	106,29	1.026,28	386,87	19,96
TOMPU BULU	779,56	1.780,94	11.833,81	3.937,93	5.070,25	2.321,03
TURIKALE	202,00	2.328,26	0	0	0	0
Grand Total	11.340,69	36.454,42	20.200,16	11.580,30	47.898,59	144.320,76

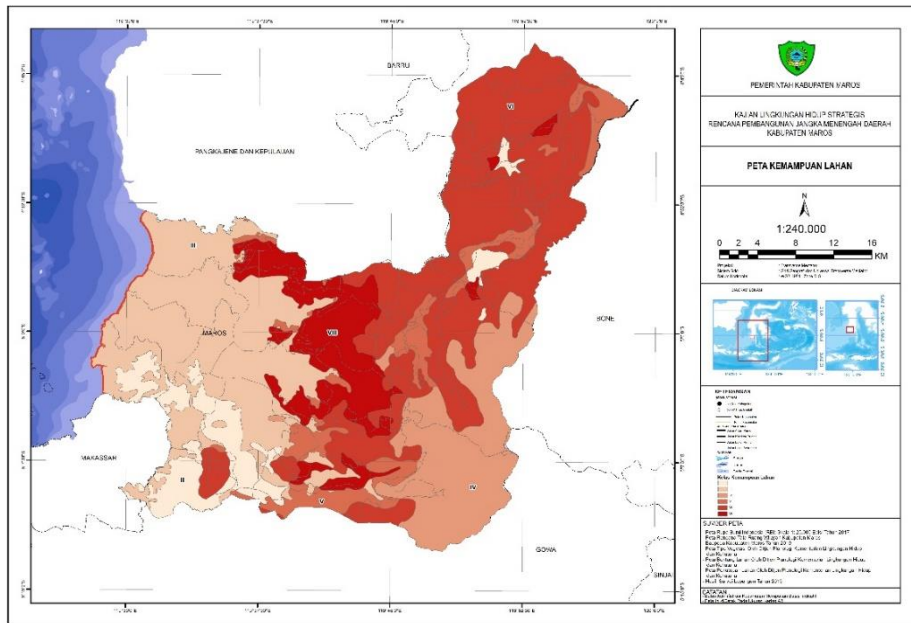
Sumber: Hasil Analisis Data Tim KLHS RPJMD Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, daerah pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh potensi lahan terdapat pada Kecamatan Tompobulu (1.780,93 ha) dan



Kecamatan Bantimurung (4.388,037 ha). Sedangkan untuk Sebagian daerah Kecamatan Mallawa (474.4294 Ha) dan Kecamatan Camba (191,37 Ha) tidak sesuai dijadikan lahan pertanian namun lebih sesuai untuk vegetasi permanen beberapa bagian juga di kecamatan ini diarahkan untuk peruntukan cagar alam, hutan lindung, atau tempat rekreasi.

Gambar 2. 5
Peta Kelas Kemampuan Lahan Kabupaten Maros Tahun 2020



Adapun hasil analisis daya dukung berdasarkan jasa ekosistem yang datanya tersedia adalah daya dukung penyediaan air bersih dan penyediaan pangan. Penentuan ambang batas dihitung berdasarkan jasa ekosistem penyediaan air bersih dengan pendekatan ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) melalui pembangunan model distribusi populasi penduduk resolusi tinggi dengan menggunakan system grid skala ragam. Hasil analisis yang menunjukkan terlampaui atau tidaknya ambang batas penyediaan air bersih dan pangan menggambarkan status daya dukung suatu wilayah.

Penyediaan air bersih di Kabupaten Maros diperlihatkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.353
Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Maros

Kecamatan	Status Air M3/Tahun		
	Kebutuhan	Ketersediaan	Selisih
BANTIMURUNG	4.294.392,90	14.387.581,56	10.093.188,66
BONTOA	1.378.192,19	5.779.035,03	4.400.842,85
CAMBA	2.930.523,32	11.743.218,48	8.812.695,16



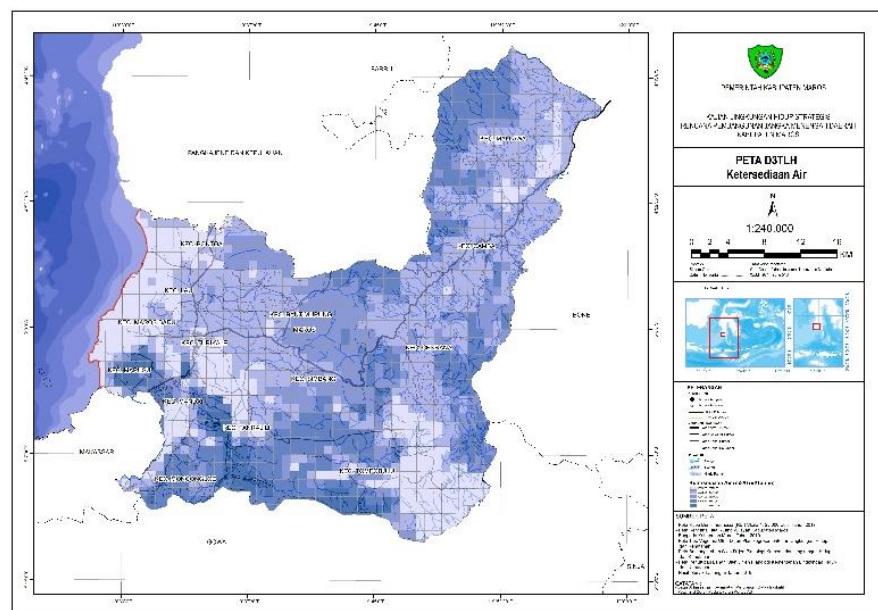
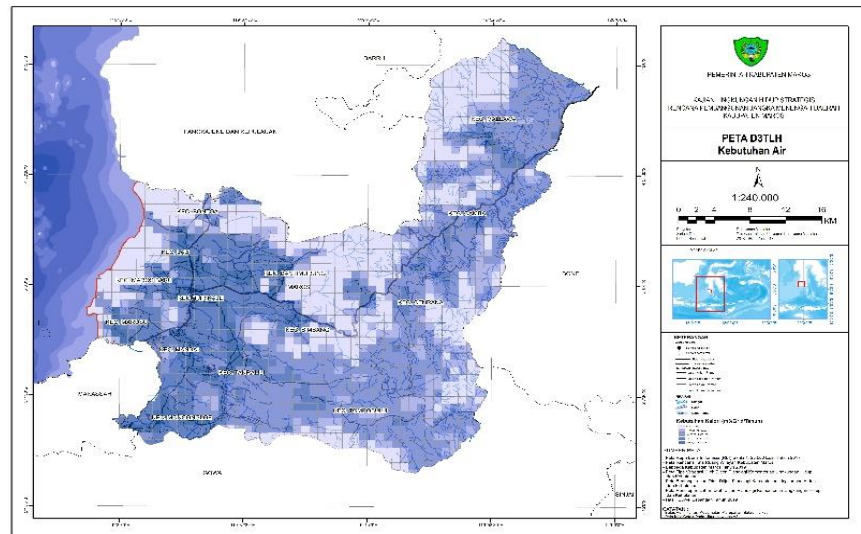
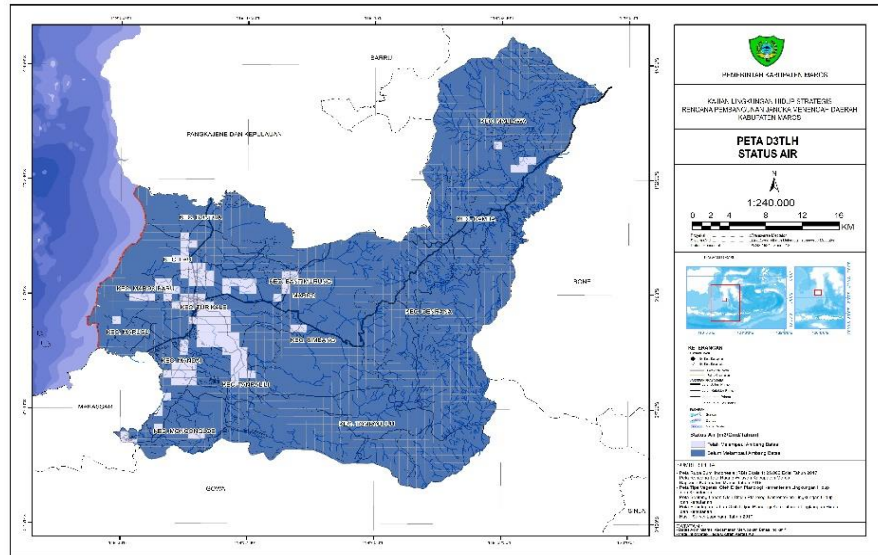
Kecamatan	Status Air M3/Tahun		
	Kebutuhan	Ketersediaan	Selisih
CENRANA	3.967.718,27	19.107.235,78	15.139.517,52
LAU	2.998.555,67	4.570.642,76	1.572.087,09
MALLAWA	5.349.133,04	21.413.136,42	16.064.003,39
MANDAI	3.273.549,59	5.109.859,86	1.836.310,27
MAROS BARU	2.045.505,99	4.137.676,93	2.092.170,94
MARUSU	2.364.303,20	6.974.328,61	4.610.025,41
MONCONGLOE	3.609.295,20	6.046.191,93	2.436.896,73
SIMBANG	3.915.321,42	9.942.721,36	6.027.399,94
TANRALILI	4.892.480,81	10.886.951,32	5.994.470,52
TOMPU BULU	6.292.992,38	23.552.856,53	17.259.864,15
TURIKALE	2.475.422,70	2.992.693,63	517.270,93
Total	53.049.239,43	161.645.898,88	108.596.659,45

Sumber: Hasil Analisis Data Tim KLHS RPJMD Tahun 2019

Hasil kajian daya dukung penyediaan air menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Maros sebesar 594.098.001,00 m³/Tahun, sementara kebutuhan sebesar 40.091.200 m³/Tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 194.006.801 m³/Tahun, hal ini berarti ambang batas daya dukung penyediaan air belum terlampaui. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Mallawa (79.946.090,00 m³/Tahun), dan Cenrana (71.879.608,00 m³/Tahun). Hal ini dapat dipahami dikarenakan Kecamatan tersebut di atas merupakan kecamatan yang tutupan lahannya masih bagus dan masih terdapat banyak kawasan hutan. Sementara untuk selisih antara ketersediaan dan kebutuhan terkecil terdapat pada Kecamatan Mandai (-50342827,00 m³/Tahun).



Gambar 2. 6
Peta Kajian Daya Dukung Penyediaan Air di Kabupaten Maros





Adapun proyeksi kebutuhan air di Kabupaten Maros untuk setiap kecamatannya diperlihatkan pada tabel dibawah. Untuk hasil proyeksi ketersediaan dan kebutuhan air tahun 2020, 2025, 2030, dan 2035 secara umum masih mencukupi dengan pertumbuhan penduduk 1-2%, dengan asumsi ketersediaan air tetap. Pada tahun 2020, 2025 dan 2035 kebutuhan air di Kabupaten Maros masing-masing 416.175.168/Tahun, 432.928.880 m³/Tahun, 450.381.136 m³/Tahun.

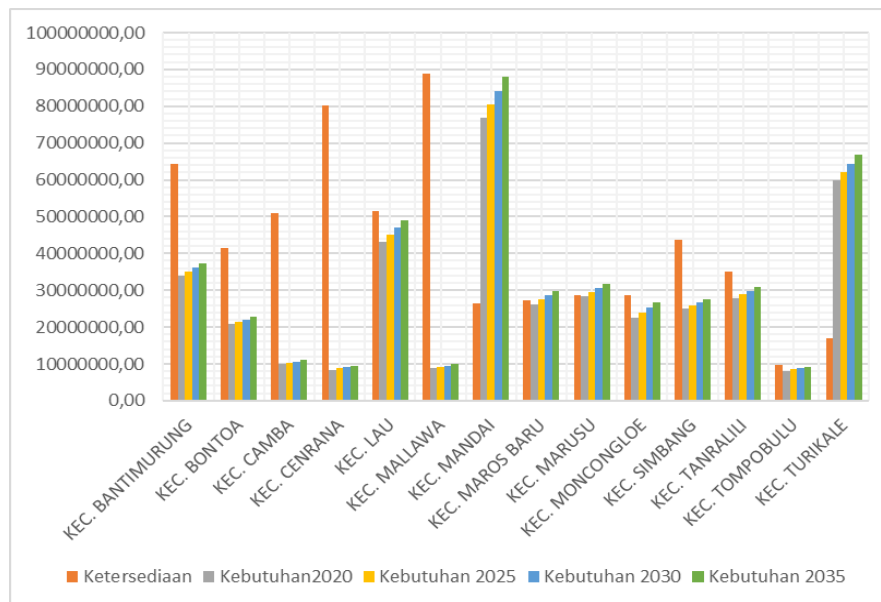
Tabel 2 .356
Proyeksi Daya Dukung Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Maros

Nama Kecamatan	Ketersediaan	Kebutuhan2020	Kebutuhan 2025	Kebutuhan 2030	Kebutuhan 2035
KEC. BANTIMURUNG	64387278,00	33960000,00	35040368	36155096	37305240
KEC. BONTOA	41483596,00	20813600,00	21426480	22057408	22706904
KEC. CAMBA	50887817,00	10092800,00	10383376	10682336	10989864
KEC. CENRANA	80313208,00	8433600,00	8761544	9102152	9456080
KEC. LAU	51512622,00	43144000,00	45018216	46973848	49014416
KEC. MALLAWA	88827690,00	8881600,00	9206488	9543264	9892344
KEC. MANDAI	26497173,00	76840000,00	80420368	84167512	88089312
KEC. MAROS BARU	27346285,00	26285600,00	27426368	28616672	29858608
KEC. MARUSU	28777384,00	28400000,00	29483872	30609104	31777320
KEC. MONCONGLOE	28530573,00	22417600,00	23802000	25271944	26832680
KEC. SIMBANG	43762791,00	25036000,00	25874200	26740456	27635712
KEC. TANRALILI	34984231,00	27864000,00	28830624	29830856	30865704
KEC. TOMPOBULU	9742139,00	8168000,00	8510968	8868400	9240808
KEC. TURIKALE	17045214,00	59754400,00	61990296	64309832	66716144
Grand Total	594098001,00	400091200,00	416175168	432928880	450381136

Sumber: Hasil Analisis Data Tim KLHS RPJMD Tahun 2020

Hasil proyeksi kebutuhan air di Kabupaten Maros menunjukkan bahwa tidak terdapat Kecamatan yang diperkirakan kebutuhannya airnya sudah lebih besar dari ketersediaan airnya pada tahun 2025, 2030, dan 2035 .

Grafik 2. 54
Proyeksi Penyediaan Air di Kabupaten Maros



Adapun hasil kajian ketersediaan pangan juga menunjukkan masih belum melampaui daya dukung penyediaan pangan. Ketersediaan pangan di Kabupaten Maros sebesar 392.464.461.500 kkal/tahun, sementara kebutuhan sebesar 1.272.091.204.544,09 kkal/tahun, sehingga masih terdapat selisih sebesar



879.626.743.044,089 kkal/tahun. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan pangan untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Tompobulu (178.847.940.812,5 kkal/tahun), Kecamatan Mallawa (149.954.795.534,55 kkal/tahun) dan Kecamatan Cenrana (143.334.566.105,45 /tahun).

Tabel 2. 357
Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Pangan di Kabupaten Maros Tahun 2020

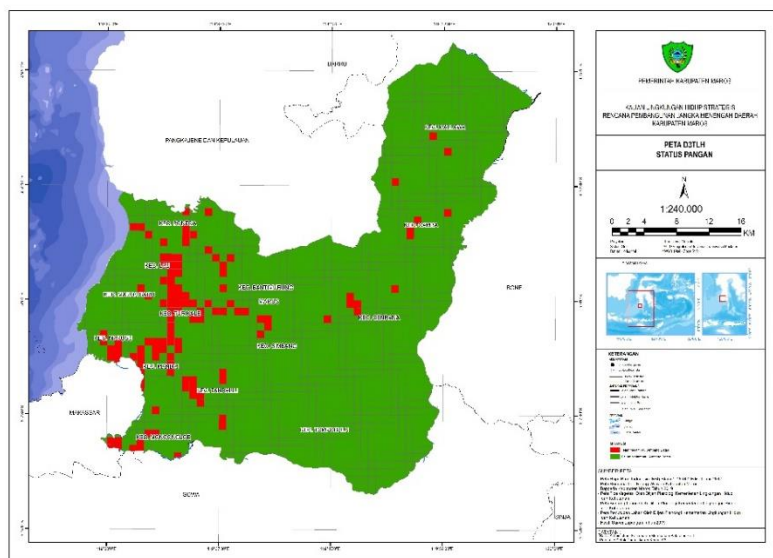
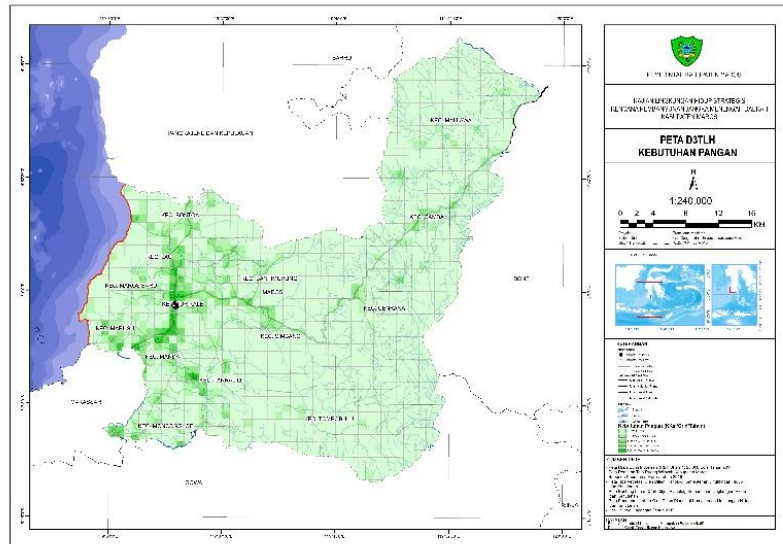
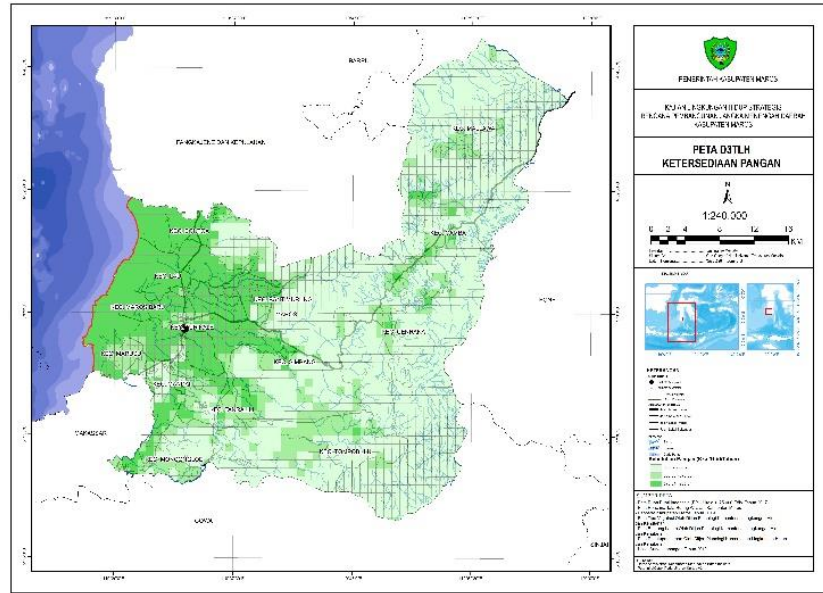
Kecamatan	Pangan (Kkal/Jiwa)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
Kec. Bantimurung	33.312.637.500	128.683.771.317	95.371.133.817
Kec. Bontoa	20.416.840.750	75.952.745.430	55.535.904.680
Kec. Camba	9.900.406.000	93.652.465.166	83.752.059.166
Kec. Cenrana	8.272.834.500	151.607.400.605	143.334.566.105
Kec. Lau	42.321.567.500	65.552.164.672	23.230.597.172
Kec. Mallawa	8.712.294.500	158.667.090.035	149.954.795.535
Kec. Mandai	75.375.237.500	49.202.810.081	-26.172.427.419
Kec. Maros Baru	25.784.530.750	55.770.569.144	29.986.038.394
Kec. Marusu	27.858.625.000	51.191.707.357	23.333.082.357
Kec. Moncongloe	21.990.264.500	49.500.900.336	27.510.635.836
Kec. Simbang	24.558.751.250	93.328.312.375	68.769.561.125
Kec. Tanralili	27.332.842.500	74.250.536.050	46.917.693.550
Kec. Tompobulu	8.012.297.500	186.860.238.313	178.847.940.813
Kec. Turikale	58.615.331.750	37.870.493.663	-20.744.838.087
TOTAL	392.464.461.500	1.272.091.204.544	879.626.743.044

Sumber: Hasil Analisis Data Tim KLHS RPJMD Tahun 2020

Hal ini menunjukkan bahwa daerah Tompobulu, Mallawa dan Cenrana dalam pengembangannya tetap diarahkan sebagai sumber produksi pangan untuk Kabupaten Maros secara umum. Sementara untuk selisih antara ketersediaan dan kebutuhan pangan terkecil terdapat pada Kecamatan Mandai (-26.172.427.418,81 kkal/tahun). Untuk Kecamatan Turikale merupakan pusat perkotaan dimana jumlah penduduknya paling besar sehingga kebutuhan pangan juga akan besar.



Gambar 2. 8
ePeta Kajian Daya Dukung Penyediaan Pangan di Kabupaten Maros





2.6. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sesuai dengan pembagian wewenang yang diatur dalam UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten memiliki wewenang sebanyak 220 indikator capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pemerintah Kabupaten Maros hanya memiliki 201 target indikator yang akan dicapai. Berdasarkan hasil analisis data, kategori capaian TPB Kabupaten Maros terbagi atas 4 (empat) kategori, yaitu:

- A. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
- B. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target
- C. Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target
- D. Indikator TPB yang belum/tidak memiliki data

Dari hasil pengolahan data, terlihat bahwa Indikator TPB Kabupaten Maros yang telah dilaksanakan dan mencapai target adalah 43% atau sebanyak 87 indikator, dari total 201 indikator yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Maros. Sementara itu, sebanyak 24% (49 indikator) telah dilaksanakan, namun belum mencapai target. Sebanyak 5 indikator atau 3% dari total indikator TPB masih belum terlaksana dan belum mencapai target, serta sebanyak 30% atau 60 indikator belum/tidak memiliki data. Persentase perbandingan capaian indikator TPB Kabupaten Maros secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2.9 dan Tabel 2.358 Dibawah ini

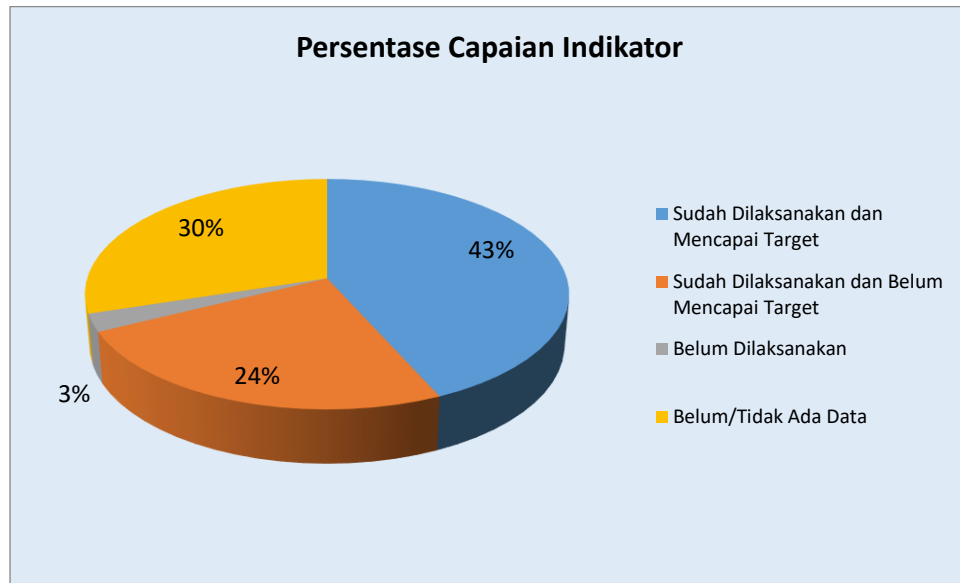
Tabel 2.358
Capaian Indikator TPB Kabupaten Maros

No	Kategori Indikator	Capaian Indikator	% Jumlah Indikator
1	A	87	43,28
2	B	49	24,38
3	C	5	2,49
4	D	60	29,85
Total Indikator		201	100

Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS



Grafik 2. 55
Presentase Capaian Indikator TPB Kabupaten Maros



Jika dilihat berdasarkan jumlah indikatornya, TPB yang paling banyak mencapai target nasional adalah TPB 3 (Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia) sebanyak 17 indikator. Untuk kategori indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target, TPB 1 (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun) memiliki jumlah yang paling banyak, yakni 9 indikator. Sementara pada indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target, TPB 7 (Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua) dengan 2 indikator. Selain itu, pada kategori indikator TPB yang belum/tidak memiliki data, TPB 6 (Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan) memiliki jumlah terbanyak yaitu 11 Indikator. Untuk lebih jelasnya, jumlah indikator TPB pada masing-masing kategori tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.359
Capaian Jumlah Indikator TPB Terhadap Target Nasional Kabupaten Maros

NO. TPB	TUJUAN TPB	Dilaksanakan dan Mencapai Target	Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	Belum Memiliki Data	Jumlah
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	10	9	1	2	22
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta	4	1	-	6	11



NO. TPB	TUJUAN TPB	Dilaksanakan dan Mencapai Target	Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	Belum Memiliki Data	Jumlah
	Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan					
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	17	7	-	8	32
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	3	5	-	5	13
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	7	7	-	-	14
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	3	2	-	11	16
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	0	-	2	-	2
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	4	4	1	8	17
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	3	4	-	2	9
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	7	1	-	2	10
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	4	3	-	1	8



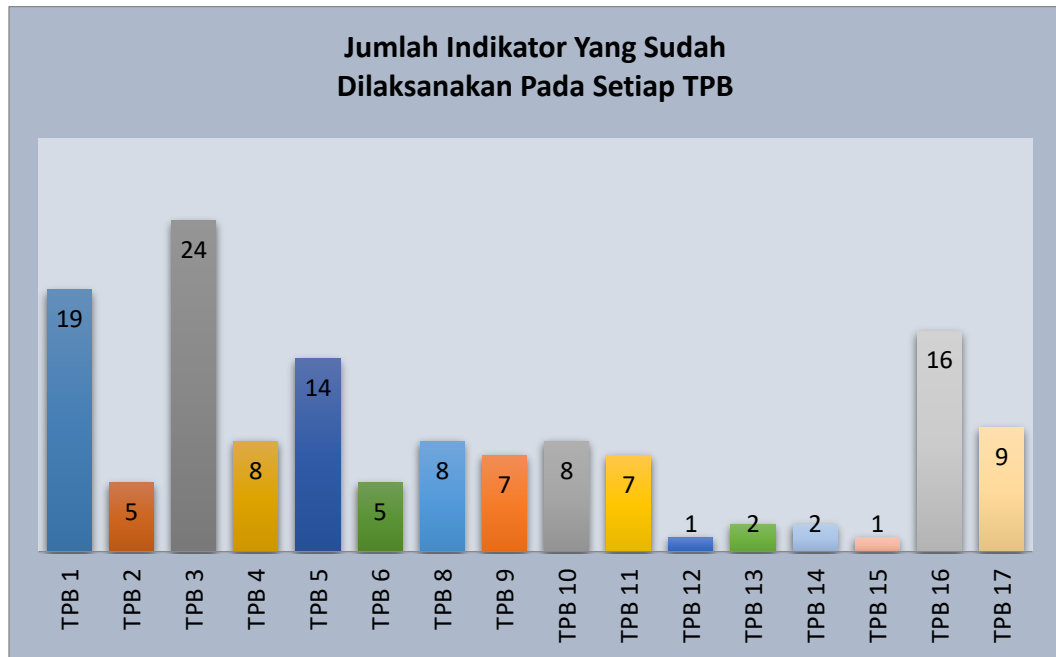
NO. TPB	TUJUAN TPB	Dilaksanakan dan Mencapai Target	Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	Belum Memiliki Data	Jumlah
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	1	-	-	2	3
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	1	1	-	-	2
14	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber	2	-	-	1	3
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	-	1	1	1	3
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	13	3	-	5	21
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	8	1	-	6	15
Jumlah		87	49	5	60	201

Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS

Dari total 201 indikator TPB yang menjadi wewenang Kabupaten Maros, jumlah indikator yang telah dilaksanakan secara keseluruhan adalah 136 indikator, dimana TPB 3 yang paling banyak telah dilaksanakan yaitu 24 indikator.



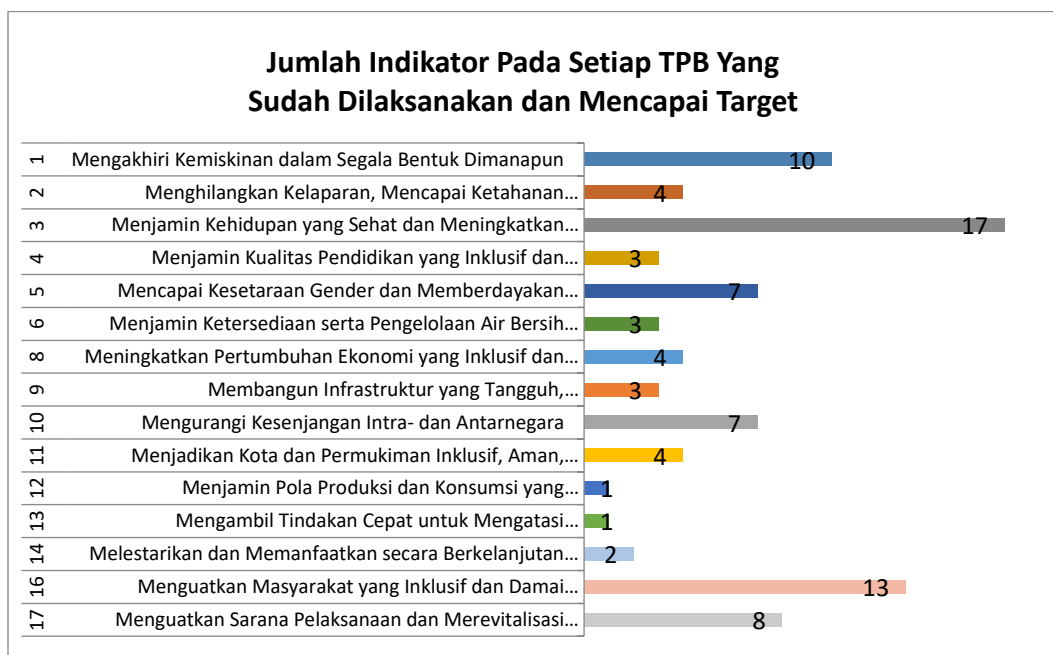
Grafik 2.56
Jumlah Indikator yang Sudah Dilaksanakan Pada Setiap TPB



2.6.1 Indikator Terlaksana dan Mencapai Target

Jumlah indikator TPB yang sudah terlaksana dan mencapai target di Kabupaten Maros sebanyak 87 indikator dari total 201 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Maros. Berdasarkan hasil analisis data, terlihat bahwa TPB yang telah dilaksanakan dan mencapai target dengan jumlah keberhasilan paling banyak yakni TPB 3 (Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia) mencapai 17 indikator.

Grafik 2.57
Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target





Dilihat dari grafik terlihat bahwa Kabupaten Maros telah melaksanakan 15 TPB dengan jumlah total indikator sebanyak 87 dan telah mencapai target nasional. Seluruh indikator yang telah dilaksanakan dan mencapai target tersebut, sepatutnya dipertahankan bahkan bisa lebih ditingkatkan lagi demi tercapainya pembangunan keberlanjutan di Kabupaten Maros.



Tabel 2.360
Realisasi Capaian Indikator TPB Yang Terlaksana dan Mencapai Target

NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR		
1	1.2	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	9,89	10
	1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 95%	96,5	
			1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat menjadi 17,12%	20	
	1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 70%	100	
			1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkat menjadi 63%.	95,88	



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR		
	atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	65,29		
		1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 94,78%	102,9		
		1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 82,2%	108,57		
	1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 81,5 ribu		411 rb
		1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	Ada		
2	2.2	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun	0,215	4



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR	
	yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Menurun		
		2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurun menjadi 28%	0,3265	
		2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat menjadi 50%	64,97	
3	3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurun menjadi 306	3 Kasus
			3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 85 %	100
	3.2	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	4,7 / 1000 KH
			3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	2,9 / 1000 KH
			3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 24	4,4 / 1000 KH
			3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkat menjadi 95%	95,5
	3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis,	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurun menjadi <0,5%	0,0005
					17	



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR	
	malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurun menjadi 245	111 / 100.000 pddk	
		3.3.3.(a)	Jumlah kecamatan yang mencapai eliminasi malaria.	Meningkat menjadi 300	14	
3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun.	Menurun menjadi 5,4%	1,106826263	
3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkat menjadi 66%	65,29	
		3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	65,29	



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR	
		3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38	36	
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkat	965 / 1000 pddk	
		3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkat menjadi minimal 95%	96,5	



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR		
	3.b	Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat	1	



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR	
	3.c	Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Meningkat	1	
4	4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1.(a) Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 84,2%	98,37	3
			4.1.1.(b) Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 81%	92	
	4.6	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	Meningkat menjadi 96,1%	99,23	
5	5.1	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.	5.1.1* Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	bertambah sebanyak 16	25	7



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR	
	5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	46
			5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkat menjadi 70%	100
	5.3	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun	23
			5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkat menjadi 21 tahun	21
		5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38 tahun	22	



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR		
	5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkat	19	
6	6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	103	3
			6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat	26	



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR		
	6.3	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat	50	
8	8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	64,33	4



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR	
	8.5	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun	0,0471
	8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	517.342
			8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkat	193.950 Juta
9	9.2	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Meningkat	3724700
			9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	2216974,4
					3	



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR		
	9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	9.c.1.(b) Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	Meningkat		
10	10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	9,89	7
			10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	80 Kabupaten (skala nasional)	66	
			10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Berkurang sebanyak 5.000 desa (skala nasional)	9	
			10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Meningkat paling sedikit 2.000 desa	5	
			10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	Meningkat	0,589859125	



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR		
	10.2	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Menurun	9,89	
	10.3	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	Ada	
11	11.1	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	3,7 juta rumah tangga	5,5	4
	11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun menjadi 30%	147	



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR		
		kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	ada	63	
	11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80%	89,03	
12	12.5	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari (skala nasional)	84,7 Ton	1
13	13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	Ada	1



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR	
14	14.4	Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.	14.4.1* Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Meningkat menjadi 6.982.560 ton (skala nasional)	21680,5	2
	14.b	Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.	14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi.	Meningkat	804	
16	16.1	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan	16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Menurun	1	13



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR		
	terkait angka kematian dimanapun.	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Menurun	-		
		16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	138		
		16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkat	0,997		
	16.2	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Menurun		2
			16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurun		0,21
			16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun		5



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR	
	16.6	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat	0,9392
			16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%	WTP
			16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%	B
	16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkat	25,71
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkat menjadi 77,4%	85	



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR		
	16.b	Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	1	
17	17.1	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat	16	8
			17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	Di atas 12%	0,0109	
			17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat	0,0109	
	17.2	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Meningkat	0,8667	
			17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Meningkat	1	



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR	
	lainnya yang relevan dengan konteks nasional.					
17.2	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	ada	Tersedia Data Base	



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR		
	17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi	Meningkat	



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR		
	17.8	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Meningkat	Meningkat	

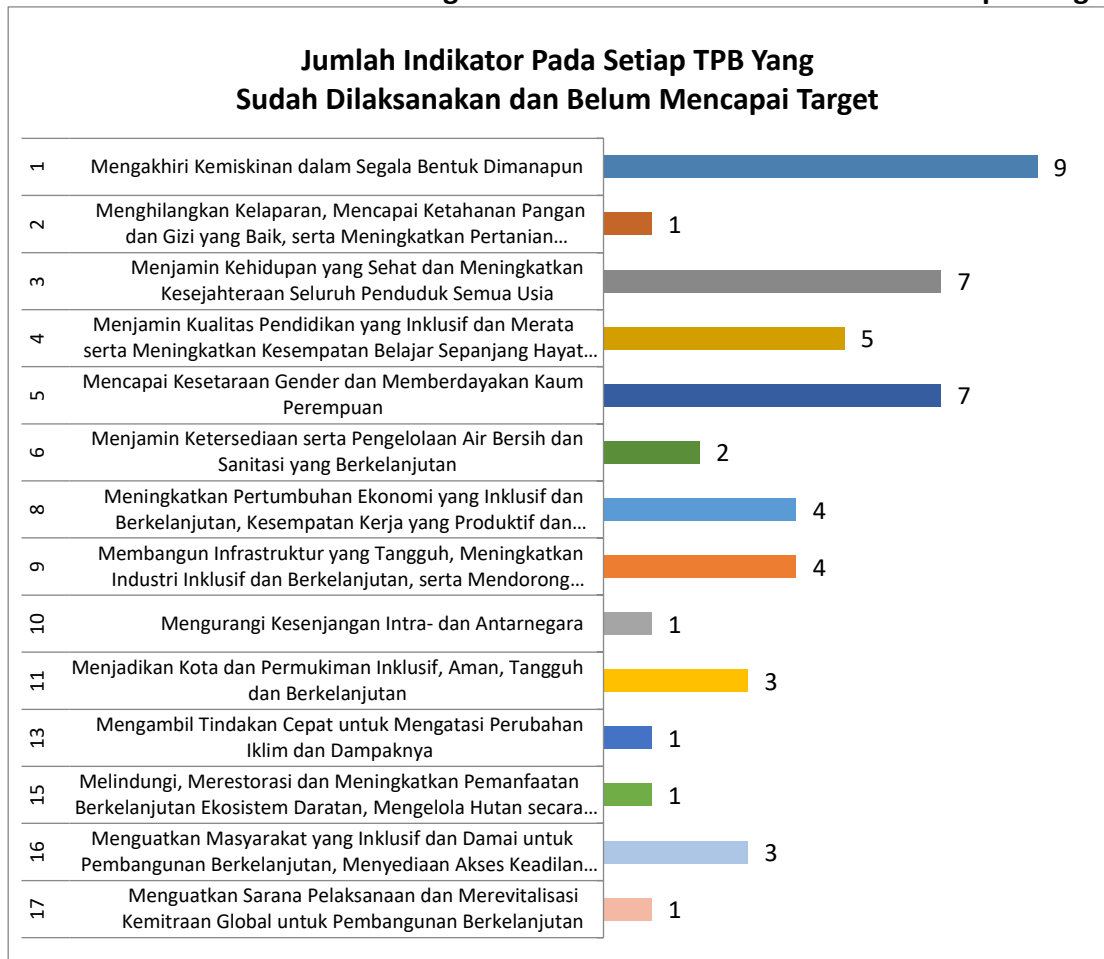
Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS



2.6.2 Indikator Terlaksana dan Belum Mencapai Target

Jumlah indikator TPB yang terlaksana namun belum mencapai target di Kabupaten Maros sebanyak 49 indikator dari total 201 indikator atau 24%. Dari **Grafik 2.**, dapat dilihat bahwa TPB 1 (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun) merupakan TPB terbanyak dengan 9 indikator.

Grafik 2.58
Indikator TPB Yang Sudah Dilaksanakan Dan Belum Mencapai Target



Dari grafik diatas, terlihat bahwa jumlah TPB yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional di Kabupaten Maros adalah sebanyak 14 TPB atau 24% dari jumlah indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Maros. Hal ini menunjukkan bahwa, Pemerintah Kabupaten Maros memerlukan upaya-upaya tambahan demi mencapai target nasional di masa depan. Gambaran mengenai realisasi capaian indikator TPB yang sudah terlaksana namun belum mencapai target, dapat dilihat pada **Tabel 2.361**.



Tabel 2.361
Realisasi Capaian Indikator TPB Yang Terlaksana dan Belum Mencapai Target

NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR	
1	1.3	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurun menjadi 2,8 juta	13880
	1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	76,56
			1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	91,07
			1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Meningkat menjadi 77,4%.	72
1.5	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	6	



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR	
	mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkat menjadi 39 daerah	0	
		1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 151 ribu	400	
		1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	422 milyar	
	1.a	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat	



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR		
2	2.1	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurun menjadi 17%	17,3	1
3	3.1	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%	89,11	7
	3.3	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menurun	0,201859175	
	3.4	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan,	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurun menjadi 24,3%	28,38	
3.4.1.(c)			Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	Menurun	0,5926		



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR		
		serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.					
	3.7	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.		Meningkat menjadi 23,5%	20,72
			3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).		Menurun menjadi 2,28	2,43
3.8	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurun menjadi 9,91%	14,49		
4	4.1	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Meningkat menjadi 114,09%	109,6	
			4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	105,31	



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR
	pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.				
4.2	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkat menjadi 77,2%	61,46
4.5	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Meningkat	105,31



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR		
	4.c	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat	65,22	
5	5.2	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	21	7
			5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	9	



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR	
	5.5	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat	804
	5.6	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Meningkat	41,958
			5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurun menjadi 9,9%	14,49
			5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi 85%	65,54



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR		
	5.b	Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat	Meningkat	
6	6.1	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	76,56	2
	6.2	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%	91,07	



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR		
8	8.1	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	1,24	4
	8.3	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	0,25	0,2077	
	8.9	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkat menjadi 8%	0,33	
			8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	1293	



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR	
9	9.1	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Meningkat	1
	9.3	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat	16,4
	9.c	Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet di negara-negara	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Meningkat	Meningkat
			9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat	Meningkat
					4	



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR		
		kurang berkembang pada tahun 2020.					
10	10.1	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1* Koefisien Gini.	Menurun menjadi 0,36	0,382	1	
11	11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	6	3
			11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	422 milyar	



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR		
	11.b	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	ada	Ada	
13	13.1	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	6	1



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR		
15	15.1	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan vegetasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkat	48,99	1
16	16.7	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat	7,14	3
	16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Meningkat	0,81	
			16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkat menjadi 85%	72	



NO. TPB	TARGET	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	CAPAIAN	TOTAL INDIKATOR		
17	17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	Meningkat	1

Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS



2.7. Hasil Evaluasi Indikator Kinerja Daerah RPJMD Periode 2016-2021

RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi RPJMD periode tahun 2016-2021. Evaluasi capaian kinerja RPJMD pada tahun 2016-2021 ditunjukkan dengan capaian indikator kinerja daerah Kabupaten Maros yang terbagi atas Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah.

Pada evaluasi tersebut status pencapaian kinerja yang dijabarkan dalam evaluasi hasil RPJMD terdiri dari 3 kategori yaitu tercapai, tidak tercapai dan melewati. Rekapitulasi indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten MARos tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
		TARGET KINERJA RPJMD 2016-2021					REALISASI KINERJA RPJMD 2016-2021				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT											
1	Pertumbuhan PDRB	9,5	6,81	7,5	7,58	7,66	9,50	6,81	6,19	1,24	-10,87
2	Laju Inflasi	3,18	3,14	3,47	3,03	3,00	3,18	3,14	3,47	2,43	2,13
3	PDRB Per Kapita	52,12	56,16	65,85	77,38	91,12	52,09	56,12	60,92	64,33	52,28
4	Indeks Gini	0,39	0,40	0,30	0,29	0,29	0,41	0,37	0,33	0,38	0,37
7	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	88,59	88,9	89,21	89,5	89,79	88,59	88,90	89,69	90,11	90,26
10	Indeks Pembangunan Manusia	67,76	68,43	69,11	69,8	70,49	67,76	68,43	68,94	69,50	69,86
11	Angka Melek Huruf	90,01	88,78	99,2	100	100	90,15	86,78	87,13	87,48	89,21
12	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	12,96	13,1	13,23	13,37	13,51	12,96	13,10	13,23	13,37	13,51
13	Angka Usia Harapan Hidup	68,58	68,6	68,62	68,64	68,66	68,58	68,60	68,62	68,64	68,66
14	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
15	Prevelnsi Balita Gizi Kurang	0,83	0,80	0,76	0,73	0,71	0,83	0,80	0,63	0,61	0,58
16	Cakupan Desa Siaga Aktif	79,61	90,29	91,26	93,2	95,15	79,61	90,29	91,26	93,20	95,15
18	Tingkat Aprtisipasi Angkatan Kerja	71,43	62,6	64,33	66,17	68,12	-	62,60	60,53	63,62	62,43
19	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,73	6,85	6,19	6,09	5,79	-	6,85	6,19	4,71	6,28
20	Rasio Penduduk Bekerja	93,27	93,15	93,54	93,91	94,21	-	93,15	93,81	95,29	80,84
21	Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja	74,39	89,53	95,82	102,6	110,81	53,14	56,04	55,33	54,85	45,89



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
		TARGET KINERJA RPJMD 2016-2021					REALISASI KINERJA RPJMD 2016-2021				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
22	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap penduduk Usia 15 Tahun Ke atas	93,27	93,15	93,54	93,91	94,21	93,27	93,15	93,54	93,91	94,21
23	Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebeas Keluarga Terhadap Total Kesempatan kerja	38,15	43,47	43,53	43,59	44,03	38,15	43,47	43,53	43,59	44,03
24	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	66,79	51,8	36,99	28,32	21,67	66,79	51,80	36,99	28,32	21,67
26	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	12,82	15,00	16,41	17,94	19,62	12,93	14,55	14,68	17,83	16,45
27	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29	Penguatan Cadangan Pangan	100	100	100	100	100	247.663,00	243.578,00	248.450,00	250.314,00	191.232,00
31	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	0,28	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28	0,27	0,30	0,33	0,49
33	Produksi Sektor Pertanian	10.431.218	11.053.650	11.704.318	12.464.951	13.242.824	943.666	945.658	956.016	958.486	462.557
34	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras Terhadap PDRB	0,1	0,09	0,1	0,11	0,12	0,001	0,001	0,001	0,001	0,003
35	Produksi Sektor Perkebunan	3.011,10	3.131,54	3.256,81	3.387,08	3.522,56	3.011,10	3.131,54	3.256,81	3.387,08	3.522,56
36	Kontribusi Produksi Kelompok Tani Terhadap PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
		TARGET KINERJA RPJMD 2016-2021					REALISASI KINERJA RPJMD 2016-2021				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
39	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	0,3	0,32	0,33	0,35	0,37	0,30	0,32	0,36	0,36	0,55
40	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	41,15	42,00	42,56	43,06	43,5	6,24	6,60	6,43	6,45	9,45
41	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	2,57	2,66	2,7	2,73	2,75	2,53	2,59	2,69	2,92	4,27
42	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	18,16	18,36	18,44	18,5	18,54	18,17	18,37	17,09	16,40	18,94
44	Pertumbuhan Industri	31,68	-4,55	2,06	2,06	2,06	46,36	-4,35	2,10	-43,08	54,19
45	Kontribusi Transmigrasi Terhadap PDRB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASPEK DAYA SAING DAERAH											
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	11,81	11,38	12,27	13,23	14,27	1.012.797	994.877	1.094.365	1.102.522	1.118.798
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	55,62	51,74	52,21	52,69	53,17	55,62	51,74	52,21	57,53	51,58
4	Produktivitas Total Daerah	74,39	89,53	95,82	102,6	110,81		89,53	91,41	86,21	73,50
5	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	2,50	2,50	6,25	6,25	2,50
6	Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	19,58	17,96	15,22	12,9	11,04	23,26	22,27	23,00	20,17	19,93



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
		TARGET KINERJA RPJMD 2016-2021					REALISASI KINERJA RPJMD 2016-2021				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
9	Angka Kriminalitas Yang tertangani	18,75	17,00	16,00	15,05	14,18	18,75	18,88	17,76	16,71	14,31
10	Rasio Ketergantungan	52,42	52,03	51,72	51,48	51,25	52,42	52,03	51,72	51,48	51,25
ASPEK PELAYANAN UMUM											
I	LAYANAN URUSAN WAJIB										
I.A	URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR										
1	PENDIDIKAN										
	Pendidikan Anak Usia Dini	0	0	0	0	0	36,74	37,56	37,78	38,02	36,94
1.1	Angka partisipasi kasar	119,46	112,6	116,97	121,49	126,12	97,61	96,00	93,91	89,25	89,56
1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	93,16	97,34	99,74	99,95	100	91,12	91,27	91,02	90,72	99,42
1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	74,97	74,63	72,13	73,57	75,04	57,11	58,52	58,81	66,44	72,92
1.7	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	99,29	99,68	99,74	100	100	94,77	94,90	94,71	96,27	100,00
1.8	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	96,37	95,44	96,42	97,09	97,77	76,97	77,17	77,26	76,80	77,34
1.10	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,03	0,03	0,26	0,29
1.11	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,50	0,06	0,07	0,11
1.13	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,64	99,94	98,74	99,4	99,69	99,64	99,94	98,74	95,88	100,00
1.14	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,11	99,92	99,86	99,89	99,94	99,11	99,92	99,86	99,89	100,00



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
		TARGET KINERJA RPJMD 2016-2021					REALISASI KINERJA RPJMD 2016-2021				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.16	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs						103,21	99,92	92,35	108,05	110,3
1.17	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA						86,88	87,3	93,9	80,27	78,54
1.18	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	98,73	99,31	99,65	100	100	92,36	95,49	96,58	95,36	96,23
1.19	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	69,18	98,29	99,15	100	100	89,57	90,41	93,15	91,30	94,74
1.20	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	76,1	75,07	75,61	75,38	75,17	63,96	51,87	48,49	42,55	49,82
1.21	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	648,87	644,3	622,64	638,74	656,3	890,05	821,14	798,16	635,70	751,43
1.22	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	66,57	66,58	64,17	66,07	68,14	82,60	74,34	72,82	60,39	58,85
1.25	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan Laki - Laki	95,55	96,86	97,13	97,48	97,79	95,55	96,86	97,13	99,96	99,96
1.26	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	90,01	88,78	99,2	100	100	99,99	99,98	99,79	99,23	99,80
1.27	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	22,61	46,08	52,88	53,38	53,89	22,61	64,28	93,43	85,58	88,87



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
		TARGET KINERJA RPJMD 2016-2021					REALISASI KINERJA RPJMD 2016-2021				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
2	KESEHATAN										
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	8,32	7,09	5,42	5,31	5,17	8,32	7,09	5,42	4,46	3,11
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi	991,68	992,91	994,58	994,69	994,83	991,68	992,91	993,74	995,81	996,89
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	8,85	7,45	5,7	5,59	5,45	8,85	7,45	5,70	4,76	3,11
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	6,02	5,85	4,45	4,33	4,19	6,02	5,85	4,45	2,98	2,82
2.5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	88,5	106,42	69,52	55,62	41,71	88,50	106,42	69,52	44,64	56,49
2.6	Rasio posyandu per satuan balita	7,95	7,95	9,56	9,66	9,71	7,95	7,95	9,56	11,75	11,99
2.7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,12	0,12	0,11	0,16	0,19	0,12	0,12	0,14	0,14	0,19
2.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2.9	Rasio dokter per satuan penduduk	0,28	0,25	0,25	0,42	0,56	0,28	0,25	0,25	0,10	0,10
2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	53,82	65,8	62,91	73,25	83,35	53,82	65,80	62,91	100,00	100,00
2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang	93,86	93,07	79,94	85,7	91,03	93,86	93,07	79,94	99,99	94,72



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
		TARGET KINERJA RPJMD 2016-2021					REALISASI KINERJA RPJMD 2016-2021				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	memiliki kompetensi kebidanan										
2.13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	82,52	79,61	100	100	100	82,52	79,61	100,00	91,26	67,96
2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	85,71	100,00	100,00	100,00	100,00
2.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	113,96	91,10	95,00	95,00	95,00	113,96	91,10	95,00	95,63	93,82
2.17	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,01
2.18	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	4,77	7,31	7,69	8,97	11,11	4,77	7,31	7,69	24,14	13,50
2.19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	20,03	20,12	20,68	30,89	32,9	20,03	20,12	20,68	40,45	27,30
2.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	103,82	127,03	295,29	278,66	258,57	103,82	127,03	295,29	192,10	116,46
2.21	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	6,42	5,20	4,29	2,83	1,40	6,42	5,20	4,29	0,01	6,99



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
		TARGET KINERJA RPJMD 2016-2021					REALISASI KINERJA RPJMD 2016-2021				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
2.22	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	82,14	53,15	72,2	100	100	82,14	53,15	72,20	100,00	100,00
2.23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	82,14	53,15	72,2	100	100	82,14	53,15	72,20	100,00	100,00
2.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.25	Penderita diare yang ditangani	31,58	32,9	31,76	31,81	31,89	31,58	32,90	31,76	78,02	39,62
2.26	Angka kejadian Malaria	20,12	55,72	43,74	50,48	50,53	20,12	55,72	43,74	22,30	20,00
2.27	Tingkat kematian akibat malaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.28	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.29	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	0	0,52	0	0	0	0,00	0,52	0,00	100,00	0,00
2.30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01
2.32	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan	0	1,58	85,00	85,00	85,00	0,00	1,58	4,55	4,66	7,11



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
		TARGET KINERJA RPJMD 2016-2021					REALISASI KINERJA RPJMD 2016-2021				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	komprehensif tentang HIV/AIDS										
2.34	Cakupan kunjungan bayi	96,93	90,15	76,64	82,36	87,85	96,93	92,86	84,48	100,00	95,74
2.35	Cakupan puskesmas	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.36	Cakupan pembantu puskesmas	25,24	25,24	25,24	25,24	25,24	25,24	25,24	25,24	30,10	40,78
2.37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	85,64	91,02	78,06	83,57	88,65	85,64	91,02	78,06	89,21	91,59
2.38	Cakupan pelayanan nifas	93,83	91,82	78,69	84,45	89,77	93,83	91,82	78,69	100,00	99,93
2.39	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	46,39	65,32	80,17	80,15	80,15	4,10	3,91	85,90	81,08	91,48
2.40	Cakupan pelayanan anak balita	52,02	65,95	100	100	100	52,02	65,95	100,00	100,00	100,00
2.41	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	88,49	86,95	86,9	86,95	86,92	4,10	3,91	85,90	81,08	91,48
2.45	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0	100	100	100	100,00	80,00	40,00	80,00	30,00	0,00
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
		TARGET KINERJA RPJMD 2016-2021					REALISASI KINERJA RPJMD 2016-2021				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (termasuk jalan propinsi dan nasional)	0,52	0,66	0,68	0,7	0,73	0,52	0,66	0,59	0,69	0,76
3.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,004	0,003	0,003	0,003	0,003	0,004	0,003	0,003	0,003	0,003
3.3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	19,80	16,20	13,09	12,80
3.4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	47,23	61,87	64,39	66,83	69,45	47,23	61,87	64,39	79,35	81,99
3.5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	1,23	1,54	1,54	1,54	1,54	1,23	1,54	1,54	1,54	1,54
3.6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57	15,57	15,45	15,31	15,18
3.7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	67,13	69,08	70,96	73,1	75,18	67,13	69,08	70,96	73,10	94,35
3.11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan	n/a	n/a	n/a	9,89	18,16	2,52	3,58	4,41	9,89	18,16



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
		TARGET KINERJA RPJMD 2016-2021					REALISASI KINERJA RPJMD 2016-2021				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	penghubung dan aliran sungai rawan longsor										
3.12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	27,86	37,57	47,64	61,46	70,53	27,86	37,57	47,64	61,46	78,72
3.13	Rasio Jaringan Irigasi	0,27	0,34	0,39	0,45	0,51	0,26	0,33	0,39	0,45	0,39
3.14	Persentase penduduk berakses air minum	60,55	62,58	64,57	66,56	68,55	60,55	62,58	64,57	66,56	90,85
3.15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	60,55	62,58	64,57	66,56	68,55	60,55	62,58	64,57	66,56	62,33
3.16	Persentase areal kawasan kumuh	0,15	0,09	0,05	0,02	0,00	6,41	6,35	6,31	6,28	6,26
3.17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	0,22	0,25	0,27	0,28	0,27	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02
3.18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	0	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,17	0,17	0,17	0,15
3.19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	2,01	1,84	1,73	1,71	1,69	2,23	1,84	2,19	2,35	2,12
3.20	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	19,37	0,71	0,74	0,82	0,9	0,71	0,71	0,74	0,82	1,06
3.21	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas	1,17	1,34	1,67	2,01	2,17	1,17	1,34	1,67	2,01	2,17



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
		TARGET KINERJA RPJMD 2016-2021					REALISASI KINERJA RPJMD 2016-2021				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	wilayah kota/kawasan perkotaan										
3.22	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,09	0,25	0,32	0,38	0,45
3.23	Ruang publik yang berubah peruntukannya	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	Ketaatan terhadap RTRW	1,11	1,45	1,74	2,17	2,83	1,11	1,45	1,85	2,17	2,83
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
4.1	Rasio rumah layak huni	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,14	0,11	0,16	0,12
4.2	Rasio permukiman layak huni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98
4.3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	55,59	55,75	54,93	54,44	53,93	54,82	55,98	43,51	62,25	53,47
4.4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	1,57	3,35	4,01	5,5	6,95	1,57	3,35	4,01	5,50	6,95
4.5	Persentase pemukiman yang tertata	99,83	99,96	100	100	100	97,26	97,53	97,77	98,00	98,18
4.6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
4.7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	56,79	82,4	0,00	0,00	0,00	3,14	4,60	4,63	26,36	31,25
4.8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT										



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
		TARGET KINERJA RPJMD 2016-2021					REALISASI KINERJA RPJMD 2016-2021				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	100	100	100	100	100,00	100,00	96,77	96,00	100,00
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	92,33	95,48	99	100	100	92,33	95,48	99,00	100,00	100,00
5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	4,01	3,15	3,27	3,09	2,78	97,01	98,08	98,15	100,00	78,79
5.5	Persentase Penegakan PERDA	100	100	100	100	100	94,50	100,00	100,00	100,00	100,00
6	SOSIAL										
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	0	13,04	18,52	33,33	47,37	0,00	13,04	18,52	33,33	47,37
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	6	15	14,81	29,41	40,00	6,00	15,00	14,81	29,41	40,00
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	0	11,54	13,04	23,81	33,33	0,00	11,54	13,04	23,81	33,33
6.4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok	0	3,85	13,64	22,22	25,00	0,00	3,85	13,64	22,22	25,00



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
		TARGET KINERJA RPJMD 2016-2021					REALISASI KINERJA RPJMD 2016-2021				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
	usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya										
6.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	85,71	85,71	57,14	71,43	71,43	85,71	85,71	57,14	71,43	71,43
6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	31,2	100	100	100	100	31,20	100,00	100,00	100,00	100,00
6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	0	20	0	100	100	0,00	20,00	0,00	100,00	100,00



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
		TARGET KINERJA RPJMD 2016-2021					REALISASI KINERJA RPJMD 2016-2021				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
6.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100	75	77,78	88,89	100	100,00	75,00	77,78	88,89	100,00
I.B	URUSAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR										
1	TENAGA KERJA										
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	31,67	21,74	38,91	55,56	78,13	31,67	21,74	38,91	55,56	47,50
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	0	100	100	100	100	57,14	100,00	90,00	50,00	66,77
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	4,55	7,45	9,63	13,33	25	4,55	7,45	9,63	13,33	23,27
1.4	Keselamatan dan perlindungan	10,41	15,22	15,56	19,26	22,86	10,41	15,22	15,56	19,26	100,00
1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	66,12	70,07	87,98	100	100	66,12	70,07	72,71	75,46	48,25
1.6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0	0	0	100	100	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1.7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	20,36	26,09	58,37	72,22	84,38	20,36	26,09	58,37	72,22	84,38



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
		TARGET KINERJA RPJMD 2016-2021					REALISASI KINERJA RPJMD 2016-2021				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	0	50	40	45	57,14	0,00	50,00	40,00	45,00	36,49
1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	0	20	46,67	80	85,71	0,00	20,00	46,67	80,00	69,00
1.11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	0	30	30	60	90	0,00	30,00	30,00	30,00	60,00
1.12	Rasio lulusan S1/S2/S3	46,67	49,15	50,13	51,15	52,23	4,83	4,09	4,05	4,13	5,09
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	7,53	16,85	17,24	17,65	18,06	7,53	16,85	17,24	17,65	18,06
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	20,00	20,00	20,00	28,57	28,57	20,00	20,00	20,00	25,71	25,71
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	92,47	83,15	82,76	82,35	81,94	92,47	83,15	82,76	82,35	81,94
2.4	Rasio KDRT	0,04	0,06	0,04	0,03	0,02	0,04	0,06	0,04	0,03	0,01
2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	40,41	37,54	40,01	42,78	45,75	40,41	37,54	40,01	42,78	43,63



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
		TARGET KINERJA RPJMD 2016-2021					REALISASI KINERJA RPJMD 2016-2021				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	0	100	100	100	100	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	0	100	100	100	100	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
		TARGET KINERJA RPJMD 2016-2021					REALISASI KINERJA RPJMD 2016-2021				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
2.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	87,50
2.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	59,38	70	80	85	90	59,38	70,00	80,00	85,00	100,00
2.13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	62,5	70	80	85	90	62,50	70,00	80,00	85,00	100,00
2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	86,77	94,61	95,46	96,32	97,19	86,77	94,61	100,00	100,00	100,00
2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	109,41	98,18	95,5	92,9	90,65	109,41	98,18	93,77	106,74	109,14
2.18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	93,23	99,66	100	100	100	0,00	27,62	27,62	27,62	27,62



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
		TARGET KINERJA RPJMD 2016-2021					REALISASI KINERJA RPJMD 2016-2021				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
3	PANGAN										
3.1	Ketersediaan pangan utama	70.178,49	68.315,51	68.995,36	69.717,79	70.498,44	37.375,01	37.755,75	38.130,60	38.490,19	42.703,37
4	PERTANAHAN										
4.1	Persentase luas lahan bersertifikat	2,51	21	22,05	23,1	24,15	7,99	10,16	12,32	12,82	14,70
4.2	Penyelesaian kasus tanah Negara	0	0	0	0	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.3	Penyelesaian izin lokasi	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	LINGKUNGAN HIDUP										
5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5.4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	5,64	7,51	7,03	6,50	5,00	45,00	47,00	50,00	50,00	50,00
5.5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	78,33	92,78	93,89	92,78	91,67	78,33	92,78	90,56	91,11	83,89
5.6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	16,2	16,32	16,33	16,34	16,36	50,33	50,33	50,33	48,99	48,99



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
		TARGET KINERJA RPJMD 2016-2021					REALISASI KINERJA RPJMD 2016-2021				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
5.7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	37,04	71,11	0	0	0	37,04	71,11	100,00	100,00	100,00
5.8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5.16	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5.17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
		TARGET KINERJA RPJMD 2016-2021					REALISASI KINERJA RPJMD 2016-2021				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
5.18	Timbulan sampah yang ditangani	25,00	30,00	35,00	55,00	65,00	30,00	87,43	88,05	89,03	90,31
5.19	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	2,87	3,27	4,61	6,51	9,17	0,47	0,51	0,44	0,44	0,43
5.20	Persentase cakupan area pelayanan	25,02	30,02	42,03	50,00	65,00	10,58	11,63	12,69	12,69	12,69
5.21	Persentase jumlah sampah yang tertangani	25,00	30,00	42,00	50,00	60,00	3,00	8,74	8,81	8,90	9,03
5.22	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	78,71	89,79	89,79	89,79	89,79	78,71	89,79	89,79	89,79	89,79
5.23	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.24	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundangundangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
6.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0,00	0,88	0,97	1,00	1,00	0,00	0,88	0,97	0,98	0,86
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99	0,95	0,96	0,97	0,98	0,91
6.3	Rasio pasangan berakte menikah	0	0,17	0,19	0,27	0,29	0,00	0,17	0,19	0,27	0,53



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
		TARGET KINERJA RPJMD 2016-2021					REALISASI KINERJA RPJMD 2016-2021				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	0	88,95	97,99	100	100	0,00	88,95	97,99	93,00	88,58
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	95,45	97,95	98,19	98,93	99,73	95,45	97,95	98,19	98,93	83,39
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
7.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	82,50	82,50	83,75	85,00	86,25	82,50	82,50	83,75	85,00	86,25
7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58
7.4	Persentase LSM aktif	69,23	71,43	75	100	100	69,23	71,43	75,00	100,00	100,00
7.5	Persentase LPM Berprestasi	13,59	14,56	15,53	16,5	17,48	13,59	14,56	15,53	16,50	17,48
7.6	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.7	Persentase Posyandu aktif	74,94	78,2	81,14	91,91	95,12	74,94	78,20	91,91	100,00	100,00
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,20	1,18	1,15	1,13	1,10	1,20	1,18	1,15	1,13	2,05



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
		TARGET KINERJA RPJMD 2016-2021					REALISASI KINERJA RPJMD 2016-2021				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	2,37	2,35	2,33	2,32	2,31	2,37	2,35	2,33	2,32	2,37
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	0	9,09	15,91	22,73	27,27	0,00	9,09	15,91	22,73	22,22
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	31,82	52,27	72,73	93,18	100	31,82	52,27	72,73	93,18	24,44
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,01	1,00
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
		TARGET KINERJA RPJMD 2016-2021					REALISASI KINERJA RPJMD 2016-2021				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	14,00
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,62	1,62	1,59	1,57	1,55	1,62	1,62	1,62	1,54	1,53
8.9	Ratio Akseptor KB	56,95	57,47	57,93	58,39	58,86	56,95	57,47	65,39	65,94	70,05
8.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	62,63	62,23	63,22	64,23	65,26	62,63	62,23	64,58	65,29	69,46
8.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	95,1	131,09	108,25	89,41	74,09	95,10	131,09	393,10	360,00	131,67
8.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	52,31	53,36	42,56	33,94	27,07	2,11	1,63	1,25	0,52	0,51
8.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	27,24	25,81	24,7	23,64	22,63	27,24	25,81	13,74	14,49	14,08
8.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	10,54	11,75	13,25	14,94	16,85	10,54	11,75	17,55	20,72	26,02



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
		TARGET KINERJA RPJMD 2016-2021					REALISASI KINERJA RPJMD 2016-2021				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
8.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	72,02	71,64	71,29	70,94	70,59	72,02	71,64	51,72	52,64	43,60
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	13,76	13,86	13,9	14,06	14,22	13,76	13,86	14,49	19,67	18,29
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	7,24	8,93	11,4	14,55	18,56	7,24	8,93	11,40	12,99	12,77
8.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	4,49	4,67	4,86	5,05	5,25	4,49	4,67	4,73	5,05	5,56
8.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	21,43	21,43	50	78,57	100	21,43	21,43	28,57	28,57	50,00
8.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	1.050,00	1.050,00	1.150,00	1.185,71	1.221,43	34,27	44,32	50,00	54,58	45,38
8.21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
		TARGET KINERJA RPJMD 2016-2021					REALISASI KINERJA RPJMD 2016-2021				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
8.22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	22,13	24,68	26,84	27,29	27,57	61,64	62,67	63,85	65,04	68,41
8.23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	198,71	170,09	156,05	143,17	131,34	198,71	170,09	195,00	138,00	66,56
8.25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100	100	100	100	100	80,00	80,00	84,00	84,00	84,00
8.26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
		TARGET KINERJA RPJMD 2016-2021					REALISASI KINERJA RPJMD 2016-2021				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
8.29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	1,20	1,35	1,51	1,69	1,89	10,81	12,58	14,54	15,36	15,36
8.30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	25,45	25,84	26,33	26,92	27,61	25,45	25,84	26,33	26,92	27,61
9	PERHUBUNGAN										
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	12.702.191	12.284.224	12.664.472	13.056.492	13.460.646	12.702.191,00	12.284.224,00	12.664.472,33	6.965.459,78	1.797.772,00
9.2	Rasio ijin trayek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	963	705	668	0	0	963,00	705,00	382,00	0,00	0,00
9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9.5	Persentase layanan angkutan darat	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	68,55	69,83	77,57	80,23	11,00
9.6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	18,42	14,86	1,33	8,19	7,46	10,99	7,92	4,40	8,92	100,00
9.7	Pemasangan Rambu - rambu	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9.8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,14	0,10	0,08	0,07	0,02
9.9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	16.202.191	17.134.224	19.168.348	21.778.223	25.156.534	72.390.045	84.357.050	100.727.255	120.274.240	143.614.484



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
		TARGET KINERJA RPJMD 2016-2021					REALISASI KINERJA RPJMD 2016-2021				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
9.10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	12.702.191	12.284.224	12.664.472	13.056.492	13.460.646	72.390.045	84.357.050	100.727.255	120.274.240	143.614.484
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0	4,98	6,71	12,74	29,71	0,00	4,98	6,71	8,23	77,74
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	56,31	56,78	57,23	57,64	58,05	77,43	77,97	78,84	77,54	71,18
10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0,00	0,27	0,27	0,32	0,37	0,30	0,35	0,41	0,46	0,85
10.5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	0,77	0,77	0,78	0,78	0,78	-	0,82	0,65	0,78	0,85
11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH										
11.1	Persentase koperasi aktif	74,34	74,86	75,5	77,08	78,57	74,34	74,86	75,50	77,08	69,43
11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	93,26	96,54	146,13	96,67	96,75	93,26	96,54	99,40	99,87	99,83
12	PENANAMAN MODAL										



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
		TARGET KINERJA RPJMD 2016-2021					REALISASI KINERJA RPJMD 2016-2021				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	298	330	420	481	542	19,00	20,00	25,00	29,00	35,00
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Juta Rp)	0	195.202.073.715	281.957.143.832	368.712.213.949	368.712.213.949	3.711.284,00	4.282.022,00	4.558.035,00	5.066.845,00	5.674.866,40
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	6,26	6,47	6,66	7,36	8,00	8,00	6,26	23,30	31,21	8,22
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	0	54,26	65,69	77,13	88,56	15,30	15,38	6,45	11,16	12,00
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13.2	Persentase wirausaha muda	9,12	9,41	8,58	8,58	8,58	9,12	9,41	8,58	8,58	8,58
13.3	Cakupan pembinaan olahraga	0	100	100	100	100	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13.5	Cakupan pembinaan atlet muda	0	3,54	7,08	10,61	10,61	0,00	3,54	7,08	10,61	10,61
13.6	Jumlah atlet berprestasi	28,00	30,00	116,00	31,00	32,00	28,00	30,00	116,00	31,00	32,00
13.7	Jumlah prestasi olahraga	22,22	14,81	77,78	29,63	29,63	22,22	14,81	77,78	29,63	29,63
14	STATISTIK										
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	tidak	tidak	tidak	ada	ada	tidak	tidak	tidak	ada	ada



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
		TARGET KINERJA RPJMD 2016-2021					REALISASI KINERJA RPJMD 2016-2021				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
14.2	Buku "kabupaten dalam angka"	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
14.3	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15	PERSANDIAN										
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	0	0	0	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16	KEBUDAYAAN										
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4,00	2,00	3,00	3,00	4,00	4,00	2,00	3,00	3,00	0,00
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	20,50	20,50	22,38	21,20	22,40	31,87	35,04	38,20	38,20	38,20
16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0,00	0,00	3,00	3,00	4,00	0,00	0,00	3,00	3,00	4,00
16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	63,00	63,00	63,00	73,00	83,00	63,00	63,00	63,00	73,00	83,00
16	PERPUSTAKAAN										
16.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0,08	0,08	0,09	0,10	0,11	0,08	0,08	0,09	0,10	0,08
16.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,38	0,38	0,73	0,83	0,88	0,10	0,07	0,25	0,37	0,41
16.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1,09	1,08	1,07	1,06	1,05	1,09	1,08	1,07	1,06	0,96



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
		TARGET KINERJA RPJMD 2016-2021					REALISASI KINERJA RPJMD 2016-2021				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
16.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	0,12	0,11	0,12	0,14	0,15	63,07	65,00	72,15	80,09	67,05
16.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	5.911,00	10.911,00	15.911,00	20.911,00	25.911,00	5.911,00	10.911,00	15.911,00	20.911,00	25.911,00
16.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	0	0	100	100	100	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
17	KEARSIPAN										
17.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	97,73	93,18	100	100	100	95,56	91,11	100,00	100,00	100,00
17.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00
II	LAYANAN URUSAN PILIHAN										
1	PARIWISATA										
1.1	Kunjungan wisata	120,6	113,92	100	100	100	92,22	90,96	93,30	100,94	43,78
1.2	Lama kunjungan Wisata	1	1	2	3	3	1,00	1,00	2,00	3,00	1,00
1.3	PAD sektor pariwisata	4,79	4,12	3,59	3,11	2,69	4,79	4,12	3,45	3,39	2,18
2	PERTANIAN										
2.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	0,28	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28	0,27	0,30	0,33	0,49
2.3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	0,100	0,090	0,100	0,110	0,120	0,001	0,001	0,001	0,001	0,003



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
		TARGET KINERJA RPJMD 2016-2021					REALISASI KINERJA RPJMD 2016-2021				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
2.4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	51,8	58,73	58,73	58,73	58,73	52,19	51,05	62,27	63,06	53,97
2.6	Cakupan bina kelompok petani	96,53	15,3	21,71	78,29	79,89	22,10	18,28	21,38	77,13	6,93
3	PERDAGANGAN										
3.1	Ekspor Bersih Perdagangan	63.557.221.000	64.125.230.000	6.464.912.420.000	65.231.980.000	66.450.921.000	4.155.028	4.408.385	4.873.656,50	4.581.698,05	4.744.520
3.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	0	73,67	85,94	86,71	86,71	0,00	73,67	85,94	86,71	78,49
4	PERINDUSTRIAN										
4.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	50	42,86	50	75	100	50,00	42,86	50,00	75,00	100,00
5	TRANSMIGRASI										
5.1	Persentase transmigran swakarsa	0	0	0	16,67	33,33	0,00	0,00	0,00	16,67	33,33
6	KELAUTAN DAN PERIKANAN										
6.1	Produksi perikanan	99,29	102,21	100	100	100	97,00	96,85	101,09	160,51	123,27
6.2	Konsumsi ikan	99,85	99,78	100	100	100	99,85	99,78	100,05	100,02	100,00
6.3	Cakupan bina kelompok nelayan	4,30	11,65	9,06	10,14	11,08	16,02	25,56	35,51	37,50	38,92
6.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	54,35	52,45	53,02	52,72	52,32	54,35	52,45	53,02	52,72	52,32



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA DAERAH									
		TARGET KINERJA RPJMD 2016-2021					REALISASI KINERJA RPJMD 2016-2021				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
6.5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	76,92	76,92	76,92	76,92	76,92	74,55	76,41	78,13	79,88	81,88
6.6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Bappeda Kab.Maros, 2021



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuan pengelolaan keuangan merupakan daya dukung manajemen pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan keuangan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari tingkat kemandirian daerah, dimana tingkat kemandirian daerah dapat dilihat dari tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh daerah itu sendiri, yang salah satu aspeknya adalah sumber daya keuangan daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*).

Melihat kondisi kemampuan keuangan daerah Kabupaten Maros selama lima tahun (2016-2020), maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Maros masih merupakan daerah yang dapat dikatakan belum mandiri, terutama dari sisi keuangan karena masih tingginya ketergantungan pada keuangan Pemerintah. Sampai dengan Tahun 2020, pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten



Maros masih bertumpu pada sumber daya keuangan yang bersumber dari Dana Perimbangan Pemerintah. Ketergantungan fiskal daerah sangat mempengaruhi proses perencanaan pembangunan daerah sampai dengan pelaksanaannya.

Untuk memahami tingkat kemampuan pengelolaan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah meliputi kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memiliki komponen terdiri atas (1) Pendapatan Daerah, (2) Belanja Daerah; dan (3) Pembiayaan. Oleh karena itu, untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah diperlukan analisis pelaksanaan terhadap semua komponen APBD. Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah serta sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa mendatang dengan mempertimbangkan segala peluang dan hambatan yang dihadapi.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Selama periode Tahun 2016-2020, sumber pendapatan daerah Kabupaten Maros terdiri atas:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang telah dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus;
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi, Dana Penyesuaian Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dan Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan daerah di APBD Kabupaten Maros cenderung mengalami peningkatan dan berfluktuasi seiring dengan peningkatan yang terjadi pada masing-masing pos pendapatan/komponen pendapatan daerah. Berdasarkan laporan realisasi anggaran, realisasi pendapatan daerah selama kurun waktu lima tahun (2016 s/d 2020) mencapai 90,58 persen setiap tahunnya. Realisasi tertinggi dicapai pada Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar 94,90 persen dari target pendapatan dengan nilai



realisasi sebesar Rp 1.414.913.465.724,41. Realisasi terendah dicapai pada Tahun Anggaran 2017 yaitu 91,64 persen dengan nilai realisasi sebesar Rp 1.299.787.473.996,01. Berikut merupakan data target dan realisasi Pendapatan Kabupaten Maros Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 secara rinci dalam table berikut ini.

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Maros
Tahun 2016 s/d 2020

Tahun	Target Perubahan RPJMD (Rp)	Target APBD Perubahan (Rp)	Realisasi		
			Rp	Perubahan RPJMD (%)	APBD Perubahan (%)
2016	1.367.007.383.243,00	1.481.786.230.460,00	1.374.566.925.494,76	100,55	92,76
2017	1.418.290.224.853,00	1.418.289.224.853,00	1.299.787.473.996,01	91,64	91,64
2018	1.490.956.688.605,00	1.490.956.817.605,00	1.414.913.465.724,41	94,90	94,9
2019	1.481.712.486.000,00	1.497.906.779.871,00	1.463.184.441.664,00	98,75	91,15
2020	1.533.808.276.761,39	1.456.868.058.842,00	1.380.928.002.665,97	90,03	94,79

Sumber : Perubahan RPJMD Kab.Maros Tahun 2016-2020
LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros

Dari data di atas menggambarkan bahwa, secara umum kinerja pendapatan daerah terlihat relatif stabil selama kurun waktu lima tahun (2016 s/d 2020). Hal ini terlihat dari tingkat pencapaian realisasi berada di atas angka 90 persen baik dilihat dari target Perubahan RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2016-2020 maupun dari target Perubahan APBD Tahun 2016-2020. Jika dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD, maka pencapaian terbaik pada tahun 2016 sebesar 100,55 persen. Jika dibandingkan dengan target Perubahan APBD Tahun, maka pencapaian realisasi terbaik terjadi pada Tahun 2018 dengan nilai realisasi sebesar Rp 1.414.913.465.724,41 atau sekitar 94,90 persen. Pencapaian tersebut didukung oleh pencapaian realisasi PAD sebesar 80,53 persen, Dana Perimbangan sebesar 98,54 persen dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 92,21 persen.

Pencapaian kinerja pendapatan daerah terbaik kedua Kabupaten Maros terjadi pada Tahun 2020 dengan nilai realisasi sebesar Rp 1.380.928.002.665,97 atau sekitar 94,79 persen. Pencapaian ini didukung oleh realisasi Dana Perimbangan mencapai 98,81 persen dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai 95,77 persen, sementara Pendapat Asli Daerah hanya mencapai 74,81 persen.

Sedangkan pencapaian realisasi terendah pada Tahun 2019 dengan nilai realisasi sebesar Rp 1.365.290.555.352,00 atau sekitar 91,15 persen. Rendahnya kinerja



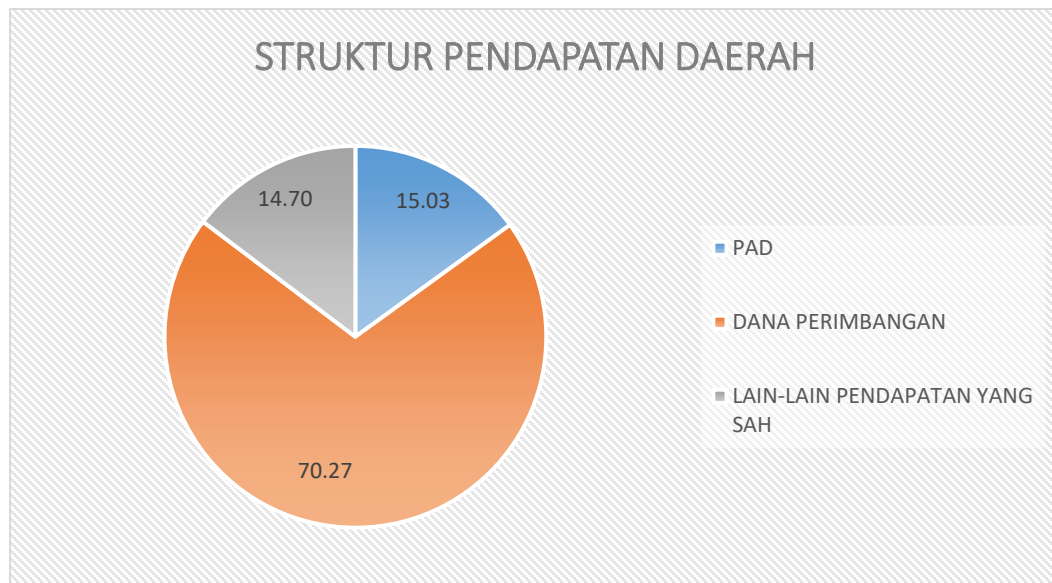
pendapatan daerah pada Tahun 2019 disebabkan sangat rendahnya realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah hanya mencapai 52,76 persen dan realisasi PAD hanya mencapai 78,94 persen, sementara realisasi Dana Perimbangan mencapai 98,10 persen. Dapat diketahui jika selama lima tahun, kinerja realisasi PAD tidak mencapai target demikian pula dengan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sementara realisasi Dana Perimbangan selalu mencapai target diatas 95 persen, bahkan di Tahun 2020 mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Maros belum memiliki kemandirian keuangan daerah yang kuat. Gambaran kinerja pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.1.
Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros

Berdasarkan data, diketahui jika selama lima tahun terakhir struktur pendapatan daerah didominasi oleh Dana Perimbangan sekitar 70,27 persen, Pendapatan Asli Daerah sebesar 15,03 persen dan Pendapatan Lain-lain Daerah Yang Sah sebesar 14,70 persen. Besarnya kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah dapat diartikan bahwa kemampuan fiskal Kabupaten Maros masih sangat kecil karena masih tergantung dana dari pemerintah pusat. Gambaran kontribusi tiap komponen pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 3.2 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016-2020**

Sumber : LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros

1) Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan daerah yang menjadi kewenangan dan secara langsung dipengaruhi oleh kinerja Pemerintah Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Adapun struktur Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

- a. Pajak daerah yang mencakup : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- b. Retribusi daerah, mencakup: retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas, retribusi penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum dan luar TPI, retribusi sewa kios pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi laboratorium pemeriksaan kualitas air, retribusi sewa alat berat, retribusi tempat pelelangan, retribusi parkir khusus TPI, retribusi pelayanan parkir tempat rekreasi, retribusi hotel dan wisma bantimurung, retribusi jasa usaha pemeriksaan kesehatan dan badan hewan, retribusi jasa usaha rumah potong hewan (RPH), retribusi TWA Bantimurung, retribusi taman prasejarah leang-leang, retribusi bantimurung waterpark, retribusi penjualan hasil produksi usaha daerah agribisnis kehutanan, retribusi jasa usaha penjualan bibit ikan, retribusi agribisnis perikanan, retribusi izin mendirikan bangunan (IMB), retribusi izin trayek.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- d. Lain-lain PAD yang sah, yang mencakup : Jasa giro kas daerah, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pendapatan dari



pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, angsuran /cicilan penjualan kendaraan perorangan dinas, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa, hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah sewa, pendapatan jasa layanan umum BLUD (JKN, JAMKESDA dan UMUM), pendapatan usaha lainnya, sewa penggunaan lahan rumah sakit dan pelataran parkir rumah sakit, pemanfaatan kekayaan daerah sewa, Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD. Lain-lain PAD yang sah lainnya, (lain-lain pengembalian dan penjualan aset daerah), sumbangan pihak ketiga, dana kapitasi JKN dan FKTP.

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros
Tahun 2016 s/d 2020

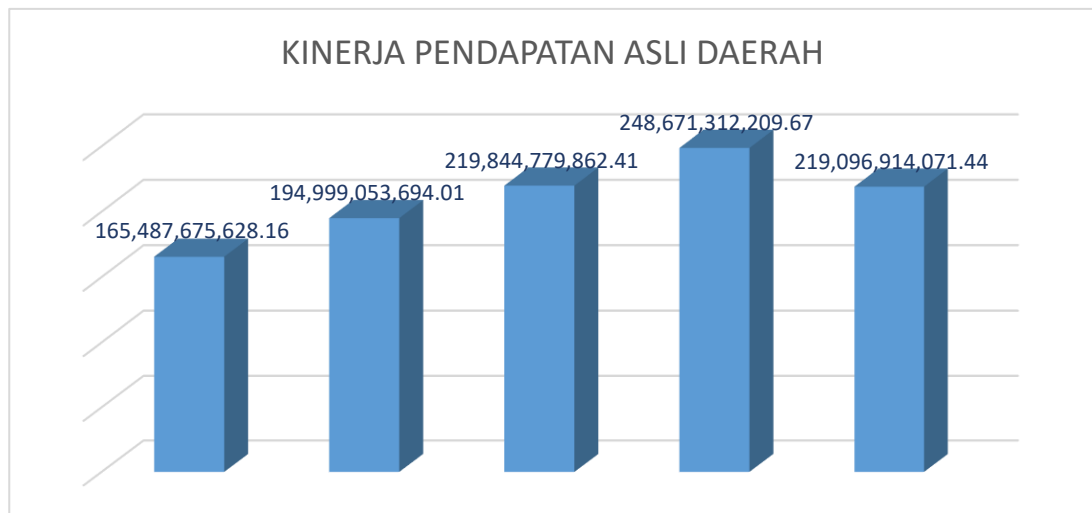
Tahun	Target Perubahan RPJMD (Rp)	Target APBD Perubahan (Rp)	Realisasi		
			Rp	Perubahan RPJMD (%)	APBD Perubahan (%)
2016	175.118.724.400,00	176.118.724.400,00	165.487.675.628,16	94,50	93,96
2017	255.586.977.000,00	255.585.977.000,00	194.999.053.694,01	76,29	76,29
2018	273.006.174.554,00	273.006.174.554,00	219.844.779.862,41	80,53	80,53
2019	249.822.700.000,00	288.807.562.871,00	248.671.312.209,67	99,54	86,10
2020	293.157.629.636,67	292.857.252.818,00	219.096.914.071,44	74,74	74,81

Sumber : Perubahan RPJMD Kab.Maros Tahun 2016-2020
LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros

Berdasarkan table 3.2, diketahui bahwa realisasi pendapatan asli daerah selama lima tahun menunjukkan kinerja yang cukup baik. Realisasi penerimaan PAD bila dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD Kab.Maros Tahun 2016-2021 dan APBD Perubahan Tahun 2016-2021 rata-rata mencapai 80 persen tiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD, maka pencapaian terbaik pada Tahun 2016 sebesar 94,50 persen. Jika dibandingkan dengan target APBD Perubahan, maka realisasi tertinggi dicapai pada Tahun 2016 dengan nilai Rp 165.487.675.628,16 atau sekitar 93,96 persen dan realisasi terendah pada Tahun 2020 dengan nilai realisasi Rp 219.096.914.071,44 atau sekitar 74,81 persen. Pencapaian terendah di Tahun 2020 diakibatkan dengan adanya Pandemi COVID-19, dimana sejak adanya pandemic awal Maret Tahun 2020 dengan pembatasan aktivitas masyarakat seperti penutupan restoran/warung makan, tempat rekreasi dan tempat hiburan lainnya memberi andil yang cukup besar terhadap penurunan realisasi PAD. Gambaran kinerja realisasi PAD dapat dilihat pada gambar berikut:



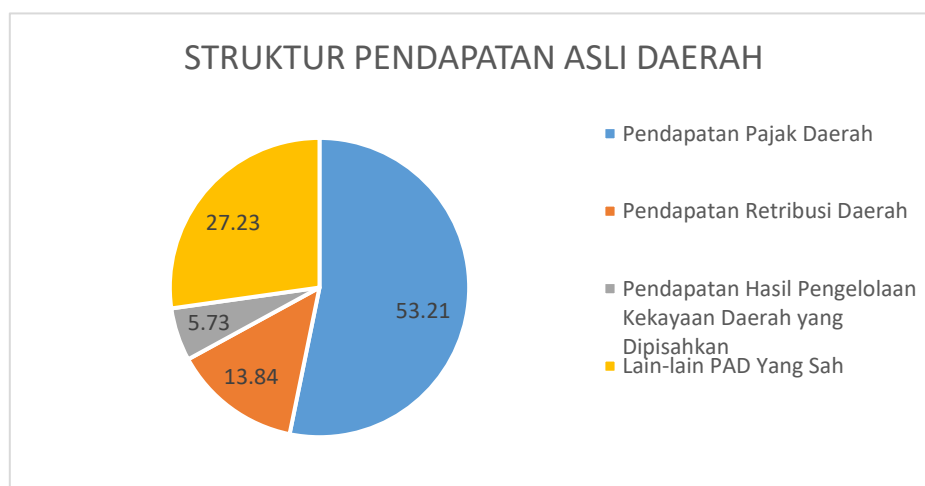
Gambar 3.3
Kinerja Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros

Komponen PAD yang memiliki pertumbuhan cukup tinggi terdapat pada pos Lain-lain PAD yang Sah yang mencapai 37,98 persen pertahun, kemudian Pajak Daerah yang mencapai 12,39 persen pertahun, disusul oleh Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mencapai 3,25 persen pertahun dan terakhir adalah penerimaan retribusi daerah yang mengalami pelambatan sekitar -15,35 persen pertahun.

Gambar 3.4
Struktur Pendapatan Asli Daerah Kab.Maros Tahun 2016-2020



Sumber : LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros

Gambar 3.4 diketahui jika kontribusi masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah masih didominasi oleh Pendapatan Pajak Daerah (53,21 persen), Lain-lain PAD Yang Sah (27,23 persen), Retribusi Daerah (13,84 persen) dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (5,73 persen).

Pajak daerah sebagai komponen PAD yang memberikan kontribusi paling besar



terhadap penerimaan PAD mencapai realisasi 91,86 persen setiap tahunnya, disusul oleh retribusi daerah dengan kinerja realisasi mencapai 91,17 persen setiap tahunnya, kemudian Lain-lain PAD yang Sah dengan kinerja realisasi mencapai 70 persen setiap tahunnya. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan memiliki nilai kontribusi yang paling kecil, namun kinerja realisasi mencapai 100 persen setiap tahunnya.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pos pajak daerah selama lima tahun bersumber dari 11 pos penerimaan dan mengalami pertumbuhan sekitar 11,32 persen setiap tahunnya. Selama empat tahun (2016-2019) penerimaan pajak daerah selalu mengalami peningkatan, dimana peningkatan sekitar 22,28 persen tiap tahunnya. Namun, tahun 2020 penerimaan pajak daerah mengalami penurunan sebesar 17,92 persen dari Tahun 2019, dimana realisasi penerimaan hanya sebesar 76,50 persen dari target yang ditetapkan. Terdapat beberapa pos pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan, seperti pajak parkir, pajak sarang burung wallet dan pajak mineral bukan logam dan batuan(marmer).

Realisasi pajak parkir di tahun 2020 hanya 77,63 persen, dimana didominasi dari pajak parkir bandara dan pajak parkir Grandmall. Hal ini sebagai dampak dari adanya pandemi COVID-19 di bulan Maret 2020. Adanya pembatasan penerbangan, sehingga jumlah orang yang berkunjung ke bandara berkurang dan akibatnya pajak parkir pun menurun. Demikian halnya dengan pajak Grandmall, di awal pandemi sempat mengalami pembatasan aktifitas terutama restoran/rumah makan di dalamnya mengalami penutupan, sehingga jumlah pengunjung pun mengalami penurunan. Berikut gambaran kinerja Pajak Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016-2021.

Gambar 3.5
Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros

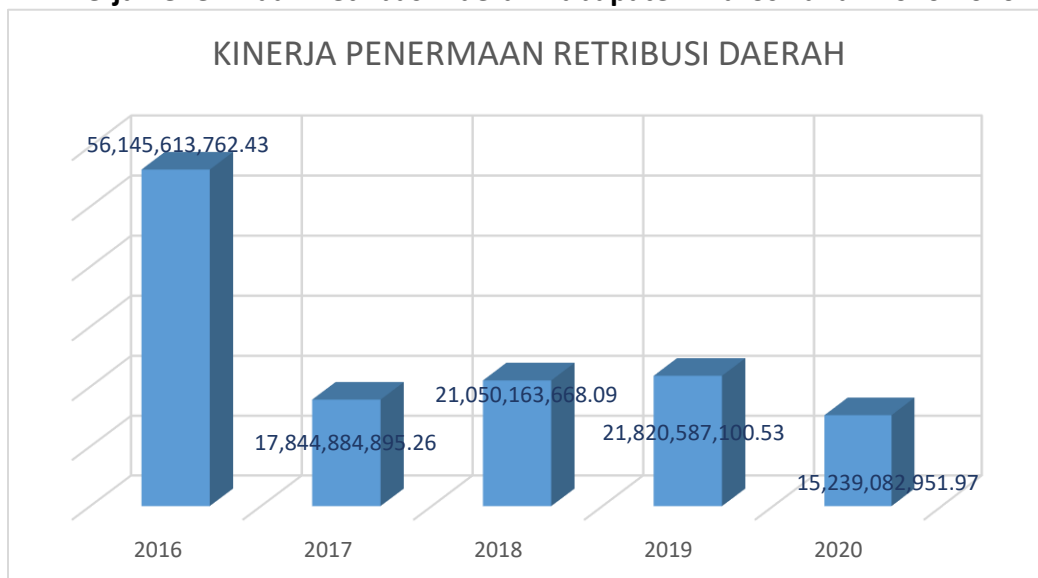
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau



pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Realisasi penerimaan retribusi daerah selama kurun waktu lima tahun (2016-2020) mengalami pelambatan (15,35) persen tiap tahunnya. Tahun 2020 mengalami penurunan realisasi penerimaan sebesar 30 persen, dimana realisasi hanya sebesar 78,81 persen dari target yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa pos retribusi yang tidak mencapai target seperti retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi TWA Bantimurung, dan retribusi Taman Prasejarah Leang-leang. Hal ini pun sebagai dampak pandemi COVID-19, dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat, beberapa tempat wisata ditutup seperti TWA Bantimurung dan Taman Prasejarah Leang-leang. Adanya penutupan TWA Bantimurung di awal pandemi COVID-19 turut memberi pengaruh dengan turunnya okupansi penginapan hotel Bantimurung. Berikut gambaran kinerja penerimaan retribusi daerah selama lima tahun.

Gambar 3.6

Kinerja Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Untuk jenis penerimaan ini masih mengandalkan penerimaan deviden atas penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank Sulselbar. Selama kurun waktu lima tahun mengalami pertumbuhan 3,32 persen tiap tahunnya. Berikut gambaran kinerja pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama kurun waktu lima tahun 2016-2020:



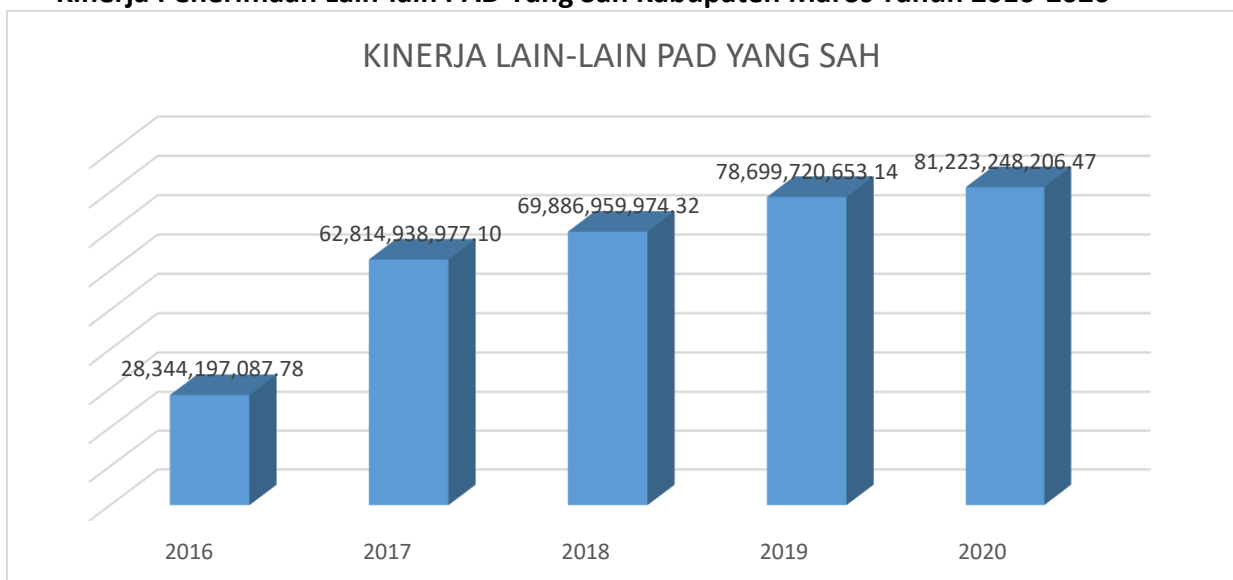
Gambar 3.7
Kinerja Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros

Lain-lain PAD Yang Sah, merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah selama lima tahun menunjukkan peningkatan tiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 29,74 persen tiap tahun. Berikut gambaran kinerja Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah selama kurun waktu lima tahun.

Gambar 3.8
Kinerja Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros

B. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Adapun struktur dari Dana Perimbangan sebagai berikut:

- Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak meliputi : Bagi hasil dari pajak bumi dan



bangunan sektor pertambangan (bagian daerah), Bagi hasil dari pajak penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 (PPh pasal 21), Bagi hasil dari provinsi sumberdaya hutan, Bagi hasil dari pungutan perusahaan perikanan, Bagi hasil dari pertambangan minyak dan bumi, Bagi hasil dari pertambangan gas bumi. Bagi hasil dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam negeri dan PPh pasal 21, Bagi hasil bea cukai tembakau, Bagi hasil dari Sumber Daya Hutan, Bagi hasil dari iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti) dan bagi hasil dari pungutan perusahaan perikanan, Bagi hasil dari pertambangan gas bumi.

- b. Dana Alokasi Umum (DAU),
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK), terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK Fisik, meliputi: DAK Bidang Infrastruktur Jalan, DAK Bidang Infrastruktur Irigasi, DAK Bidang Infrastruktur Air Minum, DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi, DAK Bidang Keluarga Berencana, DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, DAK Bidang Kesehatan, DAK Bidang Kelautan dan Perikanan, DAK Bidang Perdagangan, DAK Bidang Lingkungan Hidup, DAK Bidang Petanian, DAK Bidang Pariwisata, DAK Bidang Pendidikan. Sementara DAK Non Fisik meliputi: DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan, DAK Tunjangan Profesi Guru (TPG), DAK Tambahan Penghasilan Guru, DAK Tunjangan Khusus Guru, DAK Bantuan Operasional Kesehatan, DAK Operasional Keluarga Berencana, DAK Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Maros
Tahun 2016 s/d 2020

Tahun	Target Perubahan RPJMD (Rp)	Target APBD Perubahan (Rp)	Realisasi		
			Rp	Perubahan RPJMD (%)	APBD Perubahan (%)
2016	1.054.316.253.000,00	1.143.617.532.843,00	1.067.130.874.537,00	101,22	93,31
2017	957.915.977.090,00	957.915.977.090,00	903.546.699.475,00	94,32	94,32
2018	997.416.669.000,00	997.416.798.000,00	982.888.743.034,00	98,54	98,54
2019	1.039.605.941.000,00	985.485.153.000,00	979.444.857.798,00	94,21	99,39
2020	1.045.528.723.501,23	893.318.252.024,00	882.646.034.275,00	84,42	98,81

Sumber : Perubahan RPJMD Kab. Maros Tahun 2016-2020
LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros

Berdasarkan tabel 3.3, nampak bahwa realisasi penerimaan Dana Perimbangan selama lima tahun (2016-2020) mencapai 90 persen setiap tahunnya baik dari target Perubahan RPJMD maupun dari target APBD Perubahan. Jika dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD, maka realisasi tertinggi pada tahun 2016 sebesar 101,22 persen. Jika



dibandingkan dengan target APBD Perubahan, maka realisasi yang cukup tinggi pada Tahun 2020 dengan nilai Rp 882.646.034.275,00 atau sekitar 98,81 persen dan realisasi paling rendah pada Tahun 2016 dengan nilai Rp 1.067.130.874.537,00 atau sekitar 93,31 persen. Berikut gambaran kinerja penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Maros selama lima tahun (2016 s/d 2020).

Gambar 3.9 Kinerja Dana Perimbangan Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



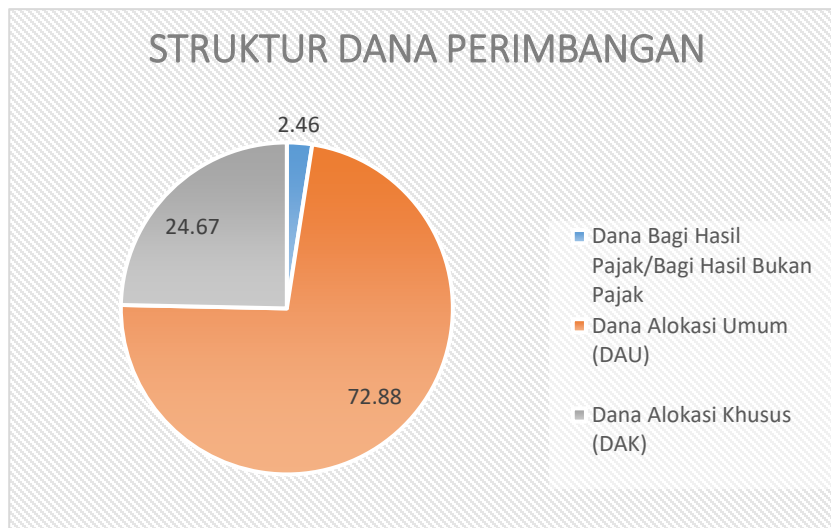
Sumber : LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020) penerimaan Dana Perimbangan mengalami pertumbuhan fluktuatif. Tahun 2016 penerimaan sebesar Rp 1 T, Tahun 2017 sampai dengan 2019 berada di kisaran angka 900 M dan Tahun 2020 berada di kisaran angka 800 M. Tahun 2020 merupakan tahun terberat bagi perekonomian diakibatkan adanya pandemic COVID-19. Transfer pemerintah pusat ke daerah mengalami refocussing terkait penanggulangan pandemic Covid-19. Adapun rata-rata realisasi pertumbuhan penerimaan Dana Perimbangan selama kurun waktu lima tahun adalah -3,35 persen (cenderung melambat) sebagai akumulasi dari tiga komponen pembentuk Dana Perimbangan, dimana Dana Alokasi Khusus tumbuh rata-rata sebesar -6,38 persen tiap tahunnya, Dana Alokasi Umum (DAU) rata-rata -0,96 persen serta Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak tumbuh rata-rata sebesar -4,37 persen.

Adapun struktur Dana Perimbangan selama lima tahun didominasi oleh Dana Alokasi Umum yang memberi kontribusi paling besar sebesar 72,88 persen tiap tahun, kemudian Dana Alokasi Khusus 24,67 persen, dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 2,46 persen. Pelambatan pertumbuhan komponen Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak turut mengambil peran semakin menurunnya kontribusi kedua komponen tersebut terhadap penerimaan Dana Perimbangan. Kontribusi ketiga komponen Dana Perimbangan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3.10
Struktur Dana Perimbangan Kab. Maros Tahun 2016-2020



Sumber : LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu mendanai daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam. Selama kurun waktu lima tahun realisasi penerimaan dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak cukup fluktuatif, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar (-4,38 persen) tiap tahunnya. Berikut gambaran kinerja penerimaan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak selama lima tahun.

Gambar 3.11
Kinerja Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Pajak Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros



Dana Alokasi Umum, merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selama lima tahun realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum cukup fluktuatif, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar (-0,96 persen) tiap tahunnya. Pada tahun 2016 penerimaan DAU sekitar Rp 700 juta, di tahun 2017 dan 2018 stagnan diangka Rp 600 jt, di tahun 2019 mengalami peningkatan sekitar 5,96 persen, berada di angka Rp 700 juta. Peningkatan ini sebagai dampak adanya dana kelurahan yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat dengan tujuan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, serta pemberdayaan masyarakat dan untuk meningkatkan kualitas hidup serta untuk peningkatan kesejahteraan di tingkat kelurahan. Tahun 2020 kembali mengalami penurunan dengan adanya kebijakan *refocussing* dari Pemerintah Pusat sebagai dampak adanya pandemi COVID-19. Berikut gambaran kinerja penerimaan Dana Alokasi Umum selama lima tahun:

Gambar 3.12
Kinerja Penerimaan Dana Alokasi Umum Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



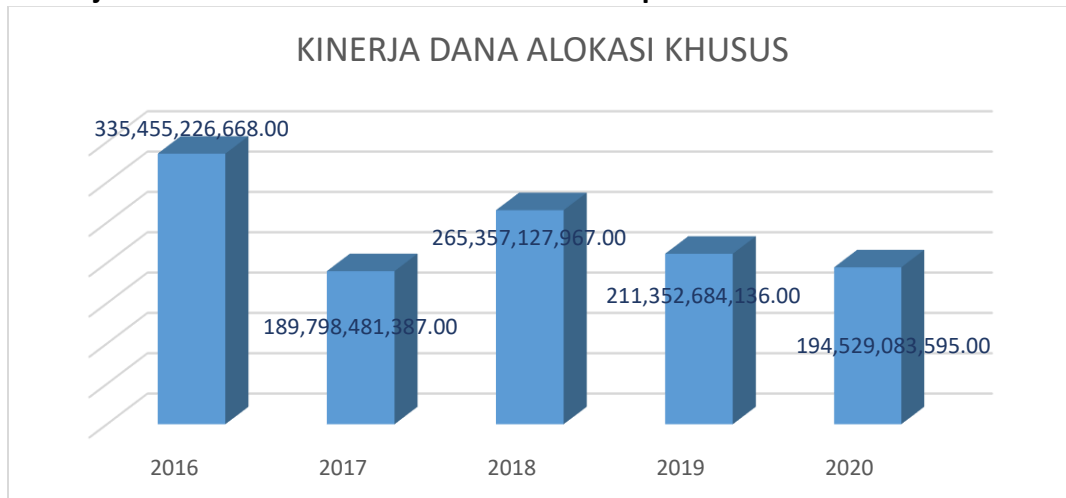
Sumber : LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros

Dana Alokasi Khusus, merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selama kurun waktu lima tahun kinerja realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus cukup fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sekitar (-6,38 persen). Tahun 2016 realisasi penerimaan DAK mencapai Rp 300 Juta bersumber dari 19 bidang DAK Fisik dan 7 bidang DAK Non Fisik, Tahun 2017 mengalami penurunan menjadi Rp 189 juta yang bersumber dari 10 bidang DAK Fisik dan 9 bidang DAK Non Fisik, Tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi Rp 265 juta yang bersumber dari 13bidang DAK Fisik dan 7 bidang DAK Non Fisik, Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp 211 juta bersumber dari 13 bidang DAK Fisik dan 7 bidang DAK Non Fisik dan di Tahun 2020 mengalami



penurunan menjadi Rp 194 juta yang bersumber dari 13 bidang DAK Fisik dan 9 bidang DAK Non Fisik. Berikut gambaran kinerja Dana Alokasi Khusus selama lima tahun:

Gambar 3.13
Kinerja Penerimaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros

2) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Struktur Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagai berikut:

- Pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya (Bantuan Operasional Sekolah dari Provinsi Sulawesi Selatan).
- Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, yang meliputi; Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Tanah, Bagi Hasil dari PLTA Baru, Bagi Hasil Pajak Rokok dan Bagi Hasil CHT dari Sulawesi Selatan.
- Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus yang meliputi : Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.
- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal ini Kesehatan Gratis.

Tabel 3.4
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Maros Tahun 2016 s/d 2020

Tahun	Target Perubahan RPJMD (Rp)	Target APBD Perubahan (Rp)	Realisasi		
			Rp	Perubahan RPJMD (%)	APBD Perubahan (%)
2016	137.572.405.843,00	162.752.106.060,00	141.948.375.329,60	103,18	87,22
2017	204.787.270.763,00	204.787.270.763,00	201.241.720.827,00	98,27	98,27
2018	220.533.845.051,00	220.533.845.051,00	212.179.942.828,00	96,21	96,21



Tahun	Target Perubahan RPJMD (Rp)	Target APBD Perubahan (Rp)	Realisasi		
			Rp	Perubahan RPJMD (%)	APBD Perubahan (%)
2019	192.283.845.000,00	223.614.064.000,00	235.305.957.367,33	122,37	105,23
2020	195.121.923.623,49	270.692.554.000,00	279.185.054.319,53	143,08	103,14

Sumber : Perubahan RPJMD Kab.Maros Tahun 2016-2020
LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros

Berdasarkan tabel 3.4, nampak bahwa realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah selama lima tahun (2016-2020) mengalami fluktuatif. Jika dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD, maka realisasi tertinggi pada tahun 2020 sebesar 143,08 persen. Jika dibandingkan dengan target APBD Perubahan, maka realisasi yang cukup tinggi pada Tahun 2019 sebesar 105,23 persen. Berikut gambaran kinerja penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Maros selama lima tahun (2016 s/d 2020).

Gambar 3.14
Kinerja Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kab. Maros Tahun 2016-2020



Sumber : LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros

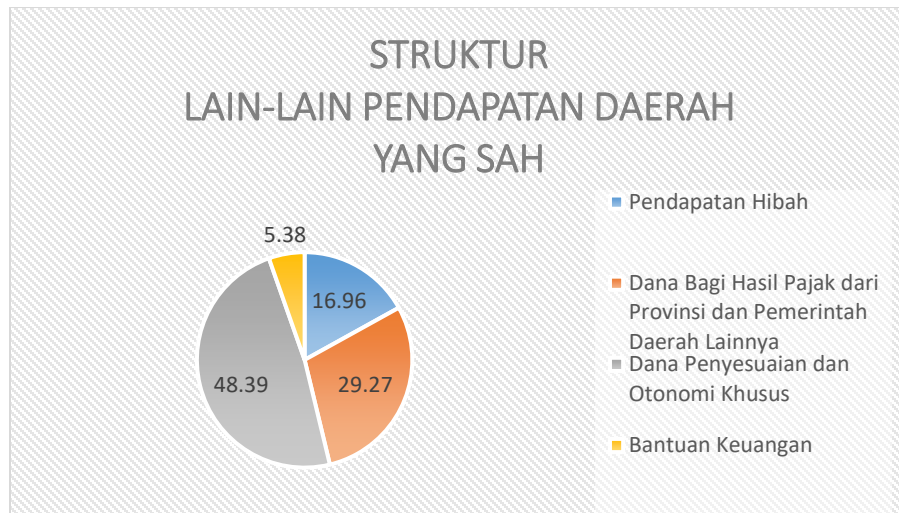
Berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020) penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami pertumbuhan yang cukup positif setiap tahunnya sebesar 15,35 persen. Tahun 2016 penerimaan sebesar Rp 141 M, Tahun 2017 sampai dengan 2018 berada di kisaran angka Rp 201 M, Tahun 2019 di kisaran angka Rp 235 M dan Tahun 2020 meningkat berada di kisaran angka Rp 279 M.

Untuk kontribusi masing-masing komponen pembentuk Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah selama lima tahun, Dana Penyesuaian dan Otonom Khusus memberi kontribusi paling besar sebesar 48,39 persen tiap tahun, Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 29,27



persen, Hibah 16,96 persen dan Bantuan Keuangan 5,38 persen. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus memberi kontribusi yang paling besar berasal dari adanya Dana Desa dan Dana Insentif Daerah. Kontribusi ketiga komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.15
Struktur Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros

Pendapatan Hibah, selama kurun waktu lima tahun (2016-2020) penerimaan dari pos ini mengalami fluktuatif dengan rata-rata realisasi penerimaan sekitar 37,63 persen tiap tahunnya. Berikut gambaran kinerja Lain-lain Pendapatan Hibah selama lima tahun:

Gambar 3.16
Kinerja Lain-lain Pendapatan Hibah Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros



Dana Bagi Hasil Pajak, selama kurun waktu lima tahun realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak cukup fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 4,55 persen tiap tahunnya. Berikut gambaran kinerja Dana Bagi Hasil Pajak selama kurun waktu lima tahun:

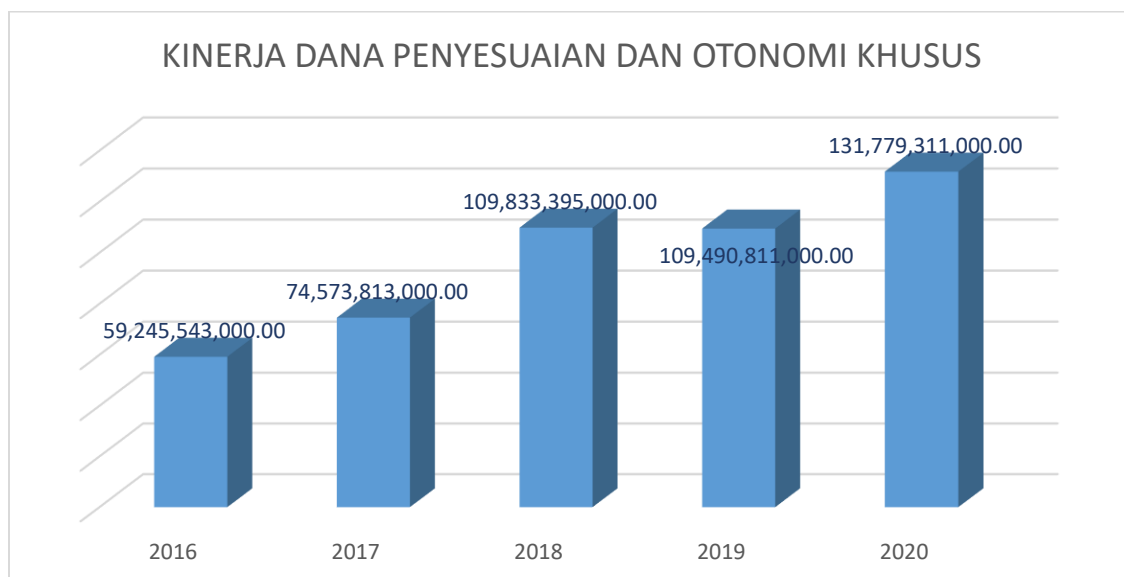
Gambar 3.17
Kinerja Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Selama kurun waktu lima tahun rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sekitar 18,64 persen tiap tahunnya. Berikut gambaran kinerja Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:

Gambar 3.18
Kinerja Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

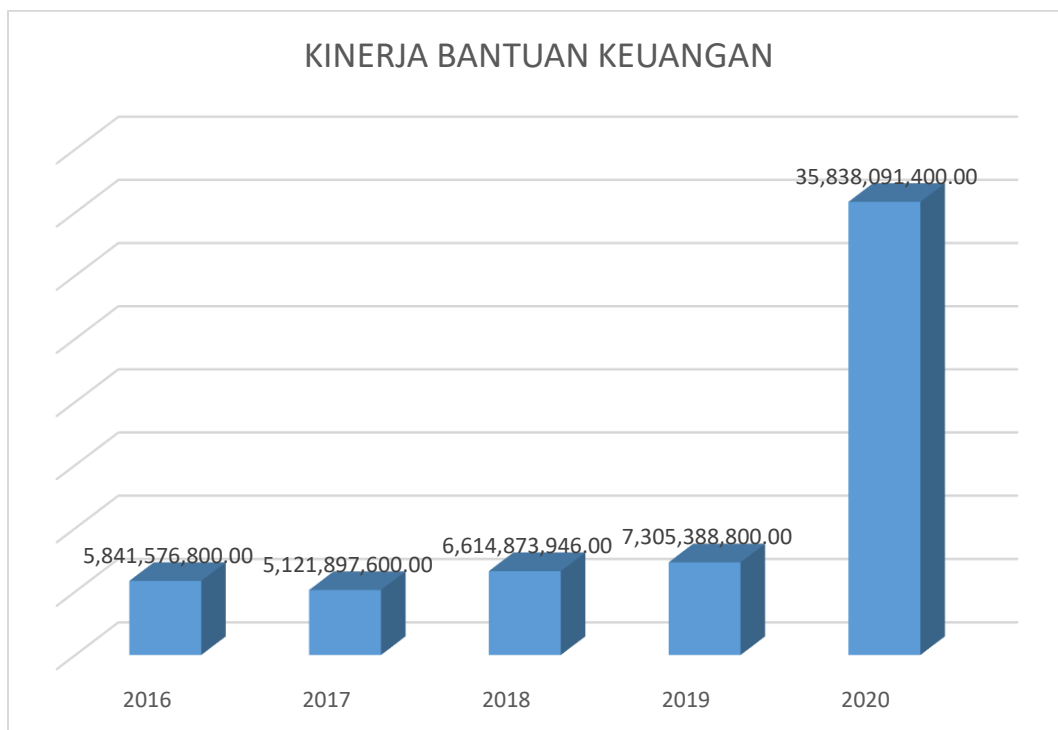


Sumber : LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros



Bantuan Keuangan, selama kurun waktu lima tahun rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi mencapai 83,57 persen tiap tahunnya. Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan sekitar 19,44 persen, hanya berkisar senilai Rp 6 M. Pada Tahun 2020 terdapat peningkatan yang cukup signifikan adalah adanya bantuan dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 25 M yang diserahkan pada saat perayaan hari jadi Kabupaten Maros. Berikut gambaran kinerja penerimaan Bantuan Keuangan selama kurun waktu lima tahun:

Gambar 3.19
Kinerja Bantuan Keuangan Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros

Gambaran lebih rinci kondisi pendapatan daerah Kabupaten Maros selama Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat sebagaimana table berikut ini:



Tabel 3.5
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Rata2 Pert. (%)
	PENDAPATAN	1.374.566.925.494,76	1.299.787.473.996,01	1.414.913.465.724,41	1.463.422.127.375,00	1.380.928.002.665,97	0,242
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	165.487.675.628,16	194.999.053.694,01	219.844.779.862,41	248.671.312.209,67	219.096.914.071,44	6,359
	Pendapatan Pajak Daerah	70.683.640.411,95	102.810.769.324,60	117.385.115.855,00	134.893.941.585,00	110.723.082.095,00	11,325
	Pendapatan Retribusi Daerah	56.145.613.762,43	17.844.884.895,26	21.050.163.668,09	21.820.587.100,53	15.239.082.951,97	-15,351
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.314.224.366,00	11.528.460.497,05	11.522.540.365,00	13.257.062.871,00	11.911.500.818,00	3,325
	Lain-lain PAD Yang Sah	28.344.197.087,78	62.814.938.977,10	69.886.959.974,32	78.699.720.653,14	81.223.248.206,47	29,738
	DANA PERIMBANGAN	1.067.130.874.537,00	903.546.699.475,00	982.888.743.034,00	979.444.857.798,00	882.646.034.275,00	-3,356
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	27.550.481.869,00	21.992.267.088,00	25.400.729.967,00	22.040.518.662,00	21.162.627.680,00	-4,378
	Dana Alokasi Umum (DAU)	704.125.166.000,00	691.755.951.000,00	692.130.885.100,00	746.051.655.000,00	666.954.323.000,00	-0,903
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	335.455.226.668,00	189.798.481.387,00	265.357.127.967,00	211.352.684.136,00	194.529.083.595,00	-6,384
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	141.948.375.329,60	201.241.720.827,00	212.179.942.828,00	235.305.957.367,33	279.185.054.319,53	15,351
	Pendapatan Hibah	23.049.973.219,00	61.718.389.372,00	43.302.276.758,00	47.422.181.589,00	48.766.443.332,00	37,635



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	53.811.282.310,60	59.827.620.855,00	52.429.397.124,00	71.087.575.978,33	62.801.208.587,53	4,549
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	59.245.543.000,00	74.573.813.000,00	109.833.395.000,00	109.490.811.000,00	131.779.311.000,00	18,640
Bantuan Keuangan	5.841.576.800,00	5.121.897.600,00	6.614.873.946,00	7.305.388.800,00	35.838.091.400,00	83,568

Sumber : LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros

**C. Belanja Daerah**

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja daerah. Belanja daerah mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, dimana rata-rata pertumbuhan mencapai 1,98 persen setiap tahunnya.

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 s/d 2020

Tahun	Target Perubahan RPJMD (Rp)	Target APBD Perubahan (Rp)	Realisasi		
			Rp	Perubahan RPJMD (%)	APBD Perubahan (%)
2016	1.366.920.460.796,00	1.457.649.334.796,80	1.339.192.825.383,00	97,97	91,87
2017	1.418.258.431.746,00	1.418.258.431.746,00	1.275.149.418.884,00	89,91	89,91
2018	1.515.687.855.238,00	1.515.687.856.038,00	1.362.441.778.753,33	89,89	89,89
2019	1.439.420.490.000,00	1.551.449.773.598,61	1.406.874.897.327,72	97,74	90,68
2020	1.477.453.492.150	1.575.720.596.905,00	1.465.617.061.618,03	99,20	93,01

Sumber : Perubahan RPJMD Kab.Maros Tahun 2016-2020
LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros

Berdasarkan tabel 3.6 nampak bahwa rata-rata realisasi belanja daerah sebesar 90 persen setiap tahunnya baik dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD maupun target APBD Perubahan. Jika dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD, maka realisasi tertinggi pada Tahun 2020 sebesar 99,20 persen. Jika dibandingkan dengan target APBD Perubahan, maka realisasi tertinggi pada tahun 2020 sebesar 93,01 atau dengan nilai Rp 1.465.617.061.618,03 dan realisasi belanja daerah terendah pada Tahun 2019 dengan nilai Rp 1.327.195.010.760,72 atau sekitar 85,55 persen.

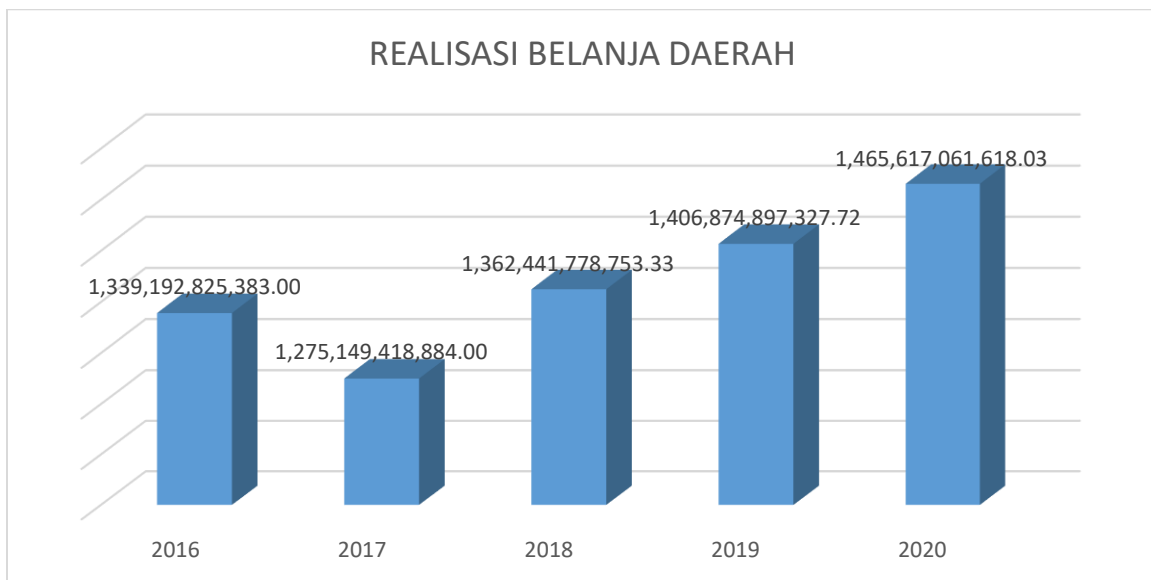
Adapun dalam kurun waktu selama lima tahun (2016-2020) belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan kelompok Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Selama kurun waktu lima tahun tersebut, realisasi belanja daerah mengalami fluktuatif. Tahun 2016 realisasi belanja sebesar Rp 1.339.192.825.383,00, kemudian di Tahun



2017 realisasi belanja daerah sebesar Rp 1.275.149.418.884,00, Tahun 2018 realisasi belanja daerah mencapai Rp 1.362.441.778.753,33, Tahun 2019 mencapai Rp 1.406.874.897.327,72 dan di Tahun 2020 mencapai Rp 1.465.617.061.618,03. Selama kurun waktu lima tahun, pertumbuhan nilai realisasi belanja daerah mencapai 1,90 persen pertahun. Berikut gambaran kinerja belanja daerah Kabupaten Maros selama lima tahun (2016 s/d 2020).

Gambar 3.20
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros

Jika dilihat dari postur belanja daerah selama kurun waktu lima tahun (2016-2020) lebih didominasi oleh belanja tidak langsung yaitu sebesar 52,72 persen pertahunnya dan belanja langsung sebesar 47,28 persen pertahun. Komposisi belanja tidak langsung yang lebih besar mengindikasikan terbatasnya kapasitas fiskal daerah untuk mendukung belanja program dan kegiatan yang terkait langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 3.21
Struktur Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros

**1) Belanja Tidak Langsung**

Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan bantuan social, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Tabel 3.7
Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Maros Tahun 2016 s/d 2020

Tahun	Target Perubahan RPJMD (Rp)	Target APBD Perubahan (Rp)	Realisasi		
			Rp	Perubahan RPJMD (%)	APBD Perubahan (%)
2016	741.798.054.828	740.711.513.628,00	707.962.546.806,00	95,44	95,58
2017	703.817.209.020	721.091.792.770,00	665.458.303.864,00	94,55	92,28
2018	717.857.913.500	746.007.250.500,00	653.595.104.241,00	91,05	87,61
2019	761.980.490.000	796.823.192.000,61	769.613.623.496,72	101,00	96,59
2020	774.326.170.574	829.732.504.400,00	777.163.030.107,78	100,37	93,66

Sumber : Perubahan RPJMD Kab.Maros Tahun 2016-2020
LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros

Berdasarkan tabel 3.7 nampak bahwa rata-rata realisasi belanja tidak langsung daerah sebesar 90 persen setiap tahunnya baik dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD maupun target APBD Perubahan. Jika dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD, maka realisasi tertinggi pada Tahun 2019 sebesar 101,00 persen. Jika dibandingkan dengan target APBD Perubahan, maka realisasi tertinggi pada tahun 2019 sebesar 96,59 persen atau dengan nilai Rp 769.261.273.831,00 dan realisasi belanja tidak langsung daerah terendah pada Tahun 2018 dengan nilai Rp 653.595.104.241,00 atau sekitar 87,61 persen.

Secara umum belanja tidak langsung mengalami pertumbuhan sekitar 2,16 persen tiap tahunnya, dimana komponen belanja pegawai -0,51 persen, belanja hibah 38,91 persen, belanja bantuan social -24,00 persen, belanja bantuan keuangan 8,99 dan belanja tidak terduga 76,32 persen. Peningkatan pos belanja tidak terduga pada Tahun Anggaran 2020 yang cukup signifikan dikarenakan adanya alokasi anggaran yang ditujukan untuk penanggulangan pandemic COVID-19. Postur belanja pegawai selama lima tahun masih mendominasi belanja tidak langsung sekitar 77,61 persen setiap tahunnya.

2) Belanja Langsung

Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Pertumbuhan belanja langsung selama lima tahun rata-rata 2,91 persen. Belanja pegawai cenderung melambat sekitar -19,61 persen, belanja barang dan jasa 13,37



persen dan belanja modal -2,06 persen. Penurunan cukup signifikan terjadi pada pos belanja pegawai, hal ini dikarenakan karena tidak adanya lagi jasa honorarium kegiatan PNS seperti tahun sebelumnya dan karena adanya tukin yang menjadi komponen belanja tidak langsung. Postur belanja langsung selama lima tahun didominasi oleh belanja modal rata-rata senilai 60,05 persen tiap tahunnya.

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Maros Tahun 2016 s/d 2020

Tahun	Target Perubahan RPJMD (Rp)	Target APBD Perubahan (Rp)	Realisasi		
			Rp	Perubahan RPJMD (%)	APBD Perubahan (%)
2016	625.122.405.968,00	716.637.821.168,00	631.230.278.577,00	100,98	88,08
2017	714.441.222.726,00	697.166.638.976,00	609.691.115.020,00	85,34	87,45
2018	797.829.941.738,00	769.680.604.738,00	708.846.674.512,33	88,85	92,10
2019	677.440.000.000,00	754.626.581.598,00	637.613.623.496,72	94,12	84,49
2020	703.127.321.976,32	745.988.092.505,00	688.454.031.510,25	97,91	92,29

Sumber : Perubahan RPJMD Kab.Maros Tahun 2016-2020
LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros

Berdasarkan tabel 3.8 nampak bahwa jika dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD, maka rata-rata realisasi belanja langsung sebesar 91 persen tiap tahunnya dan tertinggi pada Tahun 2016 sebesar 100,98 persen. Jika dibandingkan dengan target APBD Perubahan, maka rata-rata realisasi sebesar 86,92 persen tiap tahunnya dan realisasi tertinggi pada tahun 2020 sebesar 92,29 persen atau dengan nilai Rp 688.454.031.510,25 dan realisasi belanja langsung daerah terendah pada Tahun 2019 dengan nilai Rp 563.442.097.202,72 atau sekitar 74,67 persen.

Adapun realisasi rata-rata pertumbuhan belanja daerah Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada table berikut:



Tabel 3.9
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
	BELANJA	1.339.192.825.383,00	1.275.149.418.884,00	1.362.441.778.753,33	1.327.195.010.760,72	1.465.617.061.618,03
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	707.962.546.806,00	665.458.303.864,00	653.595.104.241,00	763.752.913.558,00	777.163.030.107,78
	Belanja Pegawai	588.796.479.859,00	520.993.826.776,00	516.334.465.305,00	570.963.603.716,00	566.186.615.385,00
	Belanja Hibah	13.755.903.200,00	22.415.396.450,00	35.789.328.965,00	26.313.751.360,00	52.213.070.700,00
	Belanja Bantuan Sosial	-	6.570.000.000,00	2.040.000.000,00	2.467.500.000,00	-
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Partai Politik	104.765.041.997,00	115.956.049.805,00	126.718.622.971,00	163.685.858.482,00	156.813.882.252,00
	Belanja Tidak Terduga	645.121.750,00	203.000.000,00	708.450.000,00	622.200.000,00	1.949.461.770,78
	BELANJA LANGSUNG	631.230.278.577,00	609.691.115.020,00	708.846.674.512,33	563.442.097.202,72	688.454.031.510,25
	Belanja Pegawai	17.388.980.192,00	17.266.685.000,00	27.146.863.000,00	7.016.900.000,00	1.532.600.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	191.401.046.933,00	232.572.085.338,00	243.735.440.577,33	201.252.222.280,72	317.895.327.730,15
	Belanja Modal	422.440.251.452,00	359.172.375.515,00	409.968.607.935,00	354.872.974.922,00	369.026.103.780,10

Sumber : LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros

**D. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 s/d 2020

Tahun	Target Perubahan RPJMD (Rp)	Target APBD Perubahan (Rp)	Realisasi		
			Rp	Perubahan RPJMD (%)	APBD Perubahan (%)
2016	53.637.077.553,00	77.687.050.770,00	66.840.458.182,64	124,62	86,04
2017	40.612.292.275,00	40.612.292.275,00	35.014.840.840,00	86,22	86,22
2018	36.855.587.699,00	36.855.587.699,00	32.443.312.667,53	88,03	88,03
2019	18.021.717.066,00	85.667.543.793,61	70.605.268.760,61	391,78	82,42
2020	15.684.070.423,03	130.977.088.129,00	124.550.862.690,89	794,12	95,09

Sumber : Perubahan RPJMD Kab.Maros Tahun 2016-2020
LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros

Berdasarkan tabel 3.10 nampak bahwa jika dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD, maka rata-rata realisasi pembiayaan daerah sebesar 296 persen tiap tahunnya dan tertinggi pada Tahun 2020 sebesar 794 persen. Jika dibandingkan dengan target APBD Perubahan, maka rata-rata realisasi sebesar 87,56 persen tiap tahunnya dan realisasi tertinggi pada tahun 2020 sebesar 95,09 persen atau dengan nilai Rp 124.550.862.690,89 dan realisasi terendah pada Tahun 2019 dengan nilai Rp 70.605.268.760,61 atau sekitar 82,42 persen.

Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Maros terdiri dari:

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan, dalam hal APBD dikatakan mengalami defisit, maka APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Maros berasal dari Pos penerimaan SILPA Tahun sebelumnya.

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Maros Tahun 2016 s/d 2020



Tahun	Target Perubahan RPJMD (Rp)	Target APBD Perubahan (Rp)	Realisasi		
			Rp	Perubahan RPJMD (%)	APBD Perubahan (%)
2016	26.775.077.553,00	26.775.077.553,00	26.035.703.634,64	97,24	97,24
2017	20.290.749.584,00	20.290.749.584,00	20.585.049.198,00	101,45	101,45
2018	30.799.312.666,00	30.793.312.666,00	30.793.312.667,53	99,98	100,00
2019	8.959.422.033,00	69.605.268.760,61	69.605.268.760,61	776,89	100,00
2020	8.101.812.725,19	124.914.813.096,00	124.550.862.690,89	1537,32	99,71

Sumber : Perubahan RPJMD Kab.Maros Tahun 2016-2020
LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros

Berdasarkan tabel 3.11 nampak bahwa jika dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD, maka rata-rata realisasi penerimaan pembiayaan daerah sebesar 522,58 persen tiap tahunnya dan tertinggi pada Tahun 2020 sebesar 1537,32 persen. Jika dibandingkan dengan target APBD Perubahan, maka rata-rata realisasi sebesar 99,68 persen tiap tahunnya dan realisasi tertinggi pada tahun 2017 sebesar 101,45 persen atau dengan nilai Rp 20.585.049.198,00 dan realisasi terendah pada Tahun 2016 dengan nilai Rp 26.035.703.634,64 atau sekitar 97,24 persen.

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan, dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran pembiayaan Kabupaten Maros diisi oleh Pos Penyertaan Modal Daerah/Investasi Daerah dan Pos Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo.

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Maros Tahun 2016 s/d 2020

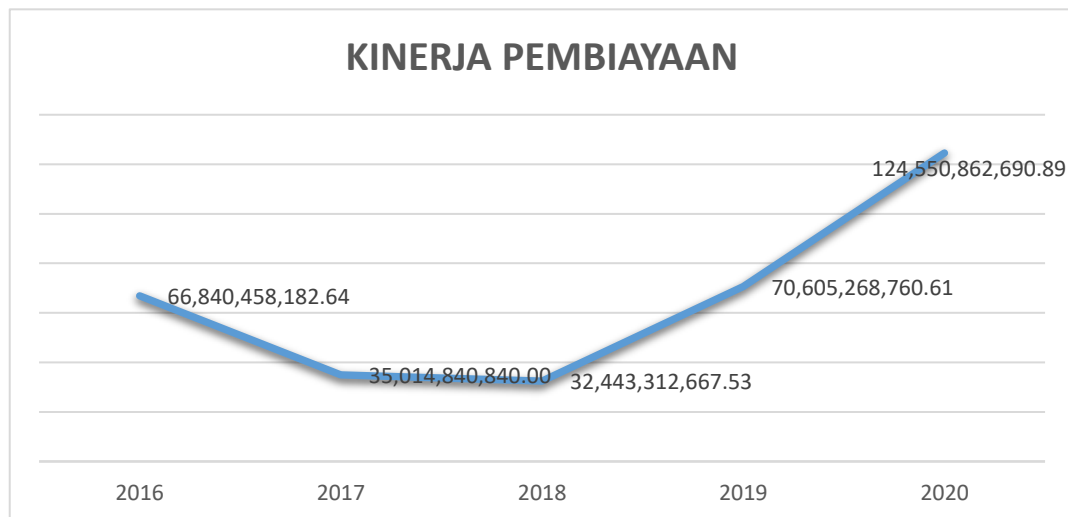
Tahun	Target Perubahan RPJMD (Rp)	Target APBD Perubahan (Rp)	Realisasi		
			Rp	Perubahan RPJMD (%)	APBD Perubahan (%)
2016	26.862.000.000,00	50.911.973.217,00	40.804.754.548,00	151,91	80,15
2017	20.321.542.691,00	20.321.542.691,00	14.429.791.642,00	71,01	71,01
2018	6.062.275.033,00	6.062.275.033,00	1.650.000.000,00	27,22	27,22
2019	9.062.275.033,00	16.062.275.033,00	1.000.000.000,00	11,03	6,23
2020	7.582.257.697,84	6.062.275.033,00	-	0,00	0,00

Sumber : Perubahan RPJMD Kab.Maros Tahun 2016-2020
LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros



Berdasarkan tabel 3.12 nampak bahwa jika dibandingkan dengan target Perubahan RPJMD, maka rata-rata realisasi pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 52,23 persen tiap tahunnya dan tertinggi pada Tahun 2016 sebesar 151,91 persen. Jika dibandingkan dengan target APBD Perubahan, maka rata-rata realisasi sebesar 36,92 persen tiap tahunnya dan realisasi tertinggi pada tahun 2016 sebesar 80,15 persen atau dengan nilai Rp 40.804.754.548,00 dan tahun 2020 tidak ada realisasi dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020

Gambar 3.22
Kinerja Pembiayaan Kabupaten Maros Tahun 2016-2020



Sumber : LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros

Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA selama lima tahun 2016-2020 secara umum mengalami peningkatan. Tahun 2016 nilai penerimaan pembiayaan sebesar Rp 26.035.703.634,64 dan di Tahun 2020 nilai penerimaan pembiayaan sebesar Rp 124.550.862.690,89.

Sedangkan dari realisasi pengeluaran pembiayaan diperoleh gambaran realisasi pengeluaran pembiayaan mengalami penurunan setiap tahunnya, dimana selama tiga tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Maros tidak lagi mengambil kebijakan dalam Pembayaran Utang. Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah disajikan pada table 3.7 berikut ini.





Tabel 3.13
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Maros
Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
	PEMBIAYAAN	66.840.458.182,64	35.014.840.840,00	32.443.312.667,53	70.605.268.760,61	124.550.862.690,89
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	26.035.703.634,64	20.585.049.198,00	30.793.312.667,53	69.605.268.760,61	124.550.862.690,89
	SILPA Tahun Sebelumnya	26.035.703.634,64	20.585.049.198,00	30.793.312.667,53	69.605.268.760,61	124.550.862.690,89
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	40.804.754.548,00	14.429.791.642,00	1.650.000.000,00	1.000.000.000,00	-
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	25.049.973.219,00	10.068.118.000,00	1.650.000.000,00	1.000.000.000,00	-
	Pembayaran Utang	15.754.781.329,00	4.361.673.642,00	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	(14.769.050.913,36)	6.155.257.556,00	29.143.312.667,53	68.605.268.760,61	124.550.862.690,89
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	20.585.049.198,40	30.793.312.667,53	81.614.999.638,61	106.700.813.351,89	53.640.400.284,76

Sumber : LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros



3.1.2 Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksud sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundangundangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Neraca daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi asset, kewajiban dan ekuitas daerah pada waktu tertentu. Laporan neraca daerah akan menggambarkan informasi penting kepada manajemen pemerintah daerah, pihak legislative daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau asset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada suatu tanggal tertentu. Pada setiap elemen utama dari neraca daerah akan diturunkan dalam beberapa sub-sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan neraca Pemerintah Kabupaten Maros selama kurun waktu lima tahun (2016-2020) dapat dilihat dari tabel berikut ini:



Tabel 3.14
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Maros
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	ASET						
	ASET LANCAR	78.387.281.125,86	166.104.741.991,67	166.104.741.991,67	219.059.859.654,63	114.704.119.092,70	19,23
	Kas	20.774.556.583,00	69.607.551.510,61	69.607.551.510,61	124.558.042.519,89	39.861.803.738,83	49,20
	Piutang	44.475.110.976,53	60.834.637.253,89	60.834.637.253,89	54.309.584.332,61	54.759.815.612,99	5,38
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	3.788.261.343,52	1.509.245.209,27	1.509.245.209,27	2.669.473.593,30	318.268.823,47	(14,27)
	Piutang Lainnya	784.711.167,75	21.182.910.965,20	21.182.910.965,20	27.975.087.778,43	4.957.401.486,35	509,85
	Persediaan	8.564.641.055,06	12.970.397.052,70	12.970.397.052,70	9.547.671.430,40	14.806.829.431,06	16,03
	INVESTASI	49.035.044.896,59	61.621.788.819,00	61.621.788.810,00	64.028.673.687,00	66.436.948.816,96	6,67
	Investasi Permanen	49.035.044.896,59	61.621.788.819,00	61.621.788.810,00	64.028.673.687,00	66.436.948.816,96	6,67
	ASET TETAP	2.015.981.258.240,23	2.463.435.463.987,73	2.463.435.463.987,71	2.692.235.809.936,01	2.873.397.397.529,10	7,64
	Tanah	547.852.590.901,96	548.925.434.626,67	548.925.434.626,67	551.072.247.256,67	554.816.008.431,67	0,25
	Peralatan dan Mesin	295.473.395.332,34	386.778.969.798,28	386.778.969.798,26	440.203.487.835,16	508.520.307.048,72	12,05
	Gedung dan Bangunan	750.947.554.263,80	992.251.455.224,12	992.251.455.224,12	1.111.656.436.163,87	1.189.352.412.659,15	10,23
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.327.451.210.751,61	1.716.971.244.323,07	1.716.971.244.323,07	1.926.478.542.479,92	2.102.270.069.125,92	10,13
	Aset Tetap Lainnya	13.323.499.088,50	29.382.240.068,50	29.382.240.068,50	37.311.772.001,49	43.288.261.129,49	32,71
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	63.757.423.540,47	23.970.342.954,55	23.970.342.954,55	24.945.309.048,12	45.009.081.415,85	4,42
	Akumulasi Penyusutan	(982.824.415.638,45)	(1.234.844.223.007,46)	(1.234.844.223.007,46)	(1.399.431.984.849,22)	(1.569.858.742.281,70)	10,23
	DANA CADANGAN	-	-				
	ASET LAINNYA	35.894.794.953,02	37.892.093.569,18	37.892.093.569,18	41.041.866.993,73	46.916.488.615,16	5,64
	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-				
	Tuntutan Ganti Rugi	145.677.983,83	1.501.206.823,33	1.501.206.823,33	188.531.125,00	237.301.125,00	173,78
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Aset Tak Berwujud	722.059.722,67	1.164.714.783,33	1.164.714.783,33	1.618.893.766,67	1.341.679.999,99	16,64
	Aset Lain-lain	35.027.057.246,52	35.226.171.962,52	35.226.171.962,52	39.234.442.102,06	45.337.507.490,17	5,50
	JUMLAH ASET	2.179.298.379.215,70	2.729.054.088.367,58	2.729.054.088.358,56	3.016.366.210.271,37	3.101.454.954.053,92	7,72
2	KEWAJIBAN	29.648.419.509,69	24.640.396.442,82	21.120.998.236,33	57.097.112.333,27	39.857.409.135,49	21,79
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	29.648.419.509,69	24.640.396.442,82	21.120.998.236,33	57.097.112.333,27	39.857.409.135,49	21,79
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-	2.282.750,00	7.179.909,00	-	214,53
	Utang Kepada BPJS Kesehatan	13.692.967.369,00	11.024.586.173,00	5.208.360.273,00	46.426.953,00	46.426.953,00	(34,27)
	Utang Kepada PT Taspen	-	586.078.584,00	1.405.026,00	-	-	(99,76)
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-	-	-	-	-
	Pendapatan Diterima Dimuka	595.930.465,25	957.743.157,08	142.845.365,41	88.422.166,66	502.865.243,17	81,25
	Utang Beban	1.176.136.783,00	1.273.317.246,00	1.212.722.338,00	1.430.762.058,00	1.412.615.969,00	4,04
	Utang jangka Pendek Lainnya	14.183.384.892,44	10.798.671.282,74	14.553.382.483,92	55.524.321.246,61	37.895.500.970,32	52,14
3	EKUITAS DANA						
	JUMLAH EKUITAS	2.149.629.959.706,40	2.355.158.011.561,32	2.707.933.090.122,25	2.959.269.148.020,15	3.061.597.544.918,41	7,46
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.179.278.379.216,09	2.379.798.408.004,14	2.729.054.088.358,58	3.016.366.260.353,42	3.101.454.954.053,90	7,45

Sumber : LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros



3.1.2.1 Aset Daerah

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat social dan ekonomi bagi masyarakat maupun pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

Analisis meliputi tiga aspek utama yaitu asset lancar, asset tetap dan asset lainnya. Selama kurun waktu lima tahun (2016-2020), pertumbuhan rata-rata jumlah asset Pemerintah Kabupaten Maros mencapai 7,72 persen pertahun. Pertumbuhan tersebut terutama dikontribusi dari asset lancar daerah yang mencapai 19,23 persen, asset tetap hanya 7,64 persen dan asset lainnya 5,64 persen. Kontribusi asset terbesar bersumber dari Aset Tetap dengan rata-rata nilai kontribusi sekitar 90,99 persen setiap tahunnya.

3.1.2.2 Kewajiban Daerah

Kewajiban daerah merupakan dampak dari pelaksanaan tugas atau tanggung jawab yang terjadi di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi kepada pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek.

Kewajiban Jangka Pendek Kabupaten Maros selama Tahun 2016-2020 stabil diangka rata-rata Rp 20 M, namun di Tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sekitar 170,33 persen hingga mencapai angka Rp 55 M. Peningkatan yang cukup signifikan ini bersumber dari pekerjaan fisik dari beberapa OPD yg terlambat menyelesaikan administrasi pembayarannya dikarenakan pekerjaan fisik banyak yg berakhir di akhir tahun anggaran.

3.1.2.3 Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan selisih antara asset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas terdiri dari Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara asset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi, asset tetap dan asset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang.

Dari segi aspek ekuitas, Kabupaten Maros Tahun 2016-2020 rata-rata bertumbuh senilai 7,46 persen tiap tahunnya.

3.1.2.4 Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas dan Aktivitas)

Tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu



dengan kelompok yang lain. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 analisis neraca daerah sekurang-kurangnya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain :

(a) Rasio lancar = aktiva lancar : kewajiban jangka pendek

(b) Rasio *quick* = (aktiva lancar – persediaan) : kewajiban jangka pendek

- 2) Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain:

(a) Rasio total hutang terhadap total aset = total hutang : total aset

(b) Rasio hutang terhadap modal = total hutang : total ekuitas

Tabel 3.15

Tabel Analisa Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio Likuiditas					
	Rasio Lancar	2,64	6,74	7,86	3,84	2,88
	Rasio Quick	2,36	6,21	7,25	3,67	2,51
2	Rasio Solvabilitas					
	Rasio Total Hutang terhadap Total Asset	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
	Rasio Hutang terhadap Modal	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02

Sumber : LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros (diolah)

Tabel 3.16

Tabel Analisa Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	Nilai	Ket.
A	RASIO LIKUIDITAS		
1	Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	≥ 1	Sangat mampu memenuhi kewajiban jangka pendek
2	Rasio Quick (<i>Quick Ratio</i>)	≥ 1	Sangat mampu memenuhi kewajiban jangka pendek secara cepat
B	RATIO SOLVABILITAS		
1	Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset	≥ 1	Mampu melunasi hutang dengan asset yang tersedia
2	Rasio Total Hutang Terhadap Ekuitas	≥ 1	Mampu melunasi hutang dengan modal yang tersedia



Dari hasil analisis neraca keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Maros selama kurun waktu lima tahun (2016-2020) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Rasio lancar (*Current Ratio*) dan Rasio Quick (*Quick Ratio*) Kabupaten Maros selama lima tahun (2016-2020) menunjukkan bahwa semua kewajiban jangka pendek telah mampu didanai dari asset lancar secara keseluruhan sampai kewajiban jangka pendek jatuh tempo.
2. Rasio total hutang terhadap total asset, menunjukkan bahwa setiap kewajiban pemerintah daerah belum mampu didanai dengan asset pemerintah daerah.
3. Rasio total hutang terhadap ekuitas, menunjukkan bahwa setiap kewajiban pemerintah daerah belum mampu didanai dengan ekuitas dana pemerintah daerah.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan dan pembiayaan. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja serta ketepatan dalam memanfaatkan pembiayaan daerah.

a. Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Maros sepanjang tahun 2016-2020, diarahkan dengan penerapan :

1. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan rangkaian kegiatan: 1) penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi daerah, 2) penentuan besarnya pajak atau retribusi daerah yang terutang, 3) penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, 4) pemungutan pajak atau retribusi daerah. Mengoptimalkan pengelolaan Badan-badan Usaha Milik Daerah agar menghasilkan penerimaan yang terus meningkat;
2. Memberikan bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber pendapatan kepada aparaturnya;
3. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang berkesinambungan terhadap sumber-sumber pendapatan;
4. Perbaiki atau pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan pelayanan umum.
5. Menerapkan norma dan prinsip anggaran yang berbasis kinerja, dengan memberikan penekanan pada aspek-aspek:
 - *Transparansi dan akuntabilitas*, yang merupakan persyaratan utama untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab, sesuai



Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Untuk dapat menilai kinerja dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat, maka APBD harus menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang ditampung dalam APBD tahunan;

- *Disiplin anggaran*, di mana struktur dan penekanan alokasi anggaran harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan era sebelumnya, pembangunan dan pelayanan umum. Karena itu, anggaran harus disusun berdasarkan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan;
- *Keadilan anggaran*, yakni norma yang mewajibkan APBD disusun demi kepentingan pelayanan umum tanpa diskriminasi;
- *Efisiensi dan efektivitas anggaran*, yakni norma yang mewajibkan anggaran dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menghasilkan kesejahteraan dan meningkatkan laju pertumbuhan.

b. Kebijakan Belanja

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Maros sepanjang Tahun 2016-2020, diarahkan dengan penerapan :

1. Mengupayakan penghematan, efisiensi dan efektifitas anggaran belanja secara proporsional dan dilakukan melalui memprioritaskan alokasi belanja daerah pada program dan kegiatan yang memiliki dampak kuat terhadap pencapaian prioritas program pembangunan daerah dan berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat.
2. Belanja daerah dititikberatkan kepada prioritas pembangunan daerah yaitu:
 - a. Peningkatan dan pemerataan perekonomian daerah yang mandiri, berdaya saing serta berbasis potensi unggulan daerah;
 - b. Peningkatan kualitas hidup manusia yang disertai dengan perluasan cakupan layanan social masyarakat;
 - c. Penciptaan kondusifitas wilayah yang dinamis, demokratis, aman dan berbudaya;
 - d. Peningkatan kinerja dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang bersih, transparan dan akuntabel;
 - e. Percepatan dan pemerataan infrastruktur wilayah serta pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.
3. Diasumsikan ada kenaikan belanja pegawai negeri sipil sebesar 10 persen setiap tahun.



4. Belanja hibah dan bantuan social dianggarkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah
5. Belanja langsung akan selalu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setiap tahun dan akan diupayakan secara merata pada semua sektor.

c. Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Maros sepanjang tahun 2016-2020, diarahkan pada perhitungan perkiraan sisa lebih anggaran (SILPA) baik berupa pelampauan pendapatan atas dasar peningkatan kinerja maupun sisa belanja atas asumsi terjadinya efisiensi belanja. Kebijakan umum pengeluaran pembiayaan diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan pengeluaran pembiayaan dalam rangka tambahan modal BUMD. Defisit BUMD direncanakan akan diatasi melalui selisih antara proyeksi penerimaan pembiayaan dengan rencana pengeluaran pembiayaan.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran yang dimaksud adalah terkait dengan realisasi dan proporsin belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Analisis belanja pemenuhan kebutuhan aparatur bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan anggaran untuk operasional aparatur dan kebijakan apa yang perlu dilakukan untuk melakukan efisiensi dan efektifitas kerja aparatur. Berikut adalah data realisasi pemenuhan kebutuhan aparat Kabupaten Maros selama lima tahun terakhir Tahun 2016-2020.

Tabel 3.17
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2016-2020

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase (%)
		(a)	(b)	(a)/(b)x100%
1	Tahun 2016	606.185.460.051,00	1.339.192.825.383,00	45,26
2	Tahun 2017	538.260.511.776,00	1.275.149.418.884,00	42,21
3	Tahun 2018	543.481.328.305,00	1.362.441.778.753,33	39,89
4	Tahun 2019	577.980.503.716,00	1.327.195.010.760,72	43,55
5	Tahun 2020	567.719.215.385,00	1.465.617.061.618,03	38,74

Sumber : LRA Tahun 2016-2020, BPKPD Kabupaten Maros (diolah)

Bila memperhatikan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total belanja daerah pada table di atas, diketahui bahwa belanja pemenuhan kebutuhan



aparatur selama lima tahun berkisar 41,93 persen dari total pengeluaran pemerintah Kabupaten Maros.

3.2.2 Analisis Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang menghasilkan pembiayaan netto. Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa mendatang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Adapun analisis pembiayaan daerah dapat dilakukan melalui:

3.2.2.1 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup deficit riil anggaran Pemerintah Daerah.

Tabel 3.18
Komposisi Penutup Defiist Riil Anggaran Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.374.566.925.494,76	1.299.787.473.996,01	1.414.913.465.724,41	1.365.290.555.352,00	1.380.928.002.665,97
	Dikurangi realisasi					
2	Belanja Daerah	1.339.192.825.383,00	1.275.149.418.884,00	1.362.441.778.753,33	1.327.195.010.760,72	1.465.617.061.618,03
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	40.804.754.548,00	14.429.791.642,00	1.650.000.000,00	1.000.000.000,00	-
A	Defisit Riil	(5.430.654.436,24)	10.208.263.470,01	50.821.686.971,08	37.095.544.591,28	(84.689.058.952,06)
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	26.035.703.634,64	20.585.049.198,00	30.793.312.667,53	69.605.268.760,61	124.550.862.690,89
5	Pencairan Dana Cadangan					
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan					
7	Penerimaan Pinjaman Daerah					



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
9	Penerimaan Piutang Daerah					
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	26.035.703.634,64	20.585.049.198,00	30.793.312.667,53	69.605.268.760,61	124.550.862.690,89
A-B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	(31.466.358.070,88)	(10.376.785.727,99)	20.028.374.303,55	(32.509.724.169,33)	(209.239.921.642,95)

Sumber : BPKPD Kabupaten Maros



2.2.2 Analisis Realisasi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran

Tabel 3.19
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
1	Jumlah SILPA	20.585.049.198,40		30.793.312.667,53		81.614.999.638,61		124.550.862.690,89		53.640.400.284,76	
2	Pelampauan Penerimaan PAD	(10.631.048.771,84)	(51,64)	(60.586.923.306,00)	-197	(53.161.394.691,59)	-65,1	(60.808.704.987,00)	-48,8	(94.717.727.169,56)	-177
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	(96.588.256.195,40)	(469,22)	(52.818.416.923,00)	-172	(19.224.833.947,00)	-23,6	(21.720.374.675,00)	-17,4	(94.156.880.849,00)	-176
4	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2,00	0,00	(5.096.410.628,00)	-16,6	(3.657.123.242,00)	-4,48	(50.087.144.857,00)	-40,2	(43.993.002.912,47)	-82
5	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	96.564.884.410,00	469,10	117.469.876.766,12	381,5	119.944.778.255,67	147	206.389.378.819,89	165,7	221.910.164.612,90	413,7
6	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan	29.648.419.509,69	144,03	24.640.396.442,82	80,02	21.120.998.236,33	25,88	57.097.112.333,27	45,84	68.111.087.314,27	127
7	Kegiatan Lanjutan	63.757.423.540,47	309,73	27.876.568.725,35	90,53	23.970.342.954,55	29,37	24.945.309.048,12	20,03	24.945.309.048,12	46,5

Sumber : BPKPD Kabupaten Maros, 2021



3.3 Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 kerangka pendanaan merupakan analisis pengelolaan keuangan daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional. Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

3.3.1 Asumsi Makro Ekonomi

Asumsi makro ekonomi daerah Kabupaten Maros diharapkan dapat memberikan dampak positif pada kondisi keuangan daerah Kabupaten Maros ke depannya. Terkait dengan asumsi ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros mengalami perubahan yang cukup signifikan. Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros mengalami pelambatan, dimana pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 1,24 persen yang diakibatkan oleh menurunnya jasa penumpang pesawat diakibatkan oleh naiknya harga tiket pesawat. Diketahui jika PDRB Kabupaten Maros sekitar 40 persen berasal dari sektor transportasi. Tahun 2020 mengalami kontraksi sebagai efek dari merebaknya pandemic COVID-19 pada akhir 2019 di Wuhan Cina dan merebak ke Indonesia pada awal bulan Maret Tahun 2020. Pandemi COVID-19 memberi dampak krisis ekonomi di seluruh penjuru dunia yang cukup memberi pengaruh signifikan terhadap penerimaan PAD maupun Dana Transfer dari Pemerintah Pusat.

Langkah awal yang dilakukan dalam menghitung kapasitas riil keuangan daerah adalah dengan mengidentifikasi penerimaan daerah dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan antara lain asumsi ekonomi makro daerah serta asumsi-asumsi lainnya yang turut mempengaruhi. Asumsi-asumsi yang digunakan akan menjadi pedoman dalam menentukan proyeksi besaran pendapatan daerah dan juga besarnya kebutuhan belanja daerah untuk jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun asumsi Indikator makro ekonomi Kabupaten Maros selama lima tahun ke depan (2021-2026) dapat dilihat pada table berikut ini.



Tabel 3.20
Asumsi Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Maros Tahun 2021-2026

No	Indikator	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,82	2,78	4,66	6,17	6,55	7,13
2	Tingkat Pengangguran (%)	6,07	5,72	5,39	5,09	4,79	4,52
3	Tingkat Kemiskinan (%)	9,37	9,02	8,68	8,35	8,04	7,74
4	PDRB Perkapita (Rp Juta)	47,16	49,05	51,03	53,08	55,22	57,44
5	Indeks Pembangunan Manusia	70,38	70,91	71,44	71,97	72,51	73,05

Sumber : Data diolah, Bappeda 2021

Asumsi-asumsi pokok kebijakan fiscal khususnya Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 3.21
Asumsi Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Kabupaten Maros Tahun 2021-2026

Indikator	Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Pendapatan Asli Daerah	304.837.004.778,00	329.914.809.290,55	364.492.341.110,69	409.333.263.134,36	465.541.938.775,17	534.593.336.094,15
Pendapatan Dana Transfer	1.119.357.429.000,00	1.137.724.791.336,94	1.185.849.891.419,15	1.286.382.774.032,11	1.481.315.588.308,55	1.848.519.233.580,03
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	47.992.707.506,00	54.048.743.534,21	60.868.970.088,04	68.549.817.762,81	77.199.885.401,67	86.941.475.565,30

Sumber : Data Diolah, 2021

3.3.2 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam menentukan angka proyeksi perlu dilakukan penyesuaian agar diperoleh angka yang lebih realistis dan tidak terlalu optimis, mengingat dalam perencanaan keuangan lebih mengedepankan asas konservatif dan kehati-hatian. Hal ini terkait dengan beberapa pos pendapatan yang cenderung mengalami pertumbuhan sangat fluktuatif bahkan cenderung negative. Penetapan proyeksi penerimaan pos pendapatan dan alokasi belanja daerah mempertimbangkan realisasi pos penerimaan pendapatan dan serapan anggaran belanja daerah selain itu di masa pandemic COVID-19 terdapat beberapa



kebijakan-kebijakan pemerintah dan kondisi terkini terkait adanya dampak wabah COVID-19 yang juga harus dipertimbangkan (*refocussing dan realokasi anggaran*). Terkait dengan adanya wabah pandemic COVID-19 yang menyebabkan bencana kesehatan dan resesi terhadap perekonomian daerah bisa dipastikan jika untuk lima tahun kedepan pertumbuhan ekonomi daerah akan melambat dan kapasitas fiskal daerah pun akan semakin rendah mengingat adanya penurunan penerimaan pendapatan daerah terutama penerimaan PAD dan Dana Transfer Pusat.

Struktur pendapatan dan belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2021-2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berikut disajikan proyeksi APBD Tahun Anggaran 2021-2026:



Tabel 3.21
Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026

URAIAN	APBD Pokok 2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
PENDAPATAN	1.472.187.141.284,00	1.521.688.344.161,71	1.611.211.202.617,89	1.764.265.854.929,29	2.024.057.412.485,40	2.470.054.045.239,48
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	304.837.004.778,00	329.914.809.290,55	364.492.341.110,69	409.333.263.134,36	465.541.938.775,17	534.593.336.094,15
Pendapatan Pajak Daerah	166.280.000.000,00	192.036.233.806,04	221.782.024.864,13	256.135.342.679,73	295.809.878.234,51	341.629.870.933,24
Pendapatan Retribusi Daerah	71.512.000.000,00	57.789.410.499,70	46.700.077.831,73	37.738.700.752,12	30.496.941.345,36	24.644.818.525,45
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.911.500.818,00	12.406.561.094,53	12.922.196.836,84	13.459.263.192,89	14.018.650.851,93	14.601.287.521,59
Lain-lain PAD Yang Sah	55.133.503.960,00	67.682.603.890,28	83.088.041.578,00	101.999.956.509,62	125.216.468.343,38	153.717.359.113,86
PENDAPATAN TRANSFER	1.119.357.429.000,00	1.137.724.791.336,94	1.185.849.891.419,15	1.286.382.774.032,11	1.481.315.588.308,55	1.848.519.233.580,03
TRANSFER PUSAT	1.055.252.976.000,00	1.070.616.444.749,83	1.115.592.887.991,67	1.212.825.021.290,74	1.404.297.263.251,00	1.767.872.356.926,46
DANA PERIMBANGAN	930.902.461.000,00	903.323.657.465,66	877.364.726.443,32	852.904.486.301,02	829.831.267.982,61	808.042.161.104,23
TRANSFER UMUM	700.960.862.000,00	691.732.699.309,24	682.659.924.144,57	673.738.229.063,47	664.963.491.977,48	656.331.766.613,82
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	19.095.741.000,00	18.050.818.684,25	17.063.074.701,92	16.129.380.244,54	15.246.777.712,55	14.412.471.346,79
Dana Alokasi Umum (DAU)	681.865.121.000,00	673.681.880.625,00	665.596.849.442,65	657.608.848.818,94	649.716.714.264,93	641.919.295.267,03
DANA TRANSFER KHUSUS	229.941.599.000,00	211.590.958.156,42	194.704.802.298,75	179.166.257.237,55	164.867.776.005,13	151.710.394.490,40
DANA INSENTIF DAERAH	35.840.162.000,00	66.542.098.560,92	123.544.388.021,79	229.376.832.738,50	425.869.051.922,20	790.683.379.920,39
DANA DESA	88.510.353.000,00	100.750.688.723,25	114.683.773.526,56	130.543.702.251,22	148.596.943.346,19	169.146.815.901,84
TRANSFER ANTAR DAERAH	64.104.453.000,00	67.108.346.587,11	70.257.003.427,49	73.557.752.741,37	77.018.325.057,55	80.646.876.653,58



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	62.104.453.000,00	64.926.561.491,01	67.876.910.324,71	70.961.326.911,89	74.185.903.468,60	77.557.009.049,26
Bantuan Keuangan	2.000.000.000,00	2.181.785.096,10	2.380.093.102,78	2.596.425.829,48	2.832.421.588,95	3.089.867.604,32
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	47.992.707.506,00	54.048.743.534,21	60.868.970.088,04	68.549.817.762,81	77.199.885.401,67	86.941.475.565,30
Hibah Dari Pemerintah Lainnya	47.992.707.506,00	54.048.743.534,21	60.868.970.088,04	68.549.817.762,81	77.199.885.401,67	86.941.475.565,30
BELANJA	1.475.187.141.284,00	1.518.424.597.750,62	1.567.610.463.631,93	1.624.590.038.200,13	1.690.334.728.944,29	1.765.965.564.142,85
BELANJA OPERASI	916.125.587.838,00	950.563.743.887,10	988.580.286.147,64	1.031.789.774.238,41	1.080.906.040.211,44	1.136.762.709.740,34
Belanja Pegawai	602.915.699.956,00	599.301.472.265,24	595.708.910.359,26	592.137.884.360,74	588.588.265.170,92	585.059.924.464,92
Belanja Barang dan Jasa	309.022.406.867,00	344.732.854.152,02	384.569.979.687,40	429.010.659.980,65	478.586.879.107,51	533.892.096.910,13
Belanja Hibah	4.187.481.015,00	5.529.417.469,85	7.301.396.100,98	9.641.229.897,02	12.730.895.933,00	16.810.688.365,29
Belanja Bantuan Sosial	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
BELANJA MODAL	389.168.764.246,00	379.162.311.291,00	369.413.148.000,38	359.914.658.845,97	350.660.398.400,54	341.644.086.964,10
Belanja Modal	389.168.764.246,00	379.162.311.291,00	369.413.148.000,38	359.914.658.845,97	350.660.398.400,54	341.644.086.964,10
BELANJA TIDAK TERDUGA	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
BELANJA TRANSFER	167.392.789.200,00	186.198.542.572,52	207.117.029.483,92	230.385.605.115,75	256.268.290.332,32	285.058.767.438,41
Belanja Bantuan Keuangan	167.392.789.200,00	186.198.542.572,52	207.117.029.483,92	230.385.605.115,75	256.268.290.332,32	285.058.767.438,41



Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dihitung sampai dengan Tahun 2026 dengan menggunakan analisis trend, namun tetap dengan beberapa asumsi terhadap masing-masing pos jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dengan berdasarkan data realisasi APBD Kabupaten Maros Tahun 2016-2020. Selanjutnya beberapa kebijakan pendapatan dan belanja daerah untuk lima tahun kedepan (2021-2026) antara lain:

a. Pendapatan Daerah

Secara umum kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah dilakukan melalui:

- a) Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan rangkaian kegiatan 1) penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi daerah, 2) penentuan besarnya pajak atau retribusi daerah yang terutang, 3) penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, 4) pemungutan pajak atau retribusi daerah;
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan system administrasi perpajakan/retribusi yang jelas dalam rangka pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui pemanfaatan teknologi serta peningkatan kompetensi aparatur pemungut pajak/retribusi daerah;
- c) Meningkatkan koordinasi antar OPD terkait dalam upaya tercapainya target pendapatan asli daerah yang diampuh oleh masing-masing OPD penghasil dan mengevaluasi atas kinerja pendapatan asli daerah;
- d) Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan asset daerah, penataan ulang (*restrukturisasi asset*), agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif sehingga mendatangkan pendapatan daerah melalui pendapatan sewa.
- e) Menggali inovasi pemanfaatan teknologi, guna mencegah kebocoran pajak dan retribusi daerah.
- f) Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah seperti pada peningkatan sarana dan prasarana pada objek pendapatan dan retribusi daerah.

b. Belanja Daerah

Secara umum kebijakan belanja daerah yang ditempuh oleh pemerintah daerah adalah:

- a) Pemanfaatan belanja daerah menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- b) Pengelolaan belanja daerah harus mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal.



- c) Belanja daerah disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah setiap tahun yang tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- d) Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros, dengan peningkatan proporsi belanja program dan kegiatan yang berdampak langsung kepada publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, disamping tetap menjaga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama biasanya berupa belanja dan pengeluaran yang bersifat periodik yaitu pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh pemerintah daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan atau belanja sejenis lainnya. Tabel berikut menggambarkan data perkembangan realisasi pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama Pemerintah Kabupaten Maros selama 5 tahun terakhir.

Tabel 3.22
Pengeluaran Belanja Wajib dan Mengikat Kabupaten Maros Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016 Rp	2017 Rp	2018 Rp	2019 Rp	2020 Rp	Rata-Rata Pert. (%)
A	Belanja Tidak Langsung	772.808.489.156,00	788.000.014.837,76	805.325.939.843,18	825.023.489.476,49	847.356.555.503,24	
1	Belanja Pegawai	602.915.699.956,00	599.301.472.265,24	595.708.910.359,26	592.137.884.360,74	588.588.265.170,92	-0,67
3	Belanja Bunga						0,00
4	Belanja Transfer	167.392.789.200,00	186.198.542.572,52	207.117.029.483,92	230.385.605.115,75	256.268.290.332,32	11,23
5	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	95,40
B	Pembiayaan Pengeluaran	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	- 64,20
1	Pembentukan Dana Cadangan						0,00
2	Pembayaran Pokok Utang						- 72,32
3	Penyertaan Modal	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	- 60,94
	TOTAL	773.808.489.156,00	789.500.014.837,76	806.825.939.843,18	827.023.489.476,49	849.356.555.503,24	0,06

Sumber : BPKPD Kabupaten Maros, 2021



Berdasarkan perhitungan tabel 3.15 di atas, dapat diketahui jika bahwa besarnya rata-rata pertumbuhan per tahun mengalami fluktuatif. Dimana, dapat dilihat pengeluaran pembiayaan selama 3 tahun terakhir tidak mengalami perubahan nilai. Selama 3 tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Maros tidak melakukan kebijakan pembayaran pokok utang. Berikut proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama selama lima tahun ke depan.

Tabel 3.23
Pengeluaran Belanja Wajib dan Mengikat Kabupaten Maros Tahun 2021-2026

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
A	Belanja Daerah	772.808.489.156,00	788.000.014.837,76	805.325.939.843,18	825.023.489.476,49	847.356.555.503,24	872.618.691.903,33
1	Belanja Pegawai	602.915.699.956,00	599.301.472.265,24	595.708.910.359,26	592.137.884.360,74	588.588.265.170,92	585.059.924.464,92
3	Belanja Bunga						
4	Belanja Transfer	167.392.789.200,00	186.198.542.572,52	207.117.029.483,92	230.385.605.115,75	256.268.290.332,32	285.058.767.438,41
5	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
B	Pembiayaan Pengeluaran	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00
1	Pembentukan Dana Cadangan						
2	Pembayaran Pokok Utang						
3	Penyertaan Modal	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00
	TOTAL	773.808.489.156,00	789.500.014.837,76	806.825.939.843,18	827.023.489.476,49	849.356.555.503,24	875.118.691.903,33

Sumber : BPKPD Kabupaten Maros, 2021

Hasil perhitungan proyeksi pada table di atas menunjukkan bahwa pada Tahun 2021 diperkirakan total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama sebesar Rp **778.263.797.088,78** dan cenderung meningkat tiap tahunnya sampai dengan Tahun 2026 mencapai Rp **943.563.642.073,65**.

3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah menjadi dasar dalam menentukan kerangka pendanaan program-program yang akan direncanakan dalam lima tahun mendatang yang akan dirumuskan dalam RPJMD.

Untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dalam mendanai pembangunan daerah adalah dengan menghitung proyeksi pendapatan daerah ditambah dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, sehingga menghasilkan angka proyeksi total penerimaan riil kas daerah. Proyeksi total penerimaan riil kas daerah dikurangkan dengan proyeksi total belanja dan pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama sehingga akan menghasilkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama lima



tahun mendatang. Berikut perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan daerah Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 disajikan pada table berikut.



Tabel 3.24
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Menndanai Pembangunan Tahun 2021-2026

No	Uraian	Proyeksi					
		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)
1	Pendapatan	1.472.187.141.284,00	1.521.688.344.161,71	1.611.211.202.617,89	1.764.265.854.929,29	2.024.057.412.485,40	2.470.054.045.239,48
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai PERDA)	-	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	40.935.845.930,86	47.661.306.005,43	70.551.652.709,20	64.811.634.408,30	67.837.216.798,44	72.972.562.732,67
	Dikurangi :						
4	Belanja Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama	773.808.489.156,00	789.500.014.837,76	806.825.939.843,18	827.023.489.476,49	849.356.555.503,24	875.118.691.903,33
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	739.314.498.058,86	779.849.635.329,38	874.936.915.483,92	1.002.053.999.861,09	1.242.538.073.780,60	1.667.907.916.068,82

Sumber : BPKPD Kabupaten Maros (diolah)



Berdasarkan Tabel 3.24 menginformasikan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros secara umum terus membaik secara perlahan dari tahun ke tahun. Hasil dari perhitungan menunjukkan bahwa secara keseluruhan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Maros cukup stabil.

Sedangkan untuk memandu alokasi pendanaan, dibagi menjadi 3 prioritas. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Prioritas I, adalah dialokasi untuk pemenuhan pelayanan dasar;
2. Prioritas II, adalah dialokasikan untuk program-program terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Bupati di luar program prioritas untuk pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar;
3. Prioritas III, adalah untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi OPD.



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah adalah “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan di buat. Perbedaan dimaksud dilihat ada kesenjangan pencapaian daerah maupun pencapaian nasional. Permasalahan pembangunan pada umumnya terjadi disebabkan oleh faktor internal pelaksanaan pembangunan yang terjadi dan faktor eksternal yang mempengaruhi jalannya pembangunan di suatu daerah. Permasalahan internal dapat terjadi antara lain karena tidak teroptimalkannya sumberdaya pembangunan yang tersedia dan tidak teratasinya kelemahan yang membuat kinerja pembangunan tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Sedangkan faktor eksternal dapat terjadi pada umumnya disebabkan oleh adanya ancaman yang tidak terantisipasi dan mempengaruhi kinerja pembangunan serta adanya peluang yang tidak dimanfaatkan sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan. Sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa mendatang.

Analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai potensi kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, rumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Maros lima tahun mendatang. Adapun perumusan permasalahan dan isu strategis daerah perlu untuk mengacu kepada gambaran umum Kabupaten Maros yang termuat dalam bab terdahulu.

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Perumusan permasalahan pembangunan daerah diklasifikasi atas dua level yakni permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah (level makro daerah) dan permasalahan untuk penentuan program prioritas daerah (level mikro sektoral/penyelenggaraan urusan pemerintahan baik urusan wajib dan urusan pilihan maupun urusan penunjang).



4.1.1 Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak bisa diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan pembangunan daerah merupakan informasi penting untuk menyusun perencanaan pembangunan pada masa mendatang. Berikut disajikan permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Maros yaitu:

1. Kontraksi Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten yang memiliki fungsi strategis dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan. Keberadaan Bandara di Kabupaten Maros merupakan subsektor yang sangat strategis bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan. Nilai PDRB Maros atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 sebesar 18,62 triliun rupiah, mengalami penurunan sekitar 4,09 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 22,71 triliun rupiah. Berdasarkan harga konstan PDRB juga mengalami penurunan, dari 13,72 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 12,23 triliun rupiah pada tahun 2020. Turunnya nilai PDRB dipengaruhi oleh menurunnya produksi di hampir seluruh lapangan usaha.

Struktur perekonomian Kabupaten Maros selama lima tahun terakhir (2016-2020) didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha, diantaranya Transportasi dan Pergudangan, Industri Pengolahan, dan Pertanian, kehutanan, dan perikanan. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Maros pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan, yaitu 25,79%, angka ini menurun dari 40,06% di tahun 2019. Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 18,94%, naik dari 16,40% di tahun 2019, disusul kemudian oleh lapangan usaha Pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 18,52%, naik dari 15,16% di tahun 2019.

Kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah salah satunya dapat diukur melalui pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros secara keseluruhan sangat bergantung pada laju pertumbuhan ketiga lapangan usaha dengan kontribusi terbesar, terutama pada pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan. Sektor transportasi dan pergudangan pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -35,54 %, semakin melambat dibandingkan tahun 2019 sebesar -11,02%. Kemudian untuk Industri Pengolahan juga mengalami kontraksi sebesar -6,57 %, turun dari 1,48% di tahun 2019, selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan perikanan mengalami kontraksi sebesar -2,29%, turun dari 5,29% di tahun 2019.



Dalamnya kontraksi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sangat dipengaruhi oleh sub sektor angkutan udara, dalam hal ini jumlah penumpang dan barang/kargo yang berangkat dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin mengalami trend negatif (belum normal kembali) akibat pandemi Covid-19. Demikian juga kontraksi pada sektor Industri Pengolahan sangat dipengaruhi oleh industri barang galian bukan logam, dalam hal ini produksi Semen Bosowa yang juga mengalami penurunan. Sektor Pertanian yang diharapkan mampu bertumbuh positif, juga mengalami kontraksi yang disebabkan oleh berkurangnya luas lahan serta bergesernya waktu panen ke awal tahun 2021, sehingga terjadi selisih jumlah produksi pada perhitungan akhir tahun 2020.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Maros selama lima tahun terakhir (2016-2020) menunjukkan trend menurun. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mencapai 9,51% (tertinggi ke-3 di Provinsi Sulawesi Selatan), namun pada tahun 2017 hingga tahun 2020 terus mengalami pelambatan. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi melambat cukup signifikan sebesar 1,24%, dan kemudian mengalami kontraksi yang cukup dalam pada tahun 2020 sebesar -10,87%. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros sejak tahun 2019 berada dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

2. Masih Tingginya Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kabupaten Maros pada tahun 2016 hingga tahun 2019 menunjukkan tren menurun, namun pada tahun 2020 tingkat pengangguran kembali meningkat akibat tingginya tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pandemi Covid-19. Pada tahun 2017, TPT Kabupaten Maros sebesar 6,85%, kemudian menurun pada tahun 2018 hingga 5,70%, lalu pada tahun 2019 menurun hingga mencapai 4,42%. Pada tahun 2020, TPT kembali meningkat menjadi 6,28 persen.

TPT Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 6,28 persen berada di bawah Propinsi Sulawesi Selatan sebesar 6,31%, dan juga di bawah nasional sebesar 7,07%. Kondisi ini disebabkan pada tahun penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Maros masih cukup tinggi, dengan adanya Grand Mall. Selain itu tumbuhnya sektor-sektor usaha, utamanya rumah makan dan café yang berada di sekitar kawasan kuliner Pantai Tak Berombak (PTB) juga banyak menyerap tenaga kerja.



3. Masih Tingginya Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sangat kompleks, bukan hanya masalah pendapatan akan tetapi juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang. Penanggulangan kemiskinan merupakan sasaran utama dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pada tingkat global, nasional, provinsi dan daerah. Hal ini pun merupakan amanat dalam SDGs di Tahun 2030 diupayakan menjadi nol (*zero poverty*).

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Maros menunjukkan trend penurunan selama tahun 2016 - 2020. Persentase penduduk miskin pada tahun 2016 sebesar 11,41%, dengan jumlah penduduk miskin sekitar 39.020 orang. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin menurun hingga 9,74% dengan jumlah penduduk miskin sekitar 34.620 orang. Penurunan persentase penduduk miskin ini disebabkan banyaknya program kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) serta peningkatan infrastruktur utamanya jalan yang dilakukan pemerintah daerah yang berdampak terhadap peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat.

Perkembangan tingkat kemiskinan Kabupaten Maros pada tahun 2020 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Di tengah masa sulit akibat pandemi Covid-19, persentase penduduk miskin mampu mencapai 9,74%, turun dibandingkan tingkat kemiskinan tahun 2019 sebesar 9,89%. Jika pada tahun 2019, tingkat kemiskinan Kabupaten Maros masih berada di atas provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, maka pada tahun 2020 tingkat kemiskinan Kabupaten Maros berada di bawah Nasional (9,78%) dan di atas Provinsi Sulawesi Selatan (8,72%).

4. Masih Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita.

Kondisi IPM Kabupaten Maros sejak tahun 2016-2021 meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2016 IPM Kabupaten Maros sebesar 67,76 kemudian meningkat hingga mencapai 69,86 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Maros selama sepuluh tahun terakhir. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta



peningkatan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia tenaga pendidik serta tenaga kesehatan dilakukan secara konsisten setiap tahunnya.

Walaupun demikian, kondisi IPM Kabupaten Maros masih berada dibawah capaian IPM Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. IPM Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 mencapai 71,93 setara dengan IPM Nasional yang berada pada angka 71,94. IPM Kabupaten Maros masih termasuk dalam kategori sedang, namun diharapkan pada tahun 2021, IPM Kabupaten Maros dapat mencapai angka 70 dan masuk dalam kategori tinggi.

5. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang baik tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai unsur utama. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan elemen penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek akuntabilitas, keterbukaan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi masyarakat.

Dengan mewujudkan reformasi birokrasi maka akan menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik dengan sumber daya manusia yang kompeten. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Maros masih menyisakan berbagai tantangan dan hambatan ke depan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang optimal. Adapun permasalahan yang terkait dengan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Maros adalah:

1. Penyelenggaraan pemerintahan masih belum mencerminkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN;
2. Manajemen kinerja pemerintah belum dilaksanakan secara maksimal;
3. Penataan kelembagaan yang masih belum efektif;
4. Penerapan tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan;
5. Manajemen SDM yang belum berjalan dengan baik;
6. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran;
7. Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal dan masih banyak praktek pungutan liar.



4.1.2 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Identifikasi permasalahan pembangunan Kabupaten Maros dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan. Berikut ini disajikan beberapa permasalahan pembangunan Daerah berdasarkan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros, Yaitu:

1. Pendidikan

- a. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Pendidikan Anak Usia Dini belum tercapai
- b. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Pendidikan Kesetaraan belum tercapai
- c. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Sederajat belum mencapai standar TPB
- d. Angka partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat belum mencapai standar TPB
- e. Angka Kelulusan belum mencapai 100 % dari semua tingkatan
- f. Kapasitas SDM tenaga guru masih perlu ditingkatkan
- g. Distribusi penempatan tenaga guru yang belum merata
- h. Sarana dan Prasarana Pendidikan belum memadai
- i. Masih terdapatnya siswa putus sekolah pada tiap jenjang Pendidikan
- j. Masih terdapatnya penduduk yang buta aksara

2. Kesehatan

- a. Masih terdapat angka kematian bayi baru lahir;
- b. Masih terdapat angka kematian ibu pasca melahirkan;
- c. Kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan
- d. Masih terdapat beberapa indikator TPB yang belum tercapai;
- e. Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan belum mencapai target TPB;
- f. Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita belum mencapai target TPB;
- g. Prevalensi stunting pada anak dibawah lima tahun/balita belum mencapai target TPB;
- h. Masih kurangnya kesadaran masyarakat bererilaku hidup bersih dan sehat;
- i. Perbikan gizi balita belum maksimal;
- j. Masih terdapat beberapa Puskesmas yang belum terakreditasi dan Puskesmas yang sudah terakreditasi perlu dilakukan Reakreditasi untuk mencapai penilaian yang semakin baik dari status Dasar, Madya, Utama dan Paripurna.
- k. Sarana dan prasarana puskesmas harus memenuhi standar SPM.



- l. Masih kurangnya pelatihan terutama pelatihan manajemen dan kompetensi sesuai profesi yang ada (RSUD Salewangang);
- m. Masih adanya gedung perawatan, poliklinik yang belum memenuhi standar permenkes (RSUD Salewangang);
- n. Masih adanya prasarana (gas medik) rsud yang belum sesuai standar (RSUD Salewangang);
- o. Masih kurangnya alat kesehatan di beberapa bagian pelayanan rawat jalan dan rawat inap (RSUD Salewangang);

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Masih minimnya pengadaan tanah untuk RTH Publik
- b. Produk tata ruang yang telah disusun belum disadari sebagai produk yang mempunyai kekuatan hukum;
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib penataan ruang;
- d. Banyaknya area hutan produksi yang beralih fungsi menjadi permukiman yang dikelola oleh masyarakat;
- e. Banyaknya pemanfaatan area sempadan sungai, jalan dan area pantai yang tidak sesuai peruntukannya;
- f. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan;
- g. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan;
- h. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak
- i. Tingkat kerusakan sarana dan prasana jalan, jembatan dan irigasi masih tinggi;
- j. Sarana dan prasarana termasuk bangunan belum memperhatikan hak dan kemudahan bagi penyandang disabilitas dan kaun rentan lainnya;
- k. Ketersediaan sumber air bersih pada kawasan pesisir masih sangat kurang;
- l. Banyaknya sarana prasarana air bersih yang sudah terbangun tetapi dalam kondisi yang rusak;
- m. Persentase rumah tangga kumuh perkotaan belum mencapai target TPB
- n. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak belum mencapai target TPB.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Belum akurat Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi korban bencana dari aparat setempat (Lurah dan Desa)



- b. Kurangnya sosialisasi tentang relokasi bencana karena keterbatasan dana;
- c. Belum optimalnya penganggaran relokasi bencana/korban bencana;
- d. Prasarana Sarana Utilitas belum maksimal;
- e. Belum optimalnya penyerahan Fasum Fasos ke Pemda;
- f. Belum optimalnya pengendalian bangunan.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Tidak tersedianya data sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan;
- b. Kurangnya sumber daya ASN yang mampu mengoperasikan computer dengan baik dan mahir;
- c. Belum adanya pemetaan daerah-daerah yang rawan bencana kebakaran;
- d. Terbatasnya sarana prasarana terkait kendaraan operasional Satdalmas, Patroli dan Armada Kebakaran (masih ada kecamatan yang belum memiliki armada damkar (Tompobulu, Mallawa, Cenrana, Simbang, Lau, Maros Baru dan Mandai)
- e. Lemahnya fungsi koordinasi dan sinergitas antara dinas/instansi terkait;
- f. Masih banyaknya ASN yang belum memenuhi standar kompetensi;
- g. Tidak adanya hydran sumber air untuk pemadam kebakaran;
- h. Masih adanya kondisi jalan yang rusak dan sulit dijangkau mobil pemadam kebakaran;
- i. Kurangnya wilayah manajemen kebakaran yang mengakibatkan sulitnya pengendalian kebakaran di lokasi luar WMK;

6. Penanggulangan dan Bencana Daerah

- a. Kualitas sdm yang belum optimal dalam penguasaan iptek sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Belum optimalnya proses penyaluran air bersih pada saat bencana kekeringan disebabkan karena kurangnya armada dan tandom penampungan air bersih
- c. Kurangnya dukungan sarana dan prasarana peralatan kerja dalam menangani bencana
- d. Belum seimbang antara jumlah aparat dengan volume kerja dalam hal penanganan darurat bencana pada saat pasca dan pra bencana
- e. Kurangnya pemahaman dan kepedulian aparat tentang pentingnya pelaporan tepat waktu dalam penanggulangan bencana

7. Sosial

- a. Angka kemiskinan masih tinggi;



- b. Penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) masih kurang;
- c. Data yang belum di update secara berkala;
- d. Belum terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan social;
- e. Belum terpenuhinya kebutuhan dasar bagi gelandangan, pengemis dan anak terlantar;
- f. Belum terpenuhinya kebutuhan dasar bagi disabilitas dan lansia;
- g. Kurangnya perhatian terhadap potensi sumber kesejahteraan kelembagaan masyarakat;
- h. Kurangnya perhatian terhadap potensi sumber kesejahteraan social (PSKS).

2. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR

1. Tenaga Kerja

- a. Kompetensi sumber daya manusia para pencari kerja blum mampu bersaing;
- b. Kurangnya informasi terkait informasi lowongan kerja dari perusahaan;
- c. Tidak tersajinya data base ketenagakerjaan yang mengakomodir informasi yang aksesnya informasinya mudah diperoleh bagi yang membutuhkannya;

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- b. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- c. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- d. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- e. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- f. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.



- g. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- h. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3. Pangan

- a. Diversifikasi produk pangan lokal belum optimal
- b. Menurunnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal

4. Pertanian

- a. Penataan penguasaan, pemilikan dan penggunaan serta pemanfaatan tanah belum tertata termasuk masih adanya lahan pemerintah yang belum bersertifikat;
- b. Penyelesaian konflik pertanahan belum optimal termasuk beberapa lahan pemerintah yang disengketakan.

5. Lingkungan Hidup

- a. Masih kurangnya kesadaran dan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah (terutama dalam hal pemilahan sampah);
- b. Jumlah Sarana Prasarana pengelolaan sampah yang tersedia saat ini masih sangat kurang;
- c. Teknologi pengelolaan sampah yang ada saat ini masih sangat sederhana;
- d. Anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk menyusun dokumen KLHS RPPLH dan D3TLH;
- e. Belum adanya tenaga PPLHD dikarenakan belum adanya lembaga diklat yang melaksanakan diklat untuk tenaga PPLHD;
- f. Belum tersedianya anggaran untuk rehabilitasi gedung laboratorium lingkungan, sehingga belum bisa tersedia sarana prasana laboratorium lingkungan untuk mendukung kegiatan pengukuran kualitas air dan udara;
- g. Belum teralokasinya anggaran untuk pelaksanaan pengukuran tutupan lahan sehingga menjadi kendala dalam penyediaan DATA tutupan lahan;
- h. Anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati sehingga kegiatan belum bisa dilaksanakan.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Aksesibilitas, masih kurangnya keterjangkauan terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang merata;



- b. Teknologi dan Pemutakhiran Data, Potret kejadian pelayanan relatif masih menggambarkan jumlah antrian yang cukup padat yang diakibatkan bukan pada perekaman dan pencetakan (eksistensi awal) pendataan penduduk dan pencatatan sipil, namun disebabkan oleh pemutakhiran komponen data dalam dokumen identitas yang saling terhubung.
- c. SUMBER DAYA MANUSIA. Masih kurangnya pengembangan untuk mempersiapkan SDM bidang administrasi agar mampu bekerja secara professional dalam meningkatkan pelayanan publik.
- d. KOORDINASI DAN PEMANFAATAN DATA. Masih belum jelasnya proses bisnis terkait koordinasi dan validitas data, termasuk ketegasan pelaksanaan kebijakan terkait mekanisme pemanfaatan data kependudukan secara umum dan khusus
- e. REGULASI DAN PROTEKSI. Belum tersosialisasinya kebijakan perundang-undangan secara menyeluruh terkait urusan kependudukan terhadap penggunaan data dan simpul-simpul pengumpul data di kewilayahan/kecamatan. Masih perlunya kebijakan yang lebih menjamin perlindungan atas data pribadi (privacy).
- f. PENGARSIPAN. Belum tersusunnya dengan rapi pendokumentasian dan pengarsipan informasi kependudukan daerah baik secara fisik maupun arsip digital.

7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

- a. Masih rendahnya tingkat kemandirian desa, ditandai belum adanya desa berstatus mandiri dan masih adanya desa berstatus tertinggal;
- b. Belum baiknya penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. Belum optimalnya pengembangan Bumdes, TTG dan Kerja Sama Desa;
- d. Belum optimalnya peran lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta masih kurangnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berprestasi;
- e. Masih rendahnya realisasi pelaksanaan program kegiatan dana desa, penyertaan swadaya masyarakat dan pemeliharaan pasca program.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Masyarakat masih kurang begitu meyakini manfaat Program BANGGAKENCANA (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana), banyak yang masih memandang KB dalam sudut yang sempit, baik di kalangan masyarakat maupun para tokoh agama, dan tokoh masyarakat;
- b. Pelayanan kesehatan reproduksi yang berkaitan dengan pemeriksaan kehamilan dan pelayanan IUD yang masih dianggap tabu karena harus membuka aurat;
- c. Masih adanya pernikahan di usia dini;



- d. Masih rendahnya peran serta Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam pelaksanaan Program BANGGAKENCANA (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana);
- e. Tugas dan Fungsi Petugas Lapangan KB belum maksimal;
- f. Pelayanan KB belum dapat dilaksanakan dengan maksimal terkendala dengan aturan yang ada terkait pelayanan KB gratis kepada masyarakat;
- g. Pemahaman masyarakat dalam keikutsertaan dalam Kelompok Kegiatan (POKTAN) belum maksimal.
- h. Masih rendahnya dukungan pemerintah daerah terhadap Program BANGGAKENCANA (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana).

9. Perhubungan

- a. Jumlah penumpang angkutan umum sangat bekurang;
- b. Sejak Tahun 2019 tidak melakukan Uji KIR;
- c. Menurunnya angkutan darat dibanding tahun sebelumnya.

10. Komunikasi dan Informatika

- a. Belum optimalnya implementasi e-government dan pelayanan telekomunikasi terintegrasi;
- b. Belum optimalnya maintenance infrastruktur sarana dan prasarana data center;
- c. Minimnya sarana dan prasarana TIK;
- d. Pengembangan jaringan system kebencanaan yang terintegrasi;
- e. Masih rendahnya proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband;

11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

- a. Belum ada aturan yang mengikat untuk dilaksanakan Mou antara diskopumdag dengan mitra layanan keuangan terkait akses UMKM;
- b. Kurang koordinasi dari pelaku UMKM dan layanan keuangan terkait kemitraan layanan keuangan ke Diskopumdag;
- c. Beberapa koperasi yang tidak aktif tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga sulit melakukan konfirmasi terkait hutang yang dimilikinya kepada nasabahnya;
- d. Untuk melaksanakan penghapusan koperasi tidak aktif dibutuhkan anggaran biaya pembentukan tim penghapusan koperasi yang besar, karena melibatkan beberapa instansi terkait

12. Penanaman Modal

- a. Belum optimalnya proses pelayanan perizinan terkait penanaman modal;



- b. Peluang investasi yang ada belum bias dikonversi menjadi investasi sektor riil secara optimal;
- c. Belum optimalnya ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam melakukan pelayanan perizinan dan penanaman modal;
- d. Belum optimalnya kegiatan promosi daerah karena keterbatasan anggaran.

13. Kepemudaan dan Olah Raga

- a. Masih sedikitnya jumlah wirausaha muda;
- b. Masih kurangnya jumlah atlet yang berprestasi pada tingkat nasional dan internasional;
- c. Masih sedikit cabang olahraga yang berprestasi;
- d. Masih terbatasnya sarana prasana olahraga dan tidak memiliki gedung olahraga dan pertemuan.

14. Statistik

- e. Belum optimalnya pemanfaatan sertifikat elektronik dalam pengamanan informasi pemerintah daerah;
- f. Tidak tersedianya system pengumpulan data sektoral;
- g. Belum optimalnya peran Dinas Komunikasi Informatika sebagai walidata dalam perencanaan pembangunan.

15. Persandian

- a. Belum optimalnya pemenuhan sumber daya persandian
- b. Optimalisasi JKS Internal Lingkup Pemkab Maros

16. Kebudayaan

- a. Nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat belum dikembangkan secara optimal;
- b. Terbatasnya SDM Pengelola Cagar Budaya dan Tim Ahli;
- c. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait nilai budaya;
- d. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya;

17. Perpustakaan

- a. Masih rendahnya minat baca masyarakat;
- b. Terbatasnya koleksi bahan pustaka;
- c. Terbatasnya ketersediaan dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan pelayanan dan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang perpustakaan dan kearsipan



18. Kearsipan

- a. Rendahnya kompetensi pengelola perpustakaan dan kearsipan (termasuk pustakawan dan arsiparis);

Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- a. Belum optimalnya penangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman
- b. Belum optimalnya pembiaian terhadap kelompok kelompok petani pembudidaya dan nelayan
- c. Masih rendahnya pendapatan nelayan
- d. Sarana prasarana jalan produksi masih belum optimal

2. Pariwisata

- a. Belum optimalnya SDM pengelola kawasan wisata;
- b. Belum optimalnya pengembangan, pemasaran dan promosi wisata;
- c. Belum maksimalnya pengembangan teknologi informasi pariwisata dalam melakukan promosi wisata;
- d. Belum optimalnya upaya pengembangan obyek destinasi wisata baru;
- e. Belum optimalnya pendataan dan pengembangan destinasi wisata baru;
- f. Belum optimalnya pengembangan infrastruktur penunjang pariwisata;
- g. Munculnya destinasi wisata baru di setiap wilayah kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan;
- h. Jarak antara Ibukota Provinsi dan Kota Maros sangat dekat sehingga lama kunjungan berwisata di Maros cukup untuk 1 hari dan maksimal 2 hari.

3. Pertanian

- a. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian;
- b. Kondisi infrastruktur yang belum memadai menyebabkan peningkatan biaya produksi dan in efisiensi usaha tani;
- c. Keterbatasan sarpras menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi;
- d. Rendahnya tingkat pendidikan petani yang relative tua menyebabkan rendahnya adopsi teknologi;
- e. Keterbatasan petugas/penyuluh pertanian lapangan sehingga menyebabkan kurang optimalnya pembangunan pertanian;
- f. Kurang optimalnya fungsi kelembagaan penyuluh;



- g. Adanya anomali iklim, bencana alam dan serangan OPT mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi.
- 4. Perdagangan**
 - a. Tidak ada survey atau pendataan langsung yang dilakukan terkait jumlah pedagang yang ada di Kabupaten Maros.
- 5. Perindustrian**
 - a. Masih rendahnya sumber daya manusia bagi pelaku IKM
- 6. Transmigrasi**
 - a. Belum adanya Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi sebagai pedoman penetapan Kawasan Transmigrasi;

FUNGSI PENUNJANG

1. Perencanaan

- a. Integrasi perencanaan dan penganggaran yang belum optimal;
- b. Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal, disebabkan kurangnya kapasitas SDM perencana;
- c. Belum optimalnya kerjasama pembangunan dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Kurangnya ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;

2. Keuangan

- a. Sdm yang belum optimal dalam penguasaan iptek sehingga menghambat kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Belum optimalnya proses pengadaan lahan yang disebabkan :
 - masalah pembebasan tanah
 - dokumen alas hak yang tidak lengkap dan
 - tidak ada surat kuasa oleh ahli waris.
- c. Pada proses pensertifikatan tanah terkendala oleh :
 - Adanya klaim dari masyarakat pada saat lahan pemda akan disertifikatkan
 - Adanya tumpang tindih dokumen alas hak
 - Proses penerbitan sertifikat oleh bpn lambat

3. Kepegawaian

- a. Belum optimalnya kompetensi ASN yang sesuai dengan unit kerja Perangkat Daerah;
- b. Masih belum optimalnya pembinaan disiplin dan terdapat ASN yang tidak disiplin di setiap unit kerja;



- c. Jumlah ASN pada jabatan fungsional terutama tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan tenaga fungsional tertentu lainnya belum mencukupi;
- d. Sistem karier ASN yang kurang jelas;
- e. Analisis kebijakan daerah mengenai kenaikan pangkat yang perlu direvisi;
- f. Penyediaan data/profil ASN yang belum akurat;

4. Pengawasan

- a. masih ada temuan yang tidak ditindak lanjuti baik internal maupun eksternal
- b. Belum tercapainya maturitas SPIP Level 3 untuk Kabupaten Maros
- c. Belum adanya PNS yang melaporkan LHKASN
- d. Belum adanya perangkat daerah yang ditetapkan sebagai ZI WEK

5. Penelitian dan Pengembangan

- a. Masih minimnya produk penelitian yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan di Kabupaten Maros;
- b. Masih minimnya produk penelitian yang memberikan dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;
- c. Masih kurangnya koordinasi dengan perangkat daerah lain dalam rangka perumusan kebijakan pembangunan;
- d. Kualitas SDM Kelitbangan yang terbatas;
- e. Keterbatasan alokasi anggaran kegiatan;
- f. Masih minimnya kegiatan pengembangan yang mendukung inovasi produk-produk kreatif dalam rangka pengembangan perekonomian Kabupaten Maros
- g. Kualitas SDM perencana program yang terbatas.

6. Sekretariat Daerah

- a. Ketersediaan data/dokumen dari OPD yang belum maksimal
- b. Kurangnya informasi ke masyarakat terkait sosialisasi pembinaan keagamaan
- c. Belum optimalnya sistim perencanaan kebijakan, penyusunan kebijakan, monitoring pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan berupa produk hukum daerah
- d. Tingginya angka inflasi (Indeks Harga Konsumen/IHK) tidak diimbangi dengan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat
- e. Pelaksanaan administrasi pembangunan yang belum maksimal
- f. Jumlah dan kapasitas sumber daya manusia dan sarana belum memadai dan mencukupi
- g. Aplikasi yang belum terintegrasi yang berdampak pada pencapaian nilai SAKIP



- h. Masih kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja yang belum sepenuhnya dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang kinerja
- i. Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan pimpinan yang terkadang menghambat/mempengaruhi acara yang satu dengan yang lainnya
- j. Seringnya terjadi pergeseran anggaran sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran

7. Sekretariat DPRD

- a. Terbatasnya jumlah SDM yang berkualitas;
- b. Belum optimalnya kinerja Sekretariat DPRD dalam menjalankan tupoksinya

8. Kesatuan Bangsa dan Politik

- c. Belum memadainya kualitas sumberdaya manusia aparatur Badan Ksebangpol;
- d. Belum optimalnya penanganan dampak penanggulangan narkoba di kalangan generasi bangsa;
- e. Semakin menurunnya pemahaman dan pengalaman nilai-nilai luhur Pancasila pada semua elemen masyarakat, penegasan Pancasila sebagai filosofi, ideology, jiwa dan pandangan hidup sudah final. Akan tetapi dalam tahap pelaksanaan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila;
- f. Belum optimalnya koordinasi di bidang ekonomi, social, budaya dan agama sebagai kekuatan pemersatu bangsa;
- g. Belum optimalnya penanganan konflik di daerah;
- h. Masih rendahnya tingkat kesadaran pengurus Ormas untuk mendaftarkan keberadaan ormas di Badan Kesbangpol

4.2 ISU-ISU STRATEGIS

Penentuan isu strategis Kabupaten Maros dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan utama dan hasil telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional yang relevan dengan pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2021-2026.

4.2.1 Isu Strategis Internasional

A. Sustainable Development Goals (SDGs)

Konsep *Sustainable Development Goals (SDGs)* dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan *Millennium Development Goals (MDGs)*. Konsep *Sustainable Development Goals (SDGs)* diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak Tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim,



perlindungan sosial, makanan dan energi dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. SDGs terdiri dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, 169 target dengan 240 indikator. Adapun tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* di Tahun 2016-2030 antara lain:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3. Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif, adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua;
7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan berkelanjutan menggunakan samudra, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, berkelanjutan mengelola hutan, memerangi desertifikasi dan menggantikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;



16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; dan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

Pemerintah Kabupaten telah menindaklanjuti komitmen pencapaian target SDG's dengan Peraturan Bupati Maros Nomor: 21 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals Tahun 2018-2021.

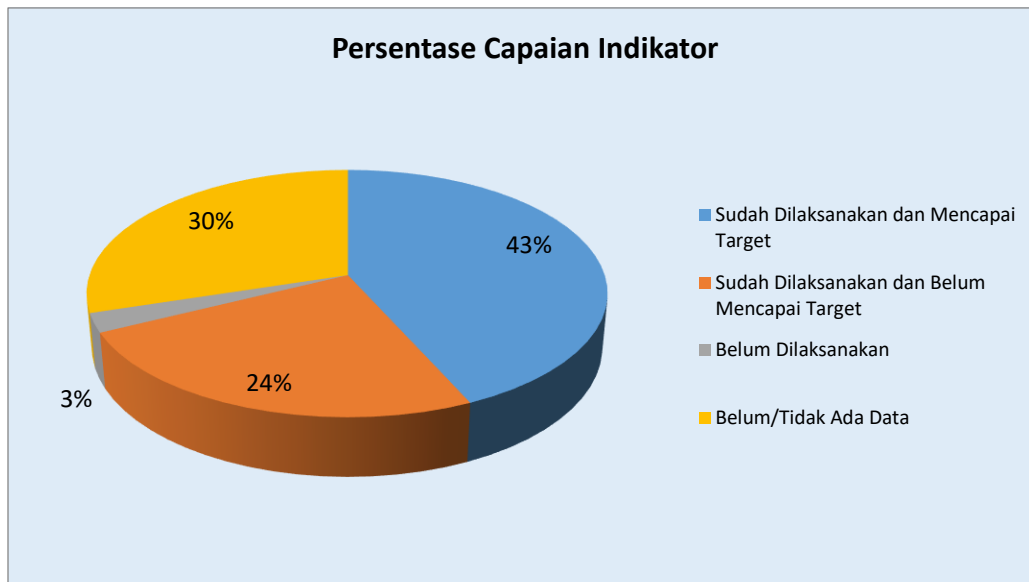
Sesuai dengan pembagian wewenang yang diatur dalam UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah kabupaten memiliki wewenang sebanyak 220 indikator capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pemerintah Kabupaten Maros hanya memiliki 201 target indikator yang akan dicapai. Berdasarkan hasil analisis data, kategori capaian TPB Kabupaten Maros terbagi atas 4 (empat) kategori, yaitu:

- A. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target
- B. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target
- C. Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target
- D. Indikator TPB yang belum/tidak memiliki data

Dari hasil pengolahan data, terlihat bahwa Indikator TPB Kabupaten Maros yang telah dilaksanakan dan mencapai target adalah 43% atau sebanyak 87 indikator, dari total 201 indikator yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Maros. Sementara itu, sebanyak 24% (49 indikator) telah dilaksanakan, namun belum mencapai target. Sebanyak 5 indikator atau 3% dari total indikator TPB masih belum terlaksana dan belum mencapai target, serta sebanyak 30% atau 60 indikator belum/tidak memiliki data. Persentase perbandingan capaian indikator TPB Kabupaten Maros secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4.1 Presentase Capaian Indikator TPB Kabupaten Maros



Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS

Tabel 4.1 Capaian Indikator TPB Kabupaten Maros

No	Kategori Indikator	Capaian Indikator	% Jumlah Indikator
1	A	87	43,28
2	B	49	24,38
3	C	5	2,49
4	D	60	29,85
Total Indikator		201	100

Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS

Jika dilihat berdasarkan jumlah indikatornya, TPB yang paling banyak mencapai target nasional adalah TPB 3 (Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia) sebanyak 17 indikator. Untuk kategori indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target, TPB 1 (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun) memiliki jumlah yang paling banyak, yakni 9 indikator. Sementara pada indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target, TPB 7 (Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua) dengan 2 indikator. Selain itu, pada kategori indikator TPB yang belum/tidak memiliki data, TPB 6 (Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan) memiliki jumlah terbanyak yaitu 11 Indikator. Untuk lebih jelasnya, jumlah indikator TPB pada masing-masing kategori tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut.



Tabel 4.2 Capaian Jumlah Indikator TPB Terhadap Target Nasional Kabupaten Maros

NO. TPB	TUJUAN TPB	Dilaksanakan dan Mencapai Target	Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	Belum Memiliki Data	Jumlah
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	10	9	1	2	22
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	4	1	-	6	11
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	17	7	-	8	32
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	3	5	-	5	13
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	7	7	-	-	14
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	3	2	-	11	16
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	0	-	2	-	2
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	4	4	1	8	17
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri	3	4	-	2	9



NO. TPB	TUJUAN TPB	Dilaksanakan dan Mencapai Target	Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	Belum Memiliki Data	Jumlah
	Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi					
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	7	1	-	2	10
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	4	3	-	1	8
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	1	-	-	2	3
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	1	1	-	-	2
14	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber	2	-	-	1	3
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	-	1	1	1	3
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	13	3	-	5	21
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk	8	1	-	6	15

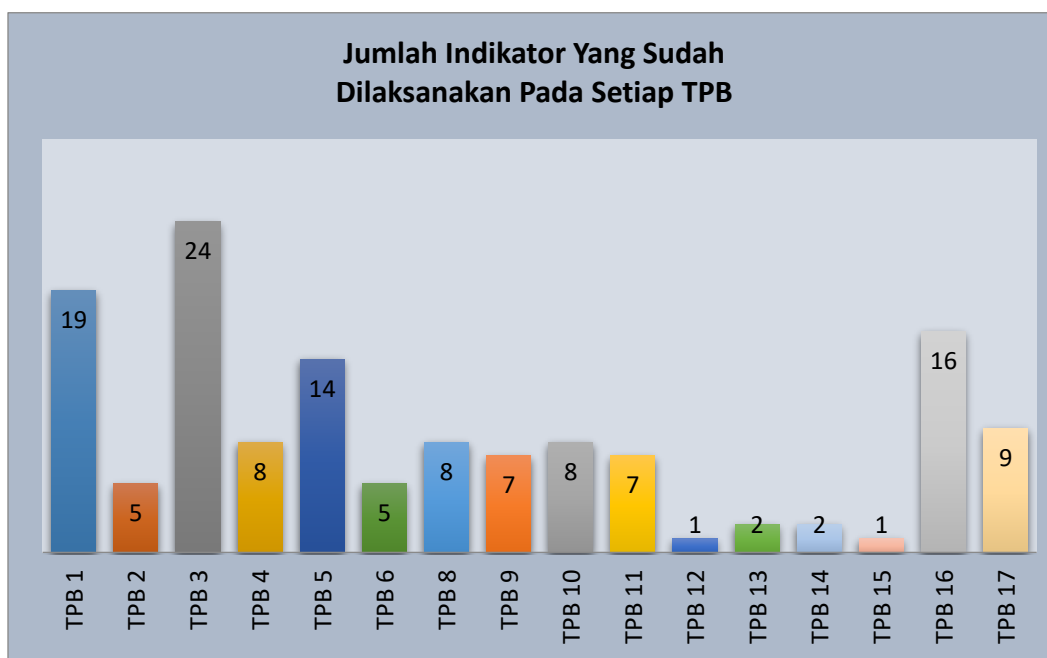


NO. TPB	TUJUAN TPB	Dilaksanakan dan Mencapai Target	Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target	Belum Memiliki Data	Jumlah
	Pembangunan Berkelanjutan					
	Jumlah	87	49	5	60	201

Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS

Dari total 201 indikator TPB yang menjadi wewenang Kabupaten Maros, jumlah indikator yang telah dilaksanakan secara keseluruhan adalah 136 indikator, dimana TPB 3 yang paling banyak telah dilaksanakan yaitu 24 indikator.

Gambar4.2 Jumlah Indikator yang Sudah Dilaksanakan Pada Setiap TPB

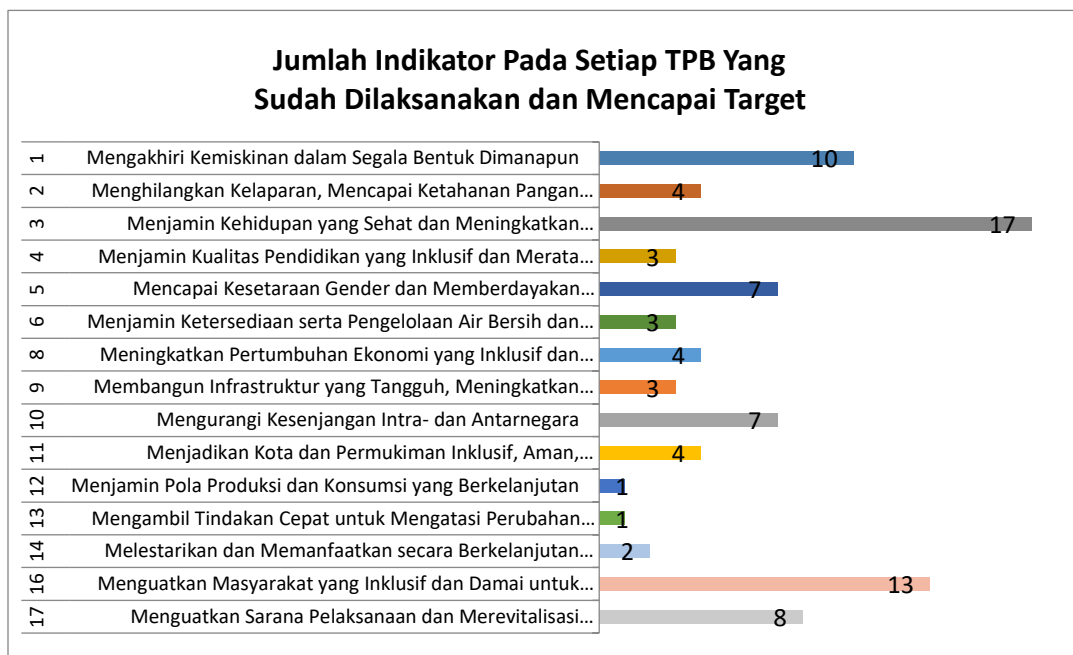


Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS

Jumlah indikator TPB yang sudah terlaksana dan mencapai target di Kabupaten Maros sebanyak 87 indikator dari total 201 indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten Maros. Berdasarkan hasil analisis data, terlihat bahwa TPB yang telah dilaksanakan dan mencapai target dengan jumlah keberhasilan paling banyak yakni TPB 3 (Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia) mencapai 17 indikator.



Gambar 4.3
Jumlah Indikator Pada Setiap Tujuan yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target



Sumber: Hasil Analisis Tim KLHS

Dilihat dari grafik terlihat bahwa Kabupaten Maros telah melaksanakan 15 TPB dengan jumlah total indikator sebanyak 87 dan telah mencapai target nasional. Seluruh indikator yang telah dilaksanakan dan mencapai target tersebut, sepatutnya dipertahankan bahkan bisa lebih ditingkatkan lagi demi tercapainya pembangunan keberlanjutan di Kabupaten Maros.

B. Perubahan Iklim (Pengurangan Emisi Gas Karbon)

Dewasa ini, perubahan iklim menjadi salah satu isu utama yang menjadi perhatian berbagai pihak. Masalah perubahan iklim juga telah menjadi masalah kebijakan publik terbesar yang dihadapi oleh pemangku kepentingan. Perubahan iklim secara langsung berdampak negatif kepada manusia dan lingkungan sekitarnya.

United States Global Climate Change Programme mendefinisikan perubahan iklim sebagai reaksi ekstrem fenomena cuaca yang menciptakan dampak negatif pada sumber daya pertanian, sumber daya air, kesehatan manusia, penipisan lapisan ozon, vegetasi dan tanah, yang menyebabkan dua kali lipat dari konsentrasi karbon dioksida dalam ekosistem.

Salah satu upaya dalam mengatasi perubahan iklim adalah dengan pengelolaan lingkungan yang dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak dan lapisan masyarakat atas dasar kerjasama. Telah banyak inisiasi gerakan sosial yang dibentuk untuk meningkatkan



kesadaran masyarakat akan bahaya perubahan iklim, dan mempromosikan langkah-langkah untuk mencegahnya.

Mengutip dari ditjenppi.menlhk.go.id, iklim adalah rata-rata cuaca di mana cuaca merupakan keadaan atmosfer pada suatu saat di waktu tertentu. Iklim didefinisikan sebagai ukuran rata-rata dan variabilitas kuantitas yang relevan dari variabel tertentu (seperti temperatur, curah hujan atau angin), pada periode waktu tertentu, yang merentang dari bulanan hingga tahunan atau jutaan tahun.

Iklim berubah secara terus menerus karena interaksi antara komponen-komponennya dan faktor eksternal seperti erupsi vulkanik, variasi sinar matahari, dan faktor-faktor disebabkan oleh kegiatan manusia seperti misalnya perubahan penggunaan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kerangka Kerja Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC) mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan iklim yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada perioda waktu yang dapat diperbandingkan. Komposisi atmosfer global yang dimaksud adalah komposisi material atmosfer bumi berupa Gas Rumah Kaca (GRK) yang di antaranya, terdiri dari Karbon Dioksida, Metana, Nitrogen, dan sebagainya.

Pada dasarnya, Gas Rumah Kaca dibutuhkan untuk menjaga suhu bumi tetap stabil. Akan tetapi, konsentrasi Gas Rumah kaca yang semakin meningkat membuat lapisan atmosfer semakin tebal. Penebalan lapisan atmosfer tersebut menyebabkan jumlah panas bumi yang terperangkap di atmosfer bumi semakin banyak, sehingga mengakibatkan peningkatan suhu bumi, yang disebut dengan pemanasan global.

Mengutip dari nasa.gov, para ilmuwan menghubungkan tren pemanasan global yang diamati sejak pertengahan abad ke-20 dengan ekspansi manusia dari "efek rumah kaca", yaitu pemanasan yang terjadi ketika atmosfer memerangkap panas yang memancar dari Bumi ke luar angkasa.

Gas-gas tertentu di atmosfer menghalangi panas keluar. Gas berumur panjang yang tetap semi permanen di atmosfer dan tidak merespons secara fisik atau kimiawi terhadap perubahan suhu digambarkan sebagai "pemaksa" terjadinya perubahan iklim. Gas, seperti uap air, yang merespons secara fisik atau kimiawi terhadap perubahan suhu dipandang sebagai "umpan balik." Gas yang berkontribusi terhadap efek rumah kaca



meliputi uap air, karbon dioksida (CO₂), metana, nitro oksida dan klorofluorokarbon (CFC).

Di Bumi, aktivitas manusia mengubah rumah kaca alami. Selama abad terakhir pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak telah meningkatkan konsentrasi karbon dioksida atmosfer (CO₂). Ini terjadi karena proses pembakaran batu bara atau minyak menggabungkan karbon dengan oksigen di udara untuk menghasilkan CO₂.

Pada tingkat lebih rendah, pembukaan lahan untuk pertanian, industri, dan aktivitas manusia lainnya telah meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca. Hal ini adalah penyebab perubahan iklim yang paling utama. Berikut penjelasannya:

Selain harus memahami penyebab perubahan iklim, sebagai manusia kita harus paham soal dampaknya. Perubahan iklim telah mengacaukan keseimbangan suhu bumi dan memiliki efek luas pada manusia dan lingkungan. Selama pemanasan global, keseimbangan energi dan suhu bumi berubah karena meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca yang memiliki dampak signifikan pada manusia dan lingkungan.

Dapat dibuktikan secara statistik bahwa pemanasan global akan meningkatkan kemungkinan kejadian cuaca ekstrem. Konsekuensi langsung dari perubahan iklim buatan manusia meliputi:

- meningkatnya suhu maksimum
- naiknya suhu minimum
- naiknya permukaan laut
- suhu laut yang lebih tinggi
- peningkatan curah hujan lebat (hujan lebat dan hujan es)
- gletser menyusut
- mencairkan lapisan es

Konsekuensi tidak langsung dari perubahan iklim, yang secara langsung mempengaruhi manusia dan lingkungan, termasuk:

- peningkatan krisis kelaparan dan air, terutama di negara-negara berkembang
- risiko kesehatan melalui peningkatan suhu udara dan gelombang panas
- implikasi ekonomi dari penanganan kerusakan sekunder terkait perubahan iklim
- meningkatkan penyebaran hama dan patogen
- hilangnya keanekaragaman hayati karena adaptasi terbatas dan kecepatan adaptasi flora dan fauna



- pengasaman laut karena peningkatan konsentrasi HCO_3 dalam air sebagai konsekuensi dari peningkatan konsentrasi CO_2
- perlunya adaptasi di semua bidang (mis. pertanian, kehutanan, energi, infrastruktur, pariwisata, dll.)

Karena iklim global adalah sistem yang saling berhubungan dan dipengaruhi oleh banyak faktor berbeda, konsekuensinya biasanya menghasilkan efek umpan balik positif atau negatif. Menurut IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), tingkat dampak perubahan iklim pada masing-masing daerah akan bervariasi dari waktu ke waktu dan dengan kemampuan berbagai sistem sosial dan lingkungan untuk memitigasi atau beradaptasi dengan perubahan.

Guna mendukung upaya pengurangan resiko dan dampak perubahan iklim maka Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia melalui Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Perubahan Iklim (SIDIK) yang menyajikan data dan informasi kerentanan perubahan iklim dengan satuan unit desa di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi dan lingkungan.

Bedasarkan perhitungan menggunakan SIDIK maka Provinsi Sulawesi Selatan termasuk kategori daerah yang relatif rentan. Adapun distribusi spasial dengan tingkat kerentanan 5 klaster yaitu tidak rentan (1), rentan (2), agak rentan (3), cukup rentan (4) dan sangat rentan (5). Peta indeks kerentanan desa Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Desa yang rentan terhadap perubahan iklim di Kabupaten Maros

No	Uraian	Tingkat Kerentanan					Total Desa
		1	2	3	4	5	
1	Jumlah Desa	7	65	27	2	3	103

Sumber : Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan BNPB

C. Revolusi Industri 4.0 (*Transformasi Digital*)

Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah lompatan besar di sektor industri dimana teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan sepenuhnya guna mencapai efisiensi yang setinggi-tingginya sehingga menghasilkan model bisnis baru berbasis digital. Revolusi industry keempat ini menandai serangkaian pergolakan social, politik, budaya dan ekonomi. Industri keempat ini sebagian besar didorong oleh konvergensi



inovasi digital, biologis dan fisik. Indonesia melalui “*Making Indonesia 4.0*” berkomitmen dan siap menerapkan industri 4.0 untuk membangun industri manufaktur yang berdaya saing global. Saat ini, di Indonesia ada lima tulang punggung industri dalam menjalankan revolusi industri 4.0 yaitu 1) makanan dan minuman, 2) tekstil, 3) otomotif, 4) elektronik, 5) kimia. Adapun contoh penerapan revolusi industri 4.0 adalah kebijakan e-smart IKM. Dengan adanya hal itu, para pelaku usaha bisa mempromosikan produk lebih massif di *platform digital*. Diharapkan kehadiran Industri 4.0 industri manufaktur semakin produktif dan berdaya saing sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional”.

Transformasi digital juga telah mengubah sistem pembayaran dari sistem pembayaran tunai ke non tunai menggunakan *electronic money (emoney)*. Hal ini pun didukung dengan adanya pandemi yang mewabah untuk disarankan lebih memilih fasilitas pembayaran non tunai untuk menghindari penularan Covid-19. Seiring dengan merebaknya pandemi Covid 19, pemakaian internet semakin meningkat. Dimana dengan diberlakukannya belajar dan bekerja dari rumah selama masa pandemi tentunya menambah jumlah pemakaian fasilitas internet.

Pemerintah Kabupaten sendiri dalam menghadapi transformasi digital telah menerapkan hal tersebut seperti pemberlakuan absensi digital (wajah), eticketing Kawasan Wisata Alam Bantimurung, kupon makan/minum PNS melalui absensi digital dan wacana pembangunan desa digital di wilayah Kabupaten Maros.

D. Pandemi COVID-19

Jika menilik ke belakang, *Coronavirus Disease 19* atau Covid-19 yang menjadi cikal bakal pandemi ini pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok, pada Desember 2019. Penyebabnya adalah virus corona jenis baru yang disebut SARS Cov-2. Virus ini menyerang saluran pernapasan dan menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan. Dalam tempo yang tergolong singkat, virus ini menyebar ke berbagai daerah lainnya di Tiongkok, kemudian ke negara-negara lain. Setelah hampir 2 bulan menjadi wabah, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 30 Januari 2020 pun menyatakan darurat global terhadap virus corona. Pada saat itu, Covid-19 sudah menyebar luas ke banyak negara.

Di Indonesia, kasus pertama Covid-19 terkonfirmasi pada 2 Maret 2020. Hanya dalam tempo 8 hari, yakni pada tanggal 10 April 2020, penyebarannya telah meluas di 34 provinsi di Indonesia. Sampai hari ini Total kasus Covid-19 atau pasien positif corona di Indonesia per Kamis sore, 18 Februari 2021 mencapai 1.252.685 orang. Angka ini didapat



usai terdapat penambahan pasien corona sebanyak 9.039 orang dalam 24 jam terakhir. Tambahan kasus Covid-19 di Indonesia hari ini turun sedikit ketimbang hari sebelumnya. Sedangkan, pasien corona yang dinyatakan sembuh bertambah sebanyak 10.546 orang, naik 2.500 pasien sembuh dari hari kemarin.

Merebaknya pandemi Covid-19 memberi dampak yang cukup signifikan terhadap Indonesia di berbagai sektor misalnya sektor perekonomian, sektor tenaga kerja, sektor social dan sektor lainnya. Di sektor perekonomian dampak yang ditimbulkan mulai dari daya beli/konsumsi rumah tangga yang merupakan 60 persen penopang terhadap perekonomian jatuh cukup dalam, kedua menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha dan ketiga seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti.

Khusus Kabupaten Maros dengan adanya Pandemi Covid 19 cukup memberi dampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah, dimana awal pandemic dengan kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat terutama restoran/rumah makan, warung kopi, tempat wisata dan pusat perbelanjaan tentunya memberi pengaruh terhadap penerimaan PAD. Selain itu, kebijakan pemerintah pusat yang membatasi kegiatan penerbangan, semakin memperburuk perekonomian Kabupaten Maros. Dengan adanya kebijakan tersebut semakin memperburuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros, dimana pada Tahun 2019 hanya mencapai 1,24 persen dan Tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi (negative).

E. Bonus Demografi

Bonus demografi merupakan suatu keadaan di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Dimana usia produktif yang dimaksud adalah berkisar antara 15 hingga 64 tahun. Tahun 2020-2030, Indonesia akan memasuki bonus demografi. Pada rentan waktu tersebut, diperkirakan penduduk usia produktif bangsa Indonesia akan mencapai 70%.

Banyak negara yang telah berhasil dan terbukti memanfaatkan bonus demografi dengan maksimal seperti Malaysia, Korea Selatan, Jepang, dan masih banyak lagi. Salah satu manfaat yang diberikan oleh bonus demografi adalah, bisa mengubah tingkat perekonomian di sebuah negara, dari negara berkembang menjadi negara maju.

Bonus demografi merupakan keadaan dimana struktur penduduk akan sangat menguntungkan ditinjau dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia



produktif sangatlah besar. Bonus demografi merupakan salah satu peluang emas dalam kemajuan Indonesia apabila dipersiapkan dengan baik. Jumlah penduduk usia produktif yang meningkat juga harus didukung dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Hal ini juga menjadi salah satu syarat wajib dalam mempersiapkan bonus geografi.

Selain memberikan keuntungan dan kesempatan bagi negara berkembang untuk menjadi negara maju dan juga jumlah usia tidak produktif akan ditanggung oleh usia produktif, namun ternyata bonus demografi juga bisa menjadi bahaya dan ancaman bagi sebuah negara jika tidak dipersiapkan dengan baik. Khususnya dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang nantinya akan menentukan tingkat keberhasilan negara dalam memanfaatkan peluang bonus demografi ini. Jika tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, maka sudah dapat dipastikan saat memasuki bonus demografi jumlah pengangguran akan semakin meningkat dan tidak dapat terkendali. Jumlah pengangguran yang meningkat akan menjadi awal yang buruk bagi negara yang tidak mampu memanfaatkan bonus demografi. Sebab, dari hal itu bisa berdampak ke berbagai aspek kehidupan.

Dampak buruk bonus demografi lainnya misalnya: berkurangnya pendapatan sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kualitas sumber daya manusia dengan standar kualifikasi yang diperlukan, meningkatkan jumlah kemiskinan hingga akhirnya memberikan pengaruh buruk kepada pendidikan, hingga ekonomi dan kesehatan.

Hasil sensus penduduk 2020 mencatat penduduk Kabupaten Maros didominasi oleh Generasi Z (8-23 tahun) dan Generasi Milenial (24-39 tahun). Proporsi Generasi Z sebanyak 29,37 persen dan Generasi Milenial sebanyak 25,66 persen dari total jumlah penduduk. Sekitar tujuh tahun lagi semua Generasi Z akan berada pada kelompok usia produktif. Generasi inilah yang berpotensi menjadi motor dalam pembangunan yang akan menjadi penentu masa depan bangsa.

Dari sisi demografi, seluruh Generasi X (40-55 tahun) dan Generasi Milenial (24-39 tahun) merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif pada tahun 2020. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Maros tahun 2020 sebanyak 266.837 jiwa atau 68,11 persen dari total jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Maros masih dalam bonus demografi. Sedangkan penduduk lanjut usia sebesar 5,28 persen atau sebanyak 20.685 jiwa.



4.2.2 Isu Kebijakan Nasional

A. RPJMN Tahun 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 ditetapkan dengan mengusung visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal dengan Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Selanjutnya Presiden Ir.Joko Widodo menetapkan tujuh Prioritas Nasional dalam Pembangunan Tahun 2020-2024 yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan berkebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Selain itu, dalam RPJMN Tahun 2020-2024 mengamanahkan bahwa pengembangan wilayah dilakukan melalui dua pendekatan utama yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan yang berbasis wilayah pulau. Kabupaten



Maros sendiri tentunya masuk dalam pengembangan wilayah Sulawesi Selatan, dimana pengembangan wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan pendekatan koridor pertumbuhan diarahkan pada kabupaten/kota yang berperan sebagai pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah.

Kabupaten Maros sebagai penyangga Kota Makassar masuk dalam Kawasan Pembangunan Makassar dan pengembangan Kawasan Mamminasata. Kawasan Makassar menjadi perhatian dalam pengembangan kawasan strategis, mengingat peran kawasan Makassar dan sekitarnya sebagai wilayah metropolitan Mamminasata dan sebagai Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Kegiatan prioritas nasional di Kawasan Makassar difokuskan pada pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda transportasi, pengembangan komoditas unggulan melalui industri pengolahan sumber daya alam komoditas pertanian, perkebunan, logam dasar, dan kemaritiman, pengembangan kawasan pariwisata sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Pengembangan (DPP) DPP Baru Toraja-Makassar-Selayar yang merupakan Kawasan strategis prioritas berbasis pariwisata yang meliputi TN Bantimurung Bulusaraung, dan Geopark Maros-Pangkajene Kepulauan yang didukung dengan peningkatan kualitas SDM kepariwisataan.

Tabel 4.4 Arah Pembangunan Wilayah Kawasan Makassar dan Sekitarnya dalam RPJMN Tahun 2020-2024

No.	Kabupaten/ Kota	Arahan Pembangunan Wilayah RPJMN 2020-2024	Instansi Pelaksana
1.	Makassar	Pengembangan Pelabuhan Makassar	Kemhub, BUMN (Pelindo IV) dan Swasta
		Pembangunan Jalur KA Makassar - Pare Pare	Kemhub (KPBU)
		Pengembangan Bandara Hasanuddin	Kemhub, BUMN
		Pembangunan PLTG/MG/GU/MGU Makassar	PLN
		Penyediaan air baku di kawasan DPP Baru Makassar-Selayar-Toraja dan sekitarnya	Kementerian PUPR
		Pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga	KPBU
	Makassar	Pembangunan instalasi PSEL	Pemda (DAK)
		Pembangunan angkutan umum massal perkotaan berbasis rel	Kemhub, Pemda, KPBU
		Pembangunan PLTS Rooftop	Kemen. ESDM
		Perjanjian kerjasama penyelesaian permasalahan pelayanan publik di Kaw. Mamminasata	Kemdagri



No.	Kabupaten/ Kota	Arahan Pembangunan Wilayah RPJMN 2020-2024	Instansi Pelaksana
		Pembangunan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan	Kemenhub, Pemda, KPBU
		Pengembangan pelabuhan Makassar	Kemenhub
		Pembangunan jalur KA Makassar- Parepare	Kemenhub, KPBU
		Pengembangan bandara Hasanuddin	Kemenhub
		Pembangunan Pusat Pengembangan Keahlian	Kemenaker
		Pembangunan jalan tol Bypass Mamminasata	KPBU
		Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk ASN, buruh dan pekerja	Kemen. PUPR
		Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR	KPBU
		Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana	BUMN
		Pembangunan dan Peningkatan SPAM	Kemen. PUPR
		Pembangunan SPALD-T Skala Kota/Regional	Kemen. PUPR, APBD, Masyarakat, Swasta (CSR)
		Pembangunan SPALD-T Skala Permukiman	DAK, Kemen. PUPR, APBD, Masyarakat, Swasta (CSR)
		Pembangunan SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Kemen. PUPR
		Pembangunan TPA	Kemen. PUPR, KPBU, APBD
		Pembangunan TPST (skala kawasan)	Kemen. PUTR
		Pembangunan TPS3R	DAK, Kemen. PUPR, APBD
		Penyediaan air baku	Kemen. PUPR
		Penyusunan laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	BPS
2	Gowa	Pengembangan komoditas tebu	Kementerian Pertanian
		Pembangunan Pusat Pengolahan Limbah B3 Terpadu	KPBU
		Perjanjian kerjasama penyelesaian permasalahan pelayanan publik di Kaw. Mamminasata	Kemdagri
		Pembangunan angkutan umum massal perkotaan berbasis rel	Kemenhub, Pemda, KPBU
		Pembangunan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan	Kemenhub, Pemda, KPBU
		Pembangunan jalan tol Bypass Mamminasata	KPBU



No.	Kabupaten/ Kota	Arahan Pembangunan Wilayah RPJMN 2020-2024	Instansi Pelaksana
		Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk ASN, buruh dan pekerja	Kemen. PUPR
		Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR	KPBU
		Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana	BUMN
		Pembangunan dan Peningkatan SPAM	Kemen. PUPR
		Pembangunan SPALD-T Skala Permukiman	DAK, Kemen. PUPR, APBD, Masyarakat, Swasta (CSR)
		Pembangunan SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Kemen. PUPR
		Penyediaan air baku	Kemen. PUPR
		Penyusunan laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	BPS
3.	Maros	Perjanjian kerjasama penyelesaian permasalahan pelayanan publik di Kaw. Mamminasata	Kemdagri
		Pembangunan angkutan umum massal perkotaan berbasis rel	Kemenhub, Pemda, KPBU
		Pembangunan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan	Kemenhub, Pemda, KPBU
		Pengembangan bandara Hasanuddin	Kemenhub
		Pembangunan jalan tol Bypass Mamminasata	KPBU
		Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk ASN, buruh dan pekerja	Kemen. PUPR
		Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR	KPBU
		Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana	BUMN
		Pembangunan dan Peningkatan SPAM	Kemen. PUPR
		Pembangunan SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Kemen. PUPR
		Penyediaan air baku	Kemen. PUPR
		Penyusunan laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	BPS
4.	Takalar	Pengembangan komoditas tebu, kelapa,	Kementerian Pertanian
		Peningkatan produksi perikanan budidaya (ikan dan rumput laut)	Kementerian Kelautan dan Perikanan
		Perjanjian kerjasama penyelesaian permasalahan	Kemdagri



No.	Kabupaten/ Kota	Arahan Pembangunan Wilayah RPJMN 2020-2024	Instansi Pelaksana
		elayanan publik di Kaw. Mamminasata	
		Pembangunan angkutan umum massal perkotaan berbasis rel	Kemenhub, Pemda, KPBU
		Pembangunan angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan	Kemenhub, Pemda, KPBU
		Pembangunan jalan tol Bypass Mamminasata	KPBU
		Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk ASN, buruh dan pekerja	Kemen. PUPR
		Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana untuk MBR	KPBU
		Pembangunan Rumah Susun Sewa/Milik Sederhana	BUMN
		Pembangunan dan Peningkatan SPAM	Kemen. PUPR
		Pembangunan SPALD-S Skala Kota (IPLT)	Kemen. PUPR
		Penyediaan air baku	Kemen. PUPR
		Penyusunan laporan Metropolitan Statistical Area (MSA)	BPS
		Perjanjian kerjasama penyelesaian permasalahan pelayanan publik di Kaw. Mamminasata	Kemdagri
5.	Pangkajene Kepulauan	Pembangunan jalur KA Makassar-Parepare	Kemenhub, KPBU
		Pengembangan Sumber daya air minum berkelanjutan berbasis masyarakat	Kemendesa PDTT
		Pembangunan Desa Digital	Kemendesa PDTT
		Pembangunan desa wisata	Kemendesa PDTT

Sumber : RPJMN Tahun 2020-2024

B. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Jenis pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setia Warga Negara secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta



pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI.

Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal mengatur tentang Prinsip dan Penetapan SPM serta segala ketentuan yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal. Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setia Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang sleanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruanga;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum dan Pelindungan Masyarakat dan
6. Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dijelaskan bahwa terget pencapaian setiap indikator adalah 100 persen setiap tahun dari enam urusan tersebut. Dari terget tersebut maka menjadi isu pokok yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah adalah capaian indikator mutu



pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar yang belum mencapai 100 persen. Adapun yang menjadi isu strategis upaya pencapaian setiap jenis pelayanan dasar untuk Kabupaten Maros yaitu :

1. Pendidikan;
 - a. Pendidikan Usia Dini
 - b. Pendidikan Dasar (SD dan SMP)
 - c. Pendidikan Kesetaraan
2. Kesehatan;
 - a. Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Hamil;
 - b. Pelayanan Kesehatan Bagi Ibu Bersalin;
 - c. Pelayanan Kesehatan Bagi Bayi Baru Lahir;
 - d. Pelayanan Kesehatan Bagi Balita;
 - e. Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Produktif;
 - f. Pelayanan Kesehatan Bagi Usia Lanjut;
 - g. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
 - h. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
 - i. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;
 - j. Pelayanan Kesehatan Bagi Tuberkulosis;
 - k. Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita HIV;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;
 - b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.
5. Ketentraman, ketertiban umum dan Pelindungan Masyarakat :
 - a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Pelayanan informasi rawan bencana;
 - c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;
 - e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban.
6. Sosial:
 - a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas.terlantar di luar panti;



- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusus gelandangan dan pengemis di luar panti;
- d. Perlindungan dan jaminan sosial saat dan/atau setelah dianggap darurat bencana bagi korban bencana.

Untuk Kabupaten Maros secara umum pencapaian SPM perangkat daerah terkait telah memenuhi target, hanya ada beberapa indikator pada Dinas Kesehatan yang belum tercapai.

C. KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK

Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender, namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, serta penguasaan terhadap sumber daya, seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan bidang strategis lainnya. Adanya ketertinggalan salah satu kelompok masyarakat dalam pembangunan, khususnya perempuan disebabkan oleh berbagai permasalahan di masyarakat yang saling berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan paling mendasar dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak adalah pendekatan pembangunan yang belum mengakomodir tentang pentingnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Untuk itu, pengarusutamaan gender diperlukan sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan pembangunan yang dapat dinikmati secara adil, efektif, dan akuntabel oleh seluruh penduduk, baik perempuan, laki-laki, anak perempuan, dan anak laki-laki.

Jaminan terhadap kesetaraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak masih menjadi isu strategis di Indonesia termasuk di Kabupaten Maros. Hal ini dampak dari masih adanya masalah eksploitasi anak, pekerja anak di bawah umur dan kekerasan pada anak serta kekerasan terhadap perempuan.

Adanya kebijakan pemerintah daerah yang menjamin perlindungan anak akan haknya untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan menyimpang, penelantaran dan eksploitasi sangat dibutuhkan. Masih



tingginya akan perkawinan anak di Kabupaten Maros sebagai salah satu bentuk bahwa masih ada perlakuan menyimpang terhadap anak-anak.

Tabel 4.5

Data Perkawinan Anak di Kabupaten Maros Tahun 2018-2020

No	Uraian	2018	2019	2020
1	Kecamatan Mandai	13	19	14
2	Kecamatan Camba	10	6	20
3	Kecamatan Bantimurung	33	15	37
4	Kecamatan Maros Baru	22	29	32
5	Kecamatan Bontoa	28	10	19
6	Kecamatan Mallawa	6	9	3
7	Kecamatan Tanralili	15	28	10
8	Kecamatan Marusu	17	19	29
9	Kecamatan Simbang	11	15	14
10	Kecamatan Cenrana	11	3	2
11	Kecamatan Tompobulu	20	23	5
12	Kecamatan Lau	24	17	23
13	Kecamatan Moncongloe	2	5	12
14	Kecamatan Turikale	13	19	21
	Total	225	217	241

Sumber : DPPPA Tahun 2021

Dari table menunjukkan jika jumlah perkawinan anak di Kabupaten Maros selama kurun waktu 3 (tiga) tahun cukup tinggi berada di atas angka 200 perkawinan. Maraknya perkawinan anak penyebab utamanya adalah rendahnya akses pendidikan, kesempatan di bidang ekonomi serta kualitas layanan dan pendidikan kesehatan reproduksi terutama anak perempuan. Selain itu tingkat kemiskinan juga turut andil menentukan situasi perkawinan anak. Dampak dari perkawinan anak ini kemudian membawa pengaruh negative terutama bagi anak perempuan terutama dari segi psikologis anak perempuan itu sendiri.



4.2.3 Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan (RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun (2018-2023). Visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah **“Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”**.

Adapun penjabaran dari misi meliputi:

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif;
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel;
3. Mewujudkan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif;
4. Mewujudkan Kualitas Manusia Yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter;
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan.

Dalam upaya meningkatkan efektifitas pengelolaan pembangunan dan fokus peningkatan pemanfaatan keunggulan sumberdaya alam serta meningkatkan keterkaitan fungsional antarwilayah, maka pembangunan wilayah Sulawesi Selatan terbagi dalam 5 Kawasan Pembangunan yang mengacu pada rencana pengembangan kawasan budidaya sebagaimana arahan penetapan Kawasan Andalan pada RTRWN dalam upaya mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang meliputi: 1) Kawasan Makassar dsk, 2) Kawasan Parepare dsk, 3) Kawasan Palopo dsk, 4) Kawasan Watampone dsk, dan 5) Kawasan Bulukmba dsk.

Kabupaten Maros sebagai daerah penyanggan Kota Makassar tentunya masuk dalam wilayah pengembangan Kawasan Makassar dan sekitarnya. Kebijakan pengembangan Kawasan Pembangunan Makassar dan sekitarnya diprioritaskan pada peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah melalui pengembangan konektivitas antar moda transportasi daerah, laut dan udara, pengembangan transportasi massal, pembangunan infrastruktur kelistrikan di pulau-pulau kecil, pemenuhan kebutuhan air minum masyarakat, khususnya pada daerah pesisir dan pulau-pulau kecil dan peningkatan kemantapan jalan provinsi.



Gambar 4.1 Arah Pembangunan Kawasan Makassar dan Sekitarnya



Sumber : Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Pembangunan Kawasan Makassar dan sekitarnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya Sulawesi Selatan yang bersih dan Melayani, Sulawesi Selatan yang Sehat dan Cerdas, Sulawesi Selatan yang mandiri dan sejahtera, Sulawesi Selatan yang inklusif dan terkoneksi dan Sulawesi Selatan yang berkarakter dengan target sebagai berikut:

Tabel 4.6 Target Pembangunan Kawasan Makassar Tahun 2019-2023

Kabupaten / Kota	Indikator Pembangunan	Realisasi 2019	Target Pembangunan			
			2020	2021	2022	2023
Makassar	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	8,79	(0,82)-2,25	3,98-5,31	4,65-6,20	4,81-6,41
	Tingkat Kemiskinan (%)	4,28 (Maret)	6,00	4,46	4,21	4,10
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	10,39	12,92	11,95	11,05	10,23
	Gini Ratio	0,39	0,389	0,386	0,383	0,381
	IPM	82,25	82,25	82,57	82,92	83,33
Gowa	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,46	1,37-2,06	4,02-5,36	4,78-6,38	4,90-6,54
	Tingkat Kemiskinan (%)	7,53 (Maret)	9,06	8,04	7,25	6,93
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,87	5,36	4,77	5,25	5,08
	Gini Ratio	0,354	0,353	0,350	0,346	0,342
	IPM	69,66	70,14	70,42	70,71	71,06
Maros	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,24	(0,78)-1,18	2,96-3,94	4,45-5,93	4,56-6,08
	Tingkat Kemiskinan (%)	9,89 (Maret)	11,90	9,88	9,34	8,81



Kabupaten / Kota	Indikator Pembangunan	Realisasi 2019	Target Pembangunan			
			2020	2021	2022	2023
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,71	5,84	4,82	4,46	4,12
	Gini Ratio	0,382	0,381	0,378	0,370	0,363
	IPM	69,50	68,86	70,14	70,43	70,78
Takalar	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,87	1,26-1,89	3,70-4,94	4,48-5,97	4,68-6,23
	Tingkat Kemiskinan (%)	8,70 (Maret)	10,46	9,06	8,57	8,35
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,13	4,75	4,23	3,57	3,30
	Gini Ratio	0,482	0,481	0,477	0,451	0,427
	IPM	66,94	67,31	67,58	67,86	68,19
Pangkajene Kepulauan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,41	1,18-1,77	3,45-4,60	4,48-5,98	4,60-6,13
	Tingkat Kemiskinan (%)	14,06 (Maret)	16,91	15,40	15,35	13,50
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,41	6,58	5,54	5,12	4,47
	Gini Ratio	0,328	0,327	0,324	0,317	0,309
	IPM	68,29	68,72	68,99	69,28	69,62

Sumber : Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

4.2.4 Isu Strategis Kabupaten Maros

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari pembangunan yang dilakukan oleh Negara/daerah. Semakin meningkat nilai IPM, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Selama 10 tahun (2010-2020) pencapaian nilai IPM Kabupaten Maros mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Angka IPM yang belum optimal, dikarenakan belum optimalnya kemampuan masyarakat dalam mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Bila dilihat dari capaian tiap komponen pembentuk IPM, diketahui bahwa komponen yang mengalami pertumbuhan sangat lambat adalah indeks pendidikan dan indeks kesehatan. Indeks pendidikan yang terdiri atas Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah menunjukkan pertumbuhan yang lambat. Angka Harapan Lama Sekolah yang merupakan gambaran harapan terkait lamanya sekolah yang akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang



(tahun), sedangkan Rata-rata Lama Sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

AHLS Kabupaten Maros selama tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik namun demikian AHLS Kabupaten Maros masih berada di bawah AHLS Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS Kabupaten Maros selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2019 masih berada pada angka 7 tahun, dengan demikian dapat diketahui bahwa rata-rata pendidikan penduduk Kabupaten Maros hanya setingkat SMP.

Melihat pencapaian AHLS dan RLS Kabupaten Maros yang hanya berada pada kisaran pendidikan setingkat SMP atau pendidikan dasar, maka perlu adanya upaya pemerintah daerah untuk menaikkan pencapaian tersebut. Sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, hal yang dapat dilakukan adalah dengan menggenjot pendidikan kesetaraan melalui pendidikan non formal agar nilai RLS maupun AHLS dapat meningkat secara signifikan.

2. Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih

Perwujudan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditandai dengan kemampuan masyarakat mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kebutuhan air bersih. Akses terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Isu yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan air bersih di Kabupaten Maros khususnya masyarakat pesisir di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Marusu, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Bontoa dan Kecamatan Lau, masih merupakan masalah klasik yang belum tertangani hingga sekarang.

3. Pengangguran dan Lapangan Kerja

Pengangguran atau tuna karya adalah istilah untuk angkatan kerja yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, sedang menunggu proyek selanjutnya atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya.



Isu pengangguran di Kabupaten Maros untuk lima tahun kedepan menjadi perhatian penting. TPT Kabupaten Maros pada tahun 2016 hingga tahun 2019 menunjukkan tren menurun, namun pada tahun 2020 tingkat pengangguran kembali meningkat akibat tingginya tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pandemi Covid-19. Pada tahun 2017, TPT Kabupaten Maros sebesar 6,85 %, kemudian menurun pada tahun 2018 hingga 5,70 %, lalu pada tahun 2019 menurun hingga mencapai 4,42 %. Pada tahun 2020, TPT kembali meningkat menjadi 6,28 persen.

TPT Kabupaten Maros pada tahun 2020 sebesar 6,28 persen berada di bawah Propinsi Sulawesi Selatan sebesar 6,31 %, dan juga di bawah nasional sebesar 7,07 %. Kondisi ini disebabkan pada tahun tersebut, penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Maros masih cukup tinggi, dengan adanya Grand Mall. Selain itu tumbuhnya sektor-sektor usaha, utamanya rumah makan dan cafe yang berada di sekitar kawasan kuliner Pantai Tak Berombak (PTB) juga banyak menyerap tenaga kerja.

4. Daya Dukung Lingkungan dan Ketahanan Bencana

Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Maros termasuk dalam wilayah rawan bencana, hal ini disebabkan karena kondisi geografis dan topografi Kabupaten Maros yang berada di wilayah pegunungan dan pesisir. Berdasarkan pengkajian resiko bencana maka Kabupaten Maros memiliki 9 (Sembilan) jenis bencana yang rawan terjadi, yaitu; bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, tsunami.

Keberadaan beberapa kawasan strategis nasional di Kabupaten Maros seperti TN Bantimurung Bulusaraung, Geopark Maros-Pangkajene Kepulauan dan Kawasan Mamminasata merupakan potensi dan keunggulan yang berpengaruh secara langsung terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan.

5. Reformasi Birokrasi

Pemerintahan yang bersih merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu suatu kondisi pelaksanaan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan Akuntabel sesuai dengan arah pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga terwujud pemerintahan yang berih (*clean governance*) dan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di semua aspek pelaksanaan pemerintahan.



Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, tidak KKN dan berorientasi pada pelayanan publik maka penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan secara efektif, efisien, bersih dan berwibawa. Hal tersebut antara lain dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas SDM ASN, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat, meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, merumuskan perencanaan dengan baik dan tertata sehingga pembangunan yang dilaksanakan memiliki arah yang jelas dan meningkatkan kualitas pengawasan internal yang dilakukan.

Upaya tersebut merupakan rangkaian reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros melalui 8 (delapan) area perubahan yaitu: (1) Mental Aparatur; 2) Pengawasan; 3) Akuntabilitas; 4) Kelembagaan; 5) Tata Laksana; 6) SDM Aparatur; 7) Peraturan Perundang-undangan; 8) Pelayanan Publik. Pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Maros masih menyisakan berbagai tantangan kedepan yang secara bertahap dan terus menerus harus diperbaiki.





BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan prioritas, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2021–2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun dengan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, religius, berkepribadian dan berbudaya, serta peningkatan daya saing Daerah melalui pengembangan potensi Daerah dan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi dengan memperhatikan tantangan perkembangan global.

Untuk mencapai hal tersebut, maka dilakukan proses analisis terhadap suatu persoalan yang muncul atau diperkirakan akan terdapat dalam dinamika pencapaian suatu Visi dan Misi yang merupakan langkah awal secara teknokratik dalam suatu perumusan rencana kerja. Pelaksanaan analisis terhadap suatu persoalan yang di dahului dengan perumusan masalah baik yang telah, sedang, dan akan terjadi menjadi sesuatu hal yang tidak dapat dihindari untuk menjaga korelasi yang positif antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan utamanya terhadap isu – isu strategis baik yang skala lokal, regional, maupun nasional yang berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang, dan budaya yang terdapat di kabupaten Maros.

A. VISI PEMBANGUNAN DAERAH

Sebagaimana arahan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 86 tahun 2017, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan yang merupakan Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan hal tersebut maka Visi Pemerintah Kabupaten Maros periode 2021 – 2026 adalah **“MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN BERDAYA SAING”**. Visi tersebut memiliki arti dan makna pada setiap pokok visi, yaitu:



Tabel 5.1
Visi, pokok Visi, dan Penjelasan Visi

VISI	POKOK – POKOK VISI	PENJELASAN
MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN BERDAYA SAING	SEJAHTERA	Kondisi masyarakat Maros yang terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa: sandang, pangan, dan papan serta mendapatkan pelayanan dasar berupa: pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan yang layak, layanan sosial, dan perlindungan baik dari aspek keamanan dan ketertiban maupun aspek kebencanaan.
	RELIGIUS	Kondisi tata hubungan masyarakat yang serasi dan selaras berdasarkan nilai-nilai agama, kearifan lokal dan norma hukum
	BERDAYA SAING	Kondisi masyarakat dan wilayah Kabupaten Maros yang memiliki Kemampuan kompetitif dan ketangguhan untuk menghadapi persaingan global dimasa yang akan datang yang meliputi: infrastruktur, Perekonomian, sumber daya manusia, iklim usaha, dan tata kelola birokrasi

B. MISI PEMBANGUNAN DAERAH

Guna Menyatukan tindakan yang nyata bagi seluruh stakeholders pembangunan Daerah dan seluruh komponen Penyelenggara Pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskanlah 6 (enam) Misi beserta penjelasannya, yaitu:

Tabel 5.2
Misi dan penjelasan Misi

NO	MISI	PENJELASAN
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik	Adalah upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi seluruh aspek pemerintahan, yaitu: kelembagaan, perencanaan, keuangan, proses bisnis, SDM aparatur, dan pengendalian yang diselenggarakan melalui mekanisme kerja yang sinergis, inovatif, responsif, dan produktif sehingga dapat menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat serta sekaligus berperan sebagai penyelenggara pelayanan publik (<i>public service</i>), pelaksana pembangunan (<i>development</i>), dan pemberdayaan masyarakat (<i>empowering</i>).
2	Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia	Adalah sumber daya manusia masyarakat yang sehat, cerdas, kreatif, empati, religius, energik, dan memiliki keterampilan serta keahlian sesuai dengan kebutuhan di berbagai bidang pembangunan yang disertai dengan kemampuan menjunjung nilai – nilai kehidupan bermasyarakat.



3	Meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif	Adalah upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan kebutuhan dasar (mulai dari kebutuhan sandang, pangan, hingga papan) dan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, ketentraman dan ketertiban, serta layanan sosial
4	Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal	Adalah penguatan ekonomi masyarakat melalui upaya pemberdayaan kelompok – kelompok ekonomi masyarakat untuk memanfaatkan potensi daerah, baik yang berbentuk fisik maupun non fisik dan menjadi sektor unggulan daerah serta mampu mensejahterakan masyarakat.
5	Memantapkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemerataan wilayah	Adalah upaya pembangunan pada aspek daya saing daerah yang di fokuskan pada infrastruktur pendukung yang memberikan dampak pada akses pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mengelola serta memanfaatkan seluruh sumber daya ekonomi daerah yang ada secara lebih efisien, efektif, dan produktif.
6	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Adalah upaya untuk mewujudkan pembangunan, baik pada wilayah perkotaan maupun perdesaan yang mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, daya tampung, serta mitigasi terhadap kerusakan lingkungan hidup dan bencana alam

C. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sekaligus sebagai sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dan sasaran dalam rangka pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan yang didasarkan kepada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

- I. MISI 1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik
 - Tujuan 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang professional, bersinergi dan berkinerja tinggi
 - a. Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
 - b. Sasaran 2: Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas



II. MISI 2: Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia

- Tujuan 2: Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang mengedepankan nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal
 - a. Sasaran 3: Meningkatnya kualitas Pendidikan dan kesehatan masyarakat
 - b. Sasaran 4: Meningkatnya kualitas hidup beragama dan penerapan nilai budaya lokal
 - c. Sasaran 5: Meningkatnya kualitas hidup dan peranserta gender dan kepemudaan dalam pembangunan.

III. MISI 3: Meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif

- Tujuan 3: Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan urusan wajib pelayanan dasar
 - a. Sasaran 6: Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat

IV. MISI 4: Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal

- Tujuan 4: Meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis keunggulan sumberdaya ekonomi daerah
 - a. Sasaran 7: Meningkatnya investasi serta perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
 - b. Sasaran 8: Meningkatnya inovasi dan produktivitas kegiatan ekonomi sektor unggulan daerah.

V. MISI 5: Memantapkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemerataan wilayah

- Tujuan 5: Meningkatkan dukungan infrastruktur ekonomi masyarakat perkotaan dan perdesaan
 - a. Sasaran 9: Meningkatnya taraf hidup pelaku ekonomi kecil dan menengah serta masyarakat kurang mampu
 - b. Sasaran 10: Berkembangnya ekosistem ekonomi kreatif di perkotaan

VI. MISI 6: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

- Tujuan 6: Meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup
 - a. Sasaran 11: Meningkatnya kualitas layanan untuk kelestarian lingkungan hidup
 - b. Sasaran 12: Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap bencana

Berdasarkan pernyataan tujuan dan sasaran yang telah di sampaikan sebelumnya, maka dilakukan *cascading down* indikator kinerja, yaitu menurunkan rencana pencapaian indikator tujuan kepada indikator sasaran yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator tujuan yang hendak dicapai target kinerjanya, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:



Tabel 5.3

Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Jangka Menengah
Kabupaten Maros Periode 2021 – 2026
VISI: MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN BERDAYA SAING

NO	MISI	TUJUAN / SASARAN	TOLOK UKUR	INDIKATOR KINERJA							SATUAN	
				KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR		
					TAHUN PELAKSANAAN							
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
1	MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK	Tujuan 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang professional, bersinergi dan berkinerja tinggi	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	CC	B	B	BB	BB	Nilai Indeks	
		1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	B (69,63)	B	BB	BB	BB	A	A	Point
				Nilai LPPD								Point
		2	Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (3,25)	B (3,25)	B (3,25)	B (3,25)	A (3,26)	A (3,26)	A (3,26)	Nilai IKM
2	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tujuan 2: Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang mengedepankan nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,86	70,38	70,91	71,44	71,97	72,51	73,05	Nilai IPM	
		3	Meningkatnya kualitas Pendidikan dan kesehatan masyarakat	Indeks Pendidikan	65,54	66,08	66,61	67,16	67,70	68,26	65,54	Nilai Indeks
				Indeks Kesehatan	0,75	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,75	Nilai Indeks



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

		4	Meningkatnya kualitas hidup beragama dan penerapan nilai budaya lokal	Indeks Kerukunan Umat Beragama	0	0	Tinggi (61-80)	Tinggi (61-80)	Tinggi (61-80)	Tinggi (61-80)	Tinggi (61-80)	Nilai Indeks
		5	Meningkatnya kualitas hidup dan peran serta gender dan kepemudaan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,23	89,50	89,77	90,04	90,31	90,58	90,85	Nilai Indeks
				Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	0,00	0,00	45,00	46,80	48,67	50,62	52,64	Nilai Indeks
3	MENINGKATKAN KETERJANGKAUAN KEBUTUHAN DASAR DAN PELAYANAN DASAR SECARA INKLUSIF	Tujuan 3: Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan urusan wajib pelayanan dasar		Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan SPM	B (3,25)	B (3,25)	B (3,25)	B (3,25)	A (3,26)	A (3,26)	A (3,26)	Nilai IKM
		6	Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat	Rata-rata persentase capaian SPM	31,94	100	100	100	100	100	100	Persen
4	MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI DAERAH BERBASIS POTENSI LOKAL	Tujuan 4: Meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis keunggulan sumberdaya ekonomi daerah		Pertumbuhan Ekonomi	-10,87	-1,82	2,78	4,66	6,17	6,55	7,13	Persen
		7	Meningkatnya investasi serta perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,31	6,07	5,72	5,39	5,09	4,79	4,52	Persen
		8	Meningkatnya inovasi dan produktivitas kegiatan ekonomi sektor unggulan daerah	PDRB Per Kapita	47,53	47,16	49,05	51,03	53,08	55,22	57,44	Nilai



5	MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN PEMERATAAN WILAYAH	Tujuan 5: Meningkatkan dukungan infrastruktur ekonomi masyarakat perkotaan dan perdesaan		Rasio Gini	0,368	0,364	0,361	0,357	0,353	0,350	0,346	Nilai Indeks
		9	Meningkatnya taraf hidup pelaku ekonomi kecil dan menengah serta masyarakat kurang mampu	Tingkat Kemiskinan	9,74	9,37	9,02	8,68	8,35	8,04	7,74	Persen
		10	Berkembangnya ekosistem ekonomi kreatif di perkotaan	Kontribusi nilai produksi ekonomi kreatif terhadap PDRB	0,55	0,69	0,81	0,94	1,07	1,22	1,37	Persen
6	MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA	Tujuan 6: Meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup		Indeks kualitas lingkungan hidup	59,76	59,76	59,60	59,43	59,26	59,10	59,60	Nilai Indeks
		11	Meningkatnya kualitas layanan untuk kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkungan Hidup	B (3,25)	B (3,25)	B (3,25)	B (3,25)	A (3,26)	A (3,26)	A (3,26)	Nilai IKM
		12	Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap bencana	Indeks risiko bencana	147,24	138,41	130,10	122,30	114,96	108,06	101,58	Nilai Indeks



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Maros mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja, kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program - program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan dan pengendalian.

Untuk mendukung visi “MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN BERDAYA SAING” maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Maros periode 2021 – 2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Maros melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

6.1. STRATEGI

Strategi diturunkan dalam arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Selanjutnya, strategi yang dirumuskan dalam pembangunan Kabupaten Maros adalah sebagai berikut :

1. Misi 1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi tersebut adalah:



1. Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan budaya kerja, profesionalitas dan kesejahteraan aparatur, penataan organisasi, proses bisnis, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, dan pengendalian yang ditunjang dengan mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
2. Menyediakan pelayanan publik yang terdesentralisasi ke semua wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan yang di dukung oleh teknologi informasi terintegrasi dan sumber daya manusia pelayanan yang melayani.

2. Misi 2: Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan pemerataan dan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan secara berkualitas yang ditunjang oleh ketersediaan SDM tenaga kesehatan, sarana prasarana kesehatan, dan teknologi informasi.
2. Meningkatkan peran serta lembaga/organisasi/kelompok masyarakat dalam memberikan pemahaman nilai-nilai keagamaan, toleransi, kerukunan, dan pelayanan kehidupan beragama, pelestarian dan pengembangan budaya yang memberikan penguatan positif terhadap karakter dan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah melalui suatu sistem layanan yang berbasis pada penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan yang disertai dengan pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

3. Misi 3: Meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi tersebut adalah:

1. Mengoptimalkan kemampuan pemerintah daerah dan pemerintah Desa yang didukung oleh potensi masyarakat dan dunia usaha dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai SPM dan percepatan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat yang mencakup pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, perumahan dan permukiman, dan transportasi.

4. Misi 4: Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi tersebut adalah:

1. Mengoptimalkan Lapangan usaha pada sektor unggulan Daerah yang memiliki pertumbuhan yang cepat, dapat memperluas lapangan kerja (formal dan non



formal), meningkatkan kompetensi serta produktivitas tenaga kerja serta dapat menjadi pemicu bagi perkembangan sektor lainnya yang disertai dengan pembentukan dan pengembangan kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat serta peningkatan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

5. Misi 5: Memantapkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemerataan wilayah

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas aksesibilitas antar ruang yang mampu mengakselerasi peningkatan usaha ekonomi kecil dan menengah terutama ekonomi produktif masyarakat miskin serta perkembangan ekonomi kreatif, baik melalui pembiayaan Daerah maupun melalui kerjasama dengan swasta/dunia usaha atau kerjasama dengan lembaga/pemerintah lainnya.

6. Misi 6: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

Strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi tersebut adalah:

1. Mengintegrasikan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup.
2. Meningkatkan sistem ketahanan bencana yang handal melalui pemantauan secara berkesinambungan, pemutakhiran sistem mitigasi bencana, dan penanganan bencana skala Kabupaten.berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana.

Selanjutnya keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi dalam RPJMD periode 2021 – 2026, disajikan dalam tabel berikut ini:

VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING				
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI
MISI 1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik				
1	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang professional, bersinergi dan berkinerja tinggi	1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan budaya kerja, profesionalitas dan kesejahteraan aparatur, penataan organisasi, proses bisnis, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, dan pengendalian yang ditunjang



				dengan mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
		2	Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas	Menyediakan pelayanan publik yang terdesentralisasi ke semua wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan yang di dukung oleh teknologi informasi terintegrasi dan sumber daya manusia pelayanan yang melayani.
MISI 2: Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia				
2	Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang mengedepankan nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal	3	Meningkatnya kualitas Pendidikan dan kesehatan masyarakat	Meningkatkan pemerataan dan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan secara berkualitas yang ditunjang oleh ketersediaan SDM tenaga kesehatan, sarana prasarana kesehatan, dan teknologi informasi.
		4	Meningkatnya kualitas hidup beragama dan penerapan nilai budaya lokal	Meningkatkan peran serta lembaga/organisasi/kelompok masyarakat dalam memberikan pemahaman nilai-nilai keagamaan, toleransi, kerukunan, dan pelayanan kehidupan beragama, pelestarian dan pengembangan budaya yang memberikan penguatan positif terhadap karakter dan kesejahteraan masyarakat.
		5	Meningkatnya kualitas hidup dan peranserta gender dan kepemudaan dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah melalui suatu sistem layanan yang berbasis pada kesadaran, pemberdayaan dan pengembangan yang disertai dengan pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
MISI 3: Meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif				
3	Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan urusan wajib pelayanan dasar	6	Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat	Mengoptimalkan kemampuan pemerintah daerah dan pemerintah Desa yang didukung oleh potensi masyarakat dan dunia usaha dalam menyediakan pelayanan



				dasar sesuai SPM
MISI 4: Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal				
4	Meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis keunggulan sumberdaya ekonomi daerah	7	Meningkatnya investasi serta perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat	Mengoptimalkan Lapangan usaha pada sektor unggulan Daerah yang memiliki pertumbuhan yang cepat, dapat memperluas lapangan kerja (formal dan non formal), meningkatkan kompetensi serta produktivitas tenaga kerja serta dapat menjadi pemicu bagi perkembangan sektor lainnya yang disertai dengan pembentukan dan pengembangan kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat serta peningkatan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.
		8	Meningkatnya inovasi dan produktivitas kegiatan ekonomi sektor unggulan daerah.	
MISI 5: Memantapkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemerataan wilayah				
5	Meningkatkan dukungan infrastruktur ekonomi masyarakat perkotaan dan perdesaan	9	Meningkatnya taraf hidup pelaku ekonomi kecil dan menengah serta masyarakat kurang mampu	Meningkatkan kualitas aksesibilitas antar ruang yang mampu mengakselerasi peningkatan usaha ekonomi kecil dan menengah terutama ekonomi produktif masyarakat miskin serta perkembangan ekonomi kreatif, baik melalui pembiayaan Daerah maupun melalui kerjasama dengan swasta/dunia usaha atau kerjasama dengan lembaga/pemerintah lainnya.
		10	Berkembangnya ekosistem ekonomi kreatif di perkotaan	
MISI 6: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana				
1	Meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup	11	Meningkatnya kualitas layanan untuk kelestarian lingkungan hidup	Mengintegrasikan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup
		12	Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap bencana	



				handal melalui pemantauan secara berkesinambungan, pemutakhiran sistem mitigasi bencana, dan penanganan bencana skala Kabupaten.berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana.
--	--	--	--	--

6.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Arah kebijakan juga merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD.

Rumusan arah kebijakan ini berfungsi untuk merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan tujuan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini dijabarkan arah kebijakan dari RPJMD Kabupaten Maros periode tahun 2021-2026, sebagai berikut:

Tabel 6.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
MISI 1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik				
1	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang professional, bersinergi dan berkinerja tinggi	1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	<p>Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan melalui penerapan budaya kerja, profesionalitas dan kesejahteraan aparatur, penataan</p> <p>Penguatan pengelolaan akuntabilitas kinerja</p> <p>Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran, termasuk pembinaan aparatur perencanaan dan penganggaran</p> <p>Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran, termasuk pembinaan aparatur perencanaan dan penganggaran</p>



			<p>organisasi, proses bisnis, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, dan pengendalian yang ditunjang dengan mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).</p>	<p>Pengintegrasian proses bisnis (tata laksana) dengan data, infrastruktur penunjang, aplikasi, dan keamanan ke dalam Sistem pemerintahan berbasis elektronik.</p> <p>Penyempurnaan berbagai produk hukum daerah yang dipandang tidak harmonis/ tumpang tindih, tidak sinkron, dan tidak relevan lagi dengan produk hukum lainnya</p> <p>Penguatan pengawasan melalui Peningkatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</p> <p>Penataan SDM Aparatur sesuai dengan tuntutan jabatan dan peranannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayan masyarakat.</p> <p>Peningkatan kesejahteraan aparatur melalui penerapan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan realisasi perjanjian kinerja yang disepakati.</p>
	2	Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas	<p>Menyediakan pelayanan publik yang terdesentralisasi ke semua wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan yang di dukung oleh teknologi informasi terintegrasi dan sumber daya manusia pelayanan yang melayani.</p>	<p>Penyempurnaan Kebijakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan</p> <p>Pelaksanaan budaya pelayanan prima melalui sosialisasi/pelatihan, inovasi teknologi informasi, serta penyempurnaan sarana layanan yang terpadu dan terintegrasi</p> <p>Penilaian kepuasan terhadap pelayanan melalui survei kepuasan, keterbukaan akses terhadap hasil survei kepuasan, dan tindak lanjut atas hasil survey.</p> <p>Peningkatan mutu, jenis layanan, dan penerima layanan dasar</p> <p>Pendelegasian kewenangan terkait pelaksanaan pelayanan publik di tingkat kecamatan, desa, dan</p>



					kelurahan.
MISI 2: Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia					
2	Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang mengedepankan nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal	3	Meningkatnya kualitas Pendidikan dan kesehatan masyarakat	Meningkatkan pemerataan dan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan secara berkualitas yang ditunjang oleh ketersediaan SDM tenaga kesehatan, sarana prasarana kesehatan, dan teknologi informasi.	<p>Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan di semua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun</p> <p>Peningkatan kualitas dan pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik (PNS dan PPPK)</p> <p>Pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antar wilayah</p> <p>Peningkatan efektifitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan untuk peningkatan akses, kualitas, dan daya saing pendidikan.</p> <p>Penghapusan iuran komite sekolah.</p> <p>Penyediaan perlengkapan sekolah setiap tahun ajaran baru dan beasiswa untuk mahasiswa</p> <p>Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber bacaan, baik cetak maupun elektronik</p> <p>Penguatan terhadap upaya mendorong minat baca masyarakat</p> <p>Peningkatan ketersediaan perpustakaan/taman bacaan yang mudah dijangkau oleh masyarakat</p> <p>Peningkatan kerjasama dengan kampus - kampus dan seluruh lembaga penelitian terkait budaya pendidikan</p> <p>Peningkatan akses bagi disabilitas dan masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan</p> <p>Peningkatan kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi</p> <p>Perluasan akses dan kualitas pelayanan KB</p> <p>Percepatan penurunan stunting dengan pengembangan sistem</p>



				<p>jaminan gizi dan tumbuh kembang anak</p> <p>Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit</p> <p>Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat</p> <p>Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan</p> <p>Pemenuhan dan peningkatan kompetensi serta kesejahteraan tenaga kesehatan</p> <p>Pemenuhan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan</p> <p>Pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulan data, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan</p>
	4	Meningkatnya kualitas hidup beragama dan penerapan nilai budaya lokal	<p>Meningkatkan peran serta lembaga/ organisasi/ kelompok masyarakat dalam memberikan pemahaman nilai-nilai keagamaan, toleransi, kerukunan, dan pelayanan kehidupan beragama, pelestarian dan pengembangan budaya yang memberikan penguatan positif terhadap karakter dan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>Peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan</p> <p>Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong</p> <p>Penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri</p> <p>Peningkatan Kesejahteraan (Insentif) bagi Imam masjid, guru mengaji, pastor, pendeta, guru sekolah minggu/remaja dan pegawai syaria'</p> <p>Peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan</p> <p>Pemberdayaan dana sosial keagamaan dan pengembangan kelembagaan ekonomi umat</p> <p>Pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat aktifitas keagamaan dan syiar.</p> <p>Peningkatan aktifitas sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan secara bergotong royong</p> <p>Pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah dan kearifan lokal</p> <p>Pengembangan produk seni, budaya, dan film serta</p>



				<p>penyelenggaraan festival budaya</p> <p>Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya</p> <p>Pembinaan terhadap organisasi sosial dan kemasyarakatan</p> <p>Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas.</p> <p>Penyiapan kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup</p> <p>Perwujudan lingkungan yang kondusif melalui penguatan masyarakat, kelembagaan, regulasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta partisipasi media dan dunia usaha</p> <p>Pelibatan Masyarakat secara aktif dalam mengemukakan pendapat atau saran pada pengambilan kebijakan publik.</p>
	5	Meningkatnya kualitas hidup dan peran serta gender dan kepemudaan dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah melalui suatu sistem layanan yang berbasis pada kesadaran, pemberdayaan dan pengembangan yang disertai dengan pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.	<p>Pemberdayaan perempuan di semua sektor pembangunan</p> <p>Pengintegrasian perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian.</p> <p>Percepatan pelaksanaan PUG melalui penguatan kelembagaan PUG dan penguatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)</p> <p>Peningkatan pengetahuan dan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha tentang gender</p> <p>Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO</p> <p>Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan politik</p> <p>Perluasan kesempatan dalam berorganisasi serta berkreasi bagi pemuda secara bebas dan bertanggung jawab.</p>



					<p>Pencegahan perilaku berisiko pada pemuda, termasuk pencegahan bahaya kekerasan, penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual lainnya.</p> <p>Peningkatan pelayanan kepemudaan termasuk memfasilitasi ruang-ruang kreasi positif bagi pemuda melalui pengembangan maros creative center</p> <p>Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelayanan pemuda pada bidang olahraga dan kependuan</p> <p>Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam pelestarian lingkungan</p> <p>Peningkatan upaya penurunan kasus perkawinan usia muda bagi pemuda perempuan</p> <p>Peningkatan akses bagi pemuda perempuan mendapatkan pendidikan tingkat menengah dan perguruan tinggi</p> <p>Perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi pemuda perempuan utamanya pada sektor formal</p> <p>Pengembangan tenaga kerja pemuda berbasis teknologi informasi dan kebutuhan pasar kerja</p> <p>Peningkatan akses terhadap permodalan bagi wirausaha muda yang memiliki ide bisnis dan usaha yang menarik</p> <p>Pengembangan kewirausahaan pemuda yang berorientasi regional dan nasional dengan memperhatikan kompetensi dan produk unggulan daerah</p>
MISI 3: Meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif					
3	Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan urusan wajib pelayanan dasar	6	Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat	<p>Mengoptimalkan kemampuan pemerintah daerah dan pemerintah Desa yang didukung oleh potensi masyarakat dan</p> <p>Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara penuh dan konsisten termasuk perbaikan mekanisme pengaduan yang terintegrasi dengan manajemen kinerja</p> <p>Percepatan pembangunan wilayah (Desa/Kelurahan) dengan fokus</p>	



				dunia usaha dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai SPM	<p>pada pemenuhan pelayanan dasar.</p> <p>Peningkatan kualitas SDM pengelola pelayanan dasar</p> <p>Penguatan peran kecamatan sebagai pusat pelayanan dasar di wilayah</p> <p>Peningkatan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan pelayanan dasar</p> <p>Perluasan jangkauan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengakselerasi pelayanan dasar</p>
MISI 4: Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal					
4	Meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis keunggulan sumberdaya ekonomi daerah	7	Meningkatnya investasi serta perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat	Mengoptimalkan Lapangan usaha pada sektor unggulan Daerah yang memiliki pertumbuhan yang cepat, dapat memperluas lapangan kerja (formal dan non formal), meningkatkan kompetensi serta produktivitas tenaga kerja serta dapat menjadi pemicu bagi perkembangan sektor lainnya yang disertai dengan pembentukan dan pengembangan kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat serta peningkatan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial dengan	<p>Peningkatan investasi pada sektor unggulan Daerah yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja</p>
					<p>Pengembangan Kawasan Industri Maros yang terintegrasi dengan sumber bahan baku lokal dan pemasaran produksi hasil industri</p>
					<p>Penyediaan balai latihan kerja</p>
					<p>Peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja</p>
					<p>Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan</p>
					<p>Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja yang tepat dan perlindungan tenaga kerja</p>
					<p>Pengintegrasian pasar modern dengan sentra-sentra IKM untuk memperluas pasar</p>
		<p>Peningkatan kerjasama lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan lembaga pemberi kerja.</p>			
		<p>Perluasan kesempatan kerja melalui Penciptaan lapangan kerja dan budaya masyarakat bekerja</p>			
		8	Meningkatnya inovasi dan produktivitas kegiatan ekonomi sektor	<p>Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi di sektor riil dan industrialisasi</p> <p>Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan</p>	



			unggulan daerah.	mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.	<p>pemasaran produk usaha mikro</p> <p>Penyediaan bantuan modal, infrastruktur, alsintan, pupuk, alat tangkap, bibit dan asuransi bagi petani serta nelayan</p> <p>Peningkatan ketersediaan data informasi perkembangan ekonomi utamanya pada sektor pertanian, pariwisata, perikanan, ekonomi kreatif dan ekonomi digital</p> <p>Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi</p> <p>Pengembangan destinasi wisata baru dan peremajaan destinasi wisata lama</p> <p>Pengembangan infrastruktur utama dan pendukung kepariwisataan</p> <p>Pemanfaatan keberadaan potensi world heritage pada bentangan kawasan karst maros sebagai tujuan wisata internasional</p> <p>Peningkatan kualitas produksi terutama pada komoditi yang berpotensi ekspor</p> <p>Penyediaan dan peningkatan sarana ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan jasa termasuk perbaikan pasar tradisional, koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)</p>
MISI 5: Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal					
5	Meningkatkan dukungan infrastruktur ekonomi masyarakat perkotaan dan perdesaan	9	Meningkatnya taraf hidup pelaku ekonomi kecil dan menengah serta masyarakat kurang mampu	Meningkatkan kualitas aksesibilitas antar ruang yang mampu mengakselerasi peningkatan usaha ekonomi kecil dan menengah terutama ekonomi produktif masyarakat miskin serta perkembangan ekonomi kreatif, baik melalui	<p>Pelatihan usaha serta pemberian akses usaha produktif bagi keluarga miskin dan rentan</p> <p>Peningkatan usaha ekonomi produktif bagi kelompok miskin dan rentan untuk peningkatan pendapatan keluarga</p> <p>Penguatan kapasitas usaha kelompok miskin dan rentan dengan skema pembinaan usaha serta kemitraan usaha</p> <p>Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu dalam kesempatan kerja serta pengembangan wirausaha</p> <p>Peningkatan ketersediaan</p>



			<p>pembiayaan Daerah maupun melalui kerjasama dengan swasta/ dunia usaha atau kerjasama dengan lembaga/ pemerintah lainnya.</p>	<p>infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu</p> <p>Percepatan pelaksanaan dan peningkatan keterpaduan program/kegiatan pengentasan kemiskinan berperspektif gender.</p> <p>Peningkatan akses dan penerima manfaat bagi penduduk miskin perempuan dan laki-laki terhadap pelayanan dasar, pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta kesempatan pada usaha</p> <p>Penyediaan bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu termasuk penyediaan perlengkapan sekolah setiap tahun ajaran baru serta beasiswa bagi mahasiswa berprestasi.</p> <p>Percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi masyarakat miskin dan rentan</p> <p>Penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, termasuk penyediaan subsidi pembayaran iuran BPJS</p> <p>Penguatan pelaksanaan jaminan sosial komprehensif dan terintegrasi</p> <p>Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat sasaran</p> <p>Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu</p> <p>Peningkatan dan Pemantapan kondisi jaringan jalan dan jembatan beserta prasarana fasilitas perlengkapan jalan.</p> <p>Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi.</p> <p>Pengembangan infrastruktur utama dan pendukung</p>
--	--	--	---	---



					kepariwisataan
					Pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan
					Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi
					Penyediaan infrastruktur Pengendalian keamanan data dan informasi (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras)
					Peningkatan ketersediaan sarana komunikasi dan informasi
					Peningkatan ketersediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman layak huni.
					Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase secara rutin dan berkelanjutan
					Peningkatan kinerja perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.
					Penyediaan dan peningkatan sarana ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan jasa termasuk perbaikan pasar tradisional, koperasi dan UMKM
					Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk usaha kreatif dan digital
					Pendampingan dan inkubasi usaha ekonomi kreatif
					Pengembangan dan revitalisasi ruang kreatif
					Peningkatan populasi pelaku usaha digital
					Pengembangan maros creative center
					Perluasan aktivitas ekonomi kreatif
					Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi untuk ekonomi kreatif dan digital
					Pengoptimalan pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0
MISI 6: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana					
1	Meningkatkan	1	Meningkatny	Mengintegrasikan	Pemantauan Kualitas Udara, Air,



daya dukung dan kualitas lingkungan hidup	1	a	<p>kualitas layanan untuk kelestarian lingkungan hidup</p> <p>upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup</p>	<p>dan tutupan lahan</p> <p>Optimalisasi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.</p> <p>Peningkatan dan pemanfaatan fasilitas pengelolaan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan</p> <p>Peningkatan peran serta sekolah, ormas/lembaga, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup</p> <p>Peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3R secara berkala</p> <p>Pemantauan dan penegakan aturan tentang pengendalian pencemaran air dan udara terutama pada sektor industri dan komersial</p> <p>Penguatan sistem perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan</p> <p>Pemantauan pengendalian pencemaran limbah domestik di perumahan dan kawasan permukiman</p> <p>Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi termasuk pada kawasan pesisir</p>	
		1 2	<p>Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap bencana</p>	<p>Meningkatkan sistem ketahanan bencana yang handal melalui pemantauan secara berkesinambungan, pemutakhiran sistem mitigasi bencana, dan penanganan bencana berbasis risiko bencana .</p>	<p>Peningkatan mitigasi bencana dan pelayanan tanggap darurat bencana.</p> <p>Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan bencana dan mitigasi bencana</p> <p>Peningkatan sistem manajemen resiko dan mitigasi bencana kebakaran melalui upaya optimalisasi rekomendasi dan pemantauan berkala proteksi kebakaran pada bangunan, kawasan permukiman, lahan, dan hutan</p> <p>Penyediaan sarana/akses untuk kemudahan penanggulangan bencana</p>



					Peningkatan kecakapan masyarakat dan petugas dalam penanggulangan bencana
					Peningkatan upaya integrasi antar stakeholder dalam pengelolaan tanggap darurat bencana
					Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana

6.3. PROGRAM PEMBANGUNAN

Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan arah kebijakan dan diselaraskan dengan program strategis nasional. Selain itu, Program pembangunan Daerah merupakan program-program yang diharapkan mampu untuk memwadahi kegiatan yang merupakan prioritas dari Bupati dan Wakil Bupati sebagai bagian pemenuhan janji politik.

Selengkapnya program pembangunan Daerah yang disertai dengan pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut ini :



Tabel 6.3
Program Pembangunan Kabupaten Maros yang disertai Pagu Indikatif
Periode 2021 – 2026

URAIAN MISI/TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB	
	TOLOK UKUR	AWAL PERIOD E (TAHU N 0)	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF													SATUA N
			TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		AKHIR PERIODE (TAHUN 5)			
TARG ET	RP (000)	TARGE T	RP (000)	TARGE T	RP (000)	TARGE T	RP (000)	TARGE T	RP (000)	TARGE T	RP (000)					
1	MISI 1 : MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK															
1	1	TUJUAN 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang professional, bersinergi dan berkinerja tinggi.	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	CC	B	B	BB	BB	BB			Nulai Indeks		
1	1	SASARAN 1: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	BB	A	A	A			Nulai Indeks		
			Nilai LPPD													



1	1	1	1														
1	1	2		SASARAN 2: Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B (3,25)	B (3,25)	B (3,25)	B (3,25)	A (3,26)	A (3,26)	A (3,26)	A (3,26)	Nilai IKM			
1	1	2	1														
2 MISI 2 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA																	
2	1			TUJUAN 2: Menciptakan kualitas sumber daya manusia yang mengedepankan nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,86	70,38	70,91	71,44	71,97	72,51	73,05	Nilai IPM				
2	1	1	1	SASARAN 3: Meningkatnya kualitas Pendidikan dan kesehatan masyarakat	Indeks Pendidikan	61,99	62,58	63,17	63,78	64,39	65,00	65,63	Nilai Indeks				
					Indeks Kesehatan	0,75	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,75	Nilai Indeks			
2	1	1	1														
2	1	2		SASARAN 4: Meningkatnya kualitas hidup beragama dan penerapan nilai	Indeks Kerukunan Umat Beragama	0	0	Tinggi (61-80)	Tinggi (61-80)	Tinggi (61-80)	Tinggi (61-80)	Tinggi (61-80)	Nilai Indeks				



				budaya lokal														
2	1	2	1															
2	1	3	1	SASARAN 5: Meningkatnya kualitas hidup dan peran serta gender dan kepemudaan dalam pembangunan	Indeks Pembangu n Gender (IPG)	89,23	89,50		89,77		90,04		90,31		90,58		90,85	Nilai IPG
					Indeks Pembangu n Pemuda (IPP)	0,00	0,00		45,00		46,80		48,67		50,62		52,64	Nilai Indeks
2	1	3	1															
3 MISI 3 : MENINGKATKAN KETERJANGKAUAN KEBUTUHAN DASAR DAN PELAYANAN DASAR SECARA INKLUSIF																		
3	1			TUJUAN 3: Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan urusan wajib pelayanan dasar	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan SPM	B (3,25)	B (3,25)		B (3,25)		B (3,25)		A (3,26)		A (3,26)		A (3,26)	Nilai IKM
3	1	1	1	SASARAN 6: Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat	Rata-rata persentase capaian SPM	31,94	100		100		100		100		100		100	Persen



3	1	1	1														
MISI 4 : MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI DAERAH BERBASIS POTENSI LOKAL																	
4	1	Tujuan 4: Meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis keunggulan sumberdaya ekonomi daerah		Pertumbuhan Ekonomi	-10,87	-1,82		2,78		4,66		6,17		6,55		7,13	Persen
4	1	1	SASARAN 7: Meningkatnya investasi serta perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,31	6,07		5,72		5,39		5,09		4,79		4,52	Persen
4	1	1	1														
4	1	2	SASARAN 8: Meningkatnya inovasi dan produktivitas kegiatan ekonomi sektor unggulan daerah	PDRB Per Kapita	47,53	47,16		49,05		51,03		53,08		55,22		57,44	Rp/Jiwa



4	1	2	1														
MISI 5 : MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN PEMERATAAN WILAYAH																	
5	1	Tujuan 5: Meningkatkan dukungan infrastruktur ekonomi masyarakat perkotaan dan perdesaan		Rasio Gini	0,368	0,364		0,361		0,357		0,353		0,350		0,346	Nilai Indeks
5	1	1	SASARAN 9: Meningkatnya taraf hidup pelaku ekonomi kecil dan menengah serta masyarakat kurang mampu	Tingkat Kemiskinan	9,74	9,37		9,02		8,68		8,35		8,04		7,74	Persen
5	1	1	1														
5	1	2	SASARAN 10: Berkembangnya ekosistem ekonomi kreatif di perkotaan.	Kontribusi nilai produksi ekonomi kreatif terhadap PDRB	0,55	0,69		0,81		0,94		1,07		1,22		1,37	Persen
5	1	2	1														



6 MISI 6 : MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KETAHANAN BENCANA																	
6	1	Tujuan 6: Meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup		Indeks kualitas lingkungan hidup	59,76	59,76		59,60		59,43		59,26		59,10		59,60	Nilai Indeks
6	1	1	SASARAN 11: Meningkatnya kualitas layanan untuk kelestarian lingkungan hidup	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkungan Hidup	B (3,25)	B (3,25)		B (3,25)		B (3,25)		A (3,26)		A (3,26)		A (3,26)	Nilai IKM
6	1	1	1														
6	1	2	SASARAN 12: Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap bencana	Indeks risiko bencana	147,24	138,41		130,10		122,30		114,96		108,06		101,58	Nilai Indeks
6	1	2	1														

**BAB VII****KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Prinsip pengelolaan ini harus tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah yang dimulai dari dokumen perencanaan jangka menengah Daerah (RPJMD), yang kesemuanya itu terangkum kedalam kerangka pendanaan pembangunan Daerah.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah merupakan kapasitas kemampuan riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas kemampuan riil adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat.

Adapun kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2016 - 2021 tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2021 – 2026

KODE	KAPASITAS RIIL/ BELANJA	PROYEKSI (Rp)					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
KAPASITAS RIIL KEUANGAN							
1	BELANJA	1,475,187,141,284	1,518,424,597,751	1,567,610,463,632	1,624,590,038,200	1,690,334,728,944	1,765,965,564,143
1	1 BELANJA OPERASI	916,125,587,838	950,563,743,887	988,580,286,148	1,031,789,774,238	1,080,906,040,211	1,136,762,709,740
1	1 1 Belanja Pegawai	602,915,699,956	599,301,472,265	595,708,910,359	592,137,884,361	588,588,265,171	585,059,924,465
1	1 2 Belanja Barang dan Jasa	309,022,406,867	344,732,854,152	384,569,979,687	429,010,659,981	478,586,879,108	533,892,096,910
1	1 3 Belanja Hibah	4,187,481,015	5,529,417,470	7,301,396,101	9,641,229,897	12,730,895,933	16,810,688,365
1	1 4 Belanja Bantuan Sosial	-	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
1	2 BELANJA MODAL	389,168,764,246	379,162,311,291	369,413,148,000	359,914,658,846	350,660,398,401	341,644,086,964
1	2 1 Belanja Modal	389,168,764,246	379,162,311,291	369,413,148,000	359,914,658,846	350,660,398,401	341,644,086,964



1	3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000
1	3	1 Belanja Tidak Terduga	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000
1	4	BELANJA TRANSFER	167,392,789,200	186,198,542,573	207,117,029,484	230,385,605,116	256,268,290,332	285,058,767,438
1	4	1 Belanja Bantuan Keuangan	167,392,789,200	186,198,542,573	207,117,029,484	230,385,605,116	256,268,290,332	285,058,767,438

Berdasarkan tabel tersebut, maka pada periode RPJMD tahun 2021 - 2026 diasumsikan bahwa pengeluaran belanja daerah dari pengeluaran wajib dan mengikat yang cenderung meningkat dan tidak disertai dengan adanya peningkatan pendapatan daerah yang signifikan, sehingga kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang dialokasikan untuk pembangunan daerah selama periode RPJMD diprediksikan cenderung mengalami penurunan.

Program prioritas dirumuskan dalam rangka pencapaian visi Pembangunan Daerah, yaitu: “ Maros Sejahtera, Religius Dan Berdaya Saing ”. Program sebagaimana dimaksud harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian Visi dan Misi pembangunan Daerah periode 2021 – 2026.

Secara umum, terdapat dua kelompok besar dari perumusan program pembangunan Kabupaten Maros 2021 – 2026. Yang pertama, Program Prioritas, yakni program - program yang secara langsung berkaitan dengan pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Maros periode 2021 - 2026. Program prioritas tersebut secara spesifik beserta dengan indikator-indikator capaiannya. telah didetailkan dalam RPJMD ini, yaitu pada Bab sebelumnya (Bab VI).

Sedangkan kelompok program yang kedua adalah Program Perangkat Daerah, yakni program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Berikut ini akan diuraikan program - program Perangkat Daerah dalam tabel sebagai berikut:



Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas (Pembangunan) Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan

URAIAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM PRIORITAS PERANGKAT DAERAH			INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KERANGKA PENDANAAN												PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB		
			TOLOK UKUR	TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF												SATUAN	
				AWAL PERIODE (TAHUN 0)	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025				AKHIR PERIODE (TAHUN 5)
TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)	TARGET	RP (000)				
0	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota														Seluruh OPD	
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																
1	1	Program Pengelolaan Pendidikan														Pendidikan	
1	2	Program Pengembangan Kurikulum															
1	3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan															
1	4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan															
1	5	Program															



		Pengembangan Bahasa Dan Sastra															
1	6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat															Kesehatan
1	7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan															
1	8	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman															
1	9	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan															
1	10	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)															Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1	11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum															
1	12	Program															



		Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional																	
1	13	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah																	
1	14	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase																	
1	15	Program Pengembangan Permukiman																	
1	16	Program Penataan Bangunan Gedung																	
1	17	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya																	
1	18	Program Penyelenggaraan Jalan																	
1	19	Program Pengembangan Jasa Konstruksi																	
1	20	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang																	



1	21	Program Pengembangan Perumahan																	
1	22	Program Kawasan Permukiman																	
1	23	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh																	
1	24	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)																	Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1	25	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman																	
1	26	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum																	Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1	27	Program Penanggulangan Bencana																	



1	28	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran																	
1	29	Program Pemberdayaan Sosial																	Sosial
1	30	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan																	
1	31	Program Rehabilitasi Sosial																	
1	32	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial																	
1	33	Program Penanganan Bencana																	
1	34	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan																	
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																		
2	1	Program Perencanaan Tenaga Kerja																	Tenaga Kerja



2	2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja																
2	3	Program Penempatan Tenaga Kerja																
2	4	Program Hubungan Industrial																
2	5	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan																
2	6	Program Perlindungan Perempuan																
2	7	Program Peningkatan Kualitas Keluarga																
2	8	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak																
2	9	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)																
2	10	Program Perlindungan Khusus Anak																
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak																		



2	11	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan																	
2	12	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat																	Pangan
2	13	Program Penanganan Kerawanan Pangan																	
2	14	Program Pengawasan Keamanan Pangan																	
2	15	Program Pengelolaan Izin Lokasi																	
2	16	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan																	Pertanahan
2	17	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan																	



2	18	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee																
2	19	Program Penetapan Tanah Ulayat																
2	20	Program Pengelolaan Tanah Kosong																
2	21	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah																
2	22	Program Penatagunaan Tanah																
2	23	Program Pengurusan Hak - Hak Atas Tanah																
2	24	Program Survei, Pengukuran Dan Pemetaan																
2	25	Program Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Dan Kelembagaan Pertanahan																



2	26	Program Pengaturan Pertanahan Di Wilayah Pesisir, Laut Dan Pulau																
2	27	Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan																
2	28	Program Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan																
2	29	Program Perencanaan Lingkungan Hidup																Lingkungan Hidup
2	30	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup																
2	31	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)																
2	32	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan																



		Beracun (Limbah B3)																	
2	33	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)																	
2	34	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh																	
2	35	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat																	
2	36	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat																	
2	37	Program Penanganan																	



		Pengaduan Lingkungan Hidup																
2	38	Program Pengelolaan Persampahan																
2	39	Program Pendaftaran Penduduk																
2	40	Program Pencatatan Sipil																Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2	41	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan																
2	42	Program Pengelolaan Profil Kependudukan																
2	43	Program Penataan Desa																
2	44	Program Peningkatan Kerjasama Desa																Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2	45	Program Administrasi Pemerintahan Desa																
2	46	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,																



		Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat																	
2	47	Program Pengendalian Penduduk																	
2	48	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)																	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2	49	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)																	
2	50	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)																	
2	51	Program Pengelolaan Pelayaran																	Perhubungan
2	52	Program Pengelolaan Penerbangan																	
2	53	Program Pengelolaan Perkeretaapian																	
2	54	Program Pengelolaan Informasi Dan																	Komunikasi Dan Informatika



		Komunikasi Publik																
2	55	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika																
2	56	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam																
2	57	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi																
2	58	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi																
2	59	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian																
2	60	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi																
2	61	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)																
2	62	Program Pengembangan Umkm																

Koperasi,
Usaha Kecil,
Dan
Menengah



2	63	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal																	
2	64	Program Promosi Penanaman Modal																	
2	65	Program Pelayanan Penanaman Modal																	
2	66	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal																	Penanaman Modal
2	67	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal																	
2	68	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan																	
2	69	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan																	Kepemudaan Dan Olahraga
2	70	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan																	
2	71	Program																	Statistik



		Penyelenggaraan Statistik Sektoral																
2	72	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi																Persandian
2	73	Program Pengembangan Kebudayaan																Kebudayaan
2	74	Program Pengembangan Kesenian Tradisional																
2	75	Program Pembinaan Sejarah																
2	76	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya																
2	77	Program Pengelolaan Permuseuman																
2	78	Program Pembinaan Perpustakaan																Perpustakaan
2	79	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno																
2	80	Program Pengelolaan Arsip																Kearsipan
2	81	Program Perlindungan Dan																



		Penyelamatan Arsip															
2	82	Program Perizinan Penggunaan Arsip															
3	Urusan Pemerintahan Pilihan																
3	1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap															Kelautan Dan Perikanan
3	2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya															
3	3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan															
3	4	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan															
3	5	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata															Pariwisata
3	6	Program Pemasaran Pariwisata															
3	7	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan															



		Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual																
3	8	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif																
3	9	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian																Pertanian
3	10	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian																
3	11	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner																
3	12	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian																
3	13	Program Perizinan Usaha Pertanian																
3	14	Program Penyuluhan																



		Pertanian																	
3	15	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan																	
3	16	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan																	
3	17	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting																	
3	18	Program Pengembangan Ekspor																	
3	19	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen																	
3	20	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri																	
3	21	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri																	
3	22	Program Pengendalian Izin Usaha Industri																	
																			Perdagangan
																			perindustrian



3	23	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional																
3	24	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi																Transmigrasi
3	25	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi																
3	26	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi																
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																	
4	1	Program Administrasi Umum																Sekretariat Daerah
4	2	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat																
4	3	Program Perekonomian Dan Pembangunan																
4	4	Program Administrasi Umum Sekretariat Dprd Kabupaten/Kota																Sekretariat Dprd



4	5	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd															
5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																	
5	1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah															Perencanaan
5	2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah															
5	3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah															
5	4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah															Keuangan
5	5	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah															
5	6	Program Kepegawaian Daerah															Kepegawaian
5	7	Program Pengembangan Sumber Daya															Pendidikan Dan Pelatihan



		Manusia																
5	8	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah																Penelitian Dan Pengembangan
6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan																		
6	1	Program Penyelenggaraan Pengawasan																Inspektorat Daerah
6	2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi																
7 Unsur Kewilayahan																		
7	1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik																Kecamatan
7	2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan																
7	3	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum																
7	4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum																



7	5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa																	
8	Unsur Pemerintahan Umum																		
8	1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan																	
8	2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik																	
8	3	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan																	
8	4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya																	
8	5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan																	
																		Kesatuan Bangsa Dan Politik	



	Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial															
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan visi dan misi bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcomes program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcomes) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator utama Bupati tersebut, merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang bersifat outcomes yang dilaksanakan OPD. Selanjutnya indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan OPD merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (output) yang dilaksanakan OPD.

Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah, yang diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan. Indikator kinerja tersebut, antara lain berupa indikator kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indeks pembangunan daerah, daya saing daerah dan daya tarik investasi. Secara komulatif hasil akhir tujuan otonomi daerah menggunakan ukuran peningkatan kualitas manusia yang digambarkan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Perumusan indikator kinerja utama Bupati yang menggambarkan tingkat keberhasilan kinerja daerah diukur dengan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator kinerja lainnya yang digunakan Pemerintah yang diintegrasikan dalam rumusan makro yang terukur dan kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada publik. Rumusan indikator kinerja utama Bupati disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja program OPD disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama Bupati dan pelayanan yang harus dilaksanakan OPD.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021 - 2026 yang telah direncanakan, dimana tahun 2020 merupakan tahun dasar, dan tahun 2021 merupakan tahun pertama RPJMD dan tahun



2026 merupakan tahun ke lima RPJMD. Indikator-indikator kinerja tersebut dituangkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Maros
Periode 2021 – 2026

NO	INDIKATOR KINERJA								
	TOLOK UKUR	KONDIS I AWAL	TARGET KINERJA					KOND ISI AKHIR	SATU AN
			2020	2021	2022	2023	2024		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	CC	B	B	BB	BB	Nilai Indeks
1	1 Nilai SAKIP	B	B	BB	BB	BB	A	A	Point
1	2 Nilai LPPD								Point
1	3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	Nilai IKM
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,86	70,38	70,91	71,44	71,97	72,51	73,05	Nilai IPM
2	1 Indeks Pendidikan	65,54	66,08	66,61	67,16	67,70	68,26	65,54	Nilai Indeks
2	2 Indeks Kesehatan	0,75	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,75	Nilai Indeks
2	3 Indeks Kerukunan Umat Beragama	0	0	61-80	61-80	61-80	61-80	61-80	Nilai Indeks
2	4 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,23	89,50	89,77	90,04	90,31	90,58	90,85	Nilai Indeks
2	5 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	0,00	0,00	45,00	46,80	48,67	50,62	52,64	Nilai Indeks
3	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan SPM	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	Nilai IKM
3	1 Rata-rata persentase capaian SPM	31,94	100	100	100	100	100	100	Persen
4	Pertumbuhan Ekonomi	-10,87	-1,82	2,78	4,66	6,17	6,55	7,13	Perse n
4	1 Tingkat Pengangguran Terbuka	6,31	6,07	5,72	5,39	5,09	4,79	4,52	Persen
4	2 PDRB Per Kapita	47,53	47,16	49,05	51,03	53,08	55,22	57,44	Nilai
5	Rasio Gini	0,368	0,364	0,361	0,357	0,353	0,350	0,346	Nilai Indeks
5	1 Tingkat Kemiskinan	9,74	9,37	9,02	8,68	8,35	8,04	7,74	Persen
5	2 Kontribusi nilai produksi ekonomi kreatif terhadap PDRB	0,55	0,69	0,81	0,94	1,07	1,22	1,37	Persen
6	Indeks kualitas lingkungan hidup	59,76	59,76	59,60	59,43	59,26	59,10	59,60	Nilai Indeks



6	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Lingkungan Hidup	B (3,25)	B (3,25)	B (3,25)	B (3,25)	A (3,26)	A (3,26)	A (3,26)	Nilai IKM
6	2	Indeks risiko bencana	147,24	138,41	130,10	122,30	114,96	108,06	101,58	Nilai Indeks

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Periode 2021 -2026

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA DAERAH							KONDISI AKHIR
		KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					KONDISI AKHIR	
			2021	2022	2023	2024	2025		
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Pertumbuhan PDRB	8,58	9,50	6,81	7,50	7,58	7,66	7,66	
2	Laju Inflasi	5,18	3,18	3,14	3,47	3,03	3,00	3,00	
3	PDRB Per Kapita	45,99	52,12	56,16	65,85	77,38	91,12	91,12	
4	Indeks Gini	0,37	0,39	0,40	0,30	0,29	0,29	0,29	
5	Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Ideks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
7	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	88,15	88,59	88,90	89,21	89,50	89,79	89,79	
8	Rasio Kesenjangan Kemiskinan	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09	
9	Proporsi Penduduk Dengan Pendapatan Kurang Dari USD 1,00 (PPP) Per Kapita Per Hari	11,82	11,38	11,11	10,84	10,57	10,32	10,32	
10	Indeks Pembangunan Manusia	67,31	67,76	68,43	69,11	69,80	70,49	70,49	
11	Angka Melek Huruf	87,89	90,01	88,78	99,20	100,00	100,00	100,00	
12	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	12,67	12,96	13,10	13,23	13,37	13,51	13,51	
13	Angka Usia Harapan Hidup	68,55	68,58	68,60	68,62	68,64	68,66	68,66	
14	Prevalensi Balita Gizi Buruk	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
15	Prevelnsi Balita Gizi Kurang	0,63	0,83	0,80	0,76	0,73	0,71	0,71	
16	Cakupan Desa Siaga Aktif	73,79	79,61	90,29	91,26	93,20	95,15	95,15	



17	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	65,19	66,19	57,93	57,43	56,98	56,1 2	56,12
18	Tingkat Aprtisipasi Angkatan Kerja	70,28	71,43	62,60	64,33	66,17	68,1 2	68,12
19	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,99	6,73	6,85	6,19	6,09	5,79	5,79
20	Rasio Penduduk Bekerja	93,01	93,27	93,15	93,54	93,91	94,2 1	94,21
21	Laju Pertumbuhan PDB Per Tenaga Kerja	69,98	74,39	89,53	95,82	102,60	110, 81	110,81
22	Rasio Kesempatan Kerja Terhadap penduduk Usia 15 Tahun Ke atas	93,01	93,27	93,15	93,54	93,91	94,2 1	94,21
23	Proporsi Tenaga Kerja Yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebeas Keluarga Terhadap Total Kesempatan kerja	39,01	38,15	43,47	43,53	43,59	44,0 3	44,03
24	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	81,95	66,79	51,80	36,99	28,32	21,6 7	21,67
25	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
26	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	12,42	12,82	15,00	16,41	17,94	19,6 2	19,62
27	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
29	Penguatan Cadangan Pangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100, 00	100,00
30	Penanganan Daerah Rawan Pangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100, 00	100,00
31	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB	0,28	0,28	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28
32	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
33	Produksi Sektor Pertanian	0,00	10.431. 218,34	11.053. 649,89	11.704.3 18,13	12.464. 950,59	13.2 42.8 23,7 6	13.242.82 3,76
34	Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras Terhadap PDRB	0,11	0,10	0,09	0,10	0,11	0,12	0,12
35	Porduksi Sektor Perkebunan	2.884,4 0	3.011,1 0	3.131,5 4	3.256,81	3.387,0 8	3.52 2,56	3.522,56
36	Kontibusi Produksi Kelompok Tani Terhadap PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100, 00	100,00
37	Kontiribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB	0,11	0,11	0,09	0,08	0,07	0,07	0,07



38	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB	6,33	6,05	6,21	6,16	6,11	6,06	6,01
39	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	0,32	0,30	0,32	0,33	0,35	0,37	0,37
40	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	41,44	41,15	42,00	42,56	43,06	43,50	43,50
41	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	2,79	2,57	2,66	2,70	2,73	2,75	2,75
42	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	19,73	18,16	18,36	18,44	18,50	18,54	18,54
43	Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri							
44	Pertumbuhan Industri	-674,09	31,68	-4,55	2,06	2,06	2,06	2,06
45	Kontribusi Transmigrasi Terhadap PDRB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	11,16	11,81	11,38	12,27	13,23	14,27	14,27
2	Nilai Tukar Petani							
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	53,06	55,62	51,74	52,21	52,69	53,17	53,17
4	Produktivitas Total Daerah	69,98	74,39	89,53	95,82	102,60	110,81	110,81
5	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
6	Rasio Ekspor + Impor Terhadap PDB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	20,57	19,58	17,96	15,22	12,90	11,04	11,04
7	Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di Bank Umum	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08
8	Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di BPR							
9	Angka Kriminalitas Yang tertangani	19,42	18,75	17,00	16,00	15,05	14,18	14,18
10	Rasio Ketergantungan	52,88	52,42	52,03	51,72	51,48	51,25	51,25
ASPEK PELAYANAN UMUM								
I LAYANAN URUSAN WAJIB								
I.A URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR								
1 PENDIDIKAN								
1.1	Angka partisipasi kasar	125,16	119,46	112,60	116,97	121,49	126,12	126,12
1.2	Angka pendidikan yang ditamatkan							
1.3	Angka Partisipasi Murni	99,87	84,07	85,99	85,94	86,76	87,8	87,90



							0	
1.4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100	93,16	97,34	99,74	99,95	100	100
1.5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	99,56	74,97	74,63	72,13	73,57	75,04	74,05
1.6	Angka partisipasi sekolah	94,78	97,83	97,56	98,08	98,55	98,89	98,89
1.7	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	100	99,29	99,68	99,74	100	100	100
1.8	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	89,55	96,37	95,44	96,42	97,09	97,77	97,77
1.9	Angka Putus Sekolah	0,30	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,32	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,27	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Angka Kelulusan	98,87	99,38	99,93	99,30	99,64	99,82	99,82
1.13	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	98,48	99,64	99,94	98,74	99,40	99,69	99,69
1.14	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,26	99,11	99,92	99,86	99,89	99,94	99,94
1.15	Angka Melanjutkan (AM)							
1.16	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs							
1.17	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA							
1.18	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	99,27	98,73	99,31	99,65	100,00	100,00	100,00
1.19	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	98,84	69,18	98,29	99,15	100,00	100,00	100,00
1.20	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	75,91	76,10	75,07	75,61	75,38	75,17	76,35
1.21	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	680,61	648,87	644,30	622,64	638,74	656,30	656,30
1.22	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	69,16	66,57	66,58	64,17	66,07	68,14	65,87
1.24	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar							
1.25	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan Laki - Laki	94,42	95,55	96,86	97,13	97,48	97,79	97,79
1.26	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf	87,89	90,01	88,78	99,20	100,00	100,00	100,00



	(tidak buta aksara)							
1.2 7	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	50,25	22,61	46,08	52,88	53,38	53,89	53,89
2	KESEHATAN							
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	9,23	8,32	7,09	5,42	5,31	5,17	5,17
2.2	Angka kelangsungan hidup bayi	990,77	991,68	992,91	994,58	994,69	994,83	994,83
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	9,59	8,85	7,45	5,70	5,59	5,45	5,45
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	7,99	6,02	5,85	4,45	4,33	4,19	4,19
2.5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	88,78	88,50	106,42	69,52	55,62	41,71	41,71
2.6	Rasio posyandu per satuan balita	8,04	7,95	7,95	9,56	9,66	9,71	9,71
2.7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,12	0,12	0,12	0,11	0,16	0,19	0,19
2.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2.9	Rasio dokter per satuan penduduk	0,32	0,28	0,25	0,25	0,42	0,56	0,56
2.1 0	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	1,60	1,56	1,65	1,86	2,27	2,95	2,95
2.1 1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	51,29	53,82	65,80	62,91	73,25	83,35	83,35
2.1 2	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90,48	93,86	93,07	79,94	85,70	91,03	91,03
2.1 3	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	0,00	82,52	79,61	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1 4	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.1 5	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 6	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	117,52	113,96	91,10	95,00	95,00	95,00	95,00
2.1 7	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
2.1 8	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	0,00	4,77	7,31	7,69	8,97	11,11	11,11
2.1	Cakupan penemuan dan	17,98	20,03	20,12	20,68	30,89	32,90	32,90



9	penanganan penderita penyakit TBC BTA						0	
2.2 0	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	123,78	103,82	127,03	295,29	278,66	258,57	258,57
2.2 1	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0,00	6,42	5,20	4,29	2,83	1,40	1,40
2.2 2	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	90,78	82,14	53,15	72,20	100,00	100,00	100,00
2.2 3	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	90,78	82,14	53,15	72,20	100,00	100,00	100,00
2.2 4	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.2 5	Penderita diare yang ditangani	94,84	31,58	32,90	31,76	31,81	31,89	31,89
2.2 6	Angka kejadian Malaria	12,08	20,12	55,72	43,74	0,48	50,53	50,53
2.2 7	Tingkat kematian akibat malaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 8	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 9	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 0	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
2.3 1	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 2	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	0,00	0,00	1,58	85,00	85,00	85,00	85,00
2.3 3	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin							
2.3 4	Cakupan kunjungan bayi	96,54	96,93	90,15	76,64	82,36	87,85	87,85
2.3 5	Cakupan puskesmas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.3	Cakupan pembantu	25,24	25,24	25,24	25,24	25,24	25,2	25,24



6	puskesmas						4	
2.3 7	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	92,09	85,64	91,02	78,06	83,57	88,65	88,65
2.3 8	Cakupan pelayanan nifas	95,22	93,83	91,82	78,69	84,45	89,77	89,77
2.3 9	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	47,40	46,39	65,32	80,17	80,15	80,15	80,15
2.4 0	Cakupan pelayanan anak balita	52,79	52,02	65,95	100,00	100,00	100,00	100,00
2.4 1	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	0,00	88,49	86,95	86,90	86,95	86,92	86,92
2.4 2	Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat	10,41	13,84	15,27	15,98	16,04	16,10	16,10
2.4 3	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2.4 4	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2.4 5	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (termasuk jalan propinsi dan nasional)	0,50	0,52	0,66	0,68	0,70	0,73	0,73
3.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,004	0,004	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
3.3	Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	45,74	47,23	61,87	64,39	66,83	69,45	69,45
3.5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	1,23	1,23	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
3.6	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Persentase rumah tinggal	65,11	67,13	69,08	70,96	73,10	75,1	75,18



	bersanitasi						8	
3.8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar							
3.9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat							
3.10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun							
3.11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	n/a	n/a	n/a	n/a	9,89	18,16	18,16
3.12	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	0,00	27,86	37,57	47,64	61,46	70,53	70,53
3.13	Rasio Jaringan Irigasi	0,00	0,27	0,34	0,39	0,45	0,51	0,51
3.14	Persentase penduduk berakses air minum	58,49	60,55	62,58	64,57	66,56	68,55	68,55
3.15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	58,49	60,55	62,58	64,57	66,56	68,55	68,55
3.16	Persentase areal kawasan kumuh	0,35	0,15	0,09	0,05	0,02	0,00	0,00
3.17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	0,20	0,22	0,25	0,27	0,28	0,27	0,27
3.18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
3.19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	2,10	2,01	1,84	1,73	1,71	1,69	1,69
3.20	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	8,15	19,37	0,71	0,74	0,82	0,90	0,90
3.21	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	1,00	1,17	1,34	1,67	2,01	2,17	2,17
3.22	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
3.23	Ruang publik yang berubah peruntukannya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a



	terhadap luas daratan							
3.2 5	Ketaatan terhadap RTRW	0,71	1,11	1,45	1,74	2,17	2,83	2,83
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
4.1	Rasio rumah layak huni	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
4.2	Rasio permukiman layak huni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4.3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	64,29	55,59	55,75	54,93	54,44	53,93	53,93
4.4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	0,31	1,57	3,35	4,01	5,50	6,95	6,95
4.5	Persentase pemukiman yang tertata	99,83	99,83	99,96	100,00	100,00	100,00	100,00
4.6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,0035	0,0035	0,0009	0,0000	0,0000	0,0000	0,00
4.7	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	0,00	56,79	82,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.9	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	91,87	92,33	95,48	99,00	100,00	100,00	100,00
5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	2,66	4,01	3,15	3,27	3,09	2,78	2,78
5.5	Persentase Penegakan PERDA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	SOSIAL							
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	0,00	0,00	13,04	18,52	33,33	47,37	47,37
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	0,00	6,00	15,00	14,81	29,41	40,00	40,00
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk	0,00	0,00	11,54	13,04	23,81	33,33	33,33



	pemenuhan kebutuhan dasar							
6.4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	0,00	0,00	3,85	13,64	22,22	25,00	25,00
6.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	85,71	85,71	85,71	57,14	71,43	71,43	71,43
6.6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33
6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	52,05	31,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	0,00	0,00	20,00	0,00	100,00	100,00	100,00
6.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	80,00	100,00	75,00	77,78	88,89	100,00	100,00
I.B	URUSAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR							
1	TENAGA KERJA							
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	27,91	31,67	21,74	38,91	55,56	78,13	78,13
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	16,31	4,55	7,45	9,63	13,33	25,00	25,00
1.4	Keselamatan dan perlindungan	5,12	10,41	15,22	15,56	19,26	22,86	22,86
1.5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	0,00	66,12	70,07	87,98	100,00	100,00	100,00
1.6	Perselisihan buruh dan	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00



	pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah						00	
1.7	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	16,28	20,36	26,09	58,37	72,22	84,38	84,38
1.8	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan							
1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	0,00	0,00	50,00	40,00	45,00	57,14	57,14
1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	0,00	0,00	20,00	46,67	80,00	85,71	85,71
1.11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	0,00	0,00	30,00	30,00	60,00	90,00	100,00
1.12	Rasio lulusan S1/S2/S3	45,97	46,67	49,15	50,13	51,15	52,23	52,23
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	8,08	7,53	16,85	17,24	17,65	18,06	18,06
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	20,00	20,00	20,00	20,00	28,57	28,57	28,57
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	91,92	92,47	83,15	82,76	82,35	81,94	81,94
2.4	Rasio KDRT	0,04	0,04	0,06	0,04	0,03	0,02	0,02
2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	47,85	40,41	37,54	40,01	42,78	45,75	45,75
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



	bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.							
2.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasuskasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	0,00	59,38	70,00	80,00	85,00	90,00	90,00
2.13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	0,00	62,50	70,00	80,00	85,00	90,00	90,00
2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	97,47	86,77	94,61	95,46	96,32	97,19	97,19
2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	104,74	109,41	98,18	95,50	92,90	90,65	90,65
2.16	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2.17	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2.18	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	92,41	93,23	99,66	100,00	100,00	100,00	100,00
2.19	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian	0,00	0,00	27,62	27,62	27,62	27,62	27,62
3	PANGAN							
3.1	Ketersediaan pangan utama	68.660,03	70.178,49	68.315,51	68.995,36	69.717,79	70.498,44	70.498,44
3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita	4.234,65	7.127,06	6.937,65	7.006,96	7.080,36	7.159,68	7.159,68
3.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	PERTANAHAN							
4.1	Persentase luas lahan	2,17	2,51	21,00	22,05	23,10	24,1	24,15



	bersertifikat						5	
4.2	Penyelesaian kasus tanah Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Penyelesaian izin lokasi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	LINGKUNGAN HIDUP							
5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada
5.2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada	Ada	Ada
5.3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5.4	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	0,00	5,64	7,51	7,03	6,50	5,00	5,00
5.5	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	105,56	78,33	92,78	93,89	92,78	91,67	91,67
5.6	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	16,03	16,20	16,32	16,33	16,34	16,36	16,36
5.7	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	60,00	37,04	71,11	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5.9	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.10	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.11	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.12	Penetapan hak MHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.13	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Terfasilitasi penyediaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4	sarana/prasarana							
5.1	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00
5.1	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5.1	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.1	Timbulan sampah yang ditangani	14,98	25,00	30,00	35,00	55,00	65,00	65,00
5.1	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	2,62	2,87	3,27	4,61	6,51	9,17	9,17
5.2	Persentase cakupan area pelayanan	1,85	25,02	30,02	42,03	50,00	65,00	65,00
5.2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	15,00	25,00	30,00	42,00	50,00	60,00	60,00
5.2	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	73,81	78,71	89,79	89,79	89,79	89,79	89,79
5.2	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundangundangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
6.1	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	0,00	0,00	0,88	0,97	1,00	1,00	1,00
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	0,89	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99	0,99
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	0,00	0,00	0,17	0,19	0,27	0,29	0,29
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	0,00	0,00	88,95	97,99	100,00	100,00	100,00
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	88,56	95,45	97,95	98,19	98,93	99,73	99,73
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
7.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran	81,25	82,50	82,50	83,75	85,00	86,25	86,25



	pemerintahan desa yang baik							
7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
7.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58
7.4	Persentase LSM aktif	50,00	69,23	71,43	75,00	100,00	100,00	100,00
7.5	Persentase LPM Berprestasi	11,65	13,59	14,56	15,53	16,50	17,48	17,48
7.6	Persentase PKK aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.7	Persentase Posyandu aktif	70,89	74,94	78,20	81,14	91,91	95,12	95,12
7.8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
7.9	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,23	1,20	1,18	1,15	1,13	1,10	1,10
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	2,39	2,37	2,35	2,33	2,32	2,31	2,31
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	0,00	0,00	9,09	15,91	22,73	27,27	27,27
8.4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	11,36	31,82	52,27	72,73	93,18	100,00	100,00
8.5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00
8.6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00



	pelaksanaan program pembangunan							
8.7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,63	1,62	1,62	1,59	1,57	1,55	1,55
8.9	Ratio Akseptor KB	56,43	56,95	57,47	57,93	58,39	58,86	58,86
8.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	60,26	62,63	62,23	63,22	64,23	65,26	65,26
8.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	90,02	95,10	131,09	108,25	89,41	74,09	74,09
8.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	51,26	52,31	53,36	42,56	33,94	27,07	27,07
8.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	28,68	27,24	25,81	24,70	23,64	22,63	22,63
8.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	9,31	10,54	11,75	13,25	14,94	16,85	16,85
8.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	72,41	72,02	71,64	71,29	70,94	70,59	70,59
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	13,59	13,76	13,86	13,90	14,06	14,22	14,22
8.17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	5,50	7,24	8,93	11,40	14,55	18,56	18,56
8.18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	4,32	4,49	4,67	4,86	5,05	5,25	5,25
8.19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	14,29	21,43	21,43	50,00	78,57	100,00	100,00
8.20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.150,00	1.185,71	1.221,43	1.221,43



8.2 1	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.2 2	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	19,18	22,13	24,68	26,84	27,29	27,57	27,57
8.2 3	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	#DIV/0!	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.2 4	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	96,47	198,71	170,09	156,05	143,17	131,34	131,34
8.2 5	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.2 6	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.2 7	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2 8	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga							
8.2 9	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	1,06	1,20	1,35	1,51	1,69	1,89	1,89
8.3 0	Rata-rata usia kawin pertama wanita	25,17	25,45	25,84	26,33	26,92	27,61	27,61
8.3 1	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!



	Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes							
9	PERHUBUNGAN							
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	11.602.159	12.702.191	12.284.224	12.664.472	13.056.492	13.460.646	11.602.159
9.2	Rasio ijin trayek	0,0017	0,0014	0,0009	0,0006	0,0005	0,0003	0,00
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	1.108,00	963,00	705,00	668,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9.5	Persentase layanan angkutan darat	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
9.6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	20,30	18,42	14,86	1,33	8,19	7,46	7,46
9.7	Pemasangan Rambu - rambu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9.8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,03	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
9.9	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	14.302.159,00	16.202.191,00	17.134.224,00	19.168.348,00	21.778.223,20	25.156.342,7	25.156.534,27
9.10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun	11.602.159	12.702.191	12.284.224	12.664.472	13.056.492	13.460.646	11.602.159
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	0,00	0,00	4,98	6,71	12,74	29,71	29,71
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	55,65	56,31	56,78	57,23	57,64	58,05	58,05
10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0,00	0,00	0,27	0,27	0,32	0,37	0,37
10.5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	0,74	0,77	0,77	0,78	0,78	0,78	0,78
11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
11.1	Persentase koperasi aktif	67,14	74,34	74,86	75,50	77,08	78,57	78,57
11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



RANCANGAN AWAL RPJMD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021-2026

11.3	Persentase BPR/LKM aktif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	99,49	93,26	96,54	146,13	96,67	96,75	96,75
12	PENANAMAN MODAL							
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	237,00	298,00	330,00	420,00	481,00	542,00	542,00
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	0,00	0,00	195.20 2.073.715	281.957. 143.832	368.71 2.213.949	#### #### ##	455.467.2 84.066
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	0,00	6,26	6,47	6,66	7,36	8,00	8,00
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	0,00	0,00	54,26	65,69	77,13	88,56	88,56
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13.2	Persentase wirausaha muda	8,55	9,12	9,41	8,58	8,58	8,58	8,58
13.3	Cakupan pembinaan olahraga	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13.5	Cakupan pembinaan atlet muda	0,00	0,00	3,54	7,08	10,61	10,61	10,61
13.6	Jumlah atlet berprestasi	18,00	28,00	30,00	116,00	31,00	32,00	32,00
13.7	Jumlah prestasi olahraga	18,52	22,22	14,81	77,78	29,63	29,63	29,63
14	STATISTIK							
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	tidak	tidak	tidak	tidak	ada	ada	ada
14.2	Buku "kabupaten dalam angka"	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
14.3	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
15	PERSANDIAN							
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
16	KEBUDAYAAN							
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4,00	4,00	2,00	3,00	3,00	4,00	4,00
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	20,50	20,50	20,50	22,38	21,20	22,40	22,40
16.	Jumlah karya budaya yang	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	4,00	4,00



3	direvitalisasi dan inventarisasi							
16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	63,00	63,00	63,00	63,00	73,00	83,00	83,00
16	PERPUSTAKAAN							
16.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0,07	0,08	0,08	0,09	0,10	0,11	0,11
16.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,30	0,38	0,38	0,73	0,83	0,88	0,88
16.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1,10	1,09	1,08	1,07	1,06	1,05	1,05
16.4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	0,09	0,12	0,11	0,12	0,14	0,15	0,15
16.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	911,00	5.911,00	10.911,00	15.911,00	20.911,00	25.911,00	25.911,00
16.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	KEARSIPAN							
17.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	97,73	97,73	93,18	100,00	100,00	100,00	100,00
17.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	3,00	3,00	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00
II	LAYANAN URUSAN PILIHAN							
1	PARIWISATA							
1.1	Kunjungan wisata	104,11	120,60	113,92	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2	Lama kunjungan Wisata	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	3,00	3,00
1.3	PAD sektor pariwisata	4,95	4,79	4,12	3,59	3,11	2,69	2,69
2	PERTANIAN							
2.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	0,28	0,28	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28
2.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2.3	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	0,11	0,10	0,09	0,10	0,11	0,12	0,12
2.4	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	57,16	51,80	58,73	58,73	58,73	58,73	57,16
2.6	Cakupan bina kelompok petani	38,43	96,53	15,30	21,71	78,29	79,89	79,89
3	PERDAGANGAN							



3.1	Ekspor Bersih Perdagangan	63.258.657.128	63.557.221.000	64.125.230.000	6.464.912.420.000	65.231.980.000	66.450.921.000	66.450.921.000
3.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	0,00	0,00	73,67	85,94	86,71	86,71	86,71
4	PERINDUSTRIAN							
4.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	#DIV/0!	50,00	42,86	50,00	75,00	100,00	100,00
5	TRANSMIGRASI							
5.1	Persentase transmigran swakarsa	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	33,33	33,33
6	KELAUTAN DAN PERIKANAN							
6.1	Produksi perikanan	108,64	99,29	102,21	100,00	100,00	100,00	100,00
6.2	Konsumsi ikan	100,00	99,85	99,78	100,00	100,00	100,00	100,00
6.3	Cakupan bina kelompok nelayan	8,93	4,30	11,65	9,06	10,14	11,08	11,08
6.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	53,34	54,35	52,45	53,02	52,72	52,32	52,32
6.5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	76,92	76,92	76,92	76,92	76,92	76,92	76,92
6.6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
6.7	Nilai tukar nelayan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a



BAB IX

PENUTUP

10. 1. Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros Tahun 2021-2026, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan Kabupaten Maros. Pada tahun 2025 yang akan datang merupakan tahun transisi pemerintahan Bupati H.A.S.Chaidir Syam, S.I.P,M.H dan Hj. Suhartina Bohari, SE, karena masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati hanya sampai tahun 2024. Terkait dengan hal tersebut diperlukan pedoman transisi guna menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pada tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun 2027 (masa transisi) atau setelah RPJMD Periode tahun 2021-2026 berakhir, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maros Tahun 2026-2046 yang akan disusun pada tahun 2025. RKPD masa transisi tersebut tetap merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD periode berikutnya.

10.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran tahun keempat RPJPD Kabupaten Maros tahun 2005-2025 atau periode terakhir. Sebagai upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, serta melaksanakan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Maros tahun 2021-2026, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bupati Maros berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah Tentang RPJMD kepada masyarakat;
2. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Maros;
3. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Maros dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Maros;



4. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Prioritas, sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026;
5. Dalam rangka perencanaan tahunan, RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026 ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maros selama periode berlakunya RPJMD. RKPD disusun setiap tahun dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rencana anggaran daerah, mulai dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga kepada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Penetapan APBD setiap tahun anggaran;
6. Apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan dokumen RPJMD, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dapat melakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Maros sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemerintahan Kabupaten Maros bersama masyarakat, harus memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD, guna menjamin pencapaian kinerja pembangunan daerah secara optimal dan menjamin agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat di Maros.
8. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Maros dan pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Maros tahun 2021-2026;
9. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap implementasi RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021-2026;

BUPATI MAROS,

H.A.S. CHAIDIR SYAM, S.I.P., M.H